

PEMERINTAH
KABUPATEN TANA TIDUNG



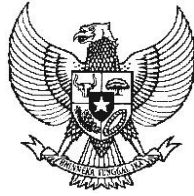
PERATURAN DAERAH TENTANG

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



Website
www.tanatidungkab.go.id





BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2026
T E N T A N G

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Minerja Instansi Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemrintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG

Dan

BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas
- d. laporan operasional
- e. Laporan Perubahan Ekuitas
- f. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 2

Dalam pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.078.782.452.324,05
b. Belanja	<u>Rp. 1.166.511.172.955,70</u>
Defisit	(Rp. 87.728.720.631,65)
c. Pembiayaan	Rp. 436.022.138.025,90
- Penerimaan	Rp. 0,00
- Pengeluaran	Rp. -
- Penyertaan Modal	Rp. -
- Pembayaran Pokok Utang	Rp. -
- Koreksi Silpa	Rp. -
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp. 348.293.417.394,25

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp.51.569.994.871,05) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.027.212.457.453,00
 - b. Realisasi Pendapatan Rp. 1.078.782.452.324,05
 - Selisih Lebih/(Kurang) (Rp. 51.569.994.871,05)
- 2) Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp.266.453.314.523,20 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 1.432.964.487.478,90
 - b. Realisasi Belanja Rp. 1.166.511.172.955,70
 - Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 266.453.314.523,20
- 3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp.318.023.309.394,25) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Defisit Setelah Perubahan (Rp. 405.752.030.025,90)
 - b. Realisasi (Rp. 87.728.720.631,65)
 - Selisih Lebih/(Kurang) (Rp. 318.023.309.394,25)
- 4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 436.022.138.025,90
 - b. Realisasi Rp. 436.022.138.025,90
 - Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 0,00

- 5) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah (Rp.30.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp. 406.022.138.025,90 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 436.022.138.025,90</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang) | (Rp. 30.000.000.000,00) |

Pasal 4

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Neraca adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 4.186.032.793.353,90
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 243.274.217.607,28
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 3.942.758.575.746,62

Pasal 5

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal	
Per 1 Januari Tahun 2025	Rp. 436.029.832.062,90
b. Arus kas Bersih dari aktivitas operasi	Rp. 298.897.546.503,59
c. Arus kas Bersih dari aktivitas investasi Nonkeuangan	(Rp. 386.626.267.135,24)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp. 0,00
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	(Rp. 5.246.957,00)
f. Saldo Kas Akhir	
Per 31 Desember 2025	Rp. 348.295.864.474,25

Pasal 6

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Laporan Operasional adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO	Rp. 1.028.473.552.676,30
b. Beban	Rp. 949.881.863.933,31

Pasal 7

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp. 3.610.370.207.483,78
b. Surplus/Defisit-LO	Rp. 339.880.782.666,50
c. Koreksi ekuitas lainnya	(Rp. 7.492.414.403,66)
d. Ekuitas Akhir	Rp. 3.942.758.575.746,62

Pasal 8

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 436.022.138.025,90
b. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 348.293.417.394,25
c. Koreksi SILPA	Rp. 0,00
d. Koreksi SILPA lain-lain	Rp. 0,00
e. SILPA setelah Koreksi	Rp. 348.293.417.394,25

Pasal 9

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d catatan atas lapoaran keuangan memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran (LRA) terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;

- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah terdiri atas :
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 4 September 2026

BUPATI TANA TIDUNG

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 4 September 2026

SEKRETARIS DAERAH,

HERSONSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN
NOMOR 1 TAHUN 2026
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, PROVINSI KALIMANTAN
UTARA : (83/01/2026)



LAMPIRAN I

LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAHAN KAB. TANA TIDUNG
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2025



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.027.212.457.453,00	1.078.782.452.324,05	51.569.994.871,05	105,02
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30.948.274.122,00	54.358.134.393,05	23.409.860.271,05	175,64
4.1.01	Pajak Daerah	7.812.710.096,00	10.240.378.261,00	2.427.668.165,00	131,07
4.1.02	Retribusi Daerah	1.778.963.865,00	9.851.845.257,00	8.072.881.392,00	553,80
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.099.406.000,00	3.741.723.567,47	(2.357.682.432,53)	61,35
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	15.257.194.161,00	30.524.187.307,58	15.266.993.146,58	200,06
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30.948.274.122,00	54.358.134.393,05	23.409.860.271,05	175,64
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	996.132.183.331,00	1.024.352.520.352,00	28.220.337.021,00	102,83
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	982.308.887.000,00	976.414.177.571,00	(5.894.709.429,00)	99,40
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	13.823.296.331,00	47.938.342.781,00	34.115.046.450,00	346,79
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	132.000.000,00	71.797.579,00	(60.202.421,00)	54,39
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	132.000.000,00	71.797.579,00	(60.202.421,00)	54,39
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	132.000.000,00	71.797.579,00	(60.202.421,00)	54,39
	JUMLAH PENDAPATAN	1.027.212.457.453,00	1.078.782.452.324,05	51.569.994.871,05	105,02
5	BELANJA DAERAH	1.433.234.595.478,90	1.166.511.172.955,70	(266.723.422.523,20)	81,39
5.1	BELANJA OPERASI	784.968.530.028,51	661.098.426.989,46	(123.870.103.039,05)	84,22
5.1.01	Belanja Pegawai	390.349.994.098,23	315.896.000.484,00	(74.453.993.614,23)	80,93
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	374.707.901.789,28	325.696.829.085,46	(49.011.072.703,82)	86,92
5.1.05	Belanja Hibah	19.667.134.141,00	19.262.097.420,00	(405.036.721,00)	97,94
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	243.500.000,00	243.500.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	784.968.530.028,51	661.098.426.989,46	(123.870.103.039,05)	84,22
5.2	BELANJA MODAL	434.056.815.945,39	386.884.401.043,24	(47.172.414.902,15)	89,13
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.015.903.866,00	2.847.964.666,00	(167.939.200,00)	94,43
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.255.670.619,00	35.323.557.737,00	(3.932.112.882,00)	89,98
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	259.808.320.981,39	233.904.479.133,85	(25.903.841.847,54)	90,03
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	128.538.549.399,00	111.466.199.577,39	(17.072.349.821,61)	86,72
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.380.431.856,00	1.461.196.461,00	80.764.605,00	105,85
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.057.939.224,00	1.881.003.468,00	(176.935.756,00)	91,40
	JUMLAH BELANJA MODAL	2.057.939.224,00	1.881.003.468,00	(176.935.756,00)	91,40

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	(%)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	94.864.820.364,00	0,00	(94.864.820.364,00)	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	94.864.820.364,00	0,00	(94.864.820.364,00)	0,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	94.864.820.364,00	0,00	(94.864.820.364,00)	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	119.344.429.141,00	118.528.344.923,00	(816.084.218,00)	99,32
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	989.949.241,00	989.949.241,00	0,00	100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	118.354.479.900,00	117.538.395.682,00	(816.084.218,00)	99,31
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	119.344.429.141,00	118.528.344.923,00	(816.084.218,00)	99,32
	JUMLAH BELANJA	1.433.234.595.478,90	1.166.511.172.955,70	(266.723.422.523,20)	81,39
	SURPLUS/DEFISIT	(406.022.138.025,90)	(87.728.720.631,65)	318.293.417.394,25	21,61
6	PEMBIAYAAN DAERAH	406.022.138.025,90	406.022.138.025,90	0,00	100,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	406.022.138.025,90	406.022.138.025,90	0,00	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	406.022.138.025,90	406.022.138.025,90	0,00	100,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	406.022.138.025,90	406.022.138.025,90	0,00	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00	0,00	(30.000.000.000,00)	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	30.000.000.000,00	0,00	(30.000.000.000,00)	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00	0,00	(30.000.000.000,00)	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	406.022.138.025,90	436.022.138.025,90	30.000.000.000,00	107,39
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	348.293.417.394,25	348.293.417.394,25	0,00

Tideng Pale, 4 September 2026

BUPATI TANA TIDUNG

IBRAHIM ALI, S.P.



LAMPIRAN I . 1

RINGKASAN LRA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH



KAB. TANA TIDUNG
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2025



Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
		4	Pendapatan	1.027.212.457.453,00	1.078.782.452.324,05	51.569.994.871,05	105,02
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9.952.808.000,00	11.145.299.835,01	1.192.491.835,01	111,98
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0,00	(390.172,00)	(390.172,00)	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	(390.172,00)	(390.172,00)	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	(390.172,00)	(390.172,00)	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	(390.172,00)	(390.172,00)	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	(390.172,00)	(390.172,00)	0,00
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	9.952.808.000,00	11.145.690.007,01	1.192.882.007,01	111,99
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	132.000.000,00	0,00	(132.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	132.000.000,00	0,00	(132.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	132.000.000,00	0,00	(132.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	132.000.000,00	0,00	(132.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001		Puskesmas Tideng Pale	809.352.000,00	959.965.702,00	150.613.702,00	118,61
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	809.352.000,00	959.965.702,00	150.613.702,00	118,61
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	809.352.000,00	959.965.702,00	150.613.702,00	118,61
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	4.1.02	Retribusi Daerah	30.000.000,00	57.244.911,00	27.244.911,00	190,82
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	779.352.000,00	902.720.791,00	123.368.791,00	115,83
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002		Puskesmas Sesayap Hilir	480.744.000,00	605.687.416,52	124.943.416,52	125,99
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	4	PENDAPATAN DAERAH	480.744.000,00	605.687.416,52	124.943.416,52	125,99
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	480.744.000,00	605.687.416,52	124.943.416,52	125,99
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	4.1.02	Retribusi Daerah	40.000.000,00	39.306.360,00	(693.640,00)	98,27
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	440.744.000,00	566.381.056,52	125.637.056,52	128,51
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003		Puskesmas Tana Lia	231.984.000,00	246.765.285,95	14.781.285,95	106,37
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	4	PENDAPATAN DAERAH	231.984.000,00	246.765.285,95	14.781.285,95	106,37
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	231.984.000,00	246.765.285,95	14.781.285,95	106,37
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	4.1.02	Retribusi Daerah	30.000.000,00	12.560.900,00	(17.439.100,00)	41,87
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	201.984.000,00	234.204.385,95	32.220.385,95	115,95
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004		Puskesmas Kujau	213.840.000,00	324.780.735,00	110.940.735,00	151,88
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	4	PENDAPATAN DAERAH	213.840.000,00	324.780.735,00	110.940.735,00	151,88
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	213.840.000,00	324.780.735,00	110.940.735,00	151,88
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	4.1.02	Retribusi Daerah	45.000.000,00	60.731.500,00	15.731.500,00	134,96
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	168.840.000,00	264.049.235,00	95.209.235,00	156,39
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005		Puskesmas Muruk Rian	84.888.000,00	117.082.274,24	32.194.274,24	137,93

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	4	PENDAPATAN DAERAH	84.888.000,00	117.082.274,24	32.194.274,24	137,93
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	84.888.000,00	117.082.274,24	32.194.274,24	137,93
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	4.1.02	Retribusi Daerah	15.000.000,00	15.430.700,00	430.700,00	102,87
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	69.888.000,00	101.651.574,24	31.763.574,24	145,45
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006		Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim	8.000.000.000,00	8.819.590.107,00	819.590.107,00	110,24
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	4	PENDAPATAN DAERAH	8.000.000.000,00	8.819.590.107,00	819.590.107,00	110,24
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.000.000.000,00	8.819.590.107,00	819.590.107,00	110,24
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	4.1.02	Retribusi Daerah	995.000.000,00	8.731.382.904,00	7.736.382.904,00	877,53
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.005.000.000,00	88.207.203,00	(6.916.792.797,00)	1,26
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0007		Rumah Sakit D Pratama Tanjung Keramat	0,00	71.818.486,30	71.818.486,30	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0007	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	71.818.486,30	71.818.486,30	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0007	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	20.907,30	20.907,30	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0007	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	20.907,30	20.907,30	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0007	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	71.797.579,00	71.797.579,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0007	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	71.797.579,00	71.797.579,00	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.017.259.649.453,00	1.067.637.152.489,04	50.377.503.036,04	104,95
5.02			KEUANGAN	1.017.259.649.453,00	1.067.637.152.489,04	50.377.503.036,04	104,95
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.017.259.649.453,00	1.067.637.152.489,04	50.377.503.036,04	104,95
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.017.259.649.453,00	1.067.637.152.489,04	50.377.503.036,04	104,95
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21.127.466.122,00	43.284.632.137,04	22.157.166.015,04	204,87
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.01	Pajak Daerah	7.812.710.096,00	10.240.378.261,00	2.427.668.165,00	131,07
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	623.963.865,00	935.187.982,00	311.224.117,00	149,88
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.099.406.000,00	3.741.723.567,47	(2.357.682.432,53)	61,35
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.591.386.161,00	28.367.342.326,57	21.775.956.165,57	430,37
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	996.132.183.331,00	1.024.352.520.352,00	28.220.337.021,00	102,83
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	982.308.887.000,00	976.414.177.571,00	(5.894.709.429,00)	99,40
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	13.823.296.331,00	47.938.342.781,00	34.115.046.450,00	346,79
		5	Belanja	1.432.964.487.478,90	1.166.511.172.955,70	(266.453.314.523,20)	81,41
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	811.135.064.794,00	703.479.587.070,38	(107.655.477.723,62)	86,73
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	262.362.992.930,00	203.501.675.255,00	(58.861.317.675,00)	77,56
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	262.362.992.930,00	203.501.675.255,00	(58.861.317.675,00)	77,56
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	262.362.992.930,00	203.501.675.255,00	(58.861.317.675,00)	77,56
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	200.606.669.672,61	151.951.943.376,00	(48.654.726.296,61)	75,75
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	124.515.820.000,00	85.609.430.772,00	(38.906.389.228,00)	68,75
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.248.618.737,61	61.546.085.484,00	(9.702.533.253,61)	86,38
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	4.842.230.935,00	4.796.427.120,00	(45.803.815,00)	99,05
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	61.756.323.257,39	51.549.731.879,00	(10.206.591.378,39)	83,47
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.591.309.995,00	11.777.876.439,00	(1.813.433.556,00)	86,66

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.704.395.262,39	38.204.269.205,00	(8.500.126.057,39)	81,80
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.470.000,00	36.844.356,00	(31.625.644,00)	53,81
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.051.748.000,00	1.294.041.879,00	242.293.879,00	123,04
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	340.400.000,00	236.700.000,00	(103.700.000,00)	69,54
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	139.557.637.050,00	129.654.300.045,16	(9.903.337.004,84)	92,90
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	110.527.069.029,00	103.743.210.979,00	(6.783.858.050,00)	93,86
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	110.527.069.029,00	103.743.210.979,00	(6.783.858.050,00)	93,86
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	90.981.725.216,00	85.152.313.904,00	(5.829.411.312,00)	93,59
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	66.114.876.606,00	65.509.371.469,00	(605.505.137,00)	99,08
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.796.848.610,00	19.572.942.435,00	(5.223.906.175,00)	78,93
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	19.545.343.813,00	18.590.897.075,00	(954.446.738,00)	95,12
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.347.302.670,00	2.165.666.665,00	(181.636.005,00)	92,26
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.198.041.143,00	16.425.230.410,00	(772.810.733,00)	95,51
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001		Puskesmas Tideng Pale	1.470.410.400,00	1.152.503.946,00	(317.906.454,00)	78,38
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	1.470.410.400,00	1.152.503.946,00	(317.906.454,00)	78,38
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.234.078.623,00	917.066.446,00	(317.012.177,00)	74,31
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	235.605.600,00	0,00	(235.605.600,00)	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	998.473.023,00	917.066.446,00	(81.406.577,00)	91,85
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	236.331.777,00	235.437.500,00	(894.277,00)	99,62
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	236.331.777,00	235.437.500,00	(894.277,00)	99,62
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002		Puskesmas Sesayap Hilir	1.327.470.262,00	1.118.440.891,00	(209.029.371,00)	84,25
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	1.327.470.262,00	1.118.440.891,00	(209.029.371,00)	84,25
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.205.087.662,00	1.013.131.181,00	(191.956.481,00)	84,07
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	144.223.200,00	0,00	(144.223.200,00)	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.060.864.462,00	1.013.131.181,00	(47.733.281,00)	95,50
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	122.382.600,00	105.309.710,00	(17.072.890,00)	86,05
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.382.600,00	105.309.710,00	(17.072.890,00)	86,05
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003		Puskesmas Tana Lia	926.232.501,00	843.932.640,76	(82.299.860,24)	91,11
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	926.232.501,00	843.932.640,76	(82.299.860,24)	91,11
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	857.134.764,00	777.944.741,76	(79.190.022,24)	90,76
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	69.595.200,00	67.410.753,60	(2.184.446,40)	96,86
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	787.539.564,00	710.533.988,16	(77.005.575,84)	90,22
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	69.097.737,00	65.987.899,00	(3.109.838,00)	95,50
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.097.737,00	65.987.899,00	(3.109.838,00)	95,50
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004		Puskesmas Kujau	843.924.104,00	727.393.580,00	(116.530.524,00)	86,19
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	5	BELANJA DAERAH	843.924.104,00	727.393.580,00	(116.530.524,00)	86,19
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	788.585.414,00	672.242.580,00	(116.342.834,00)	85,25
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	64.152.000,00	0,00	(64.152.000,00)	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	724.433.414,00	672.242.580,00	(52.190.834,00)	92,80
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	55.338.690,00	55.151.000,00	(187.690,00)	99,66
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.338.690,00	55.151.000,00	(187.690,00)	99,66
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005		Puskesmas Muruk Rian	670.600.342,00	575.458.338,00	(95.142.004,00)	85,81
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	5	BELANJA DAERAH	670.600.342,00	575.458.338,00	(95.142.004,00)	85,81
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	656.829.142,00	562.027.338,00	(94.801.804,00)	85,57
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	5.1.01	Belanja Pegawai	25.466.400,00	21.911.711,00	(3.554.689,00)	86,04
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	631.362.742,00	540.115.627,00	(91.247.115,00)	85,55
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	13.771.200,00	13.431.000,00	(340.200,00)	97,53
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.771.200,00	13.431.000,00	(340.200,00)	97,53

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006		Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim	23.659.930.412,00	21.421.779.423,00	(2.238.150.989,00)	90,54
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	5	BELANJA DAERAH	23.659.930.412,00	21.421.779.423,00	(2.238.150.989,00)	90,54
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	20.948.697.374,00	18.823.713.906,00	(2.124.983.468,00)	89,86
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	5.1.01	Belanja Pegawai	4.662.426.177,00	3.232.067.540,00	(1.430.358.637,00)	69,32
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.286.271.197,00	15.591.646.366,00	(694.624.831,00)	95,73
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	2.711.233.038,00	2.598.065.517,00	(113.167.521,00)	95,83
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.526.233.038,00	2.417.490.422,00	(108.742.616,00)	95,70
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	185.000.000,00	180.575.095,00	(4.424.905,00)	97,61
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0007		Rumah Sakit D Pratama Tanjung Keramat	132.000.000,00	71.580.247,40	(60.419.752,60)	54,23
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0007	5	BELANJA DAERAH	132.000.000,00	71.580.247,40	(60.419.752,60)	54,23
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	132.000.000,00	71.580.247,40	(60.419.752,60)	54,23
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0007	5.1.01	Belanja Pegawai	79.200.000,00	43.078.547,40	(36.121.452,60)	54,39
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.800.000,00	28.501.700,00	(24.298.300,00)	53,98
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	343.104.659.623,00	313.275.495.043,78	(29.829.164.579,22)	91,31
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	343.104.659.623,00	313.275.495.043,78	(29.829.164.579,22)	91,31
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5	BELANJA DAERAH	343.104.659.623,00	313.275.495.043,78	(29.829.164.579,22)	91,31
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	63.733.304.778,00	55.943.812.867,03	(7.789.491.910,97)	87,78
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.214.608.007,00	7.061.782.931,00	(152.825.076,00)	97,88
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.918.696.771,00	48.285.801.261,03	(7.632.895.509,97)	86,35
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	600.000.000,00	596.228.675,00	(3.771.325,00)	99,37
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	279.371.354.845,00	257.331.682.176,75	(22.039.672.668,25)	92,11
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.015.903.866,00	2.847.964.666,00	(167.939.200,00)	94,43
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.645.791.498,00	5.328.841.149,00	(316.950.349,00)	94,39
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	160.646.056.773,00	149.213.248.223,33	(11.432.808.549,67)	92,88
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	108.900.268.784,00	98.800.250.670,42	(10.100.018.113,58)	90,73
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.163.333.924,00	1.141.377.468,00	(21.956.456,00)	98,11
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10.887.461.812,00	10.511.162.860,47	(376.298.951,53)	96,54
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	10.887.461.812,00	10.511.162.860,47	(376.298.951,53)	96,54
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	5	BELANJA DAERAH	10.887.461.812,00	10.511.162.860,47	(376.298.951,53)	96,54
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	10.887.461.812,00	10.511.162.860,47	(376.298.951,53)	96,54
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.887.461.812,00	10.511.162.860,47	(376.298.951,53)	96,54
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	46.798.815.615,00	38.390.844.504,97	(8.407.971.110,03)	82,03
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.403.769.063,00	17.178.300.114,97	(7.225.468.948,03)	70,39
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	24.403.769.063,00	17.178.300.114,97	(7.225.468.948,03)	70,39
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.299.301.790,00	6.015.046.704,00	(284.255.086,00)	95,49
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.112.655.890,00	4.008.957.317,00	(103.698.573,00)	97,48
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.186.645.900,00	2.006.089.387,00	(180.556.513,00)	91,74
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	18.104.467.273,00	11.163.253.410,97	(6.941.213.862,03)	61,66
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	790.322.273,00	787.815.160,00	(2.507.113,00)	99,68

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.314.145.000,00	10.375.438.250,97	(6.938.706.749,03)	59,92
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		Satuan Polisi Pamong Praja	9.079.038.805,00	8.810.854.509,00	(268.184.296,00)	97,05
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	9.079.038.805,00	8.810.854.509,00	(268.184.296,00)	97,05
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	9.040.645.105,00	8.772.594.509,00	(268.050.596,00)	97,04
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.595.068.874,00	6.438.483.809,00	(156.585.065,00)	97,63
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.445.576.231,00	2.334.110.700,00	(111.465.531,00)	95,44
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	38.393.700,00	38.260.000,00	(133.700,00)	99,65
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.393.700,00	38.260.000,00	(133.700,00)	99,65
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.031.118.001,00	4.789.558.350,00	(241.559.651,00)	95,20
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.031.118.001,00	4.789.558.350,00	(241.559.651,00)	95,20
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.861.996.001,00	4.620.715.350,00	(241.280.651,00)	95,04
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.680.027.429,00	3.471.127.843,00	(208.899.586,00)	94,32
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.181.968.572,00	1.149.587.507,00	(32.381.065,00)	97,26
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	169.122.000,00	168.843.000,00	(279.000,00)	99,84
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.122.000,00	168.843.000,00	(279.000,00)	99,84
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000		Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	8.284.889.746,00	7.612.131.531,00	(672.758.215,00)	91,88
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	8.284.889.746,00	7.612.131.531,00	(672.758.215,00)	91,88
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.740.788.210,00	6.145.135.591,00	(595.652.619,00)	91,16
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.591.302.435,00	3.408.439.937,00	(182.862.498,00)	94,91
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.149.485.775,00	2.736.695.654,00	(412.790.121,00)	86,89
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.544.101.536,00	1.466.995.940,00	(77.105.596,00)	95,01
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.544.101.536,00	1.466.995.940,00	(77.105.596,00)	95,01
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	8.423.497.764,00	8.146.109.361,00	(277.388.403,00)	96,71
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.423.497.764,00	8.146.109.361,00	(277.388.403,00)	96,71
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.423.497.764,00	8.146.109.361,00	(277.388.403,00)	96,71
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.344.045.214,00	8.068.367.162,00	(275.678.052,00)	96,70
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.521.469.464,00	5.420.589.527,00	(100.879.937,00)	98,17
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.498.651.850,00	2.323.853.735,00	(174.798.115,00)	93,00
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	83.923.900,00	83.923.900,00	0,00	100,00
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	100,00
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	79.452.550,00	77.742.199,00	(1.710.351,00)	97,85
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.452.550,00	77.742.199,00	(1.710.351,00)	97,85
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	116.322.253.562,00	104.290.913.485,00	(12.031.340.077,00)	89,66
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.663.434.575,00	5.168.124.211,00	(495.310.364,00)	91,25
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	5.663.434.575,00	5.168.124.211,00	(495.310.364,00)	91,25
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.663.434.575,00	5.168.124.211,00	(495.310.364,00)	91,25
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.110.106.275,00	4.644.314.961,00	(465.791.314,00)	90,88
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.577.492.739,00	3.242.063.310,00	(335.429.429,00)	90,62
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.532.613.536,00	1.402.251.651,00	(130.361.885,00)	91,49
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	553.328.300,00	523.809.250,00	(29.519.050,00)	94,67
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	553.328.300,00	523.809.250,00	(29.519.050,00)	94,67
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	590.660.000,00	549.121.000,00	(41.539.000,00)	92,97
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	590.660.000,00	549.121.000,00	(41.539.000,00)	92,97

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	5	BELANJA DAERAH	590.660.000,00	549.121.000,00	(41.539.000,00)	92,97
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	590.660.000,00	549.121.000,00	(41.539.000,00)	92,97
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	410.660.000,00	369.121.000,00	(41.539.000,00)	89,88
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	100,00
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	530.853.200,00	475.079.665,00	(55.773.535,00)	89,49
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000		Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	530.853.200,00	475.079.665,00	(55.773.535,00)	89,49
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	5	BELANJA DAERAH	530.853.200,00	475.079.665,00	(55.773.535,00)	89,49
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	530.853.200,00	475.079.665,00	(55.773.535,00)	89,49
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	475.853.200,00	420.079.665,00	(55.773.535,00)	88,28
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	3.020.607.100,00	2.782.381.651,00	(238.225.449,00)	92,11
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	3.020.607.100,00	2.782.381.651,00	(238.225.449,00)	92,11
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.020.607.100,00	2.782.381.651,00	(238.225.449,00)	92,11
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.757.035.000,00	2.522.019.679,00	(235.015.321,00)	91,48
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.757.035.000,00	2.522.019.679,00	(235.015.321,00)	91,48
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	263.572.100,00	260.361.972,00	(3.210.128,00)	98,78
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.180.200,00	6.180.000,00	(200,00)	100,00
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	257.391.900,00	254.181.972,00	(3.209.928,00)	98,75
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	11.738.596.428,00	11.484.288.008,00	(254.308.420,00)	97,83
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup	11.738.596.428,00	11.484.288.008,00	(254.308.420,00)	97,83
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	11.738.596.428,00	11.484.288.008,00	(254.308.420,00)	97,83
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.408.998.828,00	11.154.981.008,00	(254.017.820,00)	97,77
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.712.530.117,34	3.692.413.173,00	(20.116.944,34)	99,46
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.696.468.710,66	7.462.567.835,00	(233.900.875,66)	96,96
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	329.597.600,00	329.307.000,00	(290.600,00)	99,91
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	329.597.600,00	329.307.000,00	(290.600,00)	99,91
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	6.202.269.925,00	5.791.881.004,00	(410.388.921,00)	93,38
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.202.269.925,00	5.791.881.004,00	(410.388.921,00)	93,38
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	6.202.269.925,00	5.791.881.004,00	(410.388.921,00)	93,38
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.194.220.725,00	5.784.054.604,00	(410.166.121,00)	93,38
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.727.549.551,00	3.618.769.034,00	(108.780.517,00)	97,08
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.466.671.174,00	2.165.285.570,00	(301.385.604,00)	87,78
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	8.049.200,00	7.826.400,00	(222.800,00)	97,23
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.049.200,00	7.826.400,00	(222.800,00)	97,23
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.581.280.000,00	2.434.274.000,00	(147.006.000,00)	94,30
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.581.280.000,00	2.434.274.000,00	(147.006.000,00)	94,30
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.581.280.000,00	2.434.274.000,00	(147.006.000,00)	94,30
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.221.280.000,00	2.074.274.000,00	(147.006.000,00)	93,38
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.421.280.000,00	1.274.274.000,00	(147.006.000,00)	89,66
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	100,00

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	5.4	BELANJA TRANSFER	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	100,00
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	100,00
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.114.452.200,00	964.316.171,00	(150.136.029,00)	86,53
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	1.114.452.200,00	964.316.171,00	(150.136.029,00)	86,53
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.114.452.200,00	964.316.171,00	(150.136.029,00)	86,53
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.049.452.200,00	913.317.221,00	(136.134.979,00)	87,03
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.049.452.200,00	913.317.221,00	(136.134.979,00)	87,03
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	65.000.000,00	50.998.950,00	(14.001.050,00)	78,46
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.000.000,00	50.998.950,00	(14.001.050,00)	78,46
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	13.045.221.055,00	12.702.011.121,00	(343.209.934,00)	97,37
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	13.045.221.055,00	12.702.011.121,00	(343.209.934,00)	97,37
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	13.045.221.055,00	12.702.011.121,00	(343.209.934,00)	97,37
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.938.301.784,00	8.723.111.631,00	(215.190.153,00)	97,59
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.405.894.811,00	4.376.914.137,00	(28.980.674,00)	99,34
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.532.406.973,00	4.346.197.494,00	(186.209.479,00)	95,89
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	4.106.919.271,00	3.978.899.490,00	(128.019.781,00)	96,88
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	864.930.334,00	758.884.190,00	(106.046.144,00)	87,74
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	986.323.322,00	966.349.000,00	(19.974.322,00)	97,97
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.255.665.615,00	2.253.666.300,00	(1.999.315,00)	99,91
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.390.119.488,00	7.870.257.956,00	(519.861.532,00)	93,80
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	8.390.119.488,00	7.870.257.956,00	(519.861.532,00)	93,80
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.390.119.488,00	7.870.257.956,00	(519.861.532,00)	93,80
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.390.119.488,00	7.870.257.956,00	(519.861.532,00)	93,80
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.904.124.238,00	4.546.133.337,00	(357.990.901,00)	92,70
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.485.995.250,00	3.324.124.619,00	(161.870.631,00)	95,36
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8.879.517.359,00	8.295.191.917,00	(584.325.442,00)	93,42
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000		Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	8.879.517.359,00	8.295.191.917,00	(584.325.442,00)	93,42
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.879.517.359,00	8.295.191.917,00	(584.325.442,00)	93,42
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.841.674.559,00	8.258.291.917,00	(583.382.642,00)	93,40
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.415.312.603,00	6.399.607.129,00	(15.705.474,00)	99,76
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.426.361.956,00	1.858.684.788,00	(567.677.168,00)	76,60
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	37.842.800,00	36.900.000,00	(942.800,00)	97,51
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.842.800,00	36.900.000,00	(942.800,00)	97,51
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6.140.743.378,00	5.777.278.855,00	(363.464.523,00)	94,08
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.140.743.378,00	5.777.278.855,00	(363.464.523,00)	94,08
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	6.140.743.378,00	5.777.278.855,00	(363.464.523,00)	94,08
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.871.510.218,00	5.526.782.205,00	(344.728.013,00)	94,13
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.797.651.200,00	3.785.481.158,00	(12.170.042,00)	99,68
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.073.859.018,00	1.741.301.047,00	(332.557.971,00)	83,96
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	269.233.160,00	250.496.650,00	(18.736.510,00)	93,04
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	269.233.160,00	250.496.650,00	(18.736.510,00)	93,04

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.752.465.736,00	1.743.883.436,00	(8.582.300,00)	99,51
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.752.465.736,00	1.743.883.436,00	(8.582.300,00)	99,51
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.752.465.736,00	1.743.883.436,00	(8.582.300,00)	99,51
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.486.328.936,00	1.479.538.618,00	(6.790.318,00)	99,54
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.216.328.936,00	1.214.538.618,00	(1.790.318,00)	99,85
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	270.000.000,00	265.000.000,00	(5.000.000,00)	98,15
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	266.136.800,00	264.344.818,00	(1.791.982,00)	99,33
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	266.136.800,00	264.344.818,00	(1.791.982,00)	99,33
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	224.663.800,00	199.738.746,00	(24.925.054,00)	88,91
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	224.663.800,00	199.738.746,00	(24.925.054,00)	88,91
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	224.663.800,00	199.738.746,00	(24.925.054,00)	88,91
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	204.802.000,00	180.313.746,00	(24.488.254,00)	88,04
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.802.000,00	180.313.746,00	(24.488.254,00)	88,04
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	19.861.800,00	19.425.000,00	(436.800,00)	97,80
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.861.800,00	19.425.000,00	(436.800,00)	97,80
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	125.355.000,00	109.684.780,00	(15.670.220,00)	87,50
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	125.355.000,00	109.684.780,00	(15.670.220,00)	87,50
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	125.355.000,00	109.684.780,00	(15.670.220,00)	87,50
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	125.355.000,00	109.684.780,00	(15.670.220,00)	87,50
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.355.000,00	109.684.780,00	(15.670.220,00)	87,50
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	30.283.379.166,00	22.285.076.262,00	(7.998.302.904,00)	73,59
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.283.379.166,00	22.285.076.262,00	(7.998.302.904,00)	73,59
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	30.283.379.166,00	22.285.076.262,00	(7.998.302.904,00)	73,59
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.251.531.320,00	5.088.484.760,00	(2.163.046.560,00)	70,17
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.251.531.320,00	5.088.484.760,00	(2.163.046.560,00)	70,17
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	23.031.847.846,00	17.196.591.502,00	(5.835.256.344,00)	74,66
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	679.767.590,00	0,00	(679.767.590,00)	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.352.080.256,00	17.196.591.502,00	(5.155.488.754,00)	76,94
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	15.755.621.027,00	15.377.345.832,00	(378.275.195,00)	97,60
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.755.621.027,00	15.377.345.832,00	(378.275.195,00)	97,60
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	15.755.621.027,00	15.377.345.832,00	(378.275.195,00)	97,60
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.358.554.738,00	4.177.851.313,00	(180.703.425,00)	95,85
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.013.974.819,00	2.965.963.811,00	(48.011.008,00)	98,41
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.344.579.919,00	1.211.887.502,00	(132.692.417,00)	90,13
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	11.397.066.289,00	11.199.494.519,00	(197.571.770,00)	98,27
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	847.086.289,00	818.999.760,00	(28.086.529,00)	96,68
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.349.980.000,00	10.341.882.077,00	(8.097.923,00)	99,92
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	38.612.682,00	(161.387.318,00)	19,31
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	283.014.125,00	280.978.870,00	(2.035.255,00)	99,28
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	283.014.125,00	280.978.870,00	(2.035.255,00)	99,28
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	283.014.125,00	280.978.870,00	(2.035.255,00)	99,28

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	283.014.125,00	280.978.870,00	(2.035.255,00)	99,28
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.014.125,00	280.978.870,00	(2.035.255,00)	99,28
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	24.630.672.955,01	23.692.938.812,00	(937.734.143,01)	96,19
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	868.309.156,00	846.827.411,00	(21.481.745,00)	97,53
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000		Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	868.309.156,00	846.827.411,00	(21.481.745,00)	97,53
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	5	BELANJA DAERAH	868.309.156,00	846.827.411,00	(21.481.745,00)	97,53
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	845.313.356,00	824.524.911,00	(20.788.445,00)	97,54
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	845.313.356,00	824.524.911,00	(20.788.445,00)	97,54
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	22.995.800,00	22.302.500,00	(693.300,00)	96,99
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.995.800,00	22.302.500,00	(693.300,00)	96,99
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	7.109.512.225,01	6.932.744.070,00	(176.768.155,01)	97,51
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	7.109.512.225,01	6.932.744.070,00	(176.768.155,01)	97,51
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.109.512.225,01	6.932.744.070,00	(176.768.155,01)	97,51
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.016.365.805,01	6.848.607.270,00	(167.758.535,01)	97,61
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.743.657.420,00	4.654.232.941,00	(89.424.479,00)	98,11
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.272.708.385,01	2.194.374.329,00	(78.334.056,01)	96,55
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	93.146.420,00	84.136.800,00	(9.009.620,00)	90,33
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.146.420,00	84.136.800,00	(9.009.620,00)	90,33
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	13.986.726.984,00	13.405.911.389,00	(580.815.595,00)	95,85
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000		Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	13.986.726.984,00	13.405.911.389,00	(580.815.595,00)	95,85
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	5	BELANJA DAERAH	13.986.726.984,00	13.405.911.389,00	(580.815.595,00)	95,85
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	13.779.944.036,00	13.206.486.569,00	(573.457.467,00)	95,84
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	10.298.937.936,00	10.081.971.220,00	(216.966.716,00)	97,89
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.481.006.100,00	3.124.515.349,00	(356.490.751,00)	89,76
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	206.782.948,00	199.424.820,00	(7.358.128,00)	96,44
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	206.782.948,00	199.424.820,00	(7.358.128,00)	96,44
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.328.967.390,00	1.296.335.932,00	(32.631.458,00)	97,54
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000		Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	1.328.967.390,00	1.296.335.932,00	(32.631.458,00)	97,54
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.328.967.390,00	1.296.335.932,00	(32.631.458,00)	97,54
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.008.635.830,00	981.089.023,00	(27.546.807,00)	97,27
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.008.635.830,00	981.089.023,00	(27.546.807,00)	97,27
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	320.331.560,00	315.246.909,00	(5.084.651,00)	98,41
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.447.400,00	132.056.700,00	(2.390.700,00)	98,22
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	185.884.160,00	183.190.209,00	(2.693.951,00)	98,55
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.185.687.800,00	1.059.754.110,00	(125.933.690,00)	89,38
3.31	3.31.3.30.2.17.01.0000		Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	1.185.687.800,00	1.059.754.110,00	(125.933.690,00)	89,38
3.31	3.31.3.30.2.17.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.185.687.800,00	1.059.754.110,00	(125.933.690,00)	89,38
3.31	3.31.3.30.2.17.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.185.687.800,00	1.059.754.110,00	(125.933.690,00)	89,38
3.31	3.31.3.30.2.17.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.035.687.800,00	909.754.110,00	(125.933.690,00)	87,84
3.31	3.31.3.30.2.17.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	151.469.400,00	151.365.900,00	(103.500,00)	99,93
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	151.469.400,00	151.365.900,00	(103.500,00)	99,93
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	151.469.400,00	151.365.900,00	(103.500,00)	99,93
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	151.469.400,00	151.365.900,00	(103.500,00)	99,93
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.469.400,00	151.365.900,00	(103.500,00)	99,93
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	114.590.894.724,00	107.577.329.599,32	(7.013.565.124,68)	93,88
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	72.311.471.302,00	67.784.294.833,32	(4.527.176.468,68)	93,74
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat Daerah	15.514.366.846,00	15.024.810.512,00	(489.556.334,00)	96,84
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	15.514.366.846,00	15.024.810.512,00	(489.556.334,00)	96,84
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	15.514.366.846,00	15.024.810.512,00	(489.556.334,00)	96,84
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	15.514.366.846,00	15.024.810.512,00	(489.556.334,00)	96,84
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001		Bagian Umum	33.589.403.423,00	30.810.833.697,32	(2.778.569.725,68)	91,73
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	33.589.403.423,00	30.810.833.697,32	(2.778.569.725,68)	91,73
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	28.753.694.854,00	26.395.942.554,80	(2.357.752.299,20)	91,80
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	709.359.620,00	520.938.740,00	(188.420.880,00)	73,44
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.044.335.234,00	25.875.003.814,80	(2.169.331.419,20)	92,26
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	4.835.708.569,00	4.414.891.142,52	(420.817.426,48)	91,30
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.678.251.604,00	4.259.487.300,00	(418.764.304,00)	91,05
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	157.456.965,00	155.403.842,52	(2.053.122,48)	98,70
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002		Bagian Pemerintahan	1.952.459.814,00	1.898.206.545,00	(54.253.269,00)	97,22
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	1.952.459.814,00	1.898.206.545,00	(54.253.269,00)	97,22
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.889.578.225,00	1.835.874.145,00	(53.704.080,00)	97,16
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.889.578.225,00	1.835.874.145,00	(53.704.080,00)	97,16
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	62.881.589,00	62.332.400,00	(549.189,00)	99,13
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.481.589,00	11.932.400,00	(549.189,00)	95,60
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	100,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003		Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat	12.747.273.357,00	11.870.320.446,00	(876.952.911,00)	93,12
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	12.747.273.357,00	11.870.320.446,00	(876.952.911,00)	93,12
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.717.022.748,00	11.841.149.646,00	(875.873.102,00)	93,11
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.809.522.748,00	1.978.706.346,00	(830.816.402,00)	70,43
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	9.904.000.000,00	9.858.943.300,00	(45.056.700,00)	99,55
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	30.250.609,00	29.170.800,00	(1.079.809,00)	96,43
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.250.609,00	29.170.800,00	(1.079.809,00)	96,43
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004		Bagian Hukum	2.493.737.200,00	2.423.538.153,00	(70.199.047,00)	97,18
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	5	BELANJA DAERAH	2.493.737.200,00	2.423.538.153,00	(70.199.047,00)	97,18
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.493.737.200,00	2.423.538.153,00	(70.199.047,00)	97,18
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.493.737.200,00	2.423.538.153,00	(70.199.047,00)	97,18
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005		Bagian Organisasi	1.423.139.887,00	1.330.166.920,00	(92.972.967,00)	93,47
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	5	BELANJA DAERAH	1.423.139.887,00	1.330.166.920,00	(92.972.967,00)	93,47
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.419.396.687,00	1.326.466.920,00	(92.929.767,00)	93,45
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.419.396.687,00	1.326.466.920,00	(92.929.767,00)	93,45
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	3.743.200,00	3.700.000,00	(43.200,00)	98,85
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.743.200,00	3.700.000,00	(43.200,00)	98,85
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006		Bagian Administrasi Pembangunan	4.591.090.775,00	4.426.418.560,00	(164.672.215,00)	96,41
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	5	BELANJA DAERAH	4.591.090.775,00	4.426.418.560,00	(164.672.215,00)	96,41
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.582.467.275,00	4.418.078.560,00	(164.388.715,00)	96,41
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.582.467.275,00	4.418.078.560,00	(164.388.715,00)	96,41
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	8.623.500,00	8.340.000,00	(283.500,00)	96,71
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.623.500,00	8.340.000,00	(283.500,00)	96,71

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
4.02			SEKRETARIAT DPRD	42.279.423.422,00	39.793.034.766,00	(2.486.388.656,00)	94,12
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat DPRD	42.279.423.422,00	39.793.034.766,00	(2.486.388.656,00)	94,12
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	42.279.423.422,00	39.793.034.766,00	(2.486.388.656,00)	94,12
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	42.167.206.622,00	39.683.254.766,00	(2.483.951.856,00)	94,11
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	15.301.173.082,00	15.147.211.310,00	(153.961.772,00)	98,99
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.866.033.540,00	24.536.043.456,00	(2.329.990.084,00)	91,33
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	112.216.800,00	109.780.000,00	(2.436.800,00)	97,83
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.216.800,00	109.780.000,00	(2.436.800,00)	97,83
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	318.556.245.494,89	183.924.596.137,00	(134.631.649.357,89)	57,74
5.01			PERENCANAAN	16.732.452.774,00	14.787.240.606,00	(1.945.212.168,00)	88,37
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	16.732.452.774,00	14.787.240.606,00	(1.945.212.168,00)	88,37
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	16.732.452.774,00	14.787.240.606,00	(1.945.212.168,00)	88,37
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	16.306.824.424,00	14.364.401.830,00	(1.942.422.594,00)	88,09
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.365.854.260,00	6.171.581.489,00	(194.272.771,00)	96,95
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.940.970.164,00	8.192.820.341,00	(1.748.149.823,00)	82,41
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	425.628.350,00	422.838.776,00	(2.789.574,00)	99,34
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.823.050,00	84.732.776,00	(2.090.274,00)	97,59
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	338.805.300,00	338.106.000,00	(699.300,00)	99,79
5.02			KEUANGAN	292.295.857.500,89	160.577.050.865,00	(131.718.806.635,89)	54,94
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	292.295.857.500,89	160.577.050.865,00	(131.718.806.635,89)	54,94
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	292.295.857.500,89	160.577.050.865,00	(131.718.806.635,89)	54,94
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	76.866.094.347,89	40.901.293.994,00	(35.964.800.353,89)	53,21
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	50.922.404.465,89	22.493.806.928,00	(28.428.597.537,89)	44,17
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.943.689.882,00	18.407.487.066,00	(7.536.202.816,00)	70,95
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.580.513.648,00	1.507.411.948,00	(73.101.700,00)	95,37
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.346.564.192,00	1.324.183.048,00	(22.381.144,00)	98,34
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	68.949.456,00	68.808.900,00	(140.556,00)	99,80
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	165.000.000,00	114.420.000,00	(50.580.000,00)	69,35
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	94.864.820.364,00	0,00	(94.864.820.364,00)	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	94.864.820.364,00	0,00	(94.864.820.364,00)	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4	BELANJA TRANSFER	118.984.429.141,00	118.168.344.923,00	(816.084.218,00)	99,31
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	989.949.241,00	989.949.241,00	0,00	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	117.994.479.900,00	117.178.395.682,00	(816.084.218,00)	99,31
5.03			KEPEGAWAIAN	7.683.185.520,00	6.914.389.711,00	(768.795.809,00)	89,99
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.683.185.520,00	6.914.389.711,00	(768.795.809,00)	89,99
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.683.185.520,00	6.914.389.711,00	(768.795.809,00)	89,99
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.640.852.320,00	6.873.716.861,00	(767.135.459,00)	89,96
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.559.405.940,00	4.321.727.577,00	(237.678.363,00)	94,79
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.081.446.380,00	2.551.989.284,00	(529.457.096,00)	82,82
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	42.333.200,00	40.672.850,00	(1.660.350,00)	96,08
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.333.200,00	40.672.850,00	(1.660.350,00)	96,08
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	629.586.600,00	606.057.187,00	(23.529.413,00)	96,26
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	629.586.600,00	606.057.187,00	(23.529.413,00)	96,26
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	629.586.600,00	606.057.187,00	(23.529.413,00)	96,26
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	629.586.600,00	606.057.187,00	(23.529.413,00)	96,26
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	629.586.600,00	606.057.187,00	(23.529.413,00)	96,26

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.215.163.100,00	1.039.857.768,00	(175.305.332,00)	85,57
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	1.215.163.100,00	1.039.857.768,00	(175.305.332,00)	85,57
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.215.163.100,00	1.039.857.768,00	(175.305.332,00)	85,57
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.215.163.100,00	1.039.857.768,00	(175.305.332,00)	85,57
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.215.163.100,00	1.039.857.768,00	(175.305.332,00)	85,57
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	17.080.860.640,00	14.031.829.867,00	(3.049.030.773,00)	82,15
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	17.080.860.640,00	14.031.829.867,00	(3.049.030.773,00)	82,15
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		Inspektorat Kabupaten	17.080.860.640,00	14.031.829.867,00	(3.049.030.773,00)	82,15
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	17.080.860.640,00	14.031.829.867,00	(3.049.030.773,00)	82,15
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	15.734.435.910,00	12.744.491.887,00	(2.989.944.023,00)	81,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.438.081.714,00	4.058.306.386,00	(379.775.328,00)	91,44
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.296.354.196,00	8.686.185.501,00	(2.610.168.695,00)	76,89
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.346.424.730,00	1.287.337.980,00	(59.086.750,00)	95,61
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	767.115.930,00	708.392.200,00	(58.723.730,00)	92,34
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	519.574.400,00	519.212.780,00	(361.620,00)	99,93
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	59.734.400,00	59.733.000,00	(1.400,00)	100,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	24.622.740.843,00	23.866.845.887,00	(755.894.956,00)	96,93
7.01			KECAMATAN	24.622.740.843,00	23.866.845.887,00	(755.894.956,00)	96,93
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		Kecamatan Sesayap	5.033.136.750,00	4.842.074.312,00	(191.062.438,00)	96,20
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.033.136.750,00	4.842.074.312,00	(191.062.438,00)	96,20
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.895.738.490,00	4.704.676.052,00	(191.062.438,00)	96,10
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.436.960.894,00	3.303.960.443,00	(133.000.451,00)	96,13
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.458.777.596,00	1.400.715.609,00	(58.061.987,00)	96,02
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	137.398.260,00	137.398.260,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.398.260,00	137.398.260,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		Kecamatan Sesayap Hilir	4.988.466.804,00	4.912.748.102,00	(75.718.702,00)	98,48
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	4.988.466.804,00	4.912.748.102,00	(75.718.702,00)	98,48
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.988.466.804,00	4.912.748.102,00	(75.718.702,00)	98,48
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.502.910.224,00	3.463.478.664,00	(39.431.560,00)	98,87
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.485.556.580,00	1.449.269.438,00	(36.287.142,00)	97,56
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		Kecamatan Betayau	4.455.807.948,00	4.396.535.109,00	(59.272.839,00)	98,67
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	4.455.807.948,00	4.396.535.109,00	(59.272.839,00)	98,67
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.369.840.668,00	4.311.140.109,00	(58.700.559,00)	98,66
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.195.934.595,00	3.154.407.736,00	(41.526.859,00)	98,70
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.173.906.073,00	1.156.732.373,00	(17.173.700,00)	98,54
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.2	BELANJA MODAL	85.967.280,00	85.395.000,00	(572.280,00)	99,33
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.967.280,00	85.395.000,00	(572.280,00)	99,33
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		Kecamatan Tana Lia	5.646.978.471,00	5.293.793.129,00	(353.185.342,00)	93,75
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	5.646.978.471,00	5.293.793.129,00	(353.185.342,00)	93,75
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.090.021.171,00	4.738.616.129,00	(351.405.042,00)	93,10
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.645.182.471,00	3.377.151.411,00	(268.031.060,00)	92,65
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.444.838.700,00	1.361.464.718,00	(83.373.982,00)	94,23
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	556.957.300,00	555.177.000,00	(1.780.300,00)	99,68
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	556.957.300,00	555.177.000,00	(1.780.300,00)	99,68
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		Kecamatan Muruk Rian	4.498.350.870,00	4.421.695.235,00	(76.655.635,00)	98,30
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5	BELANJA DAERAH	4.498.350.870,00	4.421.695.235,00	(76.655.635,00)	98,30
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.478.607.870,00	4.402.095.235,00	(76.512.635,00)	98,29
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.264.629.270,00	3.202.417.881,00	(62.211.389,00)	98,09
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.213.978.600,00	1.199.677.354,00	(14.301.246,00)	98,82
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.2	BELANJA MODAL	19.743.000,00	19.600.000,00	(143.000,00)	99,28

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.743.000,00	19.600.000,00	(143.000,00)	99,28
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6.025.754.466,00	5.647.132.098,00	(378.622.368,00)	93,72
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.025.754.466,00	5.647.132.098,00	(378.622.368,00)	93,72
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.025.754.466,00	5.647.132.098,00	(378.622.368,00)	93,72
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	6.025.754.466,00	5.647.132.098,00	(378.622.368,00)	93,72
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.025.754.466,00	5.647.132.098,00	(378.622.368,00)	93,72
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.313.775.160,00	3.240.557.673,00	(73.217.487,00)	97,79
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	2.711.979.306,00	2.406.574.425,00	(305.404.881,00)	88,74
			Jumlah	(405.752.030.025,90)	(87.728.720.631,65)	318.023.309.394,25	21,62

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



LAMPIRAN I . 2

RINCIAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN
MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAHAN KAB. TANA TIDUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Desember 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.027.212.457.453,00	76.768.869.357,36	7,47	1.483.899.695.654,45
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30.948.274.122,00	8.703.102.476,36	28,12	49.612.809.888,45
4.1.01	Pajak Daerah	7.812.710.096,00	2.298.863.353,00	29,42	7.812.755.443,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	100.000.000,00	6.399.000,00	6,39	68.905.819,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	100.000.000,00	6.399.000,00	6,39	68.905.819,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	100.000.000,00	6.399.000,00	6,39	68.905.819,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.148.246.343,00	1.110.586.850,00	96,72	4.266.314.470,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.148.246.343,00	1.110.586.850,00	96,72	4.266.314.470,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.148.246.343,00	1.110.586.850,00	96,72	4.266.314.470,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	5.000.000,00	770.000,00	15,40	1.500.000,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	5.000.000,00	770.000,00	15,40	1.500.000,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	5.000.000,00	770.000,00	15,40	1.500.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	15.000.000,00	907.500,00	6,05	28.693.592,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	15.000.000,00	907.500,00	6,05	28.693.592,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	15.000.000,00	907.500,00	6,05	28.693.592,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	2.310.737.027,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00	2.310.737.027,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00	2.310.737.027,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	10.000.000,00	718.740,00	7,18	6.803.950,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	10.000.000,00	718.740,00	7,18	6.803.950,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	10.000.000,00	718.740,00	7,18	6.803.950,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	2.000.000,00	20,00	5.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	2.000.000,00	20,00	5.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	2.000.000,00	20,00	5.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	225.000.000,00	398.047.877,00	176,91	576.718.743,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	225.000.000,00	398.047.877,00	176,91	576.718.743,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	225.000.000,00	398.047.877,00	176,91	576.718.743,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	294.000.000,00	65.005.184,00	22,11	333.340.232,00
4.1.01.15.01	PBBP2	294.000.000,00	65.005.184,00	22,11	333.340.232,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	294.000.000,00	65.005.184,00	22,11	333.340.232,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	150.000.000,00	1.000.000,00	0,66	214.741.610,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	150.000.000,00	1.000.000,00	0,66	214.741.610,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	150.000.000,00	1.000.000,00	0,66	214.741.610,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	2.000.000.000,00	214.474.702,00	10,72	0,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	2.000.000.000,00	214.474.702,00	10,72	0,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	1.700.000.000,00	211.654.585,00	12,45	0,00
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	300.000.000,00	2.820.117,00	0,94	0,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.918.174.396,00	244.785.500,00	12,76	0,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	1.918.174.396,00	244.785.500,00	12,76	0,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	1.918.174.396,00	244.785.500,00	12,76	0,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.937.289.357,00	254.168.000,00	13,11	0,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	1.937.289.357,00	254.168.000,00	13,11	0,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	1.937.289.357,00	254.168.000,00	13,11	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.778.963.865,00	2.107.863.185,00	118,48	706.311.634,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.413.963.865,00	2.032.671.334,00	143,75	118.734.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.323.963.865,00	1.990.241.834,00	150,32	83.096.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	328.963.865,00	42.116.371,00	12,80	83.096.000,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	995.000.000,00	1.948.125.463,00	195,79	0,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	45.000.000,00	19.029.000,00	42,28	31.788.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	45.000.000,00	19.029.000,00	42,28	31.788.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	36.600.000,00	17.150.500,00	46,85	0,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	12.200.000,00	433.000,00	3,54	0,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	12.200.000,00	6.931.000,00	56,81	0,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	12.200.000,00	9.786.500,00	80,21	0,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	8.400.000,00	6.250.000,00	74,40	3.850.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	8.400.000,00	6.250.000,00	74,40	3.850.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	346.500.000,00	61.517.000,00	17,75	561.810.440,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	14.000.000,00	1.116.000,00	7,97	62.669.940,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruang	14.000.000,00	1.116.000,00	7,97	62.669.940,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	48.603.000,00
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	0,00	0,00	0,00	48.603.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	36.000.000,00	1.026.000,00	2,85	54.000.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	36.000.000,00	1.026.000,00	2,85	54.000.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000.000,00	46.575.000,00	23,28	320.668.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000.000,00	46.575.000,00	23,28	320.668.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	60.000.000,00	12.800.000,00	21,33	75.869.500,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	60.000.000,00	12.800.000,00	21,33	75.869.500,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	36.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	36.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	18.500.000,00	13.674.851,00	73,91	25.767.194,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	18.500.000,00	13.674.851,00	73,91	25.767.194,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	18.500.000,00	13.674.851,00	73,91	25.767.194,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.099.406.000,00	0,00	0,00	4.930.224.687,96
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.099.406.000,00	0,00	0,00	4.930.224.687,96
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.099.406.000,00	0,00	0,00	4.930.224.687,96
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.099.406.000,00	0,00	0,00	4.930.224.687,96
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	15.257.194.161,00	4.296.375.938,36	28,15	36.163.518.123,49
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00	209.425.136,00	104,71	231.524.500,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	200.000.000,00	209.425.136,00	104,71	231.524.500,00
4.1.04.01.08.0002	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	200.000.000,00	209.425.136,00	104,71	231.524.500,00
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	200.000.000,00	(101.461.644,00)	(50,73)	228.413.484,63
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	200.000.000,00	(101.461.644,00)	(50,73)	228.413.484,63
4.1.04.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	200.000.000,00	(101.461.644,00)	(50,73)	228.413.484,63
4.1.04.05	Jasa Giro	4.526.753.653,00	452.842.686,40	10,00	7.609.090.345,26
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.516.753.653,00	451.419.632,40	9,99	7.609.090.345,26
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.516.753.653,00	451.419.632,40	9,99	7.609.090.345,26
4.1.04.05.07	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	10.000.000,00	1.423.054,00	14,23	0,00
4.1.04.05.07.0001	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	10.000.000,00	1.423.054,00	14,23	0,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	0,00	1.342.703.259,94	0,00	14.893.284.569,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	1.342.703.259,94	0,00	14.893.284.569,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	1.342.703.259,94	0,00	14.893.284.569,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	184.888.000,00	190.891.850,57	103,24	5.428.170.032,02
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	25.553.000,00	0,00	0,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	25.553.000,00	0,00	0,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	184.888.000,00	165.338.850,57	89,42	5.428.170.032,02
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	184.888.000,00	165.338.850,57	89,42	5.428.170.032,02
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	59.518.239,39	0,00	0,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	59.518.239,39	0,00	0,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	59.518.239,39	0,00	0,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	646.506.099,00	286.954.088,16	44,38	238.334.414,58
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	646.506.099,00	286.954.088,16	44,38	238.334.414,58
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	646.506.099,00	286.954.088,16	44,38	238.334.414,58
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	6.000.000,00	4.476.282,00	74,60	0,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.000.000,00	4.476.282,00	74,60	0,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	6.000.000,00	4.476.282,00	74,60	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	827.238.409,00	1.498.096.648,51	181,09	118.758.853,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	860.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	0,00	860.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	327.238.409,00	67.020.080,00	20,48	118.758.853,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	327.238.409,00	67.020.080,00	20,48	118.758.853,00
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	854.335,79	0,00	0,00
4.1.04.15.15.0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	854.335,79	0,00	0,00
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	722.500,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	722.500,00	0,00	0,00
4.1.04.15.34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.34.0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.1.04.15.61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	382.039.163,25	0,00	0,00
4.1.04.15.61.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	148.376.500,00	0,00	0,00
4.1.04.15.61.0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00	53.941.923,25	0,00	0,00
4.1.04.15.61.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	179.720.740,00	0,00	0,00
4.1.04.15.65	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	1.045.922.741,47	0,00	0,00
4.1.04.15.65.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	1.045.922.741,47	0,00	0,00
4.1.04.15.88	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	677.828,00	0,00	0,00
4.1.04.15.88.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	677.828,00	0,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	8.665.808.000,00	352.929.391,39	4,07	7.415.941.925,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	8.665.808.000,00	352.929.391,39	4,07	7.415.941.925,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	8.665.808.000,00	352.929.391,39	4,07	7.415.941.925,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	30.948.274.122,00	8.703.102.476,36	28,12	49.612.809.888,45
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	996.132.183.331,00	67.994.054.302,00	6,82	1.415.256.686.466,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	982.308.887.000,00	62.889.476.445,00	6,40	1.342.315.180.153,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	1.298.349.353.153,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	832.040.549.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	18.912.969.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00	3.353.531.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	0,00	111.163.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	1.899.280.000,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	290.698.000,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	0,00	325.447.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	0,00	0,00	794.913.065.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	0,00	0,00	5.030.298.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.578.376.000,00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	0,00	0,00	0,00	5.625.722.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	425.690.872.922,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	0,00	0,00	0,00	349.264.548.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	0,00	0,00	5.756.624.922,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	25.678.444.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	13.513.380.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	31.477.876.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	18.201.140.625,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00	775.285.700,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	0,00	1.601.422.598,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	960.209.895,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	9.560.668.240,00
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	1.901.850.564,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	3.401.703.628,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	22.416.790.606,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	5.776.158.629,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	597.500.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	6.365.703.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	296.662.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	0,00	0,00	0,00	1.048.181.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	971.392.800,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	306.144.300,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	0,00	0,00	792.301.156,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	361.791.000,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	2.267.923.772,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	0,00	0,00	0,00	3.633.032.949,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	503.424.284.000,00	20.948.084.700,00	4,16	0,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	209.480.847.000,00	20.948.084.700,00	10,00	0,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	203.634.442.000,00	20.363.444.200,00	10,00	0,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.658.197.000,00	565.819.700,00	10,00	0,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	188.208.000,00	18.820.800,00	10,00	0,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	291.194.680.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	392.475.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi	156.127.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent	274.268.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	286.545.638.000,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.323.315.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.07.02.0007	DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	328.325.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	1.174.532.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	2.748.757.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	2.748.757.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	402.661.605.000,00	18.372.748.256,00	4,56	0,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	340.233.407.000,00	11.000,00	0,00	0,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	340.233.407.000,00	11.000,00	0,00	0,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	62.428.198.000,00	18.372.737.256,00	29,43	0,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	10.463.412.000,00	5.381.538.256,00	51,43	0,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	38.264.051.000,00	9.566.014.000,00	25,00	0,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	13.700.735.000,00	3.425.185.000,00	25,00	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	41.841.009.000,00	23.568.643.489,00	56,32	0,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	13.268.698.000,00	2.999.989.928,00	22,60	0,00
4.2.01.09.01.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.999.832.000,00	2.999.989.928,00	27,27	0,00
4.2.01.09.01.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	2.268.866.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	28.572.311.000,00	20.568.653.561,00	71,98	0,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	9.692.749.000,00	8.281.449.600,00	85,43	0,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	482.750.000,00	675.000.000,00	139,82	0,00
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.078.499.000,00	1.500.258.320,00	139,10	0,00
4.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.046.632.000,00	1.011.530.000,00	96,64	0,00
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	344.710.000,00	310.608.878,00	90,10	0,00
4.2.01.09.02.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	303.988.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	1.158.100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.02.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	6.023.546.000,00	5.940.759.247,00	98,62	0,00
4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	608.500.000,00	608.500.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3.958.179.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	3.411.298.000,00	2.209.197.516,00	64,76	0,00
4.2.01.09.02.0044	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	62.700.000,00	31.350.000,00	50,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	947.926.898.000,00	62.889.476.445,00	6,63	1.298.349.353.153,00
4.2.01.05	Dana Desa	27.385.891.000,00	0,00	0,00	29.801.783.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	27.385.891.000,00	0,00	0,00	29.801.783.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	27.385.891.000,00	0,00	0,00	29.801.783.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	6.996.098.000,00	0,00	0,00	14.164.044.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	14.164.044.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	14.164.044.000,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	6.996.098.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	6.996.098.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	34.381.989.000,00	0,00	0,00	43.965.827.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	13.823.296.331,00	5.104.577.857,00	36,92	72.941.506.313,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	12.088.801.079,00	4.417.330.231,00	36,54	35.037.618.142,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	12.088.801.079,00	4.417.330.231,00	36,54	35.037.618.142,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	531.607.959,00	255.060.679,00	47,97	981.138.634,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	512.928.288,00	246.590.412,00	48,07	1.334.747.398,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.744.264.832,00	3.331.864.781,00	43,02	31.156.253.282,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	300.000.000,00	32.339.637,00	10,77	167.703.676,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.000.000.000,00	551.474.722,00	18,38	1.397.775.152,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	1.734.495.252,00	687.247.626,00	39,62	37.903.888.171,00
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	29.750.000.000,00
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	29.750.000.000,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.734.495.252,00	687.247.626,00	39,62	8.153.888.171,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	1.734.495.252,00	687.247.626,00	39,62	8.153.888.171,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	13.823.296.331,00	5.104.577.857,00	36,92	72.941.506.313,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	996.132.183.331,00	67.994.054.302,00	6,82	1.415.256.686.466,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	132.000.000,00	71.712.579,00	54,32	19.030.199.300,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	(85.000,00)	0,00	17.314.145.000,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	17.314.145.000,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	17.314.145.000,00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	17.314.145.000,00
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	(85.000,00)	0,00	0,00
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	(85.000,00)	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	(85.000,00)	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	132.000.000,00	71.797.579,00	54,39	1.716.054.300,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	132.000.000,00	71.797.579,00	54,39	1.716.054.300,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	132.000.000,00	71.797.579,00	54,39	1.716.054.300,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	132.000.000,00	71.797.579,00	54,39	1.716.054.300,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	132.000.000,00	71.712.579,00	54,32	19.030.199.300,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.027.212.457.453,00	76.768.869.357,36	7,47	1.483.899.695.654,45
5	BELANJA DAERAH	1.432.964.487.478,90	393.506.923.866,61	27,46	1.356.243.522.076,42
5.1	BELANJA OPERASI	784.698.422.028,51	157.634.849.653,30	20,08	774.466.031.112,02
5.1.01	Belanja Pegawai	390.079.886.098,23	39.684.443.708,00	10,17	313.541.036.552,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	168.372.497.247,46	2.509.946.544,00	1,49	121.794.414.558,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	118.224.566.091,00	545.079.414,00	0,46	90.270.482.932,20
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	95.927.526.931,00	545.079.414,00	0,56	84.274.122.634,20
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	22.297.039.160,00	0,00	0,00	5.996.360.298,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	10.517.136.894,00	49.278.250,00	0,46	8.160.031.866,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	8.745.428.446,00	49.278.250,00	0,56	7.832.956.576,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.771.708.448,00	0,00	0,00	327.075.290,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.286.411.462,00	39.100.000,00	0,91	3.687.681.140,33
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	3.643.728.785,00	39.100.000,00	1,07	3.687.681.140,33
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	642.682.677,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.463.979.380,00	24.880.000,00	0,33	4.957.275.293,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	6.515.834.559,00	24.880.000,00	0,38	4.677.735.293,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	948.144.821,00	0,00	0,00	279.540.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.485.117.574,00	11.080.000,00	0,44	1.534.644.999,47
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.880.900.305,00	11.080.000,00	0,58	1.479.699.999,47
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	604.217.269,00	0,00	0,00	54.945.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	6.857.734.619,00	30.629.910,00	0,44	5.228.708.320,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	5.723.459.171,00	30.629.910,00	0,53	5.000.005.960,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.134.275.448,00	0,00	0,00	228.702.360,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	135.231.415,45	959.415,00	0,70	69.389.814,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	123.064.523,45	959.415,00	0,77	69.389.814,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	12.166.892,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.864.019,34	8.239,00	0,14	1.305.223,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.429.404,34	8.239,00	0,15	1.266.549,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	434.615,00	0,00	0,00	38.674,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	15.111.950.008,55	1.804.584.737,00	11,94	7.093.812.820,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	14.140.502.816,55	1.767.718.969,00	12,50	6.862.760.757,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	971.447.192,00	36.865.768,00	3,79	231.052.063,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.259.324.529,00	1.086.637,00	0,08	183.364.457,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.207.544.708,00	1.086.637,00	0,08	171.637.846,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	51.779.821,00	0,00	0,00	11.726.611,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.724.849.643,00	3.259.942,00	0,18	541.649.973,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.576.486.242,00	3.249.097,00	0,20	506.470.836,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	148.363.401,00	10.845,00	0,00	35.179.137,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	300.331.612,12	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	281.227.352,12	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	19.104.260,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus	0,00	0,00	0,00	66.067.720,00
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus	0,00	0,00	0,00	66.067.720,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	200.619.598.385,77	35.408.016.652,40	17,64	160.207.902.502,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	189.240.488.385,77	24.638.122.185,00	13,01	160.207.902.502,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	170.264.903.390,89	24.193.274.769,00	14,20	158.189.721.176,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	18.975.584.994,88	444.847.416,00	2,34	2.018.181.326,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.379.110.000,00	10.769.894.467,40	94,64	0,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	9.692.749.000,00	8.281.449.600,00	85,43	0,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.078.499.000,00	1.500.258.320,00	139,10	0,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	528.662.000,00	675.000.000,00	127,68	0,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	79.200.000,00	313.186.547,40	395,43	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	17.856.815.413,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	6.227.057.400,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	6.227.057.400,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	0,00	0,00	1.128.471.300,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	0,00	0,00	0,00	1.128.471.300,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	570.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	570.000.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	1.377.750.113,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	1.377.750.113,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	7.438.736.600,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	6.257.904.600,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	1.102.832.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0,00	0,00	0,00	78.000.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	1.114.800.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	1.114.800.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.842.452.035,00	9.956.394,00	0,08	10.600.879.903,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	452.290.000,00	0,00	0,00	450.975.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	452.290.000,00	0,00	0,00	450.975.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	58.848.300,00	0,00	0,00	54.800.100,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	58.848.300,00	0,00	0,00	54.800.100,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	61.880.000,00	0,00	0,00	54.665.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	61.880.000,00	0,00	0,00	54.665.000,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	45.717.000,00	0,00	0,00	38.986.500,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	45.717.000,00	0,00	0,00	38.986.500,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	663.000.000,00	0,00	0,00	653.913.750,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	663.000.000,00	0,00	0,00	653.913.750,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	118.076.175,00	0,00	0,00	66.137.400,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	118.076.175,00	0,00	0,00	66.137.400,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.528.000.000,00	0,00	0,00	2.520.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.528.000.000,00	0,00	0,00	2.520.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000,00	0,00	0,00	420.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000,00	0,00	0,00	420.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	66.971.556,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	66.971.556,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	168.504,00	0,00	0,00	12.000,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	168.504,00	0,00	0,00	12.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.000.700.500,00	9.956.394,00	0,33	2.967.005.153,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	60.000.000,00	9.956.394,00	16,59	39.777.600,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.940.700.500,00	0,00	0,00	2.927.227.553,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.196.800.000,00	0,00	0,00	3.192.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.196.800.000,00	0,00	0,00	3.192.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	10.000.000,00	0,00	0,00	182.385.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	10.000.000,00	0,00	0,00	182.385.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	409.359.620,00	46.800.000,00	11,43	174.934.176,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	148.280.500,00	46.800.000,00	31,56	61.332.960,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	148.280.500,00	46.800.000,00	31,56	61.332.960,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	16.530.000,00	0,00	0,00	6.864.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	16.530.000,00	0,00	0,00	6.864.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	224.640.000,00	0,00	0,00	98.280.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	224.640.000,00	0,00	0,00	98.280.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	18.299.120,00	0,00	0,00	7.531.680,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	18.299.120,00	0,00	0,00	7.531.680,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.390.000,00	0,00	0,00	924.536,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.390.000,00	0,00	0,00	924.536,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	220.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	220.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	618.690.233,00	76.040.000,00	12,29	559.720.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	318.690.233,00	26.040.000,00	8,17	279.720.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	318.690.233,00	26.040.000,00	8,17	279.720.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00	50.000.000,00	16,66	280.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00	50.000.000,00	16,66	280.000.000,00
5.1.01.89	Belanja Pegawai BOSP	3.015.820.000,00	(63.110.000,00)	(2,09)	0,00
5.1.01.89.01	Belanja Pegawai BOSP-BOS	3.015.820.000,00	(63.110.000,00)	(2,09)	0,00
5.1.01.89.01.0001	Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler	3.015.820.000,00	(63.110.000,00)	(2,09)	0,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	5.201.468.577,00	1.696.794.117,60	32,62	2.346.370.000,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	5.201.468.577,00	1.696.794.117,60	32,62	2.346.370.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	5.201.468.577,00	1.696.794.117,60	32,62	2.346.370.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	374.707.901.789,28	115.417.850.625,30	30,80	422.867.337.627,02
5.1.02.01	Belanja Barang	123.155.941.726,01	48.896.330.454,93	39,70	154.311.459.122,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	122.632.211.996,01	48.543.750.054,93	39,58	153.946.628.122,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.240.127.760,00	245.048.726,00	19,75	934.052.845,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	295.363.700,00	85.897.150,00	29,08	175.459.968,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.420.734.516,66	922.372.450,00	17,01	6.042.520.400,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	48.152.000,00	0,00	0,00	1.724.502.400,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	28.296.700,00	22.044.700,00	77,90	31.308.700,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	97.840.000,00	50.600.000,00	51,71	388.750.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.214.527.569,00	801.746.036,00	24,94	2.900.085.512,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.607.571.775,00	471.940.465,00	29,35	1.123.926.443,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	263.639.500,00	0,00	0,00	176.830.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	29.086.400,00	1.744.365,00	5,99	12.932.240,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	87.846.200,00	22.750.000,00	25,89	38.091.070,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.724.080.213,00	349.779.530,00	20,28	2.717.780.412,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.372.045.455,00	180.314.320,00	13,14	450.137.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.238.165.111,46	1.540.148.440,00	29,40	4.407.408.649,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	194.078.000,00	37.666.000,00	19,40	210.954.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	928.745.525,00	166.858.000,00	17,96	836.975.605,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.517.415.963,35	255.302.206,00	16,82	3.596.293.200,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	449.214.728,00	49.493.900,00	11,01	613.556.940,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	248.093.100,00	66.765.600,00	26,91	830.843.850,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.213.672.000,00	158.900.000,00	13,09	825.749.500,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.612.633.200,00	690.327.150,00	26,42	1.937.101.600,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	298.210.400,00	107.925.300,00	36,19	1.385.511.977,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.534.833.898,00	139.328.086,00	9,07	803.197.854,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	68.820.476,00	2.265.000,00	3,29	1.051.735.610,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	37.687.949.963,00	22.462.088.008,74	59,60	52.620.549.514,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	13.615.165.878,00	9.717.941.302,19	71,37	29.727.149.239,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	24.785.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.969.159.147,00	322.200.500,00	10,85	1.912.245.030,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	249.509.936,00	0,00	0,00	15.625.000,00
5.1.02.01.01.0048	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi	0,00	0,00	0,00	51.937.374,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.810.932.819,54	5.056.629.000,00	23,18	17.012.467.445,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.562.890.610,00	1.878.314.320,00	28,62	8.640.273.405,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	121.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	13.480.052,00	0,00	0,00	396.980.500,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.733.680.000,00	1.612.792.000,00	28,12	5.422.483.550,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	188.860.000,00	0,00	0,00	72.200.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	177.406.000,00	36.000.000,00	20,29	176.901.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	97.086.000,00	49.900.000,00	51,39	220.540.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	402.075.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	914.936.000,00	613.462.500,00	67,04	853.394.550,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	20.160.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	218.423.000,00	3.000.000,00	1,37	97.110.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	27.060.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	262.464.000,00	0,00	0,00	627.326.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	930.397.000,00	362.205.000,00	38,93	828.636.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.262.672.400,00	60.000.000,00	4,75	1.400.563.240,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	10.400.000,00	0,00	0,00	152.465.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	293.218.600,00	218.515.600,00	74,52	364.831.000,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	97.830.000,00	93.600.000,00	95,67	299.096.000,00
5.1.02.01.02.0005	Belanja Komponen-Attachment	55.100.000,00	0,00	0,00	41.000.000,00
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	119.175.000,00	111.400.000,00	93,47	0,00
5.1.02.01.02.0009	Belanja Pipa-Pipa Baja	2.990.600,00	2.990.600,00	100,00	0,00
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	18.123.000,00	10.525.000,00	58,07	24.735.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	230.511.130,00	134.064.800,00	58,15	0,00
5.1.02.01.04.0010	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	22.426.200,00	22.089.000,00	98,49	0,00
5.1.02.01.04.0011	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	45.131.600,00	44.622.000,00	98,87	0,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	32.400.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	99.321.630,00	63.423.800,00	63,85	0,00
5.1.02.01.04.0121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.753.200,00	2.280.000,00	47,96	0,00
5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	1.577.400,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(I,Home Use)],	17.843.100,00	1.650.000,00	9,24	0,00
5.1.02.01.04.0248	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	2.915.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0452	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong	4.143.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	124.035.521.153,00	29.799.032.452,80	24,02	127.276.957.318,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	86.638.615.674,00	21.296.619.004,20	24,58	85.410.928.397,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	995.250.000,00	290.350.000,00	29,17	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.072.750.000,00	1.756.222.500,00	28,91	4.028.131.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.947.180.000,00	4.747.510.000,00	47,72	10.461.480.004,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	516.500.000,00	59.625.000,00	11,54	1.367.600.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	10.000.000,00	3.600.000,00	36,00	12.400.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	220.050.000,00	47.100.000,00	21,40	155.250.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	72.000.000,00	0,00	0,00	35.200.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	85.600.000,00	75.700.000,00	88,43	0,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	898.800.000,00	409.100.000,00	45,51	829.200.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.365.200.000,00	532.050.000,00	22,49	8.369.500.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	7.750.840.000,00	1.335.000.000,00	17,22	6.142.350.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	203.551.600,00	71.400.000,00	35,07	117.955.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	189.456.000,00	53.370.000,00	28,17	454.069.211,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.104.800.000,00	42.413.000,00	3,83	1.229.932.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.711.200.000,00	117.800.000,00	6,88	1.633.700.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	0,00	0,00	0,00	52.800.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	515.280.000,00	110.700.000,00	21,48	564.100.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	373.877.800,00	102.799.000,00	27,49	998.714.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.653.060.000,00	396.600.000,00	5,18	9.355.268.513,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	32.450.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.027.200.000,00	124.800.000,00	12,14	1.036.800.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.426.646.000,00	2.236.132.511,20	30,10	10.475.189.248,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.395.100.000,00	993.880.000,00	10,57	9.413.468.893,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.969.900.000,00	179.600.000,00	9,11	2.019.400.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	444.000.000,00	26.400.000,00	5,94	656.400.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.742.720.000,00	146.800.000,00	8,42	1.389.800.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	400.082.500,00	45.472.000,00	11,36	270.096.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	14.170.000,00	0,00	0,00	19.400.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	388.600.000,00	65.760.000,00	16,92	475.710.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	36.000.000,00	0,00	0,00	59.760.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	24.000.000,00	23.865.000,00	99,43	0,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	1.410.432.500,00	404.511.896,00	28,67	753.650.688,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.821.027.280,00	521.395.690,00	28,63	3.198.831.720,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	180.325.000,00	30.566.000,00	16,95	174.971.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	143.370.000,00	0,00	0,00	74.578.110,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.076.500.000,00	491.300.000,00	45,63	1.180.700.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	7.860.000,00	682.800,00	8,68	5.881.500,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.112.122.940,00	193.018.558,00	17,35	976.760.648,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.320.785.674,00	598.926.465,00	13,86	4.154.882.758,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	734.081.000,00	224.437.350,00	30,57	515.900.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.148.519.580,00	989.050.834,00	31,41	2.312.950.292,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	66.480.000,00	31.321.900,00	47,11	45.288.800,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	749.167.800,00	188.167.000,00	25,11	181.501.300,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	370.460.000,00	8.251.500,00	2,22	134.274.000,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	2.500.000,00	0,00	0,00	4.633.712,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.730.330.000,00	3.346.330.000,00	49,72	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.001.840.000,00	231.110.000,00	23,06	0,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	51.000.000,00	25.500.000,00	50,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.885.650.600,00	29.832.884,00	0,50	4.127.549.288,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	495.375.800,00	15.524.248,00	3,13	480.647.484,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	20.160.000,00	0,00	0,00	9.298.800,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	4.917.931.200,00	259.200,00	0,00	3.305.641.640,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	56.855.400,00	2.511.777,00	4,41	14.433.929,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	227.330.600,00	6.800.246,00	2,99	144.594.694,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	167.997.600,00	4.737.413,00	2,81	172.932.741,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	88.000.000,00	0,00	0,00	87.000.000,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	88.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
5.1.02.02.03.0017	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.697.798.271,00	1.834.125.968,00	27,38	12.610.583.614,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	28.560.000,00	0,00	0,00	64.847.000,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	142.640.000,00	126.000.000,00	88,33	168.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.494.694.000,00	366.944.000,00	24,54	863.097.142,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	32.081.600,00	20.072.000,00	62,56	35.190.500,00
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	444.715.000,00
5.1.02.02.04.0048	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	935.000.000,00	70.000.000,00	7,48	1.218.440.000,00
5.1.02.02.04.0082	Belanja Sewa Alat Ukur Universal	0,00	0,00	0,00	285.678.936,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.858.752.671,00	1.251.109.968,00	32,42	9.423.615.036,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	24.000.000,00	0,00	0,00	89.000.000,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	179.820.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.720.140.000,00	342.633.000,00	9,21	3.265.129.400,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	655.240.000,00	0,00	0,00	690.240.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	116.000.000,00	48.000.000,00	41,37	89.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	366.000.000,00	38.000.000,00	10,38	117.000.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	40.000.000,00	0,00	0,00	155.000.000,00
5.1.02.02.05.0033	Belanja Sewa Bangunan Parkir	27.750.000,00	27.000.000,00	97,29	27.000.000,00
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	489.450.000,00	0,00	0,00	389.200.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.905.700.000,00	229.633.000,00	12,04	1.573.647.900,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	120.000.000,00	0,00	0,00	224.041.500,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	964.857.900,00	587.852.676,60	60,92	8.324.697.031,00
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	0,00	0,00	0,00	1.209.750.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00	3.913.963.600,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	268.362.400,00	188.700.000,00	70,31	1.748.202.958,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	299.913.000,00	291.592.500,00	97,22	1.401.150.473,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	88.702.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	210.062.500,00	107.560.176,60	51,20	0,00
5.1.02.02.08.0029	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal	97.818.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	51.630.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.590.572.220,00	1.577.482.000,00	99,17	1.995.198.662,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0,00	0,00	0,00	196.991.700,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	0,00	0,00	0,00	124.672.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	490.572.220,00	477.482.000,00	97,33	1.673.534.962,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	180.900.000,00	171.980.958,00	95,06	167.464.816,00
5.1.02.02.10.0005	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	180.900.000,00	171.980.958,00	95,06	167.464.816,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	4.465.100.000,00	256.800.000,00	5,75	2.401.100.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	4.465.100.000,00	256.800.000,00	5,75	2.311.100.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	13.701.634.488,00	3.681.753.962,00	26,87	8.797.181.110,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	8.949.815.900,00	3.060.882.697,00	34,20	7.159.764.810,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	2.291.156.400,00	330.512.400,00	14,42	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	2.295.772.188,00	290.358.865,00	12,64	1.059.831.300,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	164.890.000,00	0,00	0,00	577.585.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	53.252.000,00	19.952.000,00	37,46	90.125.000,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	53.252.000,00	19.952.000,00	37,46	90.125.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10.333.503.130,01	5.760.187.863,57	55,74	4.569.468.019,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	236.000.000,00
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	0,00	0,00	0,00	236.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.171.856.800,01	1.619.218.900,00	31,30	3.955.662.419,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	0,00	0,00	0,00	99.905.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.517.048.000,01	546.654.836,00	36,03	2.022.197.717,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.875.875.800,00	500.774.064,00	26,69	350.656.500,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	134.640.000,00	33.600.000,00	24,95	0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.860.000,00	1.150.000,00	10,58	0,00
5.1.02.03.02.0061	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	30.050.000,00	0,00	0,00	13.186.800,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	21.169.000,00	10.735.000,00	50,71	0,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	547.870.000,00	191.025.000,00	34,86	624.301.150,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	100.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	182.364.000,00	0,00	0,00	15.394.000,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	40.000.000,00	9.300.000,00	23,25	39.759.731,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	97.950.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	206.590.000,00	68.035.000,00	32,93	224.330.911,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	121.440.000,00	59.395.000,00	48,90	130.050.210,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	274.500.000,00	198.550.000,00	72,33	398.502.000,00
5.1.02.03.02.0446	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	0,00	0,00	0,00	17.378.400,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.156.678.330,00	4.140.968.963,57	80,30	334.305.600,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.924.917.630,00	4.060.018.963,57	82,43	330.025.600,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	0,00	0,00	4.280.000,00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	226.475.000,00	75.700.000,00	33,42	0,00
5.1.02.03.03.0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	5.285.700,00	5.250.000,00	99,32	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.968.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	4.968.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	43.500.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	0,00	0,00	43.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	79.912.784.886,26	18.072.613.467,00	22,61	86.674.649.744,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	79.912.784.886,26	18.072.613.467,00	22,61	86.674.649.744,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	64.619.777.976,00	14.833.704.467,00	22,95	72.411.915.104,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.598.962.009,60	2.690.180.000,00	21,35	13.525.368.440,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	167.092.500,00	68.730.000,00	41,13	121.733.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.526.952.400,66	479.999.000,00	18,99	615.633.200,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.092.895.766,00	3.145.693.319,00	51,62	18.893.695.397,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.438.604.266,00	2.608.323.319,00	47,95	18.179.644.111,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.993.950.000,00	823.400.000,00	27,50	3.202.391.100,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	371.000.000,00	132.952.000,00	35,83	193.000.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	114.148.266,00	59.500.000,00	52,12	0,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	1.959.506.000,00	1.592.471.319,00	81,26	14.634.253.011,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	654.291.500,00	537.370.000,00	82,13	714.051.286,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	654.291.500,00	537.370.000,00	82,13	714.051.286,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	28.143.526.913,02
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	28.143.526.913,02
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	28.143.526.913,02
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	20.368.404.000,00	4.046.583.082,00	19,86	0,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	19.902.053.000,00	3.750.213.102,00	18,84	0,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	19.388.553.000,00	3.750.213.102,00	19,34	0,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	513.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	113.640.000,00	113.346.000,00	99,74	0,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	98.640.000,00	98.346.000,00	99,70	0,00
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	352.711.000,00	183.023.980,00	51,89	0,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	352.711.000,00	183.023.980,00	51,89	0,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	3.371.433.708,00	3.103.653.147,00	92,05	0,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	3.371.433.708,00	3.103.653.147,00	92,05	0,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	3.371.433.708,00	3.103.653.147,00	92,05	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	7.437.417.420,00	2.593.756.839,00	34,87	2.997.581.114,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	7.437.417.420,00	2.593.756.839,00	34,87	2.997.581.114,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	7.437.417.420,00	2.593.756.839,00	34,87	2.997.581.114,00
5.1.05	Belanja Hibah	19.667.134.141,00	2.529.055.320,00	12,85	38.040.036.933,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	442.198.500,00	0,00	0,00	4.029.717.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	250.000.000,00	0,00	0,00	3.550.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	250.000.000,00	0,00	0,00	3.550.000.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	192.198.500,00	0,00	0,00	479.717.000,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	192.198.500,00	0,00	0,00	479.717.000,00
5.1.05.04	Belanja Hibah kepada BUMD	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.04.02	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.04.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	13.405.735.115,00	951.526.200,00	7,09	31.853.300.600,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	11.307.101.280,00	661.296.200,00	5,84	28.693.600.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.388.329.080,00	469.943.300,00	4,52	28.693.600.000,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	918.772.200,00	191.352.900,00	20,82	0,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.957.709.935,00	290.230.000,00	14,82	2.954.700.600,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.957.709.935,00	290.230.000,00	14,82	2.954.700.600,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	140.923.900,00	0,00	0,00	205.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	140.923.900,00	0,00	0,00	205.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	2.383.822.000,00	1.006.150.820,00	42,20	0,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	2.383.822.000,00	1.006.150.820,00	42,20	0,00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	2.383.822.000,00	1.006.150.820,00	42,20	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.064.668.526,00	0,00	0,00	915.918.475,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.064.668.526,00	0,00	0,00	915.918.475,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.064.668.526,00	0,00	0,00	915.918.475,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	1.770.710.000,00	571.378.300,00	32,26	1.241.100.858,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	572.610.000,00	571.378.300,00	99,78	0,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	572.610.000,00	571.378.300,00	99,78	0,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.198.100.000,00	0,00	0,00	967.996.800,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.198.100.000,00	0,00	0,00	967.996.800,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	273.104.058,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	273.104.058,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	243.500.000,00	3.500.000,00	1,43	17.620.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	243.500.000,00	3.500.000,00	1,43	17.620.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	243.500.000,00	3.500.000,00	1,43	17.620.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	243.500.000,00	3.500.000,00	1,43	17.620.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	784.698.422.028,51	157.634.849.653,30	20,08	774.466.031.112,02
5.2	BELANJA MODAL	434.056.815.945,39	235.657.542.291,31	54,29	446.286.590.042,40
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.015.903.866,00	890.942.114,00	29,54	0,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	3.015.903.866,00	890.942.114,00	29,54	0,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	583.802.000,00	583.802.000,00	100,00	0,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	583.802.000,00	583.802.000,00	100,00	0,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	2.432.101.866,00	307.140.114,00	12,62	0,00
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	2.432.101.866,00	307.140.114,00	12,62	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.255.670.619,00	17.438.030.569,00	44,42	39.818.595.746,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	5.018.881.768,00	669.470.590,00	13,33	2.254.996.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	4.448.552.300,00	145.482.150,00	3,27	2.109.096.000,00
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	4.265.900.000,00	0,00	0,00	826.000.000,00
5.2.02.01.01.0005	Belanja Modal Hauler	0,00	0,00	0,00	1.268.096.000,00
5.2.02.01.01.0007	Belanja Modal Compacting Equipment	36.190.400,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.01.0010	Belanja Modal Alat Pengangkat	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	146.461.900,00	145.482.150,00	99,33	0,00
5.2.02.01.02	Belanja Modal Alat Besar Apung	0,00	0,00	0,00	131.500.000,00
5.2.02.01.02.0006	Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya	0,00	0,00	0,00	131.500.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	570.329.468,00	523.988.440,00	91,87	14.400.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	428.658.968,00	386.940.000,00	90,26	0,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	5.103.000,00	3.400.000,00	66,62	0,00
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	119.767.500,00	117.660.000,00	98,24	0,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	16.800.000,00	15.988.440,00	95,16	14.400.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	10.865.739.852,00	5.938.110.000,00	54,64	12.120.740.701,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	10.565.739.852,00	5.938.110.000,00	56,20	12.120.740.701,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.572.692.500,00	1.787.180.000,00	50,02	1.567.200.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	3.852.612.000,00	2.212.500.000,00	57,42	4.605.500.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.282.822.000,00	1.231.360.000,00	95,98	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	1.848.212.001,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.857.613.352,00	707.070.000,00	38,06	3.380.480.200,00
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	719.348.500,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	448.094.900,00	38.300.500,00	8,54	586.723.000,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	42.284.000,00
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	0,00	0,00	0,00	32.284.000,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	60.000.000,00	0,00	0,00	52.400.000,00
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0,00	0,00	0,00	52.400.000,00
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	388.094.900,00	38.300.500,00	9,86	492.039.000,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	240.000.000,00	29.365.000,00	12,23	475.939.000,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	16.100.000,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	9.524.900,00	8.935.500,00	93,81	0,00
5.2.02.03.03.0011	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	126.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	12.070.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.197.000,00	0,00	0,00	40.809.636,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.197.000,00	0,00	0,00	40.809.636,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	40.809.636,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1.197.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	11.103.037.053,00	5.991.318.619,00	53,96	12.412.207.254,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	6.060.629.239,00	3.820.686.100,00	63,04	7.787.630.320,00
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	13.747.378,00	0,00	0,00	19.454.000,00
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	0,00	0,00	5.060.000,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	57.123.375,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	502.628.665,00	62.923.000,00	12,51	281.557.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.544.253.196,00	3.757.763.100,00	67,77	7.424.435.945,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.925.324.560,00	2.141.694.419,00	43,48	4.262.658.334,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.425.638.287,00	1.216.353.669,00	50,14	1.483.155.934,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	29.699.617,00	12.217.500,00	41,13	49.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.260.028.086,00	281.454.000,00	22,33	1.752.314.100,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	56.169.663,00	33.100.000,00	58,92	10.995.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.111.225.707,00	564.048.250,00	50,75	627.713.300,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	42.563.200,00	34.521.000,00	81,10	339.480.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	117.083.254,00	28.938.100,00	24,71	361.918.600,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	29.886.800,00	11.600.000,00	38,81	55.523.600,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	66.660.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	12.813.000,00	6.338.100,00	49,46	4.895.000,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	33.683.000,00	0,00	0,00	96.650.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya	38.198.500,00	11.000.000,00	28,79	48.000.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	2.501.954,00	0,00	0,00	90.190.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	837.998.613,00	483.002.350,00	57,63	3.467.190.320,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	722.303.013,00	400.056.350,00	55,38	2.179.706.320,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	73.626.800,00	9.280.700,00	12,60	178.248.500,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	557.332.400,00	329.450.000,00	59,11	1.925.057.820,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0,00	0,00	0,00	36.950.000,00
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	91.343.813,00	61.325.650,00	67,13	29.550.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	47.728.400,00	16.346.000,00	34,24	112.484.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	17.855.000,00	16.346.000,00	91,54	44.262.000,00
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	0,00	0,00	0,00	14.043.000,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	29.873.400,00	0,00	0,00	54.179.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	67.967.200,00	66.600.000,00	97,98	1.175.000.000,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	67.967.200,00	66.600.000,00	97,98	1.175.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.092.346.383,00	1.674.355.516,00	54,14	4.259.118.215,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.147.481.138,00	876.853.356,00	40,83	3.272.866.919,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	416.183.513,00	91.161.999,00	21,90	313.524.600,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	6.122.500,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	654.313.500,00	302.627.365,00	46,25	2.213.983.120,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	26.353.100,00	23.050.000,00	87,46	69.623.200,00
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	2.244.958,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	44.381.100,00	22.200.000,00	50,02	0,00
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	769.732.467,00	264.653.992,00	34,38	254.532.999,00
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	0,00	0,00	0,00	331.721.000,00
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	45.000.000,00	0,00	0,00	83.834.000,00
5.2.02.07.01.0023	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	183.150.000,00	173.160.000,00	94,54	0,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.648.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	944.865.245,00	797.502.160,00	84,40	986.251.296,00
5.2.02.07.02.0004	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	24.928.200,00	24.400.000,00	97,88	0,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	919.937.045,00	773.102.160,00	84,03	986.251.296,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	185.769.874,00	113.569.850,00	61,13	228.995.752,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	119.674.800,00	108.929.850,00	91,02	65.678.752,00
5.2.02.08.01.0008	Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	97.180.500,00	96.320.250,00	99,11	0,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00	55.428.752,00
5.2.02.08.01.0031	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	7.947.400,00	6.782.100,00	85,33	10.250.000,00
5.2.02.08.01.0041	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	14.546.900,00	5.827.500,00	40,06	0,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	61.383.674,00	0,00	0,00	21.000.000,00
5.2.02.08.03.0002	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika	4.815.800,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.03.0003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	4.553.074,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.03.0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	47.658.800,00	0,00	0,00	21.000.000,00
5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	4.356.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	4.711.400,00	4.640.000,00	98,48	0,00
5.2.02.08.05.0003	Belanja Modal Proteksi Lingkungan	4.711.400,00	4.640.000,00	98,48	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	142.317.000,00
5.2.02.08.07.0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	0,00	0,00	0,00	142.317.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.859.146.172,00	1.444.205.174,00	37,42	2.792.733.301,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.371.703.484,00	1.268.273.914,00	37,61	1.687.300.000,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	169.000.000,00	40.799.160,00	24,14	254.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	3.134.614.984,00	1.227.474.754,00	39,15	1.433.300.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	68.088.500,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	487.442.688,00	175.931.260,00	36,09	1.105.433.301,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	433.853.938,00	146.215.960,00	33,70	1.057.445.801,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	34.463.350,00	10.710.000,00	31,07	21.400.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	19.125.400,00	19.005.300,00	99,37	26.587.500,00
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.02.12.02	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.02.12.02.0004	Belanja Modal Peralatan Bantu	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	43.295.000,00	0,00	0,00	59.790.150,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	43.295.000,00	0,00	0,00	59.790.150,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	0,00	0,00	0,00	59.790.150,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	43.295.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	200.000.000,00	0,00	0,00	864.302.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	200.000.000,00	0,00	0,00	864.302.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	200.000.000,00	0,00	0,00	864.302.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	14.408.000,00	13.000.000,00	90,22	0,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	14.408.000,00	13.000.000,00	90,22	0,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	14.408.000,00	13.000.000,00	90,22	0,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	2.888.834.000,00	775.122.000,00	26,83	0,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	2.888.834.000,00	775.122.000,00	26,83	0,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	2.866.334.000,00	775.122.000,00	27,04	0,00
5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	696.922.004,00	297.575.970,00	42,69	727.489.417,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	696.922.004,00	297.575.970,00	42,69	727.489.417,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	696.922.004,00	297.575.970,00	42,69	727.489.417,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	259.808.320.981,39	137.149.901.001,57	52,78	225.324.831.715,40
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	252.292.140.371,39	133.587.669.522,45	52,94	222.266.630.693,40
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	250.695.760.221,39	132.784.482.542,45	52,96	219.352.735.033,40
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	157.339.916.516,00	89.229.140.374,45	56,71	151.273.009.870,40
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	13.940.867.700,00	7.513.510.444,00	53,89	4.153.360.943,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	16.696.343.456,00	8.649.836.100,00	51,80	9.016.847.713,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	44.329.259.812,39	18.117.122.817,00	40,86	37.781.622.442,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	266.136.800,00	264.344.818,00	99,32	4.110.946.154,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	185.884.160,00	35.079.230,00	18,87	590.451.468,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	127.965.577,00	125.980.000,00	98,44	285.522.000,00
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	10.349.980.000,00	3.553.795.629,00	34,33	196.336.578,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	0,00	0,00	527.397.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	236.000.000,00	230.250.000,00	97,56	4.142.845.585,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	600.000.000,00	594.486.500,00	99,08	0,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	6.623.406.200,00	4.470.936.630,00	67,50	7.274.395.280,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.596.380.150,00	803.186.980,00	50,31	2.913.895.660,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	282.699.700,00	282.699.700,00	100,00	2.913.895.660,00
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	1.313.680.450,00	520.487.280,00	39,62	0,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	157.456.965,00	155.403.842,52	98,69	0,00
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	157.456.965,00	155.403.842,52	98,69	0,00
5.2.03.02.01.0002	Belanja Modal Tugu	157.456.965,00	155.403.842,52	98,69	0,00
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	172.357.745,00	164.250.000,00	95,29	0,00
5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	172.357.745,00	164.250.000,00	95,29	0,00
5.2.03.03.01.0005	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	172.357.745,00	164.250.000,00	95,29	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	7.001.365.900,00	3.208.395.541,60	45,82	2.910.704.262,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	7.001.365.900,00	3.208.395.541,60	45,82	2.910.704.262,00
5.2.03.04.01.0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	2.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	4.078.909.800,00	3.136.218.441,00	76,88	2.910.704.262,00
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	822.456.100,00	72.177.100,60	8,77	0,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	185.000.000,00	34.182.095,00	18,47	147.496.760,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	185.000.000,00	34.182.095,00	18,47	147.496.760,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	185.000.000,00	34.182.095,00	18,47	147.496.760,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	128.538.549.399,00	77.936.586.521,74	60,63	179.911.495.381,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	108.774.666.364,00	65.925.106.891,74	60,60	162.003.263.393,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	101.450.778.187,00	63.927.943.641,82	63,01	147.018.815.273,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	101.450.778.187,00	63.927.943.641,82	63,01	147.018.815.273,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	7.323.888.177,00	1.997.163.249,92	27,26	14.984.448.120,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	7.126.900.677,00	1.997.163.249,92	28,02	14.791.974.120,00
5.2.04.01.02.0011	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	196.987.500,00	0,00	0,00	192.474.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	12.216.624.920,00	8.182.685.970,00	66,97	15.210.259.425,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	895.824.283,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	0,00	0,00	522.662.880,00
5.2.04.02.01.0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi	0,00	0,00	0,00	373.161.403,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulungan Bencana Alam	10.003.806.920,00	7.050.321.780,00	70,47	10.093.657.742,00
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	10.003.806.920,00	7.050.321.780,00	70,47	10.093.657.742,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	68.470.000,00	0,00	0,00	4.220.777.400,00
5.2.04.02.06.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	68.470.000,00	0,00	0,00	4.220.777.400,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.144.348.000,00	1.132.364.190,00	52,80	0,00
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	2.144.348.000,00	1.132.364.190,00	52,80	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	5.488.580.000,00	2.335.732.660,00	42,55	0,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	5.210.833.000,00	2.062.297.480,00	39,57	0,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	5.210.833.000,00	2.062.297.480,00	39,57	0,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	277.747.000,00	273.435.180,00	98,44	0,00
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	277.747.000,00	273.435.180,00	98,44	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	2.058.678.115,00	1.493.061.000,00	72,52	2.697.972.563,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	2.058.678.115,00	1.493.061.000,00	72,52	2.697.972.563,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	2.058.678.115,00	1.493.061.000,00	72,52	2.697.972.563,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.380.431.856,00	958.889.461,00	69,46	305.796.700,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	200.000.000,00	38.612.682,00	19,30	0,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Cetak	200.000.000,00	38.612.682,00	19,30	0,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	161.227.783,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	2.618.000,00	2.610.720,00	99,72	0,00
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	31.148.617,00	31.030.050,00	99,61	0,00
5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	5.005.600,00	4.971.912,00	99,32	0,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	300.000.000,00	0,00	0,00	107.150.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	300.000.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	300.000.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	99.900.000,00
5.2.05.02.02.0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	0,00	0,00	0,00	99.900.000,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	198.646.700,00
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	198.646.700,00
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	198.646.700,00
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	128.683.856,00	128.541.900,00	99,88	0,00
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	128.683.856,00	128.541.900,00	99,88	0,00
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	128.683.856,00	128.541.900,00	99,88	0,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	751.748.000,00	791.734.879,00	105,31	0,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	664.679.000,00	741.963.200,00	111,62	0,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	664.679.000,00	741.963.200,00	111,62	0,00
5.2.05.89.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan	87.069.000,00	49.771.679,00	57,16	0,00
5.2.05.89.03.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	87.069.000,00	49.771.679,00	57,16	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.057.939.224,00	1.283.192.624,00	62,35	925.870.500,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	2.057.939.224,00	1.283.192.624,00	62,35	925.870.500,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2.057.939.224,00	1.283.192.624,00	62,35	925.870.500,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	945.005.300,00	550.131.000,00	58,21	925.870.500,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	1.112.933.924,00	733.061.624,00	65,86	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	434.056.815.945,39	235.657.542.291,31	54,29	446.286.590.042,40
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	94.864.820.364,00	0,00	0,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	94.864.820.364,00	0,00	0,00	0,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	94.864.820.364,00	0,00	0,00	0,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	94.864.820.364,00	0,00	0,00	0,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	94.864.820.364,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	94.864.820.364,00	0,00	0,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	119.344.429.141,00	214.531.922,00	0,17	135.490.900.922,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	989.949.241,00	214.531.922,00	21,67	0,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	886.812.239,00	198.079.174,00	22,33	0,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	886.812.239,00	198.079.174,00	22,33	0,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	886.812.239,00	198.079.174,00	22,33	0,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	103.137.002,00	16.452.748,00	15,95	0,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	103.137.002,00	16.452.748,00	15,95	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	103.137.002,00	16.452.748,00	15,95	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	118.354.479.900,00	0,00	0,00	135.490.900.922,00
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	357.000.000,00
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	357.000.000,00
5.4.02.03.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	357.000.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	118.354.479.900,00	0,00	0,00	135.133.900.922,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	117.994.479.900,00	0,00	0,00	105.332.117.922,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	117.994.479.900,00	0,00	0,00	105.332.117.922,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	360.000.000,00	0,00	0,00	29.801.783.000,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	360.000.000,00	0,00	0,00	29.801.783.000,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	119.344.429.141,00	214.531.922,00	0,17	135.490.900.922,00
	JUMLAH BELANJA	1.432.964.487.478,90	393.506.923.866,61	27,46	1.356.243.522.076,42
	SURPLUS/DEFISIT	(405.752.030.025,90)	(316.738.054.509,25)	78,06	127.656.173.578,03
6	PEMBIAYAAN DAERAH	406.022.138.025,90	0,00	0,00	308.365.964.447,87
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	436.022.138.025,90	0,00	0,00	308.365.964.447,87
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	436.022.138.025,90	0,00	0,00	308.365.964.447,87
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	431.769.845.596,90	0,00	0,00	307.952.816.406,90
6.1.01.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah	17.314.145.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.03.01.0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	17.314.145.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.03.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	414.455.700.596,90	0,00	0,00	307.952.816.406,90
6.1.01.03.03.0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	414.455.700.596,90	0,00	0,00	307.952.816.406,90
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	4.252.292.429,00	0,00	0,00	413.148.040,97
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	4.252.292.429,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	4.252.292.429,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	0,00	0,00	0,00	294.146.624,97
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	0,00	0,00	0,00	294.146.624,97
6.1.01.08.03	Sisa Dana Kapitasi	0,00	0,00	0,00	119.001.416,00
6.1.01.08.03.0001	Sisa Dana Kapitasi	0,00	0,00	0,00	119.001.416,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	436.022.138.025,90	0,00	0,00	308.365.964.447,87
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	30.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	30.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03.01.06	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang	30.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03.01.06.0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang	30.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	406.022.138.025,90	0,00	0,00	308.365.964.447,87
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	270.108.000,00	(316.738.054.509,25)	(117.263,48)	436.022.138.025,90

Tana Tidung, 4 September 2026
 BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



LAMPIRAN I . 3

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN
PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.01.2.22.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	677.828,00	677.828,00	0,00	
	1.01.2.22.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	677.828,00	677.828,00	0,00	
	1.01.2.22.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	677.828,00	677.828,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	0,00	677.828,00	677.828,00	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	262.362.992.930,00	65.289.869.254,00	(197.073.123.676,00)	24,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	136.671.083.850,01	20.839.022.779,00	(115.832.061.071,01)	15,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	437.197.549,00	78.095.000,00	(359.102.549,00)	17,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	402.437.549,00	78.095.000,00	(324.342.549,00)	19,40	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	402.437.549,00	78.095.000,00	(324.342.549,00)	19,40	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	402.437.549,00	78.095.000,00	(324.342.549,00)	19,40	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	34.760.000,00	0,00	(34.760.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	34.760.000,00	0,00	(34.760.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.760.000,00	0,00	(34.760.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	123.000.720.000,00	17.435.083.247,00	(105.565.636.753,00)	14,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	121.500.000.000,00	16.536.363.247,00	(104.963.636.753,00)	13,61	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	121.500.000.000,00	16.536.363.247,00	(104.963.636.753,00)	13,61	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	121.500.000.000,00	16.536.363.247,00	(104.963.636.753,00)	13,61	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	1.500.720.000,00	898.720.000,00	(602.000.000,00)	59,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.720.000,00	898.720.000,00	(602.000.000,00)	59,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.720.000,00	898.720.000,00	(602.000.000,00)	59,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	1.198.430.000,00	232.176.000,00	(966.254.000,00)	19,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0002		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	153.080.000,00	0,00	(153.080.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	153.080.000,00	0,00	(153.080.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.080.000,00	0,00	(153.080.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0004		PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	730.120.000,00	188.326.000,00	(541.794.000,00)	25,79	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	730.120.000,00	188.326.000,00	(541.794.000,00)	25,79	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	730.120.000,00	188.326.000,00	(541.794.000,00)	25,79	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0005		REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	315.230.000,00	43.850.000,00	(271.380.000,00)	13,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	315.230.000,00	43.850.000,00	(271.380.000,00)	13,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.230.000,00	43.850.000,00	(271.380.000,00)	13,91	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	215.058.000,00	53.645.000,00	(161.413.000,00)	24,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	215.058.000,00	53.645.000,00	(161.413.000,00)	24,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	215.058.000,00	53.645.000,00	(161.413.000,00)	24,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.058.000,00	53.645.000,00	(161.413.000,00)	24,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.205.890.366,01	382.912.900,00	(1.822.977.466,01)	17,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	400.400.799,35	148.082.000,00	(252.318.799,35)	36,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.189.264,35	26.632.000,00	(1.557.264,35)	94,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.189.264,35	26.632.000,00	(1.557.264,35)	94,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	372.211.535,00	121.450.000,00	(250.761.535,00)	32,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	372.211.535,00	121.450.000,00	(250.761.535,00)	32,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	815.023.566,66	136.328.900,00	(678.694.666,66)	16,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	815.023.566,66	136.328.900,00	(678.694.666,66)	16,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	815.023.566,66	136.328.900,00	(678.694.666,66)	16,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	210.412.000,00	22.542.000,00	(187.870.000,00)	10,71	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	210.412.000,00	22.542.000,00	(187.870.000,00)	10,71	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.412.000,00	22.542.000,00	(187.870.000,00)	10,71	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	50.000.000,00	400.000,00	(49.600.000,00)	0,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	400.000,00	(49.600.000,00)	0,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	400.000,00	(49.600.000,00)	0,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	730.054.000,00	75.560.000,00	(654.494.000,00)	10,34	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	730.054.000,00	75.560.000,00	(654.494.000,00)	10,34	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	730.054.000,00	75.560.000,00	(654.494.000,00)	10,34	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.491.670.000,00	1.872.000.000,00	(1.619.670.000,00)	53,61	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	3.491.670.000,00	1.872.000.000,00	(1.619.670.000,00)	53,61	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	3.491.670.000,00	1.872.000.000,00	(1.619.670.000,00)	53,61	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.491.670.000,00	1.872.000.000,00	(1.619.670.000,00)	53,61	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.566.627.935,00	670.520.632,00	(4.896.107.303,00)	12,04	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	20.000.000,00	1.680.000,00	(18.320.000,00)	8,40	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	1.680.000,00	(18.320.000,00)	8,40	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	1.680.000,00	(18.320.000,00)	8,40	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	351.399.000,00	67.629.592,00	(283.769.408,00)	19,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	351.399.000,00	67.629.592,00	(283.769.408,00)	19,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351.399.000,00	67.629.592,00	(283.769.408,00)	19,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	5.195.228.935,00	601.211.040,00	(4.594.017.895,00)	11,57	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.195.228.935,00	601.211.040,00	(4.594.017.895,00)	11,57	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.607.760.000,00	601.211.040,00	(4.006.548.960,00)	13,04	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1.05	Belanja Hibah	587.468.935,00	0,00	(587.468.935,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	555.490.000,00	114.590.000,00	(440.900.000,00)	20,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	500.000.000,00	85.070.000,00	(414.930.000,00)	17,01	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000,00	85.070.000,00	(414.930.000,00)	17,01	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	85.070.000,00	(414.930.000,00)	17,01	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	55.490.000,00	29.520.000,00	(25.970.000,00)	53,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	55.490.000,00	29.520.000,00	(25.970.000,00)	53,19	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.490.000,00	29.520.000,00	(25.970.000,00)	53,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	125.221.988.179,99	44.420.801.475,00	(80.801.186.704,99)	35,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	41.387.149.702,39	7.388.351.322,00	(33.998.798.380,39)	17,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0001		PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)	445.128.125,00	245.128.125,00	(200.000.000,00)	55,06	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	445.128.125,00	245.128.125,00	(200.000.000,00)	55,06	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	445.128.125,00	245.128.125,00	(200.000.000,00)	55,06	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	3.741.562.490,00	1.589.481.720,00	(2.152.080.770,00)	42,48	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	3.741.562.490,00	1.589.481.720,00	(2.152.080.770,00)	42,48	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.741.562.490,00	1.589.481.720,00	(2.152.080.770,00)	42,48	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0007		PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH/GURU/PENJAGA SEKOLAH	1.376.600.000,00	634.617.780,00	(741.982.220,00)	46,10	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	76.600.000,00	15.400.000,00	(61.200.000,00)	20,10	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.600.000,00	15.400.000,00	(61.200.000,00)	20,10	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	1.300.000.000,00	619.217.780,00	(680.782.220,00)	47,63	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0007	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.300.000.000,00	619.217.780,00	(680.782.220,00)	47,63	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0013		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH/GURU/PENJAGA SEKOLAH	238.000.000,00	17.506.600,00	(220.493.400,00)	7,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0013	5.2	BELANJA MODAL	238.000.000,00	17.506.600,00	(220.493.400,00)	7,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0013	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	238.000.000,00	17.506.600,00	(220.493.400,00)	7,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014		PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	354.969.000,00	253.384.986,00	(101.584.014,00)	71,38	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	354.969.000,00	253.384.986,00	(101.584.014,00)	71,38	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	354.969.000,00	253.384.986,00	(101.584.014,00)	71,38	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016		PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	1.083.238.000,00	135.496.280,00	(947.741.720,00)	12,50	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	119.358.000,00	38.873.000,00	(80.485.000,00)	32,56	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.358.000,00	38.873.000,00	(80.485.000,00)	32,56	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	5.2	BELANJA MODAL	963.880.000,00	96.623.280,00	(867.256.720,00)	10,02	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	663.880.000,00	96.623.280,00	(567.256.720,00)	14,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	4.074.836.000,00	120.950.000,00	(3.953.886.000,00)	2,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	4.074.836.000,00	120.950.000,00	(3.953.886.000,00)	2,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.074.836.000,00	120.950.000,00	(3.953.886.000,00)	2,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	58.050.000,00	57.750.000,00	(300.000,00)	99,48	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	58.050.000,00	57.750.000,00	(300.000,00)	99,48	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.050.000,00	57.750.000,00	(300.000,00)	99,48	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	1.114.586.000,00	686.854.098,00	(427.731.902,00)	61,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1	BELANJA OPERASI	1.114.586.000,00	686.854.098,00	(427.731.902,00)	61,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.114.586.000,00	686.854.098,00	(427.731.902,00)	61,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	532.190.000,00	406.658.180,00	(125.531.820,00)	76,41	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	532.190.000,00	406.658.180,00	(125.531.820,00)	76,41	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	532.190.000,00	406.658.180,00	(125.531.820,00)	76,41	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	4.246.996.000,00	0,00	(4.246.996.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	3.386.762.000,00	(8.000.000,00)	(3.394.762.000,00)	(0,23)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.899.552.000,00	(8.000.000,00)	(2.907.552.000,00)	(0,27)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.05	Belanja Hibah	487.210.000,00	0,00	(487.210.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2	BELANJA MODAL	860.234.000,00	8.000.000,00	(852.234.000,00)	0,92	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	555.245.000,00	8.000.000,00	(547.245.000,00)	1,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	304.989.000,00	0,00	(304.989.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	982.737.900,00	364.882.450,00	(617.855.450,00)	37,12	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	5.1	BELANJA OPERASI	982.737.900,00	364.882.450,00	(617.855.450,00)	37,12	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	982.737.900,00	364.882.450,00	(617.855.450,00)	37,12	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0035		PEMBINAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNTUK PENDIDIKAN	62.304.600,00	19.880.000,00	(42.424.600,00)	31,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0035	5.1	BELANJA OPERASI	62.304.600,00	19.880.000,00	(42.424.600,00)	31,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.304.600,00	19.880.000,00	(42.424.600,00)	31,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0036		PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK PENDIDIKAN	300.000.000,00	196.500.000,00	(103.500.000,00)	65,50	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0036	5.2	BELANJA MODAL	300.000.000,00	196.500.000,00	(103.500.000,00)	65,50	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0036	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	300.000.000,00	196.500.000,00	(103.500.000,00)	65,50	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0037		PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN	583.416.500,00	337.683.400,00	(245.733.100,00)	57,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0037	5.1	BELANJA OPERASI	583.416.500,00	337.683.400,00	(245.733.100,00)	57,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0037	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	583.416.500,00	337.683.400,00	(245.733.100,00)	57,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	58.130.000,00	42.283.000,00	(15.847.000,00)	72,73	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	5.1	BELANJA OPERASI	58.130.000,00	42.283.000,00	(15.847.000,00)	72,73	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.130.000,00	42.283.000,00	(15.847.000,00)	72,73	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0039		SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN	323.762.000,00	14.400.000,00	(309.362.000,00)	4,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0039	5.1	BELANJA OPERASI	323.762.000,00	14.400.000,00	(309.362.000,00)	4,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.762.000,00	14.400.000,00	(309.362.000,00)	4,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0041		FASILITASI KOMUNITAS BELAJAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	150.400.000,00	100.230.000,00	(50.170.000,00)	66,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0041	5.1	BELANJA OPERASI	150.400.000,00	100.230.000,00	(50.170.000,00)	66,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.170.000,00	0,00	(50.170.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0041	5.1.05	Belanja Hibah	100.230.000,00	100.230.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046		PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK	1.500.000.000,00	0,00	(1.500.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000.000,00	0,00	(1.500.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000.000,00	0,00	(1.500.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	4.552.572.587,39	157.323.100,00	(4.395.249.487,39)	3,45	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.1	BELANJA OPERASI	93.000.000,00	58.290.000,00	(34.710.000,00)	62,67	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.000.000,00	58.290.000,00	(34.710.000,00)	62,67	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.2	BELANJA MODAL	4.459.572.587,39	99.033.100,00	(4.360.539.487,39)	2,22	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.459.572.587,39	99.033.100,00	(4.360.539.487,39)	2,22	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048		REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	1.314.000.000,00	955.927.150,00	(358.072.850,00)	72,74	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	5.1	BELANJA OPERASI	1.251.000.000,00	921.445.000,00	(329.555.000,00)	73,65	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.251.000.000,00	921.445.000,00	(329.555.000,00)	73,65	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	5.2	BELANJA MODAL	63.000.000,00	34.482.150,00	(28.517.850,00)	54,73	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.000.000,00	34.482.150,00	(28.517.850,00)	54,73	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	882.210.000,00	169.450.000,00	(712.760.000,00)	19,20	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1	BELANJA OPERASI	841.810.000,00	169.450.000,00	(672.360.000,00)	20,12	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	841.810.000,00	169.450.000,00	(672.360.000,00)	20,12	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.2	BELANJA MODAL	40.400.000,00	0,00	(40.400.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	40.400.000,00	0,00	(40.400.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	415.000.000,00	376.466.900,00	(38.533.100,00)	90,71	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.1	BELANJA OPERASI	380.000.000,00	376.466.900,00	(3.533.100,00)	99,07	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.000.000,00	376.466.900,00	(3.533.100,00)	99,07	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2	BELANJA MODAL	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0054		PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR	12.012.050.000,00	(290.366.907,00)	(12.302.416.907,00)	(2,41)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0054	5.1	BELANJA OPERASI	10.528.060.000,00	(261.588.907,00)	(10.789.648.907,00)	(2,48)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0054	5.1.01	Belanja Pegawai	1.850.720.000,00	(63.110.000,00)	(1.913.830.000,00)	(3,41)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0054	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.727.040.000,00	(198.478.907,00)	(7.925.518.907,00)	(2,56)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0054	5.1.05	Belanja Hibah	950.300.000,00	0,00	(950.300.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0054	5.2	BELANJA MODAL	1.483.990.000,00	(28.778.000,00)	(1.512.768.000,00)	(1,93)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0054	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.351.625.000,00	(28.778.000,00)	(1.380.403.000,00)	(2,12)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0054	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	132.365.000,00	0,00	(132.365.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055		PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK	984.410.500,00	795.864.460,00	(188.546.040,00)	80,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055	5.1	BELANJA OPERASI	50.220.000,00	10.000.000,00	(40.220.000,00)	19,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.220.000,00	10.000.000,00	(40.220.000,00)	19,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055	5.2	BELANJA MODAL	934.190.500,00	785.864.460,00	(148.326.040,00)	84,12	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	934.190.500,00	785.864.460,00	(148.326.040,00)	84,12	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02		PENGLOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	72.710.415.760,00	32.695.961.357,00	(40.014.454.403,00)	44,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	30.386.759.600,00	13.225.132.405,00	(17.161.627.195,00)	43,52	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	509.471.900,00	303.231.500,00	(206.240.400,00)	59,51	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	509.471.900,00	303.231.500,00	(206.240.400,00)	59,51	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2	BELANJA MODAL	29.877.287.700,00	12.921.900.905,00	(16.955.386.795,00)	43,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.877.287.700,00	12.921.900.905,00	(16.955.386.795,00)	43,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024		REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	7.059.053.760,00	4.685.967.637,00	(2.373.086.123,00)	66,38	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	5.1	BELANJA OPERASI	1.499.085.000,00	1.175.405.100,00	(323.679.900,00)	78,40	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.499.085.000,00	1.175.405.100,00	(323.679.900,00)	78,40	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	5.2	BELANJA MODAL	5.559.968.760,00	3.510.562.537,00	(2.049.406.223,00)	63,13	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.968.760,00	0,00	(49.968.760,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.510.000.000,00	3.510.562.537,00	(1.999.437.463,00)	63,71	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025		PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	2.948.643.500,00	2.822.621.443,00	(126.022.057,00)	95,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	44.120.000,00	0,00	(44.120.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.120.000,00	0,00	(44.120.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.2	BELANJA MODAL	2.904.523.500,00	2.822.621.443,00	(81.902.057,00)	97,18	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.904.523.500,00	2.822.621.443,00	(81.902.057,00)	97,18	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027		PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	842.164.000,00	195.941.000,00	(646.223.000,00)	23,26	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027	5.1	BELANJA OPERASI	280.580.000,00	97.941.000,00	(182.639.000,00)	34,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.580.000,00	97.941.000,00	(182.639.000,00)	34,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027	5.2	BELANJA MODAL	561.584.000,00	98.000.000,00	(463.584.000,00)	17,45	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	561.584.000,00	98.000.000,00	(463.584.000,00)	17,45	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032		PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	9.745.800.000,00	6.065.933.509,00	(3.679.866.491,00)	62,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	5.1	BELANJA OPERASI	8.969.386.000,00	4.513.070.309,00	(4.456.315.691,00)	50,31	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	5.1.01	Belanja Pegawai	1.165.100.000,00	0,00	(1.165.100.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.408.686.000,00	3.941.692.009,00	(3.466.993.991,00)	53,20	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	5.1.05	Belanja Hibah	395.600.000,00	571.378.300,00	175.778.300,00	144,43	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	5.2	BELANJA MODAL	776.414.000,00	1.552.863.200,00	776.449.200,00	200,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	722.110.000,00	810.900.000,00	88.790.000,00	112,29	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	54.304.000,00	741.963.200,00	687.659.200,00	1.366,31	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	5.825.968.900,00	576.010.000,00	(5.249.958.900,00)	9,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	5.1	BELANJA OPERASI	5.825.968.900,00	576.010.000,00	(5.249.958.900,00)	9,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.825.968.900,00	576.010.000,00	(5.249.958.900,00)	9,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	4.300.114.000,00	200.000.000,00	(4.100.114.000,00)	4,65	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039	5.1	BELANJA OPERASI	4.300.114.000,00	200.000.000,00	(4.100.114.000,00)	4,65	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.300.114.000,00	200.000.000,00	(4.100.114.000,00)	4,65	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	1.580.130.000,00	935.938.308,00	(644.191.692,00)	59,23	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	1.580.130.000,00	935.938.308,00	(644.191.692,00)	59,23	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.580.130.000,00	935.938.308,00	(644.191.692,00)	59,23	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	2.653.276.000,00	1.561.806.180,00	(1.091.469.820,00)	58,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	2.653.276.000,00	1.561.806.180,00	(1.091.469.820,00)	58,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.653.276.000,00	1.561.806.180,00	(1.091.469.820,00)	58,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042		PENGLOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	2.385.050.000,00	0,00	(2.385.050.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	1.952.175.000,00	15.000.000,00	(1.937.175.000,00)	0,76	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.866.775.000,00	15.000.000,00	(1.851.775.000,00)	0,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.05	Belanja Hibah	85.400.000,00	0,00	(85.400.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2	BELANJA MODAL	432.875.000,00	(15.000.000,00)	(447.875.000,00)	(3,46)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	259.854.000,00	(15.000.000,00)	(274.854.000,00)	(5,77)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	173.021.000,00	0,00	(173.021.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	226.000.000,00	84.084.000,00	(141.916.000,00)	37,20	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043	5.1	BELANJA OPERASI	226.000.000,00	84.084.000,00	(141.916.000,00)	37,20	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.000.000,00	84.084.000,00	(141.916.000,00)	37,20	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0049		PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK PENDIDIKAN	122.550.000,00	25.134.000,00	(97.416.000,00)	20,50	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0049	5.1	BELANJA OPERASI	122.550.000,00	25.134.000,00	(97.416.000,00)	20,50	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0049	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.550.000,00	25.134.000,00	(97.416.000,00)	20,50	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	187.140.000,00	0,00	(187.140.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	5.1	BELANJA OPERASI	187.140.000,00	0,00	(187.140.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.140.000,00	0,00	(187.140.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0052		SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN	298.300.000,00	0,00	(298.300.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0052	5.1	BELANJA OPERASI	298.300.000,00	0,00	(298.300.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0052	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.300.000,00	0,00	(298.300.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	1.189.466.000,00	254.300.000,00	(935.166.000,00)	21,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	5.1	BELANJA OPERASI	1.189.466.000,00	254.300.000,00	(935.166.000,00)	21,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.189.466.000,00	254.300.000,00	(935.166.000,00)	21,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	260.000.000,00	0,00	(260.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.2	BELANJA MODAL	260.000.000,00	0,00	(260.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	260.000.000,00	0,00	(260.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0062		PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK	1.700.000.000,00	1.564.702.875,00	(135.297.125,00)	92,04	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0062	5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000.000,00	1.564.702.875,00	(135.297.125,00)	92,04	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0062	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000.000,00	1.564.702.875,00	(135.297.125,00)	92,04	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0067		PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK	1.000.000.000,00	498.390.000,00	(501.610.000,00)	49,83	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0067	5.2	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	498.390.000,00	(501.610.000,00)	49,83	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0067	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.000.000,00	498.390.000,00	(501.610.000,00)	49,83	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03		PENGLOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	9.052.735.057,60	3.254.146.908,00	(5.798.588.149,60)	35,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD	583.518.060,00	265.709.600,00	(317.808.460,00)	45,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	32.190.000,00	5.720.000,00	(26.470.000,00)	17,76	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.190.000,00	5.720.000,00	(26.470.000,00)	17,76	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	551.328.060,00	259.989.600,00	(291.338.460,00)	47,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.783.700,00	0,00	(96.783.700,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	454.544.360,00	259.989.600,00	(194.554.760,00)	57,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007		PENGADAAN MEBEL PAUD	97.781.800,00	0,00	(97.781.800,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	62.761.800,00	0,00	(62.761.800,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.761.800,00	0,00	(62.761.800,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007	5.2	BELANJA MODAL	35.020.000,00	0,00	(35.020.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.020.000,00	0,00	(35.020.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009		PENGADAAN PERLENGKAPAN PAUD	474.992.800,00	372.427.200,00	(102.565.600,00)	78,40	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	378.938.400,00	372.427.200,00	(6.511.200,00)	98,28	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	378.938.400,00	372.427.200,00	(6.511.200,00)	98,28	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009	5.2	BELANJA MODAL	96.054.400,00	0,00	(96.054.400,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.054.400,00	0,00	(96.054.400,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011		PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK PAUD	1.198.100.000,00	1.014.632.000,00	(183.468.000,00)	84,68	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011	5.1	BELANJA OPERASI	1.198.100.000,00	1.014.632.000,00	(183.468.000,00)	84,68	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	113.346.000,00	113.346.000,00	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011	5.1.05	Belanja Hibah	1.198.100.000,00	901.286.000,00	(296.814.000,00)	75,22	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD	1.602.433.200,00	346.780.000,00	(1.255.653.200,00)	21,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	5.1	BELANJA OPERASI	1.602.433.200,00	346.780.000,00	(1.255.653.200,00)	21,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.602.433.200,00	346.780.000,00	(1.255.653.200,00)	21,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD	187.907.000,00	13.418.000,00	(174.489.000,00)	7,14	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1	BELANJA OPERASI	187.907.000,00	13.418.000,00	(174.489.000,00)	7,14	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.907.000,00	13.418.000,00	(174.489.000,00)	7,14	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018		PENGLOLAAN DANA BOP PAUD	1.046.632.000,00	0,00	(1.046.632.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1	BELANJA OPERASI	1.046.632.000,00	0,00	(1.046.632.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.640.000,00	0,00	(113.640.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.05	Belanja Hibah	932.992.000,00	0,00	(932.992.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0019		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOP PAUD	293.338.000,00	0,00	(293.338.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0019	5.1	BELANJA OPERASI	293.338.000,00	0,00	(293.338.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.338.000,00	0,00	(293.338.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0024		PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN	341.790.000,00	108.981.101,00	(232.808.899,00)	31,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0024	5.1	BELANJA OPERASI	341.790.000,00	108.981.101,00	(232.808.899,00)	31,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.790.000,00	108.981.101,00	(232.808.899,00)	31,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0025		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	100.700.000,00	44.700.000,00	(56.000.000,00)	44,38	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0025	5.1	BELANJA OPERASI	100.700.000,00	44.700.000,00	(56.000.000,00)	44,38	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.700.000,00	44.700.000,00	(56.000.000,00)	44,38	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0026		SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN	316.880.000,00	53.295.000,00	(263.585.000,00)	16,81	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0026	5.1	BELANJA OPERASI	316.880.000,00	53.295.000,00	(263.585.000,00)	16,81	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.880.000,00	53.295.000,00	(263.585.000,00)	16,81	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0029		FASILITASI KOMUNITAS BELAJAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	133.608.000,00	14.410.000,00	(119.198.000,00)	10,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0029	5.1	BELANJA OPERASI	133.608.000,00	14.410.000,00	(119.198.000,00)	10,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.608.000,00	14.410.000,00	(119.198.000,00)	10,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0031		PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TIK	26.093.900,00	0,00	(26.093.900,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0031	5.2	BELANJA MODAL	26.093.900,00	0,00	(26.093.900,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0031	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.093.900,00	0,00	(26.093.900,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0034		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS PESERTA DIDIK	438.260.000,00	278.330.500,00	(159.929.500,00)	63,50	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0034	5.1	BELANJA OPERASI	438.260.000,00	278.330.500,00	(159.929.500,00)	63,50	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	438.260.000,00	278.330.500,00	(159.929.500,00)	63,50	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0039		BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN	317.909.600,00	226.011.507,00	(91.898.093,00)	71,09	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0039	5.1	BELANJA OPERASI	317.909.600,00	226.011.507,00	(91.898.093,00)	71,09	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317.909.600,00	226.011.507,00	(91.898.093,00)	71,09	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0041		PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK	650.085.000,00	25.620.000,00	(624.465.000,00)	3,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0041	5.1	BELANJA OPERASI	650.085.000,00	25.620.000,00	(624.465.000,00)	3,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.085.000,00	25.620.000,00	(624.465.000,00)	3,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0045		REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD	337.800.000,00	238.094.000,00	(99.706.000,00)	70,48	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0045	5.1	BELANJA OPERASI	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0045	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0045	5.2	BELANJA MODAL	320.300.000,00	238.094.000,00	(82.206.000,00)	74,33	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0045	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	320.300.000,00	238.094.000,00	(82.206.000,00)	74,33	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046		PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK PAUD	334.799.997,60	17.750.000,00	(317.049.997,60)	5,30	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	5.1	BELANJA OPERASI	334.799.997,60	17.750.000,00	(317.049.997,60)	5,30	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	334.799.997,60	17.750.000,00	(317.049.997,60)	5,30	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0047		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR PAUD	570.105.700,00	233.988.000,00	(336.117.700,00)	41,04	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0047	5.1	BELANJA OPERASI	570.105.700,00	233.988.000,00	(336.117.700,00)	41,04	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	570.105.700,00	233.988.000,00	(336.117.700,00)	41,04	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04		PENGLOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	2.071.687.660,00	1.082.341.888,00	(989.345.772,00)	52,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0010		PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK NONFORMAL/KESETARAAN	200.000.000,00	337.660.479,00	137.660.479,00	168,83	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	287.888.800,00	137.888.800,00	191,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	183.023.980,00	33.023.980,00	122,01	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0010	5.1.05	Belanja Hibah	0,00	104.864.820,00	104.864.820,00	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0010	5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.771.679,00	(228.321,00)	99,54	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0010	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	49.771.679,00	(228.321,00)	99,54	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	84.284.000,00	5.310.000,00	(78.974.000,00)	6,30	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015	5.1	BELANJA OPERASI	84.284.000,00	5.310.000,00	(78.974.000,00)	6,30	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.284.000,00	5.310.000,00	(78.974.000,00)	6,30	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	256.836.000,00	246.107.909,00	(10.728.091,00)	95,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	5.1	BELANJA OPERASI	256.836.000,00	246.107.909,00	(10.728.091,00)	95,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.836.000,00	246.107.909,00	(10.728.091,00)	95,82	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017		PENGLOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	344.710.000,00	0,00	(344.710.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1	BELANJA OPERASI	307.641.000,00	0,00	(307.641.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.711.000,00	0,00	(202.711.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.05	Belanja Hibah	104.930.000,00	0,00	(104.930.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.2	BELANJA MODAL	37.069.000,00	0,00	(37.069.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	37.069.000,00	0,00	(37.069.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0024		PEMBINAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNTUK PENDIDIKAN	29.806.000,00	20.700.000,00	(9.106.000,00)	69,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0024	5.1	BELANJA OPERASI	29.806.000,00	20.700.000,00	(9.106.000,00)	69,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.806.000,00	20.700.000,00	(9.106.000,00)	69,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0025		PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK PENDIDIKAN	35.908.000,00	7.000.000,00	(28.908.000,00)	19,49	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0025	5.1	BELANJA OPERASI	35.908.000,00	7.000.000,00	(28.908.000,00)	19,49	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.908.000,00	7.000.000,00	(28.908.000,00)	19,49	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0026		PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN	40.427.700,00	0,00	(40.427.700,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0026	5.1	BELANJA OPERASI	40.427.700,00	0,00	(40.427.700,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.427.700,00	0,00	(40.427.700,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0027		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	405.690.300,00	227.046.500,00	(178.643.800,00)	55,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0027	5.1	BELANJA OPERASI	405.690.300,00	227.046.500,00	(178.643.800,00)	55,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	405.690.300,00	227.046.500,00	(178.643.800,00)	55,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0028		SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN	7.900.000,00	6.970.000,00	(930.000,00)	88,22	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0028	5.1	BELANJA OPERASI	7.900.000,00	6.970.000,00	(930.000,00)	88,22	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	6.970.000,00	(930.000,00)	88,22	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0030		FASILITASI KOMUNITAS BELAJAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	40.756.000,00	2.240.000,00	(38.516.000,00)	5,49	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0030	5.1	BELANJA OPERASI	40.756.000,00	2.240.000,00	(38.516.000,00)	5,49	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.756.000,00	2.240.000,00	(38.516.000,00)	5,49	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0031		PEMBERIAN LAYANAN PENDAMPINGAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN UNTUK PENCEGAHAN PERUNDUNGAN, KEKERASAN, DAN INTOLERANSI	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0031	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0031	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0042		BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN	103.136.000,00	99.887.000,00	(3.249.000,00)	96,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0042	5.1	BELANJA OPERASI	103.136.000,00	99.887.000,00	(3.249.000,00)	96,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.136.000,00	99.887.000,00	(3.249.000,00)	96,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0045		PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA SEKOLAH	88.025.860,00	0,00	(88.025.860,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0045	5.1	BELANJA OPERASI	1.037.960,00	0,00	(1.037.960,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0045	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.037.960,00	0,00	(1.037.960,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0045	5.2	BELANJA MODAL	86.987.900,00	0,00	(86.987.900,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0045	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.517.900,00	0,00	(18.517.900,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0045	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.470.000,00	0,00	(68.470.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	269.724.000,00	129.420.000,00	(140.304.000,00)	47,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	5.1	BELANJA OPERASI	269.724.000,00	129.420.000,00	(140.304.000,00)	47,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.724.000,00	129.420.000,00	(140.304.000,00)	47,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0048		PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	74.838.000,00	0,00	(74.838.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0048	5.2	BELANJA MODAL	74.838.000,00	0,00	(74.838.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0048	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.838.000,00	0,00	(74.838.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0055		PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK NONFORMAL / KESETARAAN	29.645.800,00	0,00	(29.645.800,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0055	5.1	BELANJA OPERASI	7.475.000,00	0,00	(7.475.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0055	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.475.000,00	0,00	(7.475.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0055	5.2	BELANJA MODAL	22.170.800,00	0,00	(22.170.800,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0055	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.170.800,00	0,00	(22.170.800,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	335.607.000,00	30.045.000,00	(305.562.000,00)	8,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.01		PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR	162.775.000,00	0,00	(162.775.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0004		PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR	88.775.000,00	0,00	(88.775.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	88.775.000,00	0,00	(88.775.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.775.000,00	0,00	(88.775.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0007		PENYUSUNAN KOMPETENSI DASAR/CAPAIAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR	74.000.000,00	0,00	(74.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	74.000.000,00	0,00	(74.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.000.000,00	0,00	(74.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.02		PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL	172.832.000,00	30.045.000,00	(142.787.000,00)	17,38	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.02.0006		PENYUSUNAN KOMPETENSI DASAR/CAPAIAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL	172.832.000,00	30.045.000,00	(142.787.000,00)	17,38	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	172.832.000,00	30.045.000,00	(142.787.000,00)	17,38	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.832.000,00	30.045.000,00	(142.787.000,00)	17,38	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	45.613.900,00	0,00	(45.613.900,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01		PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	45.613.900,00	0,00	(45.613.900,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001		PERHITUNGAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002		PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	20.613.900,00	0,00	(20.613.900,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.613.900,00	0,00	(20.613.900,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.613.900,00	0,00	(20.613.900,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.06		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	88.700.000,00	0,00	(88.700.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.06.2.01		PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA YANG PENUTURANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	88.700.000,00	0,00	(88.700.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.06.2.01.0007		PENYUSUNAN MODUL DAN BAHAN AJAR BAHASA DAERAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	88.700.000,00	0,00	(88.700.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.06.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	88.700.000,00	0,00	(88.700.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.06.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.700.000,00	0,00	(88.700.000,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	262.362.992.930,00	65.289.869.254,00	(197.073.123.676,00)	24,88	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(262.362.992.930,00)	(65.289.191.426,00)	197.073.801.504,00	24,88	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(262.362.992.930,00)	(65.289.191.426,00)	197.073.801.504,00	24,88	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.01.2.22.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	677.828,00	677.828,00	0,00	
	1.01.2.22.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	677.828,00	677.828,00	0,00	
	1.01.2.22.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	677.828,00	677.828,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	0,00	677.828,00	677.828,00	0,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	30.283.379.166,00	14.111.795.881,00	(16.171.583.285,00)	46,59	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	11.220.464.965,00	3.141.362.121,00	(8.079.102.844,00)	27,99	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01		PENGLOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.626.529.100,00	0,00	(1.626.529.100,00)	0,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001		PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN	1.266.091.800,00	0,00	(1.266.091.800,00)	0,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.253.091.800,00	0,00	(1.253.091.800,00)	0,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.253.091.800,00	0,00	(1.253.091.800,00)	0,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	0,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	0,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0002		PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA KEBUDAYAAN	360.437.300,00	0,00	(360.437.300,00)	0,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	360.437.300,00	0,00	(360.437.300,00)	0,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.437.300,00	0,00	(360.437.300,00)	0,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02		PELESTARIAN Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	564.819.000,00	0,00	(564.819.000,00)	0,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0001		PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN Tradisi Budaya	201.352.000,00	0,00	(201.352.000,00)	0,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	201.352.000,00	0,00	(201.352.000,00)	0,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.352.000,00	0,00	(201.352.000,00)	0,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0002		PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA Tradisional	363.467.000,00	0,00	(363.467.000,00)	0,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	363.467.000,00	0,00	(363.467.000,00)	0,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	363.467.000,00	0,00	(363.467.000,00)	0,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03		PEMBINAAN LEMBAGA ADAT Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.029.116.865,00	3.141.362.121,00	(5.887.754.744,00)	34,79	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03.0001		PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN LEMBAGA ADAT	197.284.000,00	0,00	(197.284.000,00)	0,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	197.284.000,00	0,00	(197.284.000,00)	0,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.284.000,00	0,00	(197.284.000,00)	0,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03.0003		PENYEDIAAN Sarana dan Prasarana Pembinaan LEMBAGA ADAT	8.831.832.865,00	3.141.362.121,00	(5.690.470.744,00)	35,56	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	461.808.600,00	38.791.000,00	(423.017.600,00)	8,39	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	461.808.600,00	38.791.000,00	(423.017.600,00)	8,39	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	8.370.024.265,00	3.102.571.121,00	(5.267.453.144,00)	37,06	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	666.767.590,00	0,00	(666.767.590,00)	0,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.703.256.675,00	3.102.571.121,00	(4.600.685.554,00)	40,27	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	3.663.846.500,00	2.338.260.260,00	(1.325.586.240,00)	63,81	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01		PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.663.846.500,00	2.338.260.260,00	(1.325.586.240,00)	63,81	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0001		PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL	320.624.000,00	23.290.800,00	(297.333.200,00)	7,26	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	320.624.000,00	23.290.800,00	(297.333.200,00)	7,26	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.624.000,00	23.290.800,00	(297.333.200,00)	7,26	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0002		STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN TUNTUTAN	748.471.500,00	92.044.000,00	(656.427.500,00)	12,29	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	748.471.500,00	92.044.000,00	(656.427.500,00)	12,29	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	748.471.500,00	92.044.000,00	(656.427.500,00)	12,29	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0003		PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA LEMBAGA KESENIAN TRADISIONAL	2.594.751.000,00	2.222.925.460,00	(371.825.540,00)	85,67	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.594.751.000,00	2.222.925.460,00	(371.825.540,00)	85,67	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.594.751.000,00	2.222.925.460,00	(371.825.540,00)	85,67	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	14.810.207.581,00	8.485.673.500,00	(6.324.534.081,00)	57,29	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.04.2.01		PEMBINAAN SEJARAH LOKAL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.810.207.581,00	8.485.673.500,00	(6.324.534.081,00)	57,29	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.04.2.01.0002		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBINAAN SEJARAH	14.810.207.581,00	8.485.673.500,00	(6.324.534.081,00)	57,29	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	161.384.000,00	105.490.000,00	(55.894.000,00)	65,36	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.384.000,00	105.490.000,00	(55.894.000,00)	65,36	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.04.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	14.648.823.581,00	8.380.183.500,00	(6.268.640.081,00)	57,20	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.04.2.01.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.648.823.581,00	8.380.183.500,00	(6.268.640.081,00)	57,20	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	263.694.020,00	146.500.000,00	(117.194.020,00)	55,55	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01		PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	78.917.200,00	33.500.000,00	(45.417.200,00)	42,44	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01.0002		PENETAPAN CAGAR BUDAYA	78.917.200,00	33.500.000,00	(45.417.200,00)	42,44	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	78.917.200,00	33.500.000,00	(45.417.200,00)	42,44	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.917.200,00	33.500.000,00	(45.417.200,00)	42,44	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02		PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	184.776.820,00	113.000.000,00	(71.776.820,00)	61,15	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0001		PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA	184.776.820,00	113.000.000,00	(71.776.820,00)	61,15	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	184.776.820,00	113.000.000,00	(71.776.820,00)	61,15	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.776.820,00	113.000.000,00	(71.776.820,00)	61,15	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	325.166.100,00	0,00	(325.166.100,00)	0,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01		PENGELOLAAN MUSEUM KABUPATEN/KOTA	325.166.100,00	0,00	(325.166.100,00)	0,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0002		PEMBINAAN DAN PENINGKATAN MUTU DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PERMUSEUMAN	325.166.100,00	0,00	(325.166.100,00)	0,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	325.166.100,00	0,00	(325.166.100,00)	0,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.166.100,00	0,00	(325.166.100,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	30.283.379.166,00	14.111.795.881,00	(16.171.583.285,00)	46,59	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(30.283.379.166,00)	(14.111.118.053,00)	16.172.261.113,00	46,59	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(30.283.379.166,00)	(14.111.118.053,00)	16.172.261.113,00	46,59	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Dinas Kesehatan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.2.14.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	9.952.808.000,00	2.410.110.711,69	(7.542.697.288,31)	24,21	
	1.02.2.14.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.820.808.000,00	2.338.313.132,69	(7.482.494.867,31)	23,80	
	1.02.2.14.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.155.000.000,00	1.985.362.834,00	830.362.834,00	171,89	
	1.02.2.14.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.665.808.000,00	352.950.298,69	(8.312.857.701,31)	4,07	
	1.02.2.14.0.00.01.0000		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	132.000.000,00	71.797.579,00	(60.202.421,00)	54,39	
	1.02.2.14.0.00.01.0000		4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	132.000.000,00	71.797.579,00	(60.202.421,00)	54,39	
				JUMLAH PENDAPATAN	9.952.808.000,00	2.410.110.711,69	(7.542.697.288,31)	24,21	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	139.557.637.050,00	32.140.331.699,00	(107.417.305.351,00)	23,03	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	87.440.886.840,00	15.976.919.966,00	(71.463.966.874,00)	18,27	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	702.199.590,00	215.663.512,00	(486.536.078,00)	30,71	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	519.354.700,00	65.020.000,00	(454.334.700,00)	12,51	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	519.354.700,00	65.020.000,00	(454.334.700,00)	12,51	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	519.354.700,00	65.020.000,00	(454.334.700,00)	12,51	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	182.844.890,00	150.643.512,00	(32.201.378,00)	82,38	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	182.844.890,00	150.643.512,00	(32.201.378,00)	82,38	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.844.890,00	150.643.512,00	(32.201.378,00)	82,38	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	66.945.436.606,00	7.744.924.858,00	(59.200.511.748,00)	11,56	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	66.114.876.606,00	7.486.884.858,00	(58.627.991.748,00)	11,32	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	66.114.876.606,00	7.486.884.858,00	(58.627.991.748,00)	11,32	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	66.114.876.606,00	7.486.884.858,00	(58.627.991.748,00)	11,32	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	830.560.000,00	258.040.000,00	(572.520.000,00)	31,06	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	830.560.000,00	258.040.000,00	(572.520.000,00)	31,06	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	830.560.000,00	258.040.000,00	(572.520.000,00)	31,06	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	56.920.000,00	0,00	(56.920.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0001		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	3.150.000,00	0,00	(3.150.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.150.000,00	0,00	(3.150.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	0,00	(3.150.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0005		REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	53.770.000,00	0,00	(53.770.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	53.770.000,00	0,00	(53.770.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.770.000,00	0,00	(53.770.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	30.450.000,00	20.560.000,00	(9.890.000,00)	67,52	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0005		MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	30.450.000,00	20.560.000,00	(9.890.000,00)	67,52	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	30.450.000,00	20.560.000,00	(9.890.000,00)	67,52	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.450.000,00	20.560.000,00	(9.890.000,00)	67,52	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.015.916.143,00	451.822.119,00	(1.564.094.024,00)	22,41	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	262.823.225,00	184.763.365,00	(78.059.860,00)	70,29	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	262.823.225,00	184.763.365,00	(78.059.860,00)	70,29	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	262.823.225,00	184.763.365,00	(78.059.860,00)	70,29	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	335.186.918,00	46.947.860,00	(288.239.058,00)	14,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	335.186.918,00	46.947.860,00	(288.239.058,00)	14,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.186.918,00	46.947.860,00	(288.239.058,00)	14,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	32.682.000,00	2.887.500,00	(29.794.500,00)	8,83	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	32.682.000,00	2.887.500,00	(29.794.500,00)	8,83	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.682.000,00	2.887.500,00	(29.794.500,00)	8,83	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.385.224.000,00	217.223.394,00	(1.168.000.606,00)	15,68	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.385.224.000,00	217.223.394,00	(1.168.000.606,00)	15,68	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.385.224.000,00	217.223.394,00	(1.168.000.606,00)	15,68	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	961.275.000,00	851.240.000,00	(110.035.000,00)	88,55	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	531.401.000,00	513.800.000,00	(17.601.000,00)	96,68	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	531.401.000,00	513.800.000,00	(17.601.000,00)	96,68	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	531.401.000,00	513.800.000,00	(17.601.000,00)	96,68	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	429.874.000,00	337.440.000,00	(92.434.000,00)	78,49	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0010	5.1	BELANJA OPERASI	28.800.000,00	0,00	(28.800.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	0,00	(28.800.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	401.074.000,00	337.440.000,00	(63.634.000,00)	84,13	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	401.074.000,00	337.440.000,00	(63.634.000,00)	84,13	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.425.541.500,00	195.715.565,00	(2.229.825.935,00)	8,06	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	27.479.500,00	3.600.000,00	(23.879.500,00)	13,10	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	27.479.500,00	3.600.000,00	(23.879.500,00)	13,10	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.479.500,00	3.600.000,00	(23.879.500,00)	13,10	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	515.610.000,00	71.182.445,00	(444.427.555,00)	13,80	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	515.610.000,00	71.182.445,00	(444.427.555,00)	13,80	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	515.610.000,00	71.182.445,00	(444.427.555,00)	13,80	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.882.452.000,00	120.933.120,00	(1.761.518.880,00)	6,42	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.882.452.000,00	120.933.120,00	(1.761.518.880,00)	6,42	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.882.452.000,00	120.933.120,00	(1.761.518.880,00)	6,42	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	782.340.000,00	328.834.860,00	(453.505.140,00)	42,03	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	550.340.000,00	135.515.860,00	(414.824.140,00)	24,62	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	550.340.000,00	135.515.860,00	(414.824.140,00)	24,62	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.340.000,00	135.515.860,00	(414.824.140,00)	24,62	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	232.000.000,00	193.319.000,00	(38.681.000,00)	83,32	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000,00	158.271.000,00	(1.729.000,00)	98,91	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	158.271.000,00	(1.729.000,00)	98,91	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	72.000.000,00	35.048.000,00	(36.952.000,00)	48,67	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.000.000,00	35.048.000,00	(36.952.000,00)	48,67	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	13.520.808.001,00	6.168.159.052,00	(7.352.648.949,00)	45,61	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	13.520.808.001,00	6.168.159.052,00	(7.352.648.949,00)	45,61	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.638.885.997,00	5.836.400.987,00	(6.802.485.010,00)	46,17	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.201.468.577,00	110.489.301,00	(5.090.979.276,00)	2,12	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.437.417.420,00	5.725.911.686,00	(1.711.505.734,00)	76,98	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	881.922.004,00	331.758.065,00	(550.163.939,00)	37,61	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	696.922.004,00	297.575.970,00	(399.346.034,00)	42,69	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	185.000.000,00	34.182.095,00	(150.817.905,00)	18,47	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	48.400.319.475,00	15.496.944.657,00	(32.903.374.818,00)	32,01	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.002.150.693,00	12.311.934.959,00	(13.690.215.734,00)	47,34	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0001		PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BESERTA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNGNYA	3.223.556.000,00	1.049.681.888,00	(2.173.874.112,00)	32,56	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	3.223.556.000,00	1.049.681.888,00	(2.173.874.112,00)	32,56	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.223.556.000,00	1.049.681.888,00	(2.173.874.112,00)	32,56	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003		PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	10.322.240.300,00	6.244.987.556,00	(4.077.252.744,00)	60,50	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	54.265.000,00	41.115.000,00	(13.150.000,00)	75,76	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.265.000,00	41.115.000,00	(13.150.000,00)	75,76	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	10.267.975.300,00	6.203.872.556,00	(4.064.102.744,00)	60,41	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.267.975.300,00	6.203.872.556,00	(4.064.102.744,00)	60,41	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0004		PEMBANGUNAN RUMAH DINAS TENAGA KESEHATAN	3.149.273.443,00	1.310.576.800,00	(1.838.696.643,00)	41,61	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	24.100.000,00	22.185.000,00	(1.915.000,00)	92,05	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.100.000,00	22.185.000,00	(1.915.000,00)	92,05	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	3.125.173.443,00	1.288.391.800,00	(1.836.781.643,00)	41,22	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.125.173.443,00	1.288.391.800,00	(1.836.781.643,00)	41,22	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0008		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH SAKIT	1.565.368.400,00	1.262.382.000,00	(302.986.400,00)	80,64	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	951.200.000,00	899.751.000,00	(51.449.000,00)	94,59	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	951.200.000,00	899.751.000,00	(51.449.000,00)	94,59	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	614.168.400,00	362.631.000,00	(251.537.400,00)	59,04	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.832.000,00	102.675.000,00	(2.157.000,00)	97,94	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0008	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	509.336.400,00	259.956.000,00	(249.380.400,00)	51,03	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	218.050.000,00	18.200.000,00	(199.850.000,00)	8,34	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	218.050.000,00	18.200.000,00	(199.850.000,00)	8,34	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.050.000,00	18.200.000,00	(199.850.000,00)	8,34	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014		PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	3.058.087.683,00	1.681.314.816,00	(1.376.772.867,00)	54,97	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	53.657.000,00	41.760.000,00	(11.897.000,00)	77,82	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.657.000,00	41.760.000,00	(11.897.000,00)	77,82	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	3.004.430.683,00	1.639.554.816,00	(1.364.875.867,00)	54,57	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.004.430.683,00	1.639.554.816,00	(1.364.875.867,00)	54,57	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020		PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	475.064.000,00	9.300.000,00	(465.764.000,00)	1,95	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	445.064.000,00	9.300.000,00	(435.764.000,00)	2,08	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	445.064.000,00	9.300.000,00	(435.764.000,00)	2,08	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020	5.2	BELANJA MODAL	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023		PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	3.858.573.867,00	684.271.899,00	(3.174.301.968,00)	17,73	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	3.840.183.767,00	684.271.899,00	(3.155.911.868,00)	17,81	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.840.183.767,00	684.271.899,00	(3.155.911.868,00)	17,81	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.2	BELANJA MODAL	18.390.100,00	0,00	(18.390.100,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.390.100,00	0,00	(18.390.100,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0026		DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN KE FASILITAS KESEHATAN	131.937.000,00	51.220.000,00	(80.717.000,00)	38,82	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	131.937.000,00	51.220.000,00	(80.717.000,00)	38,82	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.937.000,00	51.220.000,00	(80.717.000,00)	38,82	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.852.978.682,00	3.004.560.905,00	(18.848.417.777,00)	13,74	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	411.628.282,00	3.780.000,00	(407.848.282,00)	0,91	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	411.628.282,00	3.780.000,00	(407.848.282,00)	0,91	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	411.628.282,00	3.780.000,00	(407.848.282,00)	0,91	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	153.656.000,00	29.808.000,00	(123.848.000,00)	19,39	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	153.656.000,00	29.808.000,00	(123.848.000,00)	19,39	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.656.000,00	29.808.000,00	(123.848.000,00)	19,39	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	107.277.200,00	46.763.318,00	(60.513.882,00)	43,59	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	96.827.200,00	36.362.618,00	(60.464.582,00)	37,55	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.827.200,00	36.362.618,00	(60.464.582,00)	37,55	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	10.450.000,00	10.400.700,00	(49.300,00)	99,52	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.450.000,00	10.400.700,00	(49.300,00)	99,52	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA	27.807.000,00	0,00	(27.807.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	20.392.000,00	0,00	(20.392.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.392.000,00	0,00	(20.392.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	7.415.000,00	0,00	(7.415.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.415.000,00	0,00	(7.415.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	258.696.700,00	2.240.000,00	(256.456.700,00)	0,86	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	258.696.700,00	2.240.000,00	(256.456.700,00)	0,86	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.696.700,00	2.240.000,00	(256.456.700,00)	0,86	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	7.860.000,00	0,00	(7.860.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.860.000,00	0,00	(7.860.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.860.000,00	0,00	(7.860.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	111.100.000,00	0,00	(111.100.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	111.100.000,00	0,00	(111.100.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.100.000,00	0,00	(111.100.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	7.860.000,00	0,00	(7.860.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	7.860.000,00	0,00	(7.860.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.860.000,00	0,00	(7.860.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	42.520.000,00	0,00	(42.520.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	42.520.000,00	0,00	(42.520.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.520.000,00	0,00	(42.520.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	62.290.000,00	0,00	(62.290.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	62.290.000,00	0,00	(62.290.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.290.000,00	0,00	(62.290.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	25.376.000,00	6.010.000,00	(19.366.000,00)	23,68	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	25.376.000,00	6.010.000,00	(19.366.000,00)	23,68	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.376.000,00	6.010.000,00	(19.366.000,00)	23,68	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0013		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)	72.634.000,00	52.610.000,00	(20.024.000,00)	72,43	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	72.634.000,00	52.610.000,00	(20.024.000,00)	72,43	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.634.000,00	52.610.000,00	(20.024.000,00)	72,43	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	1.919.997.392,00	117.233.712,00	(1.802.763.680,00)	6,10	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	1.919.997.392,00	117.233.712,00	(1.802.763.680,00)	6,10	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.919.997.392,00	117.233.712,00	(1.802.763.680,00)	6,10	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	63.596.000,00	6.930.000,00	(56.666.000,00)	10,89	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	63.596.000,00	6.930.000,00	(56.666.000,00)	10,89	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.596.000,00	6.930.000,00	(56.666.000,00)	10,89	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	697.301.600,00	515.503.000,00	(181.798.600,00)	73,92	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	678.911.500,00	515.503.000,00	(163.408.500,00)	75,93	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	678.911.500,00	515.503.000,00	(163.408.500,00)	75,93	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.2	BELANJA MODAL	18.390.100,00	0,00	(18.390.100,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.390.100,00	0,00	(18.390.100,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018		PENGLOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	92.436.800,00	13.500.000,00	(78.936.800,00)	14,60	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	92.436.800,00	13.500.000,00	(78.936.800,00)	14,60	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.436.800,00	13.500.000,00	(78.936.800,00)	14,60	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020		PENGLOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	480.401.200,00	0,00	(480.401.200,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	480.401.200,00	0,00	(480.401.200,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.401.200,00	0,00	(480.401.200,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0021		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	48.960.000,00	0,00	(48.960.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	48.960.000,00	0,00	(48.960.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.960.000,00	0,00	(48.960.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0022		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA	45.242.700,00	0,00	(45.242.700,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0022	5.1	BELANJA OPERASI	45.242.700,00	0,00	(45.242.700,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.242.700,00	0,00	(45.242.700,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	632.321.300,00	71.410.000,00	(560.911.300,00)	11,29	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	632.321.300,00	71.410.000,00	(560.911.300,00)	11,29	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	632.321.300,00	71.410.000,00	(560.911.300,00)	11,29	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026		PENGLOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	5.017.460.000,00	0,00	(5.017.460.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	5.017.460.000,00	0,00	(5.017.460.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.017.460.000,00	0,00	(5.017.460.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028		PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL	36.093.000,00	18.783.000,00	(17.310.000,00)	52,04	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	5.1	BELANJA OPERASI	36.093.000,00	18.783.000,00	(17.310.000,00)	52,04	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.093.000,00	18.783.000,00	(17.310.000,00)	52,04	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029		PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT	55.746.000,00	0,00	(55.746.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029	5.1	BELANJA OPERASI	55.746.000,00	0,00	(55.746.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.746.000,00	0,00	(55.746.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032		OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT	9.580.340.774,00	1.854.649.875,00	(7.725.690.899,00)	19,35	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.1	BELANJA OPERASI	9.376.016.374,00	1.650.337.725,00	(7.725.678.649,00)	17,60	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.1.01	Belanja Pegawai	79.200.000,00	0,00	(79.200.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.296.816.374,00	1.650.337.725,00	(7.646.478.649,00)	17,75	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.2	BELANJA MODAL	204.324.400,00	204.312.150,00	(12.250,00)	99,99	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	204.324.400,00	204.312.150,00	(12.250,00)	99,99	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	975.491.607,00	0,00	(975.491.607,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	975.491.607,00	0,00	(975.491.607,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	975.491.607,00	0,00	(975.491.607,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034		OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	620.807.200,00	256.480.000,00	(364.327.200,00)	41,31	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1	BELANJA OPERASI	620.807.200,00	256.480.000,00	(364.327.200,00)	41,31	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	620.807.200,00	256.480.000,00	(364.327.200,00)	41,31	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	10.184.010,00	0,00	(10.184.010,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	10.184.010,00	0,00	(10.184.010,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.184.010,00	0,00	(10.184.010,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0044		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	83.500.917,00	0,00	(83.500.917,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	83.500.917,00	0,00	(83.500.917,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.500.917,00	0,00	(83.500.917,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046		PENGLOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	198.093.000,00	8.860.000,00	(189.233.000,00)	4,47	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	198.093.000,00	8.860.000,00	(189.233.000,00)	4,47	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.093.000,00	8.860.000,00	(189.233.000,00)	4,47	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.03		PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	156.592.100,00	63.001.838,00	(93.590.262,00)	40,23	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002		PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	156.592.100,00	63.001.838,00	(93.590.262,00)	40,23	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	76.586.900,00	63.001.838,00	(13.585.062,00)	82,26	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.586.900,00	63.001.838,00	(13.585.062,00)	82,26	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	80.005.200,00	0,00	(80.005.200,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.005.200,00	0,00	(80.005.200,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.04		PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	388.598.000,00	117.446.955,00	(271.151.045,00)	30,22	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003		PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN	106.754.000,00	37.487.800,00	(69.266.200,00)	35,11	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	106.754.000,00	37.487.800,00	(69.266.200,00)	35,11	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.754.000,00	37.487.800,00	(69.266.200,00)	35,11	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0004		PENYIAPAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	281.844.000,00	79.959.155,00	(201.884.845,00)	28,37	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	281.844.000,00	79.959.155,00	(201.884.845,00)	28,37	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.844.000,00	79.959.155,00	(201.884.845,00)	28,37	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.903.682.992,00	361.722.800,00	(2.541.960.192,00)	12,45	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.03.2.02		PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	2.317.860.800,00	328.171.800,00	(1.989.689.000,00)	14,15	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0001		PERENCANAAN DAN DISTRIBUSI SERTA PEMERATAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	10.876.000,00	1.770.000,00	(9.106.000,00)	16,27	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.876.000,00	1.770.000,00	(9.106.000,00)	16,27	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.876.000,00	1.770.000,00	(9.106.000,00)	16,27	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0002		PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR	2.279.028.800,00	318.711.800,00	(1.960.317.000,00)	13,98	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.279.028.800,00	318.711.800,00	(1.960.317.000,00)	13,98	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.279.028.800,00	318.711.800,00	(1.960.317.000,00)	13,98	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	27.956.000,00	7.690.000,00	(20.266.000,00)	27,50	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	27.956.000,00	7.690.000,00	(20.266.000,00)	27,50	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.956.000,00	7.690.000,00	(20.266.000,00)	27,50	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.03.2.03		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	585.822.192,00	33.551.000,00	(552.271.192,00)	5,72	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	585.822.192,00	33.551.000,00	(552.271.192,00)	5,72	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	585.822.192,00	33.551.000,00	(552.271.192,00)	5,72	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	585.822.192,00	33.551.000,00	(552.271.192,00)	5,72	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	403.401.676,00	59.640.876,00	(343.760.800,00)	14,78	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.04.2.01		PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	25.768.600,00	8.998.600,00	(16.770.000,00)	34,92	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	25.768.600,00	8.998.600,00	(16.770.000,00)	34,92	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.768.600,00	8.998.600,00	(16.770.000,00)	34,92	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.768.600,00	8.998.600,00	(16.770.000,00)	34,92	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.04.2.03		PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	112.457.640,00	10.500.000,00	(101.957.640,00)	9,33	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	112.457.640,00	10.500.000,00	(101.957.640,00)	9,33	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	112.457.640,00	10.500.000,00	(101.957.640,00)	9,33	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.457.640,00	10.500.000,00	(101.957.640,00)	9,33	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.04.2.04		PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM)	100.141.000,00	37.835.276,00	(62.305.724,00)	37,78	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.04.2.04.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM)	100.141.000,00	37.835.276,00	(62.305.724,00)	37,78	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.04.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	100.141.000,00	37.835.276,00	(62.305.724,00)	37,78	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.04.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.141.000,00	37.835.276,00	(62.305.724,00)	37,78	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.04.2.06		PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	165.034.436,00	2.307.000,00	(162.727.436,00)	1,39	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001		PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN-MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN	165.034.436,00	2.307.000,00	(162.727.436,00)	1,39	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	165.034.436,00	2.307.000,00	(162.727.436,00)	1,39	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.034.436,00	2.307.000,00	(162.727.436,00)	1,39	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	409.346.067,00	245.103.400,00	(164.242.667,00)	59,87	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.05.2.01		ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	193.105.667,00	170.614.400,00	(22.491.267,00)	88,35	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001		PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	193.105.667,00	170.614.400,00	(22.491.267,00)	88,35	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	193.105.667,00	170.614.400,00	(22.491.267,00)	88,35	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.105.667,00	100.614.400,00	(22.491.267,00)	81,73	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.05.2.02		PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	72.955.400,00	34.330.000,00	(38.625.400,00)	47,05	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001		PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT	72.955.400,00	34.330.000,00	(38.625.400,00)	47,05	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	72.955.400,00	34.330.000,00	(38.625.400,00)	47,05	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.955.400,00	34.330.000,00	(38.625.400,00)	47,05	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	143.285.000,00	40.159.000,00	(103.126.000,00)	28,02	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	143.285.000,00	40.159.000,00	(103.126.000,00)	28,02	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	143.285.000,00	40.159.000,00	(103.126.000,00)	28,02	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.285.000,00	40.159.000,00	(103.126.000,00)	28,02	
				JUMLAH BELANJA	139.557.637.050,00	32.140.331.699,00	(107.417.305.351,00)	23,03	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(129.604.829.050,00)	(29.730.220.987,31)	99.874.608.062,69	22,93	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(129.604.829.050,00)	(29.730.220.987,31)	99.874.608.062,69	22,93	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Organisasi : Dinas Kesehatan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.2.14.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	9.952.808.000,00	2.410.110.711,69	(7.542.697.288,31)	24,21	
	1.02.2.14.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.820.808.000,00	2.338.313.132,69	(7.482.494.867,31)	23,80	
	1.02.2.14.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.155.000.000,00	1.985.362.834,00	830.362.834,00	171,89	
	1.02.2.14.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.665.808.000,00	352.950.298,69	(8.312.857.701,31)	4,07	
	1.02.2.14.0.00.01.0000		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	132.000.000,00	71.797.579,00	(60.202.421,00)	54,39	
	1.02.2.14.0.00.01.0000		4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	132.000.000,00	71.797.579,00	(60.202.421,00)	54,39	
				JUMLAH PENDAPATAN	9.952.808.000,00	2.410.110.711,69	(7.542.697.288,31)	24,21	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.114.452.200,00	350.371.590,00	(764.080.610,00)	31,43	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	271.767.100,00	85.066.020,00	(186.701.080,00)	31,30	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.02		PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	271.767.100,00	85.066.020,00	(186.701.080,00)	31,30	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0011		PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA	135.465.100,00	72.000.000,00	(63.465.100,00)	53,15	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	135.465.100,00	72.000.000,00	(63.465.100,00)	53,15	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.465.100,00	72.000.000,00	(63.465.100,00)	53,15	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0013		PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB	136.302.000,00	13.066.020,00	(123.235.980,00)	9,58	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	71.302.000,00	13.066.020,00	(58.235.980,00)	18,32	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.302.000,00	13.066.020,00	(58.235.980,00)	18,32	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0013	5.2	BELANJA MODAL	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	0,00	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0013	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	0,00	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	510.285.100,00	159.648.000,00	(350.637.100,00)	31,28	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01		PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	288.566.900,00	67.348.000,00	(221.218.900,00)	23,33	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0008		PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK	60.654.900,00	29.160.000,00	(31.494.900,00)	48,07	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	60.654.900,00	29.160.000,00	(31.494.900,00)	48,07	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.654.900,00	29.160.000,00	(31.494.900,00)	48,07	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0010		PENGLOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN BANGGA KENCANA	69.682.000,00	20.968.000,00	(48.714.000,00)	30,09	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	69.682.000,00	20.968.000,00	(48.714.000,00)	30,09	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.682.000,00	20.968.000,00	(48.714.000,00)	30,09	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0011		PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES), DAN MINI LOKAKARYA (MINILOK)	47.400.000,00	17.220.000,00	(30.180.000,00)	36,32	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	47.400.000,00	17.220.000,00	(30.180.000,00)	36,32	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.400.000,00	17.220.000,00	(30.180.000,00)	36,32	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0012		PROMOSI DAN KIE PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG	49.510.000,00	0,00	(49.510.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	49.510.000,00	0,00	(49.510.000,00)	0,00	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.510.000,00	0,00	(49.510.000,00)	0,00	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0014		ADVOKASI PROGRAM BANGGA KENCANA OLEH POKJA ADVOKASI KEPADA STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA	61.320.000,00	0,00	(61.320.000,00)	0,00	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	61.320.000,00	0,00	(61.320.000,00)	0,00	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.320.000,00	0,00	(61.320.000,00)	0,00	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02		PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)	98.489.000,00	47.310.000,00	(51.179.000,00)	48,03	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0004		PENGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP)	98.489.000,00	47.310.000,00	(51.179.000,00)	48,03	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	98.489.000,00	47.310.000,00	(51.179.000,00)	48,03	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.489.000,00	47.310.000,00	(51.179.000,00)	48,03	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03		PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	63.694.000,00	19.338.000,00	(44.356.000,00)	30,36	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0001		PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	19.440.000,00	8.550.000,00	(10.890.000,00)	43,98	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.440.000,00	8.550.000,00	(10.890.000,00)	43,98	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.440.000,00	8.550.000,00	(10.890.000,00)	43,98	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0003		PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)	29.466.000,00	0,00	(29.466.000,00)	0,00	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	29.466.000,00	0,00	(29.466.000,00)	0,00	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.466.000,00	0,00	(29.466.000,00)	0,00	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0008		PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	14.788.000,00	10.788.000,00	(4.000.000,00)	72,95	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	14.788.000,00	10.788.000,00	(4.000.000,00)	72,95	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.788.000,00	10.788.000,00	(4.000.000,00)	72,95	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.04		PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	59.535.200,00	25.652.000,00	(33.883.200,00)	43,08	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.04.0002		INTEGRASI PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR DI KAMPUNG KB	3.935.000,00	2.142.000,00	(1.793.000,00)	54,43	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.935.000,00	2.142.000,00	(1.793.000,00)	54,43	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.935.000,00	2.142.000,00	(1.793.000,00)	54,43	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.04.0006		PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS	55.600.200,00	23.510.000,00	(32.090.200,00)	42,28	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	55.600.200,00	23.510.000,00	(32.090.200,00)	42,28	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.600.200,00	23.510.000,00	(32.090.200,00)	42,28	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	332.400.000,00	105.657.570,00	(226.742.430,00)	31,78	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01		PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	332.400.000,00	105.657.570,00	(226.742.430,00)	31,78	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0018		PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)	108.000.000,00	105.657.570,00	(2.342.430,00)	97,83	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	108.000.000,00	105.657.570,00	(2.342.430,00)	97,83	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.000.000,00	105.657.570,00	(2.342.430,00)	97,83	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0026		PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL BAGI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)	224.400.000,00	0,00	(224.400.000,00)	0,00	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	224.400.000,00	0,00	(224.400.000,00)	0,00	
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.400.000,00	0,00	(224.400.000,00)	0,00	
JUMLAH BELANJA					1.114.452.200,00	350.371.590,00	(764.080.610,00)	31,43	
				SURPLUS / (DEFISIT)	8.838.355.800,00	2.059.739.121,69	(6.778.616.678,31)	23,30	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	8.838.355.800,00	2.059.739.121,69	(6.778.616.678,31)	23,30	

Tana Tidung, 4 September 2026

BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Tideng Pale

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.2.14.0.00.01.0001		4	PENDAPATAN DAERAH	809.352.000,00	184.916.406,00	(624.435.594,00)	22,84	
	1.02.2.14.0.00.01.0001		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	809.352.000,00	184.916.406,00	(624.435.594,00)	22,84	
	1.02.2.14.0.00.01.0001		4.1.02	Retribusi Daerah	30.000.000,00	30.236.911,00	236.911,00	100,78	
	1.02.2.14.0.00.01.0001		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	779.352.000,00	154.679.495,00	(624.672.505,00)	19,84	
				JUMLAH PENDAPATAN	809.352.000,00	184.916.406,00	(624.435.594,00)	22,84	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001		5	BELANJA DAERAH	1.470.410.400,00	661.489.696,00	(808.920.704,00)	44,98	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	809.352.000,00	661.489.696,00	(147.862.304,00)	81,73	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	809.352.000,00	661.489.696,00	(147.862.304,00)	81,73	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	809.352.000,00	661.489.696,00	(147.862.304,00)	81,73	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	573.020.223,00	661.489.696,00	88.469.473,00	115,43	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	235.605.600,00	0,00	(235.605.600,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.414.623,00	661.489.696,00	324.075.073,00	196,04	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	236.331.777,00	0,00	(236.331.777,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	236.331.777,00	0,00	(236.331.777,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	648.828.400,00	0,00	(648.828.400,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	648.828.400,00	0,00	(648.828.400,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	31.200.000,00	0,00	(31.200.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	31.200.000,00	0,00	(31.200.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	0,00	(31.200.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	58.840.000,00	0,00	(58.840.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	58.840.000,00	0,00	(58.840.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.840.000,00	0,00	(58.840.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	32.400.000,00	0,00	(32.400.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	32.400.000,00	0,00	(32.400.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	0,00	(32.400.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	720.000,00	0,00	(720.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	720.000,00	0,00	(720.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	720.000,00	0,00	(720.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	2.650.000,00	0,00	(2.650.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	2.650.000,00	0,00	(2.650.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	0,00	(2.650.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0015		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	177.253.400,00	0,00	(177.253.400,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	177.253.400,00	0,00	(177.253.400,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.253.400,00	0,00	(177.253.400,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0016		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	5.850.000,00	0,00	(5.850.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	5.850.000,00	0,00	(5.850.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	0,00	(5.850.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0017		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0020		PENGLOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	13.435.500,00	0,00	(13.435.500,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	13.435.500,00	0,00	(13.435.500,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.435.500,00	0,00	(13.435.500,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0021		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	1.920.000,00	0,00	(1.920.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	1.920.000,00	0,00	(1.920.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	0,00	(1.920.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	103.715.000,00	0,00	(103.715.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	103.715.000,00	0,00	(103.715.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.715.000,00	0,00	(103.715.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	189.704.500,00	0,00	(189.704.500,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	189.704.500,00	0,00	(189.704.500,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.704.500,00	0,00	(189.704.500,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0042		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	1.420.000,00	0,00	(1.420.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	1.420.000,00	0,00	(1.420.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.420.000,00	0,00	(1.420.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0044		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	23.000.000,00	0,00	(23.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	23.000.000,00	0,00	(23.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	0,00	(23.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0046		PENGLOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	720.000,00	0,00	(720.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	720.000,00	0,00	(720.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	720.000,00	0,00	(720.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12.230.000,00	0,00	(12.230.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.230.000,00	0,00	(12.230.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	12.230.000,00	0,00	(12.230.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.230.000,00	0,00	(12.230.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.230.000,00	0,00	(12.230.000,00)	0,00	
JUMLAH BELANJA					1.470.410.400,00	661.489.696,00	(808.920.704,00)	44,98	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(661.058.400,00)	(476.573.290,00)	184.485.110,00	72,09	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(661.058.400,00)	(476.573.290,00)	184.485.110,00	72,09	

Tana Tidung, 4 September 2026

BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Sesayap Hilir

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.2.14.0.00.01.0002		4	PENDAPATAN DAERAH	480.744.000,00	115.559.148,00	(365.184.852,00)	24,03	
	1.02.2.14.0.00.01.0002		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	480.744.000,00	115.559.148,00	(365.184.852,00)	24,03	
	1.02.2.14.0.00.01.0002		4.1.02	Retribusi Daerah	40.000.000,00	11.329.360,00	(28.670.640,00)	28,32	
	1.02.2.14.0.00.01.0002		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	440.744.000,00	104.229.788,00	(336.514.212,00)	23,64	
				JUMLAH PENDAPATAN	480.744.000,00	115.559.148,00	(365.184.852,00)	24,03	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002		5	BELANJA DAERAH	1.327.470.262,00	923.818.426,00	(403.651.836,00)	69,59	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	480.744.000,00	923.818.426,00	443.074.426,00	192,16	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	480.744.000,00	923.818.426,00	443.074.426,00	192,16	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	480.744.000,00	923.818.426,00	443.074.426,00	192,16	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	358.361.400,00	909.818.426,00	551.457.026,00	253,88	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	144.223.200,00	0,00	(144.223.200,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.138.200,00	909.818.426,00	695.680.226,00	424,87	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	122.382.600,00	14.000.000,00	(108.382.600,00)	11,43	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.382.600,00	14.000.000,00	(108.382.600,00)	11,43	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	803.010.262,00	0,00	(803.010.262,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	803.010.262,00	0,00	(803.010.262,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	107.424.000,00	0,00	(107.424.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	107.424.000,00	0,00	(107.424.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.424.000,00	0,00	(107.424.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	23.760.000,00	0,00	(23.760.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	23.760.000,00	0,00	(23.760.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.760.000,00	0,00	(23.760.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	22.560.000,00	0,00	(22.560.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	22.560.000,00	0,00	(22.560.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.560.000,00	0,00	(22.560.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	10.440.000,00	0,00	(10.440.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	10.440.000,00	0,00	(10.440.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.440.000,00	0,00	(10.440.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0015		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	201.381.968,00	0,00	(201.381.968,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	201.381.968,00	0,00	(201.381.968,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.381.968,00	0,00	(201.381.968,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0016		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	18.800.000,00	0,00	(18.800.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	18.800.000,00	0,00	(18.800.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.800.000,00	0,00	(18.800.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0017		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0020		PENGLOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	14.060.000,00	0,00	(14.060.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	14.060.000,00	0,00	(14.060.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.060.000,00	0,00	(14.060.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0021		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	17.220.000,00	0,00	(17.220.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	17.220.000,00	0,00	(17.220.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.220.000,00	0,00	(17.220.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	126.184.000,00	0,00	(126.184.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	126.184.000,00	0,00	(126.184.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.184.000,00	0,00	(126.184.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	218.673.911,00	0,00	(218.673.911,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	218.673.911,00	0,00	(218.673.911,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.673.911,00	0,00	(218.673.911,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0042		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	4.064.010,00	0,00	(4.064.010,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	4.064.010,00	0,00	(4.064.010,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.064.010,00	0,00	(4.064.010,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0044		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	13.722.373,00	0,00	(13.722.373,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	13.722.373,00	0,00	(13.722.373,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.722.373,00	0,00	(13.722.373,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0046		PENGLOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	7.520.000,00	0,00	(7.520.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	7.520.000,00	0,00	(7.520.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.520.000,00	0,00	(7.520.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	43.716.000,00	0,00	(43.716.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	43.716.000,00	0,00	(43.716.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	43.716.000,00	0,00	(43.716.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	43.716.000,00	0,00	(43.716.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0002	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.716.000,00	0,00	(43.716.000,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	1.327.470.262,00	923.818.426,00	(403.651.836,00)	69,59	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(846.726.262,00)	(808.259.278,00)	38.466.984,00	95,45	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(846.726.262,00)	(808.259.278,00)	38.466.984,00	95,45	

Tana Tidung, 4 September 2026

BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : Puskesmas Tana Lia

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.2.14.0.00.01.0003		4	PENDAPATAN DAERAH	231.984.000,00	39.384.751,77	(192.599.248,23)	16,97	
	1.02.2.14.0.00.01.0003		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	231.984.000,00	39.384.751,77	(192.599.248,23)	16,97	
	1.02.2.14.0.00.01.0003		4.1.02	Retribusi Daerah	30.000.000,00	7.863.900,00	(22.136.100,00)	26,21	
	1.02.2.14.0.00.01.0003		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	201.984.000,00	31.520.851,77	(170.463.148,23)	15,60	
				JUMLAH PENDAPATAN	231.984.000,00	39.384.751,77	(192.599.248,23)	16,97	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003		5	BELANJA DAERAH	926.232.501,00	773.254.670,60	(152.977.830,40)	83,48	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	231.984.001,00	773.254.670,60	541.270.669,60	333,32	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	231.984.001,00	773.254.670,60	541.270.669,60	333,32	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	231.984.001,00	773.254.670,60	541.270.669,60	333,32	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	162.886.264,00	741.332.671,60	578.446.407,60	455,12	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	69.595.200,00	67.410.753,60	(2.184.446,40)	96,86	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.291.064,00	673.921.918,00	580.630.854,00	722,38	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	69.097.737,00	31.921.999,00	(37.175.738,00)	46,19	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.097.737,00	31.921.999,00	(37.175.738,00)	46,19	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	681.584.500,00	0,00	(681.584.500,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	681.584.500,00	0,00	(681.584.500,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	82.944.000,00	0,00	(82.944.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	82.944.000,00	0,00	(82.944.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.944.000,00	0,00	(82.944.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	47.220.000,00	0,00	(47.220.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	47.220.000,00	0,00	(47.220.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.220.000,00	0,00	(47.220.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	14.560.000,00	0,00	(14.560.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	14.560.000,00	0,00	(14.560.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.560.000,00	0,00	(14.560.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	7.280.000,00	0,00	(7.280.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	7.280.000,00	0,00	(7.280.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.280.000,00	0,00	(7.280.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	11.050.000,00	0,00	(11.050.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	11.050.000,00	0,00	(11.050.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.050.000,00	0,00	(11.050.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0015		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	166.066.400,00	0,00	(166.066.400,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	166.066.400,00	0,00	(166.066.400,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.066.400,00	0,00	(166.066.400,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0016		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	5.350.000,00	0,00	(5.350.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	5.350.000,00	0,00	(5.350.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.350.000,00	0,00	(5.350.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0017		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0020		PENGLOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	17.796.800,00	0,00	(17.796.800,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	17.796.800,00	0,00	(17.796.800,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.796.800,00	0,00	(17.796.800,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0021		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	6.620.000,00	0,00	(6.620.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	6.620.000,00	0,00	(6.620.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.620.000,00	0,00	(6.620.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	97.490.000,00	0,00	(97.490.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	97.490.000,00	0,00	(97.490.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.490.000,00	0,00	(97.490.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	201.907.300,00	0,00	(201.907.300,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	201.907.300,00	0,00	(201.907.300,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.907.300,00	0,00	(201.907.300,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0042		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0044		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	14.620.000,00	0,00	(14.620.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	14.620.000,00	0,00	(14.620.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.620.000,00	0,00	(14.620.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0046		PENGLOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	2.380.000,00	0,00	(2.380.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	2.380.000,00	0,00	(2.380.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.380.000,00	0,00	(2.380.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12.664.000,00	0,00	(12.664.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.664.000,00	0,00	(12.664.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	12.664.000,00	0,00	(12.664.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.664.000,00	0,00	(12.664.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0003	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.664.000,00	0,00	(12.664.000,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	926.232.501,00	773.254.670,60	(152.977.830,40)	83,48	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(694.248.501,00)	(733.869.918,83)	(39.621.417,83)	105,70	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(694.248.501,00)	(733.869.918,83)	(39.621.417,83)	105,70	

Tana Tidung, 4 September 2026

BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Kujau

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.2.14.0.00.01.0004		4	PENDAPATAN DAERAH	213.840.000,00	59.384.265,00	(154.455.735,00)	27,77	
	1.02.2.14.0.00.01.0004		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	213.840.000,00	59.384.265,00	(154.455.735,00)	27,77	
	1.02.2.14.0.00.01.0004		4.1.02	Retribusi Daerah	45.000.000,00	23.877.500,00	(21.122.500,00)	53,06	
	1.02.2.14.0.00.01.0004		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	168.840.000,00	35.506.765,00	(133.333.235,00)	21,02	
				JUMLAH PENDAPATAN	213.840.000,00	59.384.265,00	(154.455.735,00)	27,77	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004		5	BELANJA DAERAH	843.924.104,00	686.164.480,00	(157.759.624,00)	81,30	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	213.840.000,00	686.164.480,00	472.324.480,00	320,87	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	213.840.000,00	686.164.480,00	472.324.480,00	320,87	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	213.840.000,00	686.164.480,00	472.324.480,00	320,87	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	158.501.310,00	631.013.480,00	472.512.170,00	398,11	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	64.152.000,00	0,00	(64.152.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.349.310,00	631.013.480,00	536.664.170,00	668,80	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	55.338.690,00	55.151.000,00	(187.690,00)	99,66	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.338.690,00	55.151.000,00	(187.690,00)	99,66	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	611.598.104,00	0,00	(611.598.104,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	611.598.104,00	0,00	(611.598.104,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	62.400.000,00	0,00	(62.400.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	62.400.000,00	0,00	(62.400.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.400.000,00	0,00	(62.400.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	37.200.000,00	0,00	(37.200.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	37.200.000,00	0,00	(37.200.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	0,00	(37.200.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	19.800.000,00	0,00	(19.800.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	19.800.000,00	0,00	(19.800.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	0,00	(19.800.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0015		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	155.541.860,00	0,00	(155.541.860,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	155.541.860,00	0,00	(155.541.860,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.541.860,00	0,00	(155.541.860,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0016		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0017		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0020		PENGLOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	10.257.500,00	0,00	(10.257.500,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	10.257.500,00	0,00	(10.257.500,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.257.500,00	0,00	(10.257.500,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0021		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	86.610.000,00	0,00	(86.610.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	86.610.000,00	0,00	(86.610.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.610.000,00	0,00	(86.610.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	188.580.200,00	0,00	(188.580.200,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	188.580.200,00	0,00	(188.580.200,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.580.200,00	0,00	(188.580.200,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0042		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0044		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	11.758.544,00	0,00	(11.758.544,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	11.758.544,00	0,00	(11.758.544,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.758.544,00	0,00	(11.758.544,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0046		PENGLOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	18.486.000,00	0,00	(18.486.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.486.000,00	0,00	(18.486.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	18.486.000,00	0,00	(18.486.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.486.000,00	0,00	(18.486.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0004	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.486.000,00	0,00	(18.486.000,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	843.924.104,00	686.164.480,00	(157.759.624,00)	81,30	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(630.084.104,00)	(626.780.215,00)	3.303.889,00	99,47	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(630.084.104,00)	(626.780.215,00)	3.303.889,00	99,47	

Tana Tidung, 4 September 2026

BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Muruk Rian

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.2.14.0.00.01.0005		4	PENDAPATAN DAERAH	84.888.000,00	21.048.625,62	(63.839.374,38)	24,79	
	1.02.2.14.0.00.01.0005		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	84.888.000,00	21.048.625,62	(63.839.374,38)	24,79	
	1.02.2.14.0.00.01.0005		4.1.02	Retribusi Daerah	15.000.000,00	7.313.700,00	(7.686.300,00)	48,75	
	1.02.2.14.0.00.01.0005		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	69.888.000,00	13.734.925,62	(56.153.074,38)	19,65	
				JUMLAH PENDAPATAN	84.888.000,00	21.048.625,62	(63.839.374,38)	24,79	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005		5	BELANJA DAERAH	670.600.342,00	535.968.453,00	(134.631.889,00)	79,92	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	84.888.000,00	535.968.453,00	451.080.453,00	631,38	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	84.888.000,00	535.968.453,00	451.080.453,00	631,38	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	84.888.000,00	535.968.453,00	451.080.453,00	631,38	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	71.116.800,00	522.537.453,00	451.420.653,00	734,75	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	25.466.400,00	0,00	(25.466.400,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.650.400,00	522.537.453,00	476.887.053,00	1.144,65	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	13.771.200,00	13.431.000,00	(340.200,00)	97,52	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.771.200,00	13.431.000,00	(340.200,00)	97,52	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	570.472.342,00	0,00	(570.472.342,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	570.472.342,00	0,00	(570.472.342,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	65.374.782,00	0,00	(65.374.782,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	65.374.782,00	0,00	(65.374.782,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.374.782,00	0,00	(65.374.782,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0015		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	149.260.564,00	0,00	(149.260.564,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	149.260.564,00	0,00	(149.260.564,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.260.564,00	0,00	(149.260.564,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0016		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0017		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	9.700.000,00	0,00	(9.700.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	9.700.000,00	0,00	(9.700.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	0,00	(9.700.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0020		PENGLOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	9.304.400,00	0,00	(9.304.400,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	9.304.400,00	0,00	(9.304.400,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.304.400,00	0,00	(9.304.400,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0021		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	18.700.000,00	0,00	(18.700.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	18.700.000,00	0,00	(18.700.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.700.000,00	0,00	(18.700.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	84.206.900,00	0,00	(84.206.900,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	84.206.900,00	0,00	(84.206.900,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.206.900,00	0,00	(84.206.900,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	176.625.696,00	0,00	(176.625.696,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	176.625.696,00	0,00	(176.625.696,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.625.696,00	0,00	(176.625.696,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0042		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0044		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	20.400.000,00	0,00	(20.400.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	20.400.000,00	0,00	(20.400.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	0,00	(20.400.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0046		PENGLOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	15.240.000,00	0,00	(15.240.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.240.000,00	0,00	(15.240.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	15.240.000,00	0,00	(15.240.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.240.000,00	0,00	(15.240.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.240.000,00	0,00	(15.240.000,00)	0,00	
JUMLAH BELANJA					670.600.342,00	535.968.453,00	(134.631.889,00)	79,92	
SURPLUS / (DEFISIT)					(585.712.342,00)	(514.919.827,38)	70.792.514,62	87,91	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)					(585.712.342,00)	(514.919.827,38)	70.792.514,62	87,91	

Tana Tidung, 4 September 2026

BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.2.14.0.00.01.0006		4	PENDAPATAN DAERAH	8.000.000.000,00	1.917.999.029,00	(6.082.000.971,00)	23,97	
	1.02.2.14.0.00.01.0006		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.000.000.000,00	1.917.999.029,00	(6.082.000.971,00)	23,97	
	1.02.2.14.0.00.01.0006		4.1.02	Retribusi Daerah	995.000.000,00	1.904.741.463,00	909.741.463,00	191,43	
	1.02.2.14.0.00.01.0006		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.005.000.000,00	13.257.566,00	(6.991.742.434,00)	0,18	
				JUMLAH PENDAPATAN	8.000.000.000,00	1.917.999.029,00	(6.082.000.971,00)	23,97	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006		5	BELANJA DAERAH	23.659.930.412,00	6.897.222.974,00	(16.762.707.438,00)	29,15	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.700.000.000,00	4.145.266.443,00	(7.554.733.557,00)	35,42	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	0,00	1.629.383.364,00	1.629.383.364,00	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	0,00	1.629.383.364,00	1.629.383.364,00	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	1.629.383.364,00	1.629.383.364,00	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	1.629.383.364,00	1.629.383.364,00	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	11.700.000.000,00	2.515.883.079,00	(9.184.116.921,00)	21,50	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	11.700.000.000,00	2.515.883.079,00	(9.184.116.921,00)	21,50	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.315.000.000,00	2.298.629.013,00	(9.016.370.987,00)	20,31	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.662.426.177,00	0,00	(4.662.426.177,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.652.573.823,00	2.298.629.013,00	(4.353.944.810,00)	34,55	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	385.000.000,00	217.254.066,00	(167.745.934,00)	56,42	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	183.071.971,00	(16.928.029,00)	91,53	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.01.2.10.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	185.000.000,00	34.182.095,00	(150.817.905,00)	18,47	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	11.791.214.412,00	2.739.302.531,00	(9.051.911.881,00)	23,23	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.02.2.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.342.873.638,00	884.652.656,00	(1.458.220.982,00)	37,75	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.02.2.01.0010		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	218.050.000,00	18.200.000,00	(199.850.000,00)	8,34	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	218.050.000,00	18.200.000,00	(199.850.000,00)	8,34	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.050.000,00	18.200.000,00	(199.850.000,00)	8,34	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.02.2.01.0014		PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	2.124.823.638,00	866.452.656,00	(1.258.370.982,00)	40,77	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	2.915.000,00	0,00	(2.915.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.915.000,00	0,00	(2.915.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	2.121.908.638,00	866.452.656,00	(1.255.455.982,00)	40,83	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.121.908.638,00	866.452.656,00	(1.255.455.982,00)	40,83	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.448.340.774,00	1.854.649.875,00	(7.593.690.899,00)	19,62	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0032		OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT	9.448.340.774,00	1.854.649.875,00	(7.593.690.899,00)	19,62	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0032	5.1	BELANJA OPERASI	9.244.016.374,00	1.650.337.725,00	(7.593.678.649,00)	17,85	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.244.016.374,00	1.650.337.725,00	(7.593.678.649,00)	17,85	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0032	5.2	BELANJA MODAL	204.324.400,00	204.312.150,00	(12.250,00)	99,99	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0032	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	204.324.400,00	204.312.150,00	(12.250,00)	99,99	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	168.716.000,00	12.654.000,00	(156.062.000,00)	7,50	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.03.2.03		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	168.716.000,00	12.654.000,00	(156.062.000,00)	7,50	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.03.2.03.0001		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	168.716.000,00	12.654.000,00	(156.062.000,00)	7,50	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	168.716.000,00	12.654.000,00	(156.062.000,00)	7,50	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.716.000,00	12.654.000,00	(156.062.000,00)	7,50	
				JUMLAH BELANJA	23.659.930.412,00	6.897.222.974,00	(16.762.707.438,00)	29,15	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(15.659.930.412,00)	(4.979.223.945,00)	10.680.706.467,00	31,79	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(15.659.930.412,00)	(4.979.223.945,00)	10.680.706.467,00	31,79	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : Rumah Sakit D Pratama Tanjung Keramat

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.2.14.0.00.01.0007		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	71.818.486,30	71.818.486,30	0,00	
	1.02.2.14.0.00.01.0007		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	20.907,30	20.907,30	0,00	
	1.02.2.14.0.00.01.0007		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	20.907,30	20.907,30	0,00	
	1.02.2.14.0.00.01.0007		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	71.797.579,00	71.797.579,00	0,00	
	1.02.2.14.0.00.01.0007		4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	71.797.579,00	71.797.579,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	0,00	71.818.486,30	71.818.486,30	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0007		5	BELANJA DAERAH	132.000.000,00	71.580.247,40	(60.419.752,60)	54,22	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0007	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	71.580.247,40	71.580.247,40	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0007	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	0,00	71.580.247,40	71.580.247,40	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0007	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	0,00	71.580.247,40	71.580.247,40	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0007	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	71.580.247,40	71.580.247,40	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0007	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	43.078.547,40	43.078.547,40	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0007	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	28.501.700,00	28.501.700,00	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0007	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	132.000.000,00	0,00	(132.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0007	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	132.000.000,00	0,00	(132.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0032		OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT	132.000.000,00	0,00	(132.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0032	5.1	BELANJA OPERASI	132.000.000,00	0,00	(132.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0032	5.1.01	Belanja Pegawai	79.200.000,00	0,00	(79.200.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.800.000,00	0,00	(52.800.000,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	132.000.000,00	71.580.247,40	(60.419.752,60)	54,22	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(132.000.000,00)	238.238,90	132.238.238,90	(0,18)	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(132.000.000,00)	238.238,90	132.238.238,90	(0,18)	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000		5		BELANJA DAERAH	343.104.659.623,00	197.277.520.529,85	(145.827.139.093,15)	57,49	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.808.645.280,00	2.049.274.864,00	(11.759.370.416,00)	14,84	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.02			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.329.348.507,00	1.137.070.582,00	(9.192.277.925,00)	11,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.02.0001			PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	9.372.348.007,00	735.030.582,00	(8.637.317.425,00)	7,84	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1		BELANJA OPERASI	9.372.348.007,00	735.030.582,00	(8.637.317.425,00)	7,84	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1.01		Belanja Pegawai	7.213.608.007,00	691.830.582,00	(6.521.777.425,00)	9,59	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	2.158.740.000,00	43.200.000,00	(2.115.540.000,00)	2,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.02.0002			PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	939.000.000,00	384.040.000,00	(554.960.000,00)	40,89	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.02.0002	5.1		BELANJA OPERASI	939.000.000,00	384.040.000,00	(554.960.000,00)	40,89	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.02.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	939.000.000,00	384.040.000,00	(554.960.000,00)	40,89	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.02.0007			KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	18.000.500,00	18.000.000,00	(500,00)	99,99	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.02.0007	5.1		BELANJA OPERASI	18.000.500,00	18.000.000,00	(500,00)	99,99	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.02.0007	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	18.000.500,00	18.000.000,00	(500,00)	99,99	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.434.105.245,00	478.513.350,00	(1.955.591.895,00)	19,65	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0002			PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	384.777.675,00	91.269.950,00	(293.507.725,00)	23,72	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0002	5.1		BELANJA OPERASI	96.912.321,00	61.249.950,00	(35.662.371,00)	63,20	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	96.912.321,00	61.249.950,00	(35.662.371,00)	63,20	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0002	5.2		BELANJA MODAL	287.865.354,00	30.020.000,00	(257.845.354,00)	10,42	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0002	5.2.02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	287.865.354,00	30.020.000,00	(257.845.354,00)	10,42	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0003			PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	10.609.506,00	0,00	(10.609.506,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0003	5.1		BELANJA OPERASI	10.609.506,00	0,00	(10.609.506,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0003	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	10.609.506,00	0,00	(10.609.506,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0004			PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	440.479.764,00	0,00	(440.479.764,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0004	5.1		BELANJA OPERASI	440.479.764,00	0,00	(440.479.764,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0004	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	440.479.764,00	0,00	(440.479.764,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0005			PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	89.885.300,00	0,00	(89.885.300,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1		BELANJA OPERASI	89.885.300,00	0,00	(89.885.300,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	89.885.300,00	0,00	(89.885.300,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0006			PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	178.050.000,00	93.137.400,00	(84.912.600,00)	52,30	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0006	5.1		BELANJA OPERASI	178.050.000,00	93.137.400,00	(84.912.600,00)	52,30	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0006	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	178.050.000,00	93.137.400,00	(84.912.600,00)	52,30	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.330.303.000,00	294.106.000,00	(1.036.197.000,00)	22,10	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.330.303.000,00	294.106.000,00	(1.036.197.000,00)	22,10	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.330.303.000,00	294.106.000,00	(1.036.197.000,00)	22,10	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	410.960.528,00	142.481.222,00	(268.479.306,00)	34,67	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	10.008.000,00	0,00	(10.008.000,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.008.000,00	0,00	(10.008.000,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.008.000,00	0,00	(10.008.000,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	400.952.528,00	142.481.222,00	(258.471.306,00)	35,53	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	400.952.528,00	142.481.222,00	(258.471.306,00)	35,53	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.952.528,00	142.481.222,00	(258.471.306,00)	35,53	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	634.231.000,00	291.209.710,00	(343.021.290,00)	45,91	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	602.341.000,00	278.109.710,00	(324.231.290,00)	46,17	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	602.341.000,00	278.109.710,00	(324.231.290,00)	46,17	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	602.341.000,00	278.109.710,00	(324.231.290,00)	46,17	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	31.890.000,00	13.100.000,00	(18.790.000,00)	41,07	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	31.890.000,00	13.100.000,00	(18.790.000,00)	41,07	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.890.000,00	13.100.000,00	(18.790.000,00)	41,07	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	18.507.133.620,00	9.029.832.585,00	(9.477.301.035,00)	48,79	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.2.01		PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.261.225.620,00	8.917.901.885,00	(8.343.323.735,00)	51,66	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.2.01.0093		NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI	971.524.200,00	183.085.250,00	(788.438.950,00)	18,84	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.2.01.0093	5.1	BELANJA OPERASI	716.004.900,00	86.765.000,00	(629.239.900,00)	12,11	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.2.01.0093	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	716.004.900,00	86.765.000,00	(629.239.900,00)	12,11	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.2.01.0093	5.2	BELANJA MODAL	255.519.300,00	96.320.250,00	(159.199.050,00)	37,69	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.2.01.0093	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	255.519.300,00	96.320.250,00	(159.199.050,00)	37,69	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.2.01.0113		PEMBANGUNAN KANAL BANJIR	16.289.701.420,00	8.734.816.635,00	(7.554.884.785,00)	53,62	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.2.01.0113	5.1	BELANJA OPERASI	3.259.205.500,00	1.684.494.855,00	(1.574.710.645,00)	51,68	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.2.01.0113	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.259.205.500,00	1.684.494.855,00	(1.574.710.645,00)	51,68	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.2.01.0113	5.2	BELANJA MODAL	13.030.495.920,00	7.050.321.780,00	(5.980.174.140,00)	54,10	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.2.01.0113	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.165.900.000,00	0,00	(2.165.900.000,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.2.01.0113	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	97.818.000,00	0,00	(97.818.000,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.2.01.0113	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.766.777.920,00	7.050.321.780,00	(3.716.456.140,00)	65,48	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.2.02		PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.245.908.000,00	111.930.700,00	(1.133.977.300,00)	8,98	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.2.02.0002		PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	349.992.000,00	35.690.000,00	(314.302.000,00)	10,19	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	338.062.400,00	35.690.000,00	(302.372.400,00)	10,55	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.062.400,00	35.690.000,00	(302.372.400,00)	10,55	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	11.929.600,00	0,00	(11.929.600,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.929.600,00	0,00	(11.929.600,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.2.02.0014		REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	895.916.000,00	76.240.700,00	(819.675.300,00)	8,50	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	895.916.000,00	76.240.700,00	(819.675.300,00)	8,50	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	895.916.000,00	76.240.700,00	(819.675.300,00)	8,50	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.558.325.600,00	3.454.647.080,00	(4.103.678.520,00)	45,70	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.558.325.600,00	3.454.647.080,00	(4.103.678.520,00)	45,70	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.2.01.0028		PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN	5.546.153.600,00	2.397.618.080,00	(3.148.535.520,00)	43,23	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	335.320.600,00	335.320.600,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.320.600,00	335.320.600,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.2.01.0028	5.2	BELANJA MODAL	5.210.833.000,00	2.062.297.480,00	(3.148.535.520,00)	39,57	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.2.01.0028	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.210.833.000,00	2.062.297.480,00	(3.148.535.520,00)	39,57	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.2.01.0029		OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)	1.894.380.000,00	1.057.029.000,00	(837.351.000,00)	55,79	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	1.894.380.000,00	1.057.029.000,00	(837.351.000,00)	55,79	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.294.380.000,00	1.057.029.000,00	(237.351.000,00)	81,66	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.2.01.0029	5.1.05	Belanja Hibah	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.2.01.0032		PERLUASAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN	117.792.000,00	0,00	(117.792.000,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.2.01.0032	5.1	BELANJA OPERASI	117.792.000,00	0,00	(117.792.000,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.2.01.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.792.000,00	0,00	(117.792.000,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.126.378.250,00	1.541.888.979,97	(584.489.270,03)	72,51	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.126.378.250,00	1.541.888.979,97	(584.489.270,03)	72,51	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.2.01.0033		PENYEDIAAN JASA PENYEDOTAN LUMPUR TINJA	579.826.600,00	311.835.180,00	(267.991.420,00)	53,78	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.2.01.0033	5.1	BELANJA OPERASI	302.079.600,00	38.400.000,00	(263.679.600,00)	12,71	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.2.01.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.079.600,00	38.400.000,00	(263.679.600,00)	12,71	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.2.01.0033	5.2	BELANJA MODAL	277.747.000,00	273.435.180,00	(4.311.820,00)	98,44	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.2.01.0033	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	277.747.000,00	273.435.180,00	(4.311.820,00)	98,44	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.2.01.0035		PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD)	189.997.250,00	69.108.540,00	(120.888.710,00)	36,37	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.2.01.0035	5.1	BELANJA OPERASI	134.341.650,00	69.108.540,00	(65.233.110,00)	51,44	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.2.01.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.341.650,00	69.108.540,00	(65.233.110,00)	51,44	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.2.01.0035	5.2	BELANJA MODAL	55.655.600,00	0,00	(55.655.600,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.2.01.0035	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.655.600,00	0,00	(55.655.600,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.2.01.0040		PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD)	1.356.554.400,00	1.160.945.259,97	(195.609.140,03)	85,58	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.2.01.0040	5.1	BELANJA OPERASI	1.356.554.400,00	1.160.945.259,97	(195.609.140,03)	85,58	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.2.01.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.356.554.400,00	1.160.945.259,97	(195.609.140,03)	85,58	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	9.092.148.067,00	5.564.596.040,30	(3.527.552.026,70)	61,20	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.06.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.092.148.067,00	5.564.596.040,30	(3.527.552.026,70)	61,20	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.06.2.01.0029		PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	9.092.148.067,00	5.564.596.040,30	(3.527.552.026,70)	61,20	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.06.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	7.710.771.067,00	4.432.231.850,30	(3.278.539.216,70)	57,48	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.06.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.710.771.067,00	4.432.231.850,30	(3.278.539.216,70)	57,48	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.06.2.01.0029	5.2	BELANJA MODAL	1.381.377.000,00	1.132.364.190,00	(249.012.810,00)	81,97	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.06.2.01.0029	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.381.377.000,00	1.132.364.190,00	(249.012.810,00)	81,97	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	175.181.340.588,00	101.552.598.192,01	(73.628.742.395,99)	57,96	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08.2.01		PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	175.181.340.588,00	101.552.598.192,01	(73.628.742.395,99)	57,96	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08.2.01.0018		PEMELIHARAAN, PERAWATAN, DAN PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	351.006.000,00	32.780.000,00	(318.226.000,00)	9,33	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	351.006.000,00	32.780.000,00	(318.226.000,00)	9,33	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351.006.000,00	32.780.000,00	(318.226.000,00)	9,33	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08.2.01.0019		PENYUSUNAN KEBIJAKAN TERKAIT PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG	445.003.100,00	292.161.000,00	(152.842.100,00)	65,65	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08.2.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	445.003.100,00	292.161.000,00	(152.842.100,00)	65,65	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08.2.01.0019	5.1.01	Belanja Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08.2.01.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.003.100,00	292.161.000,00	(151.842.100,00)	65,80	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08.2.01.0021		PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	172.513.579.463,00	100.762.954.192,01	(71.750.625.270,99)	58,40	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	18.058.169.490,00	12.232.943.048,56	(5.825.226.441,44)	67,74	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.058.169.490,00	12.232.943.048,56	(5.825.226.441,44)	67,74	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08.2.01.0021	5.2	BELANJA MODAL	154.455.409.973,00	88.530.011.143,45	(65.925.398.829,55)	57,31	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08.2.01.0021	5.2.01	Belanja Modal Tanah	583.802.000,00	583.802.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08.2.01.0021	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	194.337.400,00	193.857.999,00	(479.401,00)	99,75	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08.2.01.0021	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	153.677.270.573,00	87.752.351.144,45	(65.924.919.428,55)	57,10	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08.2.01.0022		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG	1.062.910.025,00	253.803.000,00	(809.107.025,00)	23,87	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08.2.01.0022	5.1	BELANJA OPERASI	812.510.025,00	174.488.000,00	(638.022.025,00)	21,47	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08.2.01.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	812.510.025,00	174.488.000,00	(638.022.025,00)	21,47	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08.2.01.0022	5.2	BELANJA MODAL	250.400.000,00	79.315.000,00	(171.085.000,00)	31,67	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08.2.01.0022	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	29.365.000,00	(170.635.000,00)	14,68	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08.2.01.0022	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.400.000,00	49.950.000,00	(450.000,00)	99,10	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08.2.01.0023		PENYELENGGARAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG (RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIM PENILAI TEKNIS (TPT), PENILIK, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG	808.842.000,00	210.900.000,00	(597.942.000,00)	26,07	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	808.842.000,00	210.900.000,00	(597.942.000,00)	26,07	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	808.842.000,00	210.900.000,00	(597.942.000,00)	26,07	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	7.000.902.000,00	4.486.718.980,00	(2.514.183.020,00)	64,08	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.09.2.01		PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.000.902.000,00	4.486.718.980,00	(2.514.183.020,00)	64,08	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.09.2.01.0008		PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA, KAWASAN PARIWISATA, KAWASAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DAN KAWASAN STRATEGIS LAINNYA	7.000.902.000,00	4.486.718.980,00	(2.514.183.020,00)	64,08	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.09.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	694.998.000,00	332.996.000,00	(362.002.000,00)	47,91	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.09.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	694.998.000,00	332.996.000,00	(362.002.000,00)	47,91	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.09.2.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	6.305.904.000,00	4.153.722.980,00	(2.152.181.020,00)	65,87	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.09.2.01.0008	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.305.904.000,00	4.153.722.980,00	(2.152.181.020,00)	65,87	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	105.844.445.594,00	68.053.378.707,37	(37.791.066.886,63)	64,29	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01		PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	105.844.445.594,00	68.053.378.707,37	(37.791.066.886,63)	64,29	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0032		PEMBANGUNAN JALAN	41.792.820.558,00	31.748.068.453,59	(10.044.752.104,41)	75,96	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0032	5.1	BELANJA OPERASI	2.672.200.000,00	2.131.833.819,69	(540.366.180,31)	79,77	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.672.200.000,00	2.131.833.819,69	(540.366.180,31)	79,77	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0032	5.2	BELANJA MODAL	39.120.620.558,00	29.616.234.633,90	(9.504.385.924,10)	75,70	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0032	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	39.120.620.558,00	29.616.234.633,90	(9.504.385.924,10)	75,70	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0033		REKONSTRUKSI JALAN	47.068.111.016,00	31.857.179.826,92	(15.210.931.189,08)	67,68	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.1	BELANJA OPERASI	983.533.000,00	390.461.574,97	(593.071.425,03)	39,69	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	983.533.000,00	390.461.574,97	(593.071.425,03)	39,69	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.2	BELANJA MODAL	46.084.578.016,00	31.466.718.251,95	(14.617.859.764,05)	68,28	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.432.101.866,00	307.140.114,00	(2.124.961.752,00)	12,62	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	43.652.476.150,00	31.159.578.137,95	(12.492.898.012,05)	71,38	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0040		PEMBANGUNAN JEMBATAN	9.981.508.156,00	3.106.811.960,86	(6.874.696.195,14)	31,12	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0040	5.1	BELANJA OPERASI	1.491.071.000,00	624.870.552,94	(866.200.447,06)	41,90	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.491.071.000,00	624.870.552,94	(866.200.447,06)	41,90	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0040	5.2	BELANJA MODAL	8.490.437.156,00	2.481.941.407,92	(6.008.495.748,08)	29,23	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0040	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.490.437.156,00	2.481.941.407,92	(6.008.495.748,08)	29,23	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0043		SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN	503.072.220,00	489.982.000,00	(13.090.220,00)	97,39	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0043	5.1	BELANJA OPERASI	503.072.220,00	489.982.000,00	(13.090.220,00)	97,39	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	503.072.220,00	489.982.000,00	(13.090.220,00)	97,39	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0046		PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	6.498.933.644,00	851.336.466,00	(5.647.597.178,00)	13,09	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1	BELANJA OPERASI	4.155.276.300,00	683.004.966,00	(3.472.271.334,00)	16,43	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.155.276.300,00	683.004.966,00	(3.472.271.334,00)	16,43	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.2	BELANJA MODAL	2.343.657.344,00	168.331.500,00	(2.175.325.844,00)	7,18	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.343.657.344,00	168.331.500,00	(2.175.325.844,00)	7,18	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.985.340.624,00	1.544.585.101,20	(2.440.755.522,80)	38,75	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.01		PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA	2.566.067.524,00	986.120.601,20	(1.579.946.922,80)	38,42	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.01.0003		PENETAPAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	2.373.671.324,00	797.420.601,20	(1.576.250.722,80)	33,59	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	891.659.500,00	107.560.176,60	(784.099.323,40)	12,06	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	891.659.500,00	107.560.176,60	(784.099.323,40)	12,06	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	1.482.011.824,00	689.860.424,60	(792.151.399,40)	46,54	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	565.064.200,00	51.387.800,60	(513.676.399,40)	9,09	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.01.0003	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	916.947.624,00	638.472.624,00	(278.475.000,00)	69,63	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.01.0005		PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RTRW KABUPATEN/KOTA	192.396.200,00	188.700.000,00	(3.696.200,00)	98,07	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	192.396.200,00	188.700.000,00	(3.696.200,00)	98,07	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.396.200,00	188.700.000,00	(3.696.200,00)	98,07	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.03		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	231.267.900,00	35.025.500,00	(196.242.400,00)	15,14	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.03.0005		PELAKSANAAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	99.482.300,00	0,00	(99.482.300,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.03.0005	5.2	BELANJA MODAL	99.482.300,00	0,00	(99.482.300,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.03.0005	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	99.482.300,00	0,00	(99.482.300,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.03.0007		SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENATAAN RUANG	131.785.600,00	35.025.500,00	(96.760.100,00)	26,57	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	858.700,00	0,00	(858.700,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	858.700,00	0,00	(858.700,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.03.0007	5.2	BELANJA MODAL	130.926.900,00	35.025.500,00	(95.901.400,00)	26,75	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.03.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.926.900,00	35.025.500,00	(95.901.400,00)	26,75	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.04		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.188.005.200,00	523.439.000,00	(664.566.200,00)	44,06	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.04.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	1.188.005.200,00	523.439.000,00	(664.566.200,00)	44,06	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.091.501.200,00	428.850.000,00	(662.651.200,00)	39,28	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.091.501.200,00	428.850.000,00	(662.651.200,00)	39,28	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.04.0004	5.2	BELANJA MODAL	96.504.000,00	94.589.000,00	(1.915.000,00)	98,01	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.04.0004	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	96.504.000,00	94.589.000,00	(1.915.000,00)	98,01	
				JUMLAH BELANJA	343.104.659.623,00	197.277.520.529,85	(145.827.139.093,15)	57,49	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(343.104.659.623,00)	(197.277.520.529,85)	145.827.139.093,15	57,49	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(343.104.659.623,00)	(197.277.520.529,85)	145.827.139.093,15	57,49	

Tana Tidung, 4 September 2026

BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000		5	BELANJA DAERAH	10.887.461.812,00	6.559.698.491,47	(4.327.763.320,53)	60,25	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	243.817.500,00	241.171.819,26	(2.645.680,74)	98,91	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.02.2.03		PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	243.817.500,00	241.171.819,26	(2.645.680,74)	98,91	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.02.2.03.0004		PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA	243.817.500,00	241.171.819,26	(2.645.680,74)	98,91	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	243.817.500,00	241.171.819,26	(2.645.680,74)	98,91	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.817.500,00	241.171.819,26	(2.645.680,74)	98,91	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6.341.754.898,00	3.204.992.852,16	(3.136.762.045,84)	50,53	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.03.2.02		PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	1.268.241.000,00	584.332.767,00	(683.908.233,00)	46,07	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.03.2.02.0008		PENYUSUNAN/REVIEW/LEGALISASI KEBIJAKAN BIDANG PKP	1.268.241.000,00	584.332.767,00	(683.908.233,00)	46,07	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.03.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.268.241.000,00	584.332.767,00	(683.908.233,00)	46,07	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.03.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.268.241.000,00	584.332.767,00	(683.908.233,00)	46,07	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.03.2.03		PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	5.073.513.898,00	2.620.660.085,16	(2.452.853.812,84)	51,65	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.03.2.03.0002		PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	2.418.050.000,00	755.300.000,00	(1.662.750.000,00)	31,23	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.418.050.000,00	755.300.000,00	(1.662.750.000,00)	31,23	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.418.050.000,00	755.300.000,00	(1.662.750.000,00)	31,23	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.03.2.03.0009		PELAKSANAAN PEREMAJAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.655.463.898,00	1.865.360.085,16	(790.103.812,84)	70,24	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.03.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.655.463.898,00	1.865.360.085,16	(790.103.812,84)	70,24	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.03.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.655.463.898,00	1.865.360.085,16	(790.103.812,84)	70,24	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	4.301.889.414,00	3.113.533.820,05	(1.188.355.593,95)	72,37	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.05.2.01		URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	4.301.889.414,00	3.113.533.820,05	(1.188.355.593,95)	72,37	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.05.2.01.0002		PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN	4.301.889.414,00	3.113.533.820,05	(1.188.355.593,95)	72,37	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.301.889.414,00	3.113.533.820,05	(1.188.355.593,95)	72,37	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.301.889.414,00	3.113.533.820,05	(1.188.355.593,95)	72,37	
				JUMLAH BELANJA	10.887.461.812,00	6.559.698.491,47	(4.327.763.320,53)	60,25	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(10.887.461.812,00)	(6.559.698.491,47)	4.327.763.320,53	60,25	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(10.887.461.812,00)	(6.559.698.491,47)	4.327.763.320,53	60,25	

Tana Tidung, 4 September 2026

BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000		5	BELANJA DAERAH	3.020.607.100,00	2.113.407.119,00	(907.199.981,00)	69,96	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1.726.829.000,00	1.485.244.319,00	(241.584.681,00)	86,00	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.04.2.01		PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.726.829.000,00	1.485.244.319,00	(241.584.681,00)	86,00	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.04.2.01.0004		MEDIASI PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.706.829.000,00	1.485.244.319,00	(221.584.681,00)	87,01	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.706.829.000,00	1.485.244.319,00	(221.584.681,00)	87,01	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.706.829.000,00	1.485.244.319,00	(221.584.681,00)	87,01	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.04.2.01.0005		INVENTARISASI KASUS PERTANAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.06		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	39.890.200,00	16.070.000,00	(23.820.200,00)	40,28	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.06.2.01		PENETAPAN SUBJEK DAN OBJEK REDISTRIBUSI TANAH SERTA GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.890.200,00	16.070.000,00	(23.820.200,00)	40,28	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.06.2.01.0003		KOORDINASI PENYELENGGARAAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	39.890.200,00	16.070.000,00	(23.820.200,00)	40,28	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	33.710.000,00	16.070.000,00	(17.640.000,00)	47,67	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.710.000,00	16.070.000,00	(17.640.000,00)	47,67	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.06.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	6.180.200,00	0,00	(6.180.200,00)	0,00	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.06.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.180.200,00	0,00	(6.180.200,00)	0,00	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	1.253.887.900,00	612.092.800,00	(641.795.100,00)	48,81	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.10.2.01		PENGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.253.887.900,00	612.092.800,00	(641.795.100,00)	48,81	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.10.2.01.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH	1.253.887.900,00	612.092.800,00	(641.795.100,00)	48,81	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.10.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	996.496.000,00	591.303.500,00	(405.192.500,00)	59,33	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.10.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	996.496.000,00	591.303.500,00	(405.192.500,00)	59,33	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.10.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	257.391.900,00	20.789.300,00	(236.602.600,00)	8,07	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.10.2.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	257.391.900,00	20.789.300,00	(236.602.600,00)	8,07	
				JUMLAH BELANJA	3.020.607.100,00	2.113.407.119,00	(907.199.981,00)	69,96	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.020.607.100,00)	(2.113.407.119,00)	907.199.981,00	69,96	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.020.607.100,00)	(2.113.407.119,00)	907.199.981,00	69,96	

Tana Tidung, 4 September 2026

BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	8.284.889.746,00	1.034.547.251,00	(7.250.342.495,00)	12,48	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.532.634.866,00	664.184.111,00	(6.868.450.755,00)	8,81	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.904.995,00	0,00	(9.904.995,00)	0,00	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.999.995,00	0,00	(4.999.995,00)	0,00	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.999.995,00	0,00	(4.999.995,00)	0,00	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.995,00	0,00	(4.999.995,00)	0,00	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	4.905.000,00	0,00	(4.905.000,00)	0,00	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.905.000,00	0,00	(4.905.000,00)	0,00	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.905.000,00	0,00	(4.905.000,00)	0,00	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.743.612.435,00	453.159.171,00	(3.290.453.264,00)	12,10	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.591.302.435,00	339.849.171,00	(3.251.453.264,00)	9,46	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.591.302.435,00	339.849.171,00	(3.251.453.264,00)	9,46	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.591.302.435,00	339.849.171,00	(3.251.453.264,00)	9,46	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	152.310.000,00	113.310.000,00	(39.000.000,00)	74,39	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	152.310.000,00	113.310.000,00	(39.000.000,00)	74,39	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.310.000,00	113.310.000,00	(39.000.000,00)	74,39	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	35.812.000,00	0,00	(35.812.000,00)	0,00	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	35.812.000,00	0,00	(35.812.000,00)	0,00	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	35.812.000,00	0,00	(35.812.000,00)	0,00	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.812.000,00	0,00	(35.812.000,00)	0,00	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	521.371.636,00	40.363.000,00	(481.008.636,00)	7,74	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	228.357.636,00	9.425.000,00	(218.932.636,00)	4,12	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	81.854.000,00	9.425.000,00	(72.429.000,00)	11,51	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.854.000,00	9.425.000,00	(72.429.000,00)	11,51	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004	5.2	BELANJA MODAL	146.503.636,00	0,00	(146.503.636,00)	0,00	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.503.636,00	0,00	(146.503.636,00)	0,00	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.124.000,00	0,00	(15.124.000,00)	0,00	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.124.000,00	0,00	(15.124.000,00)	0,00	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.124.000,00	0,00	(15.124.000,00)	0,00	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	277.890.000,00	30.938.000,00	(246.952.000,00)	11,13	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	277.890.000,00	30.938.000,00	(246.952.000,00)	11,13	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.890.000,00	30.938.000,00	(246.952.000,00)	11,13	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.150.500.000,00	0,00	(1.150.500.000,00)	0,00	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.150.500.000,00	0,00	(1.150.500.000,00)	0,00	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.150.500.000,00	0,00	(1.150.500.000,00)	0,00	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.150.500.000,00	0,00	(1.150.500.000,00)	0,00	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.877.809.200,00	144.793.240,00	(1.733.015.960,00)	7,71	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	59.790.000,00	18.299.300,00	(41.490.700,00)	30,60	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	59.790.000,00	18.299.300,00	(41.490.700,00)	30,60	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.790.000,00	18.299.300,00	(41.490.700,00)	30,60	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.818.019.200,00	126.493.940,00	(1.691.525.260,00)	6,95	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.818.019.200,00	126.493.940,00	(1.691.525.260,00)	6,95	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.818.019.200,00	126.493.940,00	(1.691.525.260,00)	6,95	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	193.624.600,00	25.868.700,00	(167.755.900,00)	13,36	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	188.695.000,00	25.868.700,00	(162.826.300,00)	13,70	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	188.695.000,00	25.868.700,00	(162.826.300,00)	13,70	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.695.000,00	25.868.700,00	(162.826.300,00)	13,70	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	4.929.600,00	0,00	(4.929.600,00)	0,00	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.929.600,00	0,00	(4.929.600,00)	0,00	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.929.600,00	0,00	(4.929.600,00)	0,00	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	752.254.880,00	370.363.140,00	(381.891.740,00)	49,23	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04.2.01		PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	720.318.180,00	369.833.940,00	(350.484.240,00)	51,34	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0001		PENCEGAHAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.742.500,00	9.065.000,00	(21.677.500,00)	29,48	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.742.500,00	9.065.000,00	(21.677.500,00)	29,48	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.742.500,00	9.065.000,00	(21.677.500,00)	29,48	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0002		PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.917.500,00	1.190.000,00	(43.727.500,00)	2,64	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	44.917.500,00	1.190.000,00	(43.727.500,00)	2,64	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.917.500,00	1.190.000,00	(43.727.500,00)	2,64	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0003		PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN	51.242.280,00	2.694.200,00	(48.548.080,00)	5,25	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	51.242.280,00	2.694.200,00	(48.548.080,00)	5,25	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.242.280,00	2.694.200,00	(48.548.080,00)	5,25	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0007		PEMBINAAN APARATUR PEMADAM KEBAKARAN	35.644.000,00	1.800.000,00	(33.844.000,00)	5,04	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	35.644.000,00	1.800.000,00	(33.844.000,00)	5,04	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.644.000,00	1.800.000,00	(33.844.000,00)	5,04	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0017		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI	557.771.900,00	355.084.740,00	(202.687.160,00)	63,66	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	310.674.000,00	120.315.300,00	(190.358.700,00)	38,72	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.674.000,00	120.315.300,00	(190.358.700,00)	38,72	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0017	5.2	BELANJA MODAL	247.097.900,00	234.769.440,00	(12.328.460,00)	95,01	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	247.097.900,00	234.769.440,00	(12.328.460,00)	95,01	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04.2.02		INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN	9.734.000,00	529.200,00	(9.204.800,00)	5,43	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04.2.02.0001		PENDATAAN SARANA PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN	9.734.000,00	529.200,00	(9.204.800,00)	5,43	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.734.000,00	529.200,00	(9.204.800,00)	5,43	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.734.000,00	529.200,00	(9.204.800,00)	5,43	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04.2.04		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN	22.202.700,00	0,00	(22.202.700,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04.2.04.0001		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN MELALUI SOSIALISASI DAN EDUKASI MASYARAKAT		22.202.700,00	0,00	(22.202.700,00)	0,00	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI		22.202.700,00	0,00	(22.202.700,00)	0,00	
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		22.202.700,00	0,00	(22.202.700,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA		8.284.889.746,00	1.034.547.251,00	(7.250.342.495,00)	12,48	
				SURPLUS / (DEFISIT)		(8.284.889.746,00)	(1.034.547.251,00)	7.250.342.495,00	12,48	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(8.284.889.746,00)	(1.034.547.251,00)	7.250.342.495,00	12,48	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	24.403.769.063,00	4.648.440.287,97	(19.755.328.775,03)	19,04	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.146.764.590,00	680.171.611,00	(4.466.592.979,00)	13,21	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	10.923.000,00	4.875.000,00	(6.048.000,00)	44,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	7.998.000,00	1.950.000,00	(6.048.000,00)	24,38	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.998.000,00	1.950.000,00	(6.048.000,00)	24,38	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.998.000,00	1.950.000,00	(6.048.000,00)	24,38	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.296.325.890,00	564.913.602,00	(3.731.412.288,00)	13,14	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.112.655.890,00	474.293.602,00	(3.638.362.288,00)	11,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.112.655.890,00	474.293.602,00	(3.638.362.288,00)	11,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.112.655.890,00	474.293.602,00	(3.638.362.288,00)	11,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	183.670.000,00	90.620.000,00	(93.050.000,00)	49,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	183.670.000,00	90.620.000,00	(93.050.000,00)	49,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.670.000,00	90.620.000,00	(93.050.000,00)	49,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	24.588.000,00	11.236.500,00	(13.351.500,00)	45,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	24.588.000,00	11.236.500,00	(13.351.500,00)	45,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	24.588.000,00	11.236.500,00	(13.351.500,00)	45,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.588.000,00	11.236.500,00	(13.351.500,00)	45,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	276.558.300,00	20.546.200,00	(256.012.100,00)	7,42	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	49.346.300,00	9.977.000,00	(39.369.300,00)	20,21	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	49.346.300,00	9.977.000,00	(39.369.300,00)	20,21	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.346.300,00	9.977.000,00	(39.369.300,00)	20,21	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	13.276.000,00	6.024.400,00	(7.251.600,00)	45,37	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.276.000,00	6.024.400,00	(7.251.600,00)	45,37	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.276.000,00	6.024.400,00	(7.251.600,00)	45,37	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	213.936.000,00	4.544.800,00	(209.391.200,00)	2,12	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	213.936.000,00	4.544.800,00	(209.391.200,00)	2,12	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.936.000,00	4.544.800,00	(209.391.200,00)	2,12	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	429.883.200,00	50.817.459,00	(379.065.741,00)	11,82	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.976.000,00	1.490.000,00	(1.486.000,00)	50,06	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.976.000,00	1.490.000,00	(1.486.000,00)	50,06	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.976.000,00	1.490.000,00	(1.486.000,00)	50,06	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	33.055.200,00	10.720.099,00	(22.335.101,00)	32,43	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.055.200,00	10.720.099,00	(22.335.101,00)	32,43	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.055.200,00	10.720.099,00	(22.335.101,00)	32,43	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	393.852.000,00	38.607.360,00	(355.244.640,00)	9,80	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	393.852.000,00	38.607.360,00	(355.244.640,00)	9,80	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	393.852.000,00	38.607.360,00	(355.244.640,00)	9,80	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	108.486.200,00	27.782.850,00	(80.703.350,00)	25,60	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	36.007.500,00	2.967.450,00	(33.040.050,00)	8,24	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	36.007.500,00	2.967.450,00	(33.040.050,00)	8,24	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.007.500,00	2.967.450,00	(33.040.050,00)	8,24	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	64.918.700,00	21.765.400,00	(43.153.300,00)	33,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	64.918.700,00	21.765.400,00	(43.153.300,00)	33,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.918.700,00	21.765.400,00	(43.153.300,00)	33,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	7.560.000,00	3.050.000,00	(4.510.000,00)	40,34	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.560.000,00	3.050.000,00	(4.510.000,00)	40,34	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.560.000,00	3.050.000,00	(4.510.000,00)	40,34	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	19.257.004.473,00	3.968.268.676,97	(15.288.735.796,03)	20,60	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.01		PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	82.453.900,00	43.676.261,00	(38.777.639,00)	52,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.01.0007		SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS ANCAMAN BENCANA)	82.453.900,00	43.676.261,00	(38.777.639,00)	52,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	72.413.500,00	33.636.200,00	(38.777.300,00)	46,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.413.500,00	33.636.200,00	(38.777.300,00)	46,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	10.040.400,00	10.040.061,00	(339,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.040.400,00	10.040.061,00	(339,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.02		PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	916.053.573,00	826.271.799,00	(89.781.774,00)	90,19	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.02.0015		PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA	707.113.352,00	707.070.000,00	(43.352,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.02.0015	5.2	BELANJA MODAL	707.113.352,00	707.070.000,00	(43.352,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.02.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	707.113.352,00	707.070.000,00	(43.352,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.02.0018		GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA	37.035.800,00	10.450.000,00	(26.585.800,00)	28,21	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	37.035.800,00	10.450.000,00	(26.585.800,00)	28,21	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.035.800,00	10.450.000,00	(26.585.800,00)	28,21	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.02.0021		PENGEMBANGAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT (TRC) BENCANA KABUPATEN/KOTA	48.714.200,00	9.000.000,00	(39.714.200,00)	18,47	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	48.714.200,00	9.000.000,00	(39.714.200,00)	18,47	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.714.200,00	9.000.000,00	(39.714.200,00)	18,47	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.02.0026		PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA	95.746.221,00	85.451.599,00	(10.294.622,00)	89,24	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	22.577.700,00	14.746.500,00	(7.831.200,00)	65,31	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.577.700,00	14.746.500,00	(7.831.200,00)	65,31	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.02.0026	5.2	BELANJA MODAL	73.168.521,00	70.705.099,00	(2.463.422,00)	96,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.02.0026	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.168.521,00	70.705.099,00	(2.463.422,00)	96,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.02.0028		PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA	27.444.000,00	14.300.200,00	(13.143.800,00)	52,10	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.02.0028	5.1	BELANJA OPERASI	27.444.000,00	14.300.200,00	(13.143.800,00)	52,10	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.02.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.444.000,00	14.300.200,00	(13.143.800,00)	52,10	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03		PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	42.885.000,00	4.105.000,00	(38.780.000,00)	9,57	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0002		RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA	13.430.000,00	2.710.000,00	(10.720.000,00)	20,17	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.430.000,00	2.710.000,00	(10.720.000,00)	20,17	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.430.000,00	2.710.000,00	(10.720.000,00)	20,17	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0003		PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	3.280.000,00	0,00	(3.280.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.280.000,00	0,00	(3.280.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.280.000,00	0,00	(3.280.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0009		PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	26.175.000,00	1.395.000,00	(24.780.000,00)	5,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	26.175.000,00	1.395.000,00	(24.780.000,00)	5,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.175.000,00	1.395.000,00	(24.780.000,00)	5,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.04		PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	18.215.612.000,00	3.094.215.616,97	(15.121.396.383,03)	16,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.04.0010		KOORDINASI PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA	18.198.172.000,00	3.094.215.616,97	(15.103.956.383,03)	17,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI	884.027.000,00	426.862.905,00	(457.164.095,00)	48,28	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	884.027.000,00	426.862.905,00	(457.164.095,00)	48,28	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.04.0010	5.2	BELANJA MODAL	17.314.145.000,00	2.667.352.711,97	(14.646.792.288,03)	15,40	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.04.0010	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.314.145.000,00	2.667.352.711,97	(14.646.792.288,03)	15,40	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.04.0011		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DALAM PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.04.0011	5.1	BELANJA OPERASI	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.04.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.04.0015		PENYUSUNAN KAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA (JITUPASNA) DAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PASCABENCANA (R3P) KAB/KOTA	10.690.000,00	0,00	(10.690.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.04.0015	5.1	BELANJA OPERASI	10.690.000,00	0,00	(10.690.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.04.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.690.000,00	0,00	(10.690.000,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	24.403.769.063,00	4.648.440.287,97	(19.755.328.775,03)	19,04	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(24.403.769.063,00)	(4.648.440.287,97)	19.755.328.775,03	19,04	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(24.403.769.063,00)	(4.648.440.287,97)	19.755.328.775,03	19,04	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	9.079.038.805,00	784.712.231,00	(8.294.326.574,00)	8,64	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.863.024.005,00	757.361.431,00	(8.105.662.574,00)	8,54	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	12.732.000,00	0,00	(12.732.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	12.732.000,00	0,00	(12.732.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.732.000,00	0,00	(12.732.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.732.000,00	0,00	(12.732.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.786.338.874,00	683.440.631,00	(6.102.898.243,00)	10,07	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.595.068.874,00	588.810.631,00	(6.006.258.243,00)	8,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.595.068.874,00	588.810.631,00	(6.006.258.243,00)	8,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.595.068.874,00	588.810.631,00	(6.006.258.243,00)	8,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	191.270.000,00	94.630.000,00	(96.640.000,00)	49,47	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	191.270.000,00	94.630.000,00	(96.640.000,00)	49,47	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.270.000,00	94.630.000,00	(96.640.000,00)	49,47	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	159.692.000,00	4.262.400,00	(155.429.600,00)	2,66	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	132.634.000,00	0,00	(132.634.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	132.634.000,00	0,00	(132.634.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.634.000,00	0,00	(132.634.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	27.058.000,00	4.262.400,00	(22.795.600,00)	15,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	27.058.000,00	4.262.400,00	(22.795.600,00)	15,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.058.000,00	4.262.400,00	(22.795.600,00)	15,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	658.826.356,00	4.618.400,00	(654.207.956,00)	0,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	38.393.700,00	0,00	(38.393.700,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	38.393.700,00	0,00	(38.393.700,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.393.700,00	0,00	(38.393.700,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	241.312.856,00	786.000,00	(240.526.856,00)	0,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	241.312.856,00	786.000,00	(240.526.856,00)	0,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.312.856,00	786.000,00	(240.526.856,00)	0,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	19.399.800,00	910.000,00	(18.489.800,00)	4,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	19.399.800,00	910.000,00	(18.489.800,00)	4,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.399.800,00	910.000,00	(18.489.800,00)	4,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	359.720.000,00	2.922.400,00	(356.797.600,00)	0,81	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	359.720.000,00	2.922.400,00	(356.797.600,00)	0,81	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.720.000,00	2.922.400,00	(356.797.600,00)	0,81	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.033.100.400,00	63.200.000,00	(969.900.400,00)	6,11	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	7.210.000,00	1.200.000,00	(6.010.000,00)	16,64	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.210.000,00	1.200.000,00	(6.010.000,00)	16,64	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.210.000,00	1.200.000,00	(6.010.000,00)	16,64	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	45.500.000,00	0,00	(45.500.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	45.500.000,00	0,00	(45.500.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.500.000,00	0,00	(45.500.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	980.390.400,00	62.000.000,00	(918.390.400,00)	6,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	980.390.400,00	62.000.000,00	(918.390.400,00)	6,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	980.390.400,00	62.000.000,00	(918.390.400,00)	6,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	212.334.375,00	1.840.000,00	(210.494.375,00)	0,86	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	185.494.375,00	1.840.000,00	(183.654.375,00)	0,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	185.494.375,00	1.840.000,00	(183.654.375,00)	0,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.494.375,00	1.840.000,00	(183.654.375,00)	0,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0007		PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	26.840.000,00	0,00	(26.840.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0007	5.1	BELANJA OPERASI	26.840.000,00	0,00	(26.840.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.840.000,00	0,00	(26.840.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	216.014.800,00	27.350.800,00	(188.664.000,00)	12,66	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01		PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	164.996.000,00	22.966.000,00	(142.030.000,00)	13,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0003		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA	32.208.000,00	1.101.200,00	(31.106.800,00)	3,41	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	32.208.000,00	1.101.200,00	(31.106.800,00)	3,41	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.208.000,00	1.101.200,00	(31.106.800,00)	3,41	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0004		PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.034.000,00	3.544.800,00	(489.200,00)	87,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.034.000,00	3.544.800,00	(489.200,00)	87,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.034.000,00	3.544.800,00	(489.200,00)	87,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0005		PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUGAS YANG BERNUANSА HAK ASASI MANUSIA	63.324.000,00	0,00	(63.324.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	63.324.000,00	0,00	(63.324.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.324.000,00	0,00	(63.324.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0015		PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0017		PENYEDIAAN LAYANAN DASAR DALAM RANGKA DAMPAK PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERTURAN KEPALA DAERAH	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0018		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	52.430.000,00	18.320.000,00	(34.110.000,00)	34,94	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	52.430.000,00	18.320.000,00	(34.110.000,00)	34,94	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.430.000,00	18.320.000,00	(34.110.000,00)	34,94	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02		PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	45.650.800,00	4.384.800,00	(41.266.000,00)	9,60	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0010		SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	5.624.800,00	0,00	(5.624.800,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	5.624.800,00	0,00	(5.624.800,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.624.800,00	0,00	(5.624.800,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0011		PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	20.536.000,00	4.384.800,00	(16.151.200,00)	21,35	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	20.536.000,00	4.384.800,00	(16.151.200,00)	21,35	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.536.000,00	4.384.800,00	(16.151.200,00)	21,35	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0012		PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	19.490.000,00	0,00	(19.490.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	19.490.000,00	0,00	(19.490.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.490.000,00	0,00	(19.490.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.03		PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KABUPATEN/KOTA	5.368.000,00	0,00	(5.368.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.03.0006		PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KARIER PPNS	5.368.000,00	0,00	(5.368.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.368.000,00	0,00	(5.368.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.368.000,00	0,00	(5.368.000,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	9.079.038.805,00	784.712.231,00	(8.294.326.574,00)	8,64	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(9.079.038.805,00)	(784.712.231,00)	8.294.326.574,00	8,64	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(9.079.038.805,00)	(784.712.231,00)	8.294.326.574,00	8,64	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000		5	BELANJA DAERAH	8.423.497.764,00	819.707.233,00	(7.603.790.531,00)	9,73	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.439.794.764,00	777.464.233,00	(6.662.330.531,00)	10,45	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	376.822.000,00	137.415.000,00	(239.407.000,00)	36,46	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	172.345.900,00	98.133.000,00	(74.212.900,00)	56,93	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	172.345.900,00	98.133.000,00	(74.212.900,00)	56,93	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.345.900,00	98.133.000,00	(74.212.900,00)	56,93	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	204.476.100,00	39.282.000,00	(165.194.100,00)	19,21	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	204.476.100,00	39.282.000,00	(165.194.100,00)	19,21	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.476.100,00	39.282.000,00	(165.194.100,00)	19,21	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.701.679.464,00	581.180.558,00	(5.120.498.906,00)	10,19	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.521.469.464,00	488.620.558,00	(5.032.848.906,00)	8,84	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.521.469.464,00	488.620.558,00	(5.032.848.906,00)	8,84	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.521.469.464,00	488.620.558,00	(5.032.848.906,00)	8,84	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	180.210.000,00	92.560.000,00	(87.650.000,00)	51,36	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	180.210.000,00	92.560.000,00	(87.650.000,00)	51,36	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.210.000,00	92.560.000,00	(87.650.000,00)	51,36	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	811.533.750,00	30.510.000,00	(781.023.750,00)	3,75	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	79.452.550,00	0,00	(79.452.550,00)	0,00	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	79.452.550,00	0,00	(79.452.550,00)	0,00	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.452.550,00	0,00	(79.452.550,00)	0,00	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	305.411.800,00	0,00	(305.411.800,00)	0,00	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	305.411.800,00	0,00	(305.411.800,00)	0,00	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.411.800,00	0,00	(305.411.800,00)	0,00	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	52.937.400,00	0,00	(52.937.400,00)	0,00	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	52.937.400,00	0,00	(52.937.400,00)	0,00	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.937.400,00	0,00	(52.937.400,00)	0,00	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	373.732.000,00	30.510.000,00	(343.222.000,00)	8,16	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	373.732.000,00	30.510.000,00	(343.222.000,00)	8,16	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	373.732.000,00	30.510.000,00	(343.222.000,00)	8,16	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	406.441.400,00	23.392.675,00	(383.048.725,00)	5,75	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	11.520.000,00	5.040.000,00	(6.480.000,00)	43,75	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.520.000,00	5.040.000,00	(6.480.000,00)	43,75	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.520.000,00	5.040.000,00	(6.480.000,00)	43,75	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	42.121.400,00	8.752.675,00	(33.368.725,00)	20,77	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	42.121.400,00	8.752.675,00	(33.368.725,00)	20,77	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.121.400,00	8.752.675,00	(33.368.725,00)	20,77	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	352.800.000,00	9.600.000,00	(343.200.000,00)	2,72	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	352.800.000,00	9.600.000,00	(343.200.000,00)	2,72	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.800.000,00	9.600.000,00	(343.200.000,00)	2,72	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	143.318.150,00	4.966.000,00	(138.352.150,00)	3,46	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	119.358.150,00	4.966.000,00	(114.392.150,00)	4,16	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	119.358.150,00	4.966.000,00	(114.392.150,00)	4,16	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.358.150,00	4.966.000,00	(114.392.150,00)	4,16	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	23.960.000,00	0,00	(23.960.000,00)	0,00	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	23.960.000,00	0,00	(23.960.000,00)	0,00	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.960.000,00	0,00	(23.960.000,00)	0,00	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	339.987.900,00	5.450.000,00	(334.537.900,00)	1,60	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.02.2.03		PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	339.987.900,00	5.450.000,00	(334.537.900,00)	1,60	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.02.2.03.0003		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	339.986.900,00	5.450.000,00	(334.536.900,00)	1,60	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	339.986.900,00	5.450.000,00	(334.536.900,00)	1,60	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.063.000,00	5.450.000,00	(63.613.000,00)	7,89	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.02.2.03.0003	5.1.05	Belanja Hibah	30.923.900,00	0,00	(30.923.900,00)	0,00	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.02.2.03.0003	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	240.000.000,00	0,00	(240.000.000,00)	0,00	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.02.2.03.0004		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	223.956.100,00	14.170.000,00	(209.786.100,00)	6,32	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.04.2.01		REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	223.956.100,00	14.170.000,00	(209.786.100,00)	6,32	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.04.2.01.0009		PEMBERIAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN	223.956.100,00	14.170.000,00	(209.786.100,00)	6,32	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.04.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	223.956.100,00	14.170.000,00	(209.786.100,00)	6,32	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.04.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.956.100,00	14.170.000,00	(209.786.100,00)	6,32	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	244.193.000,00	18.636.000,00	(225.557.000,00)	7,63	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.05.2.02		PENGLOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	244.193.000,00	18.636.000,00	(225.557.000,00)	7,63	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.05.2.02.0003		FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA	244.193.000,00	18.636.000,00	(225.557.000,00)	7,63	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	244.193.000,00	18.636.000,00	(225.557.000,00)	7,63	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.193.000,00	18.636.000,00	(205.557.000,00)	8,31	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.05	Belanja Hibah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	175.566.000,00	3.987.000,00	(171.579.000,00)	2,27	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.06.2.02		PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	175.566.000,00	3.987.000,00	(171.579.000,00)	2,27	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.06.2.02.0002		KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA	175.566.000,00	3.987.000,00	(171.579.000,00)	2,27	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.06.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	175.566.000,00	3.987.000,00	(171.579.000,00)	2,27	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.06.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.566.000,00	3.987.000,00	(138.579.000,00)	2,79	
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.06.2.02.0002	5.1.05	Belanja Hibah	33.000.000,00	0,00	(33.000.000,00)	0,00	
JUMLAH BELANJA					8.423.497.764,00	819.707.233,00	(7.603.790.531,00)	9,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.423.497.764,00)	(819.707.233,00)	7.603.790.531,00	9,73	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.423.497.764,00)	(819.707.233,00)	7.603.790.531,00	9,73	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000		5	BELANJA DAERAH	590.660.000,00	93.185.000,00	(497.475.000,00)	15,77	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	180.000.000,00	0,00	(180.000.000,00)	0,00	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.02.2.02		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	180.000.000,00	0,00	(180.000.000,00)	0,00	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.02.2.02.0002		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DAN POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI	180.000.000,00	0,00	(180.000.000,00)	0,00	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000,00	0,00	(180.000.000,00)	0,00	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.02.2.02.0002	5.1.05	Belanja Hibah	180.000.000,00	0,00	(180.000.000,00)	0,00	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	162.640.000,00	38.740.000,00	(123.900.000,00)	23,81	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.03.2.01		PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.338.000,00	5.400.000,00	(18.938.000,00)	22,18	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.03.2.01.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.338.000,00	5.400.000,00	(18.938.000,00)	22,18	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.338.000,00	5.400.000,00	(18.938.000,00)	22,18	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.338.000,00	5.400.000,00	(18.938.000,00)	22,18	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.03.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	115.652.000,00	28.400.000,00	(87.252.000,00)	24,55	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.03.2.02.0001		PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	115.652.000,00	28.400.000,00	(87.252.000,00)	24,55	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	115.652.000,00	28.400.000,00	(87.252.000,00)	24,55	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.652.000,00	28.400.000,00	(87.252.000,00)	24,55	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.03.2.03		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.650.000,00	4.940.000,00	(17.710.000,00)	21,81	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.03.2.03.0002		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENANGANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	22.650.000,00	4.940.000,00	(17.710.000,00)	21,81	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.650.000,00	4.940.000,00	(17.710.000,00)	21,81	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.650.000,00	4.940.000,00	(17.710.000,00)	21,81	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.06.2.01		PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.06.2.01.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	238.020.000,00	54.445.000,00	(183.575.000,00)	22,87	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.07.2.01		PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	77.162.000,00	0,00	(77.162.000,00)	0,00	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.07.2.01.0004		ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN /PROGRAM/ KEGIATAN PENCEGAHAN KTA	77.162.000,00	0,00	(77.162.000,00)	0,00	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.07.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	77.162.000,00	0,00	(77.162.000,00)	0,00	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.07.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.162.000,00	0,00	(77.162.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.07.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	114.488.000,00	36.845.000,00	(77.643.000,00)	32,18	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.07.2.02.0005		PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	114.488.000,00	36.845.000,00	(77.643.000,00)	32,18	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.07.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	114.488.000,00	36.845.000,00	(77.643.000,00)	32,18	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.07.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.488.000,00	36.845.000,00	(77.643.000,00)	32,18	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.07.2.03		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.370.000,00	17.600.000,00	(28.770.000,00)	37,95	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.07.2.03.0006		PENINGKATAN KAPASITAS SDM LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN BAGI AMPK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/	46.370.000,00	17.600.000,00	(28.770.000,00)	37,95	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.07.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	46.370.000,00	17.600.000,00	(28.770.000,00)	37,95	
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.07.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.370.000,00	17.600.000,00	(28.770.000,00)	37,95	
				JUMLAH BELANJA	590.660.000,00	93.185.000,00	(497.475.000,00)	15,77	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(590.660.000,00)	(93.185.000,00)	497.475.000,00	15,77	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(590.660.000,00)	(93.185.000,00)	497.475.000,00	15,77	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.581.280.000,00	663.691.500,00	(1.917.588.500,00)	25,71	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	917.795.200,00	434.332.500,00	(483.462.700,00)	47,32	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.04.2.01		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	917.795.200,00	434.332.500,00	(483.462.700,00)	47,32	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.04.2.01.0003		FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA	2.930.000,00	0,00	(2.930.000,00)	0,00	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.930.000,00	0,00	(2.930.000,00)	0,00	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.930.000,00	0,00	(2.930.000,00)	0,00	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.04.2.01.0004		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	373.316.200,00	189.029.000,00	(184.287.200,00)	50,63	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	373.316.200,00	189.029.000,00	(184.287.200,00)	50,63	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	373.316.200,00	189.029.000,00	(184.287.200,00)	50,63	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.04.2.01.0008		PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUM DESA DAN LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA	71.942.000,00	8.460.000,00	(63.482.000,00)	11,75	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	71.942.000,00	8.460.000,00	(63.482.000,00)	11,75	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.942.000,00	8.460.000,00	(63.482.000,00)	11,75	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.04.2.01.0012		FASILITASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA	245.179.000,00	118.028.000,00	(127.151.000,00)	48,13	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.04.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	245.179.000,00	118.028.000,00	(127.151.000,00)	48,13	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.04.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.179.000,00	118.028.000,00	(127.151.000,00)	48,13	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.04.2.01.0013		FASILITASI PENGELOLAAN ASET DESA	61.156.000,00	39.531.000,00	(21.625.000,00)	64,63	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.04.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	61.156.000,00	39.531.000,00	(21.625.000,00)	64,63	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.04.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.156.000,00	39.531.000,00	(21.625.000,00)	64,63	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.04.2.01.0014		PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA BPD	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.04.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.04.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.04.2.01.0018		FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN	163.271.000,00	79.284.500,00	(83.986.500,00)	48,56	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.04.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	163.271.000,00	79.284.500,00	(83.986.500,00)	48,56	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.04.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.271.000,00	79.284.500,00	(83.986.500,00)	48,56	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.663.484.800,00	229.359.000,00	(1.434.125.800,00)	13,78	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.05.2.01		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.663.484.800,00	229.359.000,00	(1.434.125.800,00)	13,78	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.05.2.01.0003		PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	647.272.800,00	126.449.000,00	(520.823.800,00)	19,53	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	287.272.800,00	126.449.000,00	(160.823.800,00)	44,01	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.272.800,00	126.449.000,00	(160.823.800,00)	44,01	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.05.2.01.0003	5.4	BELANJA TRANSFER	360.000.000,00	0,00	(360.000.000,00)	0,00	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.05.2.01.0003	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	360.000.000,00	0,00	(360.000.000,00)	0,00	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.05.2.01.0006		FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	129.812.000,00	2.910.000,00	(126.902.000,00)	2,24	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	129.812.000,00	2.910.000,00	(126.902.000,00)	2,24	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.812.000,00	2.910.000,00	(126.902.000,00)	2,24	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.05.2.01.0009		FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	886.400.000,00	100.000.000,00	(786.400.000,00)	11,28	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.05.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	886.400.000,00	100.000.000,00	(786.400.000,00)	11,28	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.05.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.400.000,00	0,00	(86.400.000,00)	0,00	
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.05.2.01.0009	5.1.05	Belanja Hibah	800.000.000,00	100.000.000,00	(700.000.000,00)	12,50	
				JUMLAH BELANJA	2.581.280.000,00	663.691.500,00	(1.917.588.500,00)	25,71	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.581.280.000,00)	(663.691.500,00)	1.917.588.500,00	25,71	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.581.280.000,00)	(663.691.500,00)	1.917.588.500,00	25,71	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.663.434.575,00	562.106.527,00	(5.101.328.048,00)	9,92	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.899.258.633,00	479.294.345,00	(4.419.964.288,00)	9,78	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	15.448.000,00	0,00	(15.448.000,00)	0,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	10.448.000,00	0,00	(10.448.000,00)	0,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.448.000,00	0,00	(10.448.000,00)	0,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.448.000,00	0,00	(10.448.000,00)	0,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.702.592.739,00	296.065.745,00	(3.406.526.994,00)	7,99	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.577.492.739,00	287.265.745,00	(3.290.226.994,00)	8,02	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.577.492.739,00	287.265.745,00	(3.290.226.994,00)	8,02	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.577.492.739,00	287.265.745,00	(3.290.226.994,00)	8,02	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	125.100.000,00	8.800.000,00	(116.300.000,00)	7,03	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	125.100.000,00	8.800.000,00	(116.300.000,00)	7,03	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.100.000,00	8.800.000,00	(116.300.000,00)	7,03	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	29.028.000,00	16.272.000,00	(12.756.000,00)	56,05	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	29.028.000,00	16.272.000,00	(12.756.000,00)	56,05	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	29.028.000,00	16.272.000,00	(12.756.000,00)	56,05	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.028.000,00	16.272.000,00	(12.756.000,00)	56,05	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	359.764.594,00	123.116.100,00	(236.648.494,00)	34,22	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	29.578.300,00	24.586.500,00	(4.991.800,00)	83,12	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	29.578.300,00	24.586.500,00	(4.991.800,00)	83,12	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.578.300,00	24.586.500,00	(4.991.800,00)	83,12	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	51.422.894,00	18.055.600,00	(33.367.294,00)	35,11	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	51.422.894,00	18.055.600,00	(33.367.294,00)	35,11	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.422.894,00	18.055.600,00	(33.367.294,00)	35,11	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.000.400,00	0,00	(10.000.400,00)	0,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.400,00	0,00	(10.000.400,00)	0,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.400,00	0,00	(10.000.400,00)	0,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	268.763.000,00	80.474.000,00	(188.289.000,00)	29,94	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	268.763.000,00	80.474.000,00	(188.289.000,00)	29,94	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.763.000,00	80.474.000,00	(188.289.000,00)	29,94	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	523.750.000,00	0,00	(523.750.000,00)	0,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	523.750.000,00	0,00	(523.750.000,00)	0,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	523.750.000,00	0,00	(523.750.000,00)	0,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	523.750.000,00	0,00	(523.750.000,00)	0,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	186.112.000,00	21.696.000,00	(164.416.000,00)	11,65	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.996.000,00	396.000,00	(3.600.000,00)	9,90	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.996.000,00	396.000,00	(3.600.000,00)	9,90	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.996.000,00	396.000,00	(3.600.000,00)	9,90	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	10.000.000,00	2.100.000,00	(7.900.000,00)	21,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	2.100.000,00	(7.900.000,00)	21,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	2.100.000,00	(7.900.000,00)	21,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	172.116.000,00	19.200.000,00	(152.916.000,00)	11,15	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	172.116.000,00	19.200.000,00	(152.916.000,00)	11,15	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.116.000,00	19.200.000,00	(152.916.000,00)	11,15	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	82.563.300,00	22.144.500,00	(60.418.800,00)	26,82	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	74.393.300,00	20.074.500,00	(54.318.800,00)	26,98	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	74.393.300,00	20.074.500,00	(54.318.800,00)	26,98	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.393.300,00	20.074.500,00	(54.318.800,00)	26,98	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	8.170.000,00	2.070.000,00	(6.100.000,00)	25,33	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.170.000,00	2.070.000,00	(6.100.000,00)	25,33	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.170.000,00	2.070.000,00	(6.100.000,00)	25,33	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.02.2.01		PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA (RTK)	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.02.2.01.0001		PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA MAKRO	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	204.394.000,00	13.878.000,00	(190.516.000,00)	6,78	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01		PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	204.394.000,00	13.878.000,00	(190.516.000,00)	6,78	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001		PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI	204.394.000,00	13.878.000,00	(190.516.000,00)	6,78	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	204.394.000,00	13.878.000,00	(190.516.000,00)	6,78	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.394.000,00	13.878.000,00	(190.516.000,00)	6,78	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	66.465.400,00	1.095.000,00	(65.370.400,00)	1,64	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.01		PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	0,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0003		PENYULUHAN DAN BIMBINGAN JABATAN BAGI PENCARI KERJA	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	0,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	0,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	0,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.03		PENGLOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	60.165.400,00	1.095.000,00	(59.070.400,00)	1,81	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0002		PELAYANAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PASAR KERJA ONLINE	60.165.400,00	1.095.000,00	(59.070.400,00)	1,81	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	60.165.400,00	1.095.000,00	(59.070.400,00)	1,81	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.165.400,00	1.095.000,00	(59.070.400,00)	1,81	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	488.316.542,00	67.839.182,00	(420.477.360,00)	13,89	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.01		PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.848.000,00	15.126.000,00	(23.722.000,00)	38,93	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.01.0003		PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN	38.848.000,00	15.126.000,00	(23.722.000,00)	38,93	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	38.848.000,00	15.126.000,00	(23.722.000,00)	38,93	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.848.000,00	15.126.000,00	(23.722.000,00)	38,93	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02		PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	449.468.542,00	52.713.182,00	(396.755.360,00)	11,72	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0001		PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.476.000,00	4.452.000,00	(24.000,00)	99,46	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.476.000,00	4.452.000,00	(24.000,00)	99,46	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.476.000,00	4.452.000,00	(24.000,00)	99,46	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0002		PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	60.528.291,00	40.275.682,00	(20.252.609,00)	66,54	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	60.528.291,00	40.275.682,00	(20.252.609,00)	66,54	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.528.291,00	40.275.682,00	(20.252.609,00)	66,54	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0005		PENGEMBANGAN PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA	384.464.251,00	7.985.500,00	(376.478.751,00)	2,07	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	384.464.251,00	7.985.500,00	(376.478.751,00)	2,07	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	384.464.251,00	7.985.500,00	(376.478.751,00)	2,07	
				JUMLAH BELANJA	5.663.434.575,00	562.106.527,00	(5.101.328.048,00)	9,92	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.663.434.575,00)	(562.106.527,00)	5.101.328.048,00	9,92	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.663.434.575,00)	(562.106.527,00)	5.101.328.048,00	9,92	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
 Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	151.469.400,00	28.132.000,00	(123.337.400,00)	18,57	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.02		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	118.814.400,00	28.132.000,00	(90.682.400,00)	23,67	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.02.2.01		PENCADANGAN TANAH UNTUK KAWASAN TRANSMIGRASI	118.814.400,00	28.132.000,00	(90.682.400,00)	23,67	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.02.2.01.0003		PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	118.814.400,00	28.132.000,00	(90.682.400,00)	23,67	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	118.814.400,00	28.132.000,00	(90.682.400,00)	23,67	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.814.400,00	28.132.000,00	(90.682.400,00)	23,67	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	32.655.000,00	0,00	(32.655.000,00)	0,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04.2.01		PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN PADA TAHAP KEMANDIRIAN	32.655.000,00	0,00	(32.655.000,00)	0,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04.2.01.0002		PENGUATAN INFRASTRUKTUR SOSIAL, EKONOMI DAN KELEMBAGAAN DALAM RANGKA KEMANDIRIAN SATUAN PEMUKIMAN	32.655.000,00	0,00	(32.655.000,00)	0,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	32.655.000,00	0,00	(32.655.000,00)	0,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.655.000,00	0,00	(32.655.000,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	151.469.400,00	28.132.000,00	(123.337.400,00)	18,57	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(151.469.400,00)	(28.132.000,00)	123.337.400,00	18,57	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(151.469.400,00)	(28.132.000,00)	123.337.400,00	18,57	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	11.738.596.428,00	1.827.443.874,00	(9.911.152.554,00)	15,56	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.824.758.677,34	740.749.048,00	(4.084.009.629,34)	15,35	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	17.262.000,00	3.346.000,00	(13.916.000,00)	19,38	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	7.156.000,00	0,00	(7.156.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.156.000,00	0,00	(7.156.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.156.000,00	0,00	(7.156.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	10.106.000,00	3.346.000,00	(6.760.000,00)	33,10	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.106.000,00	3.346.000,00	(6.760.000,00)	33,10	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.106.000,00	3.346.000,00	(6.760.000,00)	33,10	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.901.580.117,34	530.226.436,00	(3.371.353.681,34)	13,59	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.712.530.117,34	449.596.436,00	(3.262.933.681,34)	12,11	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.712.530.117,34	449.596.436,00	(3.262.933.681,34)	12,11	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.712.530.117,34	449.596.436,00	(3.262.933.681,34)	12,11	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	189.050.000,00	80.630.000,00	(108.420.000,00)	42,65	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	189.050.000,00	80.630.000,00	(108.420.000,00)	42,65	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.050.000,00	80.630.000,00	(108.420.000,00)	42,65	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	130.296.000,00	20.303.200,00	(109.992.800,00)	15,58	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	130.296.000,00	20.303.200,00	(109.992.800,00)	15,58	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	130.296.000,00	20.303.200,00	(109.992.800,00)	15,58	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.296.000,00	20.303.200,00	(109.992.800,00)	15,58	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	618.115.560,00	141.323.600,00	(476.791.960,00)	22,86	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	37.863.100,00	27.395.000,00	(10.468.100,00)	72,35	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.265.500,00	8.228.000,00	(37.500,00)	99,54	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.265.500,00	8.228.000,00	(37.500,00)	99,54	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	29.597.600,00	19.167.000,00	(10.430.600,00)	64,75	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.597.600,00	19.167.000,00	(10.430.600,00)	64,75	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	201.971.660,00	44.760.000,00	(157.211.660,00)	22,16	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	201.971.660,00	44.760.000,00	(157.211.660,00)	22,16	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.971.660,00	44.760.000,00	(157.211.660,00)	22,16	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	39.946.800,00	6.635.000,00	(33.311.800,00)	16,60	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	39.946.800,00	6.635.000,00	(33.311.800,00)	16,60	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.946.800,00	6.635.000,00	(33.311.800,00)	16,60	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	338.334.000,00	62.533.600,00	(275.800.400,00)	18,48	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	338.334.000,00	62.533.600,00	(275.800.400,00)	18,48	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.334.000,00	62.533.600,00	(275.800.400,00)	18,48	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	55.115.000,00	4.616.212,00	(50.498.788,00)	8,37	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	8.000.000,00	500.000,00	(7.500.000,00)	6,25	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	500.000,00	(7.500.000,00)	6,25	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	500.000,00	(7.500.000,00)	6,25	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	47.115.000,00	4.116.212,00	(42.998.788,00)	8,73	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	47.115.000,00	4.116.212,00	(42.998.788,00)	8,73	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.115.000,00	4.116.212,00	(42.998.788,00)	8,73	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	102.390.000,00	40.933.600,00	(61.456.400,00)	39,97	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	87.560.000,00	33.423.600,00	(54.136.400,00)	38,17	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	87.560.000,00	33.423.600,00	(54.136.400,00)	38,17	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.560.000,00	33.423.600,00	(54.136.400,00)	38,17	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	14.830.000,00	7.510.000,00	(7.320.000,00)	50,64	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	14.830.000,00	7.510.000,00	(7.320.000,00)	50,64	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.830.000,00	7.510.000,00	(7.320.000,00)	50,64	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	514.159.600,00	56.112.216,00	(458.047.384,00)	10,91	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01		RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA	514.159.600,00	56.112.216,00	(458.047.384,00)	10,91	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0006		PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA	514.159.600,00	56.112.216,00	(458.047.384,00)	10,91	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	514.159.600,00	56.112.216,00	(458.047.384,00)	10,91	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	514.159.600,00	56.112.216,00	(458.047.384,00)	10,91	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	260.823.000,00	66.000.000,00	(194.823.000,00)	25,30	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01		PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	260.823.000,00	66.000.000,00	(194.823.000,00)	25,30	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT	260.823.000,00	66.000.000,00	(194.823.000,00)	25,30	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	260.823.000,00	66.000.000,00	(194.823.000,00)	25,30	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.823.000,00	66.000.000,00	(194.823.000,00)	25,30	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	487.940.720,00	152.816.200,00	(335.124.520,00)	31,31	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01		PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	487.940.720,00	152.816.200,00	(335.124.520,00)	31,31	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004		PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	487.940.720,00	152.816.200,00	(335.124.520,00)	31,31	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	487.940.720,00	152.816.200,00	(335.124.520,00)	31,31	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	487.940.720,00	152.816.200,00	(335.124.520,00)	31,31	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	72.782.130,00	1.890.000,00	(70.892.130,00)	2,59	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	72.782.130,00	1.890.000,00	(70.892.130,00)	2,59	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001		FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH	72.782.130,00	1.890.000,00	(70.892.130,00)	2,59	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	72.782.130,00	1.890.000,00	(70.892.130,00)	2,59	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.782.130,00	1.890.000,00	(70.892.130,00)	2,59	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	28.045.600,66	12.938.600,00	(15.107.000,66)	46,13	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01		PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.045.600,66	12.938.600,00	(15.107.000,66)	46,13	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005		PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL/LEMBAGA MASYARAKAT/KOMUNITAS/KELOMPOK MASYARAKAT	28.045.600,66	12.938.600,00	(15.107.000,66)	46,13	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	28.045.600,66	12.938.600,00	(15.107.000,66)	46,13	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.045.600,66	12.938.600,00	(15.107.000,66)	46,13	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.550.086.700,00	796.937.810,00	(4.753.148.890,00)	14,35	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01		PENGELOLAAN SAMPAH	5.550.086.700,00	796.937.810,00	(4.753.148.890,00)	14,35	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0005		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	523.375.400,00	240.505.000,00	(282.870.400,00)	45,95	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	523.375.400,00	240.505.000,00	(282.870.400,00)	45,95	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	523.375.400,00	240.505.000,00	(282.870.400,00)	45,95	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA	893.720.200,00	23.900.000,00	(869.820.200,00)	2,67	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	593.720.200,00	23.900.000,00	(569.820.200,00)	4,02	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	593.720.200,00	23.900.000,00	(569.820.200,00)	4,02	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0020		PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST KABUPATEN/KOTA ATAU TPA/TPST REGIONAL	4.132.991.100,00	532.532.810,00	(3.600.458.290,00)	12,88	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	4.132.991.100,00	532.532.810,00	(3.600.458.290,00)	12,88	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.132.991.100,00	532.532.810,00	(3.600.458.290,00)	12,88	
				JUMLAH BELANJA	11.738.596.428,00	1.827.443.874,00	(9.911.152.554,00)	15,56	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(11.738.596.428,00)	(1.827.443.874,00)	9.911.152.554,00	15,56	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(11.738.596.428,00)	(1.827.443.874,00)	9.911.152.554,00	15,56	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	6.202.269.925,00	899.035.911,00	(5.303.234.014,00)	14,49	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.491.667.425,00	717.817.811,00	(4.773.849.614,00)	13,07	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	49.830.030,00	46.300.100,00	(3.529.930,00)	92,91	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	19.255.500,00	18.695.000,00	(560.500,00)	97,08	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.255.500,00	18.695.000,00	(560.500,00)	97,08	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.255.500,00	18.695.000,00	(560.500,00)	97,08	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	800.200,00	800.000,00	(200,00)	99,97	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	800.200,00	800.000,00	(200,00)	99,97	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.200,00	800.000,00	(200,00)	99,97	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	28.068.600,00	25.119.600,00	(2.949.000,00)	89,49	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	28.068.600,00	25.119.600,00	(2.949.000,00)	89,49	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.068.600,00	25.119.600,00	(2.949.000,00)	89,49	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.705.730,00	1.685.500,00	(20.230,00)	98,81	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.705.730,00	1.685.500,00	(20.230,00)	98,81	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.705.730,00	1.685.500,00	(20.230,00)	98,81	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.860.269.551,00	395.595.408,00	(3.464.674.143,00)	10,24	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.727.549.551,00	336.915.408,00	(3.390.634.143,00)	9,03	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.727.549.551,00	336.915.408,00	(3.390.634.143,00)	9,03	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.727.549.551,00	336.915.408,00	(3.390.634.143,00)	9,03	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	132.720.000,00	58.680.000,00	(74.040.000,00)	44,21	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	132.720.000,00	58.680.000,00	(74.040.000,00)	44,21	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.720.000,00	58.680.000,00	(74.040.000,00)	44,21	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	83.110.000,00	15.460.087,00	(67.649.913,00)	18,60	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	42.170.000,00	15.460.087,00	(26.709.913,00)	36,66	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	42.170.000,00	15.460.087,00	(26.709.913,00)	36,66	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.170.000,00	15.460.087,00	(26.709.913,00)	36,66	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0010		SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	40.940.000,00	0,00	(40.940.000,00)	0,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	40.940.000,00	0,00	(40.940.000,00)	0,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.940.000,00	0,00	(40.940.000,00)	0,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	914.016.760,00	137.115.001,00	(776.901.759,00)	15,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	5.959.200,00	5.816.400,00	(142.800,00)	97,60	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	5.959.200,00	5.816.400,00	(142.800,00)	97,60	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.959.200,00	5.816.400,00	(142.800,00)	97,60	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	476.898.560,00	60.870.700,00	(416.027.860,00)	12,76	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	474.808.560,00	58.860.700,00	(415.947.860,00)	12,39	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	474.808.560,00	58.860.700,00	(415.947.860,00)	12,39	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	5.2	BELANJA MODAL	2.090.000,00	2.010.000,00	(80.000,00)	96,17	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.090.000,00	2.010.000,00	(80.000,00)	96,17	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	54.380.000,00	28.000.000,00	(26.380.000,00)	51,48	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	54.380.000,00	28.000.000,00	(26.380.000,00)	51,48	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.380.000,00	28.000.000,00	(26.380.000,00)	51,48	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	8.640.000,00	800.000,00	(7.840.000,00)	9,25	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.640.000,00	800.000,00	(7.840.000,00)	9,25	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.640.000,00	800.000,00	(7.840.000,00)	9,25	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	368.139.000,00	41.627.901,00	(326.511.099,00)	11,30	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	368.139.000,00	41.627.901,00	(326.511.099,00)	11,30	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.139.000,00	41.627.901,00	(326.511.099,00)	11,30	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	476.161.084,00	85.770.215,00	(390.390.869,00)	18,01	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	248.401.084,00	76.092.455,00	(172.308.629,00)	30,63	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	248.401.084,00	76.092.455,00	(172.308.629,00)	30,63	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.401.084,00	76.092.455,00	(172.308.629,00)	30,63	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	224.760.000,00	9.677.760,00	(215.082.240,00)	4,30	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	224.760.000,00	9.677.760,00	(215.082.240,00)	4,30	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.760.000,00	9.677.760,00	(215.082.240,00)	4,30	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	108.280.000,00	37.577.000,00	(70.703.000,00)	34,70	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	88.780.000,00	29.057.000,00	(59.723.000,00)	32,72	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	88.780.000,00	29.057.000,00	(59.723.000,00)	32,72	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.780.000,00	29.057.000,00	(59.723.000,00)	32,72	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	19.500.000,00	8.520.000,00	(10.980.000,00)	43,69	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	19.500.000,00	8.520.000,00	(10.980.000,00)	43,69	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	8.520.000,00	(10.980.000,00)	43,69	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	186.581.000,00	78.082.400,00	(108.498.600,00)	41,84	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01		PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	70.978.000,00	35.052.000,00	(35.926.000,00)	49,38	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0001		PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN DAN RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	70.978.000,00	35.052.000,00	(35.926.000,00)	49,38	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	70.978.000,00	35.052.000,00	(35.926.000,00)	49,38	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.978.000,00	35.052.000,00	(35.926.000,00)	49,38	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03		PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK	115.603.000,00	43.030.400,00	(72.572.600,00)	37,22	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002		PELAYANAN SECARA AKTIF PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN PERISTIWA PENTING TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK	115.603.000,00	43.030.400,00	(72.572.600,00)	37,22	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	115.603.000,00	43.030.400,00	(72.572.600,00)	37,22	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.603.000,00	43.030.400,00	(72.572.600,00)	37,22	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	211.658.400,00	43.248.600,00	(168.409.800,00)	20,43	

KODE REKENING				URAIAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01		PELAYANAN PENCATATAN SIPIL		31.830.000,00	7.580.000,00	(24.250.000,00)	23,81	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002		PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL		31.830.000,00	7.580.000,00	(24.250.000,00)	23,81	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI		31.830.000,00	7.580.000,00	(24.250.000,00)	23,81	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		31.830.000,00	7.580.000,00	(24.250.000,00)	23,81	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02		PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL		179.828.400,00	35.668.600,00	(144.159.800,00)	19,83	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0004		PELAYANAN SECARA AKTIF PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN PERISTIWA PENTING TERKAIT PENCATATAN SIPIL		175.418.400,00	35.668.600,00	(139.749.800,00)	20,33	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI		175.418.400,00	35.668.600,00	(139.749.800,00)	20,33	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		175.418.400,00	35.668.600,00	(139.749.800,00)	20,33	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0008		SOSIALISASI TERKAIT PENCATATAN SIPIL		4.410.000,00	0,00	(4.410.000,00)	0,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI		4.410.000,00	0,00	(4.410.000,00)	0,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		4.410.000,00	0,00	(4.410.000,00)	0,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		240.123.100,00	50.928.100,00	(189.195.000,00)	21,20	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01		PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN		47.029.100,00	13.393.800,00	(33.635.300,00)	28,47	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0002		KERJA SAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN		47.029.100,00	13.393.800,00	(33.635.300,00)	28,47	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI		47.029.100,00	13.393.800,00	(33.635.300,00)	28,47	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		47.029.100,00	13.393.800,00	(33.635.300,00)	28,47	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03		PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		193.094.000,00	37.534.300,00	(155.559.700,00)	19,43	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003		FASILITASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		147.274.000,00	12.348.500,00	(134.925.500,00)	8,38	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI		147.274.000,00	12.348.500,00	(134.925.500,00)	8,38	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		147.274.000,00	12.348.500,00	(134.925.500,00)	8,38	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0005		SOSIALISASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		45.820.000,00	25.185.800,00	(20.634.200,00)	54,96	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI		45.820.000,00	25.185.800,00	(20.634.200,00)	54,96	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		45.820.000,00	25.185.800,00	(20.634.200,00)	54,96	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		72.240.000,00	8.959.000,00	(63.281.000,00)	12,40	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01		PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN		72.240.000,00	8.959.000,00	(63.281.000,00)	12,40	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002		PENYUSUNAN PROFIL DATA PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN SERTA KEBUTUHAN YANG LAIN		72.240.000,00	8.959.000,00	(63.281.000,00)	12,40	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI		72.240.000,00	8.959.000,00	(63.281.000,00)	12,40	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		72.240.000,00	8.959.000,00	(63.281.000,00)	12,40	
				JUMLAH BELANJA		6.202.269.925,00	899.035.911,00	(5.303.234.014,00)	14,49	
				SURPLUS / (DEFISIT)		(6.202.269.925,00)	(899.035.911,00)	5.303.234.014,00	14,49	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(6.202.269.925,00)	(899.035.911,00)	5.303.234.014,00	14,49	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : Dinas Perhubungan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	13.045.221.055,00	4.204.126.040,00	(8.841.095.015,00)	32,22	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.457.410.418,00	1.038.094.744,00	(6.419.315.674,00)	13,92	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	28.644.000,00	25.704.400,00	(2.939.600,00)	89,73	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	28.644.000,00	25.704.400,00	(2.939.600,00)	89,73	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	28.644.000,00	25.704.400,00	(2.939.600,00)	89,73	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.644.000,00	25.704.400,00	(2.939.600,00)	89,73	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.668.634.811,00	514.799.294,00	(4.153.835.517,00)	11,02	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.405.894.811,00	428.909.294,00	(3.976.985.517,00)	9,73	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.405.894.811,00	428.909.294,00	(3.976.985.517,00)	9,73	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.405.894.811,00	428.909.294,00	(3.976.985.517,00)	9,73	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	262.740.000,00	85.890.000,00	(176.850.000,00)	32,69	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	262.740.000,00	85.890.000,00	(176.850.000,00)	32,69	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.740.000,00	85.890.000,00	(176.850.000,00)	32,69	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	87.430.000,00	16.513.000,00	(70.917.000,00)	18,88	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	87.430.000,00	16.513.000,00	(70.917.000,00)	18,88	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	87.430.000,00	16.513.000,00	(70.917.000,00)	18,88	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.430.000,00	16.513.000,00	(70.917.000,00)	18,88	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.133.006.369,00	274.377.200,00	(858.629.169,00)	24,21	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	439.411.369,00	188.211.000,00	(251.200.369,00)	42,83	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	439.411.369,00	188.211.000,00	(251.200.369,00)	42,83	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	439.411.369,00	188.211.000,00	(251.200.369,00)	42,83	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	44.900.000,00	5.000.000,00	(39.900.000,00)	11,13	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	44.900.000,00	5.000.000,00	(39.900.000,00)	11,13	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.900.000,00	5.000.000,00	(39.900.000,00)	11,13	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	648.695.000,00	81.166.200,00	(567.528.800,00)	12,51	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	648.695.000,00	81.166.200,00	(567.528.800,00)	12,51	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	648.695.000,00	81.166.200,00	(567.528.800,00)	12,51	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	649.188.334,00	58.678.550,00	(590.509.784,00)	9,03	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	523.750.000,00	0,00	(523.750.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	523.750.000,00	0,00	(523.750.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	523.750.000,00	0,00	(523.750.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	34.502.100,00	6.338.100,00	(28.164.000,00)	18,37	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	34.502.100,00	6.338.100,00	(28.164.000,00)	18,37	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.502.100,00	6.338.100,00	(28.164.000,00)	18,37	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	90.936.234,00	52.340.450,00	(38.595.784,00)	57,55	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	90.936.234,00	52.340.450,00	(38.595.784,00)	57,55	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.936.234,00	52.340.450,00	(38.595.784,00)	57,55	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	551.120.104,00	43.130.900,00	(507.989.204,00)	7,82	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	33,33	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	33,33	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	33,33	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	91.380.104,00	3.420.000,00	(87.960.104,00)	3,74	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	91.380.104,00	3.420.000,00	(87.960.104,00)	3,74	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.380.104,00	3.420.000,00	(87.960.104,00)	3,74	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	456.740.000,00	38.710.900,00	(418.029.100,00)	8,47	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	456.740.000,00	38.710.900,00	(418.029.100,00)	8,47	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	456.740.000,00	38.710.900,00	(418.029.100,00)	8,47	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	339.386.800,00	104.891.400,00	(234.495.400,00)	30,90	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	339.386.800,00	104.891.400,00	(234.495.400,00)	30,90	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	339.386.800,00	104.891.400,00	(234.495.400,00)	30,90	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.386.800,00	104.891.400,00	(234.495.400,00)	30,90	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.000.638.560,00	2.500.111.196,00	(1.500.527.364,00)	62,49	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02		PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	3.383.258.560,00	2.225.392.896,00	(1.157.865.664,00)	65,77	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0001		PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	236.000.000,00	234.050.000,00	(1.950.000,00)	99,17	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	236.000.000,00	234.050.000,00	(1.950.000,00)	99,17	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	236.000.000,00	234.050.000,00	(1.950.000,00)	99,17	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002		PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	3.147.258.560,00	1.991.342.896,00	(1.155.915.664,00)	63,27	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	700.480.700,00	334.031.896,00	(366.448.804,00)	47,68	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.480.700,00	334.031.896,00	(366.448.804,00)	47,68	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	2.446.777.860,00	1.657.311.000,00	(789.466.860,00)	67,73	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	215.742.000,00	0,00	(215.742.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	172.357.745,00	164.250.000,00	(8.107.745,00)	95,29	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.058.678.115,00	1.493.061.000,00	(565.617.115,00)	72,52	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06		PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	617.380.000,00	274.718.300,00	(342.661.700,00)	44,49	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0015		FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	116.310.000,00	104.366.000,00	(11.944.000,00)	89,73	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0015	5.1	BELANJA OPERASI	116.310.000,00	104.366.000,00	(11.944.000,00)	89,73	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.310.000,00	104.366.000,00	(11.944.000,00)	89,73	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0017		PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	501.070.000,00	170.352.300,00	(330.717.700,00)	33,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0017	5.1	BELANJA OPERASI	501.070.000,00	170.352.300,00	(330.717.700,00)	33,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	501.070.000,00	170.352.300,00	(330.717.700,00)	33,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.587.172.077,00	665.920.100,00	(921.251.977,00)	41,95	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13		PEMBANGUNAN DAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU	1.587.172.077,00	665.920.100,00	(921.251.977,00)	41,95	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13.0002		PEMBANGUNAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU	1.587.172.077,00	665.920.100,00	(921.251.977,00)	41,95	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	812.219.000,00	309.690.100,00	(502.528.900,00)	38,12	

KODE REKENING				URAIAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		812.219.000,00	309.690.100,00	(502.528.900,00)	38,12	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13.0002	5.2	BELANJA MODAL		774.953.077,00	356.230.000,00	(418.723.077,00)	45,96	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		577.965.577,00	356.230.000,00	(221.735.577,00)	61,63	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		196.987.500,00	0,00	(196.987.500,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA		13.045.221.055,00	4.204.126.040,00	(8.841.095.015,00)	32,22	
				SURPLUS / (DEFISIT)		(13.045.221.055,00)	(4.204.126.040,00)	8.841.095.015,00	32,22	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(13.045.221.055,00)	(4.204.126.040,00)	8.841.095.015,00	32,22	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		5	BELANJA DAERAH	8.390.119.488,00	1.296.347.550,00	(7.093.771.938,00)	15,45	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.859.771.488,00	687.813.236,00	(5.171.958.252,00)	11,73	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	50.489.000,00	23.052.640,00	(27.436.360,00)	45,65	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	50.489.000,00	23.052.640,00	(27.436.360,00)	45,65	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	50.489.000,00	23.052.640,00	(27.436.360,00)	45,65	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.489.000,00	23.052.640,00	(27.436.360,00)	45,65	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.103.364.238,00	569.576.316,00	(4.533.787.922,00)	11,16	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.904.124.238,00	420.576.316,00	(4.483.547.922,00)	8,57	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.904.124.238,00	420.576.316,00	(4.483.547.922,00)	8,57	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.904.124.238,00	420.576.316,00	(4.483.547.922,00)	8,57	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	199.240.000,00	149.000.000,00	(50.240.000,00)	74,78	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	199.240.000,00	149.000.000,00	(50.240.000,00)	74,78	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.240.000,00	149.000.000,00	(50.240.000,00)	74,78	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	297.686.250,00	33.859.800,00	(263.826.450,00)	11,37	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	109.270.350,00	0,00	(109.270.350,00)	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	109.270.350,00	0,00	(109.270.350,00)	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.270.350,00	0,00	(109.270.350,00)	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	38.223.900,00	6.991.600,00	(31.232.300,00)	18,29	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	38.223.900,00	6.991.600,00	(31.232.300,00)	18,29	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.223.900,00	6.991.600,00	(31.232.300,00)	18,29	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	150.192.000,00	26.868.200,00	(123.323.800,00)	17,88	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	150.192.000,00	26.868.200,00	(123.323.800,00)	17,88	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.192.000,00	26.868.200,00	(123.323.800,00)	17,88	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	291.492.000,00	43.195.880,00	(248.296.120,00)	14,81	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.600.000,00	1.100.000,00	(2.500.000,00)	30,55	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	1.100.000,00	(2.500.000,00)	30,55	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	1.100.000,00	(2.500.000,00)	30,55	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	136.260.000,00	37.257.000,00	(99.003.000,00)	27,34	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	136.260.000,00	37.257.000,00	(99.003.000,00)	27,34	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.260.000,00	37.257.000,00	(99.003.000,00)	27,34	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	151.632.000,00	4.838.880,00	(146.793.120,00)	3,19	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	151.632.000,00	4.838.880,00	(146.793.120,00)	3,19	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.632.000,00	4.838.880,00	(146.793.120,00)	3,19	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	116.740.000,00	18.128.600,00	(98.611.400,00)	15,52	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	108.940.000,00	14.028.600,00	(94.911.400,00)	12,87	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	108.940.000,00	14.028.600,00	(94.911.400,00)	12,87	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.940.000,00	14.028.600,00	(94.911.400,00)	12,87	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	7.800.000,00	4.100.000,00	(3.700.000,00)	52,56	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.800.000,00	4.100.000,00	(3.700.000,00)	52,56	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	4.100.000,00	(3.700.000,00)	52,56	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.201.739.000,00	313.781.714,00	(887.957.286,00)	26,11	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01		PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.201.739.000,00	313.781.714,00	(887.957.286,00)	26,11	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0014		RELASI MEDIA	285.890.000,00	114.556.750,00	(171.333.250,00)	40,07	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	285.890.000,00	114.556.750,00	(171.333.250,00)	40,07	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.890.000,00	114.556.750,00	(171.333.250,00)	40,07	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0015		KEMITRAAN KOMUNIKASI DENGAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT	27.675.000,00	13.801.352,00	(13.873.648,00)	49,86	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	27.675.000,00	13.801.352,00	(13.873.648,00)	49,86	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.675.000,00	13.801.352,00	(13.873.648,00)	49,86	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0017		PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	468.783.000,00	95.303.200,00	(373.479.800,00)	20,32	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	468.783.000,00	95.303.200,00	(373.479.800,00)	20,32	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	468.783.000,00	95.303.200,00	(373.479.800,00)	20,32	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0019		MONITORING INFORMASI KEBIJAKAN, OPINI, DAN ASPIRASI PUBLIK	373.933.000,00	59.985.256,00	(313.947.744,00)	16,04	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	373.933.000,00	59.985.256,00	(313.947.744,00)	16,04	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	373.933.000,00	59.985.256,00	(313.947.744,00)	16,04	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0024		PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI PUBLIK	45.458.000,00	30.135.156,00	(15.322.844,00)	66,29	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0024	5.1	BELANJA OPERASI	45.458.000,00	30.135.156,00	(15.322.844,00)	66,29	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.458.000,00	30.135.156,00	(15.322.844,00)	66,29	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.328.609.000,00	294.752.600,00	(1.033.856.400,00)	22,18	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.01		PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.600.000,00	17.800.000,00	(18.800.000,00)	48,63	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.01.0004		PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN PEMERINTAH DESA	36.600.000,00	17.800.000,00	(18.800.000,00)	48,63	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	36.600.000,00	17.800.000,00	(18.800.000,00)	48,63	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.600.000,00	17.800.000,00	(18.800.000,00)	48,63	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02		PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.292.009.000,00	276.952.600,00	(1.015.056.400,00)	21,43	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0015		FASILITASI PENYELENGGARAAN SPBE DI LINGKUNGAN PEMDA	72.100.000,00	0,00	(72.100.000,00)	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	72.100.000,00	0,00	(72.100.000,00)	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.100.000,00	0,00	(72.100.000,00)	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0024		PENYELENGGARAAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	1.219.909.000,00	276.952.600,00	(942.956.400,00)	22,70	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0024	5.1	BELANJA OPERASI	1.219.909.000,00	276.952.600,00	(942.956.400,00)	22,70	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.219.909.000,00	276.952.600,00	(942.956.400,00)	22,70	
JUMLAH BELANJA					8.390.119.488,00	1.296.347.550,00	(7.093.771.938,00)	15,45	
SURPLUS / (DEFISIT)					(8.390.119.488,00)	(1.296.347.550,00)	7.093.771.938,00	15,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.390.119.488,00)	(1.296.347.550,00)	7.093.771.938,00	15,45	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
 Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000		5	BELANJA DAERAH	224.663.800,00	102.737.586,00	(121.926.214,00)	45,72	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	224.663.800,00	102.737.586,00	(121.926.214,00)	45,72	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01		PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	224.663.800,00	102.737.586,00	(121.926.214,00)	45,72	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0007		PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN STATISTIK SEKTORAL	12.806.000,00	3.471.242,00	(9.334.758,00)	27,10	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	12.806.000,00	3.471.242,00	(9.334.758,00)	27,10	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.806.000,00	3.471.242,00	(9.334.758,00)	27,10	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0010		PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA	53.582.000,00	49.091.344,00	(4.490.656,00)	91,61	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	53.582.000,00	49.091.344,00	(4.490.656,00)	91,61	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.582.000,00	49.091.344,00	(4.490.656,00)	91,61	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0011		PELAKSANAAN PROSES BISNIS STATISTIK SEKTORAL SESUAI STANDAR	158.275.800,00	50.175.000,00	(108.100.800,00)	31,70	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	138.414.000,00	30.750.000,00	(107.664.000,00)	22,21	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.414.000,00	30.750.000,00	(107.664.000,00)	22,21	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0011	5.2	BELANJA MODAL	19.861.800,00	19.425.000,00	(436.800,00)	97,80	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.861.800,00	19.425.000,00	(436.800,00)	97,80	
				JUMLAH BELANJA	224.663.800,00	102.737.586,00	(121.926.214,00)	45,72	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(224.663.800,00)	(102.737.586,00)	121.926.214,00	45,72	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(224.663.800,00)	(102.737.586,00)	121.926.214,00	45,72	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000		5	BELANJA DAERAH	125.355.000,00	14.343.600,00	(111.011.400,00)	11,44	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	125.355.000,00	14.343.600,00	(111.011.400,00)	11,44	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01		PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	125.355.000,00	14.343.600,00	(111.011.400,00)	11,44	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0001		PENETAPAN KEBIJAKAN TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI DAN JARING KOMUNIKASI SANDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.902.000,00	0,00	(14.902.000,00)	0,00	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.902.000,00	0,00	(14.902.000,00)	0,00	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.902.000,00	0,00	(14.902.000,00)	0,00	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0002		PELAKSANAAN ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	78.028.000,00	1.772.400,00	(76.255.600,00)	2,27	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	78.028.000,00	1.772.400,00	(76.255.600,00)	2,27	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.028.000,00	1.772.400,00	(76.255.600,00)	2,27	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0003		PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK	13.925.000,00	1.471.200,00	(12.453.800,00)	10,56	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	13.925.000,00	1.471.200,00	(12.453.800,00)	10,56	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.925.000,00	1.471.200,00	(12.453.800,00)	10,56	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0004		PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.500.000,00	11.100.000,00	(7.400.000,00)	60,00	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	18.500.000,00	11.100.000,00	(7.400.000,00)	60,00	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	11.100.000,00	(7.400.000,00)	60,00	
JUMLAH BELANJA					125.355.000,00	14.343.600,00	(111.011.400,00)	11,44	
SURPLUS / (DEFISIT)					(125.355.000,00)	(14.343.600,00)	111.011.400,00	11,44	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)					(125.355.000,00)	(14.343.600,00)	111.011.400,00	11,44	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	6.140.743.378,00	1.020.779.050,00	(5.119.964.328,00)	16,62	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.299.400.778,00	703.572.926,00	(4.595.827.852,00)	13,27	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.213.500,00	0,00	(3.213.500,00)	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1.806.200,00	0,00	(1.806.200,00)	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.806.200,00	0,00	(1.806.200,00)	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.806.200,00	0,00	(1.806.200,00)	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.407.300,00	0,00	(1.407.300,00)	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.407.300,00	0,00	(1.407.300,00)	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.407.300,00	0,00	(1.407.300,00)	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.956.421.200,00	489.388.242,00	(3.467.032.958,00)	12,36	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.797.651.200,00	364.458.242,00	(3.433.192.958,00)	9,59	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.797.651.200,00	364.458.242,00	(3.433.192.958,00)	9,59	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.797.651.200,00	364.458.242,00	(3.433.192.958,00)	9,59	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	158.770.000,00	124.930.000,00	(33.840.000,00)	78,68	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	158.770.000,00	124.930.000,00	(33.840.000,00)	78,68	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.770.000,00	124.930.000,00	(33.840.000,00)	78,68	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	23.665.000,00	0,00	(23.665.000,00)	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	23.665.000,00	0,00	(23.665.000,00)	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	23.665.000,00	0,00	(23.665.000,00)	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.665.000,00	0,00	(23.665.000,00)	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	842.703.018,00	128.579.684,00	(714.123.334,00)	15,25	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	54.887.000,00	0,00	(54.887.000,00)	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	54.887.000,00	0,00	(54.887.000,00)	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.887.000,00	0,00	(54.887.000,00)	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	221.044.500,00	54.390.000,00	(166.654.500,00)	24,60	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	221.044.500,00	54.390.000,00	(166.654.500,00)	24,60	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	221.044.500,00	54.390.000,00	(166.654.500,00)	24,60	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	122.191.918,00	0,00	(122.191.918,00)	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	122.191.918,00	0,00	(122.191.918,00)	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.191.918,00	0,00	(122.191.918,00)	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	43.047.600,00	0,00	(43.047.600,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	43.047.600,00	0,00	(43.047.600,00)	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.047.600,00	0,00	(43.047.600,00)	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	401.532.000,00	74.189.684,00	(327.342.316,00)	18,47	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	401.532.000,00	74.189.684,00	(327.342.316,00)	18,47	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	401.532.000,00	74.189.684,00	(327.342.316,00)	18,47	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	48.188.660,00	2.745.000,00	(45.443.660,00)	5,69	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	48.188.660,00	2.745.000,00	(45.443.660,00)	5,69	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	48.188.660,00	2.745.000,00	(45.443.660,00)	5,69	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.188.660,00	2.745.000,00	(45.443.660,00)	5,69	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	325.946.400,00	39.562.000,00	(286.384.400,00)	12,13	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	139.124.000,00	39.562.000,00	(99.562.000,00)	28,43	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	139.124.000,00	39.562.000,00	(99.562.000,00)	28,43	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.124.000,00	39.562.000,00	(99.562.000,00)	28,43	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	182.822.400,00	0,00	(182.822.400,00)	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	182.822.400,00	0,00	(182.822.400,00)	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.822.400,00	0,00	(182.822.400,00)	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	99.263.000,00	43.298.000,00	(55.965.000,00)	43,61	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	67.680.000,00	31.090.000,00	(36.590.000,00)	45,93	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	67.680.000,00	31.090.000,00	(36.590.000,00)	45,93	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.680.000,00	31.090.000,00	(36.590.000,00)	45,93	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	19.290.000,00	0,00	(19.290.000,00)	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	19.290.000,00	0,00	(19.290.000,00)	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.290.000,00	0,00	(19.290.000,00)	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	12.293.000,00	12.208.000,00	(85.000,00)	99,30	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	12.293.000,00	12.208.000,00	(85.000,00)	99,30	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.293.000,00	12.208.000,00	(85.000,00)	99,30	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	158.694.000,00	98.817.021,00	(59.876.979,00)	62,26	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.01		PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	158.694.000,00	98.817.021,00	(59.876.979,00)	62,26	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.01.0004		REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKTOR USAHA YANG REGULASINYA DIHARMONISASI TERKAIT PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO	158.694.000,00	98.817.021,00	(59.876.979,00)	62,26	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	158.694.000,00	98.817.021,00	(59.876.979,00)	62,26	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.694.000,00	98.817.021,00	(59.876.979,00)	62,26	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	210.792.100,00	142.508.003,00	(68.284.097,00)	67,60	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01		PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	210.792.100,00	142.508.003,00	(68.284.097,00)	67,60	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002		PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	125.261.000,00	75.146.543,00	(50.114.457,00)	59,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	125.261.000,00	75.146.543,00	(50.114.457,00)	59,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.261.000,00	75.146.543,00	(50.114.457,00)	59,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0003		PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	85.531.100,00	67.361.460,00	(18.169.640,00)	78,75	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	85.531.100,00	67.361.460,00	(18.169.640,00)	78,75	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.531.100,00	67.361.460,00	(18.169.640,00)	78,75	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	280.732.100,00	10.995.200,00	(269.736.900,00)	3,91	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01		PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	280.732.100,00	10.995.200,00	(269.736.900,00)	3,91	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006		PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	188.742.700,00	2.694.200,00	(186.048.500,00)	1,42	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	188.742.700,00	2.694.200,00	(186.048.500,00)	1,42	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.742.700,00	2.694.200,00	(186.048.500,00)	1,42	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007		PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	33.885.100,00	0,00	(33.885.100,00)	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	33.885.100,00	0,00	(33.885.100,00)	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.885.100,00	0,00	(33.885.100,00)	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0008		PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	58.104.300,00	8.301.000,00	(49.803.300,00)	14,28	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	58.104.300,00	8.301.000,00	(49.803.300,00)	14,28	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.104.300,00	8.301.000,00	(49.803.300,00)	14,28	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	94.048.500,00	48.741.600,00	(45.306.900,00)	51,82	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01		PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	94.048.500,00	48.741.600,00	(45.306.900,00)	51,82	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004		PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA	33.727.500,00	15.387.200,00	(18.340.300,00)	45,62	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	33.727.500,00	15.387.200,00	(18.340.300,00)	45,62	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.727.500,00	15.387.200,00	(18.340.300,00)	45,62	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0005		BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA	29.117.000,00	25.160.400,00	(3.956.600,00)	86,41	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	29.117.000,00	25.160.400,00	(3.956.600,00)	86,41	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.117.000,00	25.160.400,00	(3.956.600,00)	86,41	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006		PENGAWASAN PENANAMAN MODAL	31.204.000,00	8.194.000,00	(23.010.000,00)	26,25	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	31.204.000,00	8.194.000,00	(23.010.000,00)	26,25	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.204.000,00	8.194.000,00	(23.010.000,00)	26,25	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	97.075.900,00	16.144.300,00	(80.931.600,00)	16,63	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01		PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	97.075.900,00	16.144.300,00	(80.931.600,00)	16,63	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01.0002		PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	97.075.900,00	16.144.300,00	(80.931.600,00)	16,63	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	97.075.900,00	16.144.300,00	(80.931.600,00)	16,63	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.075.900,00	16.144.300,00	(80.931.600,00)	16,63	
				JUMLAH BELANJA	6.140.743.378,00	1.020.779.050,00	(5.119.964.328,00)	16,62	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(6.140.743.378,00)	(1.020.779.050,00)	5.119.964.328,00	16,62	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.140.743.378,00)	(1.020.779.050,00)	5.119.964.328,00	16,62	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	15.755.621.027,00	4.353.864.794,00	(11.401.756.233,00)	27,63	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.862.740.408,00	540.686.383,00	(3.322.054.025,00)	13,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	8.323.500,00	2.660.000,00	(5.663.500,00)	31,95	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	8.323.500,00	2.660.000,00	(5.663.500,00)	31,95	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.323.500,00	2.660.000,00	(5.663.500,00)	31,95	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.323.500,00	2.660.000,00	(5.663.500,00)	31,95	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.183.373.619,00	428.296.183,00	(2.755.077.436,00)	13,45	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.013.974.819,00	356.346.183,00	(2.657.628.636,00)	11,82	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.013.974.819,00	356.346.183,00	(2.657.628.636,00)	11,82	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.013.974.819,00	356.346.183,00	(2.657.628.636,00)	11,82	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	162.970.000,00	71.950.000,00	(91.020.000,00)	44,14	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	162.970.000,00	71.950.000,00	(91.020.000,00)	44,14	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.970.000,00	71.950.000,00	(91.020.000,00)	44,14	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	6.428.800,00	0,00	(6.428.800,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	6.428.800,00	0,00	(6.428.800,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.428.800,00	0,00	(6.428.800,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	23.239.200,00	21.985.200,00	(1.254.000,00)	94,60	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	23.239.200,00	21.985.200,00	(1.254.000,00)	94,60	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	23.239.200,00	21.985.200,00	(1.254.000,00)	94,60	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.239.200,00	21.985.200,00	(1.254.000,00)	94,60	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	321.621.400,00	45.974.000,00	(275.647.400,00)	14,29	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.819.500,00	0,00	(6.819.500,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.819.500,00	0,00	(6.819.500,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.819.500,00	0,00	(6.819.500,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	17.256.800,00	4.790.000,00	(12.466.800,00)	27,75	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.464.000,00	0,00	(12.464.000,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.464.000,00	0,00	(12.464.000,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	4.792.800,00	4.790.000,00	(2.800,00)	99,94	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.792.800,00	4.790.000,00	(2.800,00)	99,94	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	67.474.400,00	0,00	(67.474.400,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	67.474.400,00	0,00	(67.474.400,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.474.400,00	0,00	(67.474.400,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	220.070.700,00	41.184.000,00	(178.886.700,00)	18,71	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	220.070.700,00	41.184.000,00	(178.886.700,00)	18,71	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.070.700,00	41.184.000,00	(178.886.700,00)	18,71	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	42.441.489,00	12.439.000,00	(30.002.489,00)	29,30	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	12.441.489,00	12.439.000,00	(2.489,00)	99,97	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	12.441.489,00	12.439.000,00	(2.489,00)	99,97	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.441.489,00	12.439.000,00	(2.489,00)	99,97	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	225.171.200,00	21.990.400,00	(203.180.800,00)	9,76	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	44.960.000,00	7.396.000,00	(37.564.000,00)	16,45	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	44.960.000,00	7.396.000,00	(37.564.000,00)	16,45	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.960.000,00	7.396.000,00	(37.564.000,00)	16,45	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	174.211.200,00	14.594.400,00	(159.616.800,00)	8,37	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	174.211.200,00	14.594.400,00	(159.616.800,00)	8,37	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.211.200,00	14.594.400,00	(159.616.800,00)	8,37	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	58.570.000,00	7.341.600,00	(51.228.400,00)	12,53	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	45.620.000,00	7.341.600,00	(38.278.400,00)	16,09	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	45.620.000,00	7.341.600,00	(38.278.400,00)	16,09	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.620.000,00	7.341.600,00	(38.278.400,00)	16,09	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	12.950.000,00	0,00	(12.950.000,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.950.000,00	0,00	(12.950.000,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.950.000,00	0,00	(12.950.000,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	11.892.880.619,00	3.813.178.411,00	(8.079.702.208,00)	32,06	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01		PENGLOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.115.050.600,00	105.603.782,00	(1.009.446.818,00)	9,47	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0004		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	65.079.700,00	36.138.100,00	(28.941.600,00)	55,52	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	65.079.700,00	36.138.100,00	(28.941.600,00)	55,52	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.079.700,00	36.138.100,00	(28.941.600,00)	55,52	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0011		PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0011	5.2	BELANJA MODAL	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0016		PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.118.900,00	30.853.000,00	(19.265.900,00)	61,55	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	50.118.900,00	30.853.000,00	(19.265.900,00)	61,55	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.118.900,00	30.853.000,00	(19.265.900,00)	61,55	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0018		PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PERPUSTAKAAN	200.000.000,00	38.612.682,00	(161.387.318,00)	19,30	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0018	5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	38.612.682,00	(161.387.318,00)	19,30	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0018	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	38.612.682,00	(161.387.318,00)	19,30	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0020		PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK	299.852.000,00	0,00	(299.852.000,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0020	5.2	BELANJA MODAL	299.852.000,00	0,00	(299.852.000,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0020	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	299.852.000,00	0,00	(299.852.000,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02		PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.777.830.019,00	3.707.574.629,00	(7.070.255.390,00)	34,40	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0007		PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL	88.152.800,00	18.969.000,00	(69.183.800,00)	21,51	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	88.152.800,00	18.969.000,00	(69.183.800,00)	21,51	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.152.800,00	18.969.000,00	(69.183.800,00)	21,51	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0008		PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PERPUSTAKAAN DI TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.540.865.219,00	3.688.605.629,00	(6.852.259.590,00)	34,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	190.885.219,00	134.810.000,00	(56.075.219,00)	70,62	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.885.219,00	134.810.000,00	(56.075.219,00)	70,62	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0008	5.2	BELANJA MODAL	10.349.980.000,00	3.553.795.629,00	(6.796.184.371,00)	34,33	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0008	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.349.980.000,00	3.553.795.629,00	(6.796.184.371,00)	34,33	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0009		PEMBERIAN PENGHARGAAN GERAKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA	87.860.400,00	0,00	(87.860.400,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	87.860.400,00	0,00	(87.860.400,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.860.400,00	0,00	(87.860.400,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0010		SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MASYARAKAT	60.951.600,00	0,00	(60.951.600,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	60.951.600,00	0,00	(60.951.600,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.951.600,00	0,00	(60.951.600,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	15.755.621.027,00	4.353.864.794,00	(11.401.756.233,00)	27,63	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(15.755.621.027,00)	(4.353.864.794,00)	11.401.756.233,00	27,63	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(15.755.621.027,00)	(4.353.864.794,00)	11.401.756.233,00	27,63	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
 Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	283.014.125,00	28.729.600,00	(254.284.525,00)	10,15	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	283.014.125,00	28.729.600,00	(254.284.525,00)	10,15	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01		PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	181.849.125,00	19.332.400,00	(162.516.725,00)	10,63	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001		PENCIPTAAN DAN PENGGUNAAN ARSIP DINAMIS	37.720.625,00	0,00	(37.720.625,00)	0,00	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	37.720.625,00	0,00	(37.720.625,00)	0,00	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.720.625,00	0,00	(37.720.625,00)	0,00	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0002		PEMELIHARAAN DAN PENYUSUTAN ARSIP DINAMIS	62.078.500,00	0,00	(62.078.500,00)	0,00	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	62.078.500,00	0,00	(62.078.500,00)	0,00	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.078.500,00	0,00	(62.078.500,00)	0,00	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003		PENGAWASAN ARSIP DINAMIS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	82.050.000,00	19.332.400,00	(62.717.600,00)	23,56	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	82.050.000,00	19.332.400,00	(62.717.600,00)	23,56	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.050.000,00	19.332.400,00	(62.717.600,00)	23,56	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.02		PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.540.000,00	1.101.200,00	(31.438.800,00)	3,38	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.02.0001		PENGUMPULAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN OTENTIK NASKAH ASLI ARSIP TERJAGA KEPADA ANRI	32.540.000,00	1.101.200,00	(31.438.800,00)	3,38	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	32.540.000,00	1.101.200,00	(31.438.800,00)	3,38	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.540.000,00	1.101.200,00	(31.438.800,00)	3,38	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03		PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA	68.625.000,00	8.296.000,00	(60.329.000,00)	12,08	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0001		PENYEDIAAN INFORMASI, AKSES DAN LAYANAN KEARSIPAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA MELALUI JIKN	68.625.000,00	8.296.000,00	(60.329.000,00)	12,08	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	68.625.000,00	8.296.000,00	(60.329.000,00)	12,08	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.625.000,00	8.296.000,00	(60.329.000,00)	12,08	
JUMLAH BELANJA					283.014.125,00	28.729.600,00	(254.284.525,00)	10,15	
SURPLUS / (DEFISIT)					(283.014.125,00)	(28.729.600,00)	254.284.525,00	10,15	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)					(283.014.125,00)	(28.729.600,00)	254.284.525,00	10,15	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 Organisasi : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.752.465.736,00	339.424.300,00	(1.413.041.436,00)	19,36	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	554.102.000,00	1.342.400,00	(552.759.600,00)	0,24	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.01		PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA	554.102.000,00	1.342.400,00	(552.759.600,00)	0,24	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0015		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEPELOPORAN PEMUDA BAGI PEMUDA PELOPOR TINGKAT KABUPATEN/KOTA	554.102.000,00	1.342.400,00	(552.759.600,00)	0,24	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	554.102.000,00	1.342.400,00	(552.759.600,00)	0,24	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	329.102.000,00	1.342.400,00	(327.759.600,00)	0,40	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0015	5.1.05	Belanja Hibah	225.000.000,00	0,00	(225.000.000,00)	0,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.198.363.736,00	338.081.900,00	(860.281.836,00)	28,21	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	321.700.800,00	264.344.818,00	(57.355.982,00)	82,17	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA OLAHRAGA MELALUI PERENCANAAN, PENGADAAN, PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGAWASAN PRASARANA OLAHRAGA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	321.700.800,00	264.344.818,00	(57.355.982,00)	82,17	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	55.564.000,00	0,00	(55.564.000,00)	0,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.564.000,00	0,00	(55.564.000,00)	0,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	266.136.800,00	264.344.818,00	(1.791.982,00)	99,32	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	266.136.800,00	264.344.818,00	(1.791.982,00)	99,32	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02		PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	757.274.350,00	70.192.282,00	(687.082.068,00)	9,26	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0006		KEIKUTSERTAAN ANGGOTA KONTINGEN KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA	757.274.350,00	70.192.282,00	(687.082.068,00)	9,26	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	757.274.350,00	70.192.282,00	(687.082.068,00)	9,26	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	757.274.350,00	70.192.282,00	(687.082.068,00)	9,26	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI	119.388.586,00	3.544.800,00	(115.843.786,00)	2,96	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0006		PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN OLAHRAGA REKREASI	49.000.000,00	0,00	(49.000.000,00)	0,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0006	5.1	BELANJA OPERASI	49.000.000,00	0,00	(49.000.000,00)	0,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0006	5.1.05	Belanja Hibah	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	0,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0009		PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA REKREASI MELALUI PERENCANAAN, PENGADAAN, PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGAWASAN	70.388.586,00	3.544.800,00	(66.843.786,00)	5,03	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	70.388.586,00	3.544.800,00	(66.843.786,00)	5,03	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.388.586,00	3.544.800,00	(66.843.786,00)	5,03	
				JUMLAH BELANJA	1.752.465.736,00	339.424.300,00	(1.413.041.436,00)	19,36	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.752.465.736,00)	(339.424.300,00)	1.413.041.436,00	19,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.752.465.736,00)	(339.424.300,00)	1.413.041.436,00	19,36	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
 Organisasi : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	7.109.512.225,01	809.087.010,00	(6.300.425.215,01)	11,38	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.390.857.495,01	778.426.210,00	(5.612.431.285,01)	12,18	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	144.169.000,00	7.249.200,00	(136.919.800,00)	5,02	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	7.722.000,00	0,00	(7.722.000,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.722.000,00	0,00	(7.722.000,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.722.000,00	0,00	(7.722.000,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	136.447.000,00	7.249.200,00	(129.197.800,00)	5,31	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	136.447.000,00	7.249.200,00	(129.197.800,00)	5,31	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.447.000,00	7.249.200,00	(129.197.800,00)	5,31	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.932.737.420,00	551.161.091,00	(4.381.576.329,00)	11,17	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.743.657.420,00	407.261.091,00	(4.336.396.329,00)	8,58	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.743.657.420,00	407.261.091,00	(4.336.396.329,00)	8,58	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.743.657.420,00	407.261.091,00	(4.336.396.329,00)	8,58	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	189.080.000,00	143.900.000,00	(45.180.000,00)	76,10	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	189.080.000,00	143.900.000,00	(45.180.000,00)	76,10	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.080.000,00	143.900.000,00	(45.180.000,00)	76,10	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	101.660.000,00	41.051.932,00	(60.608.068,00)	40,38	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	39.000.000,00	0,00	(39.000.000,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	39.000.000,00	0,00	(39.000.000,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	0,00	(39.000.000,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	62.660.000,00	41.051.932,00	(21.608.068,00)	65,51	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	62.660.000,00	41.051.932,00	(21.608.068,00)	65,51	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.660.000,00	41.051.932,00	(21.608.068,00)	65,51	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	629.054.979,00	63.278.300,00	(565.776.679,00)	10,05	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.637.129,00	0,00	(6.637.129,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.637.129,00	0,00	(6.637.129,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.637.129,00	0,00	(6.637.129,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	85.070.050,00	0,00	(85.070.050,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	85.070.050,00	0,00	(85.070.050,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.070.050,00	0,00	(85.070.050,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	26.850.800,00	6.300.000,00	(20.550.800,00)	23,46	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	26.850.800,00	6.300.000,00	(20.550.800,00)	23,46	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.850.800,00	6.300.000,00	(20.550.800,00)	23,46	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	510.497.000,00	56.978.300,00	(453.518.700,00)	11,16	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	510.497.000,00	56.978.300,00	(453.518.700,00)	11,16	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	510.497.000,00	56.978.300,00	(453.518.700,00)	11,16	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	92.701.920,00	43.156.800,00	(49.545.120,00)	46,55	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	38.839.100,00	0,00	(38.839.100,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	30.600.000,00	0,00	(30.600.000,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	0,00	(30.600.000,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	8.239.100,00	0,00	(8.239.100,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.239.100,00	0,00	(8.239.100,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	53.862.820,00	43.156.800,00	(10.706.020,00)	80,12	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	764.700,00	0,00	(764.700,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	764.700,00	0,00	(764.700,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	53.098.120,00	43.156.800,00	(9.941.320,00)	81,27	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.098.120,00	43.156.800,00	(9.941.320,00)	81,27	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	383.218.176,00	53.231.787,00	(329.986.389,00)	13,89	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	9.336.000,00	0,00	(9.336.000,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.336.000,00	0,00	(9.336.000,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.336.000,00	0,00	(9.336.000,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	160.810.176,00	38.747.028,00	(122.063.148,00)	24,09	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	160.810.176,00	38.747.028,00	(122.063.148,00)	24,09	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.810.176,00	38.747.028,00	(122.063.148,00)	24,09	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	213.072.000,00	14.484.759,00	(198.587.241,00)	6,79	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	213.072.000,00	14.484.759,00	(198.587.241,00)	6,79	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.072.000,00	14.484.759,00	(198.587.241,00)	6,79	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	107.316.000,01	19.297.100,00	(88.018.900,01)	17,98	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	90.906.000,01	19.297.100,00	(71.608.900,01)	21,22	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	90.906.000,01	19.297.100,00	(71.608.900,01)	21,22	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.906.000,01	19.297.100,00	(71.608.900,01)	21,22	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	16.410.000,00	0,00	(16.410.000,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	16.410.000,00	0,00	(16.410.000,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.410.000,00	0,00	(16.410.000,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	81.233.530,00	15.700.800,00	(65.532.730,00)	19,32	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.02		PENGLOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	18.823.000,00	7.756.600,00	(11.066.400,00)	41,20	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0002		PERENCANAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	18.823.000,00	7.756.600,00	(11.066.400,00)	41,20	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.823.000,00	7.756.600,00	(11.066.400,00)	41,20	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.823.000,00	7.756.600,00	(11.066.400,00)	41,20	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.03		PENGLOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	62.410.530,00	7.944.200,00	(54.466.330,00)	12,72	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004		PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGLOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	24.271.530,00	7.944.200,00	(16.327.330,00)	32,73	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	24.271.530,00	7.944.200,00	(16.327.330,00)	32,73	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.271.530,00	7.944.200,00	(16.327.330,00)	32,73	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0006		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	38.139.000,00	0,00	(38.139.000,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	38.139.000,00	0,00	(38.139.000,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.139.000,00	0,00	(38.139.000,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	430.929.200,00	14.960.000,00	(415.969.200,00)	3,47	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.03.2.01		PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	430.929.200,00	14.960.000,00	(415.969.200,00)	3,47	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0003		PENYEDIAAN DATA DAN PENYEBARAN INFORMASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA, BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI	83.800.000,00	14.960.000,00	(68.840.000,00)	17,85	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	83.800.000,00	14.960.000,00	(68.840.000,00)	17,85	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.800.000,00	14.960.000,00	(68.840.000,00)	17,85	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0006		FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	217.820.000,00	0,00	(217.820.000,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	217.820.000,00	0,00	(217.820.000,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.820.000,00	0,00	(217.820.000,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0007		PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI	129.309.200,00	0,00	(129.309.200,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	97.500.000,00	0,00	(97.500.000,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.500.000,00	0,00	(97.500.000,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	31.809.200,00	0,00	(31.809.200,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.809.200,00	0,00	(31.809.200,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	206.492.000,00	0,00	(206.492.000,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.01		PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR	206.492.000,00	0,00	(206.492.000,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0005		FASILITASI PROSES KREASI, PRODUKSI, DISTRIBUSI KONSUMSI DAN KONSERVASI EKONOMI KREATIF	206.492.000,00	0,00	(206.492.000,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	206.492.000,00	0,00	(206.492.000,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.492.000,00	0,00	(206.492.000,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	7.109.512.225,01	809.087.010,00	(6.300.425.215,01)	11,38	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(7.109.512.225,01)	(809.087.010,00)	6.300.425.215,01	11,38	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.109.512.225,01)	(809.087.010,00)	6.300.425.215,01	11,38	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
 Organisasi : Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000		5		BELANJA DAERAH	530.853.200,00	221.156.665,00	(309.696.535,00)	41,66	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	472.418.900,00	213.230.665,00	(259.188.235,00)	45,13	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.01			PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	175.354.200,00	43.967.000,00	(131.387.200,00)	25,07	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.01.0015			PEMANTAUAN HARGA DAN PASOKAN PANGAN	161.578.000,00	43.967.000,00	(117.611.000,00)	27,21	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.01.0015	5.1		BELANJA OPERASI	161.578.000,00	43.967.000,00	(117.611.000,00)	27,21	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.01.0015	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	161.578.000,00	43.967.000,00	(117.611.000,00)	27,21	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.01.0016			PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN (NBM)	13.776.200,00	0,00	(13.776.200,00)	0,00	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.01.0016	5.1		BELANJA OPERASI	13.776.200,00	0,00	(13.776.200,00)	0,00	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.01.0016	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	13.776.200,00	0,00	(13.776.200,00)	0,00	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.02			PENGLOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA	188.790.000,00	141.993.665,00	(46.796.335,00)	75,21	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.02.0003			PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	188.790.000,00	141.993.665,00	(46.796.335,00)	75,21	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.02.0003	5.1		BELANJA OPERASI	188.790.000,00	141.993.665,00	(46.796.335,00)	75,21	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.02.0003	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	188.790.000,00	141.993.665,00	(46.796.335,00)	75,21	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.04			PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI	108.274.700,00	27.270.000,00	(81.004.700,00)	25,18	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.04.0002			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	108.274.700,00	27.270.000,00	(81.004.700,00)	25,18	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1		BELANJA OPERASI	108.274.700,00	27.270.000,00	(81.004.700,00)	25,18	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	53.274.700,00	27.270.000,00	(26.004.700,00)	51,18	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1.05		Belanja Hibah	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	0,00	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	15.670.500,00	7.926.000,00	(7.744.500,00)	50,57	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.04.2.01			PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN	15.670.500,00	7.926.000,00	(7.744.500,00)	50,57	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.04.2.01.0001			PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN	15.670.500,00	7.926.000,00	(7.744.500,00)	50,57	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.04.2.01.0001	5.1		BELANJA OPERASI	15.670.500,00	7.926.000,00	(7.744.500,00)	50,57	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.04.2.01.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	15.670.500,00	7.926.000,00	(7.744.500,00)	50,57	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	42.763.800,00	0,00	(42.763.800,00)	0,00	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.05.2.01			PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.763.800,00	0,00	(42.763.800,00)	0,00	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.05.2.01.0007			PENYEDIAAN SARANA PENGUJIAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.763.800,00	0,00	(42.763.800,00)	0,00	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.05.2.01.0007	5.1		BELANJA OPERASI	42.763.800,00	0,00	(42.763.800,00)	0,00	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.05.2.01.0007	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	42.763.800,00	0,00	(42.763.800,00)	0,00	
					JUMLAH BELANJA	530.853.200,00	221.156.665,00	(309.696.535,00)	41,66	
					SURPLUS / (DEFISIT)	(530.853.200,00)	(221.156.665,00)	309.696.535,00	41,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(530.853.200,00)	(221.156.665,00)	309.696.535,00	41,66	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000		5	BELANJA DAERAH	868.309.156,00	308.926.800,00	(559.382.356,00)	35,57	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	330.838.200,00	289.277.538,00	(41.560.662,00)	87,43	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.03.2.02		PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	330.838.200,00	289.277.538,00	(41.560.662,00)	87,43	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.03.2.02.0002		PELAKSANAAN FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN NELAYAN KECIL	330.838.200,00	289.277.538,00	(41.560.662,00)	87,43	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	330.838.200,00	289.277.538,00	(41.560.662,00)	87,43	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.838.200,00	289.277.538,00	(41.560.662,00)	87,43	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	367.194.456,00	5.619.262,00	(361.575.194,00)	1,53	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04.2.04		PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	367.194.456,00	5.619.262,00	(361.575.194,00)	1,53	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04.2.04.0002		PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	367.194.456,00	5.619.262,00	(361.575.194,00)	1,53	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	344.198.656,00	5.619.262,00	(338.579.394,00)	1,63	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.198.656,00	5.619.262,00	(338.579.394,00)	1,63	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.2	BELANJA MODAL	22.995.800,00	0,00	(22.995.800,00)	0,00	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.995.800,00	0,00	(22.995.800,00)	0,00	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	86.148.500,00	14.030.000,00	(72.118.500,00)	16,28	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.05.2.01		PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA	86.148.500,00	14.030.000,00	(72.118.500,00)	16,28	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.05.2.01.0007		PENGAWASAN USAHA PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU USAHA PENGANGKUTAN IKAN SESUAI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	86.148.500,00	14.030.000,00	(72.118.500,00)	16,28	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.05.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	86.148.500,00	14.030.000,00	(72.118.500,00)	16,28	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.05.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.148.500,00	14.030.000,00	(72.118.500,00)	16,28	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	84.128.000,00	0,00	(84.128.000,00)	0,00	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.06.2.03		PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA	84.128.000,00	0,00	(84.128.000,00)	0,00	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.06.2.03.0001		PENINGKATAN KETERSEDIAAN IKAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	84.128.000,00	0,00	(84.128.000,00)	0,00	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.06.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	84.128.000,00	0,00	(84.128.000,00)	0,00	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.06.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.128.000,00	0,00	(84.128.000,00)	0,00	
JUMLAH BELANJA					868.309.156,00	308.926.800,00	(559.382.356,00)	35,57	
SURPLUS / (DEFISIT)					(868.309.156,00)	(308.926.800,00)	559.382.356,00	35,57	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)					(868.309.156,00)	(308.926.800,00)	559.382.356,00	35,57	

Tana Tidung, 4 September 2026

BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000		5	BELANJA DAERAH	13.986.726.984,00	1.819.329.382,00	(12.167.397.602,00)	13,00	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.972.955.627,00	1.246.293.788,00	(10.726.661.839,00)	10,40	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	153.013.146,00	42.080.397,00	(110.932.749,00)	27,50	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	62.053.146,00	26.068.397,00	(35.984.749,00)	42,00	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	62.053.146,00	26.068.397,00	(35.984.749,00)	42,00	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.053.146,00	26.068.397,00	(35.984.749,00)	42,00	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	90.960.000,00	16.012.000,00	(74.948.000,00)	17,60	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	90.960.000,00	16.012.000,00	(74.948.000,00)	17,60	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.960.000,00	16.012.000,00	(74.948.000,00)	17,60	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.540.257.936,00	1.013.545.621,00	(9.526.712.315,00)	9,61	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	10.298.937.936,00	945.745.621,00	(9.353.192.315,00)	9,18	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.298.937.936,00	945.745.621,00	(9.353.192.315,00)	9,18	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	10.298.937.936,00	945.745.621,00	(9.353.192.315,00)	9,18	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	241.320.000,00	67.800.000,00	(173.520.000,00)	28,09	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	241.320.000,00	67.800.000,00	(173.520.000,00)	28,09	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.320.000,00	67.800.000,00	(173.520.000,00)	28,09	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	642.458.371,00	144.304.770,00	(498.153.601,00)	22,46	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	12.661.100,00	0,00	(12.661.100,00)	0,00	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	12.661.100,00	0,00	(12.661.100,00)	0,00	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.661.100,00	0,00	(12.661.100,00)	0,00	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	61.285.417,00	4.257.000,00	(57.028.417,00)	6,94	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	61.285.417,00	4.257.000,00	(57.028.417,00)	6,94	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.285.417,00	4.257.000,00	(57.028.417,00)	6,94	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	19.990.400,00	10.290.000,00	(9.700.400,00)	51,47	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	19.990.400,00	10.290.000,00	(9.700.400,00)	51,47	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.990.400,00	10.290.000,00	(9.700.400,00)	51,47	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	548.521.454,00	129.757.770,00	(418.763.684,00)	23,65	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	548.521.454,00	129.757.770,00	(418.763.684,00)	23,65	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	548.521.454,00	129.757.770,00	(418.763.684,00)	23,65	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	23.239.174,00	0,00	(23.239.174,00)	0,00	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	23.239.174,00	0,00	(23.239.174,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	23.239.174,00	0,00	(23.239.174,00)	0,00	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.239.174,00	0,00	(23.239.174,00)	0,00	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	592.819.000,00	43.663.000,00	(549.156.000,00)	7,36	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.240.000,00	0,00	(4.240.000,00)	0,00	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.240.000,00	0,00	(4.240.000,00)	0,00	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.240.000,00	0,00	(4.240.000,00)	0,00	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	98.502.000,00	30.838.000,00	(67.664.000,00)	31,30	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	98.502.000,00	30.838.000,00	(67.664.000,00)	31,30	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.502.000,00	30.838.000,00	(67.664.000,00)	31,30	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	490.077.000,00	12.825.000,00	(477.252.000,00)	2,61	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	490.077.000,00	12.825.000,00	(477.252.000,00)	2,61	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	490.077.000,00	12.825.000,00	(477.252.000,00)	2,61	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	21.168.000,00	2.700.000,00	(18.468.000,00)	12,75	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	15.068.000,00	0,00	(15.068.000,00)	0,00	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.068.000,00	0,00	(15.068.000,00)	0,00	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.068.000,00	0,00	(15.068.000,00)	0,00	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	6.100.000,00	2.700.000,00	(3.400.000,00)	44,26	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.100.000,00	2.700.000,00	(3.400.000,00)	44,26	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	2.700.000,00	(3.400.000,00)	44,26	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.325.200.901,00	535.695.994,00	(789.504.907,00)	40,42	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.01		PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	529.336.400,00	150.610.000,00	(378.726.400,00)	28,45	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.01.0001		PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI	179.585.000,00	4.040.000,00	(175.545.000,00)	2,24	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	179.585.000,00	4.040.000,00	(175.545.000,00)	2,24	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.585.000,00	4.040.000,00	(175.545.000,00)	2,24	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.01.0002		PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN	349.751.400,00	146.570.000,00	(203.181.400,00)	41,90	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	349.751.400,00	146.570.000,00	(203.181.400,00)	41,90	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.751.400,00	146.570.000,00	(203.181.400,00)	41,90	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.02		PENGLOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	192.240.000,00	80.396.750,00	(111.843.250,00)	41,82	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.02.0002		PENINGKATAN KUALITAS SDG HEWAN/TANAMAN	192.240.000,00	80.396.750,00	(111.843.250,00)	41,82	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	192.240.000,00	80.396.750,00	(111.843.250,00)	41,82	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.240.000,00	80.396.750,00	(111.843.250,00)	41,82	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.06		PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	603.624.501,00	304.689.244,00	(298.935.257,00)	50,47	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.06.0004		PENGADAAN BENIH TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	603.624.501,00	304.689.244,00	(298.935.257,00)	50,47	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	437.441.727,00	141.114.094,00	(296.327.633,00)	32,25	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	437.441.727,00	141.114.094,00	(296.327.633,00)	32,25	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.06.0004	5.2	BELANJA MODAL	166.182.774,00	163.575.150,00	(2.607.624,00)	98,43	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.06.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	166.182.774,00	163.575.150,00	(2.607.624,00)	98,43	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	110.635.356,00	16.210.000,00	(94.425.356,00)	14,65	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.01		PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	74.899.356,00	9.670.000,00	(65.229.356,00)	12,91	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.01.0007		PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO ZONOSIS	74.899.356,00	9.670.000,00	(65.229.356,00)	12,91	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	74.899.356,00	9.670.000,00	(65.229.356,00)	12,91	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.899.356,00	9.670.000,00	(65.229.356,00)	12,91	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.04		PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	35.736.000,00	6.540.000,00	(29.196.000,00)	18,30	

KODE REKENING				URAIAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.04.0010		PENGAWASAN UNIT USAHA PRODUK HEWAN		35.736.000,00	6.540.000,00	(29.196.000,00)	18,30	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI		35.736.000,00	6.540.000,00	(29.196.000,00)	18,30	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		35.736.000,00	6.540.000,00	(29.196.000,00)	18,30	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.06		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		59.999.400,00	16.129.600,00	(43.869.800,00)	26,88	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.06.2.01		PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA		59.999.400,00	16.129.600,00	(43.869.800,00)	26,88	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.06.2.01.0002		PENILAIAN KELAYAKAN DAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS IZIN USAHA PERTANIAN		59.999.400,00	16.129.600,00	(43.869.800,00)	26,88	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI		59.999.400,00	16.129.600,00	(43.869.800,00)	26,88	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		59.999.400,00	16.129.600,00	(43.869.800,00)	26,88	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		517.935.700,00	5.000.000,00	(512.935.700,00)	0,96	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01		PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN		517.935.700,00	5.000.000,00	(512.935.700,00)	0,96	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0001		PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA		114.332.000,00	0,00	(114.332.000,00)	0,00	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI		114.332.000,00	0,00	(114.332.000,00)	0,00	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		114.332.000,00	0,00	(114.332.000,00)	0,00	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0002		PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA		386.174.200,00	0,00	(386.174.200,00)	0,00	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI		386.174.200,00	0,00	(386.174.200,00)	0,00	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		386.174.200,00	0,00	(386.174.200,00)	0,00	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0003		PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN		17.429.500,00	5.000.000,00	(12.429.500,00)	28,68	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI		12.729.600,00	5.000.000,00	(7.729.600,00)	39,27	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		12.729.600,00	5.000.000,00	(7.729.600,00)	39,27	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL		4.699.900,00	0,00	(4.699.900,00)	0,00	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		4.699.900,00	0,00	(4.699.900,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA		13.986.726.984,00	1.819.329.382,00	(12.167.397.602,00)	13,00	
				SURPLUS / (DEFISIT)		(13.986.726.984,00)	(1.819.329.382,00)	12.167.397.602,00	13,00	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(13.986.726.984,00)	(1.819.329.382,00)	12.167.397.602,00	13,00	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000		5	BELANJA DAERAH	8.879.517.359,00	1.342.253.874,00	(7.537.263.485,00)	15,11	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.027.251.859,00	1.163.200.674,00	(6.864.051.185,00)	14,49	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	19.402.400,00	10.669.000,00	(8.733.400,00)	54,98	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	11.272.900,00	3.104.200,00	(8.168.700,00)	27,53	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.272.900,00	3.104.200,00	(8.168.700,00)	27,53	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.272.900,00	3.104.200,00	(8.168.700,00)	27,53	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.429.500,00	5.881.800,00	(547.700,00)	91,48	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.429.500,00	5.881.800,00	(547.700,00)	91,48	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.429.500,00	5.881.800,00	(547.700,00)	91,48	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.700.000,00	1.683.000,00	(17.000,00)	99,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.683.000,00	(17.000,00)	99,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.683.000,00	(17.000,00)	99,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.609.582.603,00	891.045.940,00	(5.718.536.663,00)	13,48	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.415.312.603,00	789.705.940,00	(5.625.606.663,00)	12,30	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.415.312.603,00	789.705.940,00	(5.625.606.663,00)	12,30	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.415.312.603,00	789.705.940,00	(5.625.606.663,00)	12,30	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	194.270.000,00	101.340.000,00	(92.930.000,00)	52,16	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	194.270.000,00	101.340.000,00	(92.930.000,00)	52,16	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.270.000,00	101.340.000,00	(92.930.000,00)	52,16	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	37.708.000,00	31.642.962,00	(6.065.038,00)	83,91	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	37.708.000,00	31.642.962,00	(6.065.038,00)	83,91	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	37.708.000,00	31.642.962,00	(6.065.038,00)	83,91	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.708.000,00	31.642.962,00	(6.065.038,00)	83,91	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	527.872.756,00	83.272.020,00	(444.600.736,00)	15,77	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.792.800,00	0,00	(4.792.800,00)	0,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	4.792.800,00	0,00	(4.792.800,00)	0,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.792.800,00	0,00	(4.792.800,00)	0,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	184.795.056,00	20.103.020,00	(164.692.036,00)	10,87	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	184.795.056,00	20.103.020,00	(164.692.036,00)	10,87	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.795.056,00	20.103.020,00	(164.692.036,00)	10,87	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	27.837.900,00	19.110.000,00	(8.727.900,00)	68,64	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	27.837.900,00	19.110.000,00	(8.727.900,00)	68,64	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.837.900,00	19.110.000,00	(8.727.900,00)	68,64	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	310.447.000,00	44.059.000,00	(266.388.000,00)	14,19	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	310.447.000,00	44.059.000,00	(266.388.000,00)	14,19	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.447.000,00	44.059.000,00	(266.388.000,00)	14,19	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	33.050.000,00	0,00	(33.050.000,00)	0,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	33.050.000,00	0,00	(33.050.000,00)	0,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	33.050.000,00	0,00	(33.050.000,00)	0,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.050.000,00	0,00	(33.050.000,00)	0,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	683.418.000,00	65.031.448,00	(618.386.552,00)	9,51	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6.346.000,00	0,00	(6.346.000,00)	0,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.346.000,00	0,00	(6.346.000,00)	0,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.346.000,00	0,00	(6.346.000,00)	0,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	97.952.000,00	36.075.928,00	(61.876.072,00)	36,83	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	97.952.000,00	36.075.928,00	(61.876.072,00)	36,83	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.952.000,00	36.075.928,00	(61.876.072,00)	36,83	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	579.120.000,00	28.955.520,00	(550.164.480,00)	4,99	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	579.120.000,00	28.955.520,00	(550.164.480,00)	4,99	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	579.120.000,00	28.955.520,00	(550.164.480,00)	4,99	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	116.218.100,00	81.539.304,00	(34.678.796,00)	70,16	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	91.288.100,00	81.539.304,00	(9.748.796,00)	89,32	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	91.288.100,00	81.539.304,00	(9.748.796,00)	89,32	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.288.100,00	81.539.304,00	(9.748.796,00)	89,32	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	24.930.000,00	0,00	(24.930.000,00)	0,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	24.930.000,00	0,00	(24.930.000,00)	0,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.930.000,00	0,00	(24.930.000,00)	0,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	390.406.000,00	126.678.800,00	(263.727.200,00)	32,44	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.03.2.01		PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	390.406.000,00	126.678.800,00	(263.727.200,00)	32,44	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.03.2.01.0003		PENGUATAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN KOPERASI	109.887.200,00	0,00	(109.887.200,00)	0,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	109.887.200,00	0,00	(109.887.200,00)	0,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.887.200,00	0,00	(109.887.200,00)	0,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.03.2.01.0004		PELAKSANAAN PROSES PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA	280.518.800,00	126.678.800,00	(153.840.000,00)	45,15	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	280.518.800,00	126.678.800,00	(153.840.000,00)	45,15	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.518.800,00	126.678.800,00	(153.840.000,00)	45,15	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	70.248.000,00	0,00	(70.248.000,00)	0,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.05.2.01		PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	70.248.000,00	0,00	(70.248.000,00)	0,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.05.2.01.0001		PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI	70.248.000,00	0,00	(70.248.000,00)	0,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	70.248.000,00	0,00	(70.248.000,00)	0,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.248.000,00	0,00	(70.248.000,00)	0,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	71.455.000,00	0,00	(71.455.000,00)	0,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.07.2.01		PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	71.455.000,00	0,00	(71.455.000,00)	0,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.07.2.01.0002		PEMBERDAYAAN MELALUI KEMITRAAN USAHA MIKRO	55.319.000,00	0,00	(55.319.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.07.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	55.319.000,00	0,00	(55.319.000,00)	0,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.07.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.319.000,00	0,00	(55.319.000,00)	0,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.07.2.01.0005		KOORDINASI DAN SINKRONISASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO	16.136.000,00	0,00	(16.136.000,00)	0,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.07.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.136.000,00	0,00	(16.136.000,00)	0,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.07.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.136.000,00	0,00	(16.136.000,00)	0,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	320.156.500,00	52.374.400,00	(267.782.100,00)	16,35	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.08.2.01		PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	320.156.500,00	52.374.400,00	(267.782.100,00)	16,35	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.08.2.01.0006		PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SUMBER DAYA MANUSIA, SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI	320.156.500,00	52.374.400,00	(267.782.100,00)	16,35	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.08.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	320.156.500,00	52.374.400,00	(267.782.100,00)	16,35	
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.08.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.156.500,00	52.374.400,00	(267.782.100,00)	16,35	
				JUMLAH BELANJA	8.879.517.359,00	1.342.253.874,00	(7.537.263.485,00)	15,11	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(8.879.517.359,00)	(1.342.253.874,00)	7.537.263.485,00	15,11	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.879.517.359,00)	(1.342.253.874,00)	7.537.263.485,00	15,11	

Tana Tidung, 4 September 2026

BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Organisasi : Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.328.967.390,00	358.422.805,00	(970.544.585,00)	26,97	
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	311.412.860,00	61.470.030,00	(249.942.830,00)	19,73	
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.03.2.01		PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	311.412.860,00	61.470.030,00	(249.942.830,00)	19,73	
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.03.2.01.0001		PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	225.384.160,00	35.079.230,00	(190.304.930,00)	15,56	
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.500.000,00	0,00	(39.500.000,00)	0,00	
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.500.000,00	0,00	(39.500.000,00)	0,00	
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.03.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	185.884.160,00	35.079.230,00	(150.804.930,00)	18,87	
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.03.2.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	185.884.160,00	35.079.230,00	(150.804.930,00)	18,87	
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.03.2.01.0002		FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	86.028.700,00	26.390.800,00	(59.637.900,00)	30,67	
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	86.028.700,00	26.390.800,00	(59.637.900,00)	30,67	
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.028.700,00	26.390.800,00	(59.637.900,00)	30,67	
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	755.998.530,00	240.185.375,00	(515.813.155,00)	31,77	
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.04.2.02		PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA	755.998.530,00	240.185.375,00	(515.813.155,00)	31,77	
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.04.2.02.0001		PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	121.578.000,00	0,00	(121.578.000,00)	0,00	
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	121.578.000,00	0,00	(121.578.000,00)	0,00	
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.578.000,00	0,00	(121.578.000,00)	0,00	
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.04.2.02.0002		PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PASAR RAKYAT YANG TERINTEGRASI DALAM SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	13.308.000,00	0,00	(13.308.000,00)	0,00	
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.04.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.308.000,00	0,00	(13.308.000,00)	0,00	
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.04.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.308.000,00	0,00	(13.308.000,00)	0,00	
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.04.2.02.0003		PELAKSANAAN OPERASI PASAR REGULER DAN PASAR KHUSUS YANG BERDAMPAK DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	621.112.530,00	240.185.375,00	(380.927.155,00)	38,67	
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.04.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	621.112.530,00	240.185.375,00	(380.927.155,00)	38,67	
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.04.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	621.112.530,00	240.185.375,00	(380.927.155,00)	38,67	
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	261.556.000,00	56.767.400,00	(204.788.600,00)	21,70	
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.06.2.01		PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN	261.556.000,00	56.767.400,00	(204.788.600,00)	21,70	
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.06.2.01.0001		PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG	203.911.000,00	34.228.100,00	(169.682.900,00)	16,78	
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	69.463.600,00	27.446.000,00	(42.017.600,00)	39,51	
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.463.600,00	27.446.000,00	(42.017.600,00)	39,51	
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	134.447.400,00	6.782.100,00	(127.665.300,00)	5,04	
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.447.400,00	6.782.100,00	(127.665.300,00)	5,04	
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.06.2.01.0002		PENGAWASAN/PENYULUHAN METROLOGI LEGAL	57.645.000,00	22.539.300,00	(35.105.700,00)	39,10	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	57.645.000,00	22.539.300,00	(35.105.700,00)	39,10	
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.645.000,00	22.539.300,00	(35.105.700,00)	39,10	
				JUMLAH BELANJA	1.328.967.390,00	358.422.805,00	(970.544.585,00)	26,97	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.328.967.390,00)	(358.422.805,00)	970.544.585,00	26,97	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.328.967.390,00)	(358.422.805,00)	970.544.585,00	26,97	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.31	3.31.3.30.2.17.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.185.687.800,00	180.176.750,00	(1.005.511.050,00)	15,19	
3.31	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.057.938.300,00	180.176.750,00	(877.761.550,00)	17,03	
3.31	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.31.02.2.01		PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	1.057.938.300,00	180.176.750,00	(877.761.550,00)	17,03	
3.31	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.31.02.2.01.0005		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	1.057.938.300,00	180.176.750,00	(877.761.550,00)	17,03	
3.31	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.057.938.300,00	180.176.750,00	(877.761.550,00)	17,03	
3.31	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	907.938.300,00	180.176.750,00	(727.761.550,00)	19,84	
3.31	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	0,00	
3.31	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.31.03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	46.916.200,00	0,00	(46.916.200,00)	0,00	
3.31	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.31.03.2.01		PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	46.916.200,00	0,00	(46.916.200,00)	0,00	
3.31	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.31.03.2.01.0003		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	46.916.200,00	0,00	(46.916.200,00)	0,00	
3.31	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.31.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	46.916.200,00	0,00	(46.916.200,00)	0,00	
3.31	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.31.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.916.200,00	0,00	(46.916.200,00)	0,00	
3.31	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.31.04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	80.833.300,00	0,00	(80.833.300,00)	0,00	
3.31	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.31.04.2.01		PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	80.833.300,00	0,00	(80.833.300,00)	0,00	
3.31	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.31.04.2.01.0001		FASILITASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI SERTA DATA LAIN LINGKUP KABUPATEN/KOTA MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS)	80.833.300,00	0,00	(80.833.300,00)	0,00	
3.31	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.31.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	80.833.300,00	0,00	(80.833.300,00)	0,00	
3.31	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.31.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.833.300,00	0,00	(80.833.300,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	1.185.687.800,00	180.176.750,00	(1.005.511.050,00)	15,19	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.185.687.800,00)	(180.176.750,00)	1.005.511.050,00	15,19	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.185.687.800,00)	(180.176.750,00)	1.005.511.050,00	15,19	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
 Organisasi : Sekretariat Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	72.311.471.302,00	15.826.948.927,32	(56.484.522.374,68)	21,88	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.576.527.513,00	13.194.349.691,32	(42.382.177.821,68)	23,74	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	260.554.000,00	64.464.000,00	(196.090.000,00)	24,74	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	50.266.000,00	27.710.000,00	(22.556.000,00)	55,12	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.266.000,00	27.710.000,00	(22.556.000,00)	55,12	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.266.000,00	27.710.000,00	(22.556.000,00)	55,12	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	188.873.000,00	34.294.000,00	(154.579.000,00)	18,15	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	188.873.000,00	34.294.000,00	(154.579.000,00)	18,15	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.873.000,00	34.294.000,00	(154.579.000,00)	18,15	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	21.415.000,00	2.460.000,00	(18.955.000,00)	11,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	21.415.000,00	2.460.000,00	(18.955.000,00)	11,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.415.000,00	2.460.000,00	(18.955.000,00)	11,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	16.678.185.846,00	2.092.411.563,00	(14.585.774.283,00)	12,54	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	15.514.366.846,00	1.475.502.463,00	(14.038.864.383,00)	9,51	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.514.366.846,00	1.475.502.463,00	(14.038.864.383,00)	9,51	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	15.514.366.846,00	1.475.502.463,00	(14.038.864.383,00)	9,51	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	900.870.000,00	556.830.000,00	(344.040.000,00)	61,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	900.870.000,00	556.830.000,00	(344.040.000,00)	61,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.870.000,00	556.830.000,00	(344.040.000,00)	61,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	172.317.000,00	40.256.300,00	(132.060.700,00)	23,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	172.317.000,00	40.256.300,00	(132.060.700,00)	23,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.317.000,00	40.256.300,00	(132.060.700,00)	23,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	90.632.000,00	19.822.800,00	(70.809.200,00)	21,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	90.632.000,00	19.822.800,00	(70.809.200,00)	21,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.632.000,00	19.822.800,00	(70.809.200,00)	21,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	470.341.300,00	63.763.200,00	(406.578.100,00)	13,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	218.431.300,00	0,00	(218.431.300,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	218.431.300,00	0,00	(218.431.300,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.431.300,00	0,00	(218.431.300,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	235.789.000,00	63.763.200,00	(172.025.800,00)	27,04	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	235.789.000,00	63.763.200,00	(172.025.800,00)	27,04	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.789.000,00	63.763.200,00	(172.025.800,00)	27,04	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	16.121.000,00	0,00	(16.121.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	16.121.000,00	0,00	(16.121.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.121.000,00	0,00	(16.121.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	8.960.236.522,00	3.373.889.140,00	(5.586.347.382,00)	37,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	61.651.500,00	0,00	(61.651.500,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	61.651.500,00	0,00	(61.651.500,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.651.500,00	0,00	(61.651.500,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	339.529.105,00	200.379.900,00	(139.149.205,00)	59,01	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	97.168.900,00	36.169.100,00	(60.999.800,00)	37,22	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.168.900,00	36.169.100,00	(60.999.800,00)	37,22	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	242.360.205,00	164.210.800,00	(78.149.405,00)	67,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	242.360.205,00	164.210.800,00	(78.149.405,00)	67,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	832.336.050,00	71.694.275,00	(760.641.775,00)	8,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	832.336.050,00	71.694.275,00	(760.641.775,00)	8,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	832.336.050,00	71.694.275,00	(760.641.775,00)	8,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	467.285.100,00	207.090.000,00	(260.195.100,00)	44,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	467.285.100,00	207.090.000,00	(260.195.100,00)	44,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	467.285.100,00	207.090.000,00	(260.195.100,00)	44,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	2.000.017.680,00	1.220.788.290,00	(779.229.390,00)	61,03	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.017.680,00	1.220.788.290,00	(779.229.390,00)	61,03	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.017.680,00	1.220.788.290,00	(779.229.390,00)	61,03	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	5.226.257.087,00	1.673.936.675,00	(3.552.320.412,00)	32,02	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	5.226.257.087,00	1.673.936.675,00	(3.552.320.412,00)	32,02	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.226.257.087,00	1.673.936.675,00	(3.552.320.412,00)	32,02	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0011		DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	33.160.000,00	0,00	(33.160.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0011	5.1	BELANJA OPERASI	33.160.000,00	0,00	(33.160.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.160.000,00	0,00	(33.160.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.600.808.573,00	2.672.378.980,72	(1.928.429.592,28)	58,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	2.090.480.000,00	1.367.000.000,00	(723.480.000,00)	65,39	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	2.090.480.000,00	1.367.000.000,00	(723.480.000,00)	65,39	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.090.480.000,00	1.367.000.000,00	(723.480.000,00)	65,39	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	434.712.500,00	420.180.000,00	(14.532.500,00)	96,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	434.712.500,00	420.180.000,00	(14.532.500,00)	96,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	434.712.500,00	420.180.000,00	(14.532.500,00)	96,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	322.541.800,00	116.000.000,00	(206.541.800,00)	35,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	322.541.800,00	116.000.000,00	(206.541.800,00)	35,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	322.541.800,00	116.000.000,00	(206.541.800,00)	35,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.093.823.027,00	408.650.000,00	(685.173.027,00)	37,35	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	497.907.567,00	225.950.000,00	(271.957.567,00)	45,37	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	497.907.567,00	225.950.000,00	(271.957.567,00)	45,37	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	595.915.460,00	182.700.000,00	(413.215.460,00)	30,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	595.915.460,00	182.700.000,00	(413.215.460,00)	30,65	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	430.206.965,00	309.517.980,72	(120.688.984,28)	71,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	272.750.000,00	154.114.138,20	(118.635.861,80)	56,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.750.000,00	154.114.138,20	(118.635.861,80)	56,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0009	5.2	BELANJA MODAL	157.456.965,00	155.403.842,52	(2.053.122,48)	98,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	157.456.965,00	155.403.842,52	(2.053.122,48)	98,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	139.838.544,00	24.600.000,00	(115.238.544,00)	17,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0010	5.1	BELANJA OPERASI	90.314.400,00	0,00	(90.314.400,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.314.400,00	0,00	(90.314.400,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	49.524.144,00	24.600.000,00	(24.924.144,00)	49,67	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.524.144,00	24.600.000,00	(24.924.144,00)	49,67	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0011		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	89.205.737,00	26.431.000,00	(62.774.737,00)	29,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0011	5.1	BELANJA OPERASI	16.470.937,00	15.531.000,00	(939.937,00)	94,29	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.470.937,00	15.531.000,00	(939.937,00)	94,29	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	72.734.800,00	10.900.000,00	(61.834.800,00)	14,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.734.800,00	10.900.000,00	(61.834.800,00)	14,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.578.219.648,00	280.753.797,00	(2.297.465.851,00)	10,88	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	35.900.000,00	8.700.000,00	(27.200.000,00)	24,23	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	35.900.000,00	8.700.000,00	(27.200.000,00)	24,23	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.900.000,00	8.700.000,00	(27.200.000,00)	24,23	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.080.410.048,00	233.653.797,00	(846.756.251,00)	21,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.080.410.048,00	233.653.797,00	(846.756.251,00)	21,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.410.048,00	233.653.797,00	(846.756.251,00)	21,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.461.909.600,00	38.400.000,00	(1.423.509.600,00)	2,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.461.909.600,00	38.400.000,00	(1.423.509.600,00)	2,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.461.909.600,00	38.400.000,00	(1.423.509.600,00)	2,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.457.266.400,00	922.427.804,60	(2.534.838.595,40)	26,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	952.133.700,00	302.101.556,00	(650.032.144,00)	31,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	952.133.700,00	302.101.556,00	(650.032.144,00)	31,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	952.133.700,00	302.101.556,00	(650.032.144,00)	31,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	2.087.937.000,00	353.718.855,00	(1.734.218.145,00)	16,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.087.937.000,00	353.718.855,00	(1.734.218.145,00)	16,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.087.937.000,00	353.718.855,00	(1.734.218.145,00)	16,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	117.521.700,00	48.520.000,00	(69.001.700,00)	41,28	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	117.521.700,00	48.520.000,00	(69.001.700,00)	41,28	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.521.700,00	48.520.000,00	(69.001.700,00)	41,28	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	289.674.000,00	218.087.393,60	(71.586.606,40)	75,28	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	289.674.000,00	218.087.393,60	(71.586.606,40)	75,28	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.674.000,00	218.087.393,60	(71.586.606,40)	75,28	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11		ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	3.403.062.620,00	493.537.600,00	(2.909.525.020,00)	14,50	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	409.359.620,00	46.800.000,00	(362.559.620,00)	11,43	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001	5.1	BELANJA OPERASI	409.359.620,00	46.800.000,00	(362.559.620,00)	11,43	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	409.359.620,00	46.800.000,00	(362.559.620,00)	11,43	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0002		PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	317.660.000,00	0,00	(317.660.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0002	5.1	BELANJA OPERASI	317.660.000,00	0,00	(317.660.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317.660.000,00	0,00	(317.660.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0003		PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	160.000.000,00	0,00	(160.000.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0003	5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000,00	0,00	(160.000.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	0,00	(160.000.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0004		PENYEDIAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	2.516.043.000,00	446.737.600,00	(2.069.305.400,00)	17,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.516.043.000,00	446.737.600,00	(2.069.305.400,00)	17,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	300.000.000,00	50.000.000,00	(250.000.000,00)	16,66	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.216.043.000,00	396.737.600,00	(1.819.305.400,00)	17,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12		FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	10.970.297.804,00	2.028.287.506,00	(8.942.010.298,00)	18,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH	2.670.165.060,00	334.740.506,00	(2.335.424.554,00)	12,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.506.472.900,00	274.940.506,00	(2.231.532.394,00)	10,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.506.472.900,00	274.940.506,00	(2.231.532.394,00)	10,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	5.2	BELANJA MODAL	163.692.160,00	59.800.000,00	(103.892.160,00)	36,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	163.692.160,00	59.800.000,00	(103.892.160,00)	36,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH	1.880.170.900,00	524.392.000,00	(1.355.778.900,00)	27,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.591.556.500,00	447.592.000,00	(1.143.964.500,00)	28,12	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.591.556.500,00	447.592.000,00	(1.143.964.500,00)	28,12	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002	5.2	BELANJA MODAL	288.614.400,00	76.800.000,00	(211.814.400,00)	26,60	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	288.614.400,00	76.800.000,00	(211.814.400,00)	26,60	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0003		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH	6.419.961.844,00	1.169.155.000,00	(5.250.806.844,00)	18,21	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.959.668.400,00	747.325.000,00	(5.212.343.400,00)	12,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.959.668.400,00	747.325.000,00	(5.212.343.400,00)	12,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0003	5.2	BELANJA MODAL	460.293.444,00	421.830.000,00	(38.463.444,00)	91,64	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	460.293.444,00	421.830.000,00	(38.463.444,00)	91,64	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13		PENATAAN ORGANISASI	921.264.000,00	272.058.700,00	(649.205.300,00)	29,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001		PENGLOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	366.511.000,00	108.540.900,00	(257.970.100,00)	29,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001	5.1	BELANJA OPERASI	366.511.000,00	108.540.900,00	(257.970.100,00)	29,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	366.511.000,00	108.540.900,00	(257.970.100,00)	29,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002		FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	150.393.000,00	32.677.800,00	(117.715.200,00)	21,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	150.393.000,00	32.677.800,00	(117.715.200,00)	21,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.393.000,00	32.677.800,00	(117.715.200,00)	21,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003		PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	389.087.000,00	123.470.000,00	(265.617.000,00)	31,73	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003	5.1	BELANJA OPERASI	389.087.000,00	123.470.000,00	(265.617.000,00)	31,73	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	389.087.000,00	123.470.000,00	(265.617.000,00)	31,73	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0004		MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	15.273.000,00	7.370.000,00	(7.903.000,00)	48,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.273.000,00	7.370.000,00	(7.903.000,00)	48,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.273.000,00	7.370.000,00	(7.903.000,00)	48,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14		PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	3.276.290.800,00	930.377.400,00	(2.345.913.400,00)	28,39	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0001		FASILITASI KEPROTOKOLAN	2.472.827.600,00	597.835.800,00	(1.874.991.800,00)	24,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.472.827.600,00	597.835.800,00	(1.874.991.800,00)	24,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.472.827.600,00	597.835.800,00	(1.874.991.800,00)	24,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0002		FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN	448.926.000,00	140.403.600,00	(308.522.400,00)	31,27	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0002	5.1	BELANJA OPERASI	448.926.000,00	140.403.600,00	(308.522.400,00)	31,27	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	448.926.000,00	140.403.600,00	(308.522.400,00)	31,27	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0003		PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN	354.537.200,00	192.138.000,00	(162.399.200,00)	54,19	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0003	5.1	BELANJA OPERASI	354.537.200,00	192.138.000,00	(162.399.200,00)	54,19	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	354.537.200,00	192.138.000,00	(162.399.200,00)	54,19	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	13.571.946.089,00	1.550.879.321,00	(12.021.066.768,00)	11,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01		ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	1.045.228.700,00	192.931.000,00	(852.297.700,00)	18,45	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001		PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	807.850.700,00	156.688.600,00	(651.162.100,00)	19,39	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	807.850.700,00	156.688.600,00	(651.162.100,00)	19,39	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	807.850.700,00	156.688.600,00	(651.162.100,00)	19,39	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002		PENGLOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	237.378.000,00	36.242.400,00	(201.135.600,00)	15,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	237.378.000,00	36.242.400,00	(201.135.600,00)	15,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.378.000,00	36.242.400,00	(201.135.600,00)	15,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02		PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10.392.566.300,00	672.022.900,00	(9.720.543.400,00)	6,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001		FASILITASI PENGLOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL	397.731.300,00	153.614.800,00	(244.116.500,00)	38,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	397.731.300,00	153.614.800,00	(244.116.500,00)	38,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	397.731.300,00	153.614.800,00	(244.116.500,00)	38,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0002		PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL	38.970.000,00	21.964.800,00	(17.005.200,00)	56,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	38.970.000,00	21.964.800,00	(17.005.200,00)	56,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.470.000,00	18.464.800,00	(17.005.200,00)	52,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0002	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	9.955.865.000,00	496.443.300,00	(9.459.421.700,00)	4,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.955.865.000,00	496.443.300,00	(9.459.421.700,00)	4,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.865.000,00	6.500.000,00	(45.365.000,00)	12,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0003	5.1.05	Belanja Hibah	9.904.000.000,00	489.943.300,00	(9.414.056.700,00)	4,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03		FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.866.451.500,00	602.643.168,00	(1.263.808.332,00)	32,28	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH	534.877.200,00	196.677.966,00	(338.199.234,00)	36,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	534.877.200,00	196.677.966,00	(338.199.234,00)	36,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	534.877.200,00	196.677.966,00	(338.199.234,00)	36,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002		FASILITASI BANTUAN HUKUM	1.075.544.200,00	323.142.302,00	(752.401.898,00)	30,04	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.075.544.200,00	323.142.302,00	(752.401.898,00)	30,04	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.075.544.200,00	323.142.302,00	(752.401.898,00)	30,04	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003		PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGLOLAAN INFORMASI HUKUM	256.030.100,00	82.822.900,00	(173.207.200,00)	32,34	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	256.030.100,00	82.822.900,00	(173.207.200,00)	32,34	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.030.100,00	82.822.900,00	(173.207.200,00)	32,34	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04		FASILITASI KERJA SAMA DAERAH	267.699.589,00	83.282.253,00	(184.417.336,00)	31,11	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0001		FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI	267.699.589,00	83.282.253,00	(184.417.336,00)	31,11	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	204.818.000,00	27.319.853,00	(177.498.147,00)	13,33	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.818.000,00	27.319.853,00	(177.498.147,00)	13,33	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0001	5.2	BELANJA MODAL	62.881.589,00	55.962.400,00	(6.919.189,00)	88,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.481.589,00	5.562.400,00	(6.919.189,00)	44,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0001	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.162.997.700,00	1.081.719.915,00	(2.081.277.785,00)	34,19	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01		PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	589.643.000,00	193.865.000,00	(395.778.000,00)	32,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD	206.456.000,00	0,00	(206.456.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	206.456.000,00	0,00	(206.456.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.456.000,00	0,00	(206.456.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0002		PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN	329.257.000,00	184.165.000,00	(145.092.000,00)	55,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	329.257.000,00	184.165.000,00	(145.092.000,00)	55,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	329.257.000,00	184.165.000,00	(145.092.000,00)	55,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0003		PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL	47.300.000,00	9.700.000,00	(37.600.000,00)	20,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	47.300.000,00	9.700.000,00	(37.600.000,00)	20,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.300.000,00	9.700.000,00	(37.600.000,00)	20,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0004		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN BLUD	3.315.000,00	0,00	(3.315.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.315.000,00	0,00	(3.315.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.315.000,00	0,00	(3.315.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0005		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENDIRIAN BUMD	3.315.000,00	0,00	(3.315.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.315.000,00	0,00	(3.315.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.315.000,00	0,00	(3.315.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02		PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	990.400.000,00	519.423.770,00	(470.976.230,00)	52,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002		PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN	88.660.000,00	34.901.200,00	(53.758.800,00)	39,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	88.660.000,00	34.901.200,00	(53.758.800,00)	39,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.660.000,00	34.901.200,00	(53.758.800,00)	39,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0003		PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	901.740.000,00	484.522.570,00	(417.217.430,00)	53,73	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	901.740.000,00	484.522.570,00	(417.217.430,00)	53,73	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	901.740.000,00	484.522.570,00	(417.217.430,00)	53,73	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.582.954.700,00	368.431.145,00	(1.214.523.555,00)	23,27	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.183.487.000,00	158.597.600,00	(1.024.889.400,00)	13,40	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.183.487.000,00	158.597.600,00	(1.024.889.400,00)	13,40	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.183.487.000,00	158.597.600,00	(1.024.889.400,00)	13,40	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002		PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	238.607.100,00	198.733.545,00	(39.873.555,00)	83,28	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	238.607.100,00	198.733.545,00	(39.873.555,00)	83,28	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.607.100,00	198.733.545,00	(39.873.555,00)	83,28	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003		PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	160.860.600,00	11.100.000,00	(149.760.600,00)	6,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	160.860.600,00	11.100.000,00	(149.760.600,00)	6,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.860.600,00	11.100.000,00	(149.760.600,00)	6,90	
				JUMLAH BELANJA	72.311.471.302,00	15.826.948.927,32	(56.484.522.374,68)	21,88	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(72.311.471.302,00)	(15.826.948.927,32)	56.484.522.374,68	21,88	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(72.311.471.302,00)	(15.826.948.927,32)	56.484.522.374,68	21,88	

Tana Tidung, 4 September 2026

BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Bagian Umum

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001		5	BELANJA DAERAH	33.589.403.423,00	9.913.628.074,32	(23.675.775.348,68)	29,51	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.589.403.423,00	9.913.628.074,32	(23.675.775.348,68)	29,51	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	185.080.000,00	176.220.000,00	(8.860.000,00)	95,21	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	185.080.000,00	176.220.000,00	(8.860.000,00)	95,21	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	185.080.000,00	176.220.000,00	(8.860.000,00)	95,21	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.080.000,00	176.220.000,00	(8.860.000,00)	95,21	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	342.643.300,00	63.763.200,00	(278.880.100,00)	18,60	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	218.431.300,00	0,00	(218.431.300,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	218.431.300,00	0,00	(218.431.300,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.431.300,00	0,00	(218.431.300,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	124.212.000,00	63.763.200,00	(60.448.800,00)	51,33	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	124.212.000,00	63.763.200,00	(60.448.800,00)	51,33	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.212.000,00	63.763.200,00	(60.448.800,00)	51,33	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	6.237.152.726,00	2.432.705.890,00	(3.804.446.836,00)	39,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	61.651.500,00	0,00	(61.651.500,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	61.651.500,00	0,00	(61.651.500,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.651.500,00	0,00	(61.651.500,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	246.101.796,00	140.600.000,00	(105.501.796,00)	57,13	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	46.358.900,00	10.000.000,00	(36.358.900,00)	21,57	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.358.900,00	10.000.000,00	(36.358.900,00)	21,57	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	199.742.896,00	130.600.000,00	(69.142.896,00)	65,38	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.742.896,00	130.600.000,00	(69.142.896,00)	65,38	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	558.579.750,00	28.095.000,00	(530.484.750,00)	5,02	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	558.579.750,00	28.095.000,00	(530.484.750,00)	5,02	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	558.579.750,00	28.095.000,00	(530.484.750,00)	5,02	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	356.670.000,00	171.965.000,00	(184.705.000,00)	48,21	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	356.670.000,00	171.965.000,00	(184.705.000,00)	48,21	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	356.670.000,00	171.965.000,00	(184.705.000,00)	48,21	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	2.000.017.680,00	1.220.788.290,00	(779.229.390,00)	61,03	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.017.680,00	1.220.788.290,00	(779.229.390,00)	61,03	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.017.680,00	1.220.788.290,00	(779.229.390,00)	61,03	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	2.980.972.000,00	871.257.600,00	(2.109.714.400,00)	29,22	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.980.972.000,00	871.257.600,00	(2.109.714.400,00)	29,22	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.980.972.000,00	871.257.600,00	(2.109.714.400,00)	29,22	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0011		DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	33.160.000,00	0,00	(33.160.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0011	5.1	BELANJA OPERASI	33.160.000,00	0,00	(33.160.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.160.000,00	0,00	(33.160.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.600.808.573,00	2.672.378.980,72	(1.928.429.592,28)	58,08	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	2.090.480.000,00	1.367.000.000,00	(723.480.000,00)	65,39	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	2.090.480.000,00	1.367.000.000,00	(723.480.000,00)	65,39	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.090.480.000,00	1.367.000.000,00	(723.480.000,00)	65,39	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	434.712.500,00	420.180.000,00	(14.532.500,00)	96,65	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	434.712.500,00	420.180.000,00	(14.532.500,00)	96,65	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	434.712.500,00	420.180.000,00	(14.532.500,00)	96,65	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	322.541.800,00	116.000.000,00	(206.541.800,00)	35,96	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	322.541.800,00	116.000.000,00	(206.541.800,00)	35,96	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	322.541.800,00	116.000.000,00	(206.541.800,00)	35,96	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.093.823.027,00	408.650.000,00	(685.173.027,00)	37,35	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	497.907.567,00	225.950.000,00	(271.957.567,00)	45,37	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	497.907.567,00	225.950.000,00	(271.957.567,00)	45,37	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	595.915.460,00	182.700.000,00	(413.215.460,00)	30,65	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	595.915.460,00	182.700.000,00	(413.215.460,00)	30,65	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	430.206.965,00	309.517.980,72	(120.688.984,28)	71,94	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	272.750.000,00	154.114.138,20	(118.635.861,80)	56,50	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.750.000,00	154.114.138,20	(118.635.861,80)	56,50	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0009	5.2	BELANJA MODAL	157.456.965,00	155.403.842,52	(2.053.122,48)	98,69	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	157.456.965,00	155.403.842,52	(2.053.122,48)	98,69	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	139.838.544,00	24.600.000,00	(115.238.544,00)	17,59	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0010	5.1	BELANJA OPERASI	90.314.400,00	0,00	(90.314.400,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.314.400,00	0,00	(90.314.400,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	49.524.144,00	24.600.000,00	(24.924.144,00)	49,67	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.524.144,00	24.600.000,00	(24.924.144,00)	49,67	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0011		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	89.205.737,00	26.431.000,00	(62.774.737,00)	29,62	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0011	5.1	BELANJA OPERASI	16.470.937,00	15.531.000,00	(939.937,00)	94,29	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.470.937,00	15.531.000,00	(939.937,00)	94,29	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	72.734.800,00	10.900.000,00	(61.834.800,00)	14,98	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.734.800,00	10.900.000,00	(61.834.800,00)	14,98	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.412.516.100,00	252.945.493,00	(1.159.570.607,00)	17,90	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	12.700.000,00	2.500.000,00	(10.200.000,00)	19,68	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.700.000,00	2.500.000,00	(10.200.000,00)	19,68	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.700.000,00	2.500.000,00	(10.200.000,00)	19,68	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	938.316.100,00	216.845.493,00	(721.470.607,00)	23,11	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	938.316.100,00	216.845.493,00	(721.470.607,00)	23,11	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	938.316.100,00	216.845.493,00	(721.470.607,00)	23,11	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	461.500.000,00	33.600.000,00	(427.900.000,00)	7,28	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	461.500.000,00	33.600.000,00	(427.900.000,00)	7,28	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	461.500.000,00	33.600.000,00	(427.900.000,00)	7,28	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.161.551.500,00	863.412.004,60	(2.298.139.495,40)	27,30	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	740.555.000,00	265.241.256,00	(475.313.744,00)	35,81	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	740.555.000,00	265.241.256,00	(475.313.744,00)	35,81	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	740.555.000,00	265.241.256,00	(475.313.744,00)	35,81	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	2.045.680.800,00	349.433.355,00	(1.696.247.445,00)	17,08	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.045.680.800,00	349.433.355,00	(1.696.247.445,00)	17,08	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.045.680.800,00	349.433.355,00	(1.696.247.445,00)	17,08	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	75.641.700,00	30.650.000,00	(44.991.700,00)	40,51	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	75.641.700,00	30.650.000,00	(44.991.700,00)	40,51	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.641.700,00	30.650.000,00	(44.991.700,00)	40,51	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	289.674.000,00	218.087.393,60	(71.586.606,40)	75,28	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	289.674.000,00	218.087.393,60	(71.586.606,40)	75,28	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.674.000,00	218.087.393,60	(71.586.606,40)	75,28	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.11		ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	3.403.062.620,00	493.537.600,00	(2.909.525.020,00)	14,50	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	409.359.620,00	46.800.000,00	(362.559.620,00)	11,43	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0001	5.1	BELANJA OPERASI	409.359.620,00	46.800.000,00	(362.559.620,00)	11,43	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	409.359.620,00	46.800.000,00	(362.559.620,00)	11,43	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0002		PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	317.660.000,00	0,00	(317.660.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0002	5.1	BELANJA OPERASI	317.660.000,00	0,00	(317.660.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317.660.000,00	0,00	(317.660.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0003		PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	160.000.000,00	0,00	(160.000.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0003	5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000,00	0,00	(160.000.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	0,00	(160.000.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0004		PENYEDIAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	2.516.043.000,00	446.737.600,00	(2.069.305.400,00)	17,75	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.516.043.000,00	446.737.600,00	(2.069.305.400,00)	17,75	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	300.000.000,00	50.000.000,00	(250.000.000,00)	16,66	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.216.043.000,00	396.737.600,00	(1.819.305.400,00)	17,90	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.12		FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	10.970.297.804,00	2.028.287.506,00	(8.942.010.298,00)	18,48	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.12.0001		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH	2.670.165.060,00	334.740.506,00	(2.335.424.554,00)	12,53	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.12.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.506.472.900,00	274.940.506,00	(2.231.532.394,00)	10,96	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.12.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.506.472.900,00	274.940.506,00	(2.231.532.394,00)	10,96	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.12.0001	5.2	BELANJA MODAL	163.692.160,00	59.800.000,00	(103.892.160,00)	36,53	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.12.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	163.692.160,00	59.800.000,00	(103.892.160,00)	36,53	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.12.0002		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH	1.880.170.900,00	524.392.000,00	(1.355.778.900,00)	27,89	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.12.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.591.556.500,00	447.592.000,00	(1.143.964.500,00)	28,12	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.12.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.591.556.500,00	447.592.000,00	(1.143.964.500,00)	28,12	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.12.0002	5.2	BELANJA MODAL	288.614.400,00	76.800.000,00	(211.814.400,00)	26,60	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.12.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	288.614.400,00	76.800.000,00	(211.814.400,00)	26,60	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.12.0003		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH	6.419.961.844,00	1.169.155.000,00	(5.250.806.844,00)	18,21	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.12.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.959.668.400,00	747.325.000,00	(5.212.343.400,00)	12,53	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.12.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.959.668.400,00	747.325.000,00	(5.212.343.400,00)	12,53	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.12.0003	5.2	BELANJA MODAL	460.293.444,00	421.830.000,00	(38.463.444,00)	91,64	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.12.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	460.293.444,00	421.830.000,00	(38.463.444,00)	91,64	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.14		PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	3.276.290.800,00	930.377.400,00	(2.345.913.400,00)	28,39	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.14.0001		FASILITASI KEPROTOKOLAN	2.472.827.600,00	597.835.800,00	(1.874.991.800,00)	24,17	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.14.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.472.827.600,00	597.835.800,00	(1.874.991.800,00)	24,17	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.14.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.472.827.600,00	597.835.800,00	(1.874.991.800,00)	24,17	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.14.0002		FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN	448.926.000,00	140.403.600,00	(308.522.400,00)	31,27	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.14.0002	5.1	BELANJA OPERASI	448.926.000,00	140.403.600,00	(308.522.400,00)	31,27	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.14.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	448.926.000,00	140.403.600,00	(308.522.400,00)	31,27	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.14.0003		PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN	354.537.200,00	192.138.000,00	(162.399.200,00)	54,19	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.14.0003	5.1	BELANJA OPERASI	354.537.200,00	192.138.000,00	(162.399.200,00)	54,19	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.14.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	354.537.200,00	192.138.000,00	(162.399.200,00)	54,19	
				JUMLAH BELANJA	33.589.403.423,00	9.913.628.074,32	(23.675.775.348,68)	29,51	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(33.589.403.423,00)	(9.913.628.074,32)	23.675.775.348,68	29,51	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(33.589.403.423,00)	(9.913.628.074,32)	23.675.775.348,68	29,51	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
 Organisasi : Bagian Pemerintahan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002		5	BELANJA DAERAH	1.952.459.814,00	369.320.403,00	(1.583.139.411,00)	18,91	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	639.531.525,00	93.107.150,00	(546.424.375,00)	14,55	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	188.873.000,00	34.294.000,00	(154.579.000,00)	18,15	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	188.873.000,00	34.294.000,00	(154.579.000,00)	18,15	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	188.873.000,00	34.294.000,00	(154.579.000,00)	18,15	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.873.000,00	34.294.000,00	(154.579.000,00)	18,15	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	96.220.000,00	36.610.000,00	(59.610.000,00)	38,04	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	96.220.000,00	36.610.000,00	(59.610.000,00)	38,04	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	96.220.000,00	36.610.000,00	(59.610.000,00)	38,04	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.220.000,00	36.610.000,00	(59.610.000,00)	38,04	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	5.866.000,00	0,00	(5.866.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	5.866.000,00	0,00	(5.866.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	5.866.000,00	0,00	(5.866.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.866.000,00	0,00	(5.866.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	148.846.725,00	17.917.650,00	(130.929.075,00)	12,03	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	28.064.725,00	0,00	(28.064.725,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	28.064.725,00	0,00	(28.064.725,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.064.725,00	0,00	(28.064.725,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	8.260.000,00	0,00	(8.260.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.260.000,00	0,00	(8.260.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.260.000,00	0,00	(8.260.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	112.522.000,00	17.917.650,00	(94.604.350,00)	15,92	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	112.522.000,00	17.917.650,00	(94.604.350,00)	15,92	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.522.000,00	17.917.650,00	(94.604.350,00)	15,92	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	157.469.600,00	0,00	(157.469.600,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	154.469.600,00	0,00	(154.469.600,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	154.469.600,00	0,00	(154.469.600,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.469.600,00	0,00	(154.469.600,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	42.256.200,00	4.285.500,00	(37.970.700,00)	10,14	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	42.256.200,00	4.285.500,00	(37.970.700,00)	10,14	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	42.256.200,00	4.285.500,00	(37.970.700,00)	10,14	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.256.200,00	4.285.500,00	(37.970.700,00)	10,14	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.312.928.289,00	276.213.253,00	(1.036.715.036,00)	21,03	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.02.2.01		ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	1.045.228.700,00	192.931.000,00	(852.297.700,00)	18,45	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.02.2.01.0001		PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	807.850.700,00	156.688.600,00	(651.162.100,00)	19,39	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	807.850.700,00	156.688.600,00	(651.162.100,00)	19,39	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	807.850.700,00	156.688.600,00	(651.162.100,00)	19,39	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.02.2.01.0002		PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	237.378.000,00	36.242.400,00	(201.135.600,00)	15,26	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	237.378.000,00	36.242.400,00	(201.135.600,00)	15,26	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.378.000,00	36.242.400,00	(201.135.600,00)	15,26	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.02.2.04		FASILITASI KERJA SAMA DAERAH	267.699.589,00	83.282.253,00	(184.417.336,00)	31,11	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.02.2.04.0001		FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI	267.699.589,00	83.282.253,00	(184.417.336,00)	31,11	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	204.818.000,00	27.319.853,00	(177.498.147,00)	13,33	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.818.000,00	27.319.853,00	(177.498.147,00)	13,33	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.02.2.04.0001	5.2	BELANJA MODAL	62.881.589,00	55.962.400,00	(6.919.189,00)	88,99	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.02.2.04.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.481.589,00	5.562.400,00	(6.919.189,00)	44,56	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.02.2.04.0001	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.952.459.814,00	369.320.403,00	(1.583.139.411,00)	18,91	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.952.459.814,00)	(369.320.403,00)	1.583.139.411,00	18,91	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.952.459.814,00)	(369.320.403,00)	1.583.139.411,00	18,91	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
 Organisasi : Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003		5	BELANJA DAERAH	12.747.273.357,00	1.232.904.504,00	(11.514.368.853,00)	9,67	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.765.064.057,00	367.016.604,00	(1.398.047.453,00)	20,79	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	220.380.000,00	181.880.000,00	(38.500.000,00)	82,53	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	220.380.000,00	181.880.000,00	(38.500.000,00)	82,53	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	220.380.000,00	181.880.000,00	(38.500.000,00)	82,53	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.380.000,00	181.880.000,00	(38.500.000,00)	82,53	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	16.121.000,00	0,00	(16.121.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	16.121.000,00	0,00	(16.121.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	16.121.000,00	0,00	(16.121.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.121.000,00	0,00	(16.121.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	679.730.809,00	162.328.300,00	(517.402.509,00)	23,88	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	30.250.609,00	29.170.800,00	(1.079.809,00)	96,43	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	30.250.609,00	29.170.800,00	(1.079.809,00)	96,43	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.250.609,00	29.170.800,00	(1.079.809,00)	96,43	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	40.281.400,00	1.935.000,00	(38.346.400,00)	4,80	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	40.281.400,00	1.935.000,00	(38.346.400,00)	4,80	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.281.400,00	1.935.000,00	(38.346.400,00)	4,80	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	36.958.800,00	0,00	(36.958.800,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	36.958.800,00	0,00	(36.958.800,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.958.800,00	0,00	(36.958.800,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	572.240.000,00	131.222.500,00	(441.017.500,00)	22,93	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	572.240.000,00	131.222.500,00	(441.017.500,00)	22,93	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	572.240.000,00	131.222.500,00	(441.017.500,00)	22,93	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	775.567.948,00	21.008.304,00	(754.559.644,00)	2,70	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	142.093.948,00	16.808.304,00	(125.285.644,00)	11,82	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	142.093.948,00	16.808.304,00	(125.285.644,00)	11,82	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.093.948,00	16.808.304,00	(125.285.644,00)	11,82	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	629.274.000,00	0,00	(629.274.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	629.274.000,00	0,00	(629.274.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	629.274.000,00	0,00	(629.274.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	73.264.300,00	1.800.000,00	(71.464.300,00)	2,45	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	68.154.300,00	1.800.000,00	(66.354.300,00)	2,64	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	68.154.300,00	1.800.000,00	(66.354.300,00)	2,64	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.154.300,00	1.800.000,00	(66.354.300,00)	2,64	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.110.000,00	0,00	(5.110.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.110.000,00	0,00	(5.110.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.110.000,00	0,00	(5.110.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10.392.566.300,00	672.022.900,00	(9.720.543.400,00)	6,46	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.02.2.02		PELAKSANAAN KEBUJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10.392.566.300,00	672.022.900,00	(9.720.543.400,00)	6,46	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0001		FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL	397.731.300,00	153.614.800,00	(244.116.500,00)	38,62	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	397.731.300,00	153.614.800,00	(244.116.500,00)	38,62	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	397.731.300,00	153.614.800,00	(244.116.500,00)	38,62	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0002		PELAKSANAAN KEBUJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL	38.970.000,00	21.964.800,00	(17.005.200,00)	56,36	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	38.970.000,00	21.964.800,00	(17.005.200,00)	56,36	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.470.000,00	18.464.800,00	(17.005.200,00)	52,05	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0002	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0003		PELAKSANAAN KEBUJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	9.955.865.000,00	496.443.300,00	(9.459.421.700,00)	4,98	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.955.865.000,00	496.443.300,00	(9.459.421.700,00)	4,98	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.865.000,00	6.500.000,00	(45.365.000,00)	12,53	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0003	5.1.05	Belanja Hibah	9.904.000.000,00	489.943.300,00	(9.414.056.700,00)	4,94	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	589.643.000,00	193.865.000,00	(395.778.000,00)	32,87	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.03.2.01		PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	589.643.000,00	193.865.000,00	(395.778.000,00)	32,87	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.03.2.01.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD	206.456.000,00	0,00	(206.456.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	206.456.000,00	0,00	(206.456.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.456.000,00	0,00	(206.456.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.03.2.01.0002		PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN	329.257.000,00	184.165.000,00	(145.092.000,00)	55,93	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	329.257.000,00	184.165.000,00	(145.092.000,00)	55,93	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	329.257.000,00	184.165.000,00	(145.092.000,00)	55,93	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.03.2.01.0003		PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL	47.300.000,00	9.700.000,00	(37.600.000,00)	20,50	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	47.300.000,00	9.700.000,00	(37.600.000,00)	20,50	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.300.000,00	9.700.000,00	(37.600.000,00)	20,50	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.03.2.01.0004		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBUJAKAN PEMBENTUKAN BLUD	3.315.000,00	0,00	(3.315.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.315.000,00	0,00	(3.315.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.315.000,00	0,00	(3.315.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.03.2.01.0005		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENDIRIAN BUMD	3.315.000,00	0,00	(3.315.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.315.000,00	0,00	(3.315.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.315.000,00	0,00	(3.315.000,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	12.747.273.357,00	1.232.904.504,00	(11.514.368.853,00)	9,67	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(12.747.273.357,00)	(1.232.904.504,00)	11.514.368.853,00	9,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(12.747.273.357,00)	(1.232.904.504,00)	11.514.368.853,00	9,67	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Bagian Hukum

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004		5	BELANJA DAERAH	2.493.737.200,00	877.821.343,00	(1.615.915.857,00)	35,20	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	627.285.700,00	275.178.175,00	(352.107.525,00)	43,86	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	109.800.000,00	34.470.000,00	(75.330.000,00)	31,39	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	109.800.000,00	34.470.000,00	(75.330.000,00)	31,39	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	109.800.000,00	34.470.000,00	(75.330.000,00)	31,39	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.800.000,00	34.470.000,00	(75.330.000,00)	31,39	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	15.929.000,00	0,00	(15.929.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	15.929.000,00	0,00	(15.929.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	15.929.000,00	0,00	(15.929.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.929.000,00	0,00	(15.929.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	454.122.700,00	238.708.175,00	(215.414.525,00)	52,56	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	30.810.000,00	26.169.100,00	(4.640.900,00)	84,93	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.810.000,00	26.169.100,00	(4.640.900,00)	84,93	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.810.000,00	26.169.100,00	(4.640.900,00)	84,93	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	37.069.800,00	975.000,00	(36.094.800,00)	2,63	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	37.069.800,00	975.000,00	(36.094.800,00)	2,63	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.069.800,00	975.000,00	(36.094.800,00)	2,63	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	36.683.900,00	25.025.000,00	(11.658.900,00)	68,21	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	36.683.900,00	25.025.000,00	(11.658.900,00)	68,21	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.683.900,00	25.025.000,00	(11.658.900,00)	68,21	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	349.559.000,00	186.539.075,00	(163.019.925,00)	53,36	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	349.559.000,00	186.539.075,00	(163.019.925,00)	53,36	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.559.000,00	186.539.075,00	(163.019.925,00)	53,36	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	47.434.000,00	2.000.000,00	(45.434.000,00)	4,21	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	50,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	50,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	50,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	43.434.000,00	0,00	(43.434.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	43.434.000,00	0,00	(43.434.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.434.000,00	0,00	(43.434.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.866.451.500,00	602.643.168,00	(1.263.808.332,00)	32,28	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.02.2.03		FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.866.451.500,00	602.643.168,00	(1.263.808.332,00)	32,28	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.02.2.03.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH	534.877.200,00	196.677.966,00	(338.199.234,00)	36,77	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	534.877.200,00	196.677.966,00	(338.199.234,00)	36,77	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	534.877.200,00	196.677.966,00	(338.199.234,00)	36,77	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.02.2.03.0002		FASILITASI BANTUAN HUKUM	1.075.544.200,00	323.142.302,00	(752.401.898,00)	30,04	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.075.544.200,00	323.142.302,00	(752.401.898,00)	30,04	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.075.544.200,00	323.142.302,00	(752.401.898,00)	30,04	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.02.2.03.0003		PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM	256.030.100,00	82.822.900,00	(173.207.200,00)	32,34	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	256.030.100,00	82.822.900,00	(173.207.200,00)	32,34	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.030.100,00	82.822.900,00	(173.207.200,00)	32,34	
				JUMLAH BELANJA	2.493.737.200,00	877.821.343,00	(1.615.915.857,00)	35,20	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.493.737.200,00)	(877.821.343,00)	1.615.915.857,00	35,20	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.493.737.200,00)	(877.821.343,00)	1.615.915.857,00	35,20	

Tana Tidung, 4 September 2026

BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
 Organisasi : Bagian Organisasi

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005		5	BELANJA DAERAH	1.423.139.887,00	381.988.400,00	(1.041.151.487,00)	26,84	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.423.139.887,00	381.988.400,00	(1.041.151.487,00)	26,84	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	105.010.000,00	35.010.000,00	(70.000.000,00)	33,33	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	105.010.000,00	35.010.000,00	(70.000.000,00)	33,33	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	105.010.000,00	35.010.000,00	(70.000.000,00)	33,33	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.010.000,00	35.010.000,00	(70.000.000,00)	33,33	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	20.022.000,00	0,00	(20.022.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	20.022.000,00	0,00	(20.022.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	20.022.000,00	0,00	(20.022.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.022.000,00	0,00	(20.022.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	282.445.887,00	71.449.700,00	(210.996.187,00)	25,29	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.743.200,00	0,00	(3.743.200,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	3.743.200,00	0,00	(3.743.200,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.743.200,00	0,00	(3.743.200,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	44.145.200,00	3.133.000,00	(41.012.200,00)	7,09	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	44.145.200,00	3.133.000,00	(41.012.200,00)	7,09	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.145.200,00	3.133.000,00	(41.012.200,00)	7,09	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	21.712.400,00	8.000.000,00	(13.712.400,00)	36,84	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	21.712.400,00	8.000.000,00	(13.712.400,00)	36,84	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.712.400,00	8.000.000,00	(13.712.400,00)	36,84	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	212.845.087,00	60.316.700,00	(152.528.387,00)	28,33	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	212.845.087,00	60.316.700,00	(152.528.387,00)	28,33	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.845.087,00	60.316.700,00	(152.528.387,00)	28,33	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	90.868.000,00	0,00	(90.868.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	86.868.000,00	0,00	(86.868.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	86.868.000,00	0,00	(86.868.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.868.000,00	0,00	(86.868.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.530.000,00	3.470.000,00	(60.000,00)	98,30	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	3.530.000,00	3.470.000,00	(60.000,00)	98,30	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.530.000,00	3.470.000,00	(60.000,00)	98,30	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.530.000,00	3.470.000,00	(60.000,00)	98,30	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.13		PENATAAN ORGANISASI	921.264.000,00	272.058.700,00	(649.205.300,00)	29,53	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.13.0001		PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	366.511.000,00	108.540.900,00	(257.970.100,00)	29,61	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.13.0001	5.1	BELANJA OPERASI	366.511.000,00	108.540.900,00	(257.970.100,00)	29,61	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.13.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	366.511.000,00	108.540.900,00	(257.970.100,00)	29,61	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.13.0002		FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	150.393.000,00	32.677.800,00	(117.715.200,00)	21,72	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	150.393.000,00	32.677.800,00	(117.715.200,00)	21,72	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.393.000,00	32.677.800,00	(117.715.200,00)	21,72	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.13.0003		PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	389.087.000,00	123.470.000,00	(265.617.000,00)	31,73	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.13.0003	5.1	BELANJA OPERASI	389.087.000,00	123.470.000,00	(265.617.000,00)	31,73	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.13.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	389.087.000,00	123.470.000,00	(265.617.000,00)	31,73	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.13.0004		MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	15.273.000,00	7.370.000,00	(7.903.000,00)	48,25	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.13.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.273.000,00	7.370.000,00	(7.903.000,00)	48,25	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.13.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.273.000,00	7.370.000,00	(7.903.000,00)	48,25	
				JUMLAH BELANJA	1.423.139.887,00	381.988.400,00	(1.041.151.487,00)	26,84	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.423.139.887,00)	(381.988.400,00)	1.041.151.487,00	26,84	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.423.139.887,00)	(381.988.400,00)	1.041.151.487,00	26,84	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
 Organisasi : Bagian Administrasi Pembangunan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006		5	BELANJA DAERAH	4.591.090.775,00	1.575.783.740,00	(3.015.307.035,00)	34,32	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.017.736.075,00	687.928.825,00	(1.329.807.250,00)	34,09	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	71.681.000,00	30.170.000,00	(41.511.000,00)	42,08	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	50.266.000,00	27.710.000,00	(22.556.000,00)	55,12	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.266.000,00	27.710.000,00	(22.556.000,00)	55,12	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.266.000,00	27.710.000,00	(22.556.000,00)	55,12	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	21.415.000,00	2.460.000,00	(18.955.000,00)	11,48	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	21.415.000,00	2.460.000,00	(18.955.000,00)	11,48	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.415.000,00	2.460.000,00	(18.955.000,00)	11,48	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	447.329.000,00	152.719.100,00	(294.609.900,00)	34,14	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	184.380.000,00	92.640.000,00	(91.740.000,00)	50,24	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	184.380.000,00	92.640.000,00	(91.740.000,00)	50,24	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.380.000,00	92.640.000,00	(91.740.000,00)	50,24	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	172.317.000,00	40.256.300,00	(132.060.700,00)	23,36	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	172.317.000,00	40.256.300,00	(132.060.700,00)	23,36	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.317.000,00	40.256.300,00	(132.060.700,00)	23,36	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	90.632.000,00	19.822.800,00	(70.809.200,00)	21,87	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	90.632.000,00	19.822.800,00	(70.809.200,00)	21,87	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.632.000,00	19.822.800,00	(70.809.200,00)	21,87	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	69.760.000,00	0,00	(69.760.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	69.760.000,00	0,00	(69.760.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	69.760.000,00	0,00	(69.760.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.760.000,00	0,00	(69.760.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.157.937.675,00	450.779.425,00	(707.158.250,00)	38,92	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	28.623.500,00	4.440.000,00	(24.183.500,00)	15,51	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	8.623.500,00	4.440.000,00	(4.183.500,00)	51,48	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.623.500,00	4.440.000,00	(4.183.500,00)	51,48	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	124.195.175,00	37.556.275,00	(86.638.900,00)	30,23	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	124.195.175,00	37.556.275,00	(86.638.900,00)	30,23	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.195.175,00	37.556.275,00	(86.638.900,00)	30,23		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.000.000,00	2.100.000,00	(4.900.000,00)	30,00		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	2.100.000,00	(4.900.000,00)	30,00		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	2.100.000,00	(4.900.000,00)	30,00		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	998.119.000,00	406.683.150,00	(591.435.850,00)	40,74		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	998.119.000,00	406.683.150,00	(591.435.850,00)	40,74		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	998.119.000,00	406.683.150,00	(591.435.850,00)	40,74		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	94.364.000,00	4.800.000,00	(89.564.000,00)	5,08		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	86.364.000,00	4.800.000,00	(81.564.000,00)	5,55		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	86.364.000,00	4.800.000,00	(81.564.000,00)	5,55		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.364.000,00	4.800.000,00	(81.564.000,00)	5,55		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	176.664.400,00	49.460.300,00	(127.204.100,00)	27,99		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	143.424.400,00	35.060.300,00	(108.364.100,00)	24,44		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	143.424.400,00	35.060.300,00	(108.364.100,00)	24,44		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.424.400,00	35.060.300,00	(108.364.100,00)	24,44		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	33.240.000,00	14.400.000,00	(18.840.000,00)	43,32		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	33.240.000,00	14.400.000,00	(18.840.000,00)	43,32		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.240.000,00	14.400.000,00	(18.840.000,00)	43,32		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.573.354.700,00	887.854.915,00	(1.685.499.785,00)	34,50		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.03.2.02		PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	990.400.000,00	519.423.770,00	(470.976.230,00)	52,44		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.03.2.02.0002		PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN	88.660.000,00	34.901.200,00	(53.758.800,00)	39,36		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	88.660.000,00	34.901.200,00	(53.758.800,00)	39,36		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.660.000,00	34.901.200,00	(53.758.800,00)	39,36		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.03.2.02.0003		PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	901.740.000,00	484.522.570,00	(417.217.430,00)	53,73		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	901.740.000,00	484.522.570,00	(417.217.430,00)	53,73		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	901.740.000,00	484.522.570,00	(417.217.430,00)	53,73		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.03.2.03		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.582.954.700,00	368.431.145,00	(1.214.523.555,00)	23,27		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0001		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.183.487.000,00	158.597.600,00	(1.024.889.400,00)	13,40		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.183.487.000,00	158.597.600,00	(1.024.889.400,00)	13,40		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.183.487.000,00	158.597.600,00	(1.024.889.400,00)	13,40		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0002		PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	238.607.100,00	198.733.545,00	(39.873.555,00)	83,28		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	238.607.100,00	198.733.545,00	(39.873.555,00)	83,28		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.607.100,00	198.733.545,00	(39.873.555,00)	83,28		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0003		PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	160.860.600,00	11.100.000,00	(149.760.600,00)	6,90		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	160.860.600,00	11.100.000,00	(149.760.600,00)	6,90		
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.860.600,00	11.100.000,00	(149.760.600,00)	6,90		
				JUMLAH BELANJA	4.591.090.775,00	1.575.783.740,00	(3.015.307.035,00)	34,32		
				SURPLUS / (DEFISIT)		(4.591.090.775,00)	(1.575.783.740,00)	3.015.307.035,00	34,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.591.090.775,00)	(1.575.783.740,00)	3.015.307.035,00	34,32	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : Sekretariat DPRD

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	42.279.423.422,00	5.521.196.142,00	(36.758.227.280,00)	13,05	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.075.963.622,00	1.281.967.053,00	(17.793.996.569,00)	6,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	69.970.000,00	47.042.260,00	(22.927.740,00)	67,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	69.970.000,00	47.042.260,00	(22.927.740,00)	67,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	69.970.000,00	47.042.260,00	(22.927.740,00)	67,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.970.000,00	47.042.260,00	(22.927.740,00)	67,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.140.030.814,00	279.186.965,00	(2.860.843.849,00)	8,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.140.030.814,00	279.186.965,00	(2.860.843.849,00)	8,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.140.030.814,00	279.186.965,00	(2.860.843.849,00)	8,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.140.030.814,00	279.186.965,00	(2.860.843.849,00)	8,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	50.068.000,00	0,00	(50.068.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	50.068.000,00	0,00	(50.068.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	50.068.000,00	0,00	(50.068.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.068.000,00	0,00	(50.068.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	612.457.800,00	149.869.500,00	(462.588.300,00)	24,47	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	150.561.800,00	14.175.000,00	(136.386.800,00)	9,41	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	111.798.600,00	14.175.000,00	(97.623.600,00)	12,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.798.600,00	14.175.000,00	(97.623.600,00)	12,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	38.763.200,00	0,00	(38.763.200,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.763.200,00	0,00	(38.763.200,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	111.471.000,00	79.579.000,00	(31.892.000,00)	71,38	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	111.471.000,00	79.579.000,00	(31.892.000,00)	71,38	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.471.000,00	79.579.000,00	(31.892.000,00)	71,38	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	165.035.000,00	4.560.000,00	(160.475.000,00)	2,76	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	165.035.000,00	4.560.000,00	(160.475.000,00)	2,76	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.035.000,00	4.560.000,00	(160.475.000,00)	2,76	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	185.390.000,00	51.555.500,00	(133.834.500,00)	27,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	185.390.000,00	51.555.500,00	(133.834.500,00)	27,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.390.000,00	51.555.500,00	(133.834.500,00)	27,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	73.453.600,00	72.000.000,00	(1.453.600,00)	98,02	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	73.453.600,00	72.000.000,00	(1.453.600,00)	98,02	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	73.453.600,00	72.000.000,00	(1.453.600,00)	98,02	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.453.600,00	72.000.000,00	(1.453.600,00)	98,02	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	894.311.140,00	309.745.834,00	(584.565.306,00)	34,63	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	304.199.140,00	74.291.114,00	(229.908.026,00)	24,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	304.199.140,00	74.291.114,00	(229.908.026,00)	24,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.199.140,00	74.291.114,00	(229.908.026,00)	24,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	11.312.000,00	0,00	(11.312.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.312.000,00	0,00	(11.312.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.312.000,00	0,00	(11.312.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	564.400.000,00	221.054.720,00	(343.345.280,00)	39,16	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	564.400.000,00	221.054.720,00	(343.345.280,00)	39,16	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	564.400.000,00	221.054.720,00	(343.345.280,00)	39,16	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	188.220.000,00	65.174.600,00	(123.045.400,00)	34,62	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	176.020.000,00	60.174.600,00	(115.845.400,00)	34,18	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	176.020.000,00	60.174.600,00	(115.845.400,00)	34,18	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.020.000,00	60.174.600,00	(115.845.400,00)	34,18	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	12.200.000,00	5.000.000,00	(7.200.000,00)	40,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.200.000,00	5.000.000,00	(7.200.000,00)	40,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	5.000.000,00	(7.200.000,00)	40,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15		LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	13.515.026.268,00	232.247.894,00	(13.282.778.374,00)	1,71	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001		PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	12.161.142.268,00	35.996.394,00	(12.125.145.874,00)	0,29	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.161.142.268,00	35.996.394,00	(12.125.145.874,00)	0,29	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	12.161.142.268,00	35.996.394,00	(12.125.145.874,00)	0,29	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002		PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	610.000.000,00	188.000.000,00	(422.000.000,00)	30,81	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1	BELANJA OPERASI	610.000.000,00	188.000.000,00	(422.000.000,00)	30,81	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	610.000.000,00	188.000.000,00	(422.000.000,00)	30,81	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003		PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD	743.884.000,00	8.251.500,00	(735.632.500,00)	1,10	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003	5.1	BELANJA OPERASI	743.884.000,00	8.251.500,00	(735.632.500,00)	1,10	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	743.884.000,00	8.251.500,00	(735.632.500,00)	1,10	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16		LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	532.426.000,00	126.700.000,00	(405.726.000,00)	23,79	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003		FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD	532.426.000,00	126.700.000,00	(405.726.000,00)	23,79	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	5.1	BELANJA OPERASI	532.426.000,00	126.700.000,00	(405.726.000,00)	23,79	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	532.426.000,00	126.700.000,00	(405.726.000,00)	23,79	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	23.203.459.800,00	4.239.229.089,00	(18.964.230.711,00)	18,26	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01		PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	1.573.500.000,00	727.604.072,00	(845.895.928,00)	46,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002		PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	303.300.000,00	112.100.000,00	(191.200.000,00)	36,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	303.300.000,00	112.100.000,00	(191.200.000,00)	36,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.300.000,00	112.100.000,00	(191.200.000,00)	36,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0003		PENYELENGGARAAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN	770.200.000,00	365.504.072,00	(404.695.928,00)	47,45	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	770.200.000,00	365.504.072,00	(404.695.928,00)	47,45	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	770.200.000,00	365.504.072,00	(404.695.928,00)	47,45	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004		FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK	500.000.000,00	250.000.000,00	(250.000.000,00)	50,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000,00	250.000.000,00	(250.000.000,00)	50,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	250.000.000,00	(250.000.000,00)	50,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02		PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	1.241.400.000,00	745.070.000,00	(496.330.000,00)	60,01	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001		PEMBAHASAN KUA DAN PPAS	299.100.000,00	180.800.000,00	(118.300.000,00)	60,44	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	299.100.000,00	180.800.000,00	(118.300.000,00)	60,44	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.100.000,00	180.800.000,00	(118.300.000,00)	60,44	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002		PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	173.600.000,00	94.390.000,00	(79.210.000,00)	54,37	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	173.600.000,00	94.390.000,00	(79.210.000,00)	54,37	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.600.000,00	94.390.000,00	(79.210.000,00)	54,37	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003		PEMBAHASAN APBD	270.800.000,00	137.830.000,00	(132.970.000,00)	50,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	270.800.000,00	137.830.000,00	(132.970.000,00)	50,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.800.000,00	137.830.000,00	(132.970.000,00)	50,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004		PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN	139.100.000,00	50.980.000,00	(88.120.000,00)	36,64	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	139.100.000,00	50.980.000,00	(88.120.000,00)	36,64	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.100.000,00	50.980.000,00	(88.120.000,00)	36,64	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0005		PEMBAHASAN LAPORAN SEMESTER	287.260.000,00	237.620.000,00	(49.640.000,00)	82,71	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	287.260.000,00	237.620.000,00	(49.640.000,00)	82,71	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.260.000,00	237.620.000,00	(49.640.000,00)	82,71	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006		PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD	71.540.000,00	43.450.000,00	(28.090.000,00)	60,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	71.540.000,00	43.450.000,00	(28.090.000,00)	60,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.540.000,00	43.450.000,00	(28.090.000,00)	60,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03		PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	1.000.630.000,00	45.750.000,00	(954.880.000,00)	4,57	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0001		PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	292.200.000,00	25.800.000,00	(266.400.000,00)	8,82	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	292.200.000,00	25.800.000,00	(266.400.000,00)	8,82	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.200.000,00	25.800.000,00	(266.400.000,00)	8,82	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0002		PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR	427.540.000,00	9.250.000,00	(418.290.000,00)	2,16	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	427.540.000,00	9.250.000,00	(418.290.000,00)	2,16	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	427.540.000,00	9.250.000,00	(418.290.000,00)	2,16	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0006		PENGAWASAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	242.850.000,00	4.800.000,00	(238.050.000,00)	1,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	242.850.000,00	4.800.000,00	(238.050.000,00)	1,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.850.000,00	4.800.000,00	(238.050.000,00)	1,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0008		PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH	38.040.000,00	5.900.000,00	(32.140.000,00)	15,50	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	38.040.000,00	5.900.000,00	(32.140.000,00)	15,50	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.040.000,00	5.900.000,00	(32.140.000,00)	15,50	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04		PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	2.716.652.200,00	1.223.786.360,00	(1.492.865.840,00)	45,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002		PENDALAMAN TUGAS DPRD	854.997.200,00	276.626.360,00	(578.370.840,00)	32,35	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	854.997.200,00	276.626.360,00	(578.370.840,00)	32,35	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	854.997.200,00	276.626.360,00	(578.370.840,00)	32,35	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0004		PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	375.000.000,00	22.500.000,00	(352.500.000,00)	6,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	375.000.000,00	22.500.000,00	(352.500.000,00)	6,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.000.000,00	22.500.000,00	(352.500.000,00)	6,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005		PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI	144.000.000,00	18.000.000,00	(126.000.000,00)	12,50	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	144.000.000,00	18.000.000,00	(126.000.000,00)	12,50	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.000.000,00	18.000.000,00	(126.000.000,00)	12,50	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0006		PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	801.350.000,00	537.800.000,00	(263.550.000,00)	67,11	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	801.350.000,00	537.800.000,00	(263.550.000,00)	67,11	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	801.350.000,00	537.800.000,00	(263.550.000,00)	67,11	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0007		PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD	390.960.000,00	343.860.000,00	(47.100.000,00)	87,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	390.960.000,00	343.860.000,00	(47.100.000,00)	87,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.960.000,00	343.860.000,00	(47.100.000,00)	87,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008		PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD	150.345.000,00	25.000.000,00	(125.345.000,00)	16,62	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	150.345.000,00	25.000.000,00	(125.345.000,00)	16,62	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.345.000,00	25.000.000,00	(125.345.000,00)	16,62	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05		PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	4.543.220.000,00	28.880.000,00	(4.514.340.000,00)	0,63	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001		KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH	257.200.000,00	8.530.000,00	(248.670.000,00)	3,31	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	257.200.000,00	8.530.000,00	(248.670.000,00)	3,31	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.200.000,00	8.530.000,00	(248.670.000,00)	3,31	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0002		PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	25.800.000,00	0,00	(25.800.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.800.000,00	0,00	(25.800.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	0,00	(25.800.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003		PELAKSANAAN RESES	4.260.220.000,00	20.350.000,00	(4.239.870.000,00)	0,47	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.260.220.000,00	20.350.000,00	(4.239.870.000,00)	0,47	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.260.220.000,00	20.350.000,00	(4.239.870.000,00)	0,47	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06		PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	622.600.000,00	62.400.000,00	(560.200.000,00)	10,02	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06.0001		PENYUSUNAN KODE ETIK DPRD	214.300.000,00	62.400.000,00	(151.900.000,00)	29,11	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	214.300.000,00	62.400.000,00	(151.900.000,00)	29,11	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.300.000,00	62.400.000,00	(151.900.000,00)	29,11	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06.0002		PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	408.300.000,00	0,00	(408.300.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	408.300.000,00	0,00	(408.300.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	408.300.000,00	0,00	(408.300.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08		FASILITASI TUGAS DPRD	11.505.457.600,00	1.405.738.657,00	(10.099.718.943,00)	12,21	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001		KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	11.199.007.600,00	1.169.598.657,00	(10.029.408.943,00)	10,44	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.199.007.600,00	1.169.598.657,00	(10.029.408.943,00)	10,44	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.199.007.600,00	1.169.598.657,00	(10.029.408.943,00)	10,44	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0002		PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DPRD	306.450.000,00	236.140.000,00	(70.310.000,00)	77,05	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	306.450.000,00	236.140.000,00	(70.310.000,00)	77,05	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.450.000,00	236.140.000,00	(70.310.000,00)	77,05	
				JUMLAH BELANJA	42.279.423.422,00	5.521.196.142,00	(36.758.227.280,00)	13,05	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(42.279.423.422,00)	(5.521.196.142,00)	36.758.227.280,00	13,05	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(42.279.423.422,00)	(5.521.196.142,00)	36.758.227.280,00	13,05	

Tana Tidung, 4 September 2026

BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PERENCANAAN
Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	16.732.452.774,00	3.174.848.338,00	(13.557.604.436,00)	18,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.219.349.767,00	1.323.971.178,00	(6.895.378.589,00)	16,10	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	139.374.996,00	44.125.000,00	(95.249.996,00)	31,65	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	72.564.996,00	17.545.000,00	(55.019.996,00)	24,17	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.567.000,00	17.545.000,00	(8.022.000,00)	68,62	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.567.000,00	17.545.000,00	(8.022.000,00)	68,62	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	46.997.996,00	0,00	(46.997.996,00)	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.997.996,00	0,00	(46.997.996,00)	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	66.810.000,00	26.580.000,00	(40.230.000,00)	39,78	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	66.810.000,00	26.580.000,00	(40.230.000,00)	39,78	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.810.000,00	26.580.000,00	(40.230.000,00)	39,78	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.627.514.260,00	934.109.845,00	(5.693.404.415,00)	14,09	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.365.854.260,00	728.009.845,00	(5.637.844.415,00)	11,43	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.365.854.260,00	728.009.845,00	(5.637.844.415,00)	11,43	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.365.854.260,00	728.009.845,00	(5.637.844.415,00)	11,43	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	261.660.000,00	206.100.000,00	(55.560.000,00)	78,76	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	261.660.000,00	206.100.000,00	(55.560.000,00)	78,76	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.660.000,00	206.100.000,00	(55.560.000,00)	78,76	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	6.856.000,00	0,00	(6.856.000,00)	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	6.856.000,00	0,00	(6.856.000,00)	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	6.856.000,00	0,00	(6.856.000,00)	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.856.000,00	0,00	(6.856.000,00)	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	812.052.011,00	205.905.804,00	(606.146.207,00)	25,35	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	250.836.311,00	73.000.500,00	(177.835.811,00)	29,10	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	238.720.557,00	73.000.500,00	(165.720.057,00)	30,57	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.720.557,00	73.000.500,00	(165.720.057,00)	30,57	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0004	5.2	BELANJA MODAL	12.115.754,00	0,00	(12.115.754,00)	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.115.754,00	0,00	(12.115.754,00)	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	29.668.000,00	0,00	(29.668.000,00)	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	29.668.000,00	0,00	(29.668.000,00)	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.668.000,00	0,00	(29.668.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.590.000,00	1.110.000,00	(480.000,00)	69,81	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.590.000,00	1.110.000,00	(480.000,00)	69,81	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.590.000,00	1.110.000,00	(480.000,00)	69,81	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	529.957.700,00	131.795.304,00	(398.162.396,00)	24,86	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	529.957.700,00	131.795.304,00	(398.162.396,00)	24,86	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	529.957.700,00	131.795.304,00	(398.162.396,00)	24,86	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	323.003.500,00	21.915.729,00	(301.087.771,00)	6,78	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	10.000.000,00	4.500.000,00	(5.500.000,00)	45,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	4.500.000,00	(5.500.000,00)	45,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	4.500.000,00	(5.500.000,00)	45,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	155.443.500,00	7.790.439,00	(147.653.061,00)	5,01	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	155.443.500,00	7.790.439,00	(147.653.061,00)	5,01	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.443.500,00	7.790.439,00	(147.653.061,00)	5,01	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	157.560.000,00	9.625.290,00	(147.934.710,00)	6,10	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	157.560.000,00	9.625.290,00	(147.934.710,00)	6,10	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.560.000,00	9.625.290,00	(147.934.710,00)	6,10	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	310.549.000,00	117.914.800,00	(192.634.200,00)	37,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	284.239.000,00	106.594.800,00	(177.644.200,00)	37,50	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	284.239.000,00	106.594.800,00	(177.644.200,00)	37,50	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.239.000,00	106.594.800,00	(177.644.200,00)	37,50	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	26.310.000,00	11.320.000,00	(14.990.000,00)	43,02	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	26.310.000,00	11.320.000,00	(14.990.000,00)	43,02	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.310.000,00	11.320.000,00	(14.990.000,00)	43,02	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	6.866.082.152,00	1.359.426.559,00	(5.506.655.593,00)	19,79	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01		PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	5.671.463.990,00	1.317.183.024,00	(4.354.280.966,00)	23,22	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0001		ANALISIS KONDISI DAERAH, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	696.966.000,00	321.420.000,00	(375.546.000,00)	46,11	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	696.966.000,00	321.420.000,00	(375.546.000,00)	46,11	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	696.966.000,00	321.420.000,00	(375.546.000,00)	46,11	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0003		PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK	18.900.000,00	0,00	(18.900.000,00)	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	18.900.000,00	0,00	(18.900.000,00)	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000,00	0,00	(18.900.000,00)	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH	15.120.000,00	0,00	(15.120.000,00)	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.120.000,00	0,00	(15.120.000,00)	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.120.000,00	0,00	(15.120.000,00)	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005		PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA	69.758.000,00	0,00	(69.758.000,00)	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	69.758.000,00	0,00	(69.758.000,00)	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.758.000,00	0,00	(69.758.000,00)	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007		KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.870.719.990,00	995.763.024,00	(3.874.956.966,00)	20,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	4.870.719.990,00	995.763.024,00	(3.874.956.966,00)	20,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.870.719.990,00	995.763.024,00	(3.874.956.966,00)	20,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02		ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	261.716.200,00	25.344.535,00	(236.371.665,00)	9,68	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0001		ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	261.716.200,00	25.344.535,00	(236.371.665,00)	9,68	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	261.716.200,00	25.344.535,00	(236.371.665,00)	9,68	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.716.200,00	25.344.535,00	(236.371.665,00)	9,68	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03		PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	932.901.962,00	16.899.000,00	(916.002.962,00)	1,81	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003		MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	932.901.962,00	16.899.000,00	(916.002.962,00)	1,81	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	733.101.962,00	16.899.000,00	(716.202.962,00)	2,30	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	733.101.962,00	16.899.000,00	(716.202.962,00)	2,30	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	199.800.000,00	0,00	(199.800.000,00)	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	199.800.000,00	0,00	(199.800.000,00)	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.647.020.855,00	491.450.601,00	(1.155.570.254,00)	29,83	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	657.207.055,00	151.787.752,00	(505.419.303,00)	23,09	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0003		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	253.938.555,00	41.570.918,00	(212.367.637,00)	16,37	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	226.229.255,00	41.570.918,00	(184.658.337,00)	18,37	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.229.255,00	41.570.918,00	(184.658.337,00)	18,37	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	27.709.300,00	0,00	(27.709.300,00)	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.709.300,00	0,00	(27.709.300,00)	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	403.268.500,00	110.216.834,00	(293.051.666,00)	27,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	403.268.500,00	110.216.834,00	(293.051.666,00)	27,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.268.500,00	110.216.834,00	(293.051.666,00)	27,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	477.244.000,00	60.841.252,00	(416.402.748,00)	12,74	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	477.244.000,00	60.841.252,00	(416.402.748,00)	12,74	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	477.244.000,00	60.841.252,00	(416.402.748,00)	12,74	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	477.244.000,00	60.841.252,00	(416.402.748,00)	12,74	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	512.569.800,00	278.821.597,00	(233.748.203,00)	54,39	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0008		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	512.569.800,00	278.821.597,00	(233.748.203,00)	54,39	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	373.564.500,00	139.960.597,00	(233.603.903,00)	37,46	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	373.564.500,00	139.960.597,00	(233.603.903,00)	37,46	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0008	5.2	BELANJA MODAL	139.005.300,00	138.861.000,00	(144.300,00)	99,89	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0008	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	139.005.300,00	138.861.000,00	(144.300,00)	99,89	
				JUMLAH BELANJA	16.732.452.774,00	3.174.848.338,00	(13.557.604.436,00)	18,97	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(16.732.452.774,00)	(3.174.848.338,00)	13.557.604.436,00	18,97	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(16.732.452.774,00)	(3.174.848.338,00)	13.557.604.436,00	18,97	

Tana Tidung, 4 September 2026

BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.215.163.100,00	197.181.490,00	(1.017.981.610,00)	16,22	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.215.163.100,00	197.181.490,00	(1.017.981.610,00)	16,22	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.03		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	424.307.000,00	37.512.400,00	(386.794.600,00)	8,84	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.03.0007		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP	424.307.000,00	37.512.400,00	(386.794.600,00)	8,84	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	424.307.000,00	37.512.400,00	(386.794.600,00)	8,84	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	424.307.000,00	37.512.400,00	(386.794.600,00)	8,84	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04		PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	790.856.100,00	159.669.090,00	(631.187.010,00)	20,18	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001		PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI	790.856.100,00	159.669.090,00	(631.187.010,00)	20,18	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	790.856.100,00	159.669.090,00	(631.187.010,00)	20,18	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	790.856.100,00	159.669.090,00	(631.187.010,00)	20,18	
				JUMLAH BELANJA	1.215.163.100,00	197.181.490,00	(1.017.981.610,00)	16,22	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.215.163.100,00)	(197.181.490,00)	1.017.981.610,00	16,22	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.215.163.100,00)	(197.181.490,00)	1.017.981.610,00	16,22	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEUANGAN
Organisasi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.017.259.649.453,00	74.358.080.817,67	(942.901.568.635,33)	7,30	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21.127.466.122,00	6.364.111.515,67	(14.763.354.606,33)	30,12	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.01	Pajak Daerah	7.812.710.096,00	2.298.863.353,00	(5.513.846.743,00)	29,42	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	623.963.865,00	122.500.351,00	(501.463.514,00)	19,63	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.099.406.000,00	0,00	(6.099.406.000,00)	0,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.591.386.161,00	3.942.747.811,67	(2.648.638.349,33)	59,81	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2	PENDAPATAN TRANSFER	996.132.183.331,00	67.994.054.302,00	(928.138.129.029,00)	6,82	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	982.308.887.000,00	62.889.476.445,00	(919.419.410.555,00)	6,40	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	13.823.296.331,00	5.104.577.857,00	(8.718.718.474,00)	36,92	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	(85.000,00)	(85.000,00)	0,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	(85.000,00)	(85.000,00)	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.017.259.649.453,00	74.358.080.817,67	(942.901.568.635,33)	7,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	292.295.857.500,89	11.822.675.060,00	(280.473.182.440,89)	4,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.023.265.447,89	6.945.503.439,00	(54.077.762.008,89)	11,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	38.935.000,00	22.190.000,00	(16.745.000,00)	56,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	19.530.000,00	10.770.000,00	(8.760.000,00)	55,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.530.000,00	10.770.000,00	(8.760.000,00)	55,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.530.000,00	10.770.000,00	(8.760.000,00)	55,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	19.405.000,00	11.420.000,00	(7.985.000,00)	58,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	19.405.000,00	11.420.000,00	(7.985.000,00)	58,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.405.000,00	11.420.000,00	(7.985.000,00)	58,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	51.810.404.465,89	3.290.083.798,00	(48.520.320.667,89)	6,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	50.922.404.465,89	2.915.923.798,00	(48.006.480.667,89)	5,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.922.404.465,89	2.915.923.798,00	(48.006.480.667,89)	5,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	50.922.404.465,89	2.915.923.798,00	(48.006.480.667,89)	5,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	888.000.000,00	374.160.000,00	(513.840.000,00)	42,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	888.000.000,00	374.160.000,00	(513.840.000,00)	42,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	888.000.000,00	374.160.000,00	(513.840.000,00)	42,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1.306.785.262,00	438.595.800,00	(868.189.462,00)	33,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	152.462.000,00	130.900.000,00	(21.562.000,00)	85,85	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	152.462.000,00	130.900.000,00	(21.562.000,00)	85,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.462.000,00	130.900.000,00	(21.562.000,00)	85,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	1.154.323.262,00	307.695.800,00	(846.627.462,00)	26,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.154.323.262,00	307.695.800,00	(846.627.462,00)	26,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.154.323.262,00	307.695.800,00	(846.627.462,00)	26,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	5.852.457.620,00	2.837.518.866,00	(3.014.938.754,00)	48,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	42.670.805,00	0,00	(42.670.805,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	42.670.805,00	0,00	(42.670.805,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.670.805,00	0,00	(42.670.805,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.608.757.648,00	1.005.428.900,00	(603.328.748,00)	62,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	68.244.000,00	66.151.000,00	(2.093.000,00)	96,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.244.000,00	66.151.000,00	(2.093.000,00)	96,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.540.513.648,00	939.277.900,00	(601.235.748,00)	60,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.306.564.192,00	756.049.000,00	(550.515.192,00)	57,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	68.949.456,00	68.808.900,00	(140.556,00)	99,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	165.000.000,00	114.420.000,00	(50.580.000,00)	69,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	1.430.649.667,00	703.037.700,00	(727.611.967,00)	49,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.430.649.667,00	703.037.700,00	(727.611.967,00)	49,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.430.649.667,00	703.037.700,00	(727.611.967,00)	49,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	252.914.500,00	151.405.750,00	(101.508.750,00)	59,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	252.914.500,00	151.405.750,00	(101.508.750,00)	59,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.914.500,00	151.405.750,00	(101.508.750,00)	59,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	550.000.000,00	302.800.000,00	(247.200.000,00)	55,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	550.000.000,00	302.800.000,00	(247.200.000,00)	55,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000,00	302.800.000,00	(247.200.000,00)	55,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.967.465.000,00	674.846.516,00	(1.292.618.484,00)	34,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.967.465.000,00	674.846.516,00	(1.292.618.484,00)	34,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.967.465.000,00	674.846.516,00	(1.292.618.484,00)	34,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.417.209.000,00	139.936.275,00	(1.277.272.725,00)	9,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	11.004.000,00	9.800.000,00	(1.204.000,00)	89,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.004.000,00	9.800.000,00	(1.204.000,00)	89,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.004.000,00	9.800.000,00	(1.204.000,00)	89,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.031.820.000,00	119.123.635,00	(912.696.365,00)	11,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.031.820.000,00	119.123.635,00	(912.696.365,00)	11,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.031.820.000,00	119.123.635,00	(912.696.365,00)	11,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	374.385.000,00	11.012.640,00	(363.372.360,00)	2,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	374.385.000,00	11.012.640,00	(363.372.360,00)	2,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	374.385.000,00	11.012.640,00	(363.372.360,00)	2,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	597.474.100,00	217.178.700,00	(380.295.400,00)	36,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	440.505.100,00	156.943.700,00	(283.561.400,00)	35,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	440.505.100,00	156.943.700,00	(283.561.400,00)	35,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	440.505.100,00	156.943.700,00	(283.561.400,00)	35,62	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	156.969.000,00	60.235.000,00	(96.734.000,00)	38,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	156.969.000,00	60.235.000,00	(96.734.000,00)	38,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.969.000,00	60.235.000,00	(96.734.000,00)	38,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	223.829.056.505,00	2.702.974.251,00	(221.126.082.254,00)	1,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	4.410.357.000,00	1.158.608.662,00	(3.251.748.338,00)	26,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	252.702.000,00	90.200.000,00	(162.502.000,00)	35,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	252.702.000,00	90.200.000,00	(162.502.000,00)	35,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.702.000,00	90.200.000,00	(162.502.000,00)	35,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	279.725.800,00	0,00	(279.725.800,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	279.725.800,00	0,00	(279.725.800,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.725.800,00	0,00	(279.725.800,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	344.576.000,00	167.440.000,00	(177.136.000,00)	48,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	344.576.000,00	167.440.000,00	(177.136.000,00)	48,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.576.000,00	167.440.000,00	(177.136.000,00)	48,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	344.576.000,00	0,00	(344.576.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	344.576.000,00	0,00	(344.576.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.576.000,00	0,00	(344.576.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0009		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN	1.767.678.200,00	414.003.062,00	(1.353.675.138,00)	23,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.767.678.200,00	414.003.062,00	(1.353.675.138,00)	23,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.767.678.200,00	414.003.062,00	(1.353.675.138,00)	23,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0013		PEMBINAAN PERENCANAAN PENGANGGARAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	1.421.099.000,00	486.965.600,00	(934.133.400,00)	34,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	1.421.099.000,00	486.965.600,00	(934.133.400,00)	34,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.421.099.000,00	486.965.600,00	(934.133.400,00)	34,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	2.989.705.600,00	793.737.719,00	(2.195.967.881,00)	26,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0005		KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA	371.214.000,00	136.115.600,00	(235.098.400,00)	36,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	371.214.000,00	136.115.600,00	(235.098.400,00)	36,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	371.214.000,00	136.115.600,00	(235.098.400,00)	36,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/ PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN FIIHAK KETIGA (PFK)	1.456.140.600,00	383.741.619,00	(1.072.398.981,00)	26,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.456.140.600,00	383.741.619,00	(1.072.398.981,00)	26,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.456.140.600,00	383.741.619,00	(1.072.398.981,00)	26,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0009		REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT	1.162.351.000,00	273.880.500,00	(888.470.500,00)	23,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.162.351.000,00	273.880.500,00	(888.470.500,00)	23,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.162.351.000,00	273.880.500,00	(888.470.500,00)	23,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	2.084.368.600,00	520.571.700,00	(1.563.796.900,00)	24,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004		KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	1.804.548.600,00	449.321.700,00	(1.355.226.900,00)	24,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.804.548.600,00	449.321.700,00	(1.355.226.900,00)	24,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.804.548.600,00	449.321.700,00	(1.355.226.900,00)	24,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	163.592.200,00	21.000.000,00	(142.592.200,00)	12,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	163.592.200,00	21.000.000,00	(142.592.200,00)	12,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.592.200,00	21.000.000,00	(142.592.200,00)	12,83	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0006		PENYUSUNAN TANGGAPAN/TINDAK LANJUT TERHADAP LHP BPK ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	116.227.800,00	50.250.000,00	(65.977.800,00)	43,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	116.227.800,00	50.250.000,00	(65.977.800,00)	43,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.227.800,00	50.250.000,00	(65.977.800,00)	43,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04		PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	214.344.625.305,00	230.056.170,00	(214.114.569.135,00)	0,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008		ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN	118.489.855.700,00	15.524.248,00	(118.474.331.452,00)	0,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	495.375.800,00	15.524.248,00	(479.851.552,00)	3,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	495.375.800,00	15.524.248,00	(479.851.552,00)	3,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4	BELANJA TRANSFER	117.994.479.900,00	0,00	(117.994.479.900,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	117.994.479.900,00	0,00	(117.994.479.900,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009		PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	94.864.820.364,00	0,00	(94.864.820.364,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	94.864.820.364,00	0,00	(94.864.820.364,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	94.864.820.364,00	0,00	(94.864.820.364,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0010		PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA	989.949.241,00	214.531.922,00	(775.417.319,00)	21,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0010	5.4	BELANJA TRANSFER	989.949.241,00	214.531.922,00	(775.417.319,00)	21,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0010	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	989.949.241,00	214.531.922,00	(775.417.319,00)	21,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4.260.063.900,00	1.446.398.725,00	(2.813.665.175,00)	33,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01		PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4.260.063.900,00	1.446.398.725,00	(2.813.665.175,00)	33,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001		PENYUSUNAN STANDAR HARGA	550.772.400,00	217.574.817,00	(333.197.583,00)	39,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	550.772.400,00	217.574.817,00	(333.197.583,00)	39,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.772.400,00	217.574.817,00	(333.197.583,00)	39,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0002		PENYUSUNAN STANDAR BARANG MILIK DAERAH DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH	414.796.000,00	27.937.500,00	(386.858.500,00)	6,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	414.796.000,00	27.937.500,00	(386.858.500,00)	6,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	414.796.000,00	27.937.500,00	(386.858.500,00)	6,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0003		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH	90.082.000,00	14.464.600,00	(75.617.400,00)	16,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	90.082.000,00	14.464.600,00	(75.617.400,00)	16,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.082.000,00	14.464.600,00	(75.617.400,00)	16,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006		INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH	90.690.000,00	69.986.000,00	(20.704.000,00)	77,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	90.690.000,00	69.986.000,00	(20.704.000,00)	77,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.690.000,00	69.986.000,00	(20.704.000,00)	77,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH	185.137.800,00	52.600.000,00	(132.537.800,00)	28,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	145.137.800,00	12.600.000,00	(132.537.800,00)	8,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.137.800,00	12.600.000,00	(132.537.800,00)	8,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0008		PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH	262.574.100,00	31.614.909,00	(230.959.191,00)	12,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	262.574.100,00	31.614.909,00	(230.959.191,00)	12,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.574.100,00	31.614.909,00	(230.959.191,00)	12,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0009		PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	79.677.000,00	61.570.000,00	(18.107.000,00)	77,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	79.677.000,00	61.570.000,00	(18.107.000,00)	77,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.677.000,00	61.570.000,00	(18.107.000,00)	77,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010		OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	617.557.000,00	247.536.300,00	(370.020.700,00)	40,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	617.557.000,00	247.536.300,00	(370.020.700,00)	40,08	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	617.557.000,00	247.536.300,00	(370.020.700,00)	40,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0011		REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	450.556.000,00	198.959.600,00	(251.596.400,00)	44,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	450.556.000,00	198.959.600,00	(251.596.400,00)	44,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.556.000,00	198.959.600,00	(251.596.400,00)	44,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0012		PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	544.046.000,00	105.216.999,00	(438.829.001,00)	19,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	544.046.000,00	105.216.999,00	(438.829.001,00)	19,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	544.046.000,00	105.216.999,00	(438.829.001,00)	19,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0013		PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	974.175.600,00	418.938.000,00	(555.237.600,00)	43,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	974.175.600,00	418.938.000,00	(555.237.600,00)	43,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	974.175.600,00	418.938.000,00	(555.237.600,00)	43,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.183.471.648,00	727.798.645,00	(2.455.673.003,00)	22,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01		KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.183.471.648,00	727.798.645,00	(2.455.673.003,00)	22,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0002		ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	838.853.000,00	160.980.945,00	(677.872.055,00)	19,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	838.853.000,00	160.980.945,00	(677.872.055,00)	19,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	838.853.000,00	160.980.945,00	(677.872.055,00)	19,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0003		PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	771.787.600,00	173.873.200,00	(597.914.400,00)	22,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	771.787.600,00	173.873.200,00	(597.914.400,00)	22,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	771.787.600,00	173.873.200,00	(597.914.400,00)	22,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0004		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	70.500.000,00	0,00	(70.500.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	70.500.000,00	0,00	(70.500.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.500.000,00	0,00	(70.500.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005		PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH	254.024.148,00	128.704.900,00	(125.319.248,00)	50,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	254.024.148,00	128.704.900,00	(125.319.248,00)	50,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.024.148,00	128.704.900,00	(125.319.248,00)	50,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0006		PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH	13.644.000,00	0,00	(13.644.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.644.000,00	0,00	(13.644.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.644.000,00	0,00	(13.644.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0007		PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	275.552.000,00	0,00	(275.552.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	275.552.000,00	0,00	(275.552.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.552.000,00	0,00	(275.552.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0008		PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH	152.824.000,00	0,00	(152.824.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	152.824.000,00	0,00	(152.824.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.824.000,00	0,00	(152.824.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0011		PENAGIHAN PAJAK DAERAH	290.618.000,00	84.874.800,00	(205.743.200,00)	29,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	290.618.000,00	84.874.800,00	(205.743.200,00)	29,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.618.000,00	84.874.800,00	(205.743.200,00)	29,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0012		PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH	3.514.000,00	0,00	(3.514.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	3.514.000,00	0,00	(3.514.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.514.000,00	0,00	(3.514.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0013		PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	181.789.200,00	100.791.400,00	(80.997.800,00)	55,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	181.789.200,00	100.791.400,00	(80.997.800,00)	55,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.789.200,00	100.791.400,00	(80.997.800,00)	55,44	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0014		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	330.365.700,00	78.573.400,00	(251.792.300,00)	23,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	330.365.700,00	78.573.400,00	(251.792.300,00)	23,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.365.700,00	78.573.400,00	(251.792.300,00)	23,78	
				JUMLAH BELANJA	292.295.857.500,89	11.822.675.060,00	(280.473.182.440,89)	4,04	
				SURPLUS / (DEFISIT)	724.963.791.952,11	62.535.405.757,67	(662.428.386.194,44)	8,62	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6	PEMBIAYAAN DAERAH	406.022.138.025,90	0,00	(406.022.138.025,90)	0,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	436.022.138.025,90	0,00	(436.022.138.025,90)	0,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	436.022.138.025,90	0,00	(436.022.138.025,90)	0,00	
				JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	436.022.138.025,90	0,00	(436.022.138.025,90)	0,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00	0,00	(30.000.000.000,00)	0,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	30.000.000.000,00	0,00	(30.000.000.000,00)	0,00	
				JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00	0,00	(30.000.000.000,00)	0,00	
				PEMBIAYAAN NETTO	406.022.138.025,90	0,00	(406.022.138.025,90)	0,00	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	1.130.985.929.978,01	62.535.405.757,67	(1.068.450.524.220,34)	5,52	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : KEPEGAWAIAN
 Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	7.683.185.520,00	1.260.932.005,00	(6.422.253.515,00)	16,41	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.765.878.620,00	798.511.876,00	(4.967.366.744,00)	13,84	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.091.200,00	2.852.000,00	(3.239.200,00)	46,82	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3.713.200,00	1.488.000,00	(2.225.200,00)	40,07	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.713.200,00	1.488.000,00	(2.225.200,00)	40,07	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.713.200,00	1.488.000,00	(2.225.200,00)	40,07	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.378.000,00	1.364.000,00	(1.014.000,00)	57,35	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.378.000,00	1.364.000,00	(1.014.000,00)	57,35	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.378.000,00	1.364.000,00	(1.014.000,00)	57,35	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.710.125.940,00	568.638.423,00	(4.141.487.517,00)	12,07	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.559.405.940,00	430.518.423,00	(4.128.887.517,00)	9,44	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.559.405.940,00	430.518.423,00	(4.128.887.517,00)	9,44	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.559.405.940,00	430.518.423,00	(4.128.887.517,00)	9,44	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	150.720.000,00	138.120.000,00	(12.600.000,00)	91,64	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	150.720.000,00	138.120.000,00	(12.600.000,00)	91,64	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.720.000,00	138.120.000,00	(12.600.000,00)	91,64	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	39.096.000,00	12.493.202,00	(26.602.798,00)	31,95	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	39.096.000,00	12.493.202,00	(26.602.798,00)	31,95	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	39.096.000,00	12.493.202,00	(26.602.798,00)	31,95	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.096.000,00	12.493.202,00	(26.602.798,00)	31,95	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	447.268.240,00	123.013.864,00	(324.254.376,00)	27,50	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	126.750.640,00	9.450.000,00	(117.300.640,00)	7,45	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	126.750.640,00	9.450.000,00	(117.300.640,00)	7,45	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.750.640,00	9.450.000,00	(117.300.640,00)	7,45	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	31.383.600,00	7.143.000,00	(24.240.600,00)	22,76	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	31.383.600,00	7.143.000,00	(24.240.600,00)	22,76	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.383.600,00	7.143.000,00	(24.240.600,00)	22,76	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	289.134.000,00	106.420.864,00	(182.713.136,00)	36,80	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	289.134.000,00	106.420.864,00	(182.713.136,00)	36,80	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.134.000,00	106.420.864,00	(182.713.136,00)	36,80	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	42.333.200,00	32.672.850,00	(9.660.350,00)	77,18	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	8.995.100,00	0,00	(8.995.100,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	8.995.100,00	0,00	(8.995.100,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.995.100,00	0,00	(8.995.100,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	33.338.100,00	32.672.850,00	(665.250,00)	98,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	33.338.100,00	32.672.850,00	(665.250,00)	98,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.338.100,00	32.672.850,00	(665.250,00)	98,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	452.344.040,00	56.793.037,00	(395.551.003,00)	12,55	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	216.540.040,00	51.785.677,00	(164.754.363,00)	23,91	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	216.540.040,00	51.785.677,00	(164.754.363,00)	23,91	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.540.040,00	51.785.677,00	(164.754.363,00)	23,91	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	231.804.000,00	5.007.360,00	(226.796.640,00)	2,16	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	231.804.000,00	5.007.360,00	(226.796.640,00)	2,16	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.804.000,00	5.007.360,00	(226.796.640,00)	2,16	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	68.620.000,00	2.048.500,00	(66.571.500,00)	2,98	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	64.230.000,00	2.048.500,00	(62.181.500,00)	3,18	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	64.230.000,00	2.048.500,00	(62.181.500,00)	3,18	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.230.000,00	2.048.500,00	(62.181.500,00)	3,18	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	4.390.000,00	0,00	(4.390.000,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.390.000,00	0,00	(4.390.000,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.390.000,00	0,00	(4.390.000,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.917.306.900,00	462.420.129,00	(1.454.886.771,00)	24,11	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01		PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	571.653.000,00	161.850.000,00	(409.803.000,00)	28,31	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003		KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK	190.119.000,00	28.350.000,00	(161.769.000,00)	14,91	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	190.119.000,00	28.350.000,00	(161.769.000,00)	14,91	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.119.000,00	28.350.000,00	(161.769.000,00)	14,91	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0004		EVALUASI PENGADAAN ASN DAN PENGADAAN ASN	17.656.000,00	7.600.000,00	(10.056.000,00)	43,04	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	17.656.000,00	7.600.000,00	(10.056.000,00)	43,04	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.656.000,00	7.600.000,00	(10.056.000,00)	43,04	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008		FASILITASI LEMBAGA PROFESI ASN	262.428.000,00	79.450.000,00	(182.978.000,00)	30,27	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	262.428.000,00	79.450.000,00	(182.978.000,00)	30,27	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.428.000,00	79.450.000,00	(182.978.000,00)	30,27	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011		PENGLOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	101.450.000,00	46.450.000,00	(55.000.000,00)	45,78	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	101.450.000,00	46.450.000,00	(55.000.000,00)	45,78	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.450.000,00	46.450.000,00	(55.000.000,00)	45,78	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02		MUTASI DAN PROMOSI ASN	400.229.400,00	48.819.600,00	(351.409.800,00)	12,19	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001		PENGLOLAAN MUTASI ASN	94.987.500,00	22.644.600,00	(72.342.900,00)	23,83	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	94.987.500,00	22.644.600,00	(72.342.900,00)	23,83	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.987.500,00	22.644.600,00	(72.342.900,00)	23,83	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002		PENGLOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN	213.209.900,00	14.725.000,00	(198.484.900,00)	6,90	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	213.209.900,00	14.725.000,00	(198.484.900,00)	6,90	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.209.900,00	14.725.000,00	(198.484.900,00)	6,90	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003		PENGLOLAAN PROMOSI ASN	92.032.000,00	11.450.000,00	(80.582.000,00)	12,44	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	92.032.000,00	11.450.000,00	(80.582.000,00)	12,44	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.032.000,00	11.450.000,00	(80.582.000,00)	12,44	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03		PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	928.278.700,00	235.644.665,00	(692.634.035,00)	25,38	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0002		PENGLOLAAN ASSESSMENT CENTER	662.864.900,00	229.973.665,00	(432.891.235,00)	34,69	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	662.864.900,00	229.973.665,00	(432.891.235,00)	34,69	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	662.864.900,00	229.973.665,00	(432.891.235,00)	34,69	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004		PENGLOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN	145.776.000,00	4.411.000,00	(141.365.000,00)	3,02	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	145.776.000,00	4.411.000,00	(141.365.000,00)	3,02	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.776.000,00	4.411.000,00	(141.365.000,00)	3,02	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0007		EVALUASI DIKLAT DAN SERTIFIKASI JABATAN ASN	11.783.800,00	0,00	(11.783.800,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	11.783.800,00	0,00	(11.783.800,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.783.800,00	0,00	(11.783.800,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0012		SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL ASN	107.854.000,00	1.260.000,00	(106.594.000,00)	1,16	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0012	5.1	BELANJA OPERASI	107.854.000,00	1.260.000,00	(106.594.000,00)	1,16	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.854.000,00	1.260.000,00	(106.594.000,00)	1,16	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04		PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	17.145.800,00	16.105.864,00	(1.039.936,00)	93,93	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002		PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	17.145.800,00	16.105.864,00	(1.039.936,00)	93,93	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.145.800,00	16.105.864,00	(1.039.936,00)	93,93	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.145.800,00	16.105.864,00	(1.039.936,00)	93,93	
				JUMLAH BELANJA	7.683.185.520,00	1.260.932.005,00	(6.422.253.515,00)	16,41	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(7.683.185.520,00)	(1.260.932.005,00)	6.422.253.515,00	16,41	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.683.185.520,00)	(1.260.932.005,00)	6.422.253.515,00	16,41	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	629.586.600,00	265.210.687,00	(364.375.913,00)	42,12	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	629.586.600,00	265.210.687,00	(364.375.913,00)	42,12	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02		SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	629.586.600,00	265.210.687,00	(364.375.913,00)	42,12	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007		PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN	629.586.600,00	265.210.687,00	(364.375.913,00)	42,12	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	629.586.600,00	265.210.687,00	(364.375.913,00)	42,12	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	629.586.600,00	265.210.687,00	(364.375.913,00)	42,12	
				JUMLAH BELANJA	629.586.600,00	265.210.687,00	(364.375.913,00)	42,12	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(629.586.600,00)	(265.210.687,00)	364.375.913,00	42,12	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(629.586.600,00)	(265.210.687,00)	364.375.913,00	42,12	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : Inspektorat Kabupaten

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	17.080.860.640,00	4.265.894.900,00	(12.814.965.740,00)	24,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.805.712.640,00	2.151.522.113,00	(6.654.190.527,00)	24,43	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	68.474.000,00	2.262.400,00	(66.211.600,00)	3,30	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	45.710.000,00	0,00	(45.710.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	45.710.000,00	0,00	(45.710.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.710.000,00	0,00	(45.710.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	22.764.000,00	2.262.400,00	(20.501.600,00)	9,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	22.764.000,00	2.262.400,00	(20.501.600,00)	9,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.764.000,00	2.262.400,00	(20.501.600,00)	9,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.677.781.714,00	457.655.600,00	(4.220.126.114,00)	9,78	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.438.081.714,00	408.515.600,00	(4.029.566.114,00)	9,20	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.438.081.714,00	408.515.600,00	(4.029.566.114,00)	9,20	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.438.081.714,00	408.515.600,00	(4.029.566.114,00)	9,20	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	239.700.000,00	49.140.000,00	(190.560.000,00)	20,50	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	239.700.000,00	49.140.000,00	(190.560.000,00)	20,50	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.700.000,00	49.140.000,00	(190.560.000,00)	20,50	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	680.786.000,00	61.337.474,00	(619.448.526,00)	9,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0005		MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	17.990.000,00	5.497.200,00	(12.492.800,00)	30,55	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	17.990.000,00	5.497.200,00	(12.492.800,00)	30,55	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.990.000,00	5.497.200,00	(12.492.800,00)	30,55	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	454.872.000,00	11.703.256,00	(443.168.744,00)	2,57	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	454.872.000,00	11.703.256,00	(443.168.744,00)	2,57	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	454.872.000,00	11.703.256,00	(443.168.744,00)	2,57	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	207.924.000,00	44.137.018,00	(163.786.982,00)	21,22	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	207.924.000,00	44.137.018,00	(163.786.982,00)	21,22	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.924.000,00	44.137.018,00	(163.786.982,00)	21,22	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.076.880.856,00	220.214.600,00	(856.666.256,00)	20,44	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	50.929.616,00	27.028.000,00	(23.901.616,00)	53,06	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.929.616,00	27.028.000,00	(23.901.616,00)	53,06	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.929.616,00	27.028.000,00	(23.901.616,00)	53,06	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	67.695.840,00	29.021.000,00	(38.674.840,00)	42,86	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	44.796.080,00	6.400.000,00	(38.396.080,00)	14,28	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.796.080,00	6.400.000,00	(38.396.080,00)	14,28	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	22.899.760,00	22.621.000,00	(278.760,00)	98,78	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.899.760,00	22.621.000,00	(278.760,00)	98,78	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	310.438.900,00	53.210.000,00	(257.228.900,00)	17,14	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	310.438.900,00	53.210.000,00	(257.228.900,00)	17,14	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.438.900,00	53.210.000,00	(257.228.900,00)	17,14	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	169.184.500,00	97.000.000,00	(72.184.500,00)	57,33	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	169.184.500,00	97.000.000,00	(72.184.500,00)	57,33	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.184.500,00	97.000.000,00	(72.184.500,00)	57,33	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	478.632.000,00	13.955.600,00	(464.676.400,00)	2,91	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	478.632.000,00	13.955.600,00	(464.676.400,00)	2,91	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	478.632.000,00	13.955.600,00	(464.676.400,00)	2,91	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.323.524.970,00	1.105.945.780,00	(217.579.190,00)	83,56	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	580.962.000,00	527.000.000,00	(53.962.000,00)	90,71	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	580.962.000,00	527.000.000,00	(53.962.000,00)	90,71	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	580.962.000,00	527.000.000,00	(53.962.000,00)	90,71	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	97.982.800,00	0,00	(97.982.800,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	97.982.800,00	0,00	(97.982.800,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.982.800,00	0,00	(97.982.800,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	65.271.370,00	0,00	(65.271.370,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	65.271.370,00	0,00	(65.271.370,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.271.370,00	0,00	(65.271.370,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0011		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	579.308.800,00	578.945.780,00	(363.020,00)	99,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	579.308.800,00	578.945.780,00	(363.020,00)	99,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0011	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	519.574.400,00	519.212.780,00	(361.620,00)	99,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0011	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	59.734.400,00	59.733.000,00	(1.400,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	531.278.400,00	47.468.464,00	(483.809.936,00)	8,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	12.000.000,00	600.000,00	(11.400.000,00)	5,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	600.000,00	(11.400.000,00)	5,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	600.000,00	(11.400.000,00)	5,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	148.200.000,00	15.068.464,00	(133.131.536,00)	10,16	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	148.200.000,00	15.068.464,00	(133.131.536,00)	10,16	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.200.000,00	15.068.464,00	(133.131.536,00)	10,16	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	371.078.400,00	31.800.000,00	(339.278.400,00)	8,56	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	371.078.400,00	31.800.000,00	(339.278.400,00)	8,56	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	371.078.400,00	31.800.000,00	(339.278.400,00)	8,56	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	446.986.700,00	256.637.795,00	(190.348.905,00)	57,41	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	247.840.000,00	81.995.000,00	(165.845.000,00)	33,08	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	247.840.000,00	81.995.000,00	(165.845.000,00)	33,08	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.840.000,00	81.995.000,00	(165.845.000,00)	33,08	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	37.160.000,00	12.765.000,00	(24.395.000,00)	34,35	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	37.160.000,00	12.765.000,00	(24.395.000,00)	34,35	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	

6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		37.160.000,00	12.765.000,00	(24.395.000,00)	34,35	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA		161.986.700,00	161.877.795,00	(108.905,00)	99,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI		161.986.700,00	161.877.795,00	(108.905,00)	99,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		161.986.700,00	161.877.795,00	(108.905,00)	99,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		3.752.017.000,00	1.259.135.600,00	(2.492.881.400,00)	33,55	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL		2.966.753.000,00	767.839.700,00	(2.198.913.300,00)	25,88	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001		PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH		327.298.000,00	13.250.000,00	(314.048.000,00)	4,04	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI		327.298.000,00	13.250.000,00	(314.048.000,00)	4,04	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		327.298.000,00	13.250.000,00	(314.048.000,00)	4,04	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002		PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH		556.318.000,00	90.437.200,00	(465.880.800,00)	16,25	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI		556.318.000,00	90.437.200,00	(465.880.800,00)	16,25	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		556.318.000,00	90.437.200,00	(465.880.800,00)	16,25	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003		REVIU LAPORAN KINERJA		137.666.000,00	5.350.000,00	(132.316.000,00)	3,88	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI		137.666.000,00	5.350.000,00	(132.316.000,00)	3,88	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		137.666.000,00	5.350.000,00	(132.316.000,00)	3,88	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004		REVIU LAPORAN KEUANGAN		193.983.000,00	0,00	(193.983.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI		193.983.000,00	0,00	(193.983.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		193.983.000,00	0,00	(193.983.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005		PENGAWASAN DESA		952.414.000,00	439.852.500,00	(512.561.500,00)	46,18	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI		952.414.000,00	439.852.500,00	(512.561.500,00)	46,18	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		952.414.000,00	439.852.500,00	(512.561.500,00)	46,18	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007		MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP		799.074.000,00	218.950.000,00	(580.124.000,00)	27,40	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI		799.074.000,00	218.950.000,00	(580.124.000,00)	27,40	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		799.074.000,00	218.950.000,00	(580.124.000,00)	27,40	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU		785.264.000,00	491.295.900,00	(293.968.100,00)	62,56	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002		PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU		785.264.000,00	491.295.900,00	(293.968.100,00)	62,56	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI		785.264.000,00	491.295.900,00	(293.968.100,00)	62,56	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		785.264.000,00	491.295.900,00	(293.968.100,00)	62,56	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		4.523.131.000,00	855.237.187,00	(3.667.893.813,00)	18,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN		1.485.050.000,00	257.582.517,00	(1.227.467.483,00)	17,34	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0002		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG FASILITASI PENGAWASAN		1.485.050.000,00	257.582.517,00	(1.227.467.483,00)	17,34	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI		1.485.050.000,00	257.582.517,00	(1.227.467.483,00)	17,34	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		1.485.050.000,00	257.582.517,00	(1.227.467.483,00)	17,34	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		3.038.081.000,00	597.654.670,00	(2.440.426.330,00)	19,67	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1.097.130.000,00	112.967.600,00	(984.162.400,00)	10,29	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI		1.097.130.000,00	112.967.600,00	(984.162.400,00)	10,29	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		1.097.130.000,00	112.967.600,00	(984.162.400,00)	10,29	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002		PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI		813.134.000,00	240.570.800,00	(572.563.200,00)	29,58	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI		813.134.000,00	240.570.800,00	(572.563.200,00)	29,58	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		813.134.000,00	240.570.800,00	(572.563.200,00)	29,58	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003		KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI		694.917.000,00	182.375.000,00	(512.542.000,00)	26,24	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI		694.917.000,00	182.375.000,00	(512.542.000,00)	26,24	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	694.917.000,00	182.375.000,00	(512.542.000,00)	26,24	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0004		PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS	432.900.000,00	61.741.270,00	(371.158.730,00)	14,26	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	432.900.000,00	61.741.270,00	(371.158.730,00)	14,26	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	432.900.000,00	61.741.270,00	(371.158.730,00)	14,26	
				JUMLAH BELANJA	17.080.860.640,00	4.265.894.900,00	(12.814.965.740,00)	24,97	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(17.080.860.640,00)	(4.265.894.900,00)	12.814.965.740,00	24,97	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(17.080.860.640,00)	(4.265.894.900,00)	12.814.965.740,00	24,97	

Tana Tidung, 4 September 2026

BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : KECAMATAN
 Organisasi : Kecamatan Sesayap

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.033.136.750,00	536.656.826,00	(4.496.479.924,00)	10,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.409.356.050,00	450.344.826,00	(3.959.011.224,00)	10,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.529.820.894,00	326.430.802,00	(3.203.390.092,00)	9,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.436.960.894,00	303.300.802,00	(3.133.660.092,00)	8,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.436.960.894,00	303.300.802,00	(3.133.660.092,00)	8,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.436.960.894,00	303.300.802,00	(3.133.660.092,00)	8,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	92.860.000,00	23.130.000,00	(69.730.000,00)	24,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	92.860.000,00	23.130.000,00	(69.730.000,00)	24,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.860.000,00	23.130.000,00	(69.730.000,00)	24,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	26.976.000,00	9.917.302,00	(17.058.698,00)	36,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	26.976.000,00	9.917.302,00	(17.058.698,00)	36,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	26.976.000,00	9.917.302,00	(17.058.698,00)	36,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.976.000,00	9.917.302,00	(17.058.698,00)	36,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	534.241.196,00	98.486.796,00	(435.754.400,00)	18,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	7.444.900,00	0,00	(7.444.900,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	7.444.900,00	0,00	(7.444.900,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.444.900,00	0,00	(7.444.900,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	208.337.896,00	19.739.296,00	(188.598.600,00)	9,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	208.337.896,00	19.739.296,00	(188.598.600,00)	9,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.337.896,00	19.739.296,00	(188.598.600,00)	9,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	54.741.400,00	4.340.000,00	(50.401.400,00)	7,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	54.741.400,00	4.340.000,00	(50.401.400,00)	7,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.741.400,00	4.340.000,00	(50.401.400,00)	7,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	263.717.000,00	74.407.500,00	(189.309.500,00)	28,21	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	263.717.000,00	74.407.500,00	(189.309.500,00)	28,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.717.000,00	74.407.500,00	(189.309.500,00)	28,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	129.953.360,00	0,00	(129.953.360,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	129.953.360,00	0,00	(129.953.360,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	129.953.360,00	0,00	(129.953.360,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.953.360,00	0,00	(129.953.360,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	142.044.600,00	14.089.926,00	(127.954.674,00)	9,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6.625.000,00	0,00	(6.625.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.625.000,00	0,00	(6.625.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.625.000,00	0,00	(6.625.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	47.399.600,00	9.101.488,00	(38.298.112,00)	19,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	47.399.600,00	9.101.488,00	(38.298.112,00)	19,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.399.600,00	9.101.488,00	(38.298.112,00)	19,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	88.020.000,00	4.988.438,00	(83.031.562,00)	5,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	88.020.000,00	4.988.438,00	(83.031.562,00)	5,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.020.000,00	4.988.438,00	(83.031.562,00)	5,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	38.320.000,00	1.420.000,00	(36.900.000,00)	3,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	35.680.000,00	0,00	(35.680.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	35.680.000,00	0,00	(35.680.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.680.000,00	0,00	(35.680.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2.640.000,00	1.420.000,00	(1.220.000,00)	53,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.640.000,00	1.420.000,00	(1.220.000,00)	53,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	1.420.000,00	(1.220.000,00)	53,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.200.000,00	750.000,00	(9.450.000,00)	7,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	10.200.000,00	750.000,00	(9.450.000,00)	7,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	10.200.000,00	750.000,00	(9.450.000,00)	7,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.200.000,00	750.000,00	(9.450.000,00)	7,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	750.000,00	(9.450.000,00)	7,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	553.405.700,00	72.562.000,00	(480.843.700,00)	13,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	520.565.700,00	68.972.000,00	(451.593.700,00)	13,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	17.344.700,00	0,00	(17.344.700,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.344.700,00	0,00	(17.344.700,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.344.700,00	0,00	(17.344.700,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0002		SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN	216.860.000,00	48.600.000,00	(168.260.000,00)	22,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	216.860.000,00	48.600.000,00	(168.260.000,00)	22,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.860.000,00	48.600.000,00	(168.260.000,00)	22,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	286.361.000,00	20.372.000,00	(265.989.000,00)	7,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	286.361.000,00	20.372.000,00	(265.989.000,00)	7,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.361.000,00	20.372.000,00	(265.989.000,00)	7,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.03		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	32.840.000,00	3.590.000,00	(29.250.000,00)	10,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.03.0004		FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	32.840.000,00	3.590.000,00	(29.250.000,00)	10,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	32.840.000,00	3.590.000,00	(29.250.000,00)	10,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.840.000,00	3.590.000,00	(29.250.000,00)	10,93	

KODE REKENING				URAIAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		39.625.000,00	13.000.000,00	(26.625.000,00)	32,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		29.550.000,00	13.000.000,00	(16.550.000,00)	43,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN		29.550.000,00	13.000.000,00	(16.550.000,00)	43,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI		29.550.000,00	13.000.000,00	(16.550.000,00)	43,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		29.550.000,00	13.000.000,00	(16.550.000,00)	43,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.02		KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH		10.075.000,00	0,00	(10.075.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.02.0001		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA		10.075.000,00	0,00	(10.075.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI		10.075.000,00	0,00	(10.075.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		10.075.000,00	0,00	(10.075.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		20.550.000,00	0,00	(20.550.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		20.550.000,00	0,00	(20.550.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0002		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA		20.550.000,00	0,00	(20.550.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI		20.550.000,00	0,00	(20.550.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		20.550.000,00	0,00	(20.550.000,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA		5.033.136.750,00	536.656.826,00	(4.496.479.924,00)	10,66	
				SURPLUS / (DEFISIT)		(5.033.136.750,00)	(536.656.826,00)	4.496.479.924,00	10,66	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(5.033.136.750,00)	(536.656.826,00)	4.496.479.924,00	10,66	

Tana Tidung, 4 September 2026

BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Sesayap Hilir

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	4.988.466.804,00	1.234.144.516,00	(3.754.322.288,00)	24,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.331.900.004,00	731.604.317,00	(3.600.295.687,00)	16,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	13.935.000,00	3.951.000,00	(9.984.000,00)	28,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	6.528.000,00	1.971.000,00	(4.557.000,00)	30,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.528.000,00	1.971.000,00	(4.557.000,00)	30,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.528.000,00	1.971.000,00	(4.557.000,00)	30,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	7.407.000,00	1.980.000,00	(5.427.000,00)	26,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.407.000,00	1.980.000,00	(5.427.000,00)	26,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.407.000,00	1.980.000,00	(5.427.000,00)	26,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.625.775.224,00	394.251.582,00	(3.231.523.642,00)	10,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.502.910.224,00	317.546.382,00	(3.185.363.842,00)	9,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.502.910.224,00	317.546.382,00	(3.185.363.842,00)	9,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.502.910.224,00	317.546.382,00	(3.185.363.842,00)	9,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	117.990.000,00	74.190.000,00	(43.800.000,00)	62,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	117.990.000,00	74.190.000,00	(43.800.000,00)	62,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.990.000,00	74.190.000,00	(43.800.000,00)	62,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	4.875.000,00	2.515.200,00	(2.359.800,00)	51,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	4.875.000,00	2.515.200,00	(2.359.800,00)	51,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.875.000,00	2.515.200,00	(2.359.800,00)	51,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	524.505.500,00	319.968.003,00	(204.537.497,00)	61,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	190.784.500,00	122.505.300,00	(68.279.200,00)	64,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	190.784.500,00	122.505.300,00	(68.279.200,00)	64,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.784.500,00	122.505.300,00	(68.279.200,00)	64,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.871.000,00	5.871.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.871.000,00	5.871.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.871.000,00	5.871.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	327.850.000,00	191.591.703,00	(136.258.297,00)	58,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	327.850.000,00	191.591.703,00	(136.258.297,00)	58,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	327.850.000,00	191.591.703,00	(136.258.297,00)	58,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	119.474.880,00	10.677.732,00	(108.797.148,00)	8,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	66.967.680,00	10.418.532,00	(56.549.148,00)	15,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	66.967.680,00	10.418.532,00	(56.549.148,00)	15,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.967.680,00	10.418.532,00	(56.549.148,00)	15,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	48.907.200,00	259.200,00	(48.648.000,00)	0,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	48.907.200,00	259.200,00	(48.648.000,00)	0,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.907.200,00	259.200,00	(48.648.000,00)	0,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	48.209.400,00	2.756.000,00	(45.453.400,00)	5,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	32.819.400,00	2.756.000,00	(30.063.400,00)	8,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	32.819.400,00	2.756.000,00	(30.063.400,00)	8,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.819.400,00	2.756.000,00	(30.063.400,00)	8,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	15.390.000,00	0,00	(15.390.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.390.000,00	0,00	(15.390.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.390.000,00	0,00	(15.390.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.555.000,00	10.400.000,00	(4.155.000,00)	71,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	14.555.000,00	10.400.000,00	(4.155.000,00)	71,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	14.555.000,00	10.400.000,00	(4.155.000,00)	71,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.555.000,00	10.400.000,00	(4.155.000,00)	71,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.555.000,00	10.400.000,00	(4.155.000,00)	71,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	514.514.000,00	454.117.519,00	(60.396.481,00)	88,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	378.241.800,00	323.822.619,00	(54.419.181,00)	85,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0002		SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN	227.395.000,00	196.908.000,00	(30.487.000,00)	86,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	227.395.000,00	196.908.000,00	(30.487.000,00)	86,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.395.000,00	196.908.000,00	(30.487.000,00)	86,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	150.846.800,00	126.914.619,00	(23.932.181,00)	84,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	150.846.800,00	126.914.619,00	(23.932.181,00)	84,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.846.800,00	126.914.619,00	(23.932.181,00)	84,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	136.272.200,00	130.294.900,00	(5.977.300,00)	95,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03.0001		PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	136.272.200,00	130.294.900,00	(5.977.300,00)	95,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	136.272.200,00	130.294.900,00	(5.977.300,00)	95,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.272.200,00	130.294.900,00	(5.977.300,00)	95,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.210.000,00	1.200.000,00	(23.010.000,00)	4,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.210.000,00	1.200.000,00	(23.010.000,00)	4,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	24.210.000,00	1.200.000,00	(23.010.000,00)	4,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.210.000,00	1.200.000,00	(23.010.000,00)	4,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.210.000,00	1.200.000,00	(23.010.000,00)	4,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.572.000,00	11.573.480,00	(10.998.520,00)	51,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	22.572.000,00	11.573.480,00	(10.998.520,00)	51,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0002		FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL	22.572.000,00	11.573.480,00	(10.998.520,00)	51,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.572.000,00	11.573.480,00	(10.998.520,00)	51,27	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.572.000,00	11.573.480,00	(10.998.520,00)	51,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	80.715.800,00	25.249.200,00	(55.466.600,00)	31,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	80.715.800,00	25.249.200,00	(55.466.600,00)	31,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0002		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	64.389.200,00	25.249.200,00	(39.140.000,00)	39,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	64.389.200,00	25.249.200,00	(39.140.000,00)	39,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.389.200,00	25.249.200,00	(39.140.000,00)	39,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0013		FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF	16.326.600,00	0,00	(16.326.600,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	16.326.600,00	0,00	(16.326.600,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.326.600,00	0,00	(16.326.600,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	4.988.466.804,00	1.234.144.516,00	(3.754.322.288,00)	24,73	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.988.466.804,00)	(1.234.144.516,00)	3.754.322.288,00	24,73	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.988.466.804,00)	(1.234.144.516,00)	3.754.322.288,00	24,73	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Tana Lia

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	5.646.978.471,00	1.311.308.262,00	(4.335.670.209,00)	23,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.216.811.901,00	1.123.416.262,00	(4.093.395.639,00)	21,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	26.213.100,00	1.702.000,00	(24.511.100,00)	6,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.785.500,00	1.702.000,00	(3.083.500,00)	35,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.785.500,00	1.702.000,00	(3.083.500,00)	35,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.785.500,00	1.702.000,00	(3.083.500,00)	35,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	21.427.600,00	0,00	(21.427.600,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	21.427.600,00	0,00	(21.427.600,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.427.600,00	0,00	(21.427.600,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.746.572.471,00	372.484.912,00	(3.374.087.559,00)	9,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.645.182.471,00	321.134.912,00	(3.324.047.559,00)	8,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.645.182.471,00	321.134.912,00	(3.324.047.559,00)	8,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.645.182.471,00	321.134.912,00	(3.324.047.559,00)	8,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	101.390.000,00	51.350.000,00	(50.040.000,00)	50,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	101.390.000,00	51.350.000,00	(50.040.000,00)	50,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.390.000,00	51.350.000,00	(50.040.000,00)	50,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	46.672.000,00	29.012.500,00	(17.659.500,00)	62,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	46.672.000,00	29.012.500,00	(17.659.500,00)	62,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	46.672.000,00	29.012.500,00	(17.659.500,00)	62,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.672.000,00	29.012.500,00	(17.659.500,00)	62,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	684.730.030,00	147.062.000,00	(537.668.030,00)	21,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.910.000,00	0,00	(1.910.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.910.000,00	0,00	(1.910.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.910.000,00	0,00	(1.910.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	11.742.200,00	0,00	(11.742.200,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	11.742.200,00	0,00	(11.742.200,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.742.200,00	0,00	(11.742.200,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.684.800,00	0,00	(3.684.800,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	3.684.800,00	0,00	(3.684.800,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.684.800,00	0,00	(3.684.800,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	75.573.830,00	15.048.400,00	(60.525.430,00)	19,91	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	75.573.830,00	15.048.400,00	(60.525.430,00)	19,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.573.830,00	15.048.400,00	(60.525.430,00)	19,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.891.200,00	1.782.000,00	(6.109.200,00)	22,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.891.200,00	1.782.000,00	(6.109.200,00)	22,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.891.200,00	1.782.000,00	(6.109.200,00)	22,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	583.928.000,00	130.231.600,00	(453.696.400,00)	22,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	583.928.000,00	130.231.600,00	(453.696.400,00)	22,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	583.928.000,00	130.231.600,00	(453.696.400,00)	22,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	541.530.300,00	531.060.000,00	(10.470.300,00)	98,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	531.401.000,00	531.060.000,00	(341.000,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	531.401.000,00	531.060.000,00	(341.000,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	531.401.000,00	531.060.000,00	(341.000,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	6.130.600,00	0,00	(6.130.600,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	6.130.600,00	0,00	(6.130.600,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.130.600,00	0,00	(6.130.600,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	3.998.700,00	0,00	(3.998.700,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	3.998.700,00	0,00	(3.998.700,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.998.700,00	0,00	(3.998.700,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	114.814.000,00	24.479.850,00	(90.334.150,00)	21,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.600.000,00	1.100.000,00	(2.500.000,00)	30,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	1.100.000,00	(2.500.000,00)	30,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	1.100.000,00	(2.500.000,00)	30,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	48.476.000,00	13.758.250,00	(34.717.750,00)	28,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	48.476.000,00	13.758.250,00	(34.717.750,00)	28,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.476.000,00	13.758.250,00	(34.717.750,00)	28,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	62.738.000,00	9.621.600,00	(53.116.400,00)	15,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	62.738.000,00	9.621.600,00	(53.116.400,00)	15,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.738.000,00	9.621.600,00	(53.116.400,00)	15,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	56.280.000,00	17.615.000,00	(38.665.000,00)	31,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	46.530.000,00	10.145.000,00	(36.385.000,00)	21,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	46.530.000,00	10.145.000,00	(36.385.000,00)	21,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.530.000,00	10.145.000,00	(36.385.000,00)	21,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	4.260.000,00	1.980.000,00	(2.280.000,00)	46,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.260.000,00	1.980.000,00	(2.280.000,00)	46,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.260.000,00	1.980.000,00	(2.280.000,00)	46,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	5.490.000,00	5.490.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	5.490.000,00	5.490.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.490.000,00	5.490.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.947.800,00	5.558.000,00	(5.389.800,00)	50,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	10.947.800,00	5.558.000,00	(5.389.800,00)	50,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	10.947.800,00	5.558.000,00	(5.389.800,00)	50,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.947.800,00	5.558.000,00	(5.389.800,00)	50,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.947.800,00	5.558.000,00	(5.389.800,00)	50,76	

KODE REKENING				URAIAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		331.220.400,00	149.772.000,00	(181.448.400,00)	45,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA		285.216.300,00	141.810.000,00	(143.406.300,00)	49,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0002		SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN		13.240.400,00	4.200.000,00	(9.040.400,00)	31,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI		13.240.400,00	4.200.000,00	(9.040.400,00)	31,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		13.240.400,00	4.200.000,00	(9.040.400,00)	31,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN		271.975.900,00	137.610.000,00	(134.365.900,00)	50,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI		271.975.900,00	137.610.000,00	(134.365.900,00)	50,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		271.975.900,00	137.610.000,00	(134.365.900,00)	50,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.03		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN		46.004.100,00	7.962.000,00	(38.042.100,00)	17,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.03.0001		PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN		46.004.100,00	7.962.000,00	(38.042.100,00)	17,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI		46.004.100,00	7.962.000,00	(38.042.100,00)	17,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		46.004.100,00	7.962.000,00	(38.042.100,00)	17,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		30.509.300,00	10.116.000,00	(20.393.300,00)	33,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		30.509.300,00	10.116.000,00	(20.393.300,00)	33,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN		30.509.300,00	10.116.000,00	(20.393.300,00)	33,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI		30.509.300,00	10.116.000,00	(20.393.300,00)	33,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		30.509.300,00	10.116.000,00	(20.393.300,00)	33,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		57.489.070,00	22.446.000,00	(35.043.070,00)	39,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		57.489.070,00	22.446.000,00	(35.043.070,00)	39,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0002		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA		47.403.070,00	22.446.000,00	(24.957.070,00)	47,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI		47.403.070,00	22.446.000,00	(24.957.070,00)	47,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		47.403.070,00	22.446.000,00	(24.957.070,00)	47,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0013		FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF		10.086.000,00	0,00	(10.086.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI		10.086.000,00	0,00	(10.086.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		10.086.000,00	0,00	(10.086.000,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA		5.646.978.471,00	1.311.308.262,00	(4.335.670.209,00)	23,22	
				SURPLUS / (DEFISIT)		(5.646.978.471,00)	(1.311.308.262,00)	4.335.670.209,00	23,22	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(5.646.978.471,00)	(1.311.308.262,00)	4.335.670.209,00	23,22	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Betayau

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		5	BELANJA DAERAH	4.455.807.948,00	527.158.196,00	(3.928.649.752,00)	11,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.107.344.798,00	450.868.196,00	(3.656.476.602,00)	10,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.311.494.595,00	342.597.196,00	(2.968.897.399,00)	10,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.195.934.595,00	312.797.196,00	(2.883.137.399,00)	9,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.195.934.595,00	312.797.196,00	(2.883.137.399,00)	9,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.195.934.595,00	312.797.196,00	(2.883.137.399,00)	9,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	115.560.000,00	29.800.000,00	(85.760.000,00)	25,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	115.560.000,00	29.800.000,00	(85.760.000,00)	25,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.560.000,00	29.800.000,00	(85.760.000,00)	25,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	537.562.033,00	95.931.000,00	(441.631.033,00)	17,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.985.000,00	0,00	(9.985.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.985.000,00	0,00	(9.985.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.985.000,00	0,00	(9.985.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	40.126.480,00	0,00	(40.126.480,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.389.400,00	0,00	(7.389.400,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.389.400,00	0,00	(7.389.400,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	32.737.080,00	0,00	(32.737.080,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.737.080,00	0,00	(32.737.080,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	117.780.478,00	0,00	(117.780.478,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	117.780.478,00	0,00	(117.780.478,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.780.478,00	0,00	(117.780.478,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	28.771.975,00	3.600.000,00	(25.171.975,00)	12,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	28.771.975,00	3.600.000,00	(25.171.975,00)	12,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.771.975,00	3.600.000,00	(25.171.975,00)	12,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	29.266.100,00	9.520.000,00	(19.746.100,00)	32,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	29.266.100,00	9.520.000,00	(19.746.100,00)	32,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.266.100,00	9.520.000,00	(19.746.100,00)	32,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	291.632.000,00	82.811.000,00	(208.821.000,00)	28,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	291.632.000,00	82.811.000,00	(208.821.000,00)	28,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.632.000,00	82.811.000,00	(208.821.000,00)	28,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0011		DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0011	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	72.205.500,00	0,00	(72.205.500,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	30.895.500,00	0,00	(30.895.500,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	30.895.500,00	0,00	(30.895.500,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.895.500,00	0,00	(30.895.500,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07.0011		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	41.310.000,00	0,00	(41.310.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07.0011	5.1	BELANJA OPERASI	18.975.300,00	0,00	(18.975.300,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.975.300,00	0,00	(18.975.300,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	22.334.700,00	0,00	(22.334.700,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.334.700,00	0,00	(22.334.700,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	182.022.100,00	12.340.000,00	(169.682.100,00)	6,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.592.000,00	0,00	(2.592.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.592.000,00	0,00	(2.592.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.592.000,00	0,00	(2.592.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	71.978.400,00	7.540.000,00	(64.438.400,00)	10,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	71.978.400,00	7.540.000,00	(64.438.400,00)	10,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.978.400,00	7.540.000,00	(64.438.400,00)	10,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.504.500,00	0,00	(20.504.500,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	20.504.500,00	0,00	(20.504.500,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.504.500,00	0,00	(20.504.500,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	86.947.200,00	4.800.000,00	(82.147.200,00)	5,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	86.947.200,00	4.800.000,00	(82.147.200,00)	5,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.947.200,00	4.800.000,00	(82.147.200,00)	5,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.060.570,00	0,00	(4.060.570,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	4.060.570,00	0,00	(4.060.570,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	4.060.570,00	0,00	(4.060.570,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.060.570,00	0,00	(4.060.570,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	193.462.600,00	73.304.700,00	(120.157.900,00)	37,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	152.144.800,00	64.528.000,00	(87.616.800,00)	42,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	26.000.600,00	12.768.000,00	(13.232.600,00)	49,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.000.600,00	12.768.000,00	(13.232.600,00)	49,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.000.600,00	12.768.000,00	(13.232.600,00)	49,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	126.144.200,00	51.760.000,00	(74.384.200,00)	41,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	126.144.200,00	51.760.000,00	(74.384.200,00)	41,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.144.200,00	51.760.000,00	(74.384.200,00)	41,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	41.317.800,00	8.776.700,00	(32.541.100,00)	21,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02.0001		PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN	27.797.900,00	8.776.700,00	(19.021.200,00)	31,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	27.797.900,00	8.776.700,00	(19.021.200,00)	31,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.797.900,00	8.776.700,00	(19.021.200,00)	31,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	13.519.900,00	0,00	(13.519.900,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.519.900,00	0,00	(13.519.900,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.519.900,00	0,00	(13.519.900,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	131.335.950,00	1.955.000,00	(129.380.950,00)	1,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	41.268.350,00	1.955.000,00	(39.313.350,00)	4,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	26.155.050,00	1.955.000,00	(24.200.050,00)	7,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.155.050,00	1.955.000,00	(24.200.050,00)	7,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.155.050,00	1.955.000,00	(24.200.050,00)	7,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	15.113.300,00	0,00	(15.113.300,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	15.113.300,00	0,00	(15.113.300,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.113.300,00	0,00	(15.113.300,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.03		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	90.067.600,00	0,00	(90.067.600,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.03.0001		PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	90.067.600,00	0,00	(90.067.600,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	90.067.600,00	0,00	(90.067.600,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.067.600,00	0,00	(90.067.600,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.664.600,00	1.030.300,00	(22.634.300,00)	4,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.664.600,00	1.030.300,00	(22.634.300,00)	4,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	12.631.300,00	447.000,00	(12.184.300,00)	3,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.631.300,00	447.000,00	(12.184.300,00)	3,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.631.300,00	447.000,00	(12.184.300,00)	3,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.01.0002		HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT	11.033.300,00	583.300,00	(10.450.000,00)	5,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.033.300,00	583.300,00	(10.450.000,00)	5,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.033.300,00	583.300,00	(10.450.000,00)	5,28	
				JUMLAH BELANJA	4.455.807.948,00	527.158.196,00	(3.928.649.752,00)	11,83	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.455.807.948,00)	(527.158.196,00)	3.928.649.752,00	11,83	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.455.807.948,00)	(527.158.196,00)	3.928.649.752,00	11,83	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : KECAMATAN
 Organisasi : Kecamatan Muruk Rian

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		5	BELANJA DAERAH	4.498.350.870,00	484.332.183,00	(4.014.018.687,00)	10,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.141.361.370,00	437.668.883,00	(3.703.692.487,00)	10,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.250.000,00	0,00	(6.250.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3.125.000,00	0,00	(3.125.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.125.000,00	0,00	(3.125.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.125.000,00	0,00	(3.125.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.125.000,00	0,00	(3.125.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.125.000,00	0,00	(3.125.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.125.000,00	0,00	(3.125.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.343.649.270,00	319.700.683,00	(3.023.948.587,00)	9,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.264.629.270,00	300.920.683,00	(2.963.708.587,00)	9,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.264.629.270,00	300.920.683,00	(2.963.708.587,00)	9,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.264.629.270,00	300.920.683,00	(2.963.708.587,00)	9,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	79.020.000,00	18.780.000,00	(60.240.000,00)	23,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	79.020.000,00	18.780.000,00	(60.240.000,00)	23,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.020.000,00	18.780.000,00	(60.240.000,00)	23,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	15.304.000,00	0,00	(15.304.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	15.304.000,00	0,00	(15.304.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	15.304.000,00	0,00	(15.304.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.304.000,00	0,00	(15.304.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	550.003.100,00	54.056.000,00	(495.947.100,00)	9,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	19.743.000,00	0,00	(19.743.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	19.743.000,00	0,00	(19.743.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.743.000,00	0,00	(19.743.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	193.432.100,00	1.800.000,00	(191.632.100,00)	0,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	193.432.100,00	1.800.000,00	(191.632.100,00)	0,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.432.100,00	1.800.000,00	(191.632.100,00)	0,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	19.950.000,00	0,00	(19.950.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	19.950.000,00	0,00	(19.950.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.950.000,00	0,00	(19.950.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	316.878.000,00	52.256.000,00	(264.622.000,00)	16,49	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	316.878.000,00	52.256.000,00	(264.622.000,00)	16,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.878.000,00	52.256.000,00	(264.622.000,00)	16,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	195.165.000,00	56.789.900,00	(138.375.100,00)	29,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	8.400.000,00	1.200.000,00	(7.200.000,00)	14,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.400.000,00	1.200.000,00	(7.200.000,00)	14,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	1.200.000,00	(7.200.000,00)	14,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	70.665.000,00	31.395.500,00	(39.269.500,00)	44,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	70.665.000,00	31.395.500,00	(39.269.500,00)	44,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.665.000,00	31.395.500,00	(39.269.500,00)	44,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	116.100.000,00	24.194.400,00	(91.905.600,00)	20,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	116.100.000,00	24.194.400,00	(91.905.600,00)	20,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.100.000,00	24.194.400,00	(91.905.600,00)	20,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	30.990.000,00	7.122.300,00	(23.867.700,00)	22,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	21.000.000,00	7.122.300,00	(13.877.700,00)	33,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	7.122.300,00	(13.877.700,00)	33,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	7.122.300,00	(13.877.700,00)	33,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	9.990.000,00	0,00	(9.990.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.990.000,00	0,00	(9.990.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.990.000,00	0,00	(9.990.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	85.188.000,00	11.250.000,00	(73.938.000,00)	13,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	40.188.000,00	0,00	(40.188.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	40.188.000,00	0,00	(40.188.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	40.188.000,00	0,00	(40.188.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.188.000,00	0,00	(40.188.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	45.000.000,00	11.250.000,00	(33.750.000,00)	25,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.04.0003		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	45.000.000,00	11.250.000,00	(33.750.000,00)	25,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	11.250.000,00	(33.750.000,00)	25,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	11.250.000,00	(33.750.000,00)	25,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	182.484.500,00	29.263.300,00	(153.221.200,00)	16,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	182.484.500,00	29.263.300,00	(153.221.200,00)	16,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	168.984.500,00	29.263.300,00	(139.721.200,00)	17,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	168.984.500,00	29.263.300,00	(139.721.200,00)	17,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.984.500,00	29.263.300,00	(139.721.200,00)	17,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.667.000,00	0,00	(10.667.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.667.000,00	0,00	(10.667.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	10.667.000,00	0,00	(10.667.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.667.000,00	0,00	(10.667.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.667.000,00	0,00	(10.667.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	66.050.000,00	6.150.000,00	(59.900.000,00)	9,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	66.050.000,00	6.150.000,00	(59.900.000,00)	9,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0002		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	9.900.000,00	0,00	(9.900.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.900.000,00	0,00	(9.900.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	0,00	(9.900.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0007		FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	56.150.000,00	6.150.000,00	(50.000.000,00)	10,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	56.150.000,00	6.150.000,00	(50.000.000,00)	10,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.150.000,00	6.150.000,00	(50.000.000,00)	10,95	
				JUMLAH BELANJA	4.498.350.870,00	484.332.183,00	(4.014.018.687,00)	10,76	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.498.350.870,00)	(484.332.183,00)	4.014.018.687,00	10,76	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.498.350.870,00)	(484.332.183,00)	4.014.018.687,00	10,76	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.031.118.001,00	602.352.818,00	(4.428.765.183,00)	11,97	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.031.118.001,00	602.352.818,00	(4.428.765.183,00)	11,97	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	171.505.500,00	110.745.600,00	(60.759.900,00)	64,57	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	51.411.500,00	30.500.000,00	(20.911.500,00)	59,32	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	51.411.500,00	30.500.000,00	(20.911.500,00)	59,32	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.411.500,00	30.500.000,00	(20.911.500,00)	59,32	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	120.094.000,00	80.245.600,00	(39.848.400,00)	66,81	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	120.094.000,00	80.245.600,00	(39.848.400,00)	66,81	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.094.000,00	80.245.600,00	(39.848.400,00)	66,81	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.841.187.429,00	392.958.019,00	(3.448.229.410,00)	10,23	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.680.027.429,00	317.478.019,00	(3.362.549.410,00)	8,62	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.680.027.429,00	317.478.019,00	(3.362.549.410,00)	8,62	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.680.027.429,00	317.478.019,00	(3.362.549.410,00)	8,62	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	161.160.000,00	75.480.000,00	(85.680.000,00)	46,83	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	161.160.000,00	75.480.000,00	(85.680.000,00)	46,83	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.160.000,00	75.480.000,00	(85.680.000,00)	46,83	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	71.980.000,00	0,00	(71.980.000,00)	0,00	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	71.980.000,00	0,00	(71.980.000,00)	0,00	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	71.980.000,00	0,00	(71.980.000,00)	0,00	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.980.000,00	0,00	(71.980.000,00)	0,00	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	711.756.672,00	64.109.500,00	(647.647.172,00)	9,00	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	11.867.600,00	0,00	(11.867.600,00)	0,00	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.867.600,00	0,00	(11.867.600,00)	0,00	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.867.600,00	0,00	(11.867.600,00)	0,00	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	177.930.000,00	0,00	(177.930.000,00)	0,00	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.808.000,00	0,00	(8.808.000,00)	0,00	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.808.000,00	0,00	(8.808.000,00)	0,00	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	169.122.000,00	0,00	(169.122.000,00)	0,00	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.122.000,00	0,00	(169.122.000,00)	0,00	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	44.998.972,00	0,00	(44.998.972,00)	0,00	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	44.998.972,00	0,00	(44.998.972,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.998.972,00	0,00	(44.998.972,00)	0,00	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	160.971.500,00	4.006.700,00	(156.964.800,00)	2,48	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	160.971.500,00	4.006.700,00	(156.964.800,00)	2,48	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.971.500,00	4.006.700,00	(156.964.800,00)	2,48	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	18.919.600,00	0,00	(18.919.600,00)	0,00	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	18.919.600,00	0,00	(18.919.600,00)	0,00	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.919.600,00	0,00	(18.919.600,00)	0,00	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	297.069.000,00	60.102.800,00	(236.966.200,00)	20,23	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	297.069.000,00	60.102.800,00	(236.966.200,00)	20,23	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.069.000,00	60.102.800,00	(236.966.200,00)	20,23	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	170.630.000,00	29.259.299,00	(141.370.701,00)	17,14	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	19.950.000,00	9.796.600,00	(10.153.400,00)	49,10	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.950.000,00	9.796.600,00	(10.153.400,00)	49,10	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.950.000,00	9.796.600,00	(10.153.400,00)	49,10	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	22.220.000,00	0,00	(22.220.000,00)	0,00	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	22.220.000,00	0,00	(22.220.000,00)	0,00	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.220.000,00	0,00	(22.220.000,00)	0,00	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	116.460.000,00	19.462.699,00	(96.997.301,00)	16,71	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	116.460.000,00	19.462.699,00	(96.997.301,00)	16,71	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.460.000,00	19.462.699,00	(96.997.301,00)	16,71	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	64.058.400,00	5.280.400,00	(58.778.000,00)	8,24	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	9.100.000,00	5.280.400,00	(3.819.600,00)	58,02	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.100.000,00	5.280.400,00	(3.819.600,00)	58,02	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	5.280.400,00	(3.819.600,00)	58,02	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	54.958.400,00	0,00	(54.958.400,00)	0,00	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	54.958.400,00	0,00	(54.958.400,00)	0,00	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.958.400,00	0,00	(54.958.400,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	5.031.118.001,00	602.352.818,00	(4.428.765.183,00)	11,97	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.031.118.001,00)	(602.352.818,00)	4.428.765.183,00	11,97	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.031.118.001,00)	(602.352.818,00)	4.428.765.183,00	11,97	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	6.025.754.466,00	872.381.331,00	(5.153.373.135,00)	14,47	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	531.724.660,00	230.632.200,00	(301.092.460,00)	43,37	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.02.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	531.724.660,00	230.632.200,00	(301.092.460,00)	43,37	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	265.572.400,00	200.000.000,00	(65.572.400,00)	75,30	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	265.572.400,00	200.000.000,00	(65.572.400,00)	75,30	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.572.400,00	200.000.000,00	(65.572.400,00)	75,30	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	52.100.160,00	9.355.000,00	(42.745.160,00)	17,95	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	52.100.160,00	9.355.000,00	(42.745.160,00)	17,95	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.100.160,00	9.355.000,00	(42.745.160,00)	17,95	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008		PEMBENTUKAN PASKIBRAKA	214.052.100,00	21.277.200,00	(192.774.900,00)	9,94	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	214.052.100,00	21.277.200,00	(192.774.900,00)	9,94	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.052.100,00	21.277.200,00	(192.774.900,00)	9,94	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	4.419.812.506,00	309.374.900,00	(4.110.437.606,00)	6,99	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.03.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	4.419.812.506,00	309.374.900,00	(4.110.437.606,00)	6,99	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	3.165.714.706,00	250.863.700,00	(2.914.851.006,00)	7,92	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.165.714.706,00	250.863.700,00	(2.914.851.006,00)	7,92	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	523.746.400,00	59.510.800,00	(464.235.600,00)	11,36	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	2.641.968.306,00	191.352.900,00	(2.450.615.406,00)	7,24	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	121.185.300,00	20.928.400,00	(100.256.900,00)	17,26	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	121.185.300,00	20.928.400,00	(100.256.900,00)	17,26	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.185.300,00	20.928.400,00	(100.256.900,00)	17,26	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0006		PELAKSANAAN TUGAS PASKIBRAKA	1.132.912.500,00	37.582.800,00	(1.095.329.700,00)	3,31	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.132.912.500,00	37.582.800,00	(1.095.329.700,00)	3,31	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.132.912.500,00	37.582.800,00	(1.095.329.700,00)	3,31	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	103.922.000,00	31.072.800,00	(72.849.200,00)	29,90	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.04.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	103.922.000,00	31.072.800,00	(72.849.200,00)	29,90	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	60.697.000,00	16.528.400,00	(44.168.600,00)	27,23	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	60.697.000,00	16.528.400,00	(44.168.600,00)	27,23	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.686.000,00	16.528.400,00	(44.157.600,00)	27,23	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	11.000,00	0,00	(11.000,00)	0,00	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	43.225.000,00	14.544.400,00	(28.680.600,00)	33,64	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	43.225.000,00	14.544.400,00	(28.680.600,00)	33,64	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.225.000,00	14.544.400,00	(28.680.600,00)	33,64	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	191.916.300,00	65.654.230,00	(126.262.070,00)	34,20	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.05.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	191.916.300,00	65.654.230,00	(126.262.070,00)	34,20	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	155.358.300,00	55.783.950,00	(99.574.350,00)	35,90	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	155.358.300,00	55.783.950,00	(99.574.350,00)	35,90	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.358.300,00	55.783.950,00	(29.574.350,00)	65,35	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	0,00	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	36.558.000,00	9.870.280,00	(26.687.720,00)	26,99	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	36.558.000,00	9.870.280,00	(26.687.720,00)	26,99	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.558.000,00	9.870.280,00	(26.687.720,00)	26,99	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	778.379.000,00	235.647.201,00	(542.731.799,00)	30,27	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.06.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	778.379.000,00	235.647.201,00	(542.731.799,00)	30,27	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBUJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	355.886.000,00	80.940.000,00	(274.946.000,00)	22,74	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	355.886.000,00	80.940.000,00	(274.946.000,00)	22,74	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	355.886.000,00	80.940.000,00	(274.946.000,00)	22,74	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006		PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	422.493.000,00	154.707.201,00	(267.785.799,00)	36,61	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	422.493.000,00	154.707.201,00	(267.785.799,00)	36,61	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	422.493.000,00	154.707.201,00	(267.785.799,00)	36,61	
JUMLAH BELANJA					6.025.754.466,00	872.381.331,00	(5.153.373.135,00)	14,47	
SURPLUS / (DEFISIT)					(6.025.754.466,00)	(872.381.331,00)	5.153.373.135,00	14,47	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)					(6.025.754.466,00)	(872.381.331,00)	5.153.373.135,00	14,47	

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



LAMPIRAN I . 4

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN
SUB KEGIATAN



PEMERINTAHAN KAB. TANA TIDUNG

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2025



Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	427.318.350.777,61	97.497.991.856,50	383.816.714.016,39	211.659.187.938,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	200.606.669.672,61	37.442.781.689,00	61.756.323.257,39	27.847.087.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	200.606.669.672,61	37.442.781.689,00	61.756.323.257,39	27.847.087.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	132.807.202.315,01	18.845.572.779,00	3.863.881.535,00	1.993.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	437.197.549,00	78.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	402.437.549,00	78.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	123.000.720.000,00	17.435.083.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	121.500.000.000,00	16.536.363.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.500.720.000,00	898.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.198.430.000,00	232.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	153.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	730.120.000,00	188.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	315.230.000,00	43.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	215.058.000,00	53.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	215.058.000,00	53.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.833.678.831,01	261.462.900,00	372.211.535,00	121.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.189.264,35	26.632.000,00	372.211.535,00	121.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	815.023.566,66	136.328.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	210.412.000,00	22.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	730.054.000,00	75.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	3.491.670.000,00	1.872.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	3.491.670.000,00	1.872.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.566.627.935,00	670.520.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	351.399.000,00	67.629.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.195.228.935,00	601.211.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	555.490.000,00	114.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000,00	85.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.490.000,00	29.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	67.329.546.457,60	18.567.163.910,00	57.892.441.722,39	25.853.637.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	26.167.223.000,00	3.471.907.121,00	15.219.926.702,39	3.916.444.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0,00	0,00	445.128.125,00	245.128.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	0,00	3.741.562.490,00	1.589.481.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	76.600.000,00	15.400.000,00	1.300.000.000,00	619.217.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	0,00	0,00	238.000.000,00	17.506.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	0,00	354.969.000,00	253.384.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	119.358.000,00	38.873.000,00	963.880.000,00	96.623.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4.074.836.000,00	120.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	58.050.000,00	57.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.114.586.000,00	686.854.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	532.190.000,00	406.658.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	3.386.762.000,00	(8.000.000,00)	860.234.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	982.737.900,00	364.882.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	62.304.600,00	19.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	0,00	0,00	300.000.000,00	196.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	583.416.500,00	337.683.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	58.130.000,00	42.283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	323.762.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	150.400.000,00	100.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	93.000.000,00	58.290.000,00	4.459.572.587,39	99.033.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.251.000.000,00	921.445.000,00	63.000.000,00	34.482.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	841.810.000,00	169.450.000,00	40.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	380.000.000,00	376.466.900,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	10.528.060.000,00	(261.588.907,00)	1.483.990.000,00	(28.778.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	50.220.000,00	10.000.000,00	934.190.500,00	785.864.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	31.337.762.800,00	11.306.623.272,00	41.372.652.960,00	21.389.338.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	509.471.900,00	303.231.500,00	29.877.287.700,00	12.921.900.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.499.085.000,00	1.175.405.100,00	5.559.968.760,00	3.510.562.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	44.120.000,00	0,00	2.904.523.500,00	2.822.621.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	280.580.000,00	97.941.000,00	561.584.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	8.969.386.000,00	4.513.070.309,00	776.414.000,00	1.552.863.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	5.825.968.900,00	576.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.300.114.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.580.130.000,00	935.938.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2.653.276.000,00	1.561.806.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.952.175.000,00	15.000.000,00	432.875.000,00	(15.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	226.000.000,00	84.084.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	122.550.000,00	25.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	187.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	298.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1.189.466.000,00	254.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	0,00	260.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.700.000.000,00	1.564.702.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	0,00	0,00	1.000.000.000,00	498.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8.023.938.697,60	2.756.063.308,00	1.028.796.360,00	498.083.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	32.190.000,00	5.720.000,00	551.328.060,00	259.989.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	62.761.800,00	0,00	35.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	378.938.400,00	372.427.200,00	96.054.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.198.100.000,00	1.014.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.602.433.200,00	346.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	187.907.000,00	13.418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.046.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	293.338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	341.790.000,00	108.981.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.700.000,00	44.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	316.880.000,00	53.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0029	Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	133.608.000,00	14.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0031	Penyediaan infrastruktur TIK	0,00	0,00	26.093.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	438.260.000,00	278.330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	317.909.600,00	226.011.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	650.085.000,00	25.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	17.500.000,00	0,00	320.300.000,00	238.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	334.799.997,60	17.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	570.105.700,00	233.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.800.621.960,00	1.032.570.209,00	271.065.700,00	49.771.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	150.000.000,00	287.888.800,00	50.000.000,00	49.771.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	84.284.000,00	5.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	256.836.000,00	246.107.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	307.641.000,00	0,00	37.069.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	29.806.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	35.908.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	40.427.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	405.690.300,00	227.046.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	7.900.000,00	6.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	40.756.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	103.136.000,00	99.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	1.037.960,00	0,00	86.987.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	269.724.000,00	129.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	0,00	74.838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	7.475.000,00	0,00	22.170.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	335.607.000,00	30.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	162.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	88.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	74.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	172.832.000,00	30.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	172.832.000,00	30.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	45.613.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	45.613.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja					
				Operasi		Modal		Tak Terduga	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	20.613.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	88.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	88.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.06.2.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	88.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	116.804.138.195,00	19.978.677.359,00	22.753.498.855,00	12.161.654.340,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	90.981.725.216,00	10.831.701.283,00	19.545.343.813,00	10.759.131.469,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	72.652.780.614,00	7.108.326.185,00	1.267.298.225,00	1.071.051.365,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	702.199.590,00	215.663.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	519.354.700,00	65.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	182.844.890,00	150.643.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	66.945.436.606,00	6.115.541.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	66.114.876.606,00	5.857.501.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	830.560.000,00	258.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	56.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	53.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.450.000,00	20.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30.450.000,00	20.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.753.092.918,00	267.058.754,00	262.823.225,00	184.763.365,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	262.823.225,00	184.763.365,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	335.186.918,00	46.947.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.682.000,00	2.887.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.385.224.000,00	217.223.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.800.000,00	0,00	932.475.000,00	851.240.000,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	531.401.000,00	513.800.000,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.800.000,00	0,00	401.074.000,00	337.440.000,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.425.541.500,00	195.715.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.479.500,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	515.610.000,00	71.182.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.882.452.000,00	120.933.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	710.340.000,00	293.786.860,00	72.000.000,00	35.048.000,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	550.340.000,00	135.515.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	160.000.000,00	158.271.000,00	72.000.000,00	35.048.000,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	14.883.565.867,00	3.069.562.022,00	18.278.045.588,00	9.688.080.104,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.497.491.767,00	1.749.602.899,00	18.161.785.288,00	9.677.679.404,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	0,00	0,00	3.223.556.000,00	1.049.681.888,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	54.265.000,00	41.115.000,00	10.267.975.300,00	6.203.872.556,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	24.100.000,00	22.185.000,00	3.125.173.443,00	1.288.391.800,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	951.200.000,00	899.751.000,00	614.168.400,00	362.631.000,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50.742.000,00	41.760.000,00	882.522.045,00	773.102.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	445.064.000,00	9.300.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.840.183.767,00	684.271.899,00	18.390.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	131.937.000,00	51.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.920.889.200,00	1.139.510.330,00	36.255.100,00	10.400.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	62.285.500,00	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	153.656.000,00	29.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	96.827.200,00	36.362.618,00	10.450.000,00	10.400.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	20.392.000,00	0,00	7.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	80.676.700,00	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	7.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	15.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	7.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	27.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	25.376.000,00	6.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	72.634.000,00	52.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.070.493.200,00	117.233.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	29.846.000,00	6.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	636.311.500,00	515.503.000,00	18.390.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	92.436.800,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	415.547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	45.242.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	134.115.400,00	71.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.017.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	36.093.000,00	18.783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	55.746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	620.807.200,00	256.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	186.073.000,00	8.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	76.586.900,00	63.001.838,00	80.005.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	76.586.900,00	63.001.838,00	80.005.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	388.598.000,00	117.446.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	106.754.000,00	37.487.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	281.844.000,00	79.959.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.734.966.992,00	349.068.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2.317.860.800,00	328.171.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.876.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2.279.028.800,00	318.711.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	27.956.000,00	7.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	417.106.192,00	20.897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	417.106.192,00	20.897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	403.401.676,00	59.640.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	25.768.600,00	8.998.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	25.768.600,00	8.998.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	112.457.640,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	112.457.640,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100.141.000,00	37.835.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100.141.000,00	37.835.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	165.034.436,00	2.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	165.034.436,00	2.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	307.010.067,00	245.103.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	193.105.667,00	170.614.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	193.105.667,00	170.614.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	72.955.400,00	34.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	72.955.400,00	34.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.949.000,00	40.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	40.949.000,00	40.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001		Puskesmas Tideng Pale	1.234.078.623,00	661.489.696,00	236.331.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	573.020.223,00	661.489.696,00	236.331.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	573.020.223,00	661.489.696,00	236.331.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	573.020.223,00	661.489.696,00	236.331.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	648.828.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	648.828.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	31.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	58.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	32.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	177.253.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005		Puskesmas Muruk Rian	656.829.142,00	522.537.453,00	13.771.200,00	13.431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	71.116.800,00	522.537.453,00	13.771.200,00	13.431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	71.116.800,00	522.537.453,00	13.771.200,00	13.431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	71.116.800,00	522.537.453,00	13.771.200,00	13.431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	570.472.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	570.472.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	65.374.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	149.260.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.304.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	18.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84.206.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	176.625.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	15.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0005	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	15.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006		Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim	20.948.697.374,00	5.609.204.102,00	2.711.233.038,00	1.288.018.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.315.000.000,00	3.928.012.377,00	385.000.000,00	217.254.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	1.629.383.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	1.629.383.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	11.315.000.000,00	2.298.629.013,00	385.000.000,00	217.254.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	11.315.000.000,00	2.298.629.013,00	385.000.000,00	217.254.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	9.464.981.374,00	1.668.537.725,00	2.326.233.038,00	1.070.764.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	220.965.000,00	18.200.000,00	2.121.908.638,00	866.452.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	218.050.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.915.000,00	0,00	2.121.908.638,00	866.452.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.244.016.374,00	1.650.337.725,00	204.324.400,00	204.312.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	9.244.016.374,00	1.650.337.725,00	204.324.400,00	204.312.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	168.716.000,00	12.654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	168.716.000,00	12.654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0006	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	168.716.000,00	12.654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0007		Rumah Sakit D Pratama Tanjung Keramat	132.000.000,00	71.580.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0007	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	71.580.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0007	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	0,00	71.580.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0007	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	71.580.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0007	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	132.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0007	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	132.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	132.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	63.733.304.778,00	29.317.011.808,03	279.371.354.845,00	167.960.508.721,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	63.733.304.778,00	29.317.011.808,03	279.371.354.845,00	167.960.508.721,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.520.779.926,00	2.019.254.864,00	287.865.354,00	30.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.329.348.507,00	1.137.070.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.372.348.007,00	735.030.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	939.000.000,00	384.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18.000.500,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.146.239.891,00	448.493.350,00	287.865.354,00	30.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.912.321,00	61.249.950,00	287.865.354,00	30.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.609.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	440.479.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	89.885.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	178.050.000,00	93.137.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.330.303.000,00	294.106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	410.960.528,00	142.481.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	400.952.528,00	142.481.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	634.231.000,00	291.209.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	602.341.000,00	278.109.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.890.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5.209.188.800,00	1.883.190.555,00	13.297.944.820,00	7.146.642.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.975.210.400,00	1.771.259.855,00	13.286.015.220,00	7.146.642.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	716.004.900,00	86.765.000,00	255.519.300,00	96.320.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.2.01.0113	Pembangunan Kanal Banjir	3.259.205.500,00	1.684.494.855,00	13.030.495.920,00	7.050.321.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.233.978.400,00	111.930.700,00	11.929.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	338.062.400,00	35.690.000,00	11.929.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	895.916.000,00	76.240.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.347.492.600,00	1.392.349.600,00	5.210.833.000,00	2.062.297.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.347.492.600,00	1.392.349.600,00	5.210.833.000,00	2.062.297.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	335.320.600,00	335.320.600,00	5.210.833.000,00	2.062.297.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.894.380.000,00	1.057.029.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	117.792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.792.975.650,00	1.268.453.799,97	333.402.600,00	273.435.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.792.975.650,00	1.268.453.799,97	333.402.600,00	273.435.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	302.079.600,00	38.400.000,00	277.747.000,00	273.435.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	134.341.650,00	69.108.540,00	55.655.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.356.554.400,00	1.160.945.259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	7.710.771.067,00	4.432.231.850,30	1.381.377.000,00	1.132.364.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.710.771.067,00	4.432.231.850,30	1.381.377.000,00	1.132.364.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	7.710.771.067,00	4.432.231.850,30	1.381.377.000,00	1.132.364.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	20.475.530.615,00	12.943.272.048,56	154.705.809.973,00	88.609.326.143,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	20.475.530.615,00	12.943.272.048,56	154.705.809.973,00	88.609.326.143,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	351.006.000,00	32.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	445.003.100,00	292.161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	18.058.169.490,00	12.232.943.048,56	154.455.409.973,00	88.530.011.143,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	812.510.025,00	174.488.000,00	250.400.000,00	79.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	808.842.000,00	210.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	694.998.000,00	332.996.000,00	6.305.904.000,00	4.153.722.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	694.998.000,00	332.996.000,00	6.305.904.000,00	4.153.722.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	694.998.000,00	332.996.000,00	6.305.904.000,00	4.153.722.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	9.805.152.520,00	4.320.152.913,60	96.039.293.074,00	63.733.225.793,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	9.805.152.520,00	4.320.152.913,60	96.039.293.074,00	63.733.225.793,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	2.672.200.000,00	2.131.833.819,69	39.120.620.558,00	29.616.234.633,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	983.533.000,00	390.461.574,97	46.084.578.016,00	31.466.718.251,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	1.491.071.000,00	624.870.552,94	8.490.437.156,00	2.481.941.407,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	503.072.220,00	489.982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.155.276.300,00	683.004.966,00	2.343.657.344,00	168.331.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.176.415.600,00	725.110.176,60	1.808.925.024,00	819.474.924,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.084.055.700,00	296.260.176,60	1.482.011.824,00	689.860.424,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	891.659.500,00	107.560.176,60	1.482.011.824,00	689.860.424,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	192.396.200,00	188.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	858.700,00	0,00	230.409.200,00	35.025.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	0,00	0,00	99.482.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	858.700,00	0,00	130.926.900,00	35.025.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.091.501.200,00	428.850.000,00	96.504.000,00	94.589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.091.501.200,00	428.850.000,00	96.504.000,00	94.589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10.887.461.812,00	6.559.698.491,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	10.887.461.812,00	6.559.698.491,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	243.817.500,00	241.171.819,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	243.817.500,00	241.171.819,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	243.817.500,00	241.171.819,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6.341.754.898,00	3.204.992.852,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.268.241.000,00	584.332.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1.268.241.000,00	584.332.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5.073.513.898,00	2.620.660.085,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.418.050.000,00	755.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	2.655.463.898,00	1.865.360.085,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	4.301.889.414,00	3.113.533.820,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	4.301.889.414,00	3.113.533.820,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	4.301.889.414,00	3.113.533.820,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	26.942.731.106,00	3.380.115.276,00	19.856.084.509,00	3.689.937.311,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000		Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	6.740.788.210,00	799.777.811,00	1.544.101.536,00	234.769.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.235.631.230,00	664.184.111,00	1.297.003.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.904.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.743.612.435,00	453.159.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.591.302.435,00	339.849.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	152.310.000,00	113.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	374.868.000,00	40.363.000,00	146.503.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.854.000,00	9.425.000,00	146.503.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	277.890.000,00	30.938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	1.150.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	1.150.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.877.809.200,00	144.793.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.790.000,00	18.299.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.818.019.200,00	126.493.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.624.600,00	25.868.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	188.695.000,00	25.868.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.929.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	505.156.980,00	135.593.700,00	247.097.900,00	234.769.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	473.220.280,00	135.064.500,00	247.097.900,00	234.769.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.742.500,00	9.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	44.917.500,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	51.242.280,00	2.694.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	35.644.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	310.674.000,00	120.315.300,00	247.097.900,00	234.769.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	9.734.000,00	529.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	9.734.000,00	529.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	22.202.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.04.1.05.0.00.02.0000	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	22.202.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.299.301.790,00	1.193.272.416,00	18.104.467.273,00	3.455.167.871,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.146.764.590,00	680.171.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.923.000,00	4.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.998.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.296.325.890,00	564.913.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.112.655.890,00	474.293.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	183.670.000,00	90.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.588.000,00	11.236.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.588.000,00	11.236.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	276.558.300,00	20.546.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.346.300,00	9.977.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.276.000,00	6.024.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213.936.000,00	4.544.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	429.883.200,00	50.817.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.976.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.055.200,00	10.720.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	393.852.000,00	38.607.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.486.200,00	27.782.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.007.500,00	2.967.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.918.700,00	21.765.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.560.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.152.537.200,00	513.100.805,00	18.104.467.273,00	3.455.167.871,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	72.413.500,00	33.636.200,00	10.040.400,00	10.040.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	72.413.500,00	33.636.200,00	10.040.400,00	10.040.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	135.771.700,00	48.496.700,00	780.281.873,00	777.775.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	0,00	0,00	707.113.352,00	707.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	37.035.800,00	10.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	48.714.200,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	22.577.700,00	14.746.500,00	73.168.521,00	70.705.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	27.444.000,00	14.300.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	42.885.000,00	4.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	13.430.000,00	2.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	3.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	26.175.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	901.467.000,00	426.862.905,00	17.314.145.000,00	2.667.352.711,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	884.027.000,00	426.862.905,00	17.314.145.000,00	2.667.352.711,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	10.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		Satuan Polisi Pamong Praja	9.040.645.105,00	784.712.231,00	38.393.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.824.630.305,00	757.361.431,00	38.393.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.786.338.874,00	683.440.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.595.068.874,00	588.810.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	191.270.000,00	94.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	159.692.000,00	4.262.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	132.634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27.058.000,00	4.262.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	620.432.656,00	4.618.400,00	38.393.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	38.393.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	241.312.856,00	786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.399.800,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	359.720.000,00	2.922.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.033.100.400,00	63.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.210.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	980.390.400,00	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.334.375,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	185.494.375,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	26.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	216.014.800,00	27.350.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	164.996.000,00	22.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	32.208.000,00	1.101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Keterlibatan Umum	4.034.000,00	3.544.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	63.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Keterlibatan Umum	52.430.000,00	18.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	45.650.800,00	4.384.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.624.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	20.536.000,00	4.384.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	19.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	5.368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	5.368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.861.996.001,00	602.352.818,00	169.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.861.996.001,00	602.352.818,00	169.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

[illegible]

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	339.987.900,00	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	339.987.900,00	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	339.986.900,00	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	223.956.100,00	14.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	223.956.100,00	14.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	223.956.100,00	14.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	244.193.000,00	18.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	244.193.000,00	18.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	244.193.000,00	18.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	175.566.000,00	3.987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	175.566.000,00	3.987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.13.01.0000	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	175.566.000,00	3.987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	75.613.798.396,00	15.732.864.961,00	40.348.455.166,00	17.811.935.500,00	0,00	0,00	360.000.000,00	0,00
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.110.106.275,00	537.520.027,00	553.328.300,00	24.586.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	5.110.106.275,00	537.520.027,00	553.328.300,00	24.586.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.345.930.333,00	454.707.845,00	553.328.300,00	24.586.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.702.592.739,00	296.065.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.577.492.739,00	287.265.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	125.100.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.028.000,00	16.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29.028.000,00	16.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	330.186.294,00	98.529.600,00	29.578.300,00	24.586.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	29.578.300,00	24.586.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.422.894,00	18.055.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	268.763.000,00	80.474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	523.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	523.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.112.000,00	21.696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.996.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.116.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.563.300,00	22.144.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.393.300,00	20.074.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.170.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	204.394.000,00	13.878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	204.394.000,00	13.878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	204.394.000,00	13.878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	66.465.400,00	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	60.165.400,00	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	60.165.400,00	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	488.316.542,00	67.839.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	38.848.000,00	15.126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	38.848.000,00	15.126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	449.468.542,00	52.713.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.476.000,00	4.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.528.291,00	40.275.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	384.464.251,00	7.985.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	590.660.000,00	93.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	590.660.000,00	93.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	162.640.000,00	38.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	24.338.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	24.338.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	115.652.000,00	28.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	115.652.000,00	28.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.650.000,00	4.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	22.650.000,00	4.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	238.020.000,00	54.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	77.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	77.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	114.488.000,00	36.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	114.488.000,00	36.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.370.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	46.370.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	530.853.200,00	221.156.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000		Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	530.853.200,00	221.156.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	472.418.900,00	213.230.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	175.354.200,00	43.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	161.578.000,00	43.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	13.776.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	188.790.000,00	141.993.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	188.790.000,00	141.993.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	108.274.700,00	27.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	108.274.700,00	27.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	15.670.500,00	7.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	15.670.500,00	7.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	15.670.500,00	7.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	42.763.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	42.763.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	42.763.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.757.035.000,00	2.092.617.819,00	263.572.100,00	20.789.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.757.035.000,00	2.092.617.819,00	263.572.100,00	20.789.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1.726.829.000,00	1.485.244.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.726.829.000,00	1.485.244.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.706.829.000,00	1.485.244.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	33.710.000,00	16.070.000,00	6.180.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.710.000,00	16.070.000,00	6.180.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	33.710.000,00	16.070.000,00	6.180.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	996.496.000,00	591.303.500,00	257.391.900,00	20.789.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	996.496.000,00	591.303.500,00	257.391.900,00	20.789.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	996.496.000,00	591.303.500,00	257.391.900,00	20.789.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	11.408.998.828,00	1.808.276.874,00	329.597.600,00	19.167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup	11.408.998.828,00	1.808.276.874,00	329.597.600,00	19.167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.795.161.077,34	721.582.048,00	29.597.600,00	19.167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.262.000,00	3.346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.106.000,00	3.346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.901.580.117,34	530.226.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.712.530.117,34	449.596.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	189.050.000,00	80.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130.296.000,00	20.303.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	130.296.000,00	20.303.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	588.517.960,00	122.156.600,00	29.597.600,00	19.167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.265.500,00	8.228.000,00	29.597.600,00	19.167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	201.971.660,00	44.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.946.800,00	6.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	338.334.000,00	62.533.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.115.000,00	4.616.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.115.000,00	4.116.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.390.000,00	40.933.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87.560.000,00	33.423.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.830.000,00	7.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	514.159.600,00	56.112.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	514.159.600,00	56.112.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	514.159.600,00	56.112.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	260.823.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	260.823.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	260.823.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	487.940.720,00	152.816.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	487.940.720,00	152.816.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	487.940.720,00	152.816.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	72.782.130,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	72.782.130,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	72.782.130,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	28.045.600,66	12.938.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.045.600,66	12.938.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	28.045.600,66	12.938.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.250.086.700,00	796.937.810,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	5.250.086.700,00	796.937.810,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	523.375.400,00	240.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	593.720.200,00	23.900.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	4.132.991.100,00	532.532.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.194.220.725,00	891.209.511,00	8.049.200,00	7.826.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.194.220.725,00	891.209.511,00	8.049.200,00	7.826.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.483.618.225,00	709.991.411,00	8.049.200,00	7.826.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.830.030,00	46.300.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.255.500,00	18.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	800.200,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.068.600,00	25.119.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.705.730,00	1.685.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.860.269.551,00	395.595.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.727.549.551,00	336.915.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	132.720.000,00	58.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83.110.000,00	15.460.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	42.170.000,00	15.460.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	905.967.560,00	129.288.601,00	8.049.200,00	7.826.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	5.959.200,00	5.816.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	474.808.560,00	58.860.700,00	2.090.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.380.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.640.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	368.139.000,00	41.627.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	476.161.084,00	85.770.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	248.401.084,00	76.092.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	224.760.000,00	9.677.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.280.000,00	37.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.780.000,00	29.057.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.500.000,00	8.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	186.581.000,00	78.082.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	70.978.000,00	35.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	70.978.000,00	35.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	115.603.000,00	43.030.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	115.603.000,00	43.030.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	211.658.400,00	43.248.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	31.830.000,00	7.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	31.830.000,00	7.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	179.828.400,00	35.668.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	175.418.400,00	35.668.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	4.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	240.123.100,00	50.928.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	47.029.100,00	13.393.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	47.029.100,00	13.393.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	193.094.000,00	37.534.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	147.274.000,00	12.348.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	45.820.000,00	25.185.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	72.240.000,00	8.959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	72.240.000,00	8.959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	72.240.000,00	8.959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.221.280.000,00	663.691.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000.000,00	0,00
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.221.280.000,00	663.691.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000.000,00	0,00
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	917.795.200,00	434.332.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	917.795.200,00	434.332.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	373.316.200,00	189.029.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	71.942.000,00	8.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	245.179.000,00	118.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	61.156.000,00	39.531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	163.271.000,00	79.284.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.303.484.800,00	229.359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000.000,00	0,00
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.303.484.800,00	229.359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000.000,00	0,00
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	287.272.800,00	126.449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000.000,00	0,00
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	129.812.000,00	2.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	1.06.2.08.2.13.01.0000	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	886.400.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.049.452.200,00	350.371.590,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	1.049.452.200,00	350.371.590,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	206.767.100,00	85.066.020,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	206.767.100,00	85.066.020,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	135.465.100,00	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	71.302.000,00	13.066.020,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	510.285.100,00	159.648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	288.566.900,00	67.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	60.654.900,00	29.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	69.682.000,00	20.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	47.400.000,00	17.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	49.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	61.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	98.489.000,00	47.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	98.489.000,00	47.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	63.694.000,00	19.338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	19.440.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	29.466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	14.788.000,00	10.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	59.535.200,00	25.652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.935.000,00	2.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	55.600.200,00	23.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	332.400.000,00	105.657.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	332.400.000,00	105.657.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	108.000.000,00	105.657.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.02.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	224.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	8.938.301.784,00	1.897.856.490,00	4.106.919.271,00	2.306.269.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	8.938.301.784,00	1.897.856.490,00	4.106.919.271,00	2.306.269.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.808.222.084,00	979.416.194,00	649.188.334,00	58.678.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.644.000,00	25.704.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.644.000,00	25.704.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.668.634.811,00	514.799.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.405.894.811,00	428.909.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	262.740.000,00	85.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87.430.000,00	16.513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	87.430.000,00	16.513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.133.006.369,00	274.377.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	439.411.369,00	188.211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.900.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	648.695.000,00	81.166.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	649.188.334,00	58.678.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	523.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	34.502.100,00	6.338.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	90.936.234,00	52.340.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	551.120.104,00	43.130.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.380.104,00	3.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	456.740.000,00	38.710.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	339.386.800,00	104.891.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	339.386.800,00	104.891.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.317.860.700,00	608.750.196,00	2.682.777.860,00	1.891.361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	700.480.700,00	334.031.896,00	2.682.777.860,00	1.891.361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	236.000.000,00	234.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	700.480.700,00	334.031.896,00	2.446.777.860,00	1.657.311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	617.380.000,00	274.718.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	116.310.000,00	104.366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	501.070.000,00	170.352.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	812.219.000,00	309.690.100,00	774.953.077,00	356.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	812.219.000,00	309.690.100,00	774.953.077,00	356.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	812.219.000,00	309.690.100,00	774.953.077,00	356.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.390.119.488,00	1.296.347.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	8.390.119.488,00	1.296.347.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.859.771.488,00	687.813.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.489.000,00	23.052.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.489.000,00	23.052.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.103.364.238,00	569.576.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.904.124.238,00	420.576.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	199.240.000,00	149.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	297.686.250,00	33.859.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.270.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.223.900,00	6.991.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.192.000,00	26.868.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291.492.000,00	43.195.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136.260.000,00	37.257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.632.000,00	4.838.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.740.000,00	18.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	108.940.000,00	14.028.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.800.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.201.739.000,00	313.781.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.201.739.000,00	313.781.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	285.890.000,00	114.556.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	27.675.000,00	13.801.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	468.783.000,00	95.303.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	373.933.000,00	59.985.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	45.458.000,00	30.135.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.328.609.000,00	294.752.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	36.600.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	36.600.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.292.009.000,00	276.952.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0015	Fasilitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	72.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.219.909.000,00	276.952.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8.841.674.559,00	1.342.253.874,00	37.842.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000		Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	8.841.674.559,00	1.342.253.874,00	37.842.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.989.409.059,00	1.163.200.674,00	37.842.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.402.400,00	10.669.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.272.900,00	3.104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.429.500,00	5.881.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.700.000,00	1.683.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.609.582.603,00	891.045.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.415.312.603,00	789.705.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	194.270.000,00	101.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.708.000,00	31.642.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	37.708.000,00	31.642.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	523.079.956,00	83.272.020,00	4.792.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	4.792.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	184.795.056,00	20.103.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.837.900,00	19.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310.447.000,00	44.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	33.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	33.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	683.418.000,00	65.031.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.952.000,00	36.075.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	579.120.000,00	28.955.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.218.100,00	81.539.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.288.100,00	81.539.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	390.406.000,00	126.678.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	390.406.000,00	126.678.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	109.887.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	280.518.800,00	126.678.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	70.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	70.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	70.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	71.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	71.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	55.319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	16.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	320.156.500,00	52.374.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	320.156.500,00	52.374.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.31.3.30.2.17.01.0000	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	320.156.500,00	52.374.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.871.510.218,00	963.644.050,00	269.233.160,00	57.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.871.510.218,00	963.644.050,00	269.233.160,00	57.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.030.167.618,00	646.437.926,00	269.233.160,00	57.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.806.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.407.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.956.421.200,00	489.388.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.797.651.200,00	364.458.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	158.770.000,00	124.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	621.658.518,00	74.189.684,00	221.044.500,00	54.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	54.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	221.044.500,00	54.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	122.191.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.047.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	401.532.000,00	74.189.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	48.188.660,00	2.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	48.188.660,00	2.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325.946.400,00	39.562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.124.000,00	39.562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	182.822.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.263.000,00	43.298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.680.000,00	31.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.293.000,00	12.208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	158.694.000,00	98.817.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	158.694.000,00	98.817.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	158.694.000,00	98.817.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	210.792.100,00	142.508.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	210.792.100,00	142.508.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	125.261.000,00	75.146.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	85.531.100,00	67.361.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	280.732.100,00	10.995.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	280.732.100,00	10.995.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	188.742.700,00	2.694.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	33.885.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	58.104.300,00	8.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	94.048.500,00	48.741.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	94.048.500,00	48.741.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	33.727.500,00	15.387.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	29.117.000,00	25.160.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	31.204.000,00	8.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	97.075.900,00	16.144.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	97.075.900,00	16.144.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	97.075.900,00	16.144.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.486.328.936,00	75.079.482,00	266.136.800,00	264.344.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.486.328.936,00	75.079.482,00	266.136.800,00	264.344.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	554.102.000,00	1.342.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	554.102.000,00	1.342.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	554.102.000,00	1.342.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	932.226.936,00	73.737.082,00	266.136.800,00	264.344.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	55.564.000,00	0,00	266.136.800,00	264.344.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	55.564.000,00	0,00	266.136.800,00	264.344.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	757.274.350,00	70.192.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	757.274.350,00	70.192.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	119.388.586,00	3.544.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	70.388.586,00	3.544.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	204.802.000,00	83.312.586,00	19.861.800,00	19.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	204.802.000,00	83.312.586,00	19.861.800,00	19.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	204.802.000,00	83.312.586,00	19.861.800,00	19.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	204.802.000,00	83.312.586,00	19.861.800,00	19.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Lembaga Statistik Sektoral	12.806.000,00	3.471.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	53.582.000,00	49.091.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	138.414.000,00	30.750.000,00	19.861.800,00	19.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	125.355.000,00	14.343.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	125.355.000,00	14.343.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	125.355.000,00	14.343.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	125.355.000,00	14.343.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	78.028.000,00	1.772.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	13.925.000,00	1.471.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18.500.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	7.251.531.320,00	2.629.041.260,00	23.031.847.846,00	11.482.754.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.251.531.320,00	2.629.041.260,00	23.031.847.846,00	11.482.754.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.837.440.700,00	38.791.000,00	8.383.024.265,00	3.102.571.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.613.529.100,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.253.091.800,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	360.437.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	564.819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	201.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	363.467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	659.092.600,00	38.791.000,00	8.370.024.265,00	3.102.571.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	197.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	461.808.600,00	38.791.000,00	8.370.024.265,00	3.102.571.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	3.663.846.500,00	2.338.260.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.663.846.500,00	2.338.260.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	320.624.000,00	23.290.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0002	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	748.471.500,00	92.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	2.594.751.000,00	2.222.925.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	161.384.000,00	105.490.000,00	14.648.823.581,00	8.380.183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	161.384.000,00	105.490.000,00	14.648.823.581,00	8.380.183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	161.384.000,00	105.490.000,00	14.648.823.581,00	8.380.183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	263.694.020,00	146.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	78.917.200,00	33.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	78.917.200,00	33.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	184.776.820,00	113.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	184.776.820,00	113.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	325.166.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	325.166.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	325.166.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.358.554.738,00	744.227.483,00	11.397.066.289,00	3.609.637.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.358.554.738,00	744.227.483,00	11.397.066.289,00	3.609.637.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.815.506.119,00	523.457.383,00	47.234.289,00	17.229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.323.500,00	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.323.500,00	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.183.373.619,00	428.296.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.013.974.819,00	356.346.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	162.970.000,00	71.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.428.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.239.200,00	21.985.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23.239.200,00	21.985.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	316.828.600,00	41.184.000,00	4.792.800,00	4.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.819.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.464.000,00	0,00	4.792.800,00	4.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.474.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.070.700,00	41.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	42.441.489,00	12.439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	12.441.489,00	12.439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.171.200,00	21.990.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.960.000,00	7.396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	174.211.200,00	14.594.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.570.000,00	7.341.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.620.000,00	7.341.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	543.048.619,00	220.770.100,00	11.349.832.000,00	3.592.408.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	115.198.600,00	66.991.100,00	999.852.000,00	38.612.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	65.079.700,00	36.138.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.118.900,00	30.853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	200.000.000,00	38.612.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	0,00	0,00	299.852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	427.850.019,00	153.779.000,00	10.349.980.000,00	3.553.795.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	88.152.800,00	18.969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	190.885.219,00	134.810.000,00	10.349.980.000,00	3.553.795.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	87.860.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	60.951.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	283.014.125,00	28.729.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	283.014.125,00	28.729.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	283.014.125,00	28.729.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	181.849.125,00	19.332.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	37.720.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	62.078.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	82.050.000,00	19.332.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	32.540.000,00	1.101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	32.540.000,00	1.101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	68.625.000,00	8.296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	68.625.000,00	8.296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	23.987.416.227,01	3.255.481.467,00	643.256.728,00	248.593.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	845.313.356,00	308.926.800,00	22.995.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000		Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	845.313.356,00	308.926.800,00	22.995.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	330.838.200,00	289.277.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	330.838.200,00	289.277.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	330.838.200,00	289.277.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	344.198.656,00	5.619.262,00	22.995.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	344.198.656,00	5.619.262,00	22.995.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	344.198.656,00	5.619.262,00	22.995.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	86.148.500,00	14.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	86.148.500,00	14.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	86.148.500,00	14.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	84.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	84.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	84.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	7.016.365.805,01	765.930.210,00	93.146.420,00	43.156.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	7.016.365.805,01	765.930.210,00	93.146.420,00	43.156.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.329.520.275,01	735.269.410,00	61.337.220,00	43.156.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144.169.000,00	7.249.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	136.447.000,00	7.249.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.932.737.420,00	551.161.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.743.657.420,00	407.261.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	189.080.000,00	143.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	101.660.000,00	41.051.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	62.660.000,00	41.051.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	629.054.979,00	63.278.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.637.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.070.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.850.800,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	510.497.000,00	56.978.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.364.700,00	0,00	61.337.220,00	43.156.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	30.600.000,00	0,00	8.239.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	764.700,00	0,00	53.098.120,00	43.156.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	383.218.176,00	53.231.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.810.176,00	38.747.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	213.072.000,00	14.484.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.316.000,01	19.297.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.906.000,01	19.297.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	81.233.530,00	15.700.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	18.823.000,00	7.756.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	18.823.000,00	7.756.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	62.410.530,00	7.944.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	24.271.530,00	7.944.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	38.139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	399.120.000,00	14.960.000,00	31.809.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	399.120.000,00	14.960.000,00	31.809.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	83.800.000,00	14.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	217.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	97.500.000,00	0,00	31.809.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	206.492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	206.492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	206.492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	13.779.944.036,00	1.655.754.232,00	206.782.948,00	163.575.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000		Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	13.779.944.036,00	1.655.754.232,00	206.782.948,00	163.575.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.937.055.353,00	1.246.293.788,00	35.900.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	153.013.146,00	42.080.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.053.146,00	26.068.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	90.960.000,00	16.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.540.257.936,00	1.013.545.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.298.937.936,00	945.745.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	241.320.000,00	67.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	629.797.271,00	144.304.770,00	12.661.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	12.661.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.285.417,00	4.257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.990.400,00	10.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	548.521.454,00	129.757.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	23.239.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	23.239.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	592.819.000,00	43.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.502.000,00	30.838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	490.077.000,00	12.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.168.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.100.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.159.018.127,00	372.120.844,00	166.182.774,00	163.575.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	529.336.400,00	150.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	179.585.000,00	4.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	349.751.400,00	146.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	192.240.000,00	80.396.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	192.240.000,00	80.396.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	437.441.727,00	141.114.094,00	166.182.774,00	163.575.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	437.441.727,00	141.114.094,00	166.182.774,00	163.575.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	110.635.356,00	16.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	74.899.356,00	9.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.01.0007	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	74.899.356,00	9.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	35.736.000,00	6.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	35.736.000,00	6.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	59.999.400,00	16.129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	59.999.400,00	16.129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	59.999.400,00	16.129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	513.235.800,00	5.000.000,00	4.699.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	513.235.800,00	5.000.000,00	4.699.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	114.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	386.174.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	12.729.600,00	5.000.000,00	4.699.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.008.635.830,00	316.561.475,00	320.331.560,00	41.861.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000		Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	1.008.635.830,00	316.561.475,00	320.331.560,00	41.861.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	125.528.700,00	26.390.800,00	185.884.160,00	35.079.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	125.528.700,00	26.390.800,00	185.884.160,00	35.079.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	39.500.000,00	0,00	185.884.160,00	35.079.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	86.028.700,00	26.390.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	755.998.530,00	240.185.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	755.998.530,00	240.185.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	121.578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	13.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	621.112.530,00	240.185.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	127.108.600,00	49.985.300,00	134.447.400,00	6.782.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	127.108.600,00	49.985.300,00	134.447.400,00	6.782.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	69.463.600,00	27.446.000,00	134.447.400,00	6.782.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	57.645.000,00	22.539.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.185.687.800,00	180.176.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.2.17.01.0000		Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	1.185.687.800,00	180.176.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.057.938.300,00	180.176.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.057.938.300,00	180.176.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.057.938.300,00	180.176.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	46.916.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	46.916.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	46.916.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	80.833.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	80.833.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.2.17.01.0000	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	80.833.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	151.469.400,00	28.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	151.469.400,00	28.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	118.814.400,00	28.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	118.814.400,00	28.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.02.2.01.0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	118.814.400,00	28.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	32.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	32.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	32.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	109.537.470.457,00	18.220.758.026,80	5.053.424.267,00	3.127.387.042,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	67.370.263.835,00	12.771.561.884,80	4.941.207.467,00	3.055.387.042,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat Daerah	15.514.366.846,00	1.475.502.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.514.366.846,00	1.475.502.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.514.366.846,00	1.475.502.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.514.366.846,00	1.475.502.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001		Bagian Umum	28.753.694.854,00	6.947.814.231,80	4.835.708.569,00	2.965.813.842,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.753.694.854,00	6.947.814.231,80	4.835.708.569,00	2.965.813.842,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	185.080.000,00	176.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	185.080.000,00	176.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	342.643.300,00	63.763.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	218.431.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	124.212.000,00	63.763.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.037.409.830,00	2.302.105.890,00	199.742.896,00	130.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	61.651.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.358.900,00	10.000.000,00	199.742.896,00	130.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	558.579.750,00	28.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	356.670.000,00	171.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.017.680,00	1.220.788.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.980.972.000,00	871.257.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	33.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	877.442.904,00	395.595.138,20	3.723.365.669,00	2.276.783.842,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	2.090.480.000,00	1.367.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	434.712.500,00	420.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	322.541.800,00	116.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	497.907.567,00	225.950.000,00	595.915.460,00	182.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	272.750.000,00	154.114.138,20	157.456.965,00	155.403.842,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.314.400,00	0,00	49.524.144,00	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.470.937,00	15.531.000,00	72.734.800,00	10.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.412.516.100,00	252.945.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.700.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	938.316.100,00	216.845.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	461.500.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.161.551.500,00	863.412.004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	740.555.000,00	265.241.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.045.680.800,00	349.433.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.641.700,00	30.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	289.674.000,00	218.087.393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.403.062.620,00	493.537.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	409.359.620,00	46.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaiannya Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	317.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.516.043.000,00	446.737.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	10.057.697.800,00	1.469.857.506,00	912.600.004,00	558.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.506.472.900,00	274.940.506,00	163.692.160,00	59.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.591.556.500,00	447.592.000,00	288.614.400,00	76.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	5.959.668.400,00	747.325.000,00	460.293.444,00	421.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.276.290.800,00	930.377.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	2.472.827.600,00	597.835.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	448.926.000,00	140.403.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	354.537.200,00	192.138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002		Bagian Pemerintahan	1.889.578.225,00	313.358.003,00	62.881.589,00	55.962.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	639.531.525,00	93.107.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	188.873.000,00	34.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	188.873.000,00	34.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	96.220.000,00	36.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	96.220.000,00	36.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	148.846.725,00	17.917.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.064.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.522.000,00	17.917.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.469.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.929.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	454.122.700,00	238.708.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.810.000,00	26.169.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.069.800,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.683.900,00	25.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	349.559.000,00	186.539.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.434.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.866.451.500,00	602.643.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.866.451.500,00	602.643.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	534.877.200,00	196.677.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.075.544.200,00	323.142.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	256.030.100,00	82.822.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005		Bagian Organisasi	1.419.396.687,00	381.988.400,00	3.743.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.419.396.687,00	381.988.400,00	3.743.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	105.010.000,00	35.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	105.010.000,00	35.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	278.702.687,00	71.449.700,00	3.743.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	3.743.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.145.200,00	3.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.712.400,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212.845.087,00	60.316.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.530.000,00	3.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.530.000,00	3.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	921.264.000,00	272.058.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	366.511.000,00	108.540.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	150.393.000,00	32.677.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	389.087.000,00	123.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	15.273.000,00	7.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006		Bagian Administrasi Pembangunan	4.582.467.275,00	1.571.343.740,00	8.623.500,00	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.009.112.575,00	683.488.825,00	8.623.500,00	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.681.000,00	30.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.266.000,00	27.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.415.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	447.329.000,00	152.719.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	184.380.000,00	92.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	172.317.000,00	40.256.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	90.632.000,00	19.822.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	69.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.149.314.175,00	446.339.425,00	8.623.500,00	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	0,00	8.623.500,00	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124.195.175,00	37.556.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.000.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	998.119.000,00	406.683.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.364.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.364.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.664.400,00	49.460.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	143.424.400,00	35.060.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.240.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.573.354.700,00	887.854.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	990.400.000,00	519.423.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	88.660.000,00	34.901.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	901.740.000,00	484.522.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.582.954.700,00	368.431.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.183.487.000,00	158.597.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	238.607.100,00	198.733.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	160.860.600,00	11.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02			SEKRETARIAT DPRD	42.167.206.622,00	5.449.196.142,00	112.216.800,00	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat DPRD	42.167.206.622,00	5.449.196.142,00	112.216.800,00	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.963.746.822,00	1.209.967.053,00	112.216.800,00	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.970.000,00	47.042.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	69.970.000,00	47.042.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.140.030.814,00	279.186.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.140.030.814,00	279.186.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	573.694.600,00	149.869.500,00	38.763.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.798.600,00	14.175.000,00	38.763.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	111.471.000,00	79.579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	165.035.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.390.000,00	51.555.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	73.453.600,00	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	73.453.600,00	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	894.311.140,00	309.745.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	304.199.140,00	74.291.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	564.400.000,00	221.054.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.220.000,00	65.174.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	176.020.000,00	60.174.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.200.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	13.515.026.268,00	232.247.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	12.161.142.268,00	35.996.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	610.000.000,00	188.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	743.884.000,00	8.251.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	532.426.000,00	126.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	532.426.000,00	126.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	23.203.459.800,00	4.239.229.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.573.500.000,00	727.604.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	303.300.000,00	112.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	770.200.000,00	365.504.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	500.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.241.400.000,00	745.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	299.100.000,00	180.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	173.600.000,00	94.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	270.800.000,00	137.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	139.100.000,00	50.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	287.260.000,00	237.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	71.540.000,00	43.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.000.630.000,00	45.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	292.200.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	427.540.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	242.850.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	38.040.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.716.652.200,00	1.223.786.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	854.997.200,00	276.626.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	375.000.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	144.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	801.350.000,00	537.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	390.960.000,00	343.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	150.345.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.543.220.000,00	28.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	257.200.000,00	8.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	25.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	4.260.220.000,00	20.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	622.600.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	214.300.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	408.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	11.505.457.600,00	1.405.738.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	11.199.007.600,00	1.169.598.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	306.450.000,00	236.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	102.658.520.791,89	15.355.503.908,00	2.048.475.198,00	1.150.811.750,00	94.864.820.364,00	0,00	118.984.429.141,00	214.531.922,00
5.01			PERENCANAAN	16.306.824.424,00	3.035.987.338,00	425.628.350,00	138.861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	16.306.824.424,00	3.035.987.338,00	425.628.350,00	138.861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.160.236.017,00	1.323.971.178,00	59.113.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.377.000,00	44.125.000,00	46.997.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.567.000,00	17.545.000,00	46.997.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.810.000,00	26.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.627.514.260,00	934.109.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.365.854.260,00	728.009.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	261.660.000,00	206.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	799.936.257,00	205.905.804,00	12.115.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	238.720.557,00	73.000.500,00	12.115.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.590.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja					
				Operasi		Modal		Tak Terduga	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	529.957.700,00	131.795.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	323.003.500,00	21.915.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.443.500,00	7.790.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157.560.000,00	9.625.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.549.000,00	117.914.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	284.239.000,00	106.594.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.310.000,00	11.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	6.666.282.152,00	1.359.426.559,00	199.800.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.671.463.990,00	1.317.183.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	696.966.000,00	321.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	18.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	15.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	69.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	4.870.719.990,00	995.763.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	261.716.200,00	25.344.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	261.716.200,00	25.344.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	733.101.962,00	16.899.000,00	199.800.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	733.101.962,00	16.899.000,00	199.800.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.480.306.255,00	352.589.601,00	166.714.600,00	138.861.000,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	629.497.755,00	151.787.752,00	27.709.300,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	226.229.255,00	41.570.918,00	27.709.300,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	403.268.500,00	110.216.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	477.244.000,00	60.841.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	477.244.000,00	60.841.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	373.564.500,00	139.960.597,00	139.005.300,00	138.861.000,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	373.564.500,00	139.960.597,00	139.005.300,00	138.861.000,00	0,00	0,00
5.02			KEUANGAN	76.866.094.347,89	10.628.865.238,00	1.580.513.648,00	979.277.900,00	94.864.820.364,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	76.866.094.347,89	10.628.865.238,00	1.580.513.648,00	979.277.900,00	94.864.820.364,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	59.482.751.799,89	6.006.225.539,00	1.540.513.648,00	939.277.900,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.935.000,00	22.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.530.000,00	10.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.405.000,00	11.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	51.810.404.465,89	3.290.083.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50.922.404.465,89	2.915.923.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	888.000.000,00	374.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.306.785.262,00	438.595.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	152.462.000,00	130.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.154.323.262,00	307.695.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.311.943.972,00	1.898.240.966,00	1.540.513.648,00	939.277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42.670.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.244.000,00	66.151.000,00	1.540.513.648,00	939.277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.430.649.667,00	703.037.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	252.914.500,00	151.405.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	550.000.000,00	302.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.967.465.000,00	674.846.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.417.209.000,00	139.936.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.004.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.031.820.000,00	119.123.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	374.385.000,00	11.012.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	597.474.100,00	217.178.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	440.505.100,00	156.943.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	156.969.000,00	60.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	9.979.807.000,00	2.488.442.329,00	0,00	0,00	94.864.820.364,00	0,00	118.984.429.141,00	214.531.922,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	4.410.357.000,00	1.158.608.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	252.702.000,00	90.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	279.725.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	344.576.000,00	167.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	344.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.767.678.200,00	414.003.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1.421.099.000,00	486.965.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.989.705.600,00	793.737.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	371.214.000,00	136.115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1.456.140.600,00	383.741.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1.162.351.000,00	273.880.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.084.368.600,00	520.571.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1.804.548.600,00	449.321.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	163.592.200,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	116.227.800,00	50.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	495.375.800,00	15.524.248,00	0,00	0,00	94.864.820.364,00	0,00	118.984.429.141,00	214.531.922,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	495.375.800,00	15.524.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.994.479.900,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	0,00	0,00	0,00	94.864.820.364,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.949.241,00	214.531.922,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4.220.063.900,00	1.406.398.725,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.220.063.900,00	1.406.398.725,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	550.772.400,00	217.574.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	414.796.000,00	27.937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	90.082.000,00	14.464.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	90.690.000,00	69.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	145.137.800,00	12.600.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	262.574.100,00	31.614.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	79.677.000,00	61.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	617.557.000,00	247.536.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	450.556.000,00	198.959.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	544.046.000,00	105.216.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	974.175.600,00	418.938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.183.471.648,00	727.798.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.183.471.648,00	727.798.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	838.853.000,00	160.980.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	771.787.600,00	173.873.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	70.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	254.024.148,00	128.704.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	13.644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	275.552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	152.824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	290.618.000,00	84.874.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	3.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	181.789.200,00	100.791.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	330.365.700,00	78.573.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03			KEPEGAWAIAN	7.640.852.320,00	1.228.259.155,00	42.333.200,00	32.672.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.640.852.320,00	1.228.259.155,00	42.333.200,00	32.672.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.723.545.420,00	765.839.026,00	42.333.200,00	32.672.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.091.200,00	2.852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.713.200,00	1.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.378.000,00	1.364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.710.125.940,00	568.638.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.559.405.940,00	430.518.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	150.720.000,00	138.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.096.000,00	12.493.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	39.096.000,00	12.493.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	447.268.240,00	123.013.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126.750.640,00	9.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.383.600,00	7.143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	289.134.000,00	106.420.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	42.333.200,00	32.672.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	8.995.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	33.338.100,00	32.672.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	452.344.040,00	56.793.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	216.540.040,00	51.785.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	231.804.000,00	5.007.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.620.000,00	2.048.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.230.000,00	2.048.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.917.306.900,00	462.420.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	571.653.000,00	161.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	190.119.000,00	28.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	17.656.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	262.428.000,00	79.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	101.450.000,00	46.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	400.229.400,00	48.819.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	94.987.500,00	22.644.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	213.209.900,00	14.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	92.032.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	928.278.700,00	235.644.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	662.864.900,00	229.973.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	145.776.000,00	4.411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	11.783.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	107.854.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	17.145.800,00	16.105.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	17.145.800,00	16.105.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	629.586.600,00	265.210.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	629.586.600,00	265.210.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	629.586.600,00	265.210.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	629.586.600,00	265.210.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	629.586.600,00	265.210.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.215.163.100,00	197.181.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	1.215.163.100,00	197.181.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.215.163.100,00	197.181.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	424.307.000,00	37.512.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	424.307.000,00	37.512.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	790.856.100,00	159.669.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	790.856.100,00	159.669.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	15.734.435.910,00	3.137.328.120,00	1.346.424.730,00	1.128.566.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	15.734.435.910,00	3.137.328.120,00	1.346.424.730,00	1.128.566.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		Inspektorat Kabupaten	15.734.435.910,00	3.137.328.120,00	1.346.424.730,00	1.128.566.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.459.287.910,00	1.022.955.333,00	1.346.424.730,00	1.128.566.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.474.000,00	2.262.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.764.000,00	2.262.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.677.781.714,00	457.655.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.438.081.714,00	408.515.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	239.700.000,00	49.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	680.786.000,00	61.337.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	17.990.000,00	5.497.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	454.872.000,00	11.703.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	207.924.000,00	44.137.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.053.981.096,00	197.593.600,00	22.899.760,00	22.621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.929.616,00	27.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	44.796.080,00	6.400.000,00	22.899.760,00	22.621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	310.438.900,00	53.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	169.184.500,00	97.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	478.632.000,00	13.955.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	1.323.524.970,00	1.105.945.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	580.962.000,00	527.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	97.982.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	65.271.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	579.308.800,00	578.945.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	531.278.400,00	47.468.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	148.200.000,00	15.068.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	371.078.400,00	31.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	446.986.700,00	256.637.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	247.840.000,00	81.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.160.000,00	12.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	161.986.700,00	161.877.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.752.017.000,00	1.259.135.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.966.753.000,00	767.839.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	327.298.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	556.318.000,00	90.437.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	137.666.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	193.983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	952.414.000,00	439.852.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	799.074.000,00	218.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	785.264.000,00	491.295.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	785.264.000,00	491.295.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	4.523.131.000,00	855.237.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1.485.050.000,00	257.582.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1.485.050.000,00	257.582.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	3.038.081.000,00	597.654.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1.097.130.000,00	112.967.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	813.134.000,00	240.570.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	694.917.000,00	182.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	432.900.000,00	61.741.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	23.822.675.003,00	3.562.539.983,00	800.065.840,00	531.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01			KECAMATAN	23.822.675.003,00	3.562.539.983,00	800.065.840,00	531.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		Kecamatan Sesayap	4.895.738.490,00	536.656.826,00	137.398.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.271.957.790,00	450.344.826,00	137.398.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.529.820.894,00	326.430.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.436.960.894,00	303.300.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	92.860.000,00	23.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.976.000,00	9.917.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	26.976.000,00	9.917.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	526.796.296,00	98.486.796,00	7.444.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	7.444.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	208.337.896,00	19.739.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	54.741.400,00	4.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	263.717.000,00	74.407.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	129.953.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	129.953.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.044.600,00	14.089.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.399.600,00	9.101.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	88.020.000,00	4.988.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.320.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.640.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.200.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10.200.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.200.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	553.405.700,00	72.562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	520.565.700,00	68.972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17.344.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	216.860.000,00	48.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	286.361.000,00	20.372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	32.840.000,00	3.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	32.840.000,00	3.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	39.625.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	29.550.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	29.550.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		Kecamatan Sesayap Hilir	4.988.466.804,00	1.234.144.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.331.900.004,00	731.604.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.935.000,00	3.951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.528.000,00	1.971.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.407.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.625.775.224,00	394.251.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.502.910.224,00	317.546.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	117.990.000,00	74.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.875.000,00	2.515.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	524.505.500,00	319.968.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	190.784.500,00	122.505.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.871.000,00	5.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	327.850.000,00	191.591.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.474.880,00	10.677.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.967.680,00	10.418.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.907.200,00	259.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.209.400,00	2.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.819.400,00	2.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.555.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	14.555.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14.555.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	514.514.000,00	454.117.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	378.241.800,00	323.822.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	227.395.000,00	196.908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	150.846.800,00	126.914.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	136.272.200,00	130.294.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	136.272.200,00	130.294.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.210.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.210.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.210.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.572.000,00	11.573.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	22.572.000,00	11.573.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	22.572.000,00	11.573.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	80.715.800,00	25.249.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80.715.800,00	25.249.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	64.389.200,00	25.249.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.326.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		Kecamatan Tana Lia	5.090.021.171,00	780.248.262,00	556.957.300,00	531.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.659.854.601,00	592.356.262,00	556.957.300,00	531.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.213.100,00	1.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.785.500,00	1.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.427.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.746.572.471,00	372.484.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.645.182.471,00	321.134.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	101.390.000,00	51.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.672.000,00	29.012.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	46.672.000,00	29.012.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	669.303.030,00	147.062.000,00	15.427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	11.742.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	3.684.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.573.830,00	15.048.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.891.200,00	1.782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	583.928.000,00	130.231.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	541.530.300,00	531.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	531.401.000,00	531.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	6.130.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	3.998.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.814.000,00	24.479.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.476.000,00	13.758.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	62.738.000,00	9.621.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.280.000,00	17.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.530.000,00	10.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.260.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.490.000,00	5.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.947.800,00	5.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10.947.800,00	5.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.947.800,00	5.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	331.220.400,00	149.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	285.216.300,00	141.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	13.240.400,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	271.975.900,00	137.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	46.004.100,00	7.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	46.004.100,00	7.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30.509.300,00	10.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.509.300,00	10.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.509.300,00	10.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	57.489.070,00	22.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	57.489.070,00	22.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	47.403.070,00	22.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		Kecamatan Betayau	4.369.840.668,00	527.158.196,00	85.967.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.021.377.518,00	450.868.196,00	85.967.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.311.494.595,00	342.597.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.195.934.595,00	312.797.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	115.560.000,00	29.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	504.824.953,00	95.931.000,00	32.737.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.389.400,00	0,00	32.737.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.780.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.771.975,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.266.100,00	9.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	291.632.000,00	82.811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.975.300,00	0,00	53.230.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	30.895.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.975.300,00	0,00	22.334.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.022.100,00	12.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.978.400,00	7.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.504.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.947.200,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.060.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.060.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	193.462.600,00	73.304.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	152.144.800,00	64.528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	26.000.600,00	12.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	126.144.200,00	51.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	41.317.800,00	8.776.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	27.797.900,00	8.776.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	13.519.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	131.335.950,00	1.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	41.268.350,00	1.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	26.155.050,00	1.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.113.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	90.067.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	90.067.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.664.600,00	1.030.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	23.664.600,00	1.030.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.631.300,00	447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	11.033.300,00	583.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		Kecamatan Muruk Rian	4.478.607.870,00	484.332.183,00	19.743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.121.618.370,00	437.668.883,00	19.743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.343.649.270,00	319.700.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.264.629.270,00	300.920.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	79.020.000,00	18.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	530.260.100,00	54.056.000,00	19.743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	19.743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	193.432.100,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	316.878.000,00	52.256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.165.000,00	56.789.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.665.000,00	31.395.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	116.100.000,00	24.194.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.990.000,00	7.122.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.000.000,00	7.122.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	85.188.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	40.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	45.000.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	45.000.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	182.484.500,00	29.263.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	182.484.500,00	29.263.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	168.984.500,00	29.263.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	66.050.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	66.050.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	56.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6.025.754.466,00	872.381.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.025.754.466,00	872.381.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.025.754.466,00	872.381.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	531.724.660,00	230.632.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	531.724.660,00	230.632.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	265.572.400,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	52.100.160,00	9.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	214.052.100,00	21.277.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	4.419.812.506,00	309.374.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	4.419.812.506,00	309.374.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.165.714.706,00	250.863.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	121.185.300,00	20.928.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka	1.132.912.500,00	37.582.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	103.922.000,00	31.072.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	103.922.000,00	31.072.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60.697.000,00	16.528.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	43.225.000,00	14.544.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	191.916.300,00	65.654.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	191.916.300,00	65.654.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	155.358.300,00	55.783.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	36.558.000,00	9.870.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	778.379.000,00	235.647.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	778.379.000,00	235.647.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	355.886.000,00	80.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	422.493.000,00	154.707.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah	784.698.422.028,51	157.634.849.653,30	434.056.815.945,39	235.657.542.291,31	94.864.820.364,00	0,00	119.344.429.141,00	214.531.922,00

Tana Tidung, 4 September 2026

BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



LAMPIRAN II

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REF	2025	2024
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	436.022.138.025,90	308.365.964.447,87
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	(436.022.138.025,90)	(308.365.964.447,87)
3	Sub Total (1 - 2)		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	348.293.417.394,25	436.022.138.025,90
5	Sub Total (3 + 4)		348.293.417.394,25	436.022.138.025,90
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	0,00	0,00
7	Lain-Lain	5.2.5	0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	5.2.6	348.293.417.394,25	436.022.138.025,90

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI,

IBRAHIM ALI, SP.



LAMPIRAN III

LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REF	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN - LO	5.4.1	1.028.473.552.676,30	983.691.175.744,73	44.782.376.931,57	4,55
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	5.4.1.1	53.616.787.939,46	54.566.035.153,48	(949.247.214,02)	(1,74)
4	Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	10.729.155.449,26	7.646.855.773,58	3.082.299.675,68	40,31
5	Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	9.860.962.650,00	1.283.361.623,00	8.577.601.027,00	668,37
6	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	3.741.723.567,47	5.454.784.626,96	(1.713.061.059,49)	(31,40)
7	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.4	29.284.946.272,73	40.181.033.129,94	(10.896.086.857,21)	(27,12)
8	PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2	970.452.000.024,00	905.103.395.785,00	65.348.604.239,00	7,22
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.4.1.2.1	925.326.985.171,00	832.161.889.472,00	93.165.095.699,00	11,20
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan -LO	5.4.1.2.1.1	918.330.887.171,00	817.997.845.472,00	100.333.041.699,00	12,27
11	Dana Bagi Hasil - LO	5.4.1.2.1.1.1	482.476.199.300,00	351.689.041.319,00	130.787.157.981,00	37,19
12	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	5.4.1.2.1.1.2	397.312.680.666,00	425.690.872.922,00	(28.378.192.256,00)	(6,67)
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	5.4.1.2.1.1.3	38.542.007.205,00	40.617.931.231,00	(2.075.924.026,00)	(5,11)
14	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.4.1.2.1.2	6.996.098.000,00	14.164.044.000,00	(7.167.946.000,00)	(50,61)
15	Insentif Fiskal - LO	5.4.1.2.1.2.1	6.996.098.000,00	14.164.044.000,00	(7.167.946.000,00)	(50,61)
16	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	5.4.1.2.2	45.125.014.853,00	72.941.506.313,00	(27.816.491.460,00)	(38,14)
17	Pendapatan Bagi Hasil - LO	5.4.1.2.2.1	43.390.519.601,00	35.037.618.142,00	8.352.901.459,00	23,84
18	Bantuan Keuangan - LO	5.4.1.2.2.2	1.734.495.252,00	37.903.888.171,00	(36.169.392.919,00)	(95,42)
19	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO	5.4.1.3	4.404.764.712,84	24.021.744.806,25	(19.616.980.093,41)	(81,66)
20	Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3.1	4.332.967.133,84	22.305.690.506,25	(17.972.723.372,41)	(80,57)
21	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO	5.4.1.3.2	71.797.579,00	1.716.054.300,00	(1.644.256.721,00)	(95,82)
22	BEBAN	5.4.2	949.881.863.933,31	1.089.206.567.844,34	(139.324.703.911,03)	(12,79)
23	BEBAN OPERASI	5.4.2.1	648.740.740.838,84	743.257.063.688,07	(94.516.322.849,23)	(12,72)
24	Beban Pegawai	5.4.2.1.1	314.479.737.531,00	316.377.435.083,00	(1.897.697.552,00)	(0,60)
25	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	309.331.871.936,46	390.791.123.553,54	(81.459.251.617,08)	(20,84)
26	Beban Hibah	5.4.2.1.3	23.075.271.125,00	35.692.558.871,00	(12.617.287.746,00)	(35,35)
27	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.4	243.500.000,00	0,00	243.500.000,00	-
28	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.5	1.610.360.246,38	395.946.180,53	1.214.414.065,85	306,71

NO	URAIAN	REF	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
29	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	5.4.2.1.6	209.181.755.571,47	240.362.928.106,27	(31.181.172.534,80)	(12,97)
30	Beban Penyusutan dan Amortisasi		209.181.755.571,47	240.362.928.106,27	(31.181.172.534,80)	(12,97)
31	BEBAN TIDAK TERDUGA	5.4.2.2	0,00	17.620.000,00	(17.620.000,00)	(100,00)
32	Beban Tidak Terduga	5.4.2.2	0,00	17.620.000,00	(17.620.000,00)	(100,00)
33	BEBAN TRANSFER	5.4.2.3	91.959.367.523,00	105.568.956.050,00	(13.609.588.527,00)	(12,89)
34	Beban Bagi Hasil	5.4.2.3.1	989.949.241,00	533.000.000,00	456.949.241,00	85,73
35	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.3.2.	90.969.418.282,00	105.035.956.050,00	(14.066.537.768,00)	(13,39)
36	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (2 - 22)	5.4.3	78.591.688.742,99	(105.515.392.099,61)	184.107.080.842,60	(174,48)
37	SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4	261.289.093.923,51	(27.941.350.038,67)	289.230.443.962,18	(1.035,13)
38	Surplus Non Operasional - LO	5.4.4.1	325.012.514.803,29	6.202.824,00	325.006.311.979,29	5.239.650,71
39	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		325.012.514.803,29	6.202.824,00	325.006.311.979,29	5.239.650,71
40	Defisit Non Operasional	5.4.4.2	63.723.420.879,78	27.947.552.862,67	35.775.868.017,11	128,01
41	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO		7.360.607.254,63	26.491.539.256,67	(19.130.932.002,04)	(72,22)
42	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		56.362.813.625,15	1.456.013.606,00	54.906.800.019,15	3.771,04
43	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (36 + 37)		339.880.782.666,50	(133.456.742.138,28)	473.337.524.804,78	(354,67)
44	POS LUAR BIASA	5.4.5	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
46	Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
47	SURPLUS / DEFISIT LO (43 + 44)	5.4.6	339.880.782.666,50	(133.456.742.138,28)	473.337.524.804,78	(354,67)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI,

IBRAHIM ALI, SP.



LAMPIRAN IV

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REF	2025	2024
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	3.610.370.207.483,78	3.742.895.594.401,47
2	SURPLUS/DEFISIT - LO	5.6.2	339.880.782.666,50	(133.456.742.138,28)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	5.6.3.1	0,00	0,00
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	5.6.3.2	22.382.562.788,56	0,00
6	LAIN-LAIN	5.6.3.3		
	Koreksi Ekuitas - Aset Lancar	5.6.3.3.1	(1.353.897.362,00)	(137.618.705,96)
	Koreksi Ekuitas - Investasi Jangka Panjang	5.6.3.3.2	(380.087.119,35)	1.117.225.376,50
	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	5.6.3.3.3	(0,02)	(25.751.449,95)
	Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.6.3.3.4	28.094.753.071,52	0,00
	Koreksi Ekuitas - Aset Tidak Berwujud	5.6.3.3.5	1.130.000,01	0,00
	Koreksi Ekuitas - Akumulasi dan Amortisasi Aset Lainnya	5.6.3.3.6	(241.292.242,68)	0,00
	Koreksi Ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek	5.6.3.3.7	11.128.174.444,30	(22.500.000,00)
	Koreksi Ekuitas - Kewajiban Jangka Panjang	5.6.3.3.8	(67.123.757.984,00)	0,00
7	EKUITAS AKHIR	5.6.4	3.942.758.575.746,62	3.610.370.207.483,78

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI,

IBRAHIM ALI, SP.



LAMPIRAN V

NERACA



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REF	2025	2024
1	ASET	5.3.1		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1		
3	Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	348.295.864.474,25	436.035.274.872,90
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	343.429.299.450,43	430.172.961.885,93
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	0,00	2.392.000,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	0,00	0,00
7	Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	4.161.619.400,95	4.256.815.368,00
8	Kas Dana BOSP	5.3.1.1.1.7	408.734.250,97	258.215.304,97
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.1.5	238.238,90	149.312.323,00
10	Kas Lainnya	5.3.1.1.1.6	438.600,00	5.529.955,00
11	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.1.8	295.534.533,00	1.190.048.036,00
12	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.3	3.437.362.186,00	2.938.545.467,00
13	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.4	67.382.337,00	33.697.944,00
14	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.5	0,00	1.164.197.214,49
15	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.6	349.279.261.000,00	63.174.239.000,00
16	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.7	29.962.545.759,00	19.308.478.465,00
17	Piutang Lainnya	5.3.1.1.8	1.234.837.507,00	1.984.414.780,81
18	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.9	(3.002.117.352,02)	(1.391.757.105,64)
19	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.10	382.390.966,67	4.154.148.705,00
20	Persediaan	5.3.1.1.11	136.500.250.938,15	144.839.799.829,34
21	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 20)		866.157.777.816,05	672.241.039.172,90
22	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
23	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1		
24	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
25	Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
26	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non permanen (24 s/d 25)		0,00	0,00
27	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2		
28	Penyertaan Modal Daerah		148.593.447.042,11	103.690.906.609,54
29	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen (28)		148.593.447.042,11	103.690.906.609,54
30	Jumlah Investasi Jangka Panjang (26 + 29)		148.593.447.042,11	103.690.906.609,54
31	ASET TETAP	5.3.1.3		
32	Tanah	5.3.1.3.1	480.250.499.507,38	444.105.621.898,61
33	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	400.327.614.969,40	368.942.603.056,79
34	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.733.804.884.801,55	1.454.317.612.762,93
35	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	2.405.519.511.462,56	2.333.413.362.850,06
36	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	30.835.126.317,78	30.049.549.747,30
37	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	342.318.932.552,84	356.033.937.401,24
38	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(2.310.802.049.238,91)	(2.141.030.024.649,11)
39	Jumlah Aset Tetap (32 s/d 38)		3.082.254.520.372,60	2.845.832.663.067,82
40	ASET LAINNYA	5.3.1.4		
41	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.4.1	23.868.930.822,61	31.915.383.824,39
42	Aset Tak berwujud	5.3.1.4.2	58.828.003.550,45	52.603.177.006,00
43	Akumulasi Amortisasi aset Tak Berwujud	5.3.1.4.3	(42.910.625.458,55)	(37.309.275.999,00)
44	Aset Lain-Lain	5.3.1.4.4	119.541.861.882,31	153.133.187.528,95
45	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.3.1.4.5	(70.301.122.673,68)	(72.988.066.674,24)
46	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.3.1.4.6	0,00	3.709.941.000,00
47	Jumlah Aset Lainnya (41 s/d 46)		89.027.048.123,14	131.064.346.686,10
48	JUMLAH ASET (21 + 30 + 39 + 47)		4.186.032.793.353,90	3.752.828.955.536,36

NO	URAIAN	REF	2025	2024
49	KEWAJIBAN	5.3.2		
50	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
51	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	2.504.952,00	11.344.847,00
52	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	52.498.817,74	138.745.677,00
53	Utang Belanja	5.3.2.1.3	5.438.651.174,84	8.338.063.528,58
54	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	170.656.804.678,70	133.970.594.000,00
55	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (51 s/d 54)		176.150.459.623,28	142.458.748.052,58
56	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
57	Utang kepada Pihak Swasta	5.3.2.2.1	67.123.757.984,00	0,00
58	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (57)		67.123.757.984,00	0,00
59	JUMLAH KEWAJIBAN (55 + 58)		243.274.217.607,28	142.458.748.052,58
60	EKUITAS	5.3.3		
61	EKUITAS		3.942.758.575.746,62	3.610.370.207.483,78
62	JUMLAH EKUITAS (61)		3.942.758.575.746,62	3.610.370.207.483,78
63	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (59 + 62)		4.186.032.793.353,90	3.752.828.955.536,36

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI,

IBRAHIM ALI, SP.



LAMPIRAN VI

LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REF	2025	2024
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	10.240.378.261,00	7.812.755.443,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	9.851.845.257,00	706.311.634,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	3.741.723.567,47	4.930.224.687,96
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.1.4	30.266.053.399,58	35.931.993.623,49
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1.1	506.994.414.300,00	832.040.549.000,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.2	397.312.680.666,00	425.690.872.922,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.1.3	38.542.007.205,00	40.617.931.231,00
10	Penerimaan Dana Desa	5.1.1.2.1.2.1	26.568.977.400,00	29.801.783.000,00
11	Penerimaan Dana Insentif Fiskal	5.1.1.2.1.2.2	6.996.098.000,00	14.164.044.000,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.2.1	46.203.847.529,00	35.037.618.142,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan	5.1.1.2.2.2	1.734.495.252,00	37.903.888.171,00
14	Penerimaan Hibah	5.1.1.3.1	0,00	17.314.145.000,00
15	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	71.797.579,00	1.716.054.300,00
16	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)		1.078.524.318.416,05	1.483.668.171.154,45
17	Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
18	Pembayaran Pegawai	5.1.2.1.1	315.896.000.484,00	313.541.036.552,00
19	Pembayaran Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	325.696.829.085,46	422.867.337.627,02
20	Pembayaran Hibah	5.1.2.1.3	19.262.097.420,00	38.040.036.933,00
21	Pembayaran Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	243.500.000,00	17.620.000,00
22	Pembayaran Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	117.538.395.682,00	135.490.900.922,00
23	Pembayaran Bagi Hasil	5.1.2.4.1	989.949.241,00	0,00
25	Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 23)		779.626.771.912,46	909.956.932.034,02
26	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 25)		298.897.546.503,59	573.711.239.120,43
27	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
28	Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
29	Penjualan Aset Lainnya	5.1.1.1.4.1	258.133.908,00	231.524.500,00
30	Jumlah Arus Masuk Kas (29)		258.133.908,00	231.524.500,00
31	Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
32	Perolehan Tanah	5.1.2.2.1	2.847.964.666,00	0,00
33	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	35.323.557.737,00	39.818.595.746,00
34	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	233.904.479.133,85	225.324.831.715,40
35	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	111.466.199.577,39	179.911.495.381,00
36	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	1.461.196.461,00	305.796.700,00
37	Perolehan Aset Tidak berwujud	5.1.2.2.6	1.881.003.468,00	925.870.500,00
38	Jumlah Arus Keluar Kas (32 s/d 37)		386.884.401.043,24	446.286.590.042,40
39	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (30 - 38)		(386.626.267.135,24)	(446.055.065.542,40)
40	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
41	Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
42	Pinjaman Dalam Negeri	5.5.3.1.1	0,00	0,00
43	Jumlah Arus Masuk Kas (42)		0,00	0,00
44	Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
45	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	5.5.3.2.1	0,00	0,00
46	Jumlah Arus Keluar Kas (45)		0,00	0,00
47	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (43 - 46)		0,00	0,00
48	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
49	Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
50	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1	83.276.527.552,00	96.035.532.796,00
51	Jumlah Arus Masuk Kas (50)		83.276.527.552,00	96.035.532.796,00
52	Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
53	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	83.281.716.637,00	96.129.636.346,00
54	Pengeluaran Kas Lainnya	5.5.4.2.3	57.872,00	29.197.300,00
55	Jumlah Arus Keluar Kas (53 s/d 54)		83.281.774.509,00	96.158.833.646,00
56	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (47 - 56)		(5.246.957,00)	(123.300.850,00)

NO	URAIAN	REF	2025	2024
57	Kenaikan / Penurunan Kas (26 + 39 + 47 + 56)	5.5.5	(87.733.967.588,65)	127.532.872.728,03
58	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas BOS, dan Kas Kapitasi		436.029.832.062,90	308.496.959.334,87
59	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (57 + 58)		348.295.864.474,25	436.029.832.062,90
60	Kas di Kas Daerah		343.429.299.450,43	430.172.961.885,93
61	Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	600.000,00
62	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
63	Kas di BLUD		4.161.619.400,95	4.256.815.368,00
64	Kas Dana BOSP		408.734.250,97	254.564.494,97
65	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		238.238,90	149.312.323,00
66	Kas Lainnya		438.600,00	5.529.955,00
67	Kas Dana BOK Puskesmas		295.534.533,00	1.190.048.036,00
68	Saldo Akhir Kas (60 s/d 67)	5.5.6	348.295.864.474,25	436.029.832.062,90

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI,

IBRAHIM ALI, SP.



LAMPIRAN VII

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN



BAB I

**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
2025**



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Maksud

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran (TA) 2025 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2025.

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

b. Tujuan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan pengambilan keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik Pemerintah Kabupaten Tana Tidung atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan:

- 1) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 2) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 3) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluarannya;
- 4) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- 5) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 6) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk dalam pungutan pajak dan pinjaman; dan
- 7) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Daerah yang terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dibandingkan dengan anggaran. Informasi tersebut diharapkan dapat berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan terhadap anggaran. Laporan Realisasi Anggaran TA 2025 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Lampiran LRA disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL menyediakan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih atau sering menjadi SAL sendiri, menurut paragraf 8 PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan adalah penggunaan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-TA sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca per 31 Desember 2025 ini merupakan Neraca yang format penyajiannya telah disesuaikan dengan SAP. Penyusunan Neraca telah menggunakan *double entry system*. Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung pertama kali disusun pada tahun 2009 dan tahun ini adalah tahun ke 16 (enam belas) penyajian Neraca.

4) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

5) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyediakan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas berdasarkan Paragraf 101 PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyajikan sekurang-kurangnya akun-akun Ekuitas awal, Surplus/Defisit pada periode bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas.

6) Laporan Arus Kas

Tujuan penyajian Laporan Arus Kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2025. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Tana Tidung disusun menggunakan metode langsung sebagaimana yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

7) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis untuk memudahkan pemahaman para penggunanya sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman akibat dari kesalahan persepsi. Setiap pos dalam Laporan Keuangan akan dijelaskan sesuai hasil konversi antara Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan SAP yang menjadi pedoman dalam penatausahaan keuangan daerah dan pelaporannya.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Adapun penerapan SAP yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Tana Tidung TA 2025 adalah berbasis AkruaI sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung TA 2025 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung selama TA 2025 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

- 1) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- 2) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung;



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- h. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- j. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- k. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- r. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- z. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026;
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025;
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025;
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- ff. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung;
- gg. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 58 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung;



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- hh. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung;
- ii. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 59 Tahun 2022 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- jj. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025;
- kk. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025;
- ll. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2025;
- mm. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Pemerintah Kabupaten Tana Tidung TA 2025 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

- Bab I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Bab II : Memuat Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
- Bab III : Memuat kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan, indikator pencapaian target kinerja APBD dan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

-
- Bab V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen Laporan Realisasi Anggaran, komponen-komponen Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, komponen-komponen Neraca, komponen-komponen Laporan Operasional, komponen-komponen Laporan Perubahan Ekuitas dan komponen-komponen Laporan Arus Kas.
- Bab VI : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.
- Bab VII : Penutup berisi kesimpulan atas CaLK TA 2025.



BAB II

**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
2025**



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

BAB II
INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN
DAN ENTITAS AKUNTANSI

2.1 Domisili dan Bentuk Hukum Tempat Entitas

Kabupaten Tana Tidung secara geografis, geoekonomi, dan geopolitik terletak pada posisi yang sangat strategis, yaitu berada pada jalur Lintas Timur Pulau Kalimantan dan berbatasan dengan Kota Tarakan sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan, dan pusat kehidupan modern.

Kabupaten Tana Tidung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Secara administratif, Kabupaten Tana Tidung mempunyai batas-batas wilayah, sebagai berikut.

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Nunukan
- b. Sebelah Timur : Laut Sulawesi
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Bulungan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Malinau

2.2 Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokoknya

Adapun entitas di Kabupaten Tana Tidung terdiri dari Dinas, Badan/Kantor, Kecamatan dan Sekretariat merupakan unsur pelaksana pemerintah. Kabupaten Tana Tidung yang dipimpin oleh seorang Bupati dan dibantu oleh seorang Sekretaris Daerah.

Pada tahun 2025, entitas akuntansi keuangan tingkat organisasi perangkat daerah meliputi:

- a. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a) Bagian Umum
 - b) Bagian Pemerintahan
 - c) Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
 - d) Bagian Hukum
 - e) Bagian Organisasi
 - f) Bagian Administrasi Pembangunan
 - 2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- b. Dinas/Badan/Kantor terdiri dari:
- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 2) Dinas Kesehatan
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
 - 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja
 - 6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 7) Dinas Lingkungan Hidup
 - 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 9) Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 11) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
 - 12) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
 - 13) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
 - 14) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 15) Inspektorat Kabupaten
 - 16) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang
 - 17) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - 18) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 19) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - 20) Dinas Perhubungan
 - 21) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 22) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- c. Perangkat Daerah Kecamatan terdiri dari:
- 1) Kecamatan Sesayap
 - 2) Kecamatan Sesayap Hilir
 - 3) Kecamatan Tana Lia
 - 4) Kecamatan Betayau
 - 5) Kecamatan Muruk Rian



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

2.3 Ketentuan Perundang-undangan Sebagai Landasan Kegiatan Operasional

Dasar hukum sebagai landasan kegiatan operasional entitas atau perangkat daerah yaitu:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung;
- b. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 38 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pola Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung;
- c. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- e. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
- f. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- h. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman;
- i. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- k. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- l. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- m. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- n. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- o. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- p. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- q. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- r. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- s. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- t. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- u. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- w. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang;
- x. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- y. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- z. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- aa. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A dan Kecamatan Tipe B.



BAB III

**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
2025**



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

BAB III
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1. Ekonomi Makro / Ekonomi Regional

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi yang akan dicapai pada tahun 2023 - 2025, berdasarkan berbagai langkah kebijakan yang telah dituangkan dalam agenda pembangunan dan pembiayaannya. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2025 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2024 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung, yaitu (minimal) dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2023 s.d. 2025

Kondisi Ekonomi Makro			
Indikator	2023	2024	2025
KEMISKINAN	4,62	4,47	4,56
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	3,24	3,67	3,68
IPM	70,06	70,95	71,86
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	4,50*	3,57**	NA

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tana Tidung

* Angka bersifat Tentatif

** Angka masih Dinamis

Kondisi ekonomi makro tahun 2023 sampai dengan 2025 indikatornya sebagai berikut.

3.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan didefinisikan sebagai nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Dengan demikian penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Untuk memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan, namun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian dan membutuhkan



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di suatu wilayah tertentu terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Semakin tinggi angkanya, maka akan semakin parah tingkat kemiskinannya. Tren persentase penduduk miskin dalam tiga tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tana Tidung
Periode 2023 s.d. 2025

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Kabupaten/Kota (%)	4,62	4,47	4,56
2	Kabupaten/Kota (Ribu Orang)	1,47	1,50	1,59
3	Provinsi (%)	6,45	6,32	5,54
4	Nasional (%)	9,36	9,03	8,47
5	Peringkat Provinsi	5	5	5
6	Peringkat Nasional	495	497	481

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tana Tidung

Tabel di atas menunjukkan adanya tren jumlah penduduk miskin periode tahun 2023 s.d. 2025 yang mengalami fluktuasi dalam setiap tahunnya. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tana Tidung tahun 2025 mencapai sebesar 8,47% atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Jumlah penduduk miskin (berhasil) ditekan hingga menjadi 0,56%. Jika dibandingkan rata-rata tingkat provinsi/nasional, menunjukkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tana Tidung berada di bawah Provinsi/Nasional. Oleh karena itu, perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pengentasan kemiskinan tahun mendatang harus mendapat prioritas pemerintah daerah dalam upaya menekan angka kemiskinan.

Tabel 3.3
Data Kemiskinan di Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan Wilayah dan Domisili

Penduduk Miskin		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Berdasar Wilayah Kabupaten/Kota							
a.	Kecamatan Sesayap	168	1,41	166	1,49	133	1,07
b.	Kecamatan Sesayap Hilir	385	4,93	357	4,49	259	3,11
c.	Kecamatan Betayau	412	13,03	311	8,09	151	3,73
d.	Kecamatan Tana Lia	180	5,27	360	10,27	144	3,97
e.	Kecamatan Muruk Rian	176	9,92	188	10,52	61	3,42

Sumber Dokumen: Kecamatan Kabupaten Tana Tidung

Sedangkan untuk tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Tana Tidung selama tiga tahun terakhir disajikan pada tabel-tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel 3.4

Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tana Tidung

No	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan	0,14	0,48	0,53
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,64	0,82	0,75
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,53	1,46	1,37
4	Peringkat Provinsi	5	5	3
5	Peringkat Nasional	547	509	476

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tana Tidung

Tabel di atas menyajikan tingkat kedalaman kemiskinan di Kabupaten Tana Tidung selama periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Indikator ini menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sehingga dapat menunjukkan seberapa jauh kondisi penduduk miskin dari standar kebutuhan minimum.

Selanjutnya, untuk melihat tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, disajikan tabel di bawah mengenai tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Tana Tidung. Indikator ini memberikan gambaran mengenai tingkat penyebaran pengeluaran penduduk miskin.

Tabel 3.5

Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Tana Tidung

No	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Tingkat Keparahannya Kemiskinan	0,02	0,07	0,15
2	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Provinsi	0,11	0,19	0,29
3	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Nasional	0,38	0,35	0,32
4	Peringkat Provinsi	5	4	3
5	Peringkat Nasional	546	531	391

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tana Tidung

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah melakukan beberapa upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, antara lain telah merencanakan Program/Kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan alokasi anggaran sebesar Rp362.297.951.708,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp327.321.502.521,22 atau 90,35%. Rincian program/kegiatan di bidang pengentasan kemiskinan tersebut disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel 3.6
Rekapitulasi Program/Kegiatan Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten Tana Tidung TA 2025

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	18.507.133.620,00	17.895.259.460,00	96,69
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17.261.225.620,00	16.703.240.760,00	96,77
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	971.524.200,00	827.550.150,00	85,18
1.03.02.2.01.0113	Pembangunan Kanal Banjir	16.289.701.420,00	15.875.690.610,00	97,46
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.245.908.000,00	1.192.018.700,00	95,67
1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	349.992.000,00	320.990.000,00	91,71
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	895.916.000,00	871.028.700,00	97,22
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.558.325.600,00	6.171.264.175,00	81,65
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	7.558.325.600,00	6.171.264.175,00	81,65
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	5.546.153.600,00	4.214.577.500,00	75,99
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.894.380.000,00	1.839.346.675,00	97,09
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	117.792.000,00	117.340.000,00	99,62
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.126.378.250,00	1.847.488.619,97	86,88
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.126.378.250,00	1.847.488.619,97	86,88
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	579.826.600,00	486.239.820,00	83,86
1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	189.997.250,00	84.468.540,00	44,46
1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.356.554.400,00	1.276.780.259,97	94,12
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	9.092.148.067,00	8.882.064.239,30	97,69
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.092.148.067,00	8.882.064.239,30	97,69
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	9.092.148.067,00	8.882.064.239,30	97,69



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	175.181.340.588,00	162.642.226.643,29	92,84
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	175.181.340.588,00	162.642.226.643,29	92,84
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	351.006.000,00	306.379.000,00	87,29
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	445.003.100,00	396.561.000,00	89,11
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	172.513.579.463,00	161.050.224.643,29	93,36
1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1.062.910.025,00	587.162.000,00	55,24
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	808.842.000,00	301.900.000,00	37,32
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	7.000.902.000,00	5.867.560.840,00	83,81
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	7.000.902.000,00	5.867.560.840,00	83,81
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	7.000.902.000,00	5.867.560.840,00	83,81
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	105.844.445.594,00	94.671.241.738,02	89,44
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	105.844.445.594,00	94.671.241.738,02	89,44
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	41.792.820.558,00	38.821.931.775,38	92,89
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	47.068.111.016,00	42.137.276.947,38	89,52
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	9.981.508.156,00	8.173.204.010,26	81,88
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	503.072.220,00	489.982.000,00	97,40
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	6.498.933.644,00	5.048.847.005,00	77,69
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.985.340.624,00	3.923.632.289,20	98,45
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	2.566.067.524,00	2.525.607.489,20	98,42
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	2.373.671.324,00	2.336.907.489,20	98,45



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	192.396.200,00	188.700.000,00	98,08
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	231.267.900,00	228.333.200,00	98,73
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	99.482.300,00	97.678.200,00	98,19
1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	131.785.600,00	130.655.000,00	99,14
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.188.005.200,00	1.169.691.600,00	98,46
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.188.005.200,00	1.169.691.600,00	98,46
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	243.817.500,00	241.171.819,26	98,91
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	243.817.500,00	241.171.819,26	98,91
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	243.817.500,00	241.171.819,26	98,91
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6.341.754.898,00	6.144.840.922,16	96,89
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.268.241.000,00	1.111.428.767,00	87,64
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1.268.241.000,00	1.111.428.767,00	87,64
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5.073.513.898,00	5.033.412.155,16	99,21
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.418.050.000,00	2.401.300.000,00	99,31
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	2.655.463.898,00	2.632.112.155,16	99,12
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	4.301.889.414,00	4.125.150.119,05	95,89
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	4.301.889.414,00	4.125.150.119,05	95,89
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	4.301.889.414,00	4.125.150.119,05	95,89
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	752.254.880,00	724.551.410,00	96,32
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	720.318.180,00	694.416.210,00	96,40
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.742.500,00	28.484.000,00	92,65
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	44.917.500,00	44.020.000,00	98,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	51.242.280,00	49.513.600,00	96,63
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	35.644.000,00	34.961.870,00	98,09
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	557.771.900,00	537.436.740,00	96,35
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	9.734.000,00	8.346.400,00	85,74
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	9.734.000,00	8.346.400,00	85,74
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	22.202.700,00	21.788.800,00	98,14
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	22.202.700,00	21.788.800,00	98,14
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	19.257.004.473,00	12.245.760.320,97	63,59
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	82.453.900,00	81.696.261,00	99,08
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	82.453.900,00	81.696.261,00	99,08
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	916.053.573,00	892.752.399,00	97,46
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	707.113.352,00	707.070.000,00	99,99
1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	37.035.800,00	31.075.800,00	83,91
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	48.714.200,00	47.474.800,00	97,46
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	95.746.221,00	85.451.599,00	89,25
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	27.444.000,00	21.680.200,00	79,00
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	42.885.000,00	41.935.000,00	97,78
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	13.430.000,00	13.430.000,00	100,00
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	3.280.000,00	3.280.000,00	100,00
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	26.175.000,00	25.225.000,00	96,37
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	18.215.612.000,00	11.229.376.660,97	61,65
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	18.198.172.000,00	11.215.596.660,97	61,63



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	6.750.000,00	5.740.000,00	85,04
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	10.690.000,00	8.040.000,00	75,21
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	339.987.900,00	338.338.900,00	99,51
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	339.987.900,00	338.338.900,00	99,51
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	339.986.900,00	338.338.900,00	99,52
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000,00	0,00	0,00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	223.956.100,00	170.931.240,00	76,32
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	223.956.100,00	170.931.240,00	76,32
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	223.956.100,00	170.931.240,00	76,32
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	244.193.000,00	231.842.120,00	94,94
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	244.193.000,00	231.842.120,00	94,94
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	244.193.000,00	231.842.120,00	94,94
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	175.566.000,00	173.977.000,00	99,09
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	175.566.000,00	173.977.000,00	99,09
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	175.566.000,00	173.977.000,00	99,09
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	162.640.000,00	147.891.000,00	90,93
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	24.338.000,00	23.736.000,00	97,53



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	24.338.000,00	23.736.000,00	97,53
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	115.652.000,00	103.565.000,00	89,55
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	115.652.000,00	103.565.000,00	89,55
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.650.000,00	20.590.000,00	90,91
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	22.650.000,00	20.590.000,00	90,91
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	10.000.000,00	9.900.000,00	99,00
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.900.000,00	99,00
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.900.000,00	99,00
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	238.020.000,00	211.330.000,00	88,79
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	77.162.000,00	77.160.000,00	100,00
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	77.162.000,00	77.160.000,00	100,00
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	114.488.000,00	95.230.000,00	83,18
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	114.488.000,00	95.230.000,00	83,18
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.370.000,00	38.940.000,00	83,98
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	46.370.000,00	38.940.000,00	83,98



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	472.418.900,00	420.456.225,00	89,00
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	175.354.200,00	135.515.960,00	77,28
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	161.578.000,00	130.971.160,00	81,06
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	13.776.200,00	4.544.800,00	32,99
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	188.790.000,00	183.537.265,00	97,22
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	188.790.000,00	183.537.265,00	97,22
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	108.274.700,00	101.403.000,00	93,65
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	108.274.700,00	101.403.000,00	93,65
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	15.670.500,00	13.164.940,00	84,01
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	15.670.500,00	13.164.940,00	84,01
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	15.670.500,00	13.164.940,00	84,01
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	42.763.800,00	41.458.500,00	96,95
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	42.763.800,00	41.458.500,00	96,95
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	42.763.800,00	41.458.500,00	96,95
Jumlah		362.297.951.708,00	327.321.502.521,22	90,35

Sumber Dokumen: BPKAD dan BAPPEDA LITBANG Kabupaten Tana Tidung

Program penanggulangan kemiskinan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah rumah tangga, keluarga, dan atau individu dengan kategori miskin berdasarkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Daerah berupa pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

3.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari:

- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
- Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tana Tidung tahun 2025, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tana Tidung

No	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,24	3,67	3,68
2	Tingkat Pengangguran Provinsi	4,01	3,90	3,85
3	Tingkat Pengangguran Nasional	5,32	4,91	4,85
4	Peringkat Provinsi	3	3	3

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tana Tidung

Tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tana Tidung untuk tahun 2024 lebih rendah dibandingkan angka TPT tahun 2025. Jika dibandingkan TPT tingkat Provinsi/Nasional menunjukkan bahwa angka TPT Kabupaten Tana Tidung lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi/Nasional. Berikut ini disajikan angka pengangguran berdasarkan penyebaran desa kota, tingkat pendidikan dan jenis kelamin.

Tabel 3.8
Angka Pengangguran Berdasarkan Penyebaran Desa Kota, Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Klasifikasi TPT	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota
1.	Tingkat Pendidikan						
	a.	SD ke bawah	172	-	68	-	81
	b.	SMP	39	-	166	-	33
	c.	SMA Umum	205	-	215	-	192
	d.	SMA Kejuruan	54	-	-	-	17
	e.	Diploma I/II/III	-	-	-	-	-
	f.	Universitas	21	-	105	-	244



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Klasifikasi TPT	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota
2.	Jenis Kelamin						
	a. Laki-Laki	291	-	365	-	369	-
	b. Perempuan	200	-	189	-	198	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tana Tidung

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah menerapkan strategi dalam upaya mewujudkan target penurunan tingkat pengangguran terbuka yaitu dengan menganggarkan program/kegiatan dalam upaya mengatasi tingkat pengangguran terbuka pada APBD TA 2025 senilai Rp764.175.942,00 dan telah merealisasikannya senilai Rp708.174.864,00 atau 92,67%. Rincian program/kegiatan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Rekapitulasi Program/Kegiatan dalam Upaya Menekan Angka Pengangguran
Kabupaten Tana Tidung TA 2025

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	5.000.000,00	0,00	0,00
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	5.000.000,00	0,00	0,00
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	5.000.000,00	0,00	0,00
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	204.394.000,00	201.189.600,00	98,43
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	204.394.000,00	201.189.600,00	98,43
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	204.394.000,00	201.189.600,00	98,43
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	66.465.400,00	59.891.000,00	90,11
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	6.300.000,00	0,00	0,00
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	6.300.000,00	0,00	0,00
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	60.165.400,00	59.891.000,00	99,54
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	60.165.400,00	59.891.000,00	99,54
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	488.316.542,00	447.094.264,00	91,56
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	38.848.000,00	38.664.000,00	99,53
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	38.848.000,00	38.664.000,00	99,53



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	449.468.542,00	408.430.264,00	90,87
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.476.000,00	4.452.000,00	99,46
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.528.291,00	60.495.682,00	99,95
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	384.464.251,00	343.482.582,00	89,34
Jumlah		764.175.942,00	708.174.864,00	92,67

Sumber Dokumen: BPKAD dan BAPPEDA_LITBANG Kabupaten Tana Tidung

Melalui pelaksanaan program/kegiatan tersebut, tingkat pengangguran terbuka Pemerintah Kabupaten Tana Tidung masih dipertahankan di bawah Nasional.

3.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 adalah sebesar 71,86 poin yang berarti masuk kategori (tinggi) dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.10
Indeks Pembangunan Manusia

No	Capaian IPM	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Kabupaten/Kota	70,06	70,95	71,86
2	Provinsi	72,88	73,41	74,04
3	Indonesia/Nasional	74,39	75,02	75,90
4	Peringkat Provinsi	4	4	4



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Capaian IPM	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Kabupaten/Kota	70,06	70,95	71,86
2	Provinsi	72,88	73,41	74,04
3	Indonesia/Nasional	74,39	75,02	75,90
5	Peringkat Nasional	381	366	N/A

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tana Tidung

Tabel di atas menunjukkan adanya tren yang fluktuatif atas pencapaian IPM di Kabupaten Tana Tidung. IPM di Kabupaten Tana Tidung pada saat ini berada pada urutan 4 dari 5 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dan berada pada urutan 366 untuk peringkat nasional dari 416 kabupaten dan 98 kota yang ada di Indonesia.

Tabel 3.11
IPM Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Wilayah Kabupaten/Kota
Periode Tahun 2023 s.d. 2025

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Malinau	74,00	74,72	75,21
2	Bulungan	73,20	73,83	74,53
3	Tana Tidung	70,06	70,95	71,86
4	Nunukan	68,43	69,27	69,87
5	Tarakan	77,61	78,03	78,62
Kalimantan Utara		72,88	73,41	74,04

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Tabel di atas, menunjukkan tren capaian IPM Provinsi Kalimantan Utara dalam periode tahun 2023 s.d. 2025 yang mengalami fluktuasi dimana Kabupaten Tana Tidung menduduki peringkat keempat. Berikut disajikan unsur pembentuk IPM yang meliputi kesehatan, pendidikan dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan dan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Tana Tidung

No	Indikator	Tahun		
		2023	2024	2025
1.	Kesehatan-Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir	73,47	73,51	73,64
2.	Pendidikan			
	a. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,04	9,24	9,41
	b. Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,39	12,61	12,85
3.	Pengeluaran per Kapita per Tahun Disesuaikan	8.386.000	8.707.000	9.037.000
Indeks Pembangunan Manusia		70,06	70,95	71,86

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tana Tidung



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Indikator Kesehatan (UHH), menunjukkan adanya tren yang meningkat. Umur harapan hidup manusia yang tinggal di Kabupaten Tana Tidung mencapai 73,64 tahun pada tahun 2025. Terkait pencapaian indikator ini, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah melakukan upaya untuk meningkatkan umur harapan hidup sejak lahir dengan merencanakan program/kegiatan dalam APBD sebagai berikut.

Tabel 3.13
Program/Kegiatan dalam Upaya Meningkatkan UHH TA 2025

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	33.146.031.455,00	29.688.972.028,00	89,57
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	23.659.277.055,00	21.168.008.568,00	89,47
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	3.223.556.000,00	3.125.306.388,00	96,95
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10.322.240.300,00	9.689.339.022,00	93,87
1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	3.149.273.443,00	3.114.439.000,00	98,89
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1.565.368.400,00	1.500.893.000,00	95,88
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	933.264.045,00	909.226.160,00	97,42
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	475.064.000,00	344.202.715,00	72,45
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.858.573.867,00	2.359.956.283,00	61,16
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	131.937.000,00	124.646.000,00	94,47
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.941.564.300,00	7.992.418.489,00	89,39
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	62.285.500,00	40.620.000,00	65,22
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	153.656.000,00	142.386.271,00	92,67
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	107.277.200,00	79.229.018,00	73,85
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	27.807.000,00	13.051.600,00	46,94
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	80.676.700,00	59.016.700,00	73,15
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	7.860.000,00	7.740.000,00	98,47



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	6.300.000,00	6.200.000,00	98,41
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	7.860.000,00	7.740.000,00	98,47
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.780.000,00	3.720.000,00	98,41
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	27.490.000,00	19.350.000,00	70,39
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	25.376.000,00	25.300.000,00	99,7
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	72.634.000,00	71.325.000,00	98,2
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.070.493.200,00	790.797.600,00	73,87
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	29.846.000,00	27.846.000,00	93,30
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	654.701.600,00	603.213.000,00	92,14
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	92.436.800,00	79.376.800,00	85,87
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	415.547.000,00	399.755.000,00	96,20
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	45.242.700,00	44.842.700,00	99,12
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	134.115.400,00	126.285.400,00	94,16
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.017.460.000,00	4.630.900.400,00	92,30
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	36.093.000,00	22.503.000,00	62,35
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	55.746.000,00	45.026.000,00	80,77
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	620.807.200,00	619.579.000,00	99,80
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	186.073.000,00	126.615.000,00	68,05
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	156.592.100,00	145.028.978,00	92,62
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	156.592.100,00	145.028.978,00	92,62
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	388.598.000,00	383.515.993,00	98,69
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	106.754.000,00	102.682.772,00	96,19
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	281.844.000,00	280.833.221,00	99,64



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.734.966.992,00	1.911.557.869,00	69,89
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2.317.860.800,00	1.539.664.750,00	66,43
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.876.000,00	1.770.000,00	16,27
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2.279.028.800,00	1.520.844.750,00	66,73
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	27.956.000,00	17.050.000,00	60,99
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	417.106.192,00	371.893.119,00	89,16
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	417.106.192,00	371.893.119,00	89,16
01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	403.401.676,00	318.818.552,00	79,03
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	25.768.600,00	25.298.600,00	98,18
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	25.768.600,00	25.298.600,00	98,18
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	112.457.640,00	82.252.540,00	73,14
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	112.457.640,00	82.252.540,00	73,14
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100.141.000,00	74.642.776,00	74,54
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100.141.000,00	74.642.776,00	74,54



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	165.034.436,00	136.624.636,00	82,79
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	165.034.436,00	136.624.636,00	82,79
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	307.010.067,00	272.660.646,00	88,81
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	193.105.667,00	177.562.246,00	91,95
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	193.105.667,00	177.562.246,00	91,95
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	72.955.400,00	54.939.400,00	75,31
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	72.955.400,00	54.939.400,00	75,31
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.949.000,00	40.159.000,00	98,07
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	40.949.000,00	40.159.000,00	98,07
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	11.791.214.412,00	11.295.790.525,00	95,80
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.342.873.638,00	2.211.332.051,00	94,39
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	218.050.000,00	186.750.000,00	85,65
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.124.823.638,00	2.024.582.051,00	95,28
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.448.340.774,00	9.084.458.474,00	96,15
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	9.448.340.774,00	9.084.458.474,00	96,15
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	168.716.000,00	126.208.275,00	74,81
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	168.716.000,00	126.208.275,00	74,81
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	168.716.000,00	126.208.275,00	74,81
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	271.767.100,00	194.232.783,00	71,47



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	271.767.100,00	194.232.783,00	71,47
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	135.465.100,00	124.800.000,00	92,13
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	136.302.000,00	69.432.783,00	50,94
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	510.285.100,00	468.342.818,00	91,78
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	288.566.900,00	261.697.818,00	90,69
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	60.654.900,00	47.864.220,00	78,91
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	69.682.000,00	64.278.000,00	92,24
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	47.400.000,00	47.400.000,00	100
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	49.510.000,00	46.495.000,00	93,91
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	61.320.000,00	55.660.598,00	90,77
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	98.489.000,00	96.599.000,00	98,08
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	98.489.000,00	96.599.000,00	98,08
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	63.694.000,00	51.194.000,00	80,37
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	19.440.000,00	18.540.000,00	95,37
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	29.466.000,00	19.166.000,00	65,04
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	14.788.000,00	13.488.000,00	91,21
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	59.535.200,00	58.852.000,00	98,85
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.935.000,00	3.842.000,00	97,64
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	55.600.200,00	55.010.000,00	98,94



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	332.400.000,00	301.740.570,00	90,78
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	332.400.000,00	301.740.570,00	90,78
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	108.000.000,00	105.657.570,00	97,83
2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	224.400.000,00	196.083.000,00	87,38
Jumlah		49.665.792.802,00	44.578.324.066,00	89,76

Sumber Dokumen: BPKAD dan BAPPEDA_LITBANG Kabupaten Tana Tidung

- b. Indikator Pendidikan ditunjukkan dengan pencapaian angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), yang dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah melakukan upaya untuk meningkatkan RLS dan HLS dengan menganggarkan program/kegiatan dalam APBD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.14
Program/Kegiatan dalam Upaya Meningkatkan RLS dan HLS TA 2025

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	124.923.688.179,99	104.734.665.101,00	83,84
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	41.387.149.702,39	31.434.063.370,00	75,95
1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	445.128.125,00	245.128.125,00	55,07
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.741.562.490,00	2.478.276.610,00	66,24
1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.376.600.000,00	1.326.088.900,00	96,33
1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	238.000.000,00	235.342.620,00	98,88
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	354.969.000,00	253.384.986,00	71,38
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.083.238.000,00	978.488.990,00	90,33
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4.074.836.000,00	3.978.795.350,00	97,64
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	58.050.000,00	57.750.000,00	99,48



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.114.586.000,00	902.229.398,00	80,95
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	532.190.000,00	483.976.180,00	90,94
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	4.246.996.000,00	3.609.343.727,00	84,99
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	982.737.900,00	577.122.950,00	58,73
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	62.304.600,00	54.084.000,00	86,81
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	300.000.000,00	196.500.000,00	65,50
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	583.416.500,00	473.335.659,00	81,13
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	58.130.000,00	56.033.000,00	96,39
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	323.762.000,00	168.268.500,00	51,97
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	150.400.000,00	148.396.000,00	98,67
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.500.000.000,00	1.325.821.629,00	88,39
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	4.552.572.587,39	2.338.154.093,00	51,36
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.314.000.000,00	1.122.286.250,00	85,41
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	882.210.000,00	691.532.950,00	78,39
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	415.000.000,00	411.098.900,00	99,06
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	12.012.050.000,00	8.455.010.093,00	70,39
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	984.410.500,00	867.614.460,00	88,14
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	72.412.115.760,00	62.577.905.808,00	86,42
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	30.386.759.600,00	25.760.049.331,00	84,77
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7.059.053.760,00	6.773.773.297,00	95,96
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	2.948.643.500,00	2.864.271.443,00	97,14
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	842.164.000,00	597.601.460,00	70,96
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	9.745.800.000,00	7.418.356.039,00	76,12
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	5.825.968.900,00	5.277.459.700,00	90,59



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.300.114.000,00	4.296.787.500,00	99,92
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.580.130.000,00	1.161.989.608,00	73,54
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2.653.276.000,00	2.357.802.640,00	88,86
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	2.385.050.000,00	2.180.274.715,00	91,41
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	226.000.000,00	165.318.000,00	73,15
1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	122.550.000,00	98.179.000,00	80,11
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	187.140.000,00	126.153.000,00	67,41
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1.189.466.000,00	801.429.200,00	67,38
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	260.000.000,00	136.954.000,00	52,67
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.700.000.000,00	1.564.702.875,00	92,04
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.000.000.000,00	996.804.000,00	99,68
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.052.735.057,60	8.821.759.179,00	97,45
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	583.518.060,00	575.751.679,00	98,67
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	97.781.800,00	96.400.000,00	98,59
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	474.992.800,00	473.347.200,00	99,65
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.198.100.000,00	1.196.300.000,00	99,85
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.602.433.200,00	1.545.353.602,00	96,44
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	187.907.000,00	181.313.000,00	96,49
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.046.632.000,00	1.011.530.000,00	96,65
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	293.338.000,00	287.871.000,00	98,14
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	341.790.000,00	313.961.101,00	91,86
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.700.000,00	98.600.000,00	97,91
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	316.880.000,00	296.177.000,00	93,47
1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	133.608.000,00	130.768.500,00	97,87
1.01.02.2.03.0031	Penyediaan infrastruktur TIK	26.093.900,00	26.000.000,00	99,64



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	438.260.000,00	406.778.000,00	92,82
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	317.909.600,00	317.791.507,00	99,96
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	650.085.000,00	642.808.760,00	98,88
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	337.800.000,00	333.359.000,00	98,69
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	334.799.997,60	334.608.330,00	99,94
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	570.105.700,00	553.040.500,00	97,01
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.071.687.660,00	1.900.936.744,00	91,76
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	200.000.000,00	196.950.479,00	98,48
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	84.284.000,00	71.578.500,00	84,93
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	256.836.000,00	254.107.909,00	98,94
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	344.710.000,00	340.710.000,00	98,84
1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	29.806.000,00	20.700.000,00	69,45
1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	35.908.000,00	7.000.000,00	19,49
1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	40.427.700,00	36.615.000,00	90,57
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	405.690.300,00	372.392.500,00	91,79
1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	7.900.000,00	6.970.000,00	88,23
1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	40.756.000,00	39.131.000,00	96,01
1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	60.000.000,00	36.998.000,00	61,66
1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	103.136.000,00	99.887.000,00	96,85
1.01.02.2.04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	88.025.860,00	54.844.356,00	62,30
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	269.724.000,00	262.263.000,00	97,23
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	74.838.000,00	72.450.000,00	96,81
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	29.645.800,00	28.339.000,00	95,59



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
01.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	45.613.900,00	44.610.000,00	97,80
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	45.613.900,00	44.610.000,00	97,80
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25.000.000,00	24.810.000,00	99,24
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	20.613.900,00	19.800.000,00	96,05
01.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	88.700.000,00	64.375.000,00	72,58
1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	88.700.000,00	64.375.000,00	72,58
1.01.06.2.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	88.700.000,00	64.375.000,00	72,58
Jumlah		125.058.002.079,99	104.843.650.101,00	83,84

Sumber Dokumen: BPKAD dan BAPPEDA_LITBANG Kabupaten Tana Tidung

- c. Indikator Pengeluaran per kapita per tahun disesuaikan dalam tiga tahun terakhir cenderung menurun. Terkait dengan indikator ini, Kabupaten Tana Tidung juga telah mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan dalam rangka meningkatkan indikator ini senilai Rp852.265.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.15
Program/Kegiatan dalam Upaya Meningkatkan Angka Pengeluaran
per Kapita Disesuaikan

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	390.406.000,00	342.153.300,00	87,64
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	390.406.000,00	342.153.300,00	87,64
2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	109.887.200,00	86.068.700,00	78,32
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	280.518.800,00	256.084.600,00	91,29
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN	70.248.000,00	57.337.200,00	81,62
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	70.248.000,00	57.337.200,00	81,62



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Kode	Nama Program/Kegiatan Terkait	Anggaran	Realisasi	%
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	70.248.000,00	57.337.200,00	81,62
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	71.455.000,00	65.381.800,00	91,50
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	71.455.000,00	65.381.800,00	91,50
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	55.319.000,00	49.517.400,00	89,51
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	16.136.000,00	15.864.400,00	98,32
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	320.156.500,00	223.018.800,00	69,66
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	320.156.500,00	223.018.800,00	69,66
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	320.156.500,00	223.018.800,00	69,66
Jumlah		852.265.500,00	687.891.100,00	80,71

Sumber Dokumen: BPKAD dan BAPPEDA LITBANG Kabupaten Tana Tidung

3.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karena itu, dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010, dan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.16
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Tidung TA 2023 s.d. 2025

No	Uraian	Provinsi/Kabupaten/Kota		
		2023	2024	2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB (%)	4,86	6,21*	3,73**
2	Peringkat Provinsi	2	1	4

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tana Tidung



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Selama kurun waktu tahun 2023 s.d. 2025, laju perekonomian Kabupaten Tana Tidung mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,93%. Sedangkan pada tingkat provinsi, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Tidung menempati urutan keempat dari laju pertumbuhan Kabupaten/Kota lainnya di wilayah Provinsi. Hal ini sejalan dengan tujuan undang-undang otonomi daerah yakni untuk memberi keleluasan bagi pemerintah daerah terkait bagaimana cara daerah ikut berperan dalam pembangunan ekonomi daerah berdasarkan pada potensi yang dimiliki daerah yang pada gilirannya dapat ikut serta dalam membangun pertumbuhan ekonomi secara luas yaitu dalam skala pembangunan ekonomi nasional.

3.1.5 Tingkat Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi empat kategori yang meliputi:

- Inflasi ringan (*Creeping Inflation*), ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
- Inflasi Sedang (*Gallopning Inflation*), sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
- Inflasi Berat (*High Inflation*), mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
- Hiperinflasi (*Hyper Inflation*), sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Tingkat Inflasi Kabupaten Tana Tidung tidak dapat kami klasifikasikan, karena berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara inflasi berdasarkan gabungan Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan.

3.1.6 Struktur Perekonomian Kabupaten Tana Tidung

Struktur perekonomian Kabupaten Tana Tidung dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel 3.17
PDRB Seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Dalam Juta

No	URAIAN	2023	2024*	2025**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.125,54	2.227,21	2.284,93
2	Pertambangan dan Penggalian	4.134,12	3.718,40	3.688,79
3	Industri Pengolahan	179,94	349,17	345,51
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,62	1,88	1,90
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,04	1,13	1,29
6	Konstruksi	1.398,95	1.575,18	1.801,98
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	400,52	442,25	494,17
8	Transportasi dan Pergudangan	50,92	55,95	62,84
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,15	18,11	18,81
10	Informasi dan Komunikasi	3,13	3,99	4,33
11	Jasa Keuangan	8,66	9,19	9,85
12	<i>Real Estate</i>	45,50	48,36	51,30
13	Jasa Perusahaan	1,17	1,23	1,24
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	765,02	823,84	826,81
15	Jasa Pendidikan	117,17	125,23	125,50
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,01	5,43	6,01
17	Jasa Lainnya	29,74	32,31	34,72
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)		9.284,20	9.438,85	9.759,98
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		9.236,45	9.237,77	9.574,34
18	Peringkat Provinsi	5	5	5

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tana Tidung

3.2. Kondisi Ekonomi Tahun 2025

Kebijakan desentralisasi pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ikut memicu pergerakan ekonomi daerah menuju kondisi perekonomian daerah yang semakin baik. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah dalam satu tahun.

Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel 3.18

PDRB atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021 s.d. 2025

Tahun	Dengan Migas	Tanpa Migas
2021	6.734,16 miliar	6.717,29 miliar
2022	8.851,81 miliar	8.830,67 miliar
2023	9.284,20 miliar	9.236,45 miliar
2024*	9.438,85 miliar	9.237,77 miliar
2025**	9.759,98 miliar	9.574,34 miliar

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tana Tidung

Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, sebagai berikut.

Tabel 3.19

PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2021 s.d. 2025

Tahun	Dengan Migas	Tanpa Migas
2021	3.813,90 miliar	3.804,90 miliar
2022	4.016,24 miliar	4.006,48 miliar
2023	4.211,63 miliar	4.187,98 miliar
2024*	4.473,03 miliar	4.338,26 miliar
2025**	4.640,00 miliar	4.487,40 miliar

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tana Tidung

3.2.1. Lingkungan Eksternal dan Internal Tahun 2021 – 2025

Gambaran ekonomi Kabupaten Tana Tidung tahun 2021 - 2025 dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan eksternal antara lain kepastian hukum, liberalisasi perdagangan dan kebijakan birokrasi investasi, kebijakan moneter yang menyebabkan tingginya suku bunga perbankan, kurs mata uang rupiah, tidak stabilnya harga komoditas dan insentif perpajakan yang belum kompetitif. Sedangkan lingkungan internal antara lain pemilihan Kepala Daerah secara langsung, peraturan-peraturan daerah yang memberatkan bagi investor serta kondisi infrastruktur di daerah yang kurang mendukung pertumbuhan ekonomi.

3.2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Tana Tidung selama 5 (lima) tahun terakhir ini selalu mengalami pertumbuhan positif meskipun terjadi fluktuasi di setiap tahunnya. Hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan Dengan Migas Kabupaten Tana Tidung tahun 2025 dengan laju pertumbuhan ekonomi senilai Rp4.640,00 miliar atau sebesar 3,73% dari Tahun 2023 yang memiliki laju pertumbuhan ekonominya senilai Rp4.473,03 miliar atau sebesar 6,21% dari tahun 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya laju pertumbuhan ekonomi pada lima tahun terakhir periode 2021 s.d. 2025 setiap tahunnya mengalami peningkatan rata-rata sebesar Rp4.230,96 miliar atau 4,66%. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang naik dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa adanya keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah daerahnya. Lebih lanjut dapat disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 3.20
Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan PDRB atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2021 s.d. 2025

Dalam Juta

Kategori	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.146,65	1.147,92	1.146,84	1.198,09	1.226,92
B	Pertambangan dan Penggalian	1.256,93	1.385,30	1.483,67	1.437,56	1.449,37
C	Industri Pengolahan	82,22	84,27	99,19	215,11	235,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,74	0,84	0,96	1,09	1,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,61	0,63	0,69	0,75	0,82
F	Konstruksi	591,02	614,77	678,58	760,77	844,91
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	190,14	206,21	213,95	234,32	258,25
H	Transportasi dan Pergudangan	27,96	30,21	30,64	33,29	36,64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,68	8,44	8,74	9,38	9,55
J	Informasi dan Komunikasi	1,61	1,74	1,87	2,18	2,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,43	4,88	5,62	5,95	6,28
L	Real Estate	24,56	25,73	26,41	27,79	29,17
M,N	Jasa Perusahaan	0,63	0,67	0,70	0,73	0,72
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	397,98	418,59	425,35	452,89	446,15
P	Jasa Pendidikan	60,54	64,23	65,82	69,56	67,79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,10	3,14	3,18	3,32	3,55
R,S,T,U	Jasa lainnya	17,11	18,67	19,42	20,25	21,14
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		3.813,90	4.016,24	4.211,63	4.473,03	4.640,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		3.804,19	4.006,48	4.187,98	4.338,26	4.487,40

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tana Tidung



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

3.3. Kebijakan Keuangan

Kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Dinamika ini dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan struktur penerimaan daerah, fluktuasi kebijakan transfer ke daerah, serta kondisi ekonomi makro.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menetapkan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk lima tahun kedepan yang berfokus pada kemandirian dan efisiensi yang dijabarkan dalam empat pilar utama yaitu, kebijakan pada sisi pengelolaan pendapatan daerah yang mana kebijakan diarahkan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pada sisi kebijakan pengelolaan belanja daerah, pengalokasian belanja daerah diarahkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas melalui pendekatan “*Money Follow Program*” yang berorientasi pada pemenuhan prioritas pembangunan dengan memastikan alokasi anggaran berfokus pada program strategis yang memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Dan peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu menjamin ketersediaan anggaran untuk pemenuhan standar pelayanan minimal dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Pada sisi kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah, kebijakan pembiayaan difungsikan sebagai instrumen untuk menutup celah defisit atau memanfaatkan surplus anggaran dengan manajemen silpa yaitu penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) secara cermat untuk mendukung kesinambungan fiskal. Kemudian investasi dan pembiayaan terukur yaitu menata penutupan defisit anggaran dengan tetap menjaga rasio likuiditas dan kapasitas bayar daerah yang sehat. Pada sisi kebijakan umum anggaran (KUA), menyusun kerangka kebijakan yang menyelaraskan antara target pendapatan dengan kebutuhan belanja dengan cara sinkronisasi kebijakan yaitu menjamin keselarasan antara prioritas daerah dengan kebijakan fiskal nasional dan provinsi dan disiplin anggaran dengan memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja guna mencapai opini laporan keuangan yang berkualitas.

Arah kebijakan keuangan daerah akan dibagi dalam empat pokok arah kebijakan yaitu pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah, pengelolaan pembiayaan daerah dan kebijakan umum anggaran.

3.3.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dibagi dalam tiga struktur kelompok pendapatan yaitu PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kondisi umum saat ini atas pendapatan daerah adalah dana perimbangan mendominasi jumlah keseluruhan pendapatan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah memberikan ruang kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk menggali potensi daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tanah dan Bangunan (BPHTB) sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap Dana Perimbangan.

Penurunan jumlah pendapatan secara keseluruhan dari tahun ke tahun harus segera diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara agar proses percepatan pembangunan pasca pemekaran wilayah Kalimantan Utara dapat segera diatasi.

Arah pengelolaan pendapatan daerah pada tahun 2021-2025 ditujukan pada keseimbangan struktur antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, serta peningkatan PAD rata-rata 10% per tahun.

3.3.1.1. Keseimbangan Struktur Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan

Berdasarkan kondisi dan situasi terkini, pengelolaan pendapatan daerah diarahkan untuk menjaga keseimbangan komposisi sumber penerimaan daerah antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan guna mendukung penguatan kapasitas fiskal daerah. Hingga akhir Tahun Anggaran 2025, komposisi pendapatan daerah tercatat sebesar 40% PAD dan 60% Dana Perimbangan. Capaian tersebut selanjutnya menjadi landasan dalam penyusunan arah kebijakan pendapatan daerah pada tahun berikutnya, khususnya dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

Dalam rangka mendukung pencapaian arah kebijakan dimaksud, Pemerintah Daerah melaksanakan langkah-langkah kebijakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan menganut prinsip:

- Tidak memberatkan masyarakat dan pengusaha terutama usaha kecil menengah;
- Tidak merusak lingkungan dan sumber daya alam;
- Penerapan tarif progresif dan proporsional; dan
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam penatausahaan pendapatan.

Intensifikasi ditekankan pada perbaikan sistem pemungutan pajak/retribusi, memperkecil nilai tunggakan pajak, penegakan perda PAD dan menyederhanakan birokrasi izin-izin usaha baru. Adapun potensi retribusi yang masih bisa memberikan kontribusi signifikan dalam PAD untuk 5 (lima) tahun mendatang adalah retribusi hotel dan restoran.

Sedangkan ekstensifikasi difokuskan pada pemanfaatan potensi-potensi daerah baru. Hasil riset dan kajian terkait regulasi PAD telah ditindaklanjuti dan dilegalkan melalui Peraturan Daerah, sehingga menjadi dasar hukum yang sah untuk pengelolaan dan pemungutan PAD dari sumber-sumber baru tersebut. Langkah ini memastikan setiap potensi pendapatan daerah dapat dimanfaatkan secara legal, akuntabel, dan transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

3.3.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Tana Tidung sebagai peningkatan sumber daya, pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan, jasa, industri, perikanan dan pariwisata, maka arah pengelolaan belanja daerah 5 (lima) tahun mendatang difokuskan pada peranan belanja daerah dalam memberikan *multiplier effect* bagi pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah sebagai instrumen fiskal diharapkan dapat memberikan dorongan optimal bagi dunia usaha di berbagai sektor. Selain itu, belanja daerah diharapkan dapat memberi kontribusi bagi peningkatan sumber daya manusia sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang cerdas dan madani, serta infrastruktur yang handal dan berwawasan lingkungan.

3.3.2.1. Belanja Daerah Diarahkan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkesinambungan

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan ditandai semakin terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Dengan demikian belanja daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung disinergikan dengan belanja daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sehingga diharapkan dapat memberikan dorongan pada laju pertumbuhan ekonomi agar perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara nasional dapat diminimalkan di Kabupaten Tana Tidung, dimana pertumbuhan ekonomi dapat terwujud seiring dibangunnya sarana dan prasarana infrastruktur yang baik sehingga mendorong investasi yang masuk ke Kabupaten Tana Tidung.

Dalam rangka mendorong investasi di Kabupaten Tana Tidung, maka pemerintah merencanakan belanja daerah 5 (lima) tahun mendatang lebih ditekankan pada upaya membangun infrastruktur sarana dan prasarana dan menambah daya tarik investasi. Belanja daerah akan diarahkan untuk menambah dan atau memperbaiki infrastruktur jalan, jembatan, drainase, pelabuhan, pergudangan, sarana pendidikan, kesehatan, perkantoran, *sport center* dan infrastruktur dasar lainnya dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan dunia usaha.

Untuk mencapai tujuan di atas maka perlu diambil kebijakan pengelolaan belanja pada tahun 2021-2025. Dengan memperhatikan asumsi dan proyeksi pendapatan di atas belanja daerah pada tahun 2025 semula diproyeksikan meningkat, namun realisasinya menunjukkan penurunan akibat penyesuaian terhadap dinamika kapasitas fiskal dan kebijakan efisiensi belanja daerah.

Besarnya belanja pembangunan ini diarahkan untuk terwujudnya infrastruktur yang memadai untuk menambah daya tarik investasi Kabupaten Tana Tidung dalam rangka pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pada akhirnya dapat menyejahterakan rakyat. Sedangkan persentase kenaikan belanja mengikuti persentase kenaikan pendapatan merupakan langkah antisipasi untuk meminimalkan anggaran defisit yang ekstrim, mengingat kondisi likuiditas kas daerah pada saat tahun ini dan tahun mendatang lebih sulit.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

3.3.3. Aras Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tana Tidung berencana menata pengelolaan pembiayaan dengan efisiensi dalam rangka mengantisipasi penurunan DBH SDA maupun kurang transfer dari Pemerintah Pusat karena tidak tercapainya target pajak secara nasional. Penataan ini sangatlah penting mengingat unsur-unsur pembiayaan makin bervariasi, tidak hanya sebatas SiLPA atau sisa lebih anggaran. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku banyak variasi pembiayaan yang bisa dikelola pemerintah seperti pinjaman daerah, obligasi daerah, penyertaan modal dan privatisasi. Pembiayaan ini semakin penting mengingat berperan dalam menutup defisit anggaran dan mencerminkan likuiditas dan solvabilitas.

Pembiayaan daerah terdiri dari dua unsur yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan pembiayaan akan menambah kemampuan keuangan daerah yang terdiri dari SiLPA awal tahun, transfer dari dana cadangan, dan penerimaan pinjaman/obligasi serta penerimaan hasil privatisasi. Sedangkan pengeluaran pembiayaan akan membebani keuangan daerah yang terdiri dari transfer ke dana cadangan, pembayaran utang dan bunga serta penyertaan modal.

3.3.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dari pembiayaan utang daerah, yang merupakan komponen penerimaan yang digunakan untuk menutup defisit APBD, dengan konsekuensi kewajiban pembayaran kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun berikutnya. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Kabupaten Tana Tidung menetapkan kebijakan bahwa penerimaan pembiayaan harus dikelola secara *prudent* (hati-hati) agar tidak memperberat beban anggaran di masa depan serta tetap menjamin stabilitas likuiditas keuangan daerah. Oleh karena itu, penerimaan pembiayaan difokuskan pada SiLPA awal tahun dan transfer dari dana cadangan. Sedangkan untuk pemanfaatan pinjaman daerah ditempatkan sebagai opsi terakhir yang akan dilakukan dengan pengkajian mendalam. prioritas tetap pada optimalisasi belanja yang efisien, sembari menunggu kelengkapan regulasi teknis terkait tata cara pinjaman dan penerbitan obligasi daerah. Apabila perangkat peraturannya sudah ada maka pemanfaatan pinjaman/ obligasi akan dikaji dahulu secara matang oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, mengingat pinjaman daerah memiliki beberapa risiko pada masa akan datang seperti likuiditas dan ketergantungan pada pihak lain. Apabila hasil kajian bahwa pinjaman memberikan hasil maksimal bagi masyarakat dan tidak mempersulit kemampuan keuangan daerah maka tidak menutup kemungkinan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung memanfaatkan pinjaman sebagai alternatif penerimaan pembiayaan untuk mengoptimalkan pembangunan, dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- a. Syarat pinjaman hendaknya dengan bunga lunak dan ada masa tenggang;
- b. Tujuan pinjaman, hendaknya mempunyai *multiplier effect* yang besar dan *cost recovery*;
- c. Sumber dana pinjaman dari pihak lain yang tidak mempunyai persyaratan politik;
- d. Transparansi tata cara pengesahan pinjaman, sehingga akan mengakibatkan biaya yang mahal/kebocoran yang mengakibatkan kerugian bagi peminjam; dan
- e. Pengawasan yang efektif dan efisien.

3.3.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan akan diarahkan dalam usaha-usaha menambah PAD. Oleh karena itu, pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada penyertaan modal dan transfer ke dana cadangan.

Penyertaan modal akan menambah PAD melalui penerimaan dividen. Sedangkan transfer ke dana cadangan akan menambah penerimaan bunga deposito dan jasa giro. Pengeluaran pembiayaan dilakukan setelah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah baik dari segi likuiditas dan solvabilitas.

3.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Dalam rangka pengelolaan APBD, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- h. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Berdasarkan peraturan perundangan di atas dan perkembangan anggaran maka kebijakan umum APBD Pemerintah Kabupaten Tana Tidung selama 5 (lima) tahun mendatang dibagi dalam 6 (enam) pokok kebijakan sebagaimana diuraikan pada paragraf di bawah ini:

3.4.1. Anggaran Merupakan Cermin dari Perencanaan

Anggaran merupakan cermin dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja (Renja SKPD). Hal ini berarti setiap anggaran yang diajukan harus berlandaskan hasil perencanaan sebelumnya. Sistem ini menjamin pencapaian visi dan tujuan Kabupaten Tana Tidung mengingat setiap perencanaan bersumber dari visi dan tujuan yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan. Selain itu, sistem ini menjamin bahwa anggaran menampung pula aspirasi masyarakat mengingat setiap perencanaan yang dihasilkan harus melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan masyarakat secara aktif.

3.4.2. Kegiatan pada Anggaran Memiliki Indikator Keberhasilan

Kegiatan-kegiatan dalam anggaran mencerminkan indikator-indikator kinerja. Hal ini menjamin bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu memiliki hasil dan manfaat. Tidak ada anggaran yang tidak bermanfaat dan mubazir, semuanya terukur. Dengan demikian, prinsip ekonomis, efektif dan efisien selalu terjaga dalam sistem penganggaran Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

3.4.3. APBD Menjamin Likuiditas dan Keseimbangan Keuangan

APBD menjamin likuiditas pada rasio di atas satu. Anggaran mencegah defisit ekstrim yang dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan. Defisit dalam anggaran dapat dilakukan selama masih bisa ditutup dengan kemampuan sendiri. Apabila terdapat defisit anggaran, pemerintah memprioritaskan pemanfaatan SILPA atau dana cadangan dalam menutup defisit.

3.4.4. APBD sebagai Instrumen Ekonomi

APBD merupakan alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Penyusunan dan penetapan APBD dimaksudkan sebagai pedoman tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengoptimalkan peranan APBD dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemampuan anggaran serta keuangan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tana Tidung akan mengembangkan pula kebijakan non anggaran yaitu memperkuat dan memperluas kemitraan. Kemitraan dengan swasta sudah merupakan tuntutan zaman sekarang ini, karena peranan pemerintah sudah mulai “berkurang”, sementara peranan swasta semakin meningkat terutama dalam sektor perekonomian.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Prinsip kerjasama (kemitraan) yang saling menguntungkan bagi pemerintahan, swasta dan masyarakat dilaksanakan melalui langkah-langkah:

- a. Perumusan model-model kemitraan yang paling tepat dilakukan;
- b. Perumusan kriteria mitra yang potensial sebagai mitra Pemerintah Kabupaten; dan
- c. Terciptanya model-model kerjasama antara pemerintah dengan swasta, pemerintah dengan masyarakat, dan antar swasta dengan masyarakat dalam kegiatan usaha ekonomi, penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan.

Banyak pendekatan yang dapat diterapkan dalam rangka meningkatkan kemitraan pemerintah-swasta, namun tidak semua jenis prasarana dan sarana dapat dikerjasamakan, ada bagian-bagian tertentu yang memungkinkan dapat dilakukan. Bagaimanapun, calon investor hanya mau diukur dengan kriteria finansial atau ekonomi, seperti *Benefit Cost Ratio (BCR)*, *Net Present Value (NPV)*, *Internal Rate of Return (IRR)*, dan *Pay Back Period*. Oleh karena itu, dimasa mendatang dituntut adanya kemampuan aparat atau pejabat pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk memberikan kondisi yang kondusif bagi swasta untuk mengadakan kemitraan di bidang penyediaan pelayanan jasa bagi masyarakat. Bentuk kerjasama dapat dilakukan melalui:

- a. *Leases and Concessions (L&C)*

Model pembiayaan ini mencakup periode yang panjang dan komitmen pendanaan yang cukup besar. Di bawah kondisi *lease*, Pemerintah menyediakan sarana/fasilitas dan kontraktor mengoperasikan sarana/peralatan. Kontraktor membayar Pemerintah untuk penggunaan sarana/peralatan selama periode kontrak, dan kontraktor berhak mengumpulkan biaya dari tarif pengoperasian tersebut.

Selanjutnya di bawah kondisi *Concessions*, hampir sama dengan *lease*, tetapi lebih memberikan kewajiban kepada kontraktor untuk menambah investasi infrastruktur. Model konsesi lebih diarahkan pada pelayanan transportasi perkotaan, air bersih, pengelolaan air limbah dan telekomunikasi.

- b. *Built, Operate and Transfer (BOT)*

Ide dari model BOT ini adalah pihak swasta diberi hak untuk membangun prasarana, mengoperasikannya (dan menerima jasa pelayanan) selama masa tertentu dan akhirnya setelah kontrak habis ditransfer menjadi milik Pemerintah. Model ini juga telah dikembangkan seperti misalnya *Build, Operate, Own, Transfer (BOOT)*.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

c. *Public Private Partnership*

Ide dari model ini adalah Pemerintah membentuk perusahaan bersama dengan swasta. Pemerintah berkontribusi tanah, prasarana yang sudah ada atau modal. Pihak swasta akan memberikan kontribusi tenaga ahli dan modal.

d. Dana Pembangunan Prasarana

Pemerintah menyediakan dana pinjaman yang dapat digunakan untuk pembangunan prasarana oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini dulu dilakukan oleh Departemen Keuangan berupa *Regional Development Account* (RDA). RDA untuk saat ini perlu diintroduksi kembali karena diperlukan dalam rangka mengatasi kejadian yang *unpredictable* dan membutuhkan pembiayaan yang besar, misalnya kebakaran pasar di suatu wilayah yang memerlukan penanganan segera dengan dana yang cukup besar.

3.4.5. APBD Menerapkan Asas Tepat Waktu, Keterbukaan dan Partisipatif

APBD Kabupaten Tana Tidung akan menerapkan asas tepat waktu, keterbukaan dan partisipatif dalam penganggaran dengan uraian sebagai berikut:

a. Asas tepat waktu

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung akan berusaha agar setiap proses penganggaran dari pembahasan sampai dengan pengesahan tepat waktu sesuai dengan jadwal pada kalender anggaran. APBD dibahas mulai sejak bulan oktober dan disahkan paling lambat bulan Desember. Sedangkan APBD perubahan dibahas mulai sejak bulan Juni dan disahkan paling lambat bulan Agustus.

b. Asas keterbukaan

Setiap pembahasan APBD akan melalui agenda pembahasan secara bertahap. Tahap pertama akan dilakukan pembahasan antara Banggar Eksekutif dengan Satuan Kerja. Tahap Kedua antara Banggar Legislatif dengan Satuan Kerja. Tahap Ketiga pembahasan antara Banggar Eksekutif dan Legislatif. APBD yang telah disahkan akan disebarluaskan pada masyarakat melalui media massa.

c. Asas partisipatif

Penyusunan anggaran akan melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat akan tercermin pada Musrenbang dari tingkat Desa sampai dengan Kabupaten. Hasil Musrenbang akan dijadikan dasar penyusunan perencanaan pembangunan yang kemudian tergambar dalam APBD. Selain itu ada pula aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD untuk kemudian dibahas dalam panitia anggaran.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

3.4.6. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD TA 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

3.4.6.1. Pendapatan Daerah

Realisasi pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah TA 2025 telah mencapai hasil yang maksimal. Hal ini tergambar pada Pendapatan Daerah TA 2025 yang ditargetkan senilai Rp1.027.212.457.453,00 Realisasi sampai dengan akhir TA 2025 tercatat senilai Rp1.078.782.452.324,00 atau 105,02%. Dengan demikian Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 diserap lebih senilai Rp51.569.994.871,00 atau 5,02%.

Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 yang tercatat senilai Rp1.483.899.695.654,45 Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp405.117.243.330,45 atau 27,30%.

3.4.6.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah TA 2025 ditargetkan senilai Rp1.433.234.595.478,90. Realisasi Belanja Daerah sampai dengan akhir TA 2025 senilai Rp1.166.511.172.955,70 atau 81,39%. Dengan demikian dari anggaran belanja daerah yang tidak dapat diserap sampai dengan akhir TA 2025 senilai Rp266.723.422.523,20 atau 18,61%.

Sejalan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana mengatur tentang surplus/defisit anggaran, selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja dan transfer mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Dilihat dari ketentuan tersebut APBD Pemerintah Kabupaten Tana Tidung TA 2025 mengalami defisit.

3.4.6.3. Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi penerimaan bersumber dari SiLPA Tahun 2024 yang tercatat senilai Rp436.022.138.025,90. Adapun total realisasi Pembiayaan dari sisi penerimaan sampai dengan akhir TA 2025 senilai Rp436.022.138.025,90. Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi pengeluaran sampai dengan akhir TA 2025 senilai Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp30.000.000.000,00. Dengan demikian realisasi pembiayaan daerah TA 2025 senilai Rp436.022.138.025,90.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Dari gambaran realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tersebut dapat dilihat posisi SiLPA TA 2025 sebagai berikut.

- a. Pendapatan yang melebihi target di TA 2025 Rp 51.569.994.871,05
- b. Sisa anggaran belanja yang tidak dapat Rp 266.723.422.523,20
diserap sampai dengan akhir TA 2025

APBD Kabupaten Tana Tidung TA 2025 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Selama TA 2025, sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, realisasi pendapatan yang diperoleh dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan adalah senilai Rp1.078.782.452.324,05 dengan belanja senilai Rp1.166.511.172.955,70. Gambaran lebih rinci tentang realisasi pendapatan dan belanja yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.21

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
Pendapatan Asli Daerah	30.948.274.122,00	54.299.047.851,71	175,45	49.612.809.888,45
Pendapatan Transfer	996.132.183.331,00	1.024.352.520.352,00	102,83	1.415.256.686.466,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	132.000.000,00	130.884.120,34	99,15	19.030.199.300,00
Jumlah pendapatan	1.027.212.457.453,00	1.078.782.452.324,05	105,02	1.483.899.695.654,45
Belanja Operasi	784.968.530.028,51	661.098.426.989,46	84,22	774.466.031.112,02
Belanja Modal	434.056.815.945,39	386.884.401.043,24	89,13	446.286.590.042,40
Belanja Tak Terduga	94.864.820.364,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Transfer	119.344.429.141,00	118.528.344.923,00	99,32	135.490.900.922,00
Jumlah Belanja	1.433.234.595.478,90	1.166.511.172.955,70	81,39	1.356.243.522.076,42
Surplus/(Defisit)	(406.022.138.025,90)	(87.728.720.631,65)	21,61	127.656.173.578,03
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA Sebelumnya	436.022.138.025,90	436.022.138.025,90	100,00	308.365.964.447,87
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	436.022.138.025,90	436.022.138.025,90	100,00	308.365.964.447,87
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	30.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	30.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	406.022.138.025,90	436.022.138.025,90	107,39	308.365.964.447,87
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan	0,00	348.293.417.394,25	0,00	436.022.138.025,90



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Dari tabel di atas diketahui realisasi pendapatan mencapai 105,02% dan realisasi belanja yang mencapai 81,39%. Hal ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam menjalankan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan program dan kegiatan dengan pencapaian yang baik atas indikator kinerja sebagaimana tergambar dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.

3.4.7. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan

Secara umum hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung hanya bersifat teknis dan keterbatasan anggaran. Beberapa kegiatan yang belum selesai dan dimungkinkan tidak dapat dikerjakan dikarenakan masalah waktu dan anggaran, dimana dalam pelaksanaan program/kegiatan melalui beberapa tahapan prosedur yang harus dilalui dan anggaran kegiatan tersebut telah direlokasi atau *refocusing*.

Secara khusus permasalahan yang masih dihadapi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam pencapaian target yang telah ditetapkan misalkan dalam pengelolaan pendapatan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut.

- a. Keterbatasan dana/anggaran;
- b. Kurangnya sumber daya manusia;
- c. Sanksi yang kurang tegas terhadap wajib pajak atau retribusi yang tidak membayar atau terlambat membayar;
- d. Pembebasan retribusi;
- e. *Class action*;
- f. Kecenderungan masyarakat menunda membayar; dan
- g. Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.

Permasalahan-permasalahan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk membayar pajak/retribusi yang menjadi kewajiban sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah; dan
- b. Lemahnya pengendalian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target salah satunya target pendapatan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut.

- a. Penggalan potensi PAD yang dilakukan lebih intensif untuk memaksimalkan capaian pendapatan dimasa yang akan datang;



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- b. Penerapan pelayanan prima untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam mendukung peningkatan PAD melalui kesadaran masyarakat untuk membayar pajak/retribusi;
- c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendapatan sehingga pencapaian dapat lebih optimal;
- d. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dari segi keterampilan dan pengetahuan tentang Pajak/Retribusi daerah sehingga dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara baik;
- e. Peningkatan/*upgrade/update* sistem aplikasi pengelolaan pendapatan, keuangan, aset dan persediaan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung; dan
- f. Melakukan Sosialisasi Pajak Burung Walet untuk meningkatkan Pajak Asli Daerah pada Desa dan Kecamatan di lingkungan Kabupaten Tana Tidung.

3.5. Mandatory Spending

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2025. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).

Tabel 3.22
Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	APBD 2025		% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan	P-APBD 2025		% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan
		Jumlah			Jumlah		
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan:		240.690.049.391,00	93,00%		277.475.288.245,99	94,00%
	1) Belanja Operasi:	240.690.049.391,00		93,00%	277.475.288.245,99		94,00%
	a. belanja pegawai;			0,00%	0,00		0,00%
	b. belanja barang dan jasa;			0,00%	0,00		0,00%
	c. belanja hibah;			0,00%	0,00		0,00%
	d. belanja bantuan sosial.			0,00%	0,00		0,00%
	2) Belanja Modal;			0,00%	0,00		0,00%
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:		0,00	0,00%		0,00	0,00%



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Komponen Perhitungan	APBD 2025		% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan	P-APBD 2025		% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan
		Jumlah			Jumlah		
	1) Belanja Operasi:	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	a. belanja pegawai;	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	b. belanja barang dan jasa;	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	c. belanja hibah;	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	d. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	2) Belanja Modal;	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:		0,00	0,00%		0,00	0,00%
	1) Belanja Operasi:	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	a. belanja pegawai;	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	b. belanja barang dan jasa;	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	c. belanja hibah;	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	d. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	2) Belanja Modal;	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	d. Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga:		0,00	0,00%		0,00	0,00%
	1) Belanja Operasi:	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	a. belanja pegawai;	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	b. belanja barang dan jasa;	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	c. belanja hibah;	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	d. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	2) Belanja Modal;	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:		18.086.217.636,00	7,00%		19.072.571.022,66	6,00%
	1) Belanja Transfer:	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	Belanja	0,00		0,00%	0,00		0,00%



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Komponen Perhitungan	APBD 2025		% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan	P-APBD 2025		% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan
		Jumlah			Jumlah		
	bantuan keuangan...						
	2) Sub Kegiatan pada SKPD			0,00%			0,00%
	dst	18.086.217.636,00		7,00%	19.072.571.022,66		6,00%
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	258.776.267.027,00			296.547.859.268,65		
3.	Total Belanja Daerah	1.308.801.880.201,00			1.433.234.595.478,90		
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	19,77%			20,69%		

Tabel 3.23
Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	APBD 2025	P-APBD 2025
		Jumlah	Jumlah
1	Total Belanja Daerah	1.308.801.880.201,00	1.433.234.595.478,90
	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:		
	a) belanja bagi hasil	458.721.021,00	989.949.241,00
	b) bantuan keuangan	122.902.730.800,00	118.354.479.900,00
2	Jumlah (a+b)	123.361.451.821,00	119.344.429.141,00
3	Selisih (1-2)	1.185.440.428.380,00	1.313.890.166.337,90
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	474.176.171.352,00	525.556.066.535,16
5	Persentase (4 : 3)	40%	40%

Tabel 3.24
Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur

No	Komponen Perhitungan	TA 2025	TA 2024
1	a) Belanja Modal	403.581.107.329,80	434.056.815.945,39
	1) Tanah	150.000.000,00	3.015.903.866,00
	2) Peralatan dan Mesin	29.465.940.095,00	39.255.670.619,00
	3) Bangunan dan Gedung	212.209.430.361,80	259.808.320.981,39
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	160.135.622.573,00	128.538.549.399,00
	5) Aset tetap lainnya	500.000.000,00	1.380.431.856,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Komponen Perhitungan	TA 2025	TA 2024
	6) Aset lainnya	1.120.114.300,00	2.057.939.224,00
	b) Belanja pemeliharaan	6.882.686.205,00	10.244.724.130,01
2	a) Belanja Hibah	24.490.903.218,00	19.667.134.141,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	340.000.000,00	243.500.000,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan	122.902.730.800,00	118.354.479.900,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	558.197.427.552,80	582.566.654.116,40
4	Persentase	47,09%	44,34%

Tabel 3.25
Perhitungan *Mandatory Spending*
Urusan Wajib Berdasarkan Perundang-Undangan
APBD TA 2025

No	SKPD	Total Pagu Belanja Daerah	Total Pagu Belanja SKPD	Rasio Terhadap Belanja	Keterangan
1	Inspektorat	1.433.234.595.478,90	17.080.860.640,00	1,19%	Terpenuhi
2	BKPSDM	1.433.234.595.478,90	8.312.772.120,00	0,58%	Terpenuhi

- b. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, yaitu paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/ atau transfer kepada daerah dan/ atau desa. Belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/ atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.
- c. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
- d. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan bahwa dalam uraian Pilar Strategi Percepatan meningkatkan komitmen percepatan penurunan *stunting* dengan tujuan agar persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk percepatan *stunting*. Sejalan dengan hal tersebut



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2022-2024 bahwa untuk melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan *stunting*, perlu menyusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *stunting*. Sesuai dengan amanat tersebut Pemerintah Kabupaten Tana Tidung mengalokasikan dana *stunting* sebagai berikut.

Tabel 3.26
Alokasi Anggaran Untuk Penurunan Prevalensi *Stunting* Tahun 2025

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		JUMLAH	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
	BELANJA PADA SKPD		APBD TA 2025	APBD-P TA 2025		
1.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG		150.000.000,00	177.010.000,00	174.354.000,00	98,50
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	150.000.000,00	177.010.000,00	174.354.000,00	98,50
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	150.000.000,00	177.010.000,00	174.354.000,00	98,50
	5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	150.000.000,00	177.010.000,00	174.354.000,00	98,50
2.	DINAS KESEHATAN		3.763.996.224,00	2.851.325.800,00	2.314.019.159,00	81,16
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.065.994.924,00	2.342.970.200,00	1.854.929.189,00	79,17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.065.994.924,00	2.342.970.200,00	1.854.929.189,00	79,17
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	129.513.500,00	62.285.500,00	40.620.000,00	65,22
	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	121.438.000,00	153.656.000,00	142.386.271,00	92,67
	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	64.581.200,00	107.277.200,00	79.229.018,00	73,85
	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	38.597.000,00	27.807.000,00	13.051.600,00	46,94
	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	290.528.200,00	80.676.700,00	59.016.700,00	73,15
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.964.789.924,00	1.070.493.200,00	790.797.600,00	73,87
	1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	198.093.000,00	186.073.000,00	126.615.000,00	68,05
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	258.454.100,00	654.701.600,00	603.213.000,00	92,14
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	78.630.800,00	72.955.400,00	54.939.400,00	75,31
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	78.630.800,00	72.955.400,00	54.939.400,00	75,31
	1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	78.630.800,00	72.955.400,00	54.939.400,00	75,31
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	516.370.300,00	332.400.000,00	301.740.570,00	90,78
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	516.370.300,00	332.400.000,00	301.740.570,00	90,78
	2.14.04.2.01.18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	108.000.000,00	108.000.000,00	105.657.570,00	97,83



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		JUMLAH	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
	BELANJA PADA SKPD		APBD TA 2025	APBD-P TA 2025		
	2.14.04.2.01.21	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	68.580.300,00	0,00	0,00	0,00
	2.14.04.2.01.24	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA	115.390.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.14.04.2.01.26	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA	224.400.000,00	224.400.000,00	196.083.000,00	87,38
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB	103.000.200,00	103.000.200,00	102.410.000,00	99,43
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	55.600.200,00	55.600.200,00	55.010.000,00	98,94
	2.14.03.2.04.06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	55.600.200,00	55.600.200,00	55.010.000,00	98,94
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	47.400.000,00	47.400.000,00	47.400.000,00	100,00
	2.14.03.2.01.11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	47.400.000,00	47.400.000,00	47.400.000,00	100,00
3.	DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN		258.934.700,00	192.402.700,00	184.146.950,00	95,71
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	135.092.000,00	84.128.000,00	82.743.950,00	98,35
	3.25.06.2.03	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	135.092.000,00	84.128.000,00	82.743.950,00	98,35
	3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	135.092.000,00	84.128.000,00	82.743.950,00	98,35
	3.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	123.842.700,00	108.274.700,00	101.403.000,00	93,65
	3.09.032.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	123.842.700,00	108.274.700,00	101.403.000,00	93,65
	3.09.032.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	123.842.700,00	108.274.700,00	101.403.000,00	93,65
4.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		288.872.000,00	244.193.000,00	231.842.120,00	94,94
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	288.872.000,00	244.193.000,00	231.842.120,00	94,94
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	288.872.000,00	244.193.000,00	231.842.120,00	94,94
	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	288.872.000,00	244.193.000,00	231.842.120,00	94,94
5.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		190.500.000,00	217.500.000,00	217.300.000,00	99,91
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	190.500.000,00	217.500.000,00	217.300.000,00	99,91



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		JUMLAH	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
	BELANJA PADA SKPD		APBD TA 2025	APBD-P TA 2025		
	2.16.02.2.01	<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	190.500.000,00	217.500.000,00	217.300.000,00	99,91
	2.16.02.2.01.14	Relasi Media	190.500.000,00	217.500.000,00	217.300.000,00	99,91
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN KAWASAN PERMUKIMAN		4.595.634.646,00	9.104.877.250,00	7.532.512.974,97	82,73
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.836.249.600,00	7.558.325.600,00	6.171.264.175,00	81,65
	1.03.03.2.01	<i>Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota</i>	2.836.249.600,00	7.558.325.600,00	6.171.264.175,00	81,65
	1.03.03.2.01.28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.418.124.800,00	5.546.153.600,00	4.214.577.500,00	75,99
	1.03.03.2.01.29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.234.415.000,00	1.894.380.000,00	1.839.346.675,00	97,09
	1.03.03.2.01.32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	183.709.800,00	117.792.000,00	117.340.000,00	99,62
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.759.385.046,00	1.546.551.650,00	1.361.248.799,97	88,02
	1.03.05.2.01	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.759.385.046,00	1.546.551.650,00	1.361.248.799,97	88,02
	1.03.05.2.35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	350.994.246,00	189.997.250,00	84.468.540,00	44,46
	1.03.05.2.40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.408.390.800,00	1.356.554.400,00	1.276.780.259,97	94,12
7.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		2.101.485.000,00	4.417.270.900,00	4.253.776.502,00	96,30
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2.101.485.000,00	4.417.270.900,00	4.253.776.502,00	96,30
	1.01.02.2.03	<i>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</i>	2.101.485.000,00	4.417.270.900,00	4.253.776.502,00	96,30
	1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	500.000.000,00	1.198.100.000,00	1.196.300.000,00	99,85
	1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	459.078.000,00	1.602.433.200,00	1.545.353.602,00	96,44
	1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.046.632.000,00	1.046.632.000,00	959.082.400,00	91,64
	1.01.02.2.03.47	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	95.775.000,00	570.105.700,00	553.040.500,00	97,01
TOTAL			11.349.422.570,00	17.204.579.650,00	14.907.951.705,97	86,65

Rincian program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* terdapat pada
Lampiran 3.1.



BAB IV

**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
2025**



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah menetapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual sebagai dasar untuk melakukan pencatatan dan pelaporan aktivitas keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Berbasis Akrual. Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung mengacu pada prinsip-prinsip umum yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang terdiri dari 29 SKPD dan SKPKD (PPKD) selaku entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 Komponen Laporan keuangan yang harus disampaikan setiap entitas adalah:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung TA 2025 adalah basis akrual, yaitu pengakuan pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas akuntansi/entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan; serta Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat Kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bila mana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi Pendapatan dan Pembiayaan Penerimaan dengan Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran. Pendapatan dan Belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sepanjang telah dianggarkan dalam APBD.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayar.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menyajikan saldo akun-akun tahun 2025 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran akun-akun dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan. Piutang dicatat sebesar nilai nominal. Persediaan dicatat sebesar Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

pembelian, Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengukuran akun-akun laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan akuntansi terkait basis akuntansi dan pengukuran akan dijelaskan sebagai berikut.

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode TA yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Pendapatan telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pendapatan telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan ketentuan penerimaan tersebut telah disahkan oleh BUD.
- c. Pendapatan telah diterima oleh BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah.
- d. Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya TA;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan Laporan Operasional adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode TA yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan

- a. Pendapatan diakui pada saat:
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- b. Pendapatan Laporan Operasional yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
- c. Pendapatan Laporan Operasional yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
- d. Pendapatan Laporan Operasional yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- e. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan Laporan Operasional diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- f. Pengakuan Pendapatan Laporan Operasional pada PPKD adalah:
- 1) Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan Laporan Operasional, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, Pendapatan Transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.
 - 2) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/ Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan Laporan Operasional mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.
- g. Bantuan Hibah, Bansos, dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dalam bentuk uang atau barang yang langsung ke Perangkat Daerah tanpa melalui mekanisme APBD sebagai bentuk pelaksanaan peraturan perundangan yang mendukung Kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah tahun berkenaan adalah Pendapatan Laporan operasional.
- h. Pengakuan Pendapatan Laporan Operasional pada Perangkat Daerah adalah: Pendapatan asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.
- 1) PAD Melalui Penetapan

Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

PAD yang masuk kedalam kategori ini antara lain Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

2) PAD Tanpa Penetapan

Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) yaitu antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, apabila dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

Selain pendapatan pajak tersebut di atas, PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, Perangkat Daerah akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Pengukuran

- a. Pendapatan Laporan Operasional dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan Laporan Operasional bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- c. Pendapatan Laporan Operasional dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan Laporan Operasional dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat atau entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.
- d. Pendapatan Laporan Operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- e. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan Laporan Operasional pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- f. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan Laporan Operasional yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- g. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan Laporan Operasional yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- h. Pendapatan dalam atau uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan Laporan Operasional disajikan dalam Laporan Operasional sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan adalah:

- a. Penerimaan Pendapatan Laporan Operasional tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya TA;
- b. Penjelasan mengenai Pendapatan Laporan Operasional yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Koreksi dan pengembalian pendapatan yang mempengaruhi jumlah Pendapatan Laporan Operasional;
- d. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- e. Penjelasan mengenai pendapatan Laporan Operasional non mekanisme APBD seperti Hibah, Bansos, dan Bantuan Keuangan baik berupa uang atau barang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, yang langsung ke Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis yang memberikan kontribusi terhadap kinerja Perangkat Daerah dan Pemda; dan
- f. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode TA bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Pengakuan

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- d. Belanja BOS/PSG dan JKN-FKTP yang dibayar dari Kas Dana PSG/Kas FKTP diakui sebagai Belanja setelah disahkan oleh BU.

Pengukuran

- a. Belanja diukur berdasarkan realisasi belanja menurut klasifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- b. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- c. Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, pengembalian tersebut dibukukan sebagai pendapatan LRA dalam pos pendapatan lain-lain LRA.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- d. Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Penyajian dan Pengungkapan

- a. Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- b. Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, maka entitas akuntansi dan pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- c. Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
- d. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
- 1) Belanja Operasi;
 - 2) Belanja Modal; dan
 - 3) Belanja Tak Terduga.

Dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- e. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja Tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya TA, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.
- f. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain :
- 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya TA.
 - 2) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
 - 3) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - 4) Penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang diperlukan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional.

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- Saat timbulnya kewajiban;
- Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- Beban diakui sebelum pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
- Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas**, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- Beban diakui setelah pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar Dimuka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan surat tagihan dan atau terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS/pengeluaran kas.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran pada saat pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

- a. Beban Pegawai (gaji, tunjangan dan insentif), diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
- b. Beban Barang dan Jasa, (beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas) diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani dan atau pada saat dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- c. Beban Penyusutan dana amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
- g. Beban Lain-lain diantaranya adalah sebesar harga perolehan aset tetap bernilai kecil (dibawah nilai kapitalisasi) yang dicatat secara ekstra komptabel, karena aset tersebut tidak dilakukan penyusutan.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - 1) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- 2) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.
- 3) Beban penyusutan aset tetap diukur sebesar nilai alokasi biaya perolehan aset tetap selama masa manfaat ekonomi yang dihitung dengan metode penyusutan garis lurus
- 4) Pengeluaran beban dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa).
- 5) Beban dalam bentuk barang/jasa dinilai sebesar yang tercantum dalam BAST, apabila dalam BAST tidak dicantumkan nilai barang dan jasa, maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan.

Penyajian dan Pengungkapan

- a. Beban disajikan dalam Laporan Operasional. Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - 1) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa (Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas), Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
 - 2) Beban Transfer;
 - 3) Beban Non Operasional; dan
 - 4) Beban Luar Biasa.
- b. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
- c. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - 1) Pengeluaran beban tahun berkenaan, disesuaikan dengan Bagan Akun Standar yang ditetapkan.
 - 2) Beban lain-lain atas Aset Tetap yang nilainya dibawah batasan kapitalisasi dan dicatat secara ekstra kompatibel, tidak dicatat dalam KIB dan tidak dilakukan penyusutan.
 - 3) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/TA sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja dengan pengakuan beban.
 - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengakuan

Pengakuan atas kebijakan akuntansi transfer terdiri dari:

- a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
 - 1) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada Laporan operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), atau Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
 - 3) Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Transfer Keluar dan Beban Transfer
 - 1) Transfer Keluar diakui pada saat terjadinya pengeluaran Kas dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
 - 3) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.
 - 4) Pengakuan terhadap kurang atau lebih salur transfer ditentukan berdasarkan tanggal diketahuinya. Apabila kurang atau lebih salur diketahui pada periode berjalan, jumlah kurang atau lebih salur dimaksud diakui sebagai penambah atau pengurang beban transfer tahun berjalan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Pengukuran

Akuntansi transfer dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan kas yang dikeluarkan dan jumlah kewajiban yang belum disalurkan. Nilai pengeluaran kas didasarkan pada penyaluran transfer yang dikeluarkan dari rekening entitas kepada rekening penerima sebesar nilai yang seharusnya disalurkan sesuai ketentuan perundang-undangan dan tercantum dalam dokumen penerimaan dan pengeluaran yang sah.

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- 1) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

- 1) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
- 2) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Penilaian

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- 1) Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAK merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAK tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAK TA berjalan.
- 2) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada TA sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada TA berjalan untuk jenis transfer yang sama.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Pengukuran Transfer Keluar dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal sebagaimana tercantum dalam dokumen yang sah.

Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi TA sebelumnya.
- Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
- Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
- Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan TA sebelumnya.
- Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
- Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
- Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada TA bersangkutan maupun tahun-TA berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

a. **Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

b. **Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode TA tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan, yaitu:

- Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

Pengukuran pada pembiayaan, yaitu:

- Pembiayaan dinilai berdasarkan realisasi penerimaan atau pengeluaran kas yang telah diterima atau dikeluarkan.
- Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Akuntansi Pembiayaan Neto

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode TA tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir

- Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
- Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
- Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
- Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
- Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan.
- Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan penyertaan modal pemerintah daerah.

4.3.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas adalah adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Kas dan setara kas meliputi saldo Kas di Kas Umum Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP, Kas Lainnya, dan Setara Kas.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Saldo Kas di Kas Daerah bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke RKUD yang antara lain berasal dari:

- Penyetoran kas pendapatan asli daerah dari bendahara penerimaan;
- Penyetoran kembali sisa uang persediaan dari bendahara pengeluaran;
- Penerimaan pendapatan daerah, antara lain dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pelunasan piutang;
- Penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Saldo Kas di Kas Daerah berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari RKUD yang antara lain berasal dari:

- Transfer uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran;
- Belanja daerah, antara lain belanja bagi hasil, belanja hibah, bantuan keuangan, dan belanja bantuan sosial;
- Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman; dan
- Pengeluaran lainnya, seperti pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas tunai dan saldo rekening bank Bendahara Penerimaan yang hingga tanggal neraca belum disetorkan ke Kas Daerah.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas tunai dan saldo rekening bendahara pengeluaran yang hingga tanggal neraca belum disetorkan ke Kas Daerah. Termasuk didalamnya Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca.

Kas di Badan Layanan Umum Daerah merupakan saldo kas yang masih tersimpan di Rekening Kas BLUD pada tanggal neraca.

Kas di Bendahara BOS merupakan saldo kas tunai dan saldo kas yang ada pada rekening bank Bendahara BOS pada sekolah negeri milik Pemerintah Daerah pada tanggal neraca.

Kas di Bendahara FKTP merupakan saldo kas tunai dan saldo yang ada pada rekening bank Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah pada tanggal neraca.

Kas Lainnya merupakan saldo kas yang antara lain berasal dari:

- Uang jaminan (retensi) yang disetorkan oleh pihak ketiga sebagai bentuk jaminan pemeliharaan atau perbaikan dari suatu pekerjaan;
- Saldo pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK yang belum disetorkan ke Kas Negara oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran; dan



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- c. Uang lainnya dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/GU/TU.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas meliputi:

- a. Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal penempatan serta tidak dijaminkan.
- b. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau tidak dapat digunakan secara bebas tidak diklasifikasikan dalam kas atau setara kas.

Pengakuan

- a. Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Badan Layanan Umum Daerah.
- b. Kas di Kas Daerah diakui penambahannya berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS), bukti transfer pihak ketiga, dan bukti lain yang dipersamakan.
- c. Kas di Kas Daerah diakui pengurangannya berdasarkan dokumen SP2D baik UP/GU/TU maupun LS dan surat pemindahbukuan yang diotorisasi oleh BUD.
- d. Kas di Bendahara Penerimaan diakui berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan (TBP) yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan atas penerimaan pendapatan ataupun penerimaan lainnya yang belum disetorkan hingga tanggal pelaporan.
- e. Pengurangan Kas di Bendahara Penerimaan diakui berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) atau pemindahbukuan dari rekening bank Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah.
- f. Penambahan Kas di Bendahara Pengeluaran diakui berdasarkan:
 - 1) SP2D UP/GU/TU yang diterima dari BUD yang digunakan untuk membiayai belanja yang terdapat dalam DPA-SKPD.
 - 2) SP2D LS yang ditujukan untuk pembayaran kepada pegawai.
- g. Pengurangan Kas di Bendahara Pengeluaran diakui berdasarkan:
 - 1) Pengesahan SPJ atas penggunaan uang muka persediaan yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 2) Bukti Penyetoran kelebihan sisa UP/GU/TU ke Kas Daerah.
- h. Kas di Bendahara BOS diakui berdasarkan bukti transfer dari pemerintah pusat/provinsi atau pihak ketiga. Pengurangan Kas di Bendahara BOS diakui berdasarkan pengesahan SPJ atas penggunaan Dana BOS yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- i. Kas di Bendahara FKTP diakui berdasarkan bukti transfer dari BPJS atau pihak ketiga. Pengurangan kas di Bendahara FKTP diakui berdasarkan SPJ penggunaan dana FKTP yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- j. Kas Lainnya diakui ketika terdapat:
 - 1) Uang jaminan (retensi) yang disetorkan pihak ketiga sebagai bentuk jaminan pemeliharaan atau perbaikan atas suatu pekerjaan;
 - 2) Saldo pemotongan atau pemungutan pajak atau PFK yang dilakukan oleh BUD/Kuasa BUD dan Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke Kas Negara; dan
- k. Uang lainnya dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/GU/TU.

Pengukuran

- a. Kas dan Setara kas dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah yang diterima atau dikeluarkan.
- b. Kas dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Penyajian

Kas dan Setara Kas disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Lancar dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kas di Kas Daerah;
- b. Kas di Bendahara Penerimaan;
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran;
- d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah;
- e. Kas di Bendahara FKTP;
- f. Kas Dana BOS;
- g. Kas Lainnya; dan
- h. Setara Kas.

Pengungkapan

- a. Pengungkapan Kas dan Setara Kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya menyajikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Rincian Kas dan Setara Kas;
 - 2) Penyebab timbulnya Kas Lainnya; dan
 - 3) Informasi lainnya yang dianggap penting.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- b. Saldo kas yang berasal dari dana hibah, bantuan keuangan, dan/atau dana sejenisnya yang penyalurannya tanpa melalui mekanisme APBD Kabupaten Tana Tidung cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.8 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Yang dimaksud dengan penyajian seluruh piutang adalah peristiwa yang menimbulkan piutang, yaitu:

- a. Pungutan Pendapatan Negara/Daerah;
- b. Perikatan; dan
- c. Kerugian Negara/Daerah.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debeturnya.

Jenis Piutang berdasarkan pungutan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Piutang Pajak

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Sesuai kewenangannya jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, yaitu antara lain:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

b. Piutang Retribusi

Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah karena pemberian izin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Berdasarkan ketentuan perundangan dan Peraturan tentang Pajak dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah berdasarkan objeknya, antara lain:

- 1) Jasa Umum;
- 2) Jasa Usaha; dan
- 3) Perizinan Tertentu.

c. Piutang Lain-lain PAD yang sah

Piutang Lain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari; (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

d. Piutang Dana Transfer

Piutang PAD lainnya dapat terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam, Piutang Dana Alokasi Umum (DAU), Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK), Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Piutang Transfer lainnya yang besarnya telah ditetapkan dengan peraturan perundangan.

e. Piutang Lainnya

Piutang lainnya adalah hak pemerintah daerah atas pendapatan daerah yang terutang oleh pihak ketiga selain piutang pajak, retribusi, PAD Lainnya yang sah, dan piutang transfer dan/atau piutang yang timbul karena perikatan dengan pihak lain atau sebab lainnya.

Pengakuan

- a. Pengakuan Piutang Berdasarkan Pungutan untuk dapat diakui sebagai piutang berdasarkan pungutan, harus dipenuhi kriteria :
 - 1) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - 2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- b. Piutang Pajak Daerah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan:
 - 1) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang dibayar;
 - 2) Dalam hal pajak daerah bersifat *self assessment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan penghitungannya sendiri yang didasarkan pada ketentuan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- c. Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang wajib disampaikan oleh WP ke instansi terkait yang melakukan pengelolaan pajak daerah.
- d. Pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat, dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.
- e. Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada PUPN maka piutang tersebut tetap diakui oleh entitas yang memiliki piutang, berarti tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut. Akuntansi menyisihkan 100% terhadap piutang yang diserahkan ke PUPN tersebut.
- f. Piutang Retribusi Daerah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang dibayar dari yang telah ditetapkan.
- g. Piutang Pendapatan lain-lain yang sah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan Bukti Dokumen Perikatan, Perjanjian atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang dibayar dari yang telah ditetapkan.
- h. Piutang Dana Transfer - Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
- i. Piutang Dana Transfer - Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- j. Piutang Dana Transfer - Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- k. Piutang Dana Transfer - Dana Otonomi Khusus (Otsus) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- l. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - 1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi belum menyalurkan seluruh pembayarannya yang besarnya ditetapkan dengan peraturan perundangan atau dokumen yang dipersamakan, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - 2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- m. Dana Dana Transfer - Bagi Hasil (DBH) terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, yang diberikan baik oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah maupun dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten. Piutang DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu TA. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir TA, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- n. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Daerah penerima yang bersangkutan.
- o. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu TA ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari pungutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- a. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- 1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan atau SPTPD yang telah diterima; atau
 - 2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - 3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - 4) Untuk Piutang Lain-lain PAD yang sah berupa Piutang pendapatan denda pajak dicatat dan diukur sebesar nominal tarif yang dikenakan pada wajib pajak yang menunggak sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sampai dengan tanggal pelaporan.
- b. Pengukuran piutang yang berasal dari peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, adalah sebagai berikut:
- 1) **Piutang Pemberian Pinjaman**

Piutang pemberian pinjaman disajikan senilai jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan

Piutang berupa barang/jasa harus disajikan dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - 2) **Piutang Penjualan Kredit**

Piutang dari penjualan disajikan sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - 3) **Piutang Kemitraan**

Piutang yang timbul disajikan berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul disajikan berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

- c. Pengukuran piutang transfer pemerintah pusat yang berupa Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- d. Pengukuran piutang transfer lainnya disajikan sebesar pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum diterima sesuai ketentuan.
- e. Pengukuran Piutang transfer antar daerah disajikan sebesar pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum diterima sesuai ketentuan.
- f. Pengukuran Piutang yang berasal dari kelebihan transfer disajikan sebesar jumlah nominal kelebihan transfer dari jumlah yang seharusnya.
- g. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
- h. Pengukuran Piutang Lainnya berupa Piutang Uang Muka disajikan sebesar selisih positif antara realisasi belanja atau pengeluaran kas yang pada akhir periode pelaporan atas pembayaran uang muka pengadaan barang/jasa dibandingkan dengan realisasi pengadaan barang/jasa yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah.
- i. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
- j. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*) sesuai ketentuan yang berlaku.
- k. Piutang disajikan sebesar nilai nominal piutang yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- l. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - 1) kualitas Piutang Lancar;
 - 2) kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - 3) kualitas Piutang Diragukan; dan
 - 4) kualitas Piutang Macet.
- m. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - 1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 - 2) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
 - 3) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang kurang dari 1 tahun;
 - (2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
 - (2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan dan/atau
 - (3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 4) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang kurang dari 1 tahun;
 - (2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/ banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang kurang dari 1 tahun;
 - (2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/ banding.
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

-
- 5) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dijelaskan berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a) Kualitas Lancar
 - (1) Umur piutang 0 sampai dengan 1(satu) bulan; dan/atau
 - (2) Wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - b) Kualitas Kurang Lancar
 - (1) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - (2) Wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - c) Kualitas Diragukan
 - (1) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan atau
 - (2) Wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - d) Kualitas Macet
 - (1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.
- 6) Penggolongan kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar

Belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - b) Kualitas Kurang Lancar

Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum dilakukan pelunasan.
 - c) Kualitas Diragukan

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

d) Kualitas Macet

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

- 7) Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
- Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
 - Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai bangunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai bangunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 8) Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.
- 9) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan dengan berdasarkan pengelompokan piutang, umur piutang (*aging schedule*) dan tingkat kolektibilitasnya.
- 10) Kebijakan penggolongan kualitas piutang menurut jenis/objek piutang, umur dan tingkat kolektibilitasnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rekapitulasi Umur Piutang

UMUR PIUTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITASNYA					
No	Uraian	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1	Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah				
	1) Pajak Daerah	< 1 Tahun	1 sd 2 Thn	> 2 sd 5 Thn	> 5 Thn
	2) Piutang Retribusi	< 6 Bln	6 sd 12 Bln	> 12 sd 24 Bln	> 24 Bln
2	Piutang dari Perikatan				
	1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;	< 1 Tahun	1 sd 2 Thn	> 2 sd 3 Thn	> 3 Thn
	2) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya; dan	< 1 Tahun	1 sd 2 Thn	> 2 sd 3 Thn	> 3 Thn
	3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi.	< 1 Tahun	1 sd 2 Thn	> 2 sd 3 Thn	> 3 Thn
3	Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan antara lain:				
	1) Piutang transfer pemerintah pusat;	< 1 Tahun	1 sd 2 Thn	> 2 sd 3 Thn	> 3 Thn



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

UMUR PIUTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITASNYA					
No	Uraian	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
2)	Piutang transfer pemerintah lainnya; dan	< 1 Tahun	1 sd 2 Thn	> 2 sd 3 Thn	> 3 Thn
3)	Piutang transfer pemerintah daerah lainnya.	< 1 Tahun	1 sd 2 Thn	> 2 sd 3 Thn	> 3 Thn
4	Piutang Dana Bergulir	< 1 Tahun	1 sd 2 Thn	> 2 sd 3 Thn	> 3 Thn

- 11) Pengelompokan piutang tersebut dilakukan menurut per masing-masing wajib pajak daerah / wajib retribusi / nasabah / debitur / badan / perorangan / dll, yang mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai hak tagih dari pemerintah daerah.
- 12) Penyisihan piutang tersebut dikecualikan untuk instansi pemerintah yang masih eksis lembaganya dan piutang.
- 13) Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
- 14) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.
- 15) Pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan piutang. Pencatatan penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan/tanggal pelaporan.
- 16) Pelaporan penyisihan piutang meliputi:
 - a) Beban penyisihan piutang;
 - b) Penyisihan piutang tidak tertagih. Beban penyisihan piutang disajikan dalam laporan operasional

Pemberhentian Pengakuan

- a. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
- b. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapusbukuan (*write down*) atau penghapusan bersyarat piutang dan penghapustagihan (*write-off*) atau penghapusan mutlak piutang.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- c. Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya, dimaksudkan menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada besaran pendapatan (*revenue*).
- d. Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - 1) Piutang melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet;
 - 2) Debitur tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga;
 - a) Debitur mengalami musibah (*force majeure*), meninggal dunia tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - b) Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau tidak dapat ditemukan lagi; dan
 - c) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan tidak lengkap/atau tidak dapat ditelusuri, objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.
- e. Penghapusbukuan Piutang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Dilakukan mengacu/berdasarkan pada Peraturan Kepala Daerah;
 - 2) Perlakuan akuntansi penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih; dan
 - 3) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- f. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - 1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berhutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berhutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM, kredit KUR dan atau yang dapat disejajarkan yang tidak mampu membayar;
 - 2) Penghapustagihan sebagai sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan, juga menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- 3) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit;
- 4) Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang;
- 5) Penghapustagihan sesuai hukum perdata, hukum kepailitan, hukum industri hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain; dan
- 6) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL/PUPN, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL/PUPN. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL/PUPN tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL/PUPN, dapat dilakukan penghapustagihan.

Penghapusan piutang sampai dengan Rp 1 miliar oleh Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dan diatas Rp 1 miliar sampai dengan Rp 5 miliar dilakukan oleh Kepala Daerah, sedangkan penghapusan piutang dengan nilai diatas Rp 5 miliar dilakukan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

- g. Tata cara penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan mengacu pada Peraturan Kepala Daerah.
- h. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Penyajian dan Pengungkapan Piutang

- a. Penyajian piutang yang berasal dari peraturan perundang undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib pajak dan wajib retribusi pada periode berjalan tahun berikutnya sehingga tidak ada piutang jenis ini yang melampaui satu periode berikutnya. Piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan disajikan di neraca sebagai Aset Lancar.
- b. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud berupa:



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, penilaian dan pengukuran piutang;
 - 2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - 3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih Pemda atau sudah diserahkan penagihannya kepada PUPN;
 - 4) Penjelasan terhadap piutang yang penyelesaiannya melalui proses hukum; dan
 - 5) Jaminan atau sita jaminan jika ada.
- c. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
- e. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

4.3.9 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi Pemerintah Daerah.

Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Pengukuran

Pengukuran beban dibayar dimuka disajikan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan atas suatu beban yang belum menjadi kewajiban pada tanggal pelaporan menggunakan pendekatan bulanan.

Pengungkapan

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

4.3.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

- Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah yang didasarkan pada Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pengukuran

Pencatatan persediaan dilakukan dengan menggunakan:

- Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga jumlah dan nilai persediaan selalu terupdate.
- Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Persediaan disajikan sebesar:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

Nilai persediaan yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh, yang dihitung dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian.

Beban Persediaan

- Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan selama periode pelaporan (*use of goods*). Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.
- Dalam hal persediaan dicatat dengan metode perpetual, pengukuran beban persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan harga per unit persediaan dengan menggunakan metode FIFO.
- Dalam hal terdapat selisih dalam jumlah yang tidak material antara catatan pengurus barang dengan hasil stock opname, selisih tersebut diperlakukan sebagai beban persediaan. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, rusak atau karena sifatnya.

Pengungkapan

Laporan keuangan mengungkapkan:

- Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau *using* dikeluarkan dari persediaan dan dicatat secara terpisah dan harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Penyajian dan Pengungkapan

- a. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
- b. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - 1) Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
 - 2) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang (kedaluwarsa) dikeluarkan dari persediaan dan dicatat secara ekstra komptabel dan harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.11 Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Pengakuan

- a. Pengeluaran kas dan atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
 - 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- b. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

Pengukuran

- Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya, atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.
- Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.3.12 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
- Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
- Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain terdiri dari:

- Deposito 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- Surat Utang Negara (SUN);
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
- Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Pengakuan

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Pengukuran

- a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- b. Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- c. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- d. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- e. Diskonto atau premi pada pembelian investasi jangka pendek diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- f. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau di debetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Pengungkapan

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi jangka pendek, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi jangka pendek;
- c. Perubahan harga pasar investasi jangka pendek;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- f. Perubahan pos investasi.

4.3.13 Kebijakan Akuntansi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi non permanen dapat berupa:

- 1) Pembelian Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan;
- 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- 3) Modal Kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Bergulir.

- b. Investasi Jangka Panjang Permanen.

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Investasi permanen dapat berupa:

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan;
- 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

Pengakuan

- a. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - 1) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
 - 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.
- b. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran

- a. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- b. Investasi jangka panjang non permanen:
 - 1) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
 - 2) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- 3) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai dengan diserahkan ke pihak ketiga.
- c. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- f. Perubahan pos investasi.

4.3.14 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

Termasuk dalam kategori properti investasi antara lain:

- a. Tanah yang dikuasai dan/atau dikuasai dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- b. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan untuk digunakan sendiri atau dijual dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka peningkatan nilai.
- c. Bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
- d. Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah daerah tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
- e. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

Pengakuan

- a. Properti investasi diakui sebagai aset jika:
 - 1) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - 2) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
- b. Dalam menentukan suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.

Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal/saat perolehan.
- c. Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
- d. Entitas tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut diakui sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- e. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

Pengukuran

- a. Pengukuran Saat Awal Perolehan
- 1) Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan, termasuk didalamnya biaya transaksi. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
 - 2) Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian, biaya transaksi, dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
 - 3) Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
 - a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
- b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal
- 1) Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
 - 2) Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur tentang Penyusutan Aset Tetap.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- 3) Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
 - 4) Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
 - 5) Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.
- c. Alih Guna Ke dan Dari Properti Investasi
- 1) Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 - a) dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialih gunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - b) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialih gunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - c) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialih gunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
 - d) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer/direklasifikasi dari persediaan menjadi properti investasi.
 - 2) Penggunaan properti oleh pemerintah daerah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misalnya, pemerintah daerah dapat memutuskan untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi dialih gunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap dialih gunakan menjadi properti investasi.
 - 3) Entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas Properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- 4) Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialih gunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialih gunakan.

d. Pelepasan Properti Investasi

- 1) Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
- 2) Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
- 3) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil *netto* dari pelepasan dan dari jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
- 4) Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
- 5) Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan properti investasi tersebut.
- 6) Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan, kerusakan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

Penyajian

- a. Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar dan disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Properti investasi merupakan bagian dari akun investasi.
- b. Karena sifat pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Pengungkapan

- a. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi mengungkapkan dalam laporan keuangannya sebagai berikut:
- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) properti investasi;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 3) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
 - 4) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - a) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - b) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - c) pelepasan;
 - d) penyusutan;
 - e) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - f) perubahan lain.
 - 5) Apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi, menjelaskan hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - a) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - b) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - c) tanggal efektif penilaian kembali;
 - d) nilai tercatat sebelum revaluasi;
 - e) jumlah penyesuaian atas nilai wajar; dan
 - f) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
 - 6) Metode dan asumsi diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi properti investasi, penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) atau menggunakan penilai independen dengan kualifikasi profesional yang relevan dan berpengalaman.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- 7) Jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
- a) Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - b) Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - c) Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, rusak atau karena sifatnya.
- b. Dalam hal terdapat selisih dalam jumlah yang material antara catatan pengurus barang dengan hasil stock opname, maka selisih tersebut akan diuji oleh tim pemeriksa barang pemerintah daerah. Selisih tersebut diakui sebagai kerugian daerah setelah ditetapkan tim pemeriksa.

4.3.15 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
- b. Hak atas tanah.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya;
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Pengakuan

a. Perolehan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- 6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah.

Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

tanah atas nama pemilik sebelumnya.

b. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

- 1) Pada dasarnya pengeluaran untuk aset tetap dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*).
- 2) Belanja modal adalah pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisasi). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal.
- 3) Demikian juga halnya dengan pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh pengeluaran yang memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.
- 4) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
- 5) Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengadaan baru untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 4.2
Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
PERALATAN DAN MESIN		
1	Alat Besar	
	- Alat Besar Darat	$\geq 5.000.000$
	- Alat Besar Apung	$\geq 5.000.000$
	- Alat Bantu	$\geq 5.000.000$
2	Alat Angkutan	
	- Alat Angkutan Darat Bermotor	$\geq 1.500.000$
	- Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	$\geq 1.500.000$
	- Alat Angkutan Apung Bermotor	$\geq 1.500.000$
	- Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	$\geq 1.500.000$



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
	- Alat Angkutan Bermotor Udara	>= 10.000.000
3	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	
	- Alat Bengkel Bermesin	>= 1.000.000
	- Alat Bengkel Tak Bermesin	>= 1.000.000
	- Alat Ukur	>= 1.000.000
4	Alat Pertanian	
	- Alat Pengolahan	>= 1.000.000
5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	
	- Alat Kantor	>= 1.000.000
	- Alat Rumah Tangga	>= 1.000.000
	- Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	>= 1.000.000
6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	
	- Alat Studio	>= 1.000.000
	- Alat Komunikasi	>= 1.000.000
	- Peralatan Pemancar	>= 1.000.000
	- Peralatan Komunikasi Navigasi	>= 1.000.000
7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	
	- Alat Kedokteran	>= 1.000.000
	- Alat Kesehatan Umum	>= 1.000.000
8	Alat Laboratorium	
	- Unit Alat Laboratorium	>= 1.000.000
	- Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	>= 1.000.000
	- Alat Peraga Praktek Sekolah	>= 1.000.000
	- Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	>= 1.000.000
	- Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	>= 1.000.000
	- <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)</i>	>= 1.000.000
	- Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	>= 1.000.000
	- Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	>= 1.000.000
	- Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	>= 1.000.000
9	Alat Persenjataan	
	- Senjata Api	>= 1.000.000
	- Persenjataan Non Senjata Api	>= 1.000.000
	- Senjata Sinar	>= 1.000.000
	- Alat Khusus Kepolisian	>= 1.000.000
10	Komputer	
	- Komputer Unit	>= 1.000.000
	- Peralatan Komputer	>= 1.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
11	Alat Eksplorasi	
	- Alat Eksplorasi Topografi	>= 1.000.000
	- Alat Eksplorasi Geofisika	>= 1.000.000
12	Alat Pengeboran	
	- Alat Pengeboran Mesin	>= 1.000.000
	- Alat Pengeboran Non Mesin	>= 1.000.000
13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	
	- Sumur	>= 1.000.000
	- Produksi	>= 1.000.000
	- Pengolahan Dan Pemurnian	>= 1.000.000
14	Alat Bantu Eksplorasi	
	- Alat Bantu Eksplorasi	>= 1.000.000
	- Alat Bantu Produksi	>= 1.000.000
15	Alat Keselamatan Kerja	
	- Alat Deteksi	>= 1.000.000
	- Alat Pelindung	>= 1.000.000
	- Alat Sar	>= 1.000.000
	- Alat Kerja Penerbangan	>= 1.000.000
16	Alat Peraga	
	- Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	>= 1.000.000
17	Peralatan Proses/Produksi	
	- Unit Peralatan Proses/Produksi	>= 1.000.000
18	Rambu - Rambu	
	- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	>= 1.000.000
	- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	>= 1.000.000
	- Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	>= 1.000.000
19	Peralatan Olahraga	
	- Peralatan Olahraga	>= 1.000.000
GEDUNG DAN BANGUNAN		
1	Bangunan Gedung	
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja	>= 10.000.000
	- Bangunan Gedung Tempat Tinggal	>= 10.000.000
2	Monumen	
	- Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	>= 10.000.000
3	Bangunan Menara	
	- Bangunan Menara Perambuan	>= 10.000.000
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
	- Tugu/Tanda Batas	>= 10.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
Aset Tetap Lainnya		
1	Bahan Perpustakaan	
	- Bahan Perpustakaan Tercetak	>= 100.000
	- Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro	>= 100.000
	- Kartografi, Naskah Dan Lukisan	>= 100.000
	- Musik	>= 100.000
	- Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>)	>= 100.000
	- <i>Three Dimensional Artefacts And Realia</i>	>= 100.000
	- Tarscalt	>= 100.000
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
	- Barang Bercorak Kesenian	>= 200.000
	- Alat Bercorak Kebudayaan	>= 200.000
	- Tanda Penghargaan	>= 200.000
3	Hewan	
	- Hewan Piaraan	>= 1.000.000
	- Ternak	>= 1.000.000
	- Hewan Lainnya	>= 1.000.000
4	Biota Perairan	
	- Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	>= 1.000.000
	- Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting, Dan Sebangsanya)	>= 1.000.000
	- Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, Dan Sebangsanya)	>= 1.000.000
	- Coelenterata (Ubur-Ubur Dan Sebangsanya)	>= 1.000.000
	- Echinodermata (Teripang, Bulu Babi, Dan Sebangsanya)	>= 1.000.000
	- Amphibia (Kodok Dan Sebangsanya)	>= 1.000.000
	- Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, Dan Sebangsanya)	>= 1.000.000
	- Mamalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, Dan Sebangsanya)	>= 1.000.000
	- Algae (Rumput Laut Dan Tumbuh-Tumbuhan Lain Yang Hidup Di Dalam Air)	>= 1.000.000
	- Biota Perairan Lainnya	>= 1.000.000
5	Tanaman	
	- Tanaman	>= 250.000
6	Barang Koleksi Non Budaya	
	- Barang Koleksi Non Budaya	>= 200.000



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- 6) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi.
- 7) Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi untuk persatuan jenis asset atau harga per unit atas jenis asset ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 4.3
Batasan Kapitalisasi untuk
Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, dan Restorasi

Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi	Keterangan
PERALATAN DAN MESIN		
Alat Besar		Untuk yang sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/sparepart baru
Alat Besar Apung	$\geq 5.000.000$	
Alat Bantu	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Angkutan		Untuk yang sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/sparepart baru
Alat Angkutan Darat Bermotor	$\geq 1.000.000$	
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Angkutan Apung Bermotor	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	-sda-	Untuk yang sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/sparepart baru
Alat Angkutan Bermotor Udara	$\geq 5.000.000$	
Alat Bengkel Dan Alat Ukur		
Alat Bengkel Bermesin	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Bengkel Tak Bermesin	-sda-	
Alat Ukur	-sda-	
Alat Pertanian		
Alat Pengolahan	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Kantor Dan Rumah Tangga		
Alat Kantor	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Rumah Tangga	-sda-	
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-sda-	
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar		
Alat Studio	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Komunikasi	-sda-	
Peralatan Pemancar	-sda-	-
Peralatan Komunikasi Navigasi	-sda-	
Alat Kedokteran Dan Kesehatan		
Alat Kedokteran	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Kesehatan Umum	-sda-	
Alat Laboratorium		
Unit Alat Laboratorium	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
	-sda-	
Alat Peraga Praktek Sekolah	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi	Keterangan
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	-sda-	
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	-sda-	
Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	-sda-	
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	-sda-	
Alat Persenjataan		
Senjata Api	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Persenjataan Non Senjata Api	-sda-	
Senjata Sinar	-sda-	
Alat Khusus Kepolisian	-sda-	
Komputer		
Komputer Unit	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Peralatan Komputer	-sda-	
Alat Eksplorasi		
Alat Eksplorasi Topografi	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Eksplorasi Geofisika	-sda-	
Alat Pengeboran		
Alat Pengeboran Mesin	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Pengeboran Non Mesin	-sda-	
Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian		
Sumur	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Produksi	-sda-	
Pengolahan Dan Pemurnian	-sda-	
Alat Bantu Eksplorasi		
Alat Bantu Eksplorasi	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Bantu Produksi	-sda-	
Alat Keselamatan Kerja		
Alat Deteksi	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Pelindung	-sda-	
Alat Sar	-sda-	
Alat Kerja Penerbangan	-sda-	
Alat Peraga		
Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Peralatan Proses/Produksi		
Unit Peralatan Proses/Produksi	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Rambu - Rambu		
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	-sda-	
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	-sda-	
Peralatan Olahraga		
Peralatan Olahraga	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi	Keterangan
GEDUNG DAN BANGUNAN		
Bangunan Gedung		Untuk yang sifatnya pemeliharaan sedang/ berat /Menambah Umur Ekonomis
Bangunan Gedung Tempat Kerja	>= 10.000.000	-sda-
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	>= 10.000.000	
Monumen		Untuk yang sifatnya pemeliharaan sedang/ berat /Menambah Umur Ekonomis
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	>= 5.000.000	
Bangunan Menara		Untuk yang sifatnya pemeliharaan sedang/ berat /Menambah Umur Ekonomis
Bangunan Menara Perambuan	>= 2.500.000	
Tugu Titik Kontrol/Pasti		Untuk yang sifatnya pemeliharaan sedang / berat / Menambah Umur Ekonomis
Tugu/Tanda Batas	>= 5.000.000	
ASET TETAP LAINNYA		
Bahan Perpustakaan		
Bahan Perpustakaan Tercetak	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro	-sda-	
Kartografi, Naskah Dan Lukisan	-sda-	
Musik	-sda-	
Karya Grafika (Graphic Material)	-sda-	
Three Dimensional Artefacts And Realita	-sda-	
Tarscalt	-sda-	
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga		
Barang Bercorak Kesenian	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Bercorak Kebudayaan	-sda-	
Tanda Penghargaan	-sda-	
Hewan		
Hewan Piaraan	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Ternak	-sda-	
Hewan Lainnya	-sda-	
Biota Perairan		
Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting, Dan Sebangsanya)	-sda-	
Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, Dan Sebangsanya)	-sda-	
Coelenterata (Ubur-Ubur Dan Sebangsanya)	-sda-	
Echinodermata (Teripang, Bulu Babi, Dan Sebangsanya)	-sda-	
Amphibia (Kodok Dan Sebangsanya)	-sda-	
Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, Dan Sebangsanya)	-sda-	
Mamalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, Dan Sebangsanya)	-sda-	
Algae (Rumput Laut Dan Tumbuh-Tumbuhan Lain Yang Hidup Di Dalam Air)	-sda-	
Biota Perairan Lainnya	-sda-	



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi	Keterangan
Tanaman		
Tanaman	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Barang Koleksi Non Budaya		
Barang Koleksi Non Budaya	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	

Untuk jenis aset tetap yang biaya-biaya pemeliharaannya tidak dikapitalisasi maka pada saat penganggaran dianggarkan dalam belanja barang dan jasa.

- 8) Untuk jenis aset gedung/bangunan dan jalan/jembatan/bangunan air/irigasi/instalasi dan jaringan memperhatikan pada paragraf 47 sampai dengan paragraf 51 tentang Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*), batasan minimal penganggaran dalam belanja modal sesuai dalam tabel tersebut di atas.
- 9) Pengeluaran belanja pengadaan baru untuk aset yang memenuhi kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, tetapi nilainya dibawah batasan nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana diatas dicatat secara terpisah dari daftar aset tetap (ekstrakomptabel).

Pengukuran

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- b. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- c. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- d. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Pencatatan nilai perolehan masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

b. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

d. Jalan, jaringan dan instalasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

e. Aset tetap lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan mulai karena menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

f. Konstruksi dalam Penyelesaian

Kebijakan perolehan konstruksi dalam penyelesaian diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

g. Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh pemakai atau mengurangi nilai karena keusangan, Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut.

Tabel 4.4
Penambahan Masa Manfaat

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT					
Uraian	Jenis	Perkiraan Nilai/Harga Wajar Pada Saat Penganggaran	Masa Manfaat	Penambahan Masa manfaat	Keterangan
Alat Besar Darat			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Alat Besar Apung			8		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		4	Belanja Modal
Alat Bantu			7		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan Berat	> 45 % s.d 100 %		4	Belanja Modal



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT					
Uraian	Jenis	Perkiraan Nilai/Harga Wajar Pada Saat Penganggaran	Masa Manfaat	Penambahan Masa manfaat	Keterangan
Alat Angkutan Darat Bermotor			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan Berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			2		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan Sedang	> 25 % s.d 50 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan Berat	> 50 % s.d 100 %		1	Belanja Modal
Alat Angkutan Apung Bermotor			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor			2		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		1	Belanja Modal
Alat Angkutan Bermotor Udara			20		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		5	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		10	Belanja Modal
Alat Bengkel Bermesin			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Alat Bengkel Tak Bermesin			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja
					Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT					
Uraian	Jenis	Perkiraan Nilai/Harga Wajar Pada Saat Penganggaran	Masa Manfaat	Penambahan Masa manfaat	Keterangan
Alat Ukur			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Alat Pengolahan			4		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 20 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 21 % s.d 40 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 51 % s.d 100 %		2	Belanja Modal
Alat Kantor			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Alat Rumah Tangga			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Alat Studio			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan berat	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Alat komunikasi			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Peralatan Pemancar			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT					
Uraian	Jenis	Perkiraan Nilai/Harga Wajar Pada Saat Penganggaran	Masa Manfaat	Penambahan Masa manfaat	Keterangan
Peralatan Komunikasi Navigasi			15		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		5	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		7	Belanja Modal
Alat Kedokteran			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Alat Kesehatan Umum			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Unit Alat Laboratorium			8		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		4	Belanja Modal
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir			15		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		5	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		7	Belanja Modal
Alat Peraga/Praktek Sekolah			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika			15		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		5	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		7	Belanja Modal



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT					
Uraian	Jenis	Perkiraan Nilai/Harga Wajar Pada Saat Penganggaran	Masa Manfaat	Penambahan Masa manfaat	Keterangan
Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Destructive Testing Laboratory			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup			7		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		4	Belanja Modal
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika			15		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		5	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		7	Belanja Modal
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Senjata Api			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Persenjataan Non Senjata Api			3		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		1	Belanja Modal



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT					
Uraian	Jenis	Perkiraan Nilai/Harga Wajar Pada Saat Penganggaran	Masa Manfaat	Penambahan Masa manfaat	Keterangan
Senjata Sinar			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Alat Khusus Kepolisian			4		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		2	Belanja Modal
Komputer Unit			4		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		2	Belanja Modal
Peralatan Komputer			4		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		2	Belanja Modal
Alat Eksplorasi Topografi			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Alat Eksplorasi Geofisika			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Alat Pengeboran Mesin			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		2	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Alat Pengeboran Non Mesin			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		2	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT					
Uraian	Jenis	Perkiraan Nilai/Harga Wajar Pada Saat Penganggaran	Masa Manfaat	Penambahan Masa manfaat	Keterangan
Sumur			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		2	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Produksi			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		2	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Pengolahan dan Pemurnian			15		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		0	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		5	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		7	Belanja Modal
Alat Bantu Eksplorasi			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		2	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Alat Bantu Produksi			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		2	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Alat Deteksi			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		0	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Alat Pelindung			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		0	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Alat Sar			2		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		0	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		2	Belanja Modal



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT					
Uraian	Jenis	Perkiraan Nilai/Harga Wajar Pada Saat Penganggaran	Masa Manfaat	Penambahan Masa manfaat	Keterangan
Alat Kerja Penerbang			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		2	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		2	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Unit Peralatan Proses / Produksi			8		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		0	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		4	Belanja Modal
Rambu-rambu Lalu lintas Darat			7		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		0	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		4	Belanja Modal
Rambu-rambu Lalu lintas Udara			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		0	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Rambu-rambu Lalu lintas Laut			15		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		0	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		5	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		7	Belanja Modal
Peralatan Olahraga			3		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		0	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		1	Belanja Modal



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT					
Uraian	Jenis	Perkiraan Nilai/Harga Wajar Pada Saat Penganggaran	Masa Manfaat	Penambahan Masa manfaat	Keterangan
Bangunan Gedung Tempat Kerja			50		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		10	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		15	Belanja Modal
Bangunan Gedung Tempat Tinggal			50		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		10	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		15	Belanja Modal
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti			50		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		10	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		15	Belanja Modal
Bangunan Menara Perambuan			40		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		5	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		10	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		15	Belanja Modal
Tugu / Tanda Batas			50		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		10	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		15	Belanja Modal
Jalan			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 60 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 60 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Jembatan			50		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		10	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		15	Belanja Modal



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT					
Uraian	Jenis	Perkiraan Nilai/Harga Wajar Pada Saat Penganggaran	Masa Manfaat	Penambahan Masa manfaat	Keterangan
Bangunan Air Irigasi			50		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 5 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 5 % s.d 10 %		5	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 10 % s.d 20 %		10	Belanja Modal
Bangunan Pengairan Pasang Surut			50		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		5	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		10	Belanja Modal
Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder			25		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Tanah			30		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Bangunan Air Bersih/Baku			40		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		10	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		15	Belanja Modal
Bangunan Air Kotor			40		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		10	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		15	Belanja Modal



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT					
Uraian	Jenis	Perkiraan Nilai/Harga Wajar Pada Saat Penganggaran	Masa Manfaat	Penambahan Masa manfaat	Keterangan
Instalasi Air Bersih/ Air Baku			30		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		7	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 65 %		10	Belanja Modal
Instalasi Air Kotor			30		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		7	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		10	Belanja Modal
Instalasi Pengolahan Sampah			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Instalasi Pembangkit Listrik			40		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		10	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		15	Belanja Modal
Instalasi Gardu Listrik			40		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		-	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		10	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		15	Belanja Modal
Instalasi Pertahanan			30		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Instalasi Gas			30		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
 (Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT					
Uraian	Jenis	Perkiraan Nilai/Harga Wajar Pada Saat Penganggaran	Masa Manfaat	Penambahan Masa manfaat	Keterangan
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		10	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		15	Belanja Modal
Instalasi Pengaman			20		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Instalasi Lain			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		0	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Jaringan Air Minum			30		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		7	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		10	Belanja Modal
Jaringan Listrik			40		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		10	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		15	Belanja Modal
Jaringan Telepon			20		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		5	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		10	Belanja Modal
Jaringan Gas			30		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		7	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		10	Belanja Modal
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	-	-	-	-	-
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	-	-	-	-	-
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	-	-	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Perhitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara bulanan, dan aset tetap dianggap berumur 1 tahun apabila telah melewati tahun perolehan.

Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen:

- 1) Untuk Pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian.
- 2) Untuk Pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa.
- 3) Untuk Pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana.
- 4) Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset Tetap yang tidak dilakukan penyusutan antara lain berupa tanah, konstruksi dalam pengerjaan, hewan, tanaman, dan buku perpustakaan.

Aset Tetap yang direklasifikasi sebagai Aset Lainnya dalam neraca antara lain berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya Aset, namun untuk Aset yang tidak digunakan diantaranya seperti aset rusak berat, aset hilang tidak disusutkan.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk hal tersebut, aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Aset Tetap Digunakan Bersama

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati Tana Tidung selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos dan Fasum

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya BAST atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah di turun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Pemindahtanganan aset yang ada konsekuensi kas terjadi karena nilai aset yang dipertukarkan tidak sama. Apabila terdapat konsekuensi kas dalam pertukaran aset, perlakuannya adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- Aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan sebesar nilai yang tercatat di neraca.
- Aset yang diterima dicatat sebesar nilai pasar yang wajar atas aset yang diterima.
- Jika terjadi selisih lebih atau kurang atas pertukaran tersebut maka dicatat sebagai surplus dan defisit penjualan aset tetap.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
- Pengeluaran - pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- Pengeluaran - pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
- Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi.

4.3.16 Kebijakan Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah goodwill, hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. Aset tak berwujud meliputi: *software* komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

(*copyright*), hak paten, *goodwill* dan hak lainnya, hasil riset dan pengembangan, dan aset tak berwujud lainnya. Aset tidak berwujud berupa *software/aplikasi* yang dibangun sendiri atau melalui kerjasama dengan pihak ketiga memiliki masa manfaat 5 (lima) tahun dan amortisasi mulai dihitung saat aset tidak berwujud tersebut siap digunakan.

Pengakuan

- a. Sesuatu diakui sebagai Aset Tidak Berwujud jika dan hanya jika:
 - 1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut mengalir kepada / dinikmati oleh entitas; dan
 - 2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
 - 3) Telah memenuhi dari Aset Tidak berwujud.
- b. Suatu entitas harus menilai kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial dengan menggunakan dukungan asumsi logis yang mewakili estimasi terbaik dari manajemen tentang kondisi ekonomi yang akan hadir selama umur ekonomis dari aset tidak berwujud. Entitas menggunakan pertimbangan untuk menilai derajat kepastian aliran manfaat ekonomi dimasa datang sebagai akibat dari penggunaan aset tidak berwujud dengan basis bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal, dengan menekankan pada bukti- bukti eksternal.
- c. Kendala sulit untuk menentukan apakah pengembangan secara internal atas aset tidak berwujud memenuhi prinsip-prinsip pengakuan, terutama dalam:
 - 1) Mengidentifikasi apakah dan kapan aset yang diidentifikasi tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan; dan
 - 2) Menentukan biaya perolehan dari aset tersebut secara memadai. Dalam hal tertentu, biaya untuk menghasilkan aset tidak berwujud yang dikembangkan secara tertentu, biaya untuk menghasilkan aset tidak berwujud yang dikembangkan:
 - 3) yang dikembangkan secara tertentu, biaya untuk menghasilkan aset tidak berwujud yang dikembangkan
- d. Untuk menentukan apakah perolehan internal aset tidak berwujud memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan aset tidak berwujud dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:
 - 1) Tahap penelitian atau riset
 - 2) Tahap pengembangan



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Jika Pemerintah Daerah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas / kegiatan internal untuk menghasilkan aset tidak berwujud, Pemerintah Daerah harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.

- e. Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai aset tidak berwujud. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.
- f. Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah daerah tidak/belum dapat memperlihatkan bahwa aset tidak berwujud telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karena itu, pengeluaran ini diakui sebagai biaya pada saat terjadi.
- g. Aset tidak berwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika, dan hanya jika, Pemerintah Daerah dapat memperlihatkan seluruh kondisi dibawah ini:
 - 1) Kelayakan teknis atas penyelesaian aset tidak berwujud sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
 - 2) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan aset tidak berwujud tersebut;
 - 3) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan aset tidak berwujud tersebut;
 - 4) Manfaat ekonomi dan atau social dimasa datang;
 - 5) Ketersediaannya sumber teknis, keuangan, dan lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan aset tidak berwujud tersebut;
 - 6) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran pengeluaran yang diatribusikan ke aset tidak berwujud selama masa pengembangan.
- h. Apabila telah memenuhi kriteria diatas dan ditetapkan menjadi aset tidak berwujud, maka hanya pengeluaran yang terjadi setelah seluruh kriteria tersebut tercapai yang dapat dikapitalisasi menjadi nilai perolehan, sedangkan pengeluaran yang terjadi sebelum memenuhi kriteria tersebut dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.
- i. Suatu hal yang paling krusial di dalam menentukan apakah sesuatu dapat ditetapkan sebagai aset tidak berwujud adalah penentuan apakah aset tersebut dapat dianggap mempunyai atau akan menghasilkan manfaat ekonomi atau sosial serta jasa potensial di masa yang akan datang. Untuk menetapkan apakah suatu kajian/pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau social dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- 1) Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut;
 - 2) Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;
 - 3) Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain;
 - 4) Angka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.
- j. Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah:
- 1) Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototype atau model;
 - 2) Desain, konstruksi dan pengoperasian proyek percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial;
 - 3) Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk proses, system atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.
- k. Pada praktek terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh suatu entitas tertentu namun dana ini dapat dipergunakan untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan.
- l. Sesuai dengan konsep biaya dalam pemerintahan dan konsep entitas maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari biaya yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan aset walaupun penelitiannya oleh lembaga lain.
- m. Namun demikian instansi pemerintah yang memberikan dana tidak dapat serta merta mengakui aset tidak berwujud tersebut, karena sesuai dengan karakteristik pengakuan aset tidak berwujud yang berasal dari penelitian dan pengembangan, pengakuan terhadap aset tidak berwujud adalah harus sesuai dengan kriteria pengakuan yaitu pada saat pengembangan sudah dapat dianggap mempunyai manfaat ekonomi dan/atau jasa potensial di masa yang akan datang. Biaya perolehan aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dari pengembangan adalah sejumlah pengeluaran yang dilakukan sejak tanggal aset tidak berwujud pertama kali memenuhi kriteria pengakuan. Sehingga tidak semua biaya penelitian yang telah dikeluarkan diakui dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai ini

Pengukuran

- a. Aset tidak berwujud yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tidak berwujud diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- b. Biaya untuk memperoleh aset tidak berwujud dengan pembelian biasanya dapat diukur secara memadai, khususnya bila berkenaan dengan kas atau aset moneter lainnya. Biaya untuk memperoleh aset tidak berwujud dengan pembelian terdiri atas:
 - 1) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- c. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - 1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 2) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat difungsikan secara baik.
- d. Contoh dari biaya yang bukan merupakan unsur aset tidak berwujud adalah:
 - 1) Biaya untuk memperkenalkan produk atau jasa baru (termasuk biaya *advertising* dan promosi);
 - 2) Biaya untuk melaksanakan operasi pada lokasi baru atau sehubungan dengan pemakai (*user*) baru atas suatu jasa (misalnya biaya pelatihan pegawai);
 - 3) Biaya administrasi dan *overhead* umum lainnya.

Amortisasi

- a. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat aset tidak berwujud dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.
- b. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui Pemerintah Daerah memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas *neto* bagi Pemerintah Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- c. Amortisasi suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.
- d. Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu ATB terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan kedalam jumlah tercatatnya.
- e. Amortisasi aset tidak berwujud hanya dapat diterapkan terhadap aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas. Amortisasi untuk aset tidak berwujud tersebut dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*). Rumusan perhitungan amortisasi dengan metode garis lurus (*straight line method*) untuk setiap periode sebagai berikut:
- f. Amortisasi per periode adalah nilai yang disesuaikan atau pemakaian pada nilai buku aset tidak berwujud untuk setiap periode pemakaian aset tetap. Periode perhitungan amortisasi aset tidak terwujud adalah setiap bulan.
- g. Biaya perolehan aset tidak berwujud merupakan harga perolehan atau nilai wajar aset tidak berwujud.
- h. Masa manfaat merupakan estimasi umur pemakaian aset tidak berwujud yang diharapkan memberikan manfaat ekonomis bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintah atau pelayanan kepada masyarakat. Masa manfaat setiap jenis aset tidak berwujud tidak sama tergantung pada beberapa faktor antara lain pembatasan oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.
- i. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau secara hukum mana yang lebih pendek.
- j. Periode amortisasi ditinjau setidaknya setiap akhir tahun buku. Jika perkiraan masa manfaat aset berbeda secara signifikan dengan estimasi-estimasi sebelumnya, periode amortisasi harus disesuaikan.
- k. Nilai sisa dari aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali:
 - 1) Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih aset tidak berwujud pada akhir masa manfaat; atau
 - 2) Terdapat pasar aktif atas aset tersebut dan:
 - a) Nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut
 - b) Besar kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada akhir masa manfaat



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Jumlah amortisasi aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas dihitung setelah dikurangi nilai sisa. Nilai sisa selain nihil mengindikasikan bahwa entitas mengharapkan untuk melepas aset tidak berwujud tersebut sebelum akhir masa ekonomi.

- l. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*, merek dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, abadi waralaba, dll) tidak boleh diamortisasi.
- m. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan atau sesuai dengan perubahan dalam perkiraan akuntansi.

Penghentian Dan Pelepasan

- a. Aset tidak berwujud diperoleh dengan maksud digunakan dalam mendukung kegiatan Pemerintah Daerah. Namun demikian, pada saatnya suatu aset tidak berwujud harus dihentikan dari penggunaannya. Alasan penghentian penggunaan aset tidak berwujud antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah atau berakhirnya masa manfaat aset tidak berwujud sehingga perlu diganti dengan yang baru.
- b. Secara umum, penghentian aset tidak berwujud dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tidak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Akun aset tidak berwujud yang dihentikan penggunaannya harus ditutup.
- c. Apabila suatu aset tidak berwujud tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tidak berwujud tersebut hakikatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Selanjutnya, terhadap aset tersebut secara akuntansi dapat dilepaskan, namun harus melalui proses pengelolaan barang milik daerah yang disebut disebut penghapusan.
- d. Dalam hal penghentian aset tidak berwujud merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tidak berwujud yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tidak berwujud terkait diperlakukan sebagai surplus atau defisit penjualan aset non lancar yang dilaporkan pada Laporan Operasional, dan penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Penyajian Dan Pengungkapan

- a. Aset tidak berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lainnya.
- b. Laporan Keuangan harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut untuk setiap golongan aset tidak berwujud, dengan membedakan antara aset tidak berwujud lainnya:
 - 1) Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan;
 - 2) Metode amortisasi yang digunakan, jika aset tidak berwujud terbatas masa manfaatnya;
 - 3) Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
 - 4) Unsur pada laporan keuangan yang di dalamnya terdapat amortisasi aset tidak berwujud; dan
 - 5) Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) Penambahan aset tidak berwujud yang terjadi, dengan mengungkapkan secara terpisah penambahan yang berasal dari pengembangan di dalam Pemerintah Daerah;
 - b) Penghentian dan pelepasan aset tidak berwujud;
 - c) Amortisasi yang diakui selama periode berjalan;
 - d) Perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan.
- c. Disamping informasi-informasi di atas, entitas pelaporan dan entitas akuntansi juga perlu melaporkan perubahan-perubahan terhadap:
 - 1) Periode amortisasi;
 - 2) Metode amortisasi; atau
 - 3) Nilai sisa.
- d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - 1) Alasan penentuan atau faktor-faktor penting penentuan masa manfaat suatu aset tidak berwujud;
 - 2) Penjelasan, nilai tercatat, dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap aset tidak berwujud yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan;
 - 3) Keberadaan aset tidak berwujud yang dimiliki bersama.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- e. Laporan keuangan harus mengungkapkan jumlah keseluruhan pengeluaran riset dan pengembangan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Pengeluaran riset dan pengembangan terdiri atas semua pengeluaran yang dapat dikaitkan secara langsung dengan kegiatan riset dan pengembangan atau yang dapat dialokasikan, secara rasional dan konsisten pada kegiatan-kegiatan tersebut.
- f. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi juga perlu mengungkapkan gambaran mengenai setiap aset tidak berwujud yang sudah sepenuhnya diamortisasi yang masih digunakan.

4.3.17 Kebijakan Akuntansi Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Pengakuan

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Bagan Akun Standar.

Pengakuan Aset Lain lain

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran

- a. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.
- b. Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. c. Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.
- c. Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Penyajian dan Pengungkapan

- a. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
- b. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

4.3.18 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

- a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

- b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menutup defisit anggarannya. Secara umum kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari: Utang Dalam Negeri, Utang Luar Negeri, Utang Jangka Panjang Lainnya

Pengakuan

- a. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- b. Kewajiban dapat timbul dari:
 - 1) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
 - 2) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- 3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
 - 4) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).
- c. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.
- d. Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran.

Pengukuran

- a. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- b. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- c. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

Kebijakan Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - 1) Definisi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.
 - b) Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT. Taspen, PT. Asabri, Bapertarum, PT. Askes, dan pihak berkepentingan lainnya) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- 2) Pengakuan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
 - 3) Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh BUD namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.
 - 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
 - a) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di Neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.
 - b) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada Laporan Keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- b. Utang Bunga (*Accrued Interest*);
- 1) Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)
 - a) Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek.
 - b) Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.
 - 2) Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*) Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
 - 3) Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak..
 - 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*) .



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

-
- 5) Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada CaLK. Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.
- c. Utang Jangka Pendek Lainnya;
- 1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan.
 - 2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.
 - 3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.
 - 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek. Rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- 1) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca.
 - 2) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - a) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
 - b) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- 3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Nilai yang dicantumkan di Neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di Neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.
 - 4) Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di Neraca sebagai 182 kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.
- e. Pendapatan Diterima Dimuka, dan
- 1) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.
 - 2) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
 - 3) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam CaLK.
- f. Utang belanja.
- 1) Definisi Utang Belanja,
Utang Belanja adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*). Utang Belanja ini pada umumnya terjadi karena:
 - a) adanya Belanja yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

b) pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PDAM, telepon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.

(1) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

(2) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

2) Pengakuan Utang Belanja

Utang Belanja diakui pada saat:

a) Belanja secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

b) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada Pemerintah Daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.

c) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau 183 pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

3) Pengukuran Utang Belanja

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal Neraca.

4) Penyajian dan pengungkapan Utang Belanja

Utang Belanja disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam CaLK.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Kebijakan Akuntansi Kewajiban Jangka Panjang

a. Utang Dalam Negeri;

1) Definisi Utang Dalam Negeri Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri. Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:

- a) Utang Dalam Negeri-sektor perbankan;
- b) Utang Dalam Negeri-sektor lembaga keuangan nonbank;
- c) Utang Dalam Negeri-obligasi;
- d) Utang Pemerintah Pusat;
- e) Utang Pemerintah Provinsi; dan
- f) Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.

2) Pengakuan Utang Dalam Negeri

- a) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
- b) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

3) Pengukuran Utang Dalam Negeri

- a) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
- b) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
- c) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di CaLK berdasarkan pemberi pinjaman.

b. Utang Luar Negeri

Utang Luar Negeri Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman menyatakan Pemerintah Daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri. Dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (3) dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah.

1) Definisi Utang Luar Negeri

- a) Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.
- b) Nilai nominal adalah nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.
- c) Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
- d) Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.
- e) Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

- 2) Pengakuan Utang Luar Negeri Utang luar negeri diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

3) Pengukuran Utang Luar Negeri

- a) Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

-
- b) Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut.
 - 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri
 - a) Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*).
 - b) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pospos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.
 - c. Utang Jangka Panjang Lainnya
 - 1) Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya
 - a) Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan.
 - b) Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG).
 - c) Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
 - d) Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.
 - e) Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.
 - 2) Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya
 - a) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- b) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.
- 3) Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya
 - a) Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi / pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK.
 - b) Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya- kemitraan dengan pihak ketiga.

4.3.19 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE.

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam LPE.

Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya

Pengakuan

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

Pengukuran

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

Penyajian dan Pengungkapan

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



BAB V

**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
2025**



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

BAB V
PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung TA 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah selaku entitas yang secara struktural berada dibawahnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung TA 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 dan penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024. Adapun perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 dengan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025, pendapatan terealisasi senilai Rp1.078.782.452.324,05 dan Belanja Daerah terealisasi senilai Rp1.166.511.172.955,70 sehingga terdapat Defisit senilai Rp(87.728.720.631,65). Adapun Penerimaan Pembiayaan Daerah yaitu sisa lebih perhitungan anggaran TA sebelumnya senilai Rp436.022.138.025,90 dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) senilai Rp348.293.417.394,25. Gambaran keseluruhan tentang anggaran dan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung TA 2025 dapat diuraikan dalam Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

5.1.1 Pendapatan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	1.078.782.452.324,05	1.483.899.695.654,45

Pendapatan merupakan semua penerimaan daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung TA 2025 dianggarkan senilai Rp1.027.212.457.453,00 dan terealisasi sampai dengan akhir TA 2025 Rp1.078.782.452.324,05 atau 105,02%. Jika dibandingkan dengan realisasi



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Pendapatan TA 2024 senilai Rp1.483.899.695.654,45 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan yaitu senilai Rp405.117.243.330,40 atau 27,30%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Asli Daerah	30.948.274.122,00	54.358.134.393,05	175,64	49.612.809.888,45
2	Pendapatan Transfer	996.132.183.331,00	1.024.352.520.352,00	102,83	1.415.256.686.466,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	132.000.000,00	71.797.579,00	54,39	19.030.199.300,00
Jumlah		1.027.212.457.453,00	1.078.782.452.324,05	105,02	1,483,899,695,654.45

Berdasarkan tabel di atas terdapat pelampauan anggaran Pendapatan Daerah oleh realisasi senilai Rp51.569.994.871,05 atau 5,02% yang disebabkan oleh peningkatan realisasi pendapatan, terutama dari sektor Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer yang melebihi target yang telah ditetapkan.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah 31 Desember 2025 31 Desember 2024
(PAD) 54.358.134.393,05 49.612.809.888,45

Pendapatan Asli Daerah TA 2025 dianggarkan senilai Rp30.948.274.122,00 dan terealisasi senilai Rp54.358.134.393,05 atau 175,64%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 senilai Rp49.612.809.888,45, Pendapatan Asli Daerah TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp4.745.324.504,60 atau 9,56%. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah diuraikan sebagai berikut.

5.1.1.1.1 Pajak Daerah 31 Desember 2025 31 Desember 2024
10.240.378.261,00 7.812.755.443,00

Menurut Ketentuan Umum pada Undang- Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi senilai-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah TA 2025 dianggarkan senilai Rp7.812.710.096,00 dan terealisasi senilai Rp10.240.378.261,00 atau 131,07%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah TA 2024 senilai Rp7.812.755.443,00, Pajak Daerah TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp2.427.622.818,00 atau 31,07%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel 5.2

Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Pajak Hotel	100.000.000,00	53.774.501,00	53,77	68.905.819,00
2	Pajak Restoran	1.148.246.343,00	3.895.327.555,00	339,24	4.266.314.470,00
3	Pajak Hiburan	5.000.000,00	3.567.800,00	71,36	1.500.000,00
4	Pajak Reklame	15.000.000,00	18.950.430,00	126,34	28.693.592,00
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	2.310.737.027,00
6	Pajak Air Tanah	10.000.000,00	7.747.709,00	77,48	6.803.950,00
7	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	2.000.000,00	20,00	5.000.000,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	225.000.000,00	576.808.547,00	256,36	576.718.743,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	294.000.000,00	381.340.986,00	129,71	333.340.232,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	150.000.000,00	214.788.550,00	143,19	214.741.610,00
11	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	2.000.000.000,00	2.286.782.883,00	114,34	0,00
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.918.174.396,00	1.263.915.500,00	65,89	0,00
13	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.937.289.357,00	1.535.373.800,00	79,25	0,00
Jumlah		7.812.710.096,00	10.240.378.261,00	131,07	7.812.755.443,00

Berdasarkan tabel di atas terdapat pelampauan anggaran Pendapatan Pajak Daerah oleh realisasi senilai Rp2.427.668.165,00 atau 31,07% yang disebabkan adanya peningkatan kinerja pemungutan pendapatan daerah yang efektif, optimalisasi sumber-sumber pendapatan, serta adanya faktor pendukung lain seperti peningkatan aktivitas ekonomi dan kepatuhan wajib pajak pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Mineral Bukan Logam (MBLB) serta Pajak Restoran atau Pajak Makan Minum sebagai penyumbang kenaikan terbesar dari semua jenis pajak tersebut.

5.1.1.1.1.1 Pajak Hotel

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
53.774.501,00	68.905.819,00

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, objek pajaknya termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimili, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi senilai 10% dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pajak Hotel TA 2025 dianggarkan senilai Rp100.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp53.774.501,00 atau 53,77%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Hotel TA 2024 senilai Rp68.905.819,00, Pajak Hotel TA 2025 mengalami



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

penurunan senilai Rp15.131.318,00 atau 21,96%. Penurunan nilai tersebut terjadi karena berkurangnya jumlah tamu hotel sehingga berpengaruh pada penerimaan Pajak Hotel.

5.1.1.1.1.2 Pajak Restoran	<u>31 Desember 2025</u> 3.895.327.555,00	<u>31 Desember 2024</u> 4.266.314.470,00

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi senilai 10% dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pajak Restoran dalam hal ini termasuk Pajak Katering.

Pajak Restoran TA 2025 dianggarkan senilai Rp1.148.246.343,00 dan terealisasi senilai Rp3.895.327.555,00 atau 339,24%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Restoran TA 2024 senilai Rp4.266.314.470,00, Pajak Restoran TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp370.986.915,00 atau 8,70%, penurunan tersebut terjadi karena penerapan efisiensi anggaran berpengaruh pada Belanja Makan Minum di SKPD.

5.1.1.1.1.3 Pajak Hiburan	<u>31 Desember 2025</u> 3.567.800,00	<u>31 Desember 2024</u> 1.500.000,00

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran Penyelenggaraan hiburan tersebut dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Pajak Hiburan TA 2025 dianggarkan senilai Rp5.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp3.567.800,00 atau 71,36%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Hiburan TA 2024 senilai Rp1.500.000,00, Pajak Hiburan TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp2.067.800,00 atau 137,85%. Kenaikan penerimaan pajak hiburan karena didorong oleh tingkat kepatuhan wajib pajak atas pemahaman regulasi pajak daerah, keberhasilan ini juga tidak terlepas dari intensitas pengawasan yang senantiasa dilakukan oleh petugas fiskal dilapangan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.1.1.1.1.4 Pajak Reklame	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	18.950.430,00	28.693.592,00

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Objek Pajak Reklame meliputi:

- Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- Reklame kain;
- Reklame melekat, stiker dan Reklame selebaran; dan
- Reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

Cara perhitungan dan hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi senilai 25% dan tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pajak Reklame TA 2025 dianggarkan senilai Rp15.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp18.950.430,00 atau 126,34%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Reklame TA 2024 senilai Rp28.693.592,00, Pajak Reklame TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp9.743.162,00 atau 33,96%. Penurunan realisasi pajak reklame disebabkan oleh berkurangnya Wajib Pajak yang memasang reklame. Menyikapi tren penurunan tersebut, pemerintah Kabupaten Tana Tidung pada tahun yang sama melakukan langkah intensif berupa penjarangan Wajib Pajak baru melalui pendataan ulang.

5.1.1.1.1.5 Pajak Penerangan Jalan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	0,00	2.310.737.027,00

Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek Pajak Penerangan Jalan meliputi seluruh pembangkit listrik.

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- a. Tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan
- b. Tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Pajak Penerangan Jalan TA 2025 dianggarkan senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp0,00 atau 0,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Penerangan Jalan TA 2024 senilai Rp2.310.737.027,00, Pajak Penerangan Jalan TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp2.310.737.027,00 atau 100,00%. Penurunan penerimaan Pajak Penerangan Jalan karena adanya perubahan nomenklatur dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) menjadi PBJT atas Tenaga listrik sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) sehingga untuk realisasi TA 2025 disajikan pada kode akun PBJT dari sumber lain dan yang dihasilkan sendiri.

5.1.1.1.1.6 Pajak Air Tanah	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	7.747.709,00	6.803.950,00

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bantuan dibawah permukaan tanah. Dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2033 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah, subjek pajak orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah, wajib pajak orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah, dasar pengenaan adalah nilai perolehan air tanah. Faktor perhitungan nilai perolehan air tanah sebagai berikut.

- a. Jenis sumber air;
- b. Lokasi sumber air;
- c. Tujuan pengambilan dan pemanfaatan air;
- d. Volume air yang diambil atau dimanfaatkan; dan
- e. Kualitas air.

Pajak Air Tanah TA 2025 dianggarkan senilai Rp10.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp7.747.709,00 atau 77,48%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Air Tanah TA 2024 senilai Rp6.803.950,00, Pajak Air Tanah TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp943.759,00 atau 13,87%. Realisasi mengalami kenaikan karena dilakukannya penguatan pengawasan pemanfaatan air tanah, khususnya pada sektor komersil serta upaya yang



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

dilakukan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan kepada Wajib Pajak serta meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

5.1.1.1.1.7 Pajak Sarang Burung Walet	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	2.000.000,00	5.000.000,00

Usaha mendirikan bangunan rumah sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung kian bertambah. Bidang Pendapatan memungut Pajak Sarang Burung Walet sesuai ketetapanannya yaitu senilai 2% dari harga jual. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Adapun dasar pengenaan pajak besaran tarif dan cara perhitungan tarif adalah dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet, nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet dengan volume sarang burung walet dan tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan senilai 2%.

Pajak Sarang Burung Walet TA 2025 dianggarkan senilai Rp10.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp2.000.000,00 atau 20,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Sarang Burung Walet TA 2024 senilai Rp5.000.000,00, Pajak Sarang Burung Walet TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp3.000.000,00 atau 60,00%. Penurunan realisasi terjadi karena terjadinya berkurangnya produksi sarang burung walet dan kualitas sarang burung walet yang dipengaruhi oleh cuaca serta terjadi fluktuasi harga pasar yang berdampak pada nilai transaksi. Selain tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan masih belum optimal dan pengawasan terhadap Objek Pajak yang tersebar menjadi kendala dalam pemungutan.

5.1.1.1.1.8 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	576.808.547,00	576.718.743,00

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi asbes, batu tulis, batu kapur, pasir, kerikil, dan lain-lain. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan bantuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2025 dianggarkan senilai Rp225.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp576.808.547,00 atau 256,36%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2024 senilai Rp576.718.743,00, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp89.804,00 atau 0,01%. Berdasarkan realisasi tahun 2025, penerimaan pajak MBLB mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh adanya optimalisasi pendataan objek pajak terutama pada pelaku usaha pertambangan



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

serta penguatan pengawasan terhadap pelaporan pada pelaku usaha dan pada pihak ketiga sebagai rekanan pemerintah daerah serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak turut berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan.

5.1.1.1.1.9 Pajak Bumi dan Bangunan 31 Desember 2025 31 Desember 2024
Pedesaan dan Perkotaan 381.340.986,00 333.340.232,00
(PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah Objek Pajak yang:

- digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; dan
- digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis.

Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi senilai 0,3% dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. PBB-P2 TA 2025 dianggarkan senilai Rp294.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp381.340.986,00 atau 129,71%. Jika dibandingkan dengan realisasi PBB-P2 TA 2024 senilai Rp333.340.232,00, PBB-P2 TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp48.000.754,00 atau 14,40%. Kenaikan pajak tersebut dikarenakan adanya program kegiatan yang mendukung pembayaran PBB-P2 hal ini mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain optimalisasi sistem administrasi dan dukungan kepatuhan wajib pajak turut berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan PBB-P2 tersebut.

5.1.1.1.1.10 Bea Perolehan Hak Atas 31 Desember 2025 31 Desember 2024
Tanah dan Bangunan 214.788.550,00 214.741.610,00
(BPHTB)

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2025 dianggarkan senilai Rp150.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp214.788.550,00 atau 143,19%. Jika dibandingkan dengan realisasi BPHTB TA 2024 senilai Rp214.741.610,00, BPHTB TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp46.940,00 atau 0,02%. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan, serta optimalisasi verifikasi dan validasi nilai transaksi serta peningkatan pengawasan terhadap pajak BPHTB tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.1.1.1.1.11	PBJT-Tenaga Listrik	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		2.286.782.883,00	0,00

PBJT-Tenaga Listrik terdiri dari PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain dan PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri dengan rincian sebagai berikut.

5.1.1.1.1.11.1	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		2.202.213.206,00	0,00

PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain adalah pajak daerah yang dikenakan pada konsumen akhir atas konsumsi Listrik, menggantikan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebelumnya, diatur dalam UU HKPD, dan dipungut oleh daerah untuk rumah tangga, industri, pertambangan, serta penggunaan Listrik dari PLN atau sumber lain, dengan tarif bervariasi tergantung jenis penggunaan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah masing-masing daerah, dengan pengecualian untuk instansi pemerintah, rumah ibadah, panti sosial dan Listrik yang dihasilkan sendiri oleh industri tertentu. PBJT untuk tenaga Listrik dari sumber lain adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi listrik oleh pengguna akhir, dengan tarif berbeda tergantung jenis konsumen: 3% untuk industri, pertambangan minyak & gas (migas), 2,4% untuk konsumen non-industri/migas (rumah tangga, dll.), dan 1,5% untuk listrik yang dihasilkan sendiri (genset), diatur oleh pemerintah daerah berdasarkan PP No. 4 Tahun 2023, yang menggantikan PPJ.

PBJT Konsumsi Tenaga Listrik dan Sumber Lain TA 2025 dianggarkan senilai Rp1.700.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp2.202.213.206,00 atau 129,54%. Jika dibandingkan dengan realisasi PBJT Konsumsi Tenaga Listrik dan Sumber Lain TA 2024 senilai Rp0,00, PBJT Konsumsi Tenaga Listrik dan Sumber Lain TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp2.202.213.206,00 atau 100,00%. Kenaikan penerimaan PBJT atas Tenaga listrik mengalami perubahan nomenklatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD sehingga untuk realisasi TA 2025 disajikan pada kode akun PBJT sementara TA 2024 masih menggunakan kode akun PPJ.

5.1.1.1.1.12	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		84.569.677,00	0,00

PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri adalah pajak atas penggunaan Listrik oleh pengguna akhir (seperti genset) dengan tarif paling tinggi 1,5%, ditetapkan berdasarkan kapasitas, tingkat penggunaan, jangka waktu pemakaian, dan harga satuan Listrik yang berlaku di daerah. Pungutan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah yang mengintegrasikan pajak dari beberapa jenis konsumsi Listrik.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

PBJT Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri TA 2025 dianggarkan senilai Rp300.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp84.569.677,00 atau 28,19%. Jika dibandingkan dengan realisasi PBJT Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri TA 2024 senilai Rp0,00, PBJT Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp84.569.677,00 atau 100,00%. Kenaikan Pajak tersebut karena penerimaan PBJT atas Tenaga listrik mengalami perubahan nomenklatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD sehingga untuk realisasi TA 2025 disajikan pada kode akun PBJT sementara TA 2024 masih menggunakan kode akun PPJ.

5.1.1.1.1.13	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		1.263.915.500,00	0,00

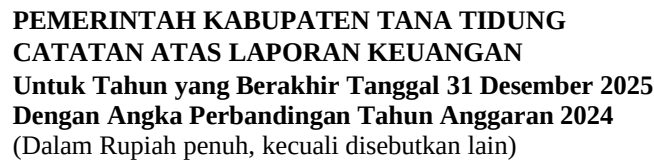
Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor adalah yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opsen PKB TA 2025 dianggarkan senilai Rp1.918.174.396,00 dan terealisasi senilai Rp1.263.915.500,00 atau 65,89%. Jika dibandingkan dengan realisasi Opsen PKB TA 2024 senilai Rp0,00, Opsen PKB TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp1.263.915.500,00 atau 100,00%. Realisasi mengalami kenaikan dikarenakan opsen PKB baru diberlakukan di tahun 2025 dan adanya koordinasi serta kerjasama dalam sosialisasi kepada masyarakat bersama pihak terkait, optimalisasi penagihan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

5.1.1.1.1.14	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		1.535.373.800,00	0,00

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Opsen BBNKB TA 2025 dianggarkan senilai Rp1.937.289.357,00 dan terealisasi senilai Rp1.535.373.800,00 atau 79,25%. Jika dibandingkan dengan realisasi Opsen BBNKB TA 2024 senilai Rp0,00, Opsen BBNKB TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp1.535.373.800,00 atau 100,00%. Realisasi mengalami kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya transaksi balik nama kendaraan bermotor di tingkat provinsi serta meningkatnya





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

lapangan, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa, serta tingginya tingkat kepatuhan Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajibannya.

5.1.1.1.2.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		8.960.041.275,00	83.096.000,00

Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2025 dianggarkan senilai Rp1.323.963.865,00 dan terealisasi senilai Rp8.960.041.275,00 atau 676,76%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2024 senilai Rp83.096.000,00, Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp8.876.945.275,00 atau 10.682,76%. Kenaikan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan terjadi karena seluruh puskesmas se-Kabupaten Tana Tidung TA 2025 sudah menerapkan pola keuangan BLUD, sehingga seluruh penerimaan dikelola langsung oleh Puskesmas sehingga mengakibatkan retribusi pelayanan kesehatan mengalami peningkatan. Adapun rincian anggaran dan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4

Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	328.963.865,00	185.274.371,00	56,32	83.096.000,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	995.000.000,00	8.774.766.904,00	881,89	0,00
Jumlah		1.323.963.865,00	8.960.041.275,00	676,76	83.096.000,00

5.1.1.1.2.1.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		185.274.371,00	83.096.000,00

Retribusi Pelayanan Kesehatan di puskesmas diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya penginapan dan konsumsi, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Seluruh Puskesmas se Kabupaten Tana Tidung TA 2025 menerapkan pola keuangan BLUD. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas TA 2025 dianggarkan senilai Rp328.963.865,00 dan terealisasi senilai Rp185.274.371,00 atau 56,32%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas TA 2024 senilai Rp83.096.000,00, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp102.178.371,00 atau 122,96%. Kenaikan realisasi tersebut karena Pendapatan BLUD Puskesmas yang sebelumnya dicatat diakun Lain-lain PAD yang Sah kemudian dicatat di Pendapatan



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas. Adapun rincian anggaran dan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Puskesmas Tideng Pale	30.000.000,00	57.244.911,00	190,82	33.315.000,00
2	Puskesmas Sesayap Hilir	40.000.000,00	39.306.360,00	98,27	13.185.000,00
3	Puskesmas Tana Lia	30.000.000,00	12.560.900,00	41,87	3.976.000,00
4	Puskesmas Kujau	45.000.000,00	60.731.500,00	134,96	26.984.500,00
5	Puskesmas Muruk Rian	15.000.000,00	15.430.700,00	102,87	6.616.500,00
6	BPKAD	168.963.865,00	0,00	0,00	(981.000,00)
Jumlah		328.963.865,00	185.274.371,00	56,32	83.096.000,00

Berdasarkan tabel di atas, anggaran Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas pada BPKAD tidak terealisasi. Hal ini terjadi karena penganggaran tersebut sebenarnya ditujukan untuk Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Tanjung Kramat yaitu salah satu FKTP yang belum berstatus BLUD. Namun, terjadi kesalahan penganggaran yang seharusnya dialokasikan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum.

5.1.1.1.2.1.2 Retribusi Pelayanan 31 Desember 2025 31 Desember 2024
Kesehatan di Rumah Sakit 8.774.766.904,00 0,00
Umum Daerah

Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya penginapan dan konsumsi, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan pola keuangan BLUD yang pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui RSUD Akhmad Berahim dan Puskesmas yang diantaranya diperoleh dari Retribusi Rawat Jalan Kesehatan.

Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Akhmad Berahim TA 2025 dianggarkan senilai Rp995.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp8.774.766.904,00 atau 881,89%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Akhmad Berahim TA 2024 senilai



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Rp0,00, Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Akhmad Berahim 2025 mengalami kenaikan senilai Rp8.774.766.904,00 atau 100,00%. Dikarenakan Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Akhmad Berahim TA 2024 mengalami salah penganggaran sehingga realisasi diungkapkan pada Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan dan pada tahun 2025 Pendapatan BLUD di Akun Lain-lain PAD yang Sah dicatat di Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

5.1.1.1.2.2	Retribusi Pelayanan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Persampahan/Kebersihan	62.778.000,00	31.788.000,00

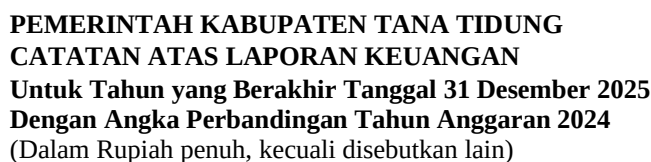
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pemusnahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2025 dianggarkan senilai Rp45.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp62.788.000,00 atau 139,51%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2024 senilai Rp31.788.000,00, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp30.990.000,00 atau 97,49%.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mengalami kenaikan karena adanya sinergi antara peningkatan kesadaran wajib retribusi, penagihan yang lebih efektif, dukungan regulasi dan sistem administrasi yang memadai, dan peningkatan tarif retribusi sesuai peraturan daerah yang berlaku.

5.1.1.1.2.3	Retribusi Pelayanan Pasar	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		75.483.000,00	0,00

Retribusi Pelayanan Pasar dipungut atas setiap pelayanan pasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat 1 huruf d pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 merupakan penyediaan fasilitas pasar rakyat tradisional atau sederhana, berupa peralatan, los kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan UMKM. Retribusi Pelayanan Pasar TA 2025 dianggarkan senilai Rp36.600.000,00 dan terealisasi senilai Rp75.483.000,00 atau 206,24%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar TA 2024 senilai Rp0,00, Retribusi Pelayanan Pasar TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp75.483.000,00 atau 100,00%. Retribusi Pelataran mengalami kenaikan karena adanya penambahan objek retribusi, rombongan yang berada di RTH Baya Inggulung baru dikenakan retribusi di

**Tabel 5.6**

Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Pelataran	12.200.000,00	1.425.000,00	11,68	0,00
2	Retribusi Los	12.200.000,00	27.982.000,00	229,36	0,00
3	Retribusi Kios	12.200.000,00	46.076.000,00	377,67	0,00
Jumlah		36.600.000,00	75.483.000,00	206,24	0,00

Berdasarkan tabel di atas terdapat pelampauan anggaran Retribusi Pelayanan Pasar oleh realisasi senilai Rp38.883.000,00 atau 106,24% yang disebabkan adanya upaya intensifikasi dan/atau ekstensifikasi pemungutan retribusi pelayanan pasar yang didukung oleh mulai optimalnya operasional pasar serta perbaikan sistem penarikan retribusi. Selain itu peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di lingkungan pasar turut memberikan kontribusi terhadap pelampauan target tersebut.

5.1.1.1.2.4	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	31 Desember 2025 11.594.750,00	31 Desember 2024 3.850.000,00

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah biaya atau pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau pengguna layanan yang berkaitan dengan penyediaan dan/atau penyedotan kakus atau WC. Layanan ini biasanya diberikan oleh instansi pemerintah atau badan usaha yang ditunjuk untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, dengan tujuan untuk mengelola limbah domestik agar tidak menimbulkan masalah sanitasi yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus TA 2025 dianggarkan senilai Rp8.400.000,00 dan terealisasi senilai Rp11.594.750,00 atau 138,03%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus TA 2024 senilai Rp3.850.000,00, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp7.744.750,00 atau 201,16%. Kenaikan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus karena telah dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat.

5.1.1.1.2.5	Retribusi Pemakaian Ruangan	31 Desember 2025 12.287.200,00	31 Desember 2024 62.669.940,00

Retribusi Pemakaian Ruang yang merupakan bagian dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2025 dianggarkan senilai Rp14.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp12.287.200,00 atau 87,77%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Ruang TA 2024 senilai



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Rp62.669.940,00, Retribusi Pemakaian Ruangan TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp50.382.740,00 atau 80,39%. Penurunan ini karena rendahnya kepatuhan atau kesadaran dari pemilik bangunan tempat tinggal selaku Wajib Pajak, serta lemahnya jalur koordinasi antara SKPD pemungut dengan Wajib Pajak di lapangan.

5.1.1.1.2.6	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	<u>31 Desember 2025</u> 0,00	<u>31 Desember 2024</u> 48.603.000,00

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah atas penggunaan/pemanfaatan tempat berjualan di pasar berbagai jenis barang yang dijual secara grosir/eceran. Retribusi dipungut sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar grosir.

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan TA 2025 dianggarkan senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp0,00 atau 0,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan TA 2024 senilai Rp48.603.000,00, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp48.603.000,00 atau 100,00%. karena adanya pemindahan akun dari Retribusi Pasar Grosir dan/ Pertokoan menjadi Retribusi Pelayanan Pasar yang terdiri dari Retribusi Pelataran, Retribusi Los dan Retribusi Kios.

5.1.1.1.2.7	Retribusi Tempat Khusus Parkir	<u>31 Desember 2025</u> 157.825.000,00	<u>31 Desember 2024</u> 54.000.000,00

Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut atas penggunaan/pemanfaatan tempat khusus parkir kendaraan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan. Retribusi Tempat Khusus Parkir TA 2025 dianggarkan senilai Rp36.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp157.825.000,00 atau 438,40%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir TA 2024 senilai Rp54.000.000,00, Retribusi Tempat Khusus Parkir TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp103.825.000,00 atau 192,27%. Kenaikan ini disebabkan karena bertambahnya volume pengunjung pasar. Hal ini terjadi akibat meningkatnya daya beli masyarakat yang mendorong ramainya aktivitas transaksi jual beli dipasar.

5.1.1.1.2.8	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	<u>31 Desember 2025</u> 411.984.000,00	<u>31 Desember 2024</u> 320.668.000,00

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi ini



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

dipungut oleh Dinas Perhubungan. Retribusi Jasa Kepelabuhan TA 2025 dianggarkan senilai Rp200.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp411.984.000,00 atau 205,99%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Kepelabuhan TA 2024 senilai Rp320.668.000,00, Retribusi Jasa Kepelabuhan TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp91.316.000,00 atau 28,48%. karena meningkatnya intensitas dan aktivitas kapal yang bersandar di wilayah pelabuhan Tana Tidung sepanjang tahun 2025.

5.1.1.1.2.9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	<u>31 Desember 2025</u> 91.280.713,00	<u>31 Desember 2024</u> 75.869,500,00

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2025 dianggarkan senilai Rp60.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp91.280.713,00 atau 152,13%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2024 senilai Rp75.869.500,00, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp15.411.213,00 atau 20,31%. Kenaikan dikarenakan bertambahnya pengunjung tempat wisata dan juga bertambahnya masyarakat yang memanfaatkan tempat/fasilitas olahraga.

5.1.1.1.2.10	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	<u>31 Desember 2025</u> 43.844.000,00	<u>31 Desember 2024</u> 0,00

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah merupakan pungutan atas penggunaan kekayaan milik pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan sebagai pembayaran pemanfaatan Aset Daerah. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah TA 2025 dianggarkan senilai Rp36.500.000,00 dan terealisasi senilai Rp43.844.000,00 atau 120,12%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah TA 2024 senilai Rp0,00, Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp43.844.000,00 atau 100,00%. Kenaikan dikarenakan sewa bangunan rumah ATM di Pasar Imbayud Taka dan hasil revidu inspektorat atas Pemanfaatan Aset Pemda pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Bawang CV. Baskara Multi Konstruksi.

5.1.1.1.2.11	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	<u>31 Desember 2025</u> 24.727.319,00	<u>31 Desember 2024</u> 25.767,194,00

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan Objeknya adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 937/1030/SJ,SE-1/MK.07/2022, 06/SE/M/2022, dan 399/A.1/2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Dalam Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa bagi daerah yang belum menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu Peraturan Daerah, maka Pemerintah Daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang Retribusi IMB ataupun Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang didalamnya mengatur terkait Retribusi IMB, masih tetap dapat melakukan pungutan retribusi tersebut sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu 5 Januari 2024, sepanjang memberikan pelayanan PBG dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Dalam hal ini Kabupaten Tana Tidung sudah mengesahkan Peraturan Daerah terkait PBG (Perda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung TA 2025 dianggarkan senilai Rp18.500.000,00 dan terealisasi senilai Rp24.727.319,00 atau 133,66%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung TA 2024 senilai Rp25.767.194,00, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp1.039.875,00 atau 4,04%. Mulai 2025, pemeriksaan teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) (pengganti IMB) resmi beralih dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP). Perubahan ini menyebabkan penurunan jumlah pemohon sementara karena adaptasi prosedur baru dan pengetatan standar teknis bangunan yang lebih komprehensif. Penurunan aktivitas pembangunan fisik atau kelesuan di sektor properti/konstruksi secara langsung mengurangi jumlah permohonan izin baru dan masih terdapat kecenderungan di masyarakat untuk melakukan pembangunan fisik terlebih dahulu sebelum mengurus perizinan resminya, dan adanya peralihan sistem administrasi dari Dinas PMTSP ke Dinas PUPRPKP.

5.1.1.1.3	Pendapatan	Hasil	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Pengelolaan	Kekayaan	3.741.723.567,47	4.930.224.687,96
	Daerah yang Dipisahkan			

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa dividen diperoleh dari BPD Kaltimara atau Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD TA 2025 dianggarkan senilai Rp6.099.406.000,00 dan terealisasi senilai Rp3.741.723.567,47 atau 61,35%.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan dari Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD TA 2024 senilai Rp4.930.224.687,96, Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp1.188.501.120,49 atau 24,11%. Penurunan Realisasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari dividen atas penyertaan modal pada Bankaltimtara dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh tidak dilakukannya penambahan penyertaan modal oleh pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Sementara itu, pemegang saham lainnya melakukan peningkatan modal disetor secara bertahap. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya dilusi persentase saham pemerintah Kabupaten Tana Tidung terhadap total modal ditempatkan dan disetor pada Bankaltimtara. Penurunan persentase kepemilikan tersebut berdampak langsung terhadap penurunan proporsi hak atas laba (dividen) yang diterima oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, meskipun kinerja keuangan Bankaltimtara secara umum tidak mengalami penurunan yang signifikan, kontribusi dividen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren menurun seiring dengan perubahan komposisi kepemilikan saham.

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
30.524.187.307,58 **36.163.518.123,49**

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 dianggarkan senilai Rp15.257.194.161,00 dan terealisasi senilai Rp30.524.187.307,58 atau 200,06 %. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 senilai Rp36.163.518.123,49, Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp5.639.330.815,91 atau 15,59%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Lain-lain PAD yang Sah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.7
Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00	258.133.908,00	129,07	231.524.500,00
2	Hasil Kerja Sama Daerah	200.000.000,00	0,00	0,00	228.413.484,63
3	Penerimaan Jasa Giro	4.526.753.653,00	9.466.066.454,28	209,11	7.609.090.345,26
4	Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah Daerah	0,00	2.931.498.473,22	0,00	14.893.284.569,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	184.888.000,00	10.074.036.421,66	5.448,72	5.428.170.032,02
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	59.518.239,39	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	646.506.099,00	1.471.713.241,39	227,64	238.334.414,58
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	6.000.000,00	19.323.042,00	322,05	0,00
9	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	0,00	279.639.000,00	0,00	0,00
10	Pendapatan Dari Pengembalian	827.238.409,00	3.807.044.281,93	460,21	118.758.853,00
11	Pendapatan BLUD	8.665.808.000,00	2.157.214.245,71	24,89	7.415.941.925,00
Jumlah		15.257.194.161,00	30.524.187.307,58	200,06	36.163.518.123,49

Berdasarkan tabel di atas terdapat pelampauan anggaran Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah oleh realisasi senilai Rp15.266.993.146,58 atau 100,06% yang disebabkan oleh realisasi beberapa komponen pendapatan yang melampaui target, terutama Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak Daerah dan Pendapatan dari Pengembalian.

5.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Terpisahkan **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
258.133.908,00 **231.524.500,00**

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan adalah penerimaan yang bersumber dari hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan dari kekayaan daerah. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan TA 2025 dianggarkan senilai Rp200.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp258.133.908,00 atau 129,07%. Jika dibandingkan dengan realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan TA 2024 senilai Rp231.524.500,00 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp26.609.408,00 atau 11,49%. Realisasi tersebut atas hasil penjualan aset daerah berdasarkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pelaksanaan Penjualan dan Penetapan Harga Minimal Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 100.3.3.2/012/K-I/2024 tanggal 05 Januari 2024 dan unit yang diusulkan untuk dilelang semuanya terlelang.

5.1.1.1.4.2 Hasil Kerjasama Daerah **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
0,00 **228.413.484,63**

Kerjasama daerah dengan daerah lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Hasil Kerjasama Daerah TA 2025 dianggarkan senilai Rp200.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp0,00 atau 0,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi Hasil Kerjasama Daerah TA 2024 senilai Rp228.413.484,63, Hasil Kerjasama Daerah TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp228.413.484,63 atau 100,00%. Penurunan terjadi karena Pemerintah Tana Tidung tidak memiliki pendapatan Hasil Kerjasama Daerah pada pemerintah pusat maupun pihak lainnya. Adapun rincian realisasi Hasil Kerjasama Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.8
Hasil Kerjasama Daerah TA 2025

No	Uraian	31-Des-25	31-Des-24
1	Surat Keputusan Pendaftaran Tanah	0,00	2.000.000,00
2	Pendapatan dari Setoran BPJS	0,00	33.798.000,00
4	Pendapatan dari Setoran Taspen	0,00	79.727.196,00
6	Pendapatan Lain-lain	0,00	98.440.170,63
7	Bunga Giro dari BNI	0,00	3.422.244,00
8	Denda keterlambatan pembayaran Pajak Daerah PBBP2 dan Retribusi Daerah	0,00	1.871.374,00
9	Piutang pajak MBLB	0,00	9.154.500,00
	Jumlah	0,00	228.413.484,63

5.1.1.1.4.3 Penerimaan Jasa Giro **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
9.466.066.454,28 **7.609.090.345,26**

Jasa Giro adalah manfaat atau *benefit* yang didapatkan nasabah ketika menempatkan dana dalam rekening giro. Jasa Giro dapat disamakan dengan bunga yang diterima jika memiliki tabungan biasa.

Jasa Giro TA 2025 dianggarkan senilai Rp4.526.753.653,00 dan terealisasi senilai Rp9.466.066.454,28 atau 209,11%. Jika dibandingkan dengan realisasi Jasa Giro TA 2024 senilai Rp7.609.090.345,26, Jasa Giro TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp1.856.976.109,02 atau 24,40%. Kenaikan tersebut disebabkan penggunaan kas belum optimal karena terdapat alokasi anggaran yang tidak direalisasikan, seperti belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.1.1.1.4.4	Pendapatan Bunga atas Penempatan Pemerintah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		2.931.498.473,22	14.893.284.569,00

Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil penyimpanan uang negara atau daerah pada Bank Umum dalam bentuk instrumen keuangan tertentu antara lain fasilitas dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) dan Bunga Deposito yang bertujuan untuk mengoptimalkan manajemen kas daerah terhadap dana yang sementara belum digunakan (*idle cash*) tanpa mengganggu likuiditas keuangan dan kualitas keuangan publik. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah TA 2025 dianggarkan senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp2.931.498.473,22 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah TA 2024 senilai Rp14.893.284.569,00, Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp11.961.786.095,78 atau 80,32%. Penurunan tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh berkurangnya pendapatan remunerasi atas penempatan dana pada fasilitas TDF senilai Rp587.564.672,00. Kondisi ini merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan strategis pengelolaan kas daerah, khususnya melalui percepatan dan peningkatan volume penarikan dana dari instrumen TDF untuk memenuhi belanja program dan kegiatan pemerintah daerah. Adapun rincian Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah disajikan pada tabel berikut.

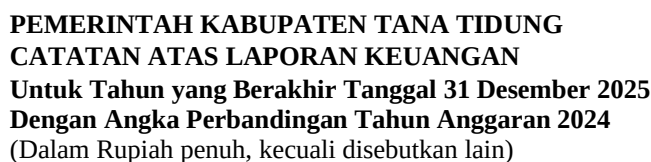
Tabel 5.9
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah TA 2025

No	Uraian	31-Des-25
1	Remunerasi atas TDF di Bank Indonesia	587.564.672,00
2	Bunga Deposito dari Bankaltimtara	202.739.726,02
3	Bunga Deposito dari Bank Rakyat Indonesia (BRI)	620.646.130,00
4	Bunga Deposito dari Bank Tabungan Negara (BTN)	1.520.547.945,20
TOTAL		2.931.498.473,22

5.1.1.1.4.5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		10.074.036.421,66	5.428.170.032,02

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah upaya yang dilakukan untuk kelancaran penyelesaian kerugian negara yang terjadi karena adanya perbuatan melanggar hukum dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) TA 2025 dianggarkan senilai Rp184.888.000,00 dan terealisasi senilai Rp10.074.036.421,66 atau 5.448,72%. Jika



5.1.1.1.4.6	Penerimaan Komisi, Potongan atau bentuk lain	31 Desember 2025 59.518.239,39	31 Desember 2024 0,00

5.1.1.1.4.7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	<u>31 Desember 2025</u> 1.471.713.241,39	<u>31 Desember 2024</u> 238.334.414,58

Pendapatan dari Denda atas Keterlambatan Pekerjaan TA 2025 dianggarkan senilai Rp646.506.099,00 dan terealisasi senilai Rp1.471.713.241,39 atau 227,64%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Denda atas Keterlambatan Pekerjaan TA 2024 senilai Rp238.334.414,58, Pendapatan dari Denda atas Keterlambatan Pekerjaan TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp1.233.378.826,81 atau 517,50%. Kenaikan terhadap Pendapatan dari Denda atas Keterlambatan Pekerjaan ini menunjukkan pelaksanaan pekerjaan penyedia tidak menyelesaikan dengan tepat waktu sesuai kontrak. Pelampauan realisasi terhadap target anggaran Pendapatan dari Denda atas



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Keterlambatan Pekerjaan senilai Rp825.207.142,39 atau 127,64% karena adanya pengenaan sanksi finansial terhadap penyedia jasa yang tidak mampu menyelesaikan komitmen pekerjaan sesuai masa kontrak yang ditetapkan dan target pendapatan denda ditetapkan secara konservatif (rendah) karena pemerintah tidak mengharapkan adanya kegagalan jadwal dalam proyek.

5.1.1.1.4.8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		19.323.042,00	0,00

Pendapatan Denda Pajak Daerah merupakan sanksi administrasi berupa uang yang dikenakan kepada wajib pajak atas pelanggaran kewajiban perpajakan seperti keterlambatan pembayaran atau pelaporan. Pendapatan Denda Pajak Daerah meliputi pendapatan denda PBB-P2 adalah sanksi administrasi berupa bunga yang wajib dibayar oleh wajib pajak akibat keterlambatan atau ketidakpatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (perdesaan dan perkotaan) setelah jatuh tempo.

Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2025 dianggarkan senilai Rp6.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp19.323.042,00 atau 322,05%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2024 senilai Rp0,00, Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp19.323.042,00 atau 100,00%. Kenaikan terhadap pendapatan denda pajak daerah dikarenakan akun pendapatan denda pajak daerah TA 2025 menyesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023, sedangkan TA 2024 pendapatan denda pajak daerah tersebut dicatat pada akun hasil kerjasama daerah. Pelampauan realisasi terhadap target Pendapatan Denda Pajak Daerah senilai Rp13.323.042,00 atau 222,05% karena optimalisasi dalam intensifikasi penagihan aktif melalui surat teguran serta sistem pengawasan internal terhadap jatuh tempo pembayaran pajak daerah serta meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam menyelesaikan piutang pajak masa lalu yang disertai dengan pembayaran sanksi administrasi yang baru disetorkan ke kas daerah pada tahun berjalan sehingga penerimaan yang diterima jauh melampaui target yang ditetapkan dalam penganggaran.

5.1.1.1.4.9	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		279.639.000,00	0,00

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa TA 2025 dianggarkan senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp279.639.000,00 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa TA 2024 senilai Rp0,00, Pelampauan realisasi terhadap target Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp279.639.000,00 atau 100,00% disebabkan adanya penerimaan yang sebelumnya tidak dianggarkan, berupa pengembalian uang muka dari pihak ketiga atas jaminan pelaksanaan



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

pekerjaan pembangunan jalan poros Bebatu–Sengkong Tahap III tanggal 1 Oktober 2024 oleh CV. Indiego Perkasa, dimana penerimaan tersebut baru disetorkan ke kas daerah pada tahun berjalan, sehingga pendapatan yang diterima melampaui target yang telah ditetapkan dalam anggaran.

5.1.1.1.4.10 Pendapatan Dari Pengembalian	<u>31 Desember 2025</u> 3.807.044.281,93	<u>31 Desember 2024</u> 118.758.853,00

Pendapatan dari Pengembalian TA 2025 dianggarkan senilai Rp827.238.409,00 dan terealisasi senilai Rp3.807.044.281,93 atau 460,21%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2024 senilai Rp118.758.853,00, Pendapatan dari Pengembalian TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp3.688.285.428,93 atau 3.105,69%. Pendapatan dari pengembalian TA 2025 mengalami kenaikan karena adanya kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan. Pelampauan realisasi terhadap target Pendapatan dari Pengembalian senilai Rp2.979.805.872,93 atau 360,21% karena adanya percepatan administrasi di unit kerja/SKPD atas pengembalian kelebihan pembayaran (seperti honorarium, tunjangan, gaji dan hibah) segera disetorkan kembali ke kasda sebelum tutup buku. Selain itu, faktor penambah nilai realisasi adalah adanya kebijakan penataan akun, berupa pemindahan pencatatan pendapatan Penyesuaian kembali akun Lain-lain PAD yang Sah, dimana pendapatan yang semula tercatat pada jenis/objek Tuntutan Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dialihkan ke jenis/objek Pendapatan dari Pengembalian, agar penyajian laporan sesuai dengan klasifikasi pendapatan yang sebenarnya.

5.1.1.1.4.11 Pendapatan BLUD	<u>31 Desember 2025</u> 2.157.214.245,71	<u>31 Desember 2024</u> 7.415.941.925,00

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 188.4.55/337/K-X/2022 tentang Penetapan BLUD pada RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 24 Oktober 2022, namun pelaksanaannya di TA 2023 dengan melengkapi beberapa dasar hukum yang tercantum dalam Kemendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD. Kemudian dari beberapa dasar hukum salah satunya adalah Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran pada BLUD RSUD Akhmad Berahim maka pendapatan BLUD TA 2025 dianggarkan senilai Rp8.665.808.000,00 dan terealisasi senilai Rp2.157.214.245,71 atau 24,89%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan BLUD TA 2024 senilai Rp7.415.941.925,00, Pendapatan BLUD TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp5.258.727.679,29 atau 70,91% karena pada tahun 2025 atas pendapatan BLUD RSUD Akhmad Berahim dan pendapatan BLUD seluruh Puskesmas dicatat menjadi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan BLUD disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel 5.10

Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim	7.005.000.000,00	88.207.203,00	1,26	7.415.941.925,00
2	Puskesmas Tideng Pale	779.352.000,00	902.720.791,00	115,83	0,00
3	Puskesmas Sesayap Hilir	440.744.000,00	566.381.056,52	128,51	0,00
4	Puskesmas Tana Lia	201.984.000,00	234.204.385,95	115,95	0,00
5	Puskesmas Kujau	168.840.000,00	264.049.235,00	156,39	0,00
6	Puskesmas Muruk Rian	69.888.000,00	101.651.574,24	145,45	0,00
	Jumlah	8.665.808.000,00	2.157.214.245,71	24,89	7.415.941.925,00

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

31 Desember 2025 **31 Desember 2024**
1.024.352.520.352,00 **1.415.256.686.466,00**

Pendapatan Transfer sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan penerimaan uang atau hak atas pendapatan oleh entitas pelaporan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya. Berdasarkan pasal 106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) kini terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa, yang bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain alokasi dari Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Daerah juga bersumber dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yang pada Tahun Anggaran 2025 diatur secara teknis melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100.3.3.1/55/2026 tentang Penetapan Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepada Kabupaten/Kota TA 2025. Pendapatan Transfer TA 2025 dianggarkan senilai Rp996.132.183.331,00 dan terealisasi senilai Rp1.024.352.520.352,00 atau 102,83%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 senilai Rp1.415.256.686.466,00, Pendapatan Transfer TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp390.904.166.114,00 atau 27,62%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel 5.11

Realisasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
A	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	982.308.887.000,00	976.414.177.571,00	99,40	1.342.315.180.153,00
1	Transfer Pemerintah Pusat - Perimbangan	947.926.898.000,00	942.849.102.171,00	99,46	1.298.349.353.153,00
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	34.381.989.000,00	33.565.075.400,00	97,62	43.965.827.000,00
B	Pendapatan Transfer Antar Daerah	13.823.296.331,00	47.938.342.781,00	346,79	72.941.506.313,00
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	12.088.801.079,00	46.203.847.529,00	382,20	35.037.618.142,00
2	Bantuan Keuangan - LRA	1.734.495.252,00	1.734.495.252,00	100,00	37.903.888.171,000
Jumlah A + B		996.132.183.331,00	1.024.352.520.352,00	102,83	1.415.256.686.466,00

5.1.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	<u>31 Desember 2025</u> 976.414.177.571,00	<u>31 Desember 2024</u> 1.342.315.180.153,00

Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a juncto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pengelolaan Keuangan Negara dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2025. Kemudian Transfer Pemerintah Pusat diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2025. Perubahan rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Pengaturan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam hal ini PMK Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan DBH dan DAU, alokasi lebih bayar dana bagi hasil diperhitungkan dalam penyaluran alokasi kurang bayar dana bagi hasil. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025. Adapun peraturan rincian Penetapan penyaluran KB dan LB DBH tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/ tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025.

Dalam dana transfer pusat ini, pemerintah daerah memiliki dana bagi hasil yang ditempatkan dalam fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) atau non tunai yang telah melewati masa *holding period* dan dapat dilakukan penarikan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus pada Pasal 47 ayat 1 menyebutkan bahwa Transfer ke Daerah dalam bentuk



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

tunai dan non tunai, Penyaluran TKD dalam bentuk nontunai yang meliputi penerbitan SBN dan TDF. Dana Bagi hasil dalam bentuk non tunai Kabupaten Tana Tidung dalam bentuk TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh BUN bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Penyaluran dana TDF diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara Non Tunai melalui fasilitas TDF.

Dari beberapa kali penyesuaian dan penetapan Pagu TKDD, maka pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 dianggarkan senilai Rp982.308.887.000,00 dan terealisasi senilai Rp976.414.177.571,00 atau 99,40%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 senilai Rp1.342.315.180.153,00, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp365.901.002.582,00 atau 27,26%. Tidak tercapainya realisasi terhadap target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat senilai Rp5.894.709.429,00 atau 0,60% karena adanya penyesuaian penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) khususnya terkait perhitungan kurang bayar (KB) dan lebih bayar (LB) DBH, sehingga jumlah transfer yang diterima daerah tidak seluruhnya sesuai dengan pagu yang telah dianggarkan sebagian dana masih ditempatkan pada fasilitas TDF dan belum dapat dicairkan pada tahun anggaran berjalan, serta adanya kebijakan efisiensi dan penyesuaian belanja pemerintah pusat yang turut mempengaruhi besaran penyaluran transfer ke daerah. Adapun rincian realisasi Transfer Pemerintah Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.12
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	942.849.102.171,00	1.298.349.353.153,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	33.565.075.400,00	43.965.827.000,00
Jumlah		976.414.177.571,00	1.342.315.180.153,00

5.1.1.2.1.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 31 Desember 2025 31 Desember 2024
942.849.102.171,00 1.298.349.353.153,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yaitu salah satunya adalah Dana Bagi Hasil. Transfer Dana Bagi Hasil ini tidak hanya disalurkan dalam bentuk tunai, tetapi juga dapat berupa non-tunai melalui TDF, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK Nomor 19 Tahun 2024 mengenai Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara non-tunai melalui TDF.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2025 senilai Rp942.849.102.171,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2024 senilai Rp1.298.349.353.153,00, maka Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp355.500.250.982,00 atau 27,38%. Adapun rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebagai berikut.

Tabel 5.13
Realisasi Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dana Bagi Hasil	506.994.414.300,00	832.040.549.000,00	(325.046.134.700,00)	(39,07)
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	397.312.680.666,00	425.690.872.922,00	(28.378.192.256,00)	(6,67)
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	38.542.007.205,00	40.617.931.231,00	(2.075.924.026,00)	(5,11)
Jumlah		942.849.102.171,00	1.298.349.353.153,00	(355.500.250.982,00)	(27,38)

5.1.1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil

31 Desember 2025
506.994.414.300,00

31 Desember 2024
832.040.549.000,00

Dana Bagi Hasil TA 2025 dianggarkan senilai Rp503.424.284.000,00 dan terealisasi senilai Rp506.994.414.300,00 atau 100,71%. Jika dibandingkan dengan realisasi Dana Bagi Hasil TA 2024 senilai Rp832.040.549.000,00, maka realisasi Dana Bagi Hasil TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp325.046.134.700,00 atau 39,07%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.14
Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025				%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi				
			Dana TDF	Realisasi TA 2025	Total		
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	203.634.442.000,00	0,00	203.740.003.800,00	203.740.003.800,00	100,05	18.912.969.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	5.658.197.000,00	0,00	5.404.240.300,00	5.404.240.300,00	95,51	3.353.531.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	188.208.000,00	0,00	172.967.200,00	172.967.200,00	91,90	111.163.000,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	392.475.000,00	0,00	392.475.000,00	392.475.000,00	100,00	1.899.280.000,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	156.127.000,00	0,00	179.952.000,00	179.952.000,00	115,26	290.698.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	274.268.000,00	0,00	274.268.000,00	274.268.000,00	100,00	325.447.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	TA 2025				%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi				
			Dana TDF	Realisasi TA 2025	Total		
7	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	286.545.638.000,00	3.709.941.000,00	286.545.638.000,00	290.255.579.000,00	101,29	794.913.065.000,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.323.315.000,00	0,00	2.323.315.000,00	2.323.315.000,00	100,00	5.030.298.000,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	328.325.000,00	0,00	328.325.000,00	328.325.000,00	100,00	0,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.174.532.000,00	0,00	1.174.532.000,000	1.174.532.000,000	100,00	1.578.376.000,00
11	DBH Sawit	2.748.757.000,00	0,00	2.748.757.000,00	2.748.757.000,00	100,00	5.625.722.000,00
Jumlah		503.424.284.000,00	3.709.941.000,00	503.284.473.300,00	506.994.414.300,00	100,71	832.040.549.000,00

5.1.1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 31 Desember 2025 31 Desember 2024
209.317.211.300,00 22.377.663.000,00

Dana Bagi Hasil Pajak TA 2025 dianggarkan senilai Rp209.480.847.000,00 dan terealisasi senilai Rp209.317.211.300,00 atau 99,92%. Jika dibandingkan dengan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 senilai Rp22.377.663.000,00, maka realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp186.939.548.300,00 atau 835,38%. Kenaikan yang sangat signifikan tersebut disebabkan oleh melonjaknya pendapatan negara dari sektor pajak secara nasional. Seiring dengan meningkatnya penerimaan pajak pusat, alokasi Dana Bagi Hasil yang disalurkan kepada daerah pun turut meningkat. Adapun rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.15

Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025				%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi				
			Dana TDF	Realisasi TA 2025	Total		
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	203.634.442.000,00	0,00	203.740.003.800,00	203.740.003.800,00	100,05	18.912.969.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	5.658.197.000,00	0,00	5.404.240.300,00	5.404.240.300,00	95,51	3.353.531.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	188.208.000,00	0,00	172.967.200,00	172.967.200,00	91,90	111.163.000,00
Jumlah		209.480.847.000,00	0,00	209.317.211.300,00	209.317.211.300,00	99,92	22.377.663.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.1.1.2.1.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) 31 Desember 2025 31 Desember 2024
294.928.446.000,00 804.037.164.000,00

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2025 dianggarkan senilai Rp291.194.680.000,00 dengan realisasi senilai Rp294.928.446.000,00 atau 101,28% dari anggaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi DBH Sumber Daya Alam TA 2024 senilai Rp804.037.164.000,00, maka realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp509.108.718.000,00 atau 63,32%. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya pendapatan negara dari sektor Sumber Daya Alam, khususnya komoditi sumber daya alam minyak bumi dan mineral dan batubara royalti. Penurunan pendapatan negara di sektor tersebut secara otomatis berdampak pada berkurangnya alokasi Dana Bagi Hasil yang disalurkan kepada daerah.. Adapun rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) dan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.16
Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025				%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi				
			Dana TDF	Realisasi TA 2025	Total		
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	392.475.000,00	0,00	392.475.000,00	392.475.000,00	100,00	1.899.280.000,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	156.127.000,00	0,00	179.952.000,00	179.952.000,00	115,26	290.698.000,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	274.268.000,00	0,00	274.268.000,00	274.268.000,00	100,00	325.447.000,00
4	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	286.545.638.000,00	3.709.941.000,00	286.545.638.000,00	290.255.579.000,00	101,29	794.913.065.000,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.323.315.000,00	0,00	2.323.315.000,00	2.323.315.000,00	100,00	5.030.298.000,00
6	DBH SDA Kehutanan-luran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	328.325.000,00	0,00	328.325.000,00	328.325.000,00	100,00	0,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.174.532.000,00	0,00	1.174.532.000,00	1.174.532.000,00	100,00	1.578.376.000,00
Jumlah		291.194.680.000,00	3.709.941.000,00	291.218.505.000,00	294.928.446.000,00	101,28	804.037.164.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.1.1.2.1.1.3 Dana Bagi Hasil Lainnya (DBH Sawit)	<u>31 Desember 2025</u> 2.748.757.000,00	<u>31 Desember 2024</u> 5.625.722.000,00

Dana Bagi Hasil Lainnya TA 2025 dianggarkan senilai Rp2.748.757.000,00 dengan realisasi senilai Rp2.748.757.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi Dana Bagi Hasil Lainnya TA 2024 senilai Rp5.625.722.000,00, maka realisasi Dana Bagi Hasil Lainnya TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp2.876.965.000,00 atau 51,14%. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya pendapatan negara dari sektor Sumber Daya Alam, khususnya komoditas kelapa sawit.

5.1.1.2.1.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	<u>31 Desember 2025</u> 397.312.680.666,00	<u>31 Desember 2024</u> 425.690.872.922,00

DAU merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom (provinsi, kabupaten, dan kota) setiap tahunnya. DAU menjadi salah satu komponen pendapatan dalam APBD dan berfungsi sebagai dana pembangunan daerah. Tujuan utama DAU adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal. Besaran DAU setiap daerah ditetapkan melalui Keputusan Presiden, sehingga besaran yang diterima setiap kabupaten/kota tidak sama. DAU TA 2025 dianggarkan senilai Rp402.661.605.000,00 dengan realisasi senilai Rp397.312.680.666,00 atau 98,67% dari anggaran yang ditetapkan, Jika dibandingkan dengan realisasi DAU TA 2024 senilai Rp425.690.872.922,00, maka realisasi Dana Alokasi Umum TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp28.378.192.256,00 atau 6,67%. Penurunan tersebut disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran Tahun 2025 melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD serta PMK Nomor 56 Tahun 2025. Kebijakan efisiensi ini mengakibatkan pemangkasan pada Belanja Transfer ke Daerah (TKD), termasuk DAU.

Selain itu, realisasi Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (*Specific Grant*) tidak mencapai 100,00%. Pada bidang tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), DAU dianggarkan senilai Rp10.463.412.000,00 dan terealisasi senilai Rp5.381.538.256,00. Realisasi ini menyesuaikan dengan gaji PPPK yang diangkat pada TA 2025, yaitu untuk periode gaji bulan Oktober hingga Desember. Pemberian DAU bersifat kombinasi, yaitu terdiri atas DAU *Block Grant* (tidak ditentukan penggunaannya) dan DAU *Specific Grant* (ditentukan penggunaannya). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Adapun rincian anggaran dan realisasi DAU disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.17
Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025			%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Potongan	Realisasi		
1	Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	340.233.407.000,00	0,00	339.966.356.410,00	99,92	349.264.548.000,00
2	Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK	10.463.412.000,00	0,00	5.381.538.256,00	51,43	5.756.624.922,00
3	Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan	38.264.051.000,00	0,00	38.264.051.000,00	100,00	25.678.444.000,00
4	Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan	13.700.735.000,00	0,00	13.700.735.000,00	100,00	13.513.380.000,00
5	Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	31.477.876.000,00
Jumlah		402.661.605.000,00	0,00	397.312.680.666,00	98,67	425.690.872.922,00

5.1.1.2.1.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
38.542.007.205,00 **40.617.931.231,00**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi APBN kepada Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk Dana Perimbangan disamping Dana DAU. DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. DAK TA 2025 dianggarkan senilai Rp41.841.009.000,00 dengan realisasi senilai Rp38.542.007.205,00 atau 92,12% dari anggaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi DAK TA 2024 senilai Rp40.617.931.231,00, maka realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp2.075.924.026,00 atau 5,11%. DAK terdiri dari Dana Transfer Khusus-DAK Fisik dan Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik. Adapun rincian anggaran dan realisasi DAK disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel 5.18
Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik
TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.999.832.000,00	10.810.611.370,00	98,28	0,00
2	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	2.268.866.000,00	2.247.694.000,00	99,07	0,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00	775.285.700,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	0,00	1.601.422.598,00
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	960.209.895,00
6	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	9.560.668.240,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	1.901.850.564,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	3.401.703.628,00
9	DAK Non Fisik-BOS Reguler	6.023.546.000,00	5.940.759.247,00	98,63	5.776.158.629,00
10	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	608.500.000,00	608.500.000,00	100,00	597.500.000,00
11	DAK Non Fisik-TPG PNSD	9.692.749.000,00	8.281.449.600,00	85,44	6.365.703.000,00
12	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	482.750.000,00	675.000.000,00	139,82	296.662.000,00
13	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.078.499.000,00	1.500.258.320,00	139,11	1.048.181.000,00
14	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.046.632.000,00	1.011.530.000,00	96,65	971.392.800,00
15	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	344.710.000,00	310.608.878,00	90,11	306.144.300,00
16	DAK Non Fisik-BOKB-KB	1.158.100.000,00	831.212.900,00	71,77	792.301.156,00
17	DAK Non Fisik-BOK-BOK Puskesmas	3.411.298.000,00	2.209.197.516,00	64,76	3.633.032.949,00
18	DAK Non Fisik-BOK-BOK Dinas-Kab/kota	3.958.179.000,00	3.451.051.374,00	87,19	2.267.923.772,00
19	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	303.988.000,00	303.988.000,00	100,00	0,00
20	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	297.446.000,00	74,24	361.791.000,00
21	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	62.700.000,00	62.700.000,00	100,00	0,00
Jumlah		41.841.009.000,00	38.542.007.205,00	92,12	40.617.931.231,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- a. Dana Transfer Khusus berupa DAK Fisik TA 2025 dianggarkan senilai Rp13.268.698.000,00 dengan realisasi senilai Rp13.058.305.370,00 atau 98,41% dari anggaran yang ditetapkan, Jika dibandingkan dengan realisasi DAK Fisik TA 2024 senilai Rp18.201.140.625,00, maka realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp5.142.835.255,00 atau 28,26%. Penurunan tersebut salah satunya disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran Tahun 2025 yang mengakibatkan berkurangnya alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari pemangkasan Belanja TKD, sehingga beberapa kegiatan DAK Fisik di bidang lainnya tidak dapat terlaksana. Adapun rincian anggaran dan realisasi DAK Fisik disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.19
Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.999.832.000,00	10.810.611.370,00	98,28	0,00
2	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	2.268.866.000,00	2.247.694.000,00	99,07	0,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00	775.285.700,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	0,00	1.601.422.598,00
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	960.209.895,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	1.901.850.564,00
7	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	9.560.668.240,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	3.401.703.628,00
Jumlah		13.268.698.000,00	13.058.305.370,00	98,41	18.201.140.625,00

- b. Dana Transfer Khusus berupa DAK Non Fisik TA 2025 dianggarkan senilai Rp28.572.311.000,00 dengan realisasi senilai Rp25.483.701.835,00 atau 89,19% dari anggaran yang ditetapkan, Jika dibandingkan dengan realisasi DAK Non Fisik TA 2024 senilai Rp22.416.790.606,00, maka realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp3.066.911.229,00 atau 13,68%. Adapun rincian anggaran dan realisasi DAK Non Fisik disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel 5.20

Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	TA 2025				%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi				
			Penerimaan tidak melalui Kasda	Penerimaan melalui Kasda	Total		
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	6.023.546.000,00	5.940.759.247,00	0,00	5.940.759.247,00	98,63	5.776.158.629,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	608.500.000,00	608.500.000,00	0,00	608.500.000,00	100,00	597.500.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	9.692.749.000,00	8.281.449.600,00	0,00	8.281.449.600,00	85,44	6.365.703.000,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	482.750.000,00	675.000.000,00	0,00	675.000.000,00	139,82	296.662.000,00
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.078.499.000,00	1.500.258.320,00	0,00	1.500.258.320,00	139,11	1.048.181.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.046.632.000,00	1.011.530.000,00	0,00	1.011.530.000,00	96,65	971.392.800,00
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	344.710.000,00	310.608.878,00	0,00	310.608.878,00	90,11	306.144.300,00
8	DAK Non Fisik-BOKB-KB	1.158.100.000,00	0,00	831.212.900,00	831.212.900,00	71,77	792.301.156,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	303.988.000,00	0,00	303.988.000,00	303.988.000,00	100,00	0,00
10	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	0,00	297.446.000,00	297.446.000,00	74,24	361.791.000,00
11	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	62.700.000,00	0,00	62.700.000,00	62.700.000,00	100,00	0,00
12	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3.958.179.000,00	0,00	3.451.051.374,00	3.451.051.374,00	87,19	2.267.923.772,00
13	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	3.411.298.000,00	2.209.197.516,00	0,00	2.209.197.516,00	64,76	3.633.032.949,00
Jumlah		28.572.311.000,00	20.537.303.561,00	4.946.398.274,00	25.483.701.835,00	89,19	22.416.790.606,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Berdasarkan tabel di atas realisasi DAK Non Fisik TA 2025 senilai Rp25.483.701.835,00 dengan anggaran senilai Rp28.572.311.000,00 atau 89,19% sehingga masih terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi. Namun demikian, terdapat dua rincian yang melampaui pagu, yaitu DAK Non Fisik Tamsil Guru PNSD dan TKG PNSD, kelebihan tersebut disebabkan oleh pembayaran kekurangan tunjangan Triwulan IV Tahun 2024 yang direalisasikan pada Tahun 2025, masing-masing untuk Tamsil senilai Rp137.250.000,00 dan TKG senilai Rp107.773.820,00 serta adanya penambahan jumlah guru penerima tunjangan. Kondisi ini terjadi karena penetapan nominasi penerima tunjangan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak lagi terlibat dalam proses pengusulan penerima.

Dari tabel di atas ada beberapa DAK Non Fisik yang tidak melalui RKUD atau (Non RKUD), sebagai berikut.

- DAK Non Fisik BOS Reguler dianggarkan senilai Rp6.023.546.000,00 dengan realisasi senilai Rp5.940.759.247,00 atau 98,63% dari anggaran yang ditetapkan, Selanjutnya, DAK Non Fisik BOS Kinerja dianggarkan senilai Rp608.500.000,00 dengan realisasi senilai Rp608.500.000,00 atau 100%.
- DAK Non Fisik BOP PAUD/TK dianggarkan senilai Rp1.046.632.000,00 dengan realisasi senilai Rp1.011.530.000,00 atau 96,65%,. Namun demikian, BOP PAUD/TK Swasta tersebut tidak diakui sebagai salah satu SiLPA sesuai Permendagri Nomor 3 Tahun 2023.
- DAK Non Fisik Kesetaraan dianggarkan senilai Rp344.710.000,00 dengan realisasi senilai Rp310.608.878,00 atau 90,11%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kesetaraan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.21
Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP
Kesetaraan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Tana Tidung (SPNF SKB KABUPATEN TANA TIDUNG)	239.780.000,00	205.744.058,00	85,81	206.974.300,00
2	BOSP Kesetaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mandiri (Swasta)	104.930.000,00	104.864.820,00	99,94	99.170.000,00
Jumlah		344.710.000,00	310.608.878,00	90,11	306.144.300,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- d. DAK Non Fisik-TPG PNSD dianggarkan senilai Rp9.692.749.000,00 dan terealisasi senilai Rp 8.281.499.600,00 atau 85,44%,
- e. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD dianggarkan senilai Rp482.750.000,00 dan terealisasi senilai Rp 675.000.000,00 atau 139,82%, DAK Non Fisik-TKG PNSD dianggarkan senilai Rp1.078.499.000,00 dan terealisasi senilai Rp1.500.258.320,00 atau 139,11%,
- f. DAK Non Fisik BOK Puskesmas dianggarkan senilai Rp3.411.298.000,00 realisasi senilai Rp2.209.197.516,00 atau 64,76%. Adapun rincian DAK Non Fisik BOK Puskesmas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.22
Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOK
Puskesmas TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Puskesmas Tideng Pale	667.108.788,00	147.416.488,00	22,10	765.203.382,00
2	Puskesmas Sesayap Hilir	846.716.962,00	688.417.274,00	81,30	977.957.235,00
3	Puskesmas Tana Lia	695.406.131,00	574.094.398,00	82,56	733.349.075,00
4	Puskesmas Kujau	632.137.846,00	407.442.780,00	64,45	703.846.657,00
5	Puskesmas Muruk Rian	569.928.273,00	391.826.576,00	68,75	452.676.600,00
Jumlah		3.411.298.000,00	2.209.197.516,00	64,76	3.633.032.949,00

5.1.1.2.1.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
33.565.075.400,00 **43.965.827.000,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2025 senilai Rp33.565.075.400,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2024 senilai Rp43.965.827.000,00, maka Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp10.400.751.600,00 atau 23,66%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel 5.23
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Dana Desa	27.385.891.000,00	26.568.977.400,00	97,02	29.801.783.000,00
2	Insentif Fiskal	6.996.098.000,00	6.996.098.000,00	100,00	14.164.044.000,00
Jumlah		34.381.989.000,00	33.565.075.400,00	97,62	43.965.827.000,00

5.1.1.2.1.2.1 Dana Desa **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
26.568.977.400,00 **29.801.783.000,00**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa. Dana Alokasi Desa per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa TA 2025. Dana Alokasi Desa TA 2025 dianggarkan senilai Rp27.385.891.000,00 dan terealisasi senilai Rp26.568.977.400,00 atau 97,02%. Jika dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Desa TA 2024 senilai Rp29.801.783.000,00, Dana Alokasi Desa TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp3.232.805.600,00 atau 10,85%. Realisasi Dana Desa mengalami penurunan karena secara nasional alokasi Anggaran Dana Desa mengalami penurunan karena adanya kebijakan Efisiensi Anggaran. Adapun rincian transfer Dana Desa TA 2025 pada **Lampiran 5.2**.

5.1.1.2.1.2.2 Insentif Fiskal **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
6.996.098.000,00 **14.164.044.000,00**

Insentif Fiskal TA 2025 dianggarkan senilai Rp6.996.098.000,00 dan terealisasi senilai Rp6.996.098.000,00 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi Insentif Fiskal TA 2024 senilai Rp14.164.044.000,00, Insentif Fiskal TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp7.167.946.000,00 atau 50,61%. Penurunan signifikan tersebut terjadi karena anggaran Insentif Fiskal TA 2025 mengalami penurunan disebabkan adanya efisiensi anggaran transfer ke daerah sesuai dengan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN/APBD dan PMK Nomor 56 Tahun 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.1.1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		47.938.342.781,00	72.941.506.313,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur yang terdiri dari Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan. Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2025 dianggarkan senilai Rp13.823.296.331,00 dan terealisasi senilai Rp47.938.342.781,00 atau 346,79%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2024 senilai Rp72.941.506.313,00, Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp25.003.163.532,00 atau 34,28%. Hal tersebut disebabkan karena pada TA 2025 Kabupaten Tana Tidung tidak menerima Transfer Bantuan Keuangan Umum dan Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Kalimantan Utara.

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2025 yang melebihi target dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, terdapat peningkatan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.89/2024, alokasi Bagi Hasil Pajak TA 2023 ditetapkan lebih tinggi dibandingkan proyeksi yang digunakan dalam penyusunan APBD TA 2025. Hal ini menyebabkan realisasi pendapatan Bagi Hasil Pajak mencapai Rp46.203.847.529,00 atau 382,20% dari target anggaran Rp12.088.801.079,00, meskipun secara nominal mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Kelebihan ini terjadi karena anggaran direncanakan lebih konservatif sementara realisasi mengikuti ketentuan definitif dari provinsi.

Bantuan Keuangan TA 2025 mengalami penurunan drastis dari Rp37.903.888.171,00 menjadi Rp1.734.495.252,00 atau 95,42% karena Kabupaten Tana Tidung tidak mendapat alokasi anggaran bantuan keuangan umum dari Provinsi Kalimantan Utara, dan bantuan keuangan khusus juga mengalami penurunan dibanding pada TA 2024, sesuai SK Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100.3.3.1/11/2025 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Kab/Kota Provinsi Kalimantan Utara berupa tunjangan tambahan ketua rukun tetangga TA 2025 dan SK Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100.3.3.1/102/2025 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi Provinsi Kalimantan Utara TA 2025 sehingga menyebabkan pendapatan transfer antar daerah mengalami penurunan. Adapun rincian pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan sebagai berikut.

5.1.1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		46.203.847.529,00	35.037.618.142,00

Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100.3.3.1/55/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Penetapan Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepada Kabupaten/Kota TA 2025 dan SK



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.396/2024 Tentang Perubahan Penetapan Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepada Kabupaten/Kota TA 2025. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepada Kabupaten/Kota TA 2025 ditargetkan senilai Rp12.088.801.079,00 dan terealisasi senilai Rp46.203.847.529,00 atau 382,20%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2024 senilai Rp35.037.618.142,00, Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp11.166.229.387,00 atau 31,87%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.24
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi			%	Realisasi TA. 2024
			Realisasi KB TA 2025	Realisasi Tahun 2025	Total		
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	531.607.959,00	1.020.242.716,00	21.486.601,00	1.041.729.317,00	195,96	981.138.634,00
2	Bagi Hasil Dari Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	512.928.288,00	986.361.648,00	19.747.464,00	1.006.109.112,00	196,15	1.334.747.398,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	7.744.264.832,00	13.327.459.124,00	26.749.043.832,00	40.076.502.956,00	517,50	31.156.253.282,00
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (AP)	300.000.000,00	129.358.548,00	316.566.466,00	445.925.014,00	148,64	167.703.676,00
5	Bagi Hasil Pajak Lainnya/Pajak Rokok	3.000.000.000,00	0,00	3.633.581.130,00	3.633.581.130,00	121,12	1.397.775.152,00
Jumlah		12.088.801.079,00	15.463.422.036,00	30.740.425.493,00	46.203.847.529,00	382,20	35.037.618.142,00

5.1.1.2.2.2 Bantuan Keuangan

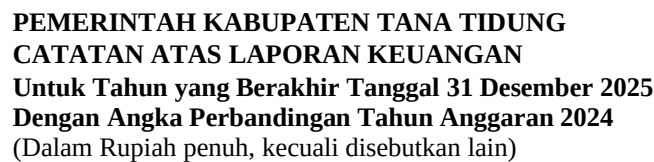
31 Desember 2025 **31 Desember 2024**
1.734.495.252,00 **37.903.888.171,00**

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada Kabupaten Tana Tidung TA 2025 dianggarkan senilai Rp1.734.495.252,00 dan terealisasi senilai Rp1.734.495.252,00 atau 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi Bantuan Keuangan TA 2024 senilai Rp37.903.888.171,00, Bantuan Keuangan TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp36.169.392.919,00 atau 95,42%. Penurunan signifikan tersebut terjadi karena alokasi bantuan keuangan umum TA 2025 nihil atau tidak mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

5.1.1.2.2.2.1 Bantuan Keuangan Umum

31 Desember 2025 **31 Desember 2024**
0,00 **29.750.000.000,00**

Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Umum kepada Kabupaten Tana Tidung TA 2025 senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp0,00 atau 0%. Jika



Tabel 5.25

Rincian Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Umum TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Pematangan Lahan Landscape Bundaran Pusat Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	11.750.000.000,00
2	Pembangunan Jalan Poros Bebatu-Desa Sengkong Tahap III Zona B	0,00	0,00	0,00	9.000.000.000,00
3	Rekonstruksi Jalan IR.Soekarno (Bundaran-Simpang AJP)	0,00	0,00	0,00	9.000.000.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	29.750.000.000,00

5.1.1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan Khusus	31 Desember 2025 1.734.495.252,00	31 Desember 2024 8.153.888.171,00

Bantuan Keuangan Khusus TA 2025 dianggarkan senilai Rp1.734.495.252,00 dan terealisasi senilai Rp1.734.495.252,00 atau 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi Bantuan Keuangan Khusus TA 2024 senilai Rp8.153.888.171,00, Bantuan Keuangan Khusus TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp6.419.392.919,00 atau 78,73%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Bantuan Keuangan Khusus disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.26

Rincian Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Tambahan Penghasilan Guru	0,00	0,00	0,00	6.107.400.000,00
2	ASN & TBPP-Penyuluh	0,00	0,00	0,00	438.000.000,00
3	Bantuan Keuangan Khusus TAPE	1.374.495.252,00	1.374.495.252,00	100,00	1.251.488.171,00
4	Tunjangan Tambahan Ketua RT	360.000.000,00	360.000.000,00	100,00	357.000.000,00
Jumlah		1.734.495.252,00	1.734.495.252,00	100,00	8.153.888.171,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		71.797.579,00	19.030.199.300,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025 yang terdiri atas Pendapatan atas Dana Hibah dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP dianggarkan senilai Rp132.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp71.797.579,00 atau 54,39%. Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2024 senilai Rp19.030.199.300,00, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp18.958.401.721,00 atau 99,62%. Adapun Penjelasan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diuraikan sebagai berikut.

5.1.1.3.1	Pendapatan Hibah	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		0,00	17.314.145.000,00

Pendapatan Hibah terdiri atas Pendapatan Hibah dari Pemerintah pusat. Anggaran Pendapatan Hibah TA 2025 senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah TA 2024 senilai Rp17.314.145.000,00, maka Pendapatan Hibah TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp17.314.145.000,00 atau 100%. Pendapatan Hibah mengalami penurunan yang signifikan karena tidak adanya alokasi atau transfer dana hibah dari pemerintah pusat dibandingkan tahun sebelumnya yang memiliki realisasi cukup besar.

5.1.1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		71.797.579,00	1.716.054.300,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan bagian dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan FKTP TA 2025 dianggarkan senilai Rp132.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp71.797.579,00 atau 54,39%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 senilai Rp1.716.054.300,00, maka Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp1.644.256.721,00 atau 95,82%.

5.1.1.3.2.1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan FKTP	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		71.797.579,00	1.716.054.300,00

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP TA 2025 dianggarkan senilai Rp132.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp71.797.579,00 atau 54,39%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP TA 2024 senilai Rp1.716.054.300,00, maka Pendapatan Dana Kapitasi JKN TA



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

2025 mengalami penurunan senilai Rp1.644.256.721,00 atau 95,82%. Penurunan tersebut disebabkan seluruh puskesmas pada TA 2025 tidak menerima Pendapatan Dana Kapitasi JKN, karena puskesmas sudah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD Sesuai Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 100.3.3.2/426/K-X11/2024 pada tanggal 24 Desember 2024, tentang Penerapan Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Tana Tidung. Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan FKTP disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.27

Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan FKTP
TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Puskesmas Tideng Pale	0,00	0,00	0,00	748.636.237,00
2	Puskesmas Sesayap Hilir	0,00	0,00	0,00	464.209.583,00
3	Puskesmas Tana Lia	0,00	0,00	0,00	219.391.136,00
4	Puskesmas Kujau	0,00	0,00	0,00	211.439.105,00
5	Puskesmas Muruk Rian	0,00	0,00	0,00	72.378.239,00
6	RSP Tanjung Kramat	132.000.000,00	71.797.579,00	54,39	0,00
Jumlah		132.000.000,00	71.797.579,00	54,39	1.716.054.300,00

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP TA 2025 hanya terdapat pada RSP Tanjung Kramat dengan anggaran senilai Rp132.000.000,00 dan realisasi senilai Rp71.797.579,00 atau 45,61%. Tidak tercapainya target anggaran dikarenakan pengaruhi oleh proses migrasi peserta JKN dari Puskesmas Tana Lia ke RSP Tanjung Kramat yang dilakukan secara bertahap, sehingga jumlah peserta terdaftar belum stabil di awal periode dan berdampak pada penerimaan kapitasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum tercapainya target pendapatan merupakan dampak dari proses penyesuaian jumlah peserta yang masih berlangsung sepanjang tahun.

5.1.2 Belanja

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
1.166.511.172.955,70	1.356.243.522.076,42

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening kas daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu TA yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari SKPD yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*performance-based budgeting*), yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Belanja Daerah TA 2025 dianggarkan senilai Rp1.433.234.595.478,90 dan terealisasi senilai Rp1.166.511.172.955,70 atau 81,39% dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp1.356.243.522.076,42, maka Belanja Daerah TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp189.732.349.120,72 atau 13,99%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.28
Realisasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
I	Belanja Operasi	784.968.530.028,51	661.098.426.989,46	84,22	774.466.031.112,02
1	Belanja Pegawai	390.349.994.098,23	315.896.000.484,00	80,93	313.541.036.552,00
2	Belanja Barang dan Jasa	374.707.901.789,28	325.696.829.085,46	86,92	422.867.337.627,02
3	Belanja Hibah	19.667.134.141,00	19.262.097.420,00	97,94	38.040.036.933,00
4	Belanja Bantuan Sosial	243.500.000,00	243.500.000,00	100,00	17.620.000,00
II	Belanja Modal	434.056.815.945,39	386.884.401.043,24	89,13	446.286.590.042,40
1	Belanja Modal Tanah	3.015.903.866,00	2.847.964.666,00	94,43	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.255.670.619,00	35.323.557.737,00	89,98	39.818.595.746,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	259.808.320.981,39	233.904.479.133,85	90,03	225.324.831.715,40
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	128.538.549.399,00	111.466.199.577,39	86,72	179.911.495.381,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.380.431.856,00	1.461.196.461,00	105,85	305.796.700,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	2.057.939.224,00	1.881.003.468,00	91,40	925.870.500,00
III	Belanja Tak Terduga	94.864.820.364,00	0,00	0,00	0,00
1	Belanja Tidak Terduga	94.864.820.364,00	0,00	0,00	0,00
IV	Belanja Transfer	119.344.429.141,00	118.528.344.923,00	99,32	135.490.900.922,00
1	Belanja Bagi Hasil	989.949.241,00	989.949.241,00	100,00	0,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	118.354.479.900,00	117.538.395.682,00	99,31	135.490.900.922,00
Jumlah (I, II, III, dan IV)		1.433.234.595.478,90	1.166.511.172.955,70	81,39	1.356.243.522.076,42



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.1.2 Belanja Daerah menurut Klasifikasi Ekonomi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan aktivitas. Klasifikasi ekonomi berdasarkan jenis belanja untuk Pemerintah Daerah terdiri dari Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer.

5.1.2.1 Belanja Operasi	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	661.098.426.989,46	774.466.031.112,02

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Operasi TA 2025 dianggarkan senilai Rp784.968.530.028,51 dan terealisasi senilai Rp661.098.426.989,46 atau 84,22% dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp774.466.031.112,02, maka Belanja Operasi TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp113.367.604.122,56 atau 14,64%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.29
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Pegawai	390.349.994.098,23	315.896.000.484,00	80,93	313.541.036.552,00
2	Belanja Barang dan Jasa	374.707.901.789,28	325.696.829.085,46	86,92	422.867.337.627,02
3	Belanja Hibah	19.667.134.141,00	19.262.097.420,00	97,94	38.040.036.933,00
4	Belanja Bantuan Sosial	243.500.000,00	243.500.000,00	100,00	17.620.000,00
Jumlah		784.968.530.028,51	661.098.426.989,46	84,22	774.466.031.112,02

Penjelasan lebih lanjut rincian Belanja Operasi TA 2025 adalah sebagai berikut.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	315.896.000.484,00	313.541.036.552,00

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Belanja Pegawai TA 2025 dianggarkan senilai Rp390.349.994.098,23 dan terealisasi senilai Rp315.896.000.484,00 atau 80,93% dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp313.541.036.552,00, maka Belanja Pegawai TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp2.354.963.932,00 atau 0,75%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.30
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA. 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Gaji Pokok ASN	118.224.566.091,00	97.800.292.547,00	82,72	90.270.482.932,20
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	10.517.136.894,00	8.771.897.530,00	83,41	8.160.031.866,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.286.411.462,00	3.212.650.250,00	74,95	3.687.681.140,33
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.463.979.380,00	6.002.014.116,00	80,41	4.957.275.293,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.485.117.574,00	2.006.799.523,00	80,75	1.534.644.999,47
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	6.857.734.619,00	5.694.791.230,00	83,04	5.228.708.320,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	135.231.415,45	81.411.066,00	60,20	69.389.814,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.864.019,34	1.508.786,00	25,73	1.305.223,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	15.111.950.008,55	11.124.869.833,00	73,62	7.093.812.820,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.259.324.529,00	202.226.745,00	16,06	183.364.457,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.724.849.643,00	606.682.269,00	35,17	541.649.973,00
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	300.331.612,12	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Tunjangan Khusus	0,00	0,00	0,00	66.067.720,00
14	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	189.240.488.385,77	151.120.270.941,00	79,86	160.207.902.502,00
15	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.649.218.000,00	10.814.894.467,40	92,84	1.377.750.113,00
16	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	6.227.057.400,00
17	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	0,00	0,00	1.128.471.300,00
18	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	570.000.000,00
19	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	7.438.736.600,00
20	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	1.114.800.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA. 2024
		Anggaran	Realisasi		
21	Belanja Uang Representasi DPRD	452.290.000,00	451.290.000,00	99,78	450.975.000,00
22	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	58.848.300,00	53.975.600,00	91,72	54.800.100,00
23	Belanja Tunjangan Beras DPRD	61.880.000,00	54.730.000,00	88,45	54.665.000,00
24	Belanja Uang Paket DPRD	45.717.000,00	38.682.000,00	84,61	38.986.500,00
25	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	663.000.000,00	654.370.500,00	98,70	653.913.750,00
26	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	118.076.175,00	66.487.575,00	56,31	66.137.400,00
27	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.000.000,00	6.044.325,00	60,44	0,00
28	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.528.000.000,00	3.528.000.000,00	100,00	2.520.000.000,00
29	Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000,00	630.000.000,00	100,00	420.000.000,00
30	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	66.971.556,00	66.064.520,00	98,65	0,00
31	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	168.504,00	12.000,00	7,12	12.000,00
32	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.000.700.500,00	2.980.525.916,00	99,33	2.967.005.153,00
33	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.196.800.000,00	3.192.000.000,00	99,85	3.192.000.000,00
34	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	10.000.000,00	0,00	0,00	182.385.000,00
35	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	148.280.500,00	107.338.560,00	72,39	61.332.960,00
36	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	16.530.000,00	7.248.000,00	43,85	6.864.000,00
37	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	224.640.000,00	98.280.000,00	43,75	98.280.000,00
38	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	18.299.120,00	7.314.420,00	39,97	7.531.680,00
39	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.390.000,00	755.900,00	54,38	924.536,00
40	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	220.000,00	1.860,00	0,85	1.000,00
41	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	318.690.233,00	312.480.000,00	98,05	279.720.000,00
42	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	280.000.000,00
43	Belanja Pegawai BOSP-BOS	3.015.820.000,00	2.578.700.000,00	85,51	0,00
44	Belanja Pegawai BLUD	5.201.468.577,00	3.321.390.004,60	63,85	2.346.370.000,00
Jumlah		390.349.994.098,23	315.896.000.484,00	80,93	313.541.036.552,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		325.696.829.085,46	422.867.337.627,02

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dianggarkan senilai Rp374.707.901.789,28 dan terealisasi senilai Rp325.696.829.085,46 atau 86,92% dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp422.867.337.627,02, maka Belanja Barang dan Jasa TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp97.170.508.541,56 atau 22,98%. Penurunan tersebut disebabkan adanya kebijakan efisiensi anggaran transfer pemerintah pusat. Hal ini mengharuskan dilakukannya rasionalisasi anggaran termasuk belanja barang dan jasa, yang mana penyesuaian alokasi belanja pada masing-masing Perangkat Daerah guna menyelaraskan target kinerja dengan ketersediaan kapasitas fiskal yang bersumber dari dana transfer pusat. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.31

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Barang Pakai Habis	122.632.211.996,01	109.020.916.712,93	88,90	153.946.628.122,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	293.218.600,00	280.265.600,00	95,58	364.831.000,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	230.511.130,00	207.966.570,00	90,22	0,00
4	Belanja Jasa Kantor	86.638.615.674,00	69.482.956.701,20	80,20	85.410.928.397,00
5	Belanja Jaminan/Asuransi	5.885.650.600,00	5.317.079.745,00	90,34	4.127.549.288,00
6	Belanja Sewa Tanah	88.000.000,00	77.000.000,00	87,50	87.000.000,00
7	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.697.798.271,00	5.642.643.668,00	84,25	12.610.583.614,00
8	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.720.140.000,00	3.176.033.000,00	85,37	3.265.129.400,00
9	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00	0,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	964.857.900,00	844.716.920,60	87,55	8.324.697.031,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.590.572.220,00	1.577.482.000,00	99,18	1.995.198.662,00
12	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	180.900.000,00	171.980.958,00	95,07	167.464.816,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
13	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	4.465.100.000,00	4.463.200.000,00	99,96	2.401.100.000,00
14	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	13.701.634.488,00	10.067.290.447,00	73,48	8.797.181.110,00
15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	53.252.000,00	53.252.000,00	100,00	90.125.000,00
16	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	236.000.000,00
17	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.171.856.800,01	4.609.016.611,00	89,12	3.955.662.419,00
18	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.156.678.330,00	4.626.839.985,57	89,73	334.305.600,00
19	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.968.000,00	4.968.000,00	100,00	0,00
20	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	43.500.000,00
21	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	79.912.784.886,26	70.949.996.166,00	88,78	86.674.649.744,00
22	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.438.604.266,00	4.995.966.179,00	91,86	18.179.644.111,00
23	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	654.291.500,00	623.738.500,00	95,33	714.051.286,00
24	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	28.143.526.913,02
25	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	19.902.053.000,00	18.909.431.502,00	95,01	0,00
26	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	113.640.000,00	113.346.000,00	99,74	0,00
27	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesenjangan	352.711.000,00	183.023.980,00	51,89	0,00
28	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	3.371.433.708,00	3.103.653.147,00	92,06	0,00
29	Belanja Barang dan Jasa BLUD	7.437.417.420,00	7.145.064.692,16	96,07	2.997.581.114,00
Jumlah		374.707.901.789,28	325.696.829.085,46	86,92	422.867.337.627,02

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

31 Desember 2025

19.262.097.420,00

31 Desember 2024

38.040.036.933,00

Belanja Hibah adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian Belanja Hibah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja Hibah TA 2025 dianggarkan senilai Rp19.667.134.141,00 dan terealisasi senilai Rp19.262.097.420,00 atau 97,94% dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp38.040.036.933,00, maka Belanja Hibah TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp18.777.939.513,00 atau 49,36%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.32
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	3.550.000.000,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	192.198.500,00	174.825.000,00	90,96	479.717.000,00
3	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	600.000.000,00	596.228.675,00	99,37	0,00
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	11.307.101.280,00	11.014.024.200,00	97,41	28.693.600.000,00
5	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.957.709.935,00	1.912.698.000,00	97,70	2.954.700.600,00
6	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	140.923.900,00	140.923.900,00	100,00	205.000.000,00
7	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	2.383.822.000,00	2.341.050.820,00	98,21	0,00
8	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.064.668.526,00	1.064.668.525,00	100,00	915.918.475,00
9	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	572.610.000,00	571.378.300,00	99,78	0,00
10	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.198.100.000,00	1.196.300.000,00	99,85	967.996.800,00
11	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	273.104.058,00
Jumlah		19.667.134.141,00	19.262.097.420,00	97,94	38.040.036.933,00

Rincian penerima hibah disajikan pada **Lampiran 5.3**.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	243.500.000,00	17.620.000,00

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dianggarkan senilai Rp243.500.000,00 dan terealisasi senilai Rp243.500.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp17.620.000,00, maka Belanja Bantuan Sosial TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp225.880.000,00 atau 1.281,95%. Kenaikan Belanja Bantuan Sosial dikarenakan terdapat kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan daerah berdasarkan SK Bupati Nomor 100.3.3.2/297/K-VII/2025 tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang kepada Pelaku Usaha Ekonomi Produktif Individu Kabupaten Tana Tidung TA 2025. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.33
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025

No	Uraian	TA 2025		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan SK Bupati Nomor : 100.3.3.2/297/K-VIII/2025. SP2D 03819 (48 orang @Rp5.000.000,00) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00
2	Pemberian Bantuan Biaya Transportasi dan Akomodasi Berobat Bagi Masyarakat Kurang Mampu Kabupaten Tana Tidung Akomodasi Berobat Rawat Inap Ke RSUD Tarakan Berdasarkan SK Bupati Nomor: 100.3.3.2/405/K-XI/2025. SP2D 06515 (an. FERNANDES) pada Sekretariat Daerah Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
Jumlah		243.500.000,00	243.500.000,00	100,00

5.1.2.2 Belanja Modal	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	386.884.401.043,24	446.286.590.042,40

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pembelian atau pengadaan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Belanja ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan pemerintahan daerah, antara lain berupa perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Belanja Modal TA 2025 dianggarkan senilai Rp434.056.815.945,39 dan terealisasi senilai



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Rp386.884.401.043,24 atau 89,13% dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp446.286.590.042,40, maka Belanja Modal TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp59.402.188.999,16 atau 13,31%. Penurunan ini disebabkan oleh penyesuaian belanja sesuai dengan kebutuhan riil SKPD sebagaimana tercantum dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).

Atas pelaksanaan Belanja Modal yang telah selesai di akhir tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah menahan jaminan pemeliharaan sebagai kesanggupan rekanan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan pekerjaan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.34
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Tanah	3.015.903.866,00	2.847.964.666,00	94,43	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.255.670.619,00	35.323.557.737,00	89,98	39.818.595.746,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	259.808.320.981,39	233.904.479.133,85	90,03	225.324.831.715,40
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	128.538.549.399,00	111.466.199.577,39	86,72	179.911.495.381,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.380.431.856,00	1.461.196.461,00	105,85	305.796.700,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	2.057.939.224,00	1.881.003.468,00	91,40	925.870.500,00
Jumlah		434.056.815.945,39	386.884.401.043,24	89,13	446.286.590.042,40

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	2.847.964.666,00	0,00

Belanja Modal Tanah TA 2025 dianggarkan senilai Rp3.015.903.866,00 dan terealisasi senilai Rp2.847.964.666,00 atau 94,43% dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp0,00, maka Belanja Modal Tanah TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp2.847.964.666,00 atau 100,00%. Belanja Modal Tanah TA 2025 mengalami kenaikan karena pembangunan jalan dan pematangan lahan Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Tana Tidung pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRKP). Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah disajikan pada tabel berikut.





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
7	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	60.000.000,00	0,00	0,00	52.400.000,00
8	Belanja Modal Alat Ukur	388.094.900,00	175.325.100,00	45,18	492.039.000,00
9	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.197.000,00	1.197.000,00	100,00	40.809.636,00
10	Belanja Modal Alat Kantor	6.060.629.239,00	5.664.749.677,00	93,47	7.787.630.320,00
11	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.925.324.560,00	3.937.480.119,00	79,94	4.262.658.334,00
12	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	117.083.254,00	102.848.054,00	87,84	361.918.600,00
13	Belanja Modal Alat Studio	722.303.013,00	531.859.760,00	73,63	2.179.706.320,00
14	Belanja Modal Alat Komunikasi	47.728.400,00	46.096.000,00	96,58	112.484.000,00
15	Belanja Modal Peralatan Pemancar	67.967.200,00	66.600.000,00	97,99	1.175.000.000,00
16	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.147.481.138,00	2.046.569.001,00	95,30	3.272.866.919,00
17	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	944.865.245,00	898.835.460,00	95,13	986.251.296,00
18	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	119.674.800,00	116.429.850,00	97,29	65.678.752,00
19	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	61.383.674,00	47.920.920,00	78,07	21.000.000,00
20	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	4.711.400,00	4.640.000,00	98,48	0,00
21	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	142.317.000,00
22	Belanja Modal Komputer Unit	3.371.703.484,00	3.193.742.004,00	94,72	1.687.300.000,00
23	Belanja Modal Peralatan Komputer	487.442.688,00	454.301.222,00	93,20	1.105.433.301,00
24	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
25	Belanja Modal Alat Pelindung	43.295.000,00	0,00	0,00	59.790.150,00
26	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	200.000.000,00	198.912.000,00	99,46	864.302.000,00
27	Belanja Modal Peralatan Olahraga	14.408.000,00	13.421.800,00	93,16	0,00
28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	2.888.834.000,00	2.729.358.100,00	94,48	0,00
29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	696.922.004,00	666.827.080,00	95,68	727.489.417,00
Jumlah		39.255.670.619,00	35.323.557.737,00	89,98	39.818.595.746,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD disajikan pada **Lampiran 5.5**.

5.1.2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	<u>31 Desember 2025</u> 233.904.479.133,85	<u>31 Desember 2024</u> 225.324.831.715,40

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dianggarkan senilai Rp259.808.320.981,39, dan terealisasi senilai Rp233.904.479.133,85 atau 90,03% dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp225.324.831.715,40, maka Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp8.579.647.418,45 atau 3,81%. Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami kenaikan karena adanya Pembangunan Pusat Pemerintah (Program Prioritas Pemerintahan). Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.37
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	250.695.760.221,39	227.300.323.234,73	90,67	219.352.735.033,40
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.596.380.150,00	1.439.338.100,00	90,16	2.913.895.660,00
3	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	157.456.965,00	155.403.842,52	98,70	0,00
4	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	172.357.745,00	164.250.000,00	95,30	0,00
5	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	7.001.365.900,00	4.664.588.861,60	66,62	2.910.704.262,00
6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	185.000.000,00	180.575.095,00	97,61	147.496.760,00
Jumlah		259.808.320.981,39	233.904.479.133,85	90,03	225.324.831.715,40

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD terdapat pada **Lampiran 5.6**.

5.1.2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	<u>31 Desember 2025</u> 111.466.199.577,39	<u>31 Desember 2024</u> 179.911.495.381,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dianggarkan senilai Rp128.538.549.399,00, dan terealisasi senilai Rp111.466.199.577,39 atau 86,72% dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp179.911.495.381,00, maka Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp68.445.295.803,61 atau 38,04%. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2025 mengalami penurunan karena adanya kebijakan penyesuaian dan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

yang memengaruhi postur transfer ke daerah. Pemerintah daerah mengambil langkah melakukan rasionalisasi belanja modal, sehingga belanja modal jalan, irigasi dan jaringan hanya diprioritaskan untuk pemenuhan infrastruktur esensial yang berdampak langsung pada pelayanan masyarakat berdasarkan kesesuaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBM) SKPD terkait. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.38

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Jalan	101.450.778.187,00	87.026.279.349,02	85,78	147.018.815.273,00
2	Belanja Modal Jembatan	7.323.888.177,00	6.183.889.292,37	84,43	14.984.448.120,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	895.824.283,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10.003.806.920,00	9.906.125.700,00	99,02	10.093.657.742,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	68.470.000,00	36.844.356,00	53,81	4.220.777.400,00
6	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.144.348.000,00	2.102.007.000,00	98,03	0,00
7	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	5.210.833.000,00	3.879.256.900,00	74,45	0,00
8	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	277.747.000,00	273.435.180,00	98,45	0,00
9	Belanja Modal Jaringan Listrik	2.058.678.115,00	2.058.361.800,00	99,98	2.697.972.563,00
Jumlah		128.538.549.399,00	111.466.199.577,39	86,72	179.911.495.381,00

Adapun rincian anggaran dan ealisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD terdapat pada **Lampiran 5.7**.

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
1.461.196.461,00 **305.796.700,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dianggarkan senilai Rp1.380.431.856,00, dan terealisasi senilai Rp1.461.196.461,00 atau 105,85% dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp305.796.700,00, maka Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp1.155.399.761,00 atau 377,83%. Pelampauan realisasi dikarenakan terdapat kekeliruan pembagian anggaran akun belanja barang dan jasa dan belanja modal pada DPA Dinas Pendidikan dengan RKAS, dimana pelampauan realisasi tersebut terdapat pada akun Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan Reguler dan Belanja Modal Aset Tetap



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Lainnya BOSP-BOS Reguler. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.39
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Bahan Perpus takaan Tercetak	200.000.000,00	38.612.682,00	19,31	0,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	300.000.000,00	296.592.000,00	98,86	7.250.000,00
3	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	99.900.000,00
4	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	198.646.700,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	128.683.856,00	128.541.900,00	99,89	0,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	664.679.000,00	897.678.200,00	135,05	0,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan	87.069.000,00	99.771.679,00	114,59	0,00
Jumlah		1.380.431.856,00	1.461.196.461,00	105,85	305.796.700,00

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD terdapat pada **Lampiran 5.8**

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya	<u>31 Desember 2025</u> 1.881.003.468,00	<u>31 Desember 2024</u> 925.870.500,00

Belanja Modal Aset Lainnya TA 2025 dianggarkan senilai Rp2.057.939.224,00, dan terealisasi senilai Rp1.881.003.468,00 atau 91,40% dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp925.870.500,00, maka Belanja Modal Aset Lainnya TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp955.132.968,00 atau 103,16% karena dipengaruhi oleh tingginya volume Belanja Aset Tak Berwujud (ATB) pada tahun berjalan. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal Aset Lainnya per SKPD terdapat pada **Lampiran 5.9**.

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga	<u>31 Desember 2025</u> 0,00	<u>31 Desember 2024</u> 0,00

Belanja Tidak Terduga TA 2025 dianggarkan senilai Rp94.864.820.364,00 yang diprioritaskan untuk mengantisipasi kewajiban pembayaran utang berdasarkan putusan inkrah PT PMJ senilai Rp67.123.757.984,00. Namun demikian, alokasi tersebut tidak direalisasikan. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam penggunaan pos Belanja Tidak Terduga. Lebih lanjut, terdapat sisa anggaran Belanja Tidak Terduga senilai Rp26.876.242.016,00 yang dialokasikan untuk penanganan kondisi darurat dan kebutuhan mendesak. Pemanfaatan anggaran ini bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, antara lain untuk penanganan bencana, kejadian luar biasa, serta kebutuhan mendesak lainnya yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

5.1.2.4	Belanja Transfer	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		118.528.344.923,00	135.490.900.922,00

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terdapat komponen transfer yang terdiri dari transfer/bagi hasil pendapatan ke Kabupaten/Kota dan Transfer/Bantuan Keuangan. Belanja Transfer pada Laporan Keuangan Tahun 2025 disajikan dalam kelompok Belanja Transfer/Bagi Hasil dan Belanja Transfer/Bantuan Keuangan.

Belanja Transfer TA 2025 dianggarkan senilai Rp119.344.429.141,00 dan terealisasi senilai Rp118.528.344.923,00 atau 99,32% dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp135.490.900.922,00, maka Belanja Transfer TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp16.962.555.999,00 atau 12,52%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Transfer disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.40
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Bagi Hasil	989.949.241,00	989.949.241,00	100,00	0,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	118.354.479.900,00	117.538.395.682,00	99,31	135.490.900.922,00
Jumlah		119.344.429.141,00	118.528.344.923,00	99,32	135.490.900.922,00

5.1.2.4.1	Belanja Bagi Hasil	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		989.949.241,00	0,00

Belanja Bagi Hasil adalah pengeluaran anggaran pemerintah, baik pusat ke daerah maupun daerah ke daerah/desa, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana ini berasal dari pendapatan APBN (pajak dan sumber daya alam) atau pendapatan daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase tertentu, umumnya bertujuan mengurangi ketimpangan fiskal.

Belanja Bagi Hasil TA 2025 dianggarkan senilai Rp989.949.241,00, dan terealisasi senilai Rp989.949.241,00 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp0,00, maka Belanja Bagi Hasil TA 2025 mengalami





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5 1.2.4.2.1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		0,00	357.000.000,00,00

Belanja Bantuan Keuangan Khusus merupakan transfer dana dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota yang penggunaannya ditetapkan secara spesifik untuk mendukung program prioritas dan kebutuhan strategis daerah. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2025 tidak dianggarkan, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 senilai Rp357.000.000,00, maka Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp357.000.000,00 atau 100%.

5.1.2.4.2.2	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		117.178.395.682,00	105.332.117.922,00

Belanja Bantuan Keuangan ke Desa TA 2025 dianggarkan senilai Rp117.994.479.900,00, dan terealisasi senilai Rp117.178.395.682,00 atau 99,31% dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp105.332.117.922,00, maka Belanja Bantuan Keuangan ke Desa TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp11.846.277.760,00 atau 11,25%. Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa TA 2025 terdiri dari Dana Desa yang telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2023 dan Alokasi Dana Desa sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa setiap desa TA 2022. Penganggaran atas bagi hasil pajak dan retribusi seharusnya disajikan pada akun transfer bagi hasil pajak dan transfer bagi hasil retribusi dikarenakan adanya kekeliruan dalam menginterpretasikan dalam penempatan akun terkait bantuan keuangan ke pemerintah desa, demikian pula halnya kesalahan penganggaran iuran jaminan kesehatan desa dan aparat desa yang seharusnya disajikan di belanja jasa. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.43

Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Alokasi Dana Desa	90.608.588.900,00	90.609.418.282,00	100,00	74.877.173.050,00
2	Dana Desa	27.385.891.000,00	26.568.977.400,00	97,02	29.801.783.000,00
3	Transfer Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	460.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
	Daerah				
4	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	72.500.000,00
5	Jaminan Kesehatan Bagi Kepala dan Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00	120.161.872,00
Jumlah		117.994.479.900,00	117.178.395.682,00	99,31	105.332.117.922,00

Rincian anggaran dan realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dapat dilihat pada **Lampiran 5.10**.

5.1.2.4.2.3 Belanja Bantuan Keuangan 31 Desember 2025 31 Desember 2024
Khusus Daerah Provinsi atau 360.000.000,00 29.801.783.000,00
Kabupaten/Kota Kepada
Desa

Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa TA 2025 dianggarkan senilai Rp360.000.000,00, dan terealisasi senilai Rp360.000.000,00 atau mencapai 100,00% dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp29.801.783.000,00, maka Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp29.441.783.000,00 atau 98,79%. Hal ini dikarenakan pada TA 2025 Dana Desa dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.44
Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Khusus ke Desa
TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Dana Desa	0,00	0,00	0,00	28.923.773.000,00
2	Insentif Desa	360.000.000,00	360.000.000,00	100,00	878.010.000,00
Jumlah		360.000.000,00	360.000.000,00	100,00	29.801.783.000,00

5.1.3 Surplus/Defisit 31 Desember 2025 31 Desember 2024
(87.728.720.631,65) 127.656.173.578,03

Surplus/Defisit merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi total Pendapatan dengan total Belanja dalam kurun waktu satu periode pelaporan. Realisasi total Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp1.078.782.452.324,05



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

sedangkan realisasi Belanja adalah senilai Rp1.166.511.172.955,70. Dengan demikian, diketahui bahwa Pendapatan Daerah yang diterima lebih kecil dari pada Belanja, atau terjadi Defisit senilai Rp87.728.720.631,65. Realisasi Defisit TA 2025 senilai Rp87.728.720.631,65 atau 21,62% dari anggaran yang ditetapkan senilai minus Rp(405.752.030.025,90). Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 senilai Rp127.656.173.578,03 terjadi penurunan Defisit senilai Rp(215.384.894.209,68) atau (168,72)%. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan pendapatan dibanding tahun sebelumnya. Adapun rincian Perhitungan Surplus/Defisit disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.45
Rincian Surplus/Defisit TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Penambahan / Pengurangan	%
1	Pendapatan	1.078.782.452.324,05	1.483.899.695.654,45	(405.117.243.330,40)	(27,30)
2	Belanja	(1.166.511.172.955,70)	(1.356.243.522.076,42)	189.732.349.120,72	(13,99)
Jumlah		(87.728.720.631,65)	127.656.173.578,03	(215.384.894.209,68)	(168,72)

5.1.4	Pembiayaan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		436.022.138.025,90	308.365.964.447,87

Pembiayaan Daerah dianggarkan senilai Rp406.022.138.025,90 dan terealisasi senilai Rp436.022.138.025,90 atau 107,39%. Bila dibandingkan TA 2024 senilai Rp308.365.964.447,87 maka pembiayaan daerah TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp127.656.173.578,03 atau 41,40%. Realisasi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1.4.1	Penerimaan Pembiayaan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		436.022.138.025,90	308.365.964.447,87

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2025 terdiri dari Silpa TA sebelumnya senilai Rp436.022.138.025,90. Jika dibandingkan TA 2024 senilai Rp308.365.964.447,87 maka terjadi kenaikan senilai Rp127.656.173.578,03 atau 41,40%. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah mengalami kenaikan yang signifikan karena APBD TA 2025 lebih besar dibandingkan TA 2024.

5.1.4.2	Pengeluaran Pembiayaan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		0,00	0,00

Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2025 dianggarkan senilai Rp30.000.000.000,00. Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah senilai Rp0,00 atau 0,00%. Jika dibandingkan TA 2024 senilai Rp0,00, pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk menganggarkan investasi perbankan, tetapi tidak terealisasi, karena investasi tersebut memiliki jangka waktu jatuh tempo kurang dari atau



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

sama dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sehingga penempatan dana lebih tepat diklasifikasikan sebagai setara kas, dan tidak memenuhi kriteria sebagai pengeluaran pembiayaan.

5.1.5	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	<u>31 Desember 2025</u> 348.293.417.394,25	<u>31 Desember 2024</u> 436.022.138.025,90

SiLPA dalam pelaksanaan APBD TA 2025 senilai Rp348.293.417.394,25 yang merupakan selisih lebih antara surplus dan defisit dengan pembiayaan netto dan ditambah atas koreksi SiLPA. Bila dibandingkan dengan SiLPA Tahun 2024 senilai Rp436.022.138.025,90, maka SiLPA tahun 2025 mengalami penurunan yang signifikan senilai Rp87.728.720.631,65 atau 20,12%. Penurunan tersebut disebabkan adanya efisiensi Anggaran Tahun 2025 Melalui Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja APBN/APBD dan PMK Nomor 56 Tahun 2025. Sehingga terjadi pemangkasan pada belanja Transfer Ke Daerah (TKD).

5.2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Saldo Anggaran Lebih Awal mengalami kenaikan yang signifikan karena sisa lebih pembiayaan anggaran TA 2024 yang menjadi saldo pada TA 2025. Laporan Perubahan SAL tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	<u>31 Desember 2025</u> 436.022.138.025,90	<u>31 Desember 2024</u> 308.365.964.447,87

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi saldo SiLPA/SiKPA tahun - TA sebelumnya dan SiLPA dari pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Belanja TA 2025 ditambah/dikurangi penyesuaian SAL yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih meliputi saldo awal di Kas di Kas Daerah, Kas di BLUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya, Kas Dana BOS, Kas Dana BOSP, Kas Dana BOK Puskesmas dan Kas Dana Kapitasi pada FKTP. Saldo Anggaran Lebih Awal 1 Januari 2025 adalah senilai Rp436.022.138.025,90 yang merupakan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2024 (*Audited*). Adapun rincian Saldo Anggaran Lebih Awal disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.46
Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2025 dan 2024

No	Uraian	1-Jan-25	1-Jan-24
1	Kas di Kas Daerah	430.172.961.885,93	304.256.764.871,88
2	Kas di BLUD	4.252.292.429,00	3.055.287.795,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	600.000,00	4.475.000,00
4	Kas Lainnya	2.358.857,00	31.717,02



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	1-Jan-25	1-Jan-24
5	Kas Dana BOS	217.132.552,97	286.347.024,97
6	Kas Dana BOSP	37.431.942,00	995.700,00
7	Kas Dana BOK Puskesmas	1.190.048.036,00	643.060.923,00
8	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	149.312.323,00	119.001.416,00
Jumlah		436.022.138.025,90	308.365.964.447,87

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai 31 Desember 2025 31 Desember 2024
Penerimaan Pembiayaan Tahun (436.022.138.025,90) (308.365.964.447,87)
Berjalan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 84 disebutkan bahwa dalam hal APBD diperkirakan defisit, maka pembiayaan defisit bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Dana Cadangan, Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Pinjaman Daerah. Penggunaan SAL TA 2025 adalah senilai Rp436.022.138.025,90 setelah dikurangi dengan koreksi SiLPA atas koreksi saldo atas kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yang merupakan pembiayaan TA 2025 dan digunakan untuk menutup defisit anggaran pada TA 2025.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan 31 Desember 2025 31 Desember 2024
Anggaran (SiLPA/SiKPA) 348.293.417.394,25 436.022.138.025,90

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan realisasi pengeluaran setelah memperhitungkan pembiayaan neto selama satu periode pelaporan dan koreksi tambah/kurang atas SiLPA. Selain itu, SiLPA dapat pula diperhitungkan dengan menghitung selisih secara langsung antara defisit anggaran dengan Pembiayaan Neto setelah memperhitungkan koreksi tambah/kurang atas SiLPA.

Realisasi SiLPA pada TA 2025 yaitu senilai Rp348.293.417.394,25 dan jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp436.022.138.025,90, maka SiLPA pada TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp87.728.720.631,65 atau 20,12%. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya defisit anggaran karena adanya efisiensi belanja, dan penerimaan pembiayaan yang lebih rendah.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	0,00	0,00

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya merupakan penyesuaian pos yang memengaruhi saldo awal SAL tahun anggaran TA 2025 senilai Rp0,00 dan sedangkan pada TA 2024 senilai Rp0,00. Tidak terdapat Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya pada TA 2025.

5.2.5 Lain – Lain	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	0,00	0,00

Lain-Lain pada LPSAL merupakan penyesuaian pos yang mempengaruhi saldo akhir tahun anggaran TA 2025 senilai Rp0,00 dan sedangkan pada TA 2024 senilai Rp0,00. Tidak terdapat Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya pada TA 2025.

5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	348.293.417.394,25	436.022.138.025,90

Berdasarkan LPSAL Pemerintah Kabupaten Tana Tidung per 31 Desember 2025 terdapat Saldo Anggaran Lebih Akhir senilai Rp348.293.417.394,25. LPSAL mengalami penurunan yang signifikan karena APBD TA 2025 lebih kecil dibandingkan TA 2024. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya defisit anggaran karena adanya efisiensi belanja, dan penerimaan pembiayaan yang lebih rendah. Adapun rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.47
Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2025

No	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Sisa Anggaran
Kas yang dibatasi Penggunaannya:		187.962.791.773,94
1	DAU SG Bidang Kesehatan	197.045.852,00
2	DAU SG Bidang Pendidikan	5.007.317.307,00
3	Dukungan Penggajian PPPK	0,00
4	DAK FISIK	2,00
5	Insentif Fiskal	837.830.140,00
6	DBH Sawit	301.429.378,79
7	Hibah Rehabilitasi Pascabencana dan BNPB	6.517.253.070,33
8	Silpa BLUD	4.161.619.400,95
9	Silpa Dana BOS	401.488.030,97
10	Silpa Dana Kapitasi pada FKTP	238.238,90



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Sisa Anggaran
11	Kas Lainnya_Pajak belum setor	438.600,00
12	Silpa Dana BOSP	7.246.220,00
13	Silpa Dana BOK Puskesmas	295.534.533,00
14	Lebih Bayar DBH Pajak Bagian Daerah PBB Panas Bumi	162.099.000,00
15	Lebih Bayar DBH SDA Minyak Bumi	1.171.410.000,00
16	Lebih Bayar DBH SDA Landrent	38.411.000,00
17	Lebih Bayar DBH SDA Royalti	159.770.097.000,00
18	Lebih Bayar DBH SDA PSDH	1.799.497.000,00
19	Lebih Bayar DBH SDA Perikanan	1.361.621.000,00
20	Lebih Bayar DBH SDA Perkebunan Sawit	5.932.216.000,00
Kas yang tidak dibatasi Penggunaannya:		160.330.625.620,31
1	Kas yang tidak dibatasi penggunaannya	160.330.625.620,31
JUMLAH		348.293.417.394,25

5.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca

Neraca Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2025 dengan nilai total Aset senilai Rp4.141.311.204.079,80, total Kewajiban senilai Rp243.274.217.607,28, dan total Ekuitas senilai Rp3.897.458.504.755,82. Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024, yaitu total Aset senilai Rp3.752.828.955.536,36, total Kewajiban senilai Rp142.458.748.052,58, dan Ekuitas senilai Rp3.610.370.207.483,78, maka terdapat kenaikan Aset senilai Rp388.482.248.543,44 atau 10,35%, kenaikan Kewajiban senilai Rp101.393.951.271,40 atau 71,17%, serta kenaikan Ekuitas senilai Rp287.088.297.272,04 atau 7,95%.

Terdapat kenaikan Aset pada tahun 2025 senilai Rp388.482.248.543,44 atau 10,35%, kenaikan Kewajiban pada TA 2025 senilai Rp100.815.469.554,70 atau 70,77% dan kenaikan nilai Ekuitas pada TA 2025 senilai Rp287.088.297.272,04 atau 7,95%. Hal tersebut akan dijabarkan dengan rinci atas masing-masing akun Neraca sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.3.1 Aset	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	4.186.032.793.353,90	3.752.828.955.536,36

Saldo Aset per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp4.186.032.793.353,90 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp3.752.828.955.536,36, maka terdapat kenaikan saldo Aset senilai Rp433.203.837.817,54 atau 11,54%. Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya. Adapun rincian aset disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.48
Rincian Aset per 31 Desember 2025 dan 2024

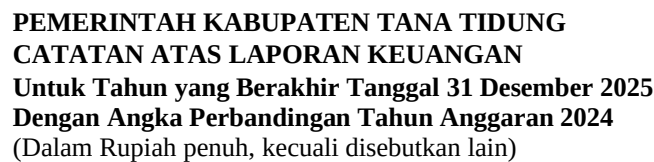
No	Uraian	Saldo Per 31 Desember		Kenaikan / Penurunan	%
		2025	2024		
1	Aset Lancar	866.157.777.816,05	672.241.039.172,90	193.916.738.643,15	28,85
2	Investasi Jangka Panjang	148.593.447.042,11	103.690.906.609,54	44.902.540.432,57	43,30
3	Aset Tetap	3.082.254.520.372,60	2.845.832.663.067,82	236.421.857.304,78	8,31
4	Aset Lainnya	89.027.048.123,14	131.064.346.686,10	(42.037.298.562,96)	(32,07)
Jumlah		4.186.032.793.353,90	3.752.828.955.536,36	433.203.837.817,54	11,54

Adapun penjelasan rincian Aset sebagai berikut.

5.3.1.1 Aset Lancar	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	866.157.777.816,05	672.241.039.172,90

Suatu Aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika diharapkan untuk dipakai atau dimiliki dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Piutang, dan Persediaan. Rincian disajikan sebagai berikut.

- Kas dan Setara Kas meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana Kapitasi pada FKTP, Kas Lainnya, Kas Dana BOSP dan Kas Dana BOK Puskesmas;
- Pos-pos Piutang antara lain Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat, Piutang Transfer Antar Daerah, Piutang Lainnya dan Penyisihan Piutang;
- Beban Dibayar Dimuka; dan
- Persediaan mencakup Barang Pakai Habis dan Barang Tak Habis Pakai diantaranya merupakan perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan barang yang akan diserahkan ke masyarakat.

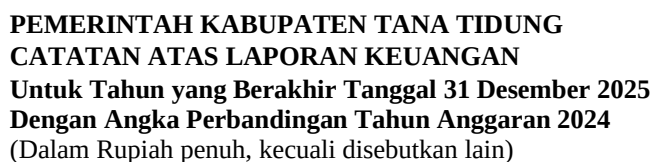


Tabel 5.49
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember		Kenaikan/ Penurunan	%
		2025	2024		
1	Kas dan Setara Kas	348.295.864.474,25	436.035.274.872,90	(87.739.410.398,65)	(20,12)
2	Piutang Pajak Daerah	3.437.362.186,00	2.938.545.467,00	498.816.719,00	16,97
3	Piutang Retribusi Daerah	67.382.337,00	33.697.944,00	33.684.393,00	99,96
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	1.164.197.214,49	(1.164.197.214,49)	(100,00)
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	349.279.261.000,00	63.174.239.000,00	286.105.022.000,00	452,88
6	Piutang Transfer Antar Daerah	29.962.545.759,00	19.308.478.465,00	10.654.067.294,00	55,18
7	Piutang Lainnya	1.234.837.507,00	1.984.414.780,81	(749.577.273,81)	(37,77)
8	Penyisihan Piutang	(3.002.117.352,02)	(1.391.757.105,64)	(1.610.360.246,38)	115,71
9	Beban Dibayar Dimuka	382.390.966,67	4.154.148.705,00	(3.771.757.738,33)	(90,79)
10	Persediaan	136.500.250.938,15	144.839.799.829,34	(8.339.548.891,19)	(5,76)
Jumlah		866.157.777.816,05	672.241.039.172,90	193.916.738.643,15	28,85

5.3.1.1.1	Kas dan Setara Kas	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		348.295.864.474,25	436.035.274.872,90

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025



Tabel 5.50

No	Uraian	Saldo per 31 Desember		Kenaikan/ Penurunan	%
		2025	2024		
1	Kas di Kas Daerah	343.429.299.450,43	430.172.961.885,93	(86.743.662.435,50)	(20,16)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	2.392.000,00	(2.392.000,00)	(100,00)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	4.161.619.400,95	4.256.815.368,00	(95.195.967,05)	(2,24)
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	238.238,90	149.312.323,00	(149.074.084,10)	(99,84)
6	Kas Lainnya	438.600,00	5.529.955,00	(5.091.355,00)	(92,07)
7	Kas Dana BOSP	408.734.250,97	258.215.304,97	150.518.946,00	58,29
8	Kas Dana BOK Puskesmas	295.534.533,00	1.190.048.036,00	(894.513.503,00)	(75,17)
Jumlah		348.295.864.474,25	436.035.274.872,90	(87.739.410.398,65)	(20,12)

Rincian Kas dan Setara Kas dijelaskan sebagai berikut.

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2025
343.429.299.450,43

31 Desember 2024
430.172.961.885,93

Kas di Kas Daerah merupakan Rekening Kas Umum Daerah untuk mengelola seluruh Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam rangka melayani kebutuhan utama penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp343.429.299.450,43 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp430.172.961.885,93, maka terdapat penurunan saldo Kas di Kas Daerah senilai Rp86.743.662.435,50 atau 20,16%. Saldo Kas di Kas Daerah merupakan posisi saldo pada rekening giro Pemerintah Kabupaten Tana Tidung senilai Rp343.429.299.450,43 yang merupakan hasil rekonsiliasi antara saldo menurut Buku Kas Umum dengan rekening koran Bankaltimtara Kantor Cabang Tideng Pale Nomor Rekening 0141300016. Adapun rincian Kas di Kas Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.51

No	Nama Bank	Uraian	31-Des-25	31-Des-24
1	Bank Kaltimtara	Rekening KUD Kab Tana Tidung	343.429.299.450,43	430.124.733.328,93
2	Bank Kaltimtara	Pengembalian Kelebihan atas Piutang Uang Muka	0,00	48.228.557,00
Jumlah			343.429.299.450,43	430.172.961.885,93



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Penjelasan hasil rekonsiliasi antara saldo menurut buku kas umum dan rekening koran dapat dilihat pada **Lampiran 5.11**.

5.3.1.1.1.2	Kas di Bendahara	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Penerimaan	0,00	2.392.000,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh Kas, baik saldo rekening di Bank, maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp0,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp2.392.000,00, maka terdapat penurunan saldo Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp2.392.000,00 atau 100,00%. Penurunan saldo menjadi Rp0,00 (nihil) pada akhir TA 2025 karena seluruh penerimaan daerah yang dipungut oleh bendahara penerimaan selama tahun berjalan telah disetorkan secara tepat waktu ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebelum batas akhir penutupan buku per 31 Desember 2025. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 merupakan sisa penerimaan akhir tahun yang baru disetorkan ke Kas Daerah pada awal tahun anggaran berikutnya.

5.3.1.1.1.3	Kas di Bendahara	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Pengeluaran	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP), namun sampai dengan akhir TA belum disetor/dipertanggungjawabkan ke Kas Daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp0,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, maka tidak terdapat kenaikan maupun penurunan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran atau 0,00%.

5.3.1.1.1.4	Kas di BLUD	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		4.161.619.400,95	4.256.815.368,00

Saldo Kas BLUD per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp4.161.619.400,95 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp4.256.815.368,00, maka terdapat penurunan saldo Kas BLUD senilai Rp95.195.967,05 atau 2,24%. Adapun rincian saldo kas BLUD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.52
Saldo Kas BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember		Kenaikan/ Penurunan	%
		2025	2024		
1	Puskesmas Tideng Pale	399.929.125,00	0,00	399.929.125,00	100,00
2	Puskesmas Sesayap Hilir	344.975.876,52	0,00	344.975.876,52	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Saldo per 31 Desember		Kenaikan/ Penurunan	%
		2025	2024		
3	Puskesmas Tana Lia	104.621.641,19	0,00	104.621.641,19	100,00
4	Puskesmas Kujau	182.804.905,00	0,00	182.804.905,00	100,00
5	Puskesmas Muruk Rian	57.185.940,24	0,00	57.185.940,24	100,00
6	RSUD Akhmad Berahim	3.072.101.913,00	4.256.815.368,00	(1.184.713.455,00)	(27,83)
Jumlah		4.161.619.400,95	4.256.815.368,00	(95.195.967,05)	(2,24)

5.3.1.1.1.5 Kas Dana Kapitasi pada FKTP **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
238.238,90 **149.312.323,00**

Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah diatur dalam Permendagri Nomor 28 Tahun 2021. Saldo Kas di FKTP per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp238.238,90 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp149.312.323,00, maka terdapat penurunan saldo Kas di FKTP senilai Rp149.074.084,10 atau 99,84%. Adapun rincian saldo kas dana kapitasi FKTP pada FKTP disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.53
Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember		Kenaikan / Penurunan	%
		2025	2024		
1	Puskesmas Tideng Pale	0,00	244.105,00	(244.105,00)	(100,00)
2	Puskesmas Sesayap Hilir	0,00	26.448.201,00	(26.448.201,00)	(100,00)
3	Puskesmas Tana Lia	0,00	49.847.078,00	(49.847.078,00)	(100,00)
4	Puskesmas Kujau	0,00	52.175.308,00	(52.175.308,00)	(100,00)
5	RSUD Akhmad Berahim	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Puskesmas Muruk Rian	0,00	20.597.631,00	(20.597.631,00)	(100,00)
7	RS Pratama Tanjung Keramat	238.238,90	0,00	238.238,90	100,00
Jumlah		238.238,90	149.312.323,00	(149.074.084,10)	99,84

Adapun penjelasan Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP dapat dilihat pada **Lampiran 5.12.**



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.3.1.1.1.6	Kas Lainnya	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		438.600,00	5.529.955,00

Kas Lainnya mencakup saldo pungutan atau potongan perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang telah dipotong dari pembayaran atas belanja barang namun belum disetorkan ke kas negara hingga akhir periode pelaporan TA 2025. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp438.600,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp5.529.955,00, maka terdapat penurunan saldo kas lainnya senilai Rp5.091.355,00 atau 92,07%. Adapun rincian Kas Lainnya atas yang belum ditarik disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.54
Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember		Kenaikan / Penurunan	%
		2025	2024		
1	Penyetoran Pajak PPh 23 BOP Melampaui TA	110.600,00	1.068.000,00	(957.400,00)	(89,64)
2	Penyetoran PPN BOP Melampaui TA	328.000,00	4.461.955,00	(4.133.955,00)	(92,65)
Jumlah		438.600,00	5.529.955,00	(5.091.355,00)	(92,07)

5.3.1.1.1.7	Kas Dana BOSP	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		408.734.250,97	258.215.304,97

Kas dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) terdiri dari kas Bos pusat senilai Rp401.488.030,97, kas dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) atas PAUD dan Pendidikan Kesetaraan senilai Rp7.246.220,00. Adapun rincian Kas Dana BOS disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.55
Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31-Des-25	31-Des-24
1	Kas Dana BOS	401.488.030,97	220.783.362,97
2	Kas Dana BOP	7.246.220,00	37.431.942,00
Jumlah		408.734.250,97	258.215.304,97



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.3.1.1.1.7.1 Kas Dana BOS	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	401.488.030,97	220.783.362,97

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu pendanaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan. Dana bos dilaksanakan sesuai ketentuan yang mengatur pengelolaan dana BOS yaitu Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2022 dan PMK 119/PMK.07/2021. Saldo Dana BOS per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp401.488.030,97 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp220.783.362,97, maka terdapat kenaikan saldo Dana BOS senilai Rp180.704.688,00 atau 81,85%. Adapun rincian Kas Dana BOS disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.56
Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember	
		2025	2024
1	Saldo BOS	399.421.678,97	211.159.173,97
2	Pajak Makan Minum yang disetorkan Melampaui TA	0,00	2.802.281,00
3	Saldo Kas di Bendahara Sekolah (Utang PFK yang belum disetorkan)	2.066.352,00	6.821.908,00
a	SDN 005 Tana Tidung	0,00	313.182,00
b	SDN 12 Tana Tidung	0,00	312.360,00
c	SMPN 07 Tana Tidung	0,00	2.545.556,00
d	SDN 013 Tana Tidung	0,00	3.650.810,00
e	SDN 001 Tana Tidung	374.960,00	0,00
f	SDN TU 1 Tana Tidung	330.723,00	0,00
g	SMPN TU 2 Tana tidung	1.360.669,00	0,00
Jumlah		401.488.030,97	220.783.362,97

Dari tabel di atas, saldo dana bos terdiri dari kas sisa lebih belanja dan utang PFK yang dipungut oleh Bendahara Sekolah atas transaksi belanja tahun 2025 namun belum disetorkan ke Kas Negara dan Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2025. Adapun rincian Kas di Bendahara Dana BOS sebelum ditambah dengan Pajak Makan Minum dan Pajak Pihak Ketiga (PFK) yang belum disetor dapat dilihat pada **Lampiran 5.13**.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.3.1.1.1.7.2 Kas Dana BOP	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	7.246.220,00	37.431.942,00

Kas Dana BOP terdiri atas Kas BOSP Pemerintah Daerah yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada sekolah dilingkungan Kabupaten Tana Tidung dengan ketentuan sisa saldo kas disetorkan kembali dan kas daerah per 31 Desember 2025, saldo Dana BOP daerah Rp0,00 namun dalam akun ini tercatat juga kas dana BOP Kesetaraan. BOP kesetaraan TKDD melalui DAK non fisik BOP Kesetaraan dan BOP Sanggar Kegiatan Belajar PAUD. Salah satu jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota, selain pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, adalah pendidikan kesetaraan. Sesuai dengan kewenangan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 2 Tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib membiayai Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C. Sesuai dengan kewenangan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 2 Tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib membiayai Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.

Saldo Dana BOP per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp7.246.220,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp37.431.942,00, maka terdapat penurunan saldo Dana BOP senilai Rp30.185.722,00 atau 80,64%. Adapun rincian Kas BOP disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.57
Saldo Kas Dana BOP per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember		Kenaikan / Penurunan	%
		2025	2024		
1	Kas BOP Sanggar Kegiatan Belajar PAUD	294.000,00	3.396.000,00	(3.102.000,00)	(91,34)
2	Kas BOP Sanggar Kegiatan Belajar Kesetaraan	6.952.220,00	34.035.942,00	(27.083.722,00)	(79,57)
Jumlah		7.246.220,00	37.431.942,00	(30.185.722,00)	(80,64)

5.3.1.1.1.8 Kas Dana BOK Puskesmas	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	295.534.533,00	1.190.048.036,00

Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dana BOK adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan program prioritas nasional bidang kesehatan diatur sesuai dengan Permendagri Nomor 12 Tahun 2023 tentang pengelolaan dana BOK pusat kesehatan masyarakat pada pemerintah daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Saldo Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp295.534.533,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp1.190.048.036,00, maka terdapat penurunan saldo dana BOK puskesmas senilai Rp894.513.503,00 atau 75,17%. Adapun rincian saldo dana BOK puskesmas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.58
Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember		Kenaikan / Penurunan	%
		2025	2024		
1	Puskesmas Tideng Pale	68.834.998,00	513.641.774,00	(444.806.776,00)	(86,60)
2	Puskesmas Sesayap Hilir	15.435.812,00	158.299.688,00	(142.863.876,00)	(90,25)
3	Puskesmas Tana Lia	42.306.450,00	120.153.970,00	(77.847.520,00)	(64,79)
4	Puskesmas Kujau	96.894.704,00	222.694.366,00	(125.799.662,00)	(56,49)
6	Puskesmas Muruk Rian	72.062.569,00	175.258.238,00	(103.195.669,00)	(58,88)
Jumlah		295.534.533,00	1.190.048.036,00	(894.513.503,00)	(75,17)

5.3.1.1.2 Setara Kas **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
0,00 **0,00**

Setara kas adalah investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik, setara kas per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00 karena Setara kas telah disetorkan kembali ke RKUD sesuai dengan penjelasan berikut.

- Deposito senilai Rp75.000.000.000,00 disetorkan ke Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 6 Oktober 2025 dan dikembalikan ke RKUD pada tanggal 19 Desember 2025.
- Deposito senilai Rp25.000.000.000,00 disetorkan ke Bank Kaltimara pada tanggal 6 Oktober 2025 dan dikembalikan ke RKUD pada tanggal 19 Desember 2025.
- Deposito senilai Rp 150.000.000.000,00 disetorkan ke Bank Negara Indonesia pada tanggal 6 Oktober 2025 dan dikembalikan ke RKUD pada tanggal 19 Desember 2025.

5.3.1.1.3 Piutang Pajak Daerah **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
3.437.362.186,00 **2.938.545.467,00**

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp3.437.362.186,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp2.938.545.467,00, maka terdapat kenaikan saldo Piutang Pajak Daerah senilai Rp498.816.719,00 atau 16,98%. Adapun rincian Piutang Pajak



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.59
Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo Piutang 1 Jan 2025	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Piutang 31 Des 2025
1	Piutang Pajak Restoran	0,00	3.904.761.791,00	3.903.741.791,00	1.020.000,00
2	Piutang Pajak Reklame	0,00	20.049.081,00	18.950.430,00	1.098.651,00
3	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	0,00	7.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00
4	Piutang Pajak MBLB	9.860.752,00	584.970.125,00	576.495.777,00	18.335.100,00
5	Piutang PBB-P2	2.928.684.715,00	812.903.344,00	381.340.986,00	3.360.247.073,00
6	Piutang BPJT-Tenaga Listrik	0,00	2.338.444.245,00	2.286.782.883,00	51.661.362,00
Jumlah		2.938.545.467,00	7.668.128.586,00	7.169.311.867,00	3.437.362.186,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.3.1.1.3.1 Piutang Pajak Restoran **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
1.020.000,00 **0,00**

Saldo piutang pajak restoran per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1.020.000,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, maka terdapat kenaikan saldo Piutang pajak restoran senilai Rp1.020.000,00 atau 100%. Kenaikan saldo piutang tersebut dikarenakan penetapan senilai Rp3.904.761.791,00 dan terealisasi Rp3.903.741.791,00 sehingga terdapat piutang senilai Rp1.020.000,00 atas dua Wajib Pajak yang belum menyetorkan Pajak Restoran ke RKUD.

5.3.1.1.3.2 Piutang Pajak Reklame **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
1.098.651,00 **0,00**

Saldo Piutang Pajak Reklame papan/Billboard/Videotron per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1.098.651,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, maka terdapat kenaikan saldo piutang pajak reklame papan/Billboard/Videotron senilai Rp1.098.651,00 atau 100%. Adapun rincian Piutang Pajak Reklame disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.60
Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo Piutang 1 Jan 2025	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Piutang 31 Des 2025
1	Reklame Baliho	0,00	392.700,00	392.700,00	0,00
2	Reklame Papan/Billboard	0,00	1.912.830,00	1.912.830,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Saldo Piutang 1 Jan 2025	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Piutang 31 Des 2025
3	Reklame Billboard	0,00	494.667,00	494.667,00	0,00
4	Reklame Neon Sigh/Box	0,00	5.919.666,00	4.821.015,00	1.098.651,00
5	Reklame Kain	0,00	7.657.500,00	7.657.500,00	0,00
6	Reklame Berjalan	0,00	3.512.030,00	3.512.030,00	0,00
7	Reklame Spanduk	0,00	159.688,00	159.688,00	0,00
Jumlah		0,00	20.049.081,00	18.950.430,00	1.098.651,00

Dari tabel di atas, Reklame Neon Sigh/Box dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Terdapat piutang TA 2024 yang baru tercatat pada TA 2025 senilai Rp196.188,00.
- Terdapat piutang TA 2025 senilai Rp902.463,00 yang merupakan selisih antara nilai penetapan senilai Rp5.723.478,00 dan terealisasi senilai Rp4.821.015,00.

5.3.1.1.3.3 Piutang Pajak Sarang Burung Walet 31 Desember 2025 31 Desember 2024
5.000.000,00 0,00

Saldo piutang pajak sarang burung walet per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp5.000.000,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, maka terdapat kenaikan saldo Piutang pajak sarang burung walet senilai Rp5.000.000,00 atau 100%. Kenaikan saldo piutang tersebut dikarenakan Penetapan senilai Rp7.000.000,00 dan terealisasi Rp2.000.000,00 sehingga terdapat piutang senilai Rp5.000.000,00 atas 1 (satu) Wajib Pajak yang belum menyetorkan ke RKUD.

5.3.1.1.3.4 Piutang Pajak Mineral bukan Logam 31 Desember 2025 31 Desember 2024
18.335.100,00 9.860.752,00

Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp18.335.100,00 dan jika dibanding saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp9.860.752,00, maka terdapat kenaikan saldo piutang pajak mineral bukan logam senilai Rp8.474.348,00 atau 85,94%. Kenaikan saldo piutang tersebut dikarenakan terdapat koreksi saldo awal atas piutang TA 2024 yang tidak tercatat pada TA 2025 senilai Rp18.335.100,00 dan belum terseter ke RKUD.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.3.1.1.3.5 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
3.360.247.073,00 **2.928.684.715,00**

Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp3.360.247.073,00,00, dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp2.928.684.715,00, maka terdapat kenaikan saldo piutang PBB P2 senilai Rp431.562.358,00 atau 14,74%. Secara keseluruhan Piutang Pajak tersebut merupakan Piutang PBB-P2. Adapun rincian Piutang PBB-P2 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.61
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)

No	Uraian	Penambah Piutang	Pengurang Piutang	Saldo Piutang Pajak
1	Saldo Awal TA 2025	0,00	0,00	2.928.684.715,00
2	Ketetapan PBB-P2 TA 2025	812.903.344,00	0,00	3.741.588.059,00
3	Pembayaran Pokok PBB-P2 TA 2025	0,00	381.340.986,00	3.360.247.073,00

5.3.1.1.3.6 Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
51.661.362,00 **0.00**

Saldo Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp51.661.362,00 dan jika dibandingkan dengan saldo Per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, maka terdapat kenaikan saldo piutang PBJT-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain senilai Rp51.661.362,00 atau 100%. Kenaikan saldo piutang tersebut dikarenakan Penetapan senilai Rp2.338.444.245,00 dan terealisasi Rp2.286.782.883,00 sehingga terdapat piutang senilai Rp51.661.362,00 atas satu Wajib Pajak yang belum menyetorkan Pajak ke RKUD.

5.3.1.1.4 Piutang Retribusi Daerah **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
67.382.337,00 **33.697.944,00**

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp67.382.337,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp33.697.944,00, maka terdapat kenaikan saldo Piutang Retribusi senilai Rp33.684.393,00 atau 99,96%. Kenaikan tersebut karena terdapat Piutang Retribusi Jasa Umum senilai Rp33.684.393,00 dan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu Rp33.697.944,00. Adapun rincian Piutang Retribusi disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel 5.62

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo Piutang 1 Jan 2025	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Piutang 31 Des 2025
1	Retribusi Jasa Umum	0,00	1.227.985.886,00	1.194.301.493,00	33.684.393,00
2	Retribusi Jasa Usaha	0,00	673.376.913,00	673.376.913,00	0,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	33.697.944,00	24.727.319,00	24.727.319,00	33.697.944,00
Jumlah		33.697.944,00	1.926.090.118,00	1.892.405.725,00	67.382.337,00

5.3.1.1.4.1	Piutang Retribusi Jasa Umum	31 Desember 2025 33.684.393.00	31 Desember 2024 0.00

Saldo Piutang Retribusi Jasa Umum per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp33.684.393,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 maka terdapat kenaikan saldo Piutang Retribusi senilai Rp33.684.393,00 atau 100,00%. Kenaikan tersebut karena terdapat Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas senilai Rp33.207.143,00, Retribusi Pelayanan Pasar senilai Rp122.000,00 dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus senilai Rp355.250,00. Adapun rincian Piutang Retribusi Jasa Umum disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.63

Saldo Piutang Retribusi Jasa Umum per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo Piutang 1 Jan 2025	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Piutang 31 Des 2025
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	1.080.549.886,00	1.047.342.743,00	33.207.143,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	62.778.000,00	62.778.000,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	72.708.000,00	72.586.000,00	122.000,00
4	Retribusi dan/atau Penyediaan Kakus	0,00	11.950.000,00	11.594.750,00	355.250,00
Jumlah		0,00	1.227.985.886,00	1.194.301.493,00	33.684.393,00

5.3.1.1.4.1.1 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	33.207.143.00	0,00

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp33.207.143,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, maka terdapat kenaikan saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan senilai Rp33.207.143,00 atau 100%, kenaikan tersebut karena terdapat Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Akhmad Berahim senilai Rp33.207.143,00. Adapun rincian Piutang Retribusi Jasa Umum disajikan pada tabel berikut.

5.3.1.1.4.1.1.1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		33.207.143,00	0,00

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Akhmad Berahim per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp33.207.143,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, maka terdapat kenaikan saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Akhmad Berahim senilai Rp33.207.143,00 atau 100%. Kenaikan tersebut atas Piutang pada PT Waskita atas Jasa Pelayanan Umum Tenaga Kerja PT. Waskita (Pasien Umum) senilai Rp28.524.053,00 dan Pasien Umum senilai Rp4.683.090,00 yang belum dibayarkan.

5.3.1.1.4.1.2	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		122.000,00	0,00

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp122.000,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, maka terdapat kenaikan saldo Retribusi pelayanan Pasar senilai Rp122.000,00 atau 100,00%. Piutang tersebut atas Retribusi Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM. Adapun rincian saldo Piutang Retribusi Pelayanan Pasar yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.64
Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Piutang Lainnya TA 2025	Piutang Lainnya TA 2024
1	Retribusi Los No.10 dan 33 Periode Desember 2025	77.000,00	0,00
2	Retribusi Pelataran Periode 17 Nopember 31 Desember	45.000,00	0,00
Jumlah		122.000,00	0,00

5.3.1.1.4.1.3	Piutang Retribusi Penyediaan Penyedotan Kakus	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		355.250,00	0,00

Saldo Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaskus per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp355.250,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, maka terdapat kenaikan saldo Retribusi penyediaan penyedotan kakus senilai Rp355.250,00 atau 100,00%. Piutang tersebut atas Retribusi penyediaan penyedotan kakus pada DPUPRKP yang belum tersetorkan senilai Rp350.000, sedangkan senilai Rp5.250,00 merupakan Biaya potongan qris yang seharusnya tidak dikenakan biaya.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.3.1.1.4.2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		0,00	0,00

Saldo Piutang Retribusi Jasa Usaha per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp0,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00.

5.3.1.1.4.3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		33.697.944,00	33.697.944,00

Saldo Piutang Retribusi Perizinan Tertentu per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp33.697.944,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp33.697.944,00 maka terdapat kenaikan saldo Piutang Retribusi Perizinan Tertentu senilai Rp0,00 atau 0,00%.

5.3.1.1.4.3.1	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		33.697.944,00	33.697.944,00

Saldo Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp33.697.944,00 dan jika dibandingkan dengan saldo Piutang Retribusi Izin per 31 Desember 2024 senilai Rp33.697.944,00 atau 0,00%, maka tidak terdapat kenaikan atau penurunan saldo. Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tersebut atas SKRD Nomor 008/SKRD/PBG/X/2023 dengan satu Wajib Retribusi belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2025.

5.3.1.1.5	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		0,00	1.164.197.214,49

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp0,00, dan jika dibandingkan dengan Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp1.164.197.214,49, maka terdapat penurunan saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah senilai Rp1.164.197.214,49 atau 100%. Adapun rincian saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.65
Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan / Penurunan	%
1	Piutang Pendapatan BLUD	0,00	548.667.136,00	(548.667.136,00)	(100,00)
2	Piutang Pendapatan denda keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan	0,00	4.968.173,00	(4.968.173,00)	(100,00)
3	Piutang Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran	0,00	610.561.905,49	(610.561.905,49)	(100,00)
Jumlah		0,00	1.164.197.214,49	(1.164.197.214,49)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.3.1.1.6	Piutang Transfer	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Pemerintah Pusat	349.279.261.000,00	63.174.239.000,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat Peraturan Perundang-undangan. Saldo Piutang Transfer per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp349.279.261.000,00, dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp63.174.239.000,00, maka terdapat kenaikan saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat senilai Rp286.105.022.000,00 atau 452,88%. Penyebab Piutang Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan dengan rincian sebagai berikut.

- Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023.
- Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29/MK/PK/2025 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2025.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025. Rincian penyaluran Kurang Bayar senilai Rp349.279.196.000,00 dan Rincian penyaluran Lebih Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan TA 2024 senilai Rp170.235.351.000,00.

Adapun rincian saldo piutang transfer Pemerintah Pusat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.66
Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo Awal Piutang TA 2025	Koreksi Saldo Awal atas Penyelesaian KB PMK Nomor 89 TA 2024	KB yang disalurkan sesuai KMK Nomor 29 Tahun 2025	KB TA 2024 Sesuai PMK Nomor 16 Tahun 2025 dan 120 Tahun 2025	Saldo Akhir Piutang TA 2025
1	Piutang Dana Transfer Umum- DBH Pajak	63.101.901.000,00	14.822.771.000,00	20.784.449.000,00	318.584.406.000,00	346.079.087.000,00
2	Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak dan Sumber Daya Alam	72.338.000,00	16.995.000,00	23.825.000,00	3.168.656.000,00	3.200.174.000,00
Jumlah		63.174.239.000,00	14.839.766.000,00	20.808.274.000,00	321.753.062.000,00	349.279.261.000,00

Berikut penjelasan piutang transfer Pemerintah Pusat.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.3.1.1.6.1 Piutang Transfer Dana 31 Desember 2025 31 Desember 2024
Perimbangan DBH Pajak 346.079.087.000,00 63.101.901.000,00

Berdasarkan PMK Nomor 120 Tahun 2025 tentang kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2025 sesuai dengan PMK tersebut disebutkan bahwa kurang bayar DBH pajak kabupaten Tana Tidung senilai Rp346.079.022.000,00 dan PMK Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian DBH Cukai Hasil Tembakau TA 2025 senilai Rp65.000,00. Kurang bayar tersebut diakui sebagai saldo Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp346.079.087.000,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp63.101.901.000,00, maka terdapat kenaikan saldo Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak senilai Rp282.977.186.000,00 atau 448,44 %. Adapun rincian saldo Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.67
Rincian Piutang Dana Perimbangan DBH Pajak

Uraian	Sado Awal Piutang TA 2025	Koreksi Saldo Awal atas Penyelesaian KB PMK Nomor 89 TA 2024	KB yang disalurkan sesuai KMK Nomor 29 Tahun 2025	KB TA 2024 Sesuai PMK Nomor 16 Tahun 2025 dan 120 Tahun 2025	Saldo Akhir Piutang TA 2025
PPh	957.688.000,00	224.963.000,00	315.443.000,00	3.885.280.000,00	4.302.562.000,00
PPh Pasal 21	946.820.000,00	222.410.000,00	311.863.000,00	3.465.944.000,00	3.878.491.000,00
PPh Pasal 25/29	10.868.000,00	2.553.000,00	3.580.000,00	419.336.000,00	424.071.000,00
PBB	62.144.212.000,00	14.597.807.000,00	20.469.006.000,00	314.699.061.000,00	341.776.460.000,00
Bagi Rata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Daerah	62.144.210.000,00	14.597.805.000,00	20.469.006.000,00	314.699.061.000,00	341.776.460.000,00
Bagian Daerah Migas	0,00	0,00	0,00	5.527.042.000,00	5.527.042.000,00
Bagian Daerah Non Migas	61.876.376.000,00	14.534.890.000,00	20.380.787.000,00	306.638.899.000,00	333.599.598.000,00
Bagian Daerah Perhutanan	195.925.000,00	46.023.000,00	64.534.000,00	1.926.028.000,00	2.011.396.000,00
Bagian Daerah Perkebunan	1.000,00	1.000,00	0,00	384.764.000,00	384.764.000,00
Bagian Daerah Sektor Lainnya	71.908.000,00	16.891.000,00	23.685.000,00	222.328.000,00	253.660.000,00
Biaya Pemungutan	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Biaya Pemungutan Non Migas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Biaya Pemungutan Perkebunan	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
CHT	1.000,00	1.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
Jumlah	63.101.901.000,00	14.822.771.000,00	20.784.449.000,00	318.584.406.000,00	346.079.087.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.3.1.1.6.2	Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak dan Sumber Daya Alam	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		3.200.174.000,00	72.337.000,00

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 tentang kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil pada TA 2023 dan TA 2024 sesuai dengan KMK tersebut Saldo Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak dan Sumber Daya Alam per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp3.200.174.000,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp72.337.000,00, maka terdapat kenaikan saldo Saldo Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak dan Sumber Daya Alam senilai Rp3.127.837.000,00 atau 4.323,92%. Adapun rincian kurang salur yang diakui sebagai piutang bagi hasil bukan pajak dan sumber daya alam disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.68
Rincian Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak dan Sumber Daya Alam

Uraian	Saldo Awal Piutang TA 2025	Koreksi Saldo Awal atas Penyelesaian KB PMK Nomor 89 TA 2024	KB yang disalurkan sesuai KMK Nomor 29 Tahun 2025	KB TA 2024 Sesuai PMK Nomor 16 Tahun 2025 dan 120 Tahun 2025	Saldo Akhir Piutang TA 2025
Migas	72.335.000,00	16.992.000,00	23.825.000,00	1.420.783.000,00	1.452.301.000,00
Minyak Bumi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Gas Bumi	72.334.000,00	16.991.000,00	23.825.000,00	1.420.783.000,00	1.452.301.000,00
Minerba-Royalti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Kehutanan	1.000,00	1.000,00	0	1.747.873.000,00	1.747.873.000,00
IIUPH	0,00	0,00	0,00	718.392.000,00	718.392.000,00
PSDH	1.000,00	1.000,00	0,00	1.029.481.000,00	1.029.481.000,00
Jumlah	72.338.000,00	16.995.000,00	23.825.000,00	3.168.656.000,00	3.200.174.000,00

5.3.1.1.7	Piutang Transfer Antar Daerah	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		29.962.545.759,00	19.308.478.465,00

Saldo Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp29.962.545.759,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp19.308.478.465,00, maka terdapat kenaikan saldo Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi senilai Rp10.654.067.294,00 atau 55,18%. Penyebab Piutang Transfer Antar Daerah mengalami kenaikan dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 188.44/K.89/2024 tentang Penetapan Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten/Kota TA 2023, dicatat kurang salur senilai Rp3.865.855.510,00.
- Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 100.3.3.1/128/2025 tentang Penetapan Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada Kabupaten/Kota TA 2024, dicatat kurang salur senilai Rp13.446.596.141,00.
- Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 100.3.3.1/55/2026 tentang Penetapan Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada Kabupaten/Kota TA 2025, dicatat kurang salur senilai Rp12.650.094.108,00.

Adapun rincian Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Utara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.69
Rincian Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Utara

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.275.303.394,00	960.754.589,00	1.041.729.317,00	1.194.328.666,00
2	Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	1.232.952.062,00	792.279.984,00	1.006.109.112,00	1.019.122.934,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	16.638.524.826,00	50.934.452.301,00	40.076.502.956,00	27.496.474.171,00
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	161.698.183,00	536.846.819,00	445.925.014,00	252.619.988,00
5	Pajak Rokok	0,00	3.633.581.130,00	3.633.581.130,00	0,00
Jumlah		19.308.478.465,00	56.857.914.823,00	46.203.847.529,00	29.962.545.759,00

Penjelasan Piutang Transfer DBH Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut.

- Saldo awal PKB senilai Rp1.275.303.394,00, terdapat mutasi masuk atas koreksi nilai kurang bayar TA 2024 yang baru diakui TA 2025 berdasarkan Pergub Nomor 100.3.3.1/128/2025 senilai Rp939.267.988,00 serta ditambah nilai kurang bayar TA 2025 Pergub Nomor 100.3.3.1/55/2026 senilai Rp21.486.601,00 dengan jumlah senilai Rp960.754.589,00, sedangkan mutasi keluar atau nilai yang disalurkan atas kurang bayar PKB TA 2025 senilai Rp1.041.729.317,00, sehingga saldo akhir senilai Rp1.194.328.666,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- b. Saldo awal BBN-KB senilai Rp1.232.952.062,00, terdapat mutasi masuk atas koreksi nilai kurang bayar TA 2024 yang baru diakui TA 2025 berdasarkan Pergub Nomor 100.3.3.1/128/2025 senilai Rp772.532.520,00 serta ditambah nilai kurang bayar TA 2025 Pergub Nomor 100.3.3.1/55/2026 senilai Rp19.747.464,00 dengan jumlah senilai Rp792.279.984,00, sedangkan mutasi keluar atau nilai yang disalurkan atas kurang bayar BBN-KB TA 2025 senilai Rp1.006.109.112,00, sehingga saldo akhir senilai Rp1.019.122.934,00.
- c. Saldo awal PBB-KB senilai Rp16.638.524.826,00, terdapat mutasi masuk atas koreksi nilai kurang bayar TA 2023 pada TA 2025 sesuai dengan Pergub Nomor 188.44/K.89 senilai Rp20.799.081,00, ditambah nilai kurang bayar TA 2024 yang baru diakui TA 2025 berdasarkan Pergub Nomor 100.3.3.1/128/2025 senilai Rp11.628.875.008,00 serta ditambah nilai kurang bayar TA 2025 Pergub Nomor 100.3.3.1/55/2026 senilai Rp39.284.778.212,00 dengan jumlah senilai Rp50.934.452.301,00, sedangkan mutasi keluar atau nilai yang disalurkan atas kurang bayar PBB-KB senilai Rp40.076.502.956,00, sehingga saldo akhir senilai Rp27.496.474.171,00.
- d. Saldo awal PAP senilai Rp161.698.183,00, terdapat mutasi masuk atas koreksi nilai kurang bayar TA 2024 yang baru diakui TA 2025 berdasarkan Pergub Nomor 100.3.3.1/128/2025 senilai Rp105.920.625,00 serta ditambah nilai kurang bayar TA 2025 Pergub Nomor 100.3.3.1/55/2026 senilai Rp430.926.194,00 dengan jumlah senilai Rp536.846.819,00, sedangkan mutasi keluar atau nilai yang disalurkan atas kurang bayar PAP TA 2025 senilai Rp445.925.014,00, sehingga saldo akhir senilai Rp252.619.988,00.
- e. Saldo awal Pajak Rokok senilai Rp0,00, terdapat mutasi masuk atas nilai kurang bayar TA 2025 Pergub Nomor 100.3.3.1/55/2026 senilai Rp3.633.581.130,00 sedangkan mutasi keluar atau nilai yang disalurkan atas kurang bayar Pajak Rokok TA 2025 senilai Rp3.633.681.130,00, sehingga saldo akhir senilai Rp0,00.

5.3.1.1.8	Piutang Lainnya	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		1.234.837.507,00	1.984.414.780,81

Saldo Piutang Lainnya atas Piutang Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1.234.837.507,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp1.984.414.780,81, maka terdapat penurunan saldo Piutang Lainnya atas Piutang Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp749.577.273,81 atau 37,77%. Penurunan dikarenakan Uang Muka pengadaan telah dipotong pada Berita Acara Pembayaran. Adapun rincian piutang lainnya disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel 5.70
Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	per 31 Desember 2025	per 31 Desember 2024
1	Pembangunan Gedung Utama Kantor Bupati Kabupaten Tana Tidung (MTL)	0,00	329.325.333,77
2	Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Tana Tidung (MTL)	0,00	299.047.899,67
3	Pembangunan Masjid Menjelutung (MTL)	0,00	178.783.922,00
4	Pembangunan Jembatan Sei Sebang	0,00	1.177.257.625,37
5	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	631.250.000,00	0,00
6	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	603.587.507,00	0,00
Jumlah		1.234.837.507,00	1.984.414.780,81

5.3.1.1.8.1 Bagian Lancar Tuntutan 31 Desember 2025 31 Desember 2024
Ganti Kerugian Daerah 1.234.837.507,00 0,00

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2025 atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Senilai Rp1.234.837.507,00. Saldo tersebut mengalami kenaikan Senilai Rp1.234.837.507,00 atau 100,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 Senilai Rp0,00. Kenaikan ini disebabkan adanya perubahan metode pencatatan atas Kerugian Daerah yang telah ditetapkan yang sebelumnya dicatat pada Aset Lainnya – Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Adapun Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.71
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	per 31 Desember 2025	per 31 Desember 2024
1	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	631.250.000,00	0,00
2	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	603.587.507,00	0,00
Jumlah		1.234.837.507,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.3.1.1.9. Penyisihan Piutang **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
(3.002.117.352,02) **(1.391.757.105,64)**

Penyisihan Piutang adalah Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 adalah senilai (Rp3.002.117.352,02) dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai (Rp1.391.757.105,64), maka terdapat kenaikan saldo Penyisihan Piutang senilai (Rp1.610.360.246,38) atau 115,71%. Adapun rincian Penyisihan Piutang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.72
Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember		Kenaikan / Penurunan	%
		2025	2024		
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(1.767.046.800,06)	(1.388.387.311,24)	(378.659.488,82)	(27,27)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(3.369.794,40)	(3.369.794,40)	0,00	0,00
3	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(1.231.700.757,56)	0,00	(1.231.700.757,56)	0,00
Jumlah		(3.002.117.352,02)	(1.391.757.105,64)	(1.610.360.246,38)	115,71

Adapun Piutang dan Penyisihan Piutang tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut.

5.3.1.1.9.1 Penyisihan Piutang Pajak **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
(1.767.046.800,06) **(1.388.387.311,24)**

Penyisihan Piutang adalah Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 adalah senilai (Rp1.767.046.800,06) dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai (Rp1.388.387.311,24), maka terdapat kenaikan saldo Penyisihan Piutang senilai (Rp378.659.488,82) atau 27,27%. Adapun rincian Penyisihan Piutang Pajak disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.73
Rincian Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo Piutang Per 31 Desember 2025	0 s.d. 1 Bulan	1 s.d. 3 Bulan	3 s.d. 12 Bulan	> 12 Bulan	Saldo Penyisihan Piutang TA 2025
			0,5% (Lancar)	10% (Kurang Lancar)	50% (Diragukan)	100% (Macet)	
1	Piutang Pajak Restoran	1.020.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
2	Piutang Pajak Reklame	1.098.651,00	4.512,32	19.618,80	0,00	0,00	24.131,12
3	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Saldo Piutang Per 31 Desember 2025	0 s.d. 1 Bulan	1 s.d. 3 Bulan	3 s.d. 12 Bulan	> 12 Bulan	Saldo Penyisihan Piutang TA 2025
			0,5% (Lancar)	10% (Kurang Lancar)	50% (Diragukan)	100% (Macet)	
4	Piutang Pajak MBLB	18.335.100,00	0,00	1.833.510,00	0,00	0,00	1.833.510,00
5	Piutang PBBP2	3.360.247.073,00	2.811.001,96	47.308.285,00	610.182.367,00	1.104.599.098,00	1.764.900.751,96
6	Piutang PBJT – Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	51.661.362,00	258.306,98	0,00	0,00	0,00	258.306,98
Jumlah		3.437.362.186,00	3.103.921,26	49.161.413,80	610.182.367,00	1.104.599.098,00	1.767.046.800,06

Adapun rincian Penyisihan Piutang Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 5.14**.

5.3.1.1.9.1.1 Penyisihan Piutang Pajak Restoran **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
(5.100,00) **(0,00)**

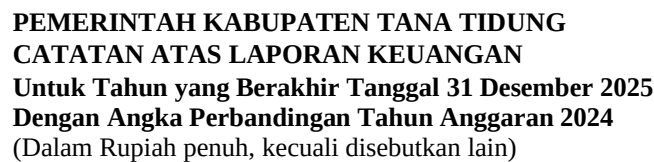
Saldo Penyisihan Piutang Restoran-Restoran dan Sejenisnya per 31 Desember 2025 adalah senilai (Rp5.100,00) dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai (Rp0,00), maka terdapat kenaikan saldo Penyisihan Piutang senilai (Rp5.100,00) atau 100,00%. Adapun rincian Penyisihan Piutang Pajak Restoran disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.74
Rincian Penyisihan Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo Piutang Per 31 Desember 2025	0 s.d. 1 Bulan	1 s.d. 3 Bulan	3 s.d. 12 Bulan	> 12 Bulan	Saldo Penyisihan Piutang TA 2025
			0,5% (Lancar)	10% (Kurang Lancar)	50% (Diragukan)	100% (Macet)	
1	Rumah Makan Sederhana	420.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2	Warung Ampera Bundo	600.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Jumlah		1.020.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00

5.3.1.1.9.1.2 Penyisihan Piutang Pajak Reklame **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
(24.131,12) **(0,00)**

Saldo Penyisihan Piutang Reklame per 31 Desember 2025 adalah senilai (Rp24.131,12) dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai (Rp0,00), maka terdapat kenaikan saldo Penyisihan Piutang senilai (Rp24.131,12) atau 100,00%. Adapun rincian Penyisihan Piutang Pajak Reklame disajikan pada tabel berikut.



Rincian Penyisihan Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2025 dan 2024

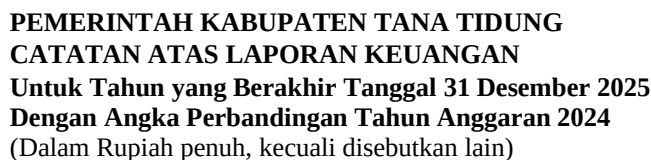
No	Uraian	Saldo Piutang Per 31 Desember 2025	0 s.d. 1 Bulan	1 s.d. 3 Bulan	3 s.d. 12 Bulan	> 12 Bulan	Saldo Penyisihan Piutang TA 2025
			0,5% (Lancar)	10% (Kurang Lancar)	50% (Diragukan)	100% (Macet)	
1	PT. Global Jet Express	706.275,00	3.531,38	0,00	0,00	0,00	3.531,38
2	PT. PLN Cabang Tideng Pale	392.376,00	980,94	19.618,80	0,00	0,00	20.599,74
Jumlah		1.098.651,00	4.512,32	19.618,80	0,00	0,00	24.131,12

5.3.1.1.9.1.3	Penyisihan Piutang PBJT- Tenaga Listrik	<u>31 Desember 2025</u> (258.306,98)	<u>31 Desember 2024</u> (0,00)

Saldo Penyisihan Piutang PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri per 31 Desember 2025 adalah senilai (Rp258.306,98) dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai (Rp0,00), maka terdapat kenaikan saldo Penyisihan Piutang senilai (Rp258.306,98) atau 100,00%. Kenaikan tersebut dikarenakan piutang PBJT-Tenaga Listrik oleh tiga Wajib Pajak yang umur piutangnya masih lancar atau kurang dari satu tahun belum menyetorkan PBJT-Tenaga Listrik TA 2025. Adapun rincian Penyisihan Piutang PBJT-Tenaga Listrik disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.76
Rincian Penyisihan Piutang PBJT-Tenaga Listrik
per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo Piutang Per 31 Desember 2025	0 s.d. 1 Bulan	1 s.d. 3 Bulan	3 s.d. 12 Bulan	> 12 Bulan	Saldo Penyisihan Piutang TA 2025
			0,5% (Lancar)	10% (Kurang Lancar)	50% (Diragukan)	100% (Macet)	
1	Job Pertamina Medco E&P Simenggaris	45.645.996,00	228.230,10	0,00	0,00	0,00	228.230,10
2	PT. Adindo Inhutani Lestari	5.375.009,00	26.875,08	0,00	0,00	0,00	26.875,08
3	PT. Usaha Kaltim Mandiri	640.357,00	3.201,80	0,00	0,00	0,00	3.201,80
Jumlah		51.661.362,00	258.306,98	0,00	0,00	0,00	258.306,98



Saldo Penyisihan Piutang Sarang Burung Walet per 31 Desember 2025 adalah senilai (Rp25.000) dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai (Rp0,00), maka terdapat kenaikan saldo Penyisihan Piutang senilai (Rp0,00) atau 100%. Kenaikan tersebut dikarenakan piutang pajak sarang burung walet oleh satu Wajib Pajak yang umur piutangnya masih lancar atau kurang dari satu tahun belum menyetorkan Walet TA 2025.

Saldo Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2025 adalah senilai (Rp1.833.510,00) dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai (Rp0,00), maka terdapat kenaikan saldo Penyisihan Piutang senilai (Rp1.833.510,00) atau 100%. Kenaikan tersebut dikarenakan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan oleh satu Wajib Pajak yang umur piutangnya kurang lancar atau satu sampai dengan dua tahun.

Penyisihan Piutang adalah Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 adalah senilai (Rp1.764.900.751,96) dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai (Rp1.388.387.311,24), maka terdapat kenaikan saldo Penyisihan Piutang senilai (Rp376.513.440,72) atau 27,12%. Adapun rincian Penyisihan Piutang disajikan pada tabel berikut.

No	Tahun Pajak	Saldo Piutang Per 31 Desember 2025	0 s.d. 1 Bulan	1 s.d. 3 Bulan	3 s.d. 12 Bulan	> 12 Bulan	Saldo Penyisihan Piutang TA 2025
			0,5% (Lancar)	10% (Kurang Lancar)	50% (Diragukan)	100% (Macet)	
1	2025	0,00	2.811.001,96	0,00	0,00	0,00	2.811.001,96
2	2024	545.909.706,00	0,00	47.308.285,00	0,00	0,00	47.308.285,00
3	2023	438.567.822,00	0,00	0,00	209.022.040,00	0,00	209.022.040,00
4	2022	431.358.235,00	0,00	0,00	208.959.799,00	0,00	208.959.799,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Tahun Pajak	Saldo Piutang Per 31 Desember 2025	0 s.d. 1 Bulan	1 s.d. 3 Bulan	3 s.d. 12 Bulan	> 12 Bulan	Saldo Penyisihan Piutang TA 2025
			0,5% (Lancar)	10% (Kurang Lancar)	50% (Diragukan)	100% (Macet)	
5	2021	392.894.703,00	0,00	0,00	192.200.528,00	0,00	192.200.528,00
6	2020	380.559.575,00	0,00	0,00	0,00	374.714.670,00	374.714.670,00
7	2019	386.591.076,00	0,00	0,00	0,00	382.203.552,00	382.203.552,00
8	2018	352.803.598,00	0,00	0,00	0,00	347.680.876,00	347.680.876,00
Jumlah		2.928.684.715,00	2.811.001,96	47.308.285,00	610.182.367,00	1.104.599.098,00	1.764.900.751,96

Adapun rincian penyisihan piutang pajak PBB dapat dilihat pada **Lampiran 5.15**.

5.3.1.1.9.2 Penyisihan Piutang Retribusi 31 Desember 2025 31 Desember 2024
Perizinan Tertentu IMB (3.369.794,40) (3.369.794,40)

Penyisihan Piutang adalah Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 adalah senilai (Rp3.369.794,40) dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai (Rp3.369.794,40), maka terdapat kenaikan saldo Penyisihan Piutang senilai (Rp0,00) atau 0,00%. Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu oleh Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tersebut atas SKRD Nomor 008/SKRD/PBG/X/2023 dengan satu Wajib Pajak belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2025.

5.3.1.1.9.3 Penyisihan Bagian Lancar 31 Desember 2025 31 Desember 2024
Tuntutan Ganti Kerugian (1.231.700.757,56) (0,00)
Daerah

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2025 adalah senilai (Rp1.231.700.757,56) dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp 0,00, maka terdapat kenaikan saldo Penyisihan Piutang senilai (Rp1.231.700.757,56) atau 100,00%. Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tersebut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 5.16**.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.3.1.1.10	Beban Dibayar Dimuka	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		382.390.966,67	4.154.148.705,00

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp382.390.966,67 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp4.154.148.705,00, maka terdapat penurunan saldo Beban Dibayar Dimuka senilai Rp3.771.575.738,33 atau 90,79%. Adapun Beban Dibayar Dimuka TA 2025 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.78
Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember		Kenaikan / Penurunan	%
		2025	2024		
1	Beban Dibayar Dimuka	0,00	3.813.173.705,00	(3.813.173.705,00)	(100,00)
2	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan	381.231.666,67	340.975.000,00	40.256.666,67	11,81
3	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Aset Tetap Lainnya	1.159.300,00	0,00	1.159.300,00	100,00
Jumlah		382.390.966,67	4.154.148.705,00	(3.771.757.738,33)	(90,79)

5.3.1.1.10.1	Beban Dibayar Dimuka-Hibah	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		0,00	3.813.173.705,00

Saldo Beban Dibayar Dimuka-Hibah per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp0,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp3.813.173.705,00, maka terdapat penurunan saldo Beban Dibayar Dimuka senilai Rp3.813.173.705,00 atau 100,00%. Adapun penurunan Saldo Beban dibayar dimuka dikarenakan pengakuan Beban Hibah Pilkada yang telah di setorkan kembali pada TA 2025, rincian beban hibah pilkada terdiri atas pengakuan hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) senilai Rp2.716.048.778,00 dan pengakuan hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) senilai Rp1.097.124.927,00.

5.3.1.1.10.1	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		381.231.666,67	340.975.000,00

Saldo Beban Dibayar Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp381.231.666,67 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp340.975.000,00, maka terdapat kenaikan saldo Beban Dibayar Dimuka senilai Rp40.256.666,67 atau 11,81%. Adapun penurunan Saldo Beban dibayar dimuka dikarenakan terdapat tambahan beban sewa dibayar dimuka Sewa Rumah Kantor Perwakilan KTT di Jakarta. Adapun rincian Beban Dibayar Dimuka Sewa Gedung dan Bangunan disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel 5.79

Rincian Beban Dibayar Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember		Kenaikan / Penurunan	%
		2025	2024		
1	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	107.223.333,33	5.833.333,33	101.390.000,00	1.738,11
2	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	64.166.666,67	67.583.333,33	(3.416.666,66)	(5,06)
3	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	15.750.000,00	18.000.000,00	(2.250.000,00)	(12,50)
4	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	117.925.000,00	147.225.000,00	(29.300.000,00)	(19,90)
5	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	76.166.666,67	102.333.333,34	(26.166.666,67)	(25,57)
Jumlah		381.231.666,67	340.975.000,00	40.256.666,67	11.81

Adapun Beban Dibayar Dimuka Sewa Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada **Lampiran 5.17**.

5.3.1.1.10.1 Beban Dibayar Dimuka-Sewa Aset Tetap Lainnya	<u>31 Desember 2025</u> 1.159.300,00	<u>31 Desember 2024</u> 0,00

Saldo Beban Dibayar Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1.159.300,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, maka terdapat kenaikan saldo Beban Dibayar Dimuka senilai Rp1.159.300,00 atau 100,00%. Adapun kenaikan Saldo Beban dibayar dimuka dikarenakan adanya keterlambatan penyerahan buku oleh pihak penyedia yaitu PT. Penerbit Erlangga kepada SDN 024 Tana Tidung senilai Rp1.159.300,00 berdasarkan BA Keterlambatan Penyerahan Buku Dana BOS TA 2025 Nomor 421.7/090/SDN 024/V/BA/2026.

5.3.1.1.11 Persediaan	<u>31 Desember 2025</u> 136.500.250.938,15	<u>31 Desember 2024</u> 144.839.799.829,34

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp136.500.250.938,15 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp144.839.799.829,34, maka terdapat penurunan saldo Persediaan senilai Rp8.339.548.891,19 atau 5,76%. Persediaan mengalami penurunan disebabkan pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman terdapat penurunan nilai persediaan barang yang sudah diserahkan ke masyarakat atau pihak lain serta bahan bangunan dan konstruksi yang sudah tercatat ke aset tetap dikarenakan sudah terpasang. Adapun rincian Persediaan sebagai berikut.

Tabel 5.80
Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	14.759.510.435,00	17.803.086.608,50	(3.043.576.173,50)	(17,10)
2	Bahan Kimia	94.970.219,00	45.776.850,00	49.193.369,00	107,46
3	Bahan Bakar dan Pelumas	8.694.000,00	10.026.200,00	(1.332.200,00)	(13,29)
4	Bahan/Bibit Tanaman	334.500,00	1.884.000,00	(1.549.500,00)	(82,25)
5	Isi Tabung Gas	600.000,00	38.370.000,00	(37.770.000,00)	(98,44)
6	Bahan Lainnya	1.907.724.703,30	2.171.864.061,21	(264.139.357,91)	(12,16)
7	Suku Cadang Alat Angkutan	41.754.000,00	395.000,00	41.359.000,00	10.470,63
8	Suku Cadang Alat Kedokteran	1.250.000,00	3.436.858,00	(2.186.858,00)	(63,63)
9	Suku Cadang Alat Laboratorium	10.861.200,00	10.861.200,00	0,00	0,00
10	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	1.890.000,00	(1.890.000,00)	(100,00)
11	Suku Cadang Alat Pertanian	2.090.000,00	1.600.000,00	490.000,00	30,63
12	Suku Cadang Lainnya	7.770.000,00	107.254.845,00	(99.484.845,00)	(92,76)
13	Alat Tulis Kantor	482.876.287,80	389.908.408,35	92.967.879,45	23,84
14	Kertas dan Cover	366.731.503,10	291.553.125,00	75.178.378,10	25,79
15	Bahan Cetak	231.931.039,00	218.521.502,10	13.409.536,90	6,14
16	Benda Pos	14.302.000,00	5.925.000,00	8.377.000,00	141,38
17	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00
18	Bahan Komputer	426.634.291,75	184.325.502,00	242.308.789,75	131,46
19	Perabot Kantor	316.325.761,27	336.719.609,00	(20.393.847,73)	(6,06)
20	Alat Listrik	272.188.154,80	85.657.200,00	186.530.954,80	217,76
21	Perlengkapan Dinas	33.124.910,00	23.000.000,00	10.124.910,00	44,02



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
22	Perlengkapan Pendukung Olahraga	84.867.280,00	70.642.680,00	14.224.600,00	20,14
23	Suvenir/Cendera Mata	4.215.000,00	10.152.000,00	(5.937.000,00)	(58,48)
24	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	322.363.787,00	87.570.883,00	234.792.904,00	268,12
25	Obat	5.395.152.497,65	5.079.923.225,17	315.229.272,48	6,21
26	Obat-Obatan Lainnya	229.800,00	2.418.800,00	(2.189.000,00)	(90,50)
27	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	110.776.852.803,28	117.207.775.795,85	(6.430.922.992,57)	(5,49)
28	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	45.448,00	0,00	45.448,00	100,00
29	Natura	192.199.767,20	93.031.926,16	99.167.841,04	106,60
30	Natura dan Pakan Lainnya	35.175.100,00	904.800,00	34.270.300,00	3.787,61
31	Komponen Rambu-Rambu	705.665.850,00	555.027.750,00	150.638.100,00	27,14
32	Pipa Baja	2.990.600,00	0,00	2.990.600,00	100,00
33	Pipa Plastik Pvc (Upvc)	500.000,00	296.000,00	204.000,00	68,92
Jumlah		136.500.250.938,15	144.839.799.829,34	(8.339.548.891,19)	(5,76)

Adapun persediaan selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 5.18**.

Terdapat barang persediaan yang dimaksud untuk diserahkan ke masyarakat/pihak lain namun belum dilakukan penyerahan disebabkan oleh:

- Pekerjaan tersebut baru selesai dikerjakan pada akhir tahun 2025 dan rencana akan dilakukan penyerahan pada tahun 2026.
- Masih dilakukan proses inventarisasi terhadap persediaan perencanaan-perencanaan fisik yang sudah dikerjakan fisiknya atau tidak dilanjutkan pekerjaannya oleh dinas terkait, nantinya perencanaan yang tercatat pada persediaan tersebut dan tidak dilanjutkan pekerjaannya akan dilakukan proses penghapusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat persediaan yang sudah rusak/usang/kedaluwarsa senilai Rp933.732.763,32 yang sudah dikeluarkan dalam persediaan dan menjadi beban persediaan dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel 5.81

Rincian Persediaan yang Rusak/Usang/Kedaluwarsa

No	SKPD	Nilai	Kategori	Keterangan
1	Instalasi Farmasi Kabupaten	293.127.152,07	Obat-Obatan	Kedaluwarsa
2	RSU Tanjung Keramat	15.727.166,47	Obat-Obatan	Kedaluwarsa
3	RSUD Akhmad Berahim	438.676.441,38	Obat-Obatan	Kedaluwarsa
4	RSUD Akhmad Berahim	26.947.948,08	Bahan Lainnya	Kedaluwarsa
5	Puskesmas Tana Lia	84.605.508,71	Obat-Obatan	Kedaluwarsa
6	Puskesmas Tideng Pale	10.131.020,61	Obat-Obatan	Kedaluwarsa
7	Puskesmas Sesayap Hiir	5.406.272,00	Obat-Obatan	Kedaluwarsa
8	Puskesmas Muruk Rian	8.791.912,90	Obat-Obatan	Kedaluwarsa
9	Puskesmas Kujau	7.613.954,00	Obat-Obatan	Kedaluwarsa
10	Dinas Lingkungan Hidup	9.671.730,00	Barang Cetak	Usang
11	Dinas Perhubungan	7.354.657,10	Barang Cetak	Usang
12	Bagian Umum Sekretariat Daerah	24.990.000,00	Barang Cetak	Usang
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	689.000,00	Barang Cetak	Usang
Jumlah		933.732.763,32		

Adapun rincian persediaan rusak/usang/kedaluwarsa selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 5.19**.

Terdapat penambahan persediaan yang disebabkan oleh kesalahan penganggaran belanja senilai Rp1.926.079.162,85 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.82

Rincian Penambahan Persediaan dikarenakan Kesalahan Penganggaran

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Salah Pos Belanja Modal KIB B (Seharusnya Belanja Barang Persediaan)	290.698.640,00	Reklasifikasi Dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2	Salah Pos Belanja Modal KIB C (Seharusnya Belanja Barang Persediaan)	19.851.167,85	Reklasifikasi Dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang akan diserahkan
3	Salah Pos Belanja Modal KIB D (Seharusnya Belanja Barang Persediaan)	1.012.707.055,00	Reklasifikasi Dari Belanja Modal Jalan Irigasi dan jaringan yang akan diserahkan
4	Salah Pos Belanja Modal BOP (Seharusnya Belanja Barang Persediaan BOP)	34.515.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Belanja Modal BOP
5	Salah Pos Belanja Modal BOS (Seharusnya Belanja Barang Persediaan BOS)	423.543.300,00	Reklasifikasi Masuk Dari Belanja Modal BOS



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Nilai	Keterangan
Jumlah		1.781.315.162,85	Belanja Modal
1	Salah Pos Belanja Jasa dan Pemeliharaan (Seharusnya Belanja Barang Persediaan)	144.764.000,00	Reklasifikasi Barang Persediaan Dari Belanja Jasa / Pemeliharaan
Jumlah		144.764.000,00	Belanja Jasa/Pemeliharaan
Total Penambahan Persediaan		1.926.079.162,85	

Adapun penambahan persediaan dikarenakan kesalahan penganggaran selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 5.20**.

Terdapat juga pengurangan persediaan yang disebabkan oleh kesalahan penganggaran belanja senilai Rp3.875.801.346,10 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.83
Rincian Pengurangan persediaan dikarenakan kesalahan Penganggaran

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Salah Pos Belanja Barang Persediaan (Seharusnya Belanja Modal)	3.353.707.042,58	Reklasifikasi ke Aset Tetap Intrakompatabel
2	Salah Pos Belanja Barang Persediaan (Seharusnya Belanja Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria Kapitalisasi Ekstrakompatabel)	173.868.980,00	Reklasifikasi ke Aset Tetap Ekstrakompatabel
3	Salah Pos Belanja Barang Persediaan BOS/BOP (Seharusnya Belanja Modal BOS/BOP)	329.768.700,00	Reklasifikasi ke Aset tetap Peralatan mesin, Gedung dan Aset Tetap lainnya
Jumlah		3.857.344.722,58	
1	Salah Pos Belanja Barang Persediaan (Seharusnya Belanja Jasa)	18.456.623,52	Reklasifikasi ke beban Jasa / Pemeliharaan
Jumlah		18.456.623,52	
Total Pengurangan Persediaan		3.875.801.346,10	

Adapun pengurangan persediaan dikarenakan kesalahan penganggaran selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 5.21**.

Terdapat kondisi persediaan perencanaan melewati periode 12 bulan yang tidak bergerak di Neraca senilai Rp1.834.294.000,0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.84
Rincian Perencanaan Persediaan yang Melebihi Periode 12 Bulan

No	Kode Rekening Persediaan	Nama Barang	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	1.1.7.01.05.01.39	Perencanaan Pemasangan Siring Lahan Masjid Agung Sesayap Hilir	2018	49.742.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat output perencanaan (RAB) sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru baik Standar satuan harga maupun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk dipergunakan saat ini



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Kode Rekening Persediaan	Nama Barang	Tahun	Jumlah	Keterangan
2	1.1.7.01.05.01.47	Perencanaan Gereja Gbi Tideng Pale Sebwang	2018	49.500.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat tidak ada kejelasan status lahan serta output perencanaan (RAB) sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru baik Standar satuan harga maupun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk dipergunakan saat ini
3	1.1.7.01.05.01.48	Perencanaan Gereja Gkpi Desa Sebidai	2018	45.050.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat adanya perubahan lokasi lahan serta output perencanaan (RAB) sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru baik Standar satuan harga maupun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk dipergunakan saat ini.
4	1.1.7.01.05.01.34	Perencanaan Gereja Katolik Kasai Desa Buong Baru	2018	49.390.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat tidak ada kejelasan status lahan serta output perencanaan (RAB) sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru baik Standar satuan harga maupun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk dipergunakan saat ini
5	1.1.7.01.05.01.43	Perencanaan Gereja Pantekosta	2018	48.565.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat tidak ada kejelasan status lahan serta output perencanaan (RAB) sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru baik Standar satuan harga maupun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk dipergunakan saat ini
6	1.1.7.01.05.01.44	Perencanaan Mushola Istiqomah Rt.I Tanah Merah	2018	48.565.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, masjid telah dibangun oleh masyarakat/desa/CSR
7	1.1.7.01.05.01.36	Perencanaan Mushola Muruk Rian	2018	49.511.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat output perencanaan (RAB) sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru baik Standar satuan harga maupun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk dipergunakan saat ini
8	1.1.7.01.05.01.35	Perencanaan Mushola Seputuk	2018	49.538.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat output perencanaan (RAB) sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru baik Standar satuan harga maupun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk dipergunakan saat ini
9	1.1.7.01.05.01.57	Perencanaan Pemasangan Patok Gsb	2018	29.744.000,00	Diusulkan untuk penghapusan karena perencanaan tersebut sudah melewati 5 Tahun



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Kode Rekening Persediaan	Nama Barang	Tahun	Jumlah	Keterangan
10	1.1.7.01.05.01.27	Perencanaan Pembangunan Balai Petemuan Adat	2018	291.150.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat output perencanaan (RAB) sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru baik Standar satuan harga maupun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk dipergunakan saat ini
11	1.1.7.01.05.01.26	Perencanaan Pembangunan Gereja Bethany	2018	49.610.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat output perencanaan (RAB) sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru baik Standar satuan harga maupun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk dipergunakan saat ini
12	1.1.7.01.05.01.28	Perencanaan Pembangunan Gkii Desa Gunawan	2018	49.610.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat pekerjaan pek. Ta. 2022, 2023 telah di hibahkan
13	1.1.7.01.05.01.56	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Menjelutung	2018	49.885.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat output perencanaan (RAB) sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru baik Standar satuan harga maupun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk dipergunakan saat ini
14	1.1.7.01.05.01.58	Perencanaan Pembangunan Kanal Desa Sedulun	2018	49.610.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat output perencanaan (RAB) sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru baik Standar satuan harga maupun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk dipergunakan saat ini
15	1.1.7.01.05.01.42	Perencanaan Pembangunan Kantor Desa Sesayap	2018	49.885.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat output perencanaan (RAB) sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru baik Standar satuan harga maupun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk dipergunakan saat ini
16	1.1.7.01.05.01.37	Perencanaan Pembangunan Masjid Desa Sambungan	2018	49.610.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, masjid telah dibangun oleh masyarakat/desa/CSR
17	1.1.7.01.05.01.31	Perencanaan Pembangunan Mushola Selor	2018	49.885.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat output perencanaan (RAB) sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru baik Standar satuan harga maupun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk dipergunakan saat ini
18	1.1.7.01.05.01.84	Perencanaan Irigasi Kolam Ikan Pokdatan Minapolitan	2019	99.374.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, Karena termasuk wilayah BWS
19	1.1.7.01.05.01.87	Pembayaran Perencanaan Drainase Lingkungan Kecamatan Sesayap	2019	58.960.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat output perencanaan (RAB) sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru baik Standar satuan harga maupun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk dipergunakan saat ini



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Kode Rekening Persediaan	Nama Barang	Tahun	Jumlah	Keterangan
20	1.1.7.01.05.01.88	Perencanaan Drainase Lingkungan Kecamatan Betayau	2019	59.152.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat output perencanaan (RAB) sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru baik Standar satuan harga maupun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk dipergunakan saat ini
21	1.1.7.01.05.01.90	Perencanaan Drainase Lingkungan Kecamatan Muruk Rian	2019	58.932.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat output perencanaan (RAB) sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru baik Standar satuan harga maupun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk dipergunakan saat ini
22	1.1.7.01.05.01.89	Perencanaan Drainase Lingkungan Kecamatan Sesayap Hilir	2019	59.097.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat output perencanaan (RAB) sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru baik Standar satuan harga maupun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk dipergunakan saat ini
23	1.1.7.01.05.01.86	Perencanaan Irigasi Minapadi Pokdatan Minapadi Nuong Ubok	2019	99.440.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, Karena termasuk wilayah BWS
24	1.1.7.01.05.01.126	Perencanaan Irigasi Tambak Desa Sengkong	2020	98.560.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, Karena termasuk wilayah BWS
25	1.1.7.01.05.01.125	Perencanaan Jalan Lingkungan Kecamatan Sesayap - Sesayap Hilir	2020	99.000.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, mengingat output perencanaan (RAB) sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru baik Standar satuan harga maupun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk dipergunakan saat ini
26	1.1.7.01.05.01.120	Perencanaan Pembangunan Irigasi Sawah Kelompok Tani Desa Teng kudacing	2020	99.380.000,00	Diusulkan untuk penghapusan, karena termasuk wilayah BWS
Total				1.834.294.000,00	

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
148.593.447.042,11 **103.690.906.609,54**

Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp148.593.447.042,11 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp103.690.906.609,54, maka terdapat kenaikan saldo Investasi Jangka Panjang senilai Rp44.902.540.432,57 atau 43,30%. Kenaikan tersebut dikarenakan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sungoi Sesayap TA 2025 memperoleh laba sesuai dengan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Adapun rinciannya sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
0,00 0,00

Investasi Non Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara berkelanjutan. Nilai Investasi Non Permanen Kabupaten Tana Tidung per 31 Desember 2025 adalah nihil.

5.3.1.2.2 Investasi Permanen **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
148.593.447.042,11 103.690.906.609,54

Berdasarkan Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 900/115/K-VI/2009 tanggal 24 Juni 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tana Tidung pada Bankaltimta Provinsi Kalimantan Timur TA 2009. Atas keputusan tersebut Kabupaten Tana Tidung menyertakan modal senilai Rp100.100.000.000,00 pada Bankaltimta. Penyertaan Modal tersebut menjadi Investasi Jangka Panjang Kabupaten Tana Tidung dan tidak mengalami perubahan sampai dengan per 31 Desember 2025 senilai Rp100.100.000.000,00. Investasi Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp148.593.447.042,11 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp103.690.906.609,54, maka terdapat kenaikan saldo Investasi Permanen senilai Rp44.902.540.432,57 atau 43,30%. Terdiri atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tana Tidung kepada Bankaltimta Kantor Cabang Tideng Pale senilai Rp100.100.000.000,00 dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sungoi Sesayap senilai Rp48.493.447.042,11. Adapun rincian Investasi Permanen disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.85
Penyertaan Modal Pemerintah per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ penurunan	%
1	Investasi Permanen Pada Bankaltimta	100.100.000.000,00	100.100.000.000,00	0,00	0,00
2	Investasi Permanen pada Perusahaan Air Minum	48.493.447.042,11	3.590.906.609,54	44.902.540.432,57	1.250,45
Jumlah		148.593.447.042,11	103.690.906.609,54	44.902.540.432,57	43,30



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.3.1.2.2.1	Investasi Permanen pada Bankaltimtara	<u>31 Desember 2025</u> 100.100.000.000,00	<u>31 Desember 2024</u> 100.100.000.000,00

Saldo Investasi Permanen pada Bankaltimtara per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp100.100.000.000,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp100.100.000.000,00, maka tidak terdapat kenaikan maupun penurunan saldo Investasi Permanen pada Bankaltimtara yang merupakan Penyertaan Modal berbentuk saham sebanyak 20.020 lembar saham @Rp5.000.000,00. Penyertaan Modal disajikan menggunakan metode harga perolehan sehingga nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tana Tidung per 31 Desember 2025 senilai jumlah total nominal saham terhadap jumlah lembar yang dimiliki. Adapun rincian investasi permanen pada bankaltimtara disajikan pada tabel berikut.

5.3.1.2.2.2	Investasi Permanen pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum	<u>31 Desember 2025</u> 48.493.447.042,11	<u>31 Desember 2024</u> 3.590.906.609,54

Saldo Investasi Permanen pada Perusahaan Daerah Air Minum per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp48.493.447.042,11 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp3.590.906.609,54, maka terdapat kenaikan saldo Investasi Permanen pada Perusahaan Daerah Air Minum senilai Rp44.902.540.432,57 atau 1.250,45%. Penyertaan modal disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah, sehingga penyertaan modal setelah dikurangi laba/rugi bersih pada TA 2025. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sungoi Sesayap mengungkapkan modal dasar berupa:

- Uang senilai Rp16.000.000.000,00 telah disetorkan ke Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sungoi Sesayap; dan
- Barang dengan nilai perolehan senilai Rp45.024.336.388,00 nilai akumulasi Penyusutan Senilai Rp1.164.472.701,37 dengan nilai buku Senilai Rp43.859.863.686,63.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Penyertaan modal berupa barang dengan nilai buku senilai Rp43.859.863.686,63 dari tiga SKPD yaitu DPUPRPKP senilai Rp43.757.263.682,30, Bagian Pemerintahan Umum senilai Rp15.400.000,00 dan Kecamatan Sesayap senilai Rp87.200.004,33. Adapun rincian investasi permanen pada Perusda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.86
Investasi Permanen ke Perusda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap
per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember (Rp)		Kenaikan/ Penurunan	%
		2025	2024		
1	Modal Dasar	3.590.906.609,54	1.269.459.294,04	2.321.447.315,50	182,87
2	Koreksi Laba TA 2024	(380.087.119,35)	1.117.225.376,50	(1.497.312.495,85)	(134,02)
3	Tambahan Penyertaan Modal Pemda Tana Tidung	43.859.863.686,63	0,00	43.859.863.686,63	100,00
4	Laba TA 2025	1.422.763.865,29	524.559.939,00	898.203.926,29	171,23
5	Tambahan Modal dari DPUPRPKP	0,00	679.662.000,00	(679.662.000,00)	(100,00)
Jumlah		48.493.447.042,11	3.590.906.609,54	44.902.540.432,57	1.250,45

Laporan Keuangan Perusda Air Minum Tirta Sungoi Sesayap dapat dilihat pada **Lampiran 5.22**.

5.3.1.3 Aset Tetap

31 Desember 2025 **31 Desember 2024**
3.082.254.520.372,60 **2.845.832.663.067,82**

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp3.082.254.520.372,60 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp2.845.832.663.067,82, maka terdapat kenaikan saldo Aset Tetap senilai Rp236.421.857.304,78 atau 8,31%. Rincian atas Aset Tetap dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.87
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember		Kenaikan / Penurunan	%
		2025	2024		
1	Tanah	480.250.499.507,38	444.105.621.898,61	36.144.877.608,77	8,14
2	Peralatan dan Mesin	400.327.614.969,40	368.942.603.056,79	31.385.011.912,61	8,51
3	Gedung dan Bangunan	1.733.804.884.801,55	1.454.317.612.762,93	279.487.272.038,62	19,22
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.405.519.511.462,56	2.333.413.362.850,06	72.106.148.612,50	3,09
5	Aset Tetap Lainnya	30.835.126.317,78	30.049.549.747,30	785.576.570,48	2,61



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Saldo per 31 Desember		Kenaikan / Penurunan	%
		2025	2024		
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	342.318.932.552,84	356.033.937.401,24	(13.715.004.848,40)	(3,85)
7	Akumulasi Penyusutan	(2.310.802.049.238,91)	(2.141.030.024.649,11)	(169.772.024.589,80)	7,93
Jumlah		3.082.254.520.372,60	2.845.832.663.067,82	236.421.857.304,78	8,31

Adapun uraian mutasi masuk dan mutasi keluar Aset Tetap dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.88
Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun 2025

No	Uraian	Saldo 1 Januari 2025	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo 31 Desember 2025
1	Tanah	444.105.621.898,61	37.847.509.428,56	1.702.631.819,79	480.250.499.507,38
2	Peralatan dan Mesin	368.942.603.056,79	45.702.788.185,80	14.317.776.273,19	400.327.614.969,40
3	Gedung dan Bangunan	1.454.317.612.762,93	465.449.664.660,10	185.962.392.621,48	1.733.804.884.801,55
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.333.413.362.850,06	163.501.984.533,46	91.395.835.920,96	2.405.519.511.462,56
5	Aset Tetap Lainnya	30.049.549.747,30	2.824.576.266,48	2.038.999.696,00	30.835.126.317,78
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	356.033.937.401,24	231.171.487.280,10	244.886.492.128,50	342.318.932.552,84
7	Akumulasi Penyusutan	(2.141.030.024.649,11)	(209.473.002.847,16)	(39.700.978.257,36)	(2.310.802.049.238,91)
Jumlah		2.845.832.663.067,82	737.025.007.507,34	500.603.150.202,56	3.082.254.520.372,60

Dari tabel di atas diketahui bahwa Aset Tetap mengalami kenaikan senilai Rp236.421.857.304,78. Adapun penyebab kenaikan sebagai berikut.

a. Penambahan Aset Tetap

- 1) Penambahan Aset Tetap atas realisasi Belanja Modal yang menjadi Aset Tetap pada setiap organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Tana Tidung.
- 2) Penambahan atas hibah peralatan dan mesin, Gedung Bangunan dan Jalan dari Kementerian dan Provinsi.
- 3) Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari dana BOS dan BOP, oleh Satuan Pendidikan di lingkungan Kabupaten Tana Tidung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- 4) Penambahan Aset Peralatan dan mesin dari BLUD oleh Puskesmas dan RSUD Akhmad Berahim di Lingkungan Dinas Kesehatan.
- 5) Penambahan Aset Tetap karena kesalahan penganggaran Belanja Jasa menjadi Aset Tetap.
- b. Pengurangan Aset Tetap
 - 1) Pengurangan Aset Tetap ke Aset Lainnya karena kondisi rusak berat, serta aset yang akan dialihkan sebagai penyertaan modal ke PDAM.
 - 2) Pengurangan Aset Tetap atas Belanja Modal yang tidak memenuhi karakteristik sebagai Aset Tetap sehingga harus dihapuskan dari Neraca.
 - 3) Pengurangan Aset Tetap karena kesalahan penganggaran Belanja Modal.

Hal - hal tersebut di atas yang mengakibatkan adanya kenaikan/penurunan Aset Tetap, adapun peningkatan terhadap Jalan Irigasi dan Bangunan, karena adanya belanja modal, kapitalisasi aset ke aset induk, koreksi tersebut karena pencatatan aset yang terpisah-pisah. Pencatatan dan penatausahaan aset di Kabupaten Tana Tidung berbasis teknologi informasi dengan menggunakan Aplikasi E-BMD sejak tahun 2025. Pengurus Barang seluruh SKPD secara aktif telah menggunakan aplikasi ini untuk keperluan administrasi aset berupa Daftar Barang Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang, Kartu Inventaris Ruangan, Laporan BMD dan Laporan Penyusutan untuk keperluan Neraca. Hal ini untuk menjamin integrasi penatausahaan aset di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

5.3.1.3.1 Tanah

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
480.250.499.507,38	444.105.621.898,61

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp480.250.499.507,38 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp444.105.621.898,61, maka terdapat kenaikan saldo Aset Tetap Tanah senilai Rp36.144.877.608,77 atau 8,14%. Kenaikan Aset Tanah karena terdapat mutasi tambah senilai Rp37.847.509.428,56 dan mutasi kurang senilai Rp1.702.631.819,79. Adapun rincian mutasi masuk dan keluar Tanah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.89
Rincian Mutasi Tanah Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
A	Saldo Awal	444.105.621.898,61
B	Mutasi Masuk	
1	Penambahan Aset Tanah karena Belanja Modal	2.847.964.666,00
2	Penambahan Aset Tanah karena reklas antar KIB karena pekerjaan pematangan lahan	12.544.081.974,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Jumlah
3	Penambahan Aset Tanah dari reklas Persediaan atas aset yang akan dijadikan penyertaan modal	72.900.000,00
4	Penambahan Aset Tanah dari revaluasi tanah pusat pemerintahan	22.382.562.788,56
Jumlah B		37.847.509.428,56
C	Mutasi Keluar	
1	Pengurangan Aset Tanah atas Pembayaran Utang Tahun Lalu	1.315.292.619,79
2	Pengurangan Aset Tanah atas Pengembalian Sisa Potensi Kelebihan Pembayaran	167.939.200,00
3	Pengurangan Aset Tanah Atas Ubah Kondisi Kedalam Aset Lainnya	219.400.000,00
Jumlah C		1.702.631.819,79
Saldo Akhir Tanah (A+B-C)		480.250.499.507,38

Adapun rincian mutasi Aset Tetap Tanah Perakun barangnya sebagai berikut.

Tabel 5.90
Rincian Mutasi per Jenis Tanah Tahun 2025

No	Uraian	Saldo per 1 Jan 2025	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo per 31 Des 2025
1	Tanah Persil	306.854.202.487,58	33.953.415.538,96	171.577.163,16	340.636.040.863,38
2	Tanah Non Persil	13.551.190.000,00	0,00	0,00	13.551.190.000,00
3	Lapangan	123.700.229.411,03	3.894.093.889,60	1.531.054.656,63	126.063.268.644,00
Jumlah		444.105.621.898,61	37.847.509.428,56	1.702.631.819,79	480.250.499.507,38

Adapun rincian Aset Tetap Tanah selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 5.23**.

Rincian lain Aset Tanah sebagai berikut.

- Aset tanah yang bersertifikat berjumlah 38 bidang tanah dan yang belum bersertifikat berjumlah 224 bidang tanah terdiri dari 73 bidang telah memiliki dokumen yang lengkap sehingga dapat disertifikatkan sedangkan sisanya 151 bidang masih dalam proses pelengkapan dokumen.
- Aset Tanah yang diserahkan ke desa/instansi lain tapi masih tercatat di Tanah. Penghapusan aset tersebut masih menunggu keluarnya SK Penghapusan senilai Rp8.575.000,00.
- Aset Tanah yang akan menjadi penyertaan modal ke PDAM senilai Rp69.750.000,00, Adapun rincian Aset Tetap Tanah selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 5.24**.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- d. Aset Tanah di atas tanah HGB PT. Inhutani berupa pematangan lahan, Ex Bulungan, Pembangunan Jalan dan Penimbunan senilai Rp48.997.228.624,00. Adapun rincian Tanah di Atas Lahan Inhutani disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.91
Rincian Tanah di atas Lahan Inhutani

No	SKPD	Jenis Aset	No Reg	Luas M2	Alamat	Penggunaan	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	2	35000	Kec. Sesayap	Lapangan Sepak bola	3.776.664.000,00	Pembangunan Lapangan Sepak Bola
2	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	4	42500	Kec. Sesayap	Stadion Mini	3.864.652.000,00	Pematangan Lapangan Stadion Kec Sesayap
3	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Tanah Rawa	1	42500	Kec. Sesayap	Lapangan Sepakbola	78.114.000,00	Penimbunan Lapangan Sepak Bola Inhutani
4	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Tanah Lapangan Lainnya	1	16,4	Ds Tideng Pale Kec. Sesayap	Lapangan Panahan	146.040.063,00	Lapangan Panahan Ds. Tideng Pale
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	93	1200	Jl. Jend. Sudirman Timur	Tanah badan jalan	5.214.275.000,00	Jl. Jend. Sudirman Timur (Sesayap)
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	94	45600	Jalan Padat Karya	Tanah badan jalan	11.354.400.000,00	Jalan Padat Karya Kec. Sesayap
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	1	56711,62	KEC. SESAYAP	PERUMAHAN PNS	21.233.325.121,00	Pematangan Perumahan PNS
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Tanah Bangunan Gedung Kesenian	1	1034	Jl. Jend. Sudirman	Tanah Untuk Gedung Kesenian	329.758.440,00	(Eks Bulungan)
9	Kantor Camat Sesayap	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	5000	Jl. Tanah Abang	Tanah Bangunan Polsek	3.000.000.000,00	(Eks Bulungan)
Jumlah							48.997.228.624,00	

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2025	31 Desember 2024
400.327.614.969,40	368.942.603.056,79

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp400.327.614.969,40 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp368.942.603.056,79, maka terdapat kenaikan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp31.385.011.912,61 atau 8,51%. Kenaikan nilai Aset tersebut disebabkan Belanja Modal, Hibah dari Kementerian, Provinsi, Pihak Ketiga, Masyarakat, pengakuan pencatatan peralatan dan mesin dari Dana BOS dan BOP dan BLUD sehingga menambah nilai Aset Tetap Peralatan dan



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Mesin Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Penambahan aset atas Belanja Modal dari BLUD Tahun 2025 senilai Rp666.827.080,00. Adapun rincian mutasi masuk dan keluar Peralatan dan Mesin disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.92
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
A	Saldo Awal	368.942.603.056,79
B	Mutasi Masuk	
1	Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal TA 2025	31.927.372.557,00
2	Penambahan Aset Peralatan dan Mesin karena Reklas antar KIB	2.036.603.475,99
3	Penambahan Aset Peralatan dan Mesin karena berasal dari Belanja Modal BOP TA 2025	1.886.990.400,00
4	Penambahan Aset Peralatan dan Mesin Karena berasal dari Belanja Modal BOS TA 2025	842.367.700,00
5	Penambahan Aset Peralatan dan Mesin Karena berasal dari Belanja Modal BLUD TA 2025	666.827.080,00
6	Penambahan Aset Peralatan dan Mesin Karena berasal dari Belanja Persediaan TA 2025	236.548.600,00
7	Penambahan Aset Peralatan dan Mesin karena berasal dari Belanja Barang TA 2025	81.749.400,00
8	Hibah dari Kemendikdasmen, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi	1.625.114.975,81
9	Penambahan Aset Peralatan dan Mesin Karena berasal dari Belanja Persediaan BOS TA 2025	41.775.000,00
10	Penambahan Aset Peralatan dan Mesin Karena berasal dari Belanja Persediaan BOP TA 2025	19.045.000,00
11	Penambahan Aset Peralatan dan Mesin atas Penerimaan Internal	6.338.393.997,00
Jumlah B		39.364.394.188,80
C	Mutasi Keluar	
1	Pengurangan Peralatan dan Mesin karena Reklas antar KIB	6.315.812.944,13
2	Pengurangan BM Peralatan dan Mesin TA 2025 Reklas ke Persediaan	290.698.640,00
3	Pengurangan atas BM TA 2025 bernilai dibawah Kapitalisasi	868.097.513,06
4	Pengurangan atas BM BOP TA 2025 bernilai dibawah Kapitalisasi	334.172.879,00
5	Pengurangan BM BOP Peralatan dan Mesin TA 2025 Reklas ke Persediaan	28.315.000,00
6	Pengurangan atas BM BOS TA 2025 bernilai dibawah Kapitalisasi	114.094.200,00
7	Pengurangan BM BOS Peralatan dan Mesin TA 2025 Reklas ke Persediaan	6.502.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Jumlah
8	Pengurangan BM BLUD Peralatan dan Mesin TA 2025 bernilai dibawah kapitalisasi	21.689.100,00
9	Pengurangan Peralatan dan Mesin atas Pengeluaran Internal	6.338.393.997,00
Jumlah C		14.317.776.273,19
Saldo Akhir Peralatan dan Mesin (A+B-C)		393.989.220.972,40

Adapun rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per akun barangnya sebagai berikut.

Tabel 5.93
Rincian Mutasi per Jenis Peralatan dan Mesin Tahun 2025

No	Uraian	Saldo 1 Januari 2025	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo 31 Desember 2025
1	Alat Besar Darat	12.655.006.450,00	4.421.561.150,00	0,00	17.076.567.600,00
2	Alat Besar Apung	131.500.000,00	0,00	0,00	131.500.000,00
3	Alat Bantu	5.876.671.192,00	504.600.000,00	0,00	6.381.271.192,00
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	85.194.733.362,36	10.582.876.800,03	3.746.002.550,82	92.031.607.611,57
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.285.980.024,00	306.685.241,00	0,00	1.592.665.265,00
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	3.622.693.900,00	0,00	0,00	3.622.693.900,00
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	297.566.500,00	0,00	0,00	297.566.500,00
8	Alat Bengkel Bermesin	494.141.600,00	10.420.000,00	8.700.000,00	495.861.600,00
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	232.840.000,00	0,00	0,00	232.840.000,00
10	Alat Ukur	2.234.188.037,00	200.925.100,00	2.500.000,00	2.432.613.137,00
11	Alat Pengolahan	5.863.856.365,00	333.294.260,00	2.425.800,00	6.194.724.825,00
12	Alat Kantor	21.398.810.305,09	5.949.810.376,30	4.250.081.557,04	23.098.539.124,35
13	Alat Rumah Tangga	58.040.954.355,58	11.699.362.898,46	2.420.439.356,00	67.319.877.898,04
14	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.461.418.682,18	529.312.186,00	229.497.000,00	7.761.233.868,18
15	Alat Studio	9.330.406.416,00	1.026.500.722,00	222.709.026,00	10.134.198.112,00
16	Alat Komunikasi	1.565.152.395,00	35.032.000,00	236.210.000,00	1.363.974.395,00
17	Peralatan Pemancar	669.418.054,00	70.600.000,00	3.500.000,00	736.518.054,00
18	Alat Kedokteran	46.695.146.317,30	3.205.945.722,00	652.410.922,00	49.248.681.117,30
19	Alat Kesehatan Umum	17.621.544.996,96	999.104.813,00	705.086.335,00	17.915.563.474,96



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Saldo 1 Januari 2025	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo 31 Desember 2025
20	Unit Alat Laboratorium	11.376.561.113,14	273.646.850,00	6.234.000,00	11.643.973.963,14
21	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	263.992.800,00	0,00	0,00	263.992.800,00
22	Alat Peraga Praktik Sekolah	3.067.350.214,38	93.420.920,00	2.434.028,00	3.158.337.106,38
23	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	232.887.650,00	0,00	0,00	232.887.650,00
24	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	213.374.000,00	4.640.000,00	0,00	218.014.000,00
25	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	734.672.768,00	0,00	0,00	734.672.768,00
26	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	192.327.900,00	0,00	0,00	192.327.900,00
27	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	40.280.626,00	9.000.000,00	0,00	49.280.626,00
28	Persenjataan Non Senjata Api	3.926.000,00	0,00	3.926.000,00	0,00
29	Alat Khusus Kepolisian	18.150.000,00	2.000.000,00	16.350.000,00	3.800.000,00
30	Komputer Unit	44.533.394.647,89	3.898.865.071,00	1.079.521.190,33	47.352.738.528,56
31	Peralatan Komputer	14.645.693.378,91	968.549.476,00	357.644.708,00	15.256.598.146,91
32	Alat Eksplorasi Geofisika	128.649.000,00	0,00	0,00	128.649.000,00
33	Alat Pengeboran Non Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Pengolahan dan Pemurnian	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
35	Alat Deteksi	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
36	Alat Pelindung	384.055.500,00	3.926.000,00	0,00	387.981.500,00
37	Alat SAR	4.119.160.387,00	46.449.800,00	0,00	4.165.610.187,00
38	Alat Kerja Penerbangan	421.776.559,00	22.000.000,00	157.850.000,00	285.926.559,00
39	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	4.000.000,00
40	Unit Peralatan Proses/Produksi	80.400.000,00	2.495.000,00	0,00	82.895.000,00
41	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	2.278.933.260,00	363.162.000,00	198.912.000,00	2.443.183.260,00
42	Peralatan Olahraga	3.532.728.300,00	135.601.800,00	15.341.800,00	3.652.988.300,00
Jumlah		368.942.603.056,79	45.702.788.185,79	14.317.776.273,19	400.327.614.969,39



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Selain itu, terdapat Aset Peralatan dan Mesin yang didapatkan dari Kementerian berupa Pemberian Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Sekolah Dasar di tahun 2025 namun belum tercatat karena BASTnya ditahun 2026. Aset tersebut senilai Rp.7.942.500,00 di Sekolah Dasar Negeri 014 Tana Tidung dan Senilai Rp. 66.717.000,00 di Sekolah Dasar Negeri 023 Tana Tidung dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.94
Rincian Aset Peralatan dan Mesin Bantuan Kementerian
Program Revitalisasi Sekolah Dasar

Sekolah Dasar Negeri 014 Tana Tidung				
No	Kode Rekening Belanja	Jumlah	Harga Satuan	Nilai
1	Lemari UKS	1	2.500.000,00	2.500.000,00
2	Ranjang UKS	2	1.000.000,00	2.000.000,00
3	Meja UKS	1	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Kursi UKS	2	500.000,00	1.000.000,00
5	Kasur UKS	2	500.000,00	1.000.000,00
6	Bantal UKS	2	121.250,00	242.500,00
7	Gorden UKS	4	50.000,00	200.000,00
Total		14	5.671.250,00	7.942.500,00
Sekolah Dasar Negeri 023 Tana Tidung				
1	Lemari Kelas	3	900.000,00	2.700.000,00
2	Meja Siswa	84	450.000,00	37.800.000,00
3	Kursi Siswa	84	200.000,00	16.800.000,00
4	Meja Guru	3	800.000,00	2.400.000,00
5	Kursi Guru	3	350.000,00	1.050.000,00
6	Papan Tulis Kelas	3	600.000,00	1.800.000,00
7	Rak Pojok Baca	3	1.389.000,00	4.167.000,00
Total		183	4.689.000,00	66.717.000,00

Rincian selengkapnya Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada **Lampiran 5.25**.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	1.733.804.884.801,55	1.454.317.612.762,93

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1.733.804.884.801,55 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp1.454.317.612.762,93, maka terdapat kenaikan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp279.487.272.038,62 atau 19,22%. Kenaikan nilai Aset tersebut disebabkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan di tahun berjalan, Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dikapitalisasikan ke gedung.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dari BLUD Tahun 2025 senilai Rp180.575.095,00. Adapun rincian mutasi masuk dan keluar Gedung dan Bangunan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.95
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
A	Saldo Awal	1.454.317.612.762,93
B	Mutasi Masuk	
1	Penambahan Aset Gedung dan Bangunan karena Belanja Modal TA 2025	233.723.904.038,85
2	Penambahan Aset Gedung dan Bangunan karena Reklas antar KIB	224.708.281.558,97
3	Penambahan Aset Gedung dan Bangunan berasal dari Belanja Modal BLUD TA 2025	180.575.095,00
4	Penambahan Aset Gedung dan Bangunan berasal dari Belanja Barang TA 2025	1.493.462.212,74
5	Penambahan Aset Gedung dan Bangunan berasal dari Belanja Persediaan TA 2025	96.195.000,00
6	Penambahan Aset dari Hibah Pusat dan Provinsi	953.541.309,49
7	Penambahan Aset Gedung dan Bangunan berasal dari Belanja Persediaan BOP TA 2025	11.000.000,00
8	Penambahan Aset Gedung dan Bangunan atas pengembalian uang muka (Piutang)	628.373.233,08
9	Penambahan Aset Gedung dan Bangunan atas Penerimaan Internal	3.654.332.212,00
Jumlah B		465.449.664.660,13
C	Mutasi Keluar	
1	Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan karena Reklas antar KIB	179.927.906.288,75
2	Pengurangan BM Gedung BangunanTA 2025 Reklas ke Barang dan Jasa	680.343.257,69
3	Pengurangan BM Gedung BangunanTA 2025 Reklas ke Persediaan	19.851.167,85
4	Pengurangan BM Gedung BangunanTA 2025 Bernilai dibawah Kapitalisasi	506.103.863,61
5	Belanja Modal BOP TA 2025 Bernilai dibawah Kapitalisasi	9.952.100,00
6	Belanja Modal TA 2025 untuk Pembayaran Utang Tahun Lalu	1.163.903.731,61
7	Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan atas Pengeluaran Internal	3.654.332.212,00
Jumlah C		185.962.392.621,51
Saldo Akhir Gedung dan Bangunan (A+B-C)		1.733.804.884.801,55

Adapun rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per akun barangnya sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel 5.96

Rincian Mutasi per Jenis Gedung dan Bangunan Tahun 2025

No	Uraian	Saldo 1 Januari 2025	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo 31 Desember 2025
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.044.141.926.854,54	451.327.654.161,09	183.817.748.152,37	1.311.651.832.863,26
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	383.168.929.672,39	9.222.683.489,00	1.185.619.393,09	391.205.993.768,30
3	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	7.537.212.795,00	0,00	0,00	7.537.212.795,00
4	Tugu/Tanda Batas	19.469.543.441,00	8.304.629.747,04	4.364.327.813,05	23.409.845.374,99
Jumlah		1.454.317.612.762,93	468.854.967.397,13	189.367.695.358,51	1.733.804.884.801,55

Adapun rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 5.26**.

Rincian lain Aset Gedung dan Bangunan sebagai berikut.

- Terdapat Aset Gedung yang didapatkan dari Kementerian berupa Pemberian Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Sekolah Dasar di tahun 2025 namun belum tercatat karena BASTnya ditahun 2026. Aset tersebut senilai Rp. 788.785.208,00 di Sekolah Dasar Negeri 014 Tana Tidung dan Senilai Rp929.399.905,00 di Sekolah Dasar Negeri 023 Tana Tidung dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.97

Rincian Aset Gedung Bantuan Kementerian Program Revitalisasi Sekolah Dasar

SDN 014 Tana Tidung			
No	Kode Rekening Belanja	Jumlah	Harga Satuan
	Gedung Pembangunan Baru :		
1	Gedung UKS	1	233.200.429,00
2	Gedung WC/Toilet	1	227.825.093,00
	Rehabilitasi Gedung :		
1	Rehabilitasi RKB	1	281.350.932,00
	Perencanaan dan Pengawasan :		
1	Biaya Perencanaan	1	14.035.677,00
2	Biaya Pengawasan	1	16.168.428,00
	Biaya Pengelolaan Administrasi :		
1	Biaya Pengelolaan Administrasi	1	16.204.649,00
Total Hibah Gedung dan Bangunan			788.785.208,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

SDN 023 Tana Tidung			
No	Kode Rekening Belanja	Jumlah	Harga Satuan
	Gedung Pembangunan Baru :		
1	Gedung RKB 3 Ruang	1	878.616.000,00
	Perencanaan dan Pengawasan :		
1	Biaya Perencanaan	1	15.725.681,00
2	Biaya Pengawasan	1	17.890.725,00
	Biaya Pengelolaan Administrasi :		
1	Biaya Pengelolaan Administrasi	1	17.167.499,00
Total Hibah Gedung dan Bangunan			929.399.905,00

- b. Terdapat Aset Gedung dan Bangunan yang berdiri di atas tanah HGB PT. Inhutani senilai Rp541.855.930.480,55 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.98

Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Berdiri di atas Tanah HGB PT. Inhutani

No	SKPD	Jenis Aset	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1.3.3.1.1.1.5	1	Jl. Inhutani Rt.6 Ds. Tideng Pale	59.400.000,00
2	RSUD Akhmad Berahim	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	1.3.3.1.1.4.7	1	jalan padat karya, rt.001 rw.002 desa tideng pale timur, kec. sesayap, kab. tana tidung	305.535.200,00
3	RSUD Akhmad Berahim	Bangunan Rumah Sakit Umum	1.3.3.1.1.6.1	3	Jl. Ir salmon RSU AB di belakang Pendopo Jafaruddin	11.315.507.060,00
4	RSUD Akhmad Berahim	Bangunan Rumah Sakit Umum	1.3.3.1.1.6.1	4	Jl. Ir salmon RSU AB di belakang Pendopo Jafaruddin.	42.335.747.558,00
5	RSUD Akhmad Berahim	Bangunan Rumah Sakit Umum	1.3.3.1.1.6.1	1	Jl. Ir. salmon (Dibelakang Pendopo Jafaruddin)	39.193.438.627,00
6	RSUD Akhmad Berahim	Bangunan Rumah Sakit Umum	1.3.3.1.1.6.1	2	Jl. Ir. salmon (Dibelakang Pendopo Jafaruddin)	37.682.317.347,00
7	RSUD Akhmad Berahim	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	1.3.3.1.1.6.19	14	Jalan Padat Karya, RT.001 RW.001 Desa Tideng Pale Timur Kecamatan Sesayap Kab. Tana Tidung, Prov. Kalimantan Utara	3.398.361.346,00
8	RSUD Akhmad Berahim	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.3.1.1.37.1	7	Jl. Pendopo Jafaruddin	1.285.910.000,00
9	RSUD Akhmad Berahim	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.3.1.1.37.1	1	Jl. Padat Karya RT 1 RW 1 Desa Tideng Pale Timur (Rumah Genset RSUD AB)	725.049.900,00
10	RSUD Akhmad Berahim	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	1.3.3.1.2.13.1	1	Jl. Pendopo Jafaruddin (RSUD Akhmad Berahim)	15.373.910.246,02
11	RSUD Akhmad Berahim	Pagar Permanen	1.3.3.4.1.4.1	1	Jl. Padat Karya	4.887.853.893,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	Taman Permanen	1.3.3.1.1.36.1	7	Kecamatan Sesayap	7.424.330.475,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	SKPD	Jenis Aset	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga
13	Dinas Lingkungan Hidup	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.3.1.1.37.1	18	Jl. Perumahan Dinas	18.243.000,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.3.1.1.37.1	20	Pendopo	18.243.000,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.3.1.1.37.1	6	Jl. Ir. Salmon	18.243.000,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.3.1.1.37.1	4	Jl. Padat Karya Sebidai	18.243.000,00
17	Dinas Lingkungan Hidup	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.3.1.1.37.1	5	Jl. Ir. Salmon	18.243.000,00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	1.3.3.1.1.11.1	8	Jl. Inhutani	2.390.373.725,00
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	1.3.3.1.1.11.1	7	Jl. Jendral Sudirman	5.519.291.000,00
20	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	1.3.3.1.1.11.1	3	Jl. Inhutani	5.539.042.641,00
21	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1.3.3.1.1.11.4	3	DESA TIDENG PALE KEC.SESAYAP KAB.TANA TIDUNG	118.734.038,00
22	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	1.3.3.1.1.11.8	1	Jl. Inhutani	1.281.984.000,00
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Taman lainnya	1.3.3.1.1.36.3	4	Jl. Inhutani	866.569.348,00
24	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Taman lainnya	1.3.3.1.1.36.3	1	Jl. Inhutani	2.300.731.000,00
25	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Taman lainnya	1.3.3.1.1.36.3	3	Jl. Inhutani	969.341.697,00
26	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.1.1.1.1	114		1.621.187.800,00
27	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.1.1.1.1	109	Jl. Padat Karya	227.843.400,00
28	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.1.1.1.1	13	JL. Perintis Rt.06	8.239.398.590,00
29	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1.3.3.1.1.2.1	1	-	269.599.500,00
30	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1.3.3.1.1.9.1	10	-	255.452.242,00
31	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1.3.3.1.1.9.1	11	-	255.715.659,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	SKPD	Jenis Aset	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga
	Permukiman					
32	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1.3.3.1.1.9.1	8	-	1.011.892.600,00
33	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1.3.3.1.1.9.1	9	-	254.919.472,00
34	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pagar Semi Permanen	1.3.3.4.1.4.2	1	Jl. Inhutani	228.467.000,00
35	Dinas Kebudayaan Pendidikan,	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	1.3.3.1.1.4.6	1	Tideng Pale	2.444.411.089,28
36	Dinas Kebudayaan Pendidikan,	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1.3.3.1.1.8.1	3	Tideng Pale	3.905.363.900,00
37	Dinas Kebudayaan Pendidikan,	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1.3.3.1.1.9.1	1	Tideng Pale	7.792.313.938,90
38	Dinas Kebudayaan Pendidikan,	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.3.3.1.1.10.1	129	Jl. Perintis Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung	409.021.718,00
39	Dinas Kebudayaan Pendidikan,	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.3.3.1.1.10.1	100	Tideng Pale	56.418.792.183,73
40	Dinas Kebudayaan Pendidikan,	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.3.3.1.1.10.1	101	Tideng Pale	59.050.976.059,31
41	Dinas Kebudayaan Pendidikan,	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.3.3.1.1.10.1	94	Tideng Pale	273.856.000,00
42	SMPN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	1.3.3.1.1.10.2	1	SMPN 01 Sesayap Desa Tideng Pale Kec. Sesayap	1.366.134.142,86
43	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	1.3.3.1.1.10.2	2	SMAN 1 Sesayap Desa Tideng pale Kec. Sesayap	317.320.000,00
44	Dinas Kebudayaan Pendidikan,	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	1.3.3.1.1.10.5	66	Desa Tideng Pale	1.705.410.575,00
45	Dinas Kebudayaan Pendidikan,	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	1.3.3.1.1.10.5	57	Tideng Pale	1.003.507.950,00
46	Dinas Kebudayaan Pendidikan,	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	1.3.3.1.1.10.5	5	Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap	59.208.000,00
47	Dinas Kebudayaan Pendidikan,	Gedung Pos Jaga Permanen	1.3.3.1.1.13.1	4	Tideng Pale	1.924.363.477,90
48	Dinas Kebudayaan Pendidikan,	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	1.3.3.1.1.16.1	12	Tideng Pale	4.863.456.239,17
49	Dinas Kebudayaan Pendidikan,	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1.3.3.1.1.30.5	1	Tideng Pale	1.464.447.516,00
50	Dinas Kebudayaan Pendidikan,	Bangunan Parkir lainnya (dst)	1.3.3.1.1.33.7	31	Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap.	236.421.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	SKPD	Jenis Aset	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga
51	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Parkir lainnya (dst)	1.3.3.1.1.33.7	30	Jl Jendral Sudirman No 1 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung	117.157.000,00
52	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Parkir lainnya (dst)	1.3.3.1.1.33.7	24	Tideng Pale	205.015.000,00
53	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Taman Permanen	1.3.3.1.1.36.1	24	Tideng Pale	16.657.186.884,00
54	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	1.3.3.1.2.3.1	5	Tideng Pale	2.101.529.156,72
55	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	1.3.3.1.2.3.1	4	Tideng Pale	2.040.265.726,17
56	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1.3.3.1.2.4.1	26	Tideng Pale	31.669.060.387,55
57	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1.3.3.1.2.4.1	25	Tideng Pale	7.815.511.617,55
58	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Asrama Permanen	1.3.3.1.2.5.1	6	Tideng Pale	59.768.975.765,65
59	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Asrama Permanen	1.3.3.1.2.5.1	7	Tideng Pale	54.972.154.013,06
60	SMPN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	1.3.3.1.2.13.1	3	SMPN Terpadu Unggulan 1 (BLOGRANT) Desa Tideng Pale Kec. Sesayap	23.901.454,84
61	SMPN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	1.3.3.1.2.13.1	4	SMPN Terpadu Unggulan 1 (BLOGRANT) Desa Tideng Pale Kec. Sesayap	23.901.454,84
62	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	1.3.3.1.2.13.1	2	Desa Tideng Pale	216.830.000,00
63	SMPN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	1.3.3.1.2.13.1	1	SMPN Terpadu Unggulan 1 (BLOGRANT) Desa Tideng Pale Kec. Sesayap	23.901.454,84
64	SMPN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	1.3.3.1.2.13.1	2	SMPN Terpadu Unggulan 1 (BLOGRANT) Desa Tideng Pale Kec. Sesayap	23.901.454,84
65	SMPN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	1.3.3.1.2.3.16	1	SMPN 01 Sesayap Desa Tideng Pale Kec. Sesayap	94.200.000,00
66	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1.3.3.1.1.12.1	13	JL. Jendral Sudirman (Pasar Ibayud Taka)	7.542.032.650,00
67	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1.3.3.1.1.12.1	14	Jl. Jendral Sudirman Rt.06, Rw.03 Desa Tideng Pale, Kec. Sesayap, Kab. Tana Tidung	2.808.789.000,00
68	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Gedung Pos Jaga Permanen	1.3.3.1.1.13.1	2	JL. Jendral Sudirman (Pasar Ibayud Taka) Tideng Pale	120.507.476,00
69	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	1.3.3.1.1.32.5	2	-	27.459.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	SKPD	Jenis Aset	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga
70	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	1.3.3.1.1.32.5	3	Jl. Perintis, RTH Josup Abdullah	188.739.744,00
71	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	1.3.3.1.1.32.5	4	JL. Jendral Sudirman (Pasar Ibayud Taka) Tideng Pale	120.591.847,00
72	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	1.3.3.1.1.32.5	1	-	27.459.000,00
73	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1.3.3.1.1.33.1	6	JL. Jendral Sudirman (Pasar Ibayud Taka Baru)	212.178.558,00
74	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1.3.3.1.1.33.1	2	-	179.944.000,00
75	Kantor DPRD	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1.3.3.1.1.1.5	3	Jl.Inhutani	267.619.500,00
76	Kantor DPRD	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1.3.3.1.1.1.5	5	Jl.Inhutani	74.034.000,00
77	Kantor DPRD	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen	1.3.3.1.1.8.2	1	Jl.Inhutani	171.518.000,00
78	Kantor DPRD	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.3.1.1.37.1	5	Jl. Inhutani Tideng Pale	49.318.000,00
79	Kantor DPRD	Rumah Negara Golongan III Tipe D Semi Permanen	1.3.3.1.2.3.11	1	Jl. Perumahan Dinas (Rumdin Sekwan)	134.891.714,30
80	Kantor DPRD	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	1.3.3.1.2.13.1	1	Kantor Dewan Tana Tidung, status tanah: Milik Inhutani (Sewa), status bangunan: Bagian Umum (Kantor Dewan)	82.547.404,02
81	Kantor DPRD	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	1.3.3.1.1.1.2	12	Jl. Inhutani (Rehab Berat Gedung DPRD)	4.167.867.800,00
82	Bagian Umum	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.1.1.1.1	3	Jl. Inhutani	4.366.000.000,00
83	Bagian Umum	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1.3.3.1.1.9.1	1	Jl. Inhutani	6.086.829.448,00
84	Bagian Umum	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.3.1.1.37.1	8	Jl. Inhutani	809.987.815,00
Total						541.855.930.480,55

- c. Terdapat Aset Gedung dan Bangunan yang berdiri di atas tanah bukan milik Pemda dan bukan di tanah HGB PT. Inhutani senilai Rp114.463.792.324,60 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel 5.99

**Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Berdiri di atas Tanah Bukan Milik
Pemerintah Daerah dan Bukan Tanah HGB PT. Inhutani**

No	SKPD	Jenis Aset	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga
1	Dinas Perhubungan	Gedung Pos Jaga Permanen	1.3.3.1.1.13.1	1	Betayau dan Seputuk	240.702.000,00
2	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	1.3.3.1.1.32.5	1	Jl. Menuju Air Terjun Gunung Rian	79.800.000,00
3	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	1.3.3.1.1.32.5	4	Jl. Menuju Air Terjun Gunung Rian	409.831.000,00
4	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Taman Permanen	1.3.3.1.1.36.1	1	Jl. Menuju Air Terjun Gunung Rian	3.243.096.000,00
5	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	1.3.3.1.1.32.5	5	Jl. Menuju Air Terjun Gunung Rian	6.401.548.140,00
6	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	1.3.3.1.1.32.5	6	Jl. Menuju Air Terjun Gunung Rian	1.094.342.810,00
7	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	1.3.3.1.1.32.5	7	Jl. Menuju Air Terjun Gunung Rian	478.494.240,00
8	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bangunan tempat pertemuan lain-lain (dst)	1.3.3.1.1.9.7	1	Gg. Rian	2.501.465.000,00
9	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1.3.3.1.1.12.1	1	Gg. Rian	1.644.272.000,00
10	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.3.1.1.37.1	2	Gg. Rian	64.884.000,00
11	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.3.1.1.37.1	3	Gg. Rian	124.884.000,00
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1.3.3.1.1.12.1	1	Gg. Rian	223.673.000,00
13	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	1.3.3.1.1.32.5	8	Gg. Rian	75.436.000,00
14	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen	1.3.3.1.1.8.2	1	Wisata Gunung Rian Desa Muruk Rian	219.800.000,00
15	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.3.1.1.37.1	1	PAUD Kec. Sesayap Hilir (Desa Manjelutung)	235.494.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	SKPD	Jenis Aset	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga
16	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	1.3.3.1.2.3.16	3	SDN 005 Tana Tidung (Rian-Kapuak)	208.000.000,00
17	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Mess/Wisma/Bungalaw/Tempat Peristirahatan Permanen	1.3.3.1.2.4.1	23	Kecamatan Sesayap Hilir	7.990.682.206,90
18	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Mess/Wisma/Bungalaw/Tempat Peristirahatan Permanen	1.3.3.1.2.4.1	24	Kecamatan Sesayap Hilir	7.892.764.206,90
19	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Mess/Wisma/Bungalaw/Tempat Peristirahatan Permanen	1.3.3.1.2.4.1	8	Desa Buong Baru Kecamatan Betayau	1.353.300.500,00
20	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Makam Bersejarah	1.3.3.2.1.3.4	4	Sebawang	229.984.895,00
21	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Makam Bersejarah	1.3.3.2.1.3.4	1	Sesayap Hilir	48.500.000,00
22	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Makam Bersejarah	1.3.3.2.1.3.4	2	Sesayap Hilir	48.500.000,00
23	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Makam Bersejarah	1.3.3.2.1.3.4	3	Sesayap Hilir	48.500.000,00
24	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.1.1.1.1	3	SMPN 1 Atas Tana Lia (Tengku Dacing)	801.227.000,00
25	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Asrama Permanen	1.3.3.1.2.5.1	1	Pembangunan Gedung Asrama Putra TK-SD Terpadu Unggulan	7.123.231.868,20
26	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1.3.3.1.1.8.1	2	Sesayap Hilir	6.716.969.206,80
27	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.3.3.1.1.10.1	98	Pembangunan Gedung Sekolah SD Terpadu Unggulan	21.534.328.341,90
28	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.3.3.1.1.10.1	99	Pembangunan Gedung Sekolah SMP Terpadu Unggulan	35.096.158.412,90
29	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	1.3.3.1.1.10.1	5	SDN 005 Tana Tidung (Rian-Kapuak)	641.000.000,00
30	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	1.3.3.1.1.10.1	3	SDN 007 Tana Tidung (Bebakung)	986.588.334,00
31	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	1.3.3.1.1.10.1	4	Pembangunan Gedung Sekolah SDN Filial Sesayap (Kujau)	876.094.000,00
32	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	1.3.3.1.1.10.1	73	Pembangunan SDN 013 sesayap+Perencanaan 949577000)+Pengawasan(39820000)+Penyelesaian Administrasi(2015)(129.416.542)	4.704.469.880,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	SKPD	Jenis Aset	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga
33	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	1.3.3.1.1.10.1	9	SDN 021 Tana Tidung (Gunawan)	311.551.000,00
34	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	1.3.3.1.1.10.1	8	SDN 019 Tana Tidung (Buang Baru)	814.220.300,00
Jumlah						114.463.792.324,60

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
2.405.519.511.462,56 **2.333.413.362.850,06**

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp2.405.519.511.462,56 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp2.333.413.362.850,06, maka terdapat kenaikan saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp72.106.148.612,50 atau 3,09%. Adapun rincian mutasi masuk dan keluar Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.100
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
A	Saldo Awal	2.333.413.362.850,06
B	Mutasi Masuk	
1	Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan karena BM TA 2025	111.466.199.577,39
2	Penambahan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi karena Reklas antar KIB	24.885.173.583,53
3	Penambahan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi berasal dari Belanja Jasa TA 2025	38.326.648,00
4	Penambahan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi berasal dari Belanja Persediaan TA 2025	22.720.831.663,44
5	Penambahan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi berasal dari Progress Pekerjaan Melebihi Pembayaran	88.881.435,73
6	Penambahan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi atas Pengembalian Uang Muka	1.177.257.625,37
7	Penambahan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi atas penerimaan Internal	3.125.314.000,00
Jumlah B		163.501.984.533,46
C	Mutasi Keluar	
1	Pengurangan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi karena Reklas antar KIB	65.778.760.850,31
2	Pengurangan BM Peralatan dan Mesin TA 2025 Reklas ke Persediaan	1.012.707.055,00
3	Pengurangan BM TA 2025 karena Utang Tahun Lalu	1.607.201.515,65
4	Pengurangan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi Karena Reklas ke Aset Lain-lain (Aset yang akan dipindahtangankan)	19.871.852.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Jumlah
5	Pengurangan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi atas Pengeluaran Internal	3.125.314.000,00
Jumlah C		91.395.835.920,96
Saldo Akhir Jalan, Irigasi dan Jaringan (A+B-C)		2.405.519.511.462,56

Adapun rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per akun barangnya sebagai berikut.

Tabel 5.101
Rincian Mutasi per Jenis Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2025

No	Uraian	Saldo 1 Januari 2025	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo 31 Desember 2025
1	Jalan	1.628.349.691.823,61	126.789.558.691,78	89.304.909.503,93	1.665.834.341.011,46
2	Jembatan	16.099.127.100,11	16.673.835.315,35	705.864.195,74	32.067.098.219,72
3	Bangunan Air Irigasi	82.209.094.263,12	2.538.779.783,54	0,00	84.747.874.046,66
4	Bangunan Pengairan Pasang Surut	237.730.999,00	0,00	0,00	237.730.999,00
5	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	557.345.246.470,22	11.953.865.923,50	0,00	569.299.112.393,72
6	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.683.475.000,00	11.975.000,00	0,00	1.695.450.000,00
7	Bangunan Air Bersih/Air Baku	3.311.033.815,00	54.334.356,00	0,00	3.365.368.171,00
8	Bangunan Air Kotor	218.193.355,00	1.600.378.563,29	1.099.689.221,29	718.882.697,00
9	Instalasi Air Bersih/Air Baku	5.610.335.155,00	3.879.256.900,00	285.373.000,00	9.204.219.055,00
10	Instalasi Air Kotor	6.493.449.849,00	0,00	0,00	6.493.449.849,00
11	Instalasi Pengolahan Sampah	24.865.359.000,00	0,00	0,00	24.865.359.000,00
12	Instalasi Pembangkit Listrik	957.610.000,00	0,00	0,00	957.610.000,00
13	Instalasi Gardu Listrik	29.880.000,00	0,00	0,00	29.880.000,00
14	Instalasi Pertahanan	375.336.800,00	0,00	0,00	375.336.800,00
15	Instalasi Gas	75.956.000,00	0,00	0,00	75.956.000,00
16	Instalasi Lain	1.124.532.500,00	0,00	0,00	1.124.532.500,00
17	Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Jaringan Listrik	4.427.310.720,00	0,00	0,00	4.427.310.720,00
Jumlah		2.333.413.362.850,06	163.501.984.533,46	91.395.835.920,96	2.405.519.511.462,56

Adapun Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 5.27**.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Rincian lain Jalan, Irigasi, dan Jaringan, sebagai berikut.

- a. Terdapat Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berdiri di atas Tanah HGB PT. Inhutani senilai Rp91.984.610.629,15 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.102

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berdiri di atas tanah HGB PT. Inhutani

No	SKPD	Jenis Aset	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Instalasi PLTD Kapasitas Sedang	1.3.4.3.5.2.2	1	Tideng Pale, Kab. Tana Tidung	957.610.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	1.3.4.4.2.2.2	2	Tideng Pale	2.369.694.720,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jalan Kabupaten Lokal	1.3.4.1.1.3.3	211	Jl. Inhutani (Jl. SMU) (Badan Jalan)	2.003.022.557,15
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jalan Kabupaten Lokal	1.3.4.1.1.3.3	222	Jl. Tanah Abang (Badan Jalan)	3.353.016.617,63
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jalan Kabupaten Lokal	1.3.4.1.1.3.3	214	Jl. Jendral Sudirman Timur (Badan Jalan)	5.679.039.660,59
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jalan Kabupaten Lokal	1.3.4.1.1.3.3	95	Jl. Perintis (Badan Jalan)	7.889.547.279,80
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Saluran Induk Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	1.3.4.2.1.4.1	37	Jl. Perintis (Irigasi)	8.595.517.942,05
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Saluran Induk Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	1.3.4.2.1.4.1	8	Jl. Jendral Sudirman Timur (Irigasi)	4.987.426.792,51
9	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jalan Kabupaten Lokal	1.3.4.1.1.3.3	223	Jl. Ks Tubun (Badan Jalan)	78.484.930,69
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Saluran Induk Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	1.3.4.2.1.4.1	20	Jl. Rumah Dinas Bupati (Irigasi)	491.991.110,00
11	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Saluran Induk Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	1.3.4.2.1.4.1	7	JL. PADAT KARYA (Irigasi)	16.204.746.698,69



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	SKPD	Jenis Aset	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Saluran Induk Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	1.3.4.2.1.4.1	16	Jl. Ks. Tubun (irigasi)	118.813.922,00
13	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Saluran Induk Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	1.3.4.2.1.4.1	14	Jl. Jendral Sudirman Barat (Irigasi)	124.356.423,00
14	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Saluran Induk Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	1.3.4.2.1.4.1	17	Jl. Inhutani (Jl. SMU) (Irigasi)	1.764.637.714,00
15	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Saluran Induk Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	1.3.4.2.1.4.1	36	Jl. Tanah Abang (Irigasi)	715.798.922,58
16	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jalan Kabupaten Lokal	1.3.4.1.1.3.3	224	Jl. Rumah Dinas Bupati (Badan Jalan)	105.393.333,00
17	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jalan Kabupaten Lokal	1.3.4.1.1.3.3	215	Jl. Padat Karya	34.380.468.005,47
18	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Saluran Induk Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	1.3.4.2.1.4.1	60	-	228.308.000,00
19	Kantor Camat Sesayap	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	1.3.4.3.6.2.4	3	jl.jend.sudirman	29.880.000,00
20	Dinas Lingkungan Hidup	Jaringan listrik lainnya	1.3.4.4.2.3.1	6	Taman Lokasi 2 (Samping Dinas PU)	19.800.000,00
21	Dinas Lingkungan Hidup	Jaringan listrik lainnya	1.3.4.4.2.3.1	7	Taman Lokasi 2 (Samping Dinas PU)	19.800.000,00
22	Dinas Kesehatan	Instalasi air kotor lainnya	1.3.4.3.2.4.1	1	Jl. Padat Karya Rt.001 Tideng Pale Timur	1.781.300.000,00
23	Dinas Kesehatan	Instalasi gas lainnya	1.3.4.3.8.4.1	1	Jalan Padat Karya Rt.01 Rw.01 Desa Tideng Pale Timur Kec. Sesayap. Kab. Tana Tidung	75.956.000,00
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jaringan Distribusi Lain-lain	1.3.4.4.2.2.4	3	Jln. Perintis. (Depan SMA SMP Terpadu 1)	10.000.000,00
Total						91.984.610.629,15

- b. Terdapat Aset Jalan Irigasi dan Jaringan yang berdiri di atas lahan bukan milik Pemda dan bukan tanah HGB PT. Inhutani senilai Rp36.853.242.871,00 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel 5.103

Rincian JIJ yang Berdiri di atas Bukan Milik Pemda dan Bukan Tanah HGB PT. Inhutani

No	SKPD	Uraian	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Buster Pump	1.3.4.2.6.5.9	1	Sesayap Hilir	83.372.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Buster Pump	1.3.4.2.6.5.9	5	Sesayap Hilir	119.431.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Buster Pump	1.3.4.2.6.5.9	2	Sesayap Hilir	167.160.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Buster Pump	1.3.4.2.6.5.9	4	Sesayap Hilir	167.704.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Buster Pump	1.3.4.2.6.5.9	9	Tideng Pale	237.787.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Buster Pump	1.3.4.2.6.5.9	6	Sesayap Hilir	427.821.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain	1.3.4.2.6.2.8	4	Desa Tengku Dacing	1.244.400.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain	1.3.4.2.6.2.8	1	Sesayap Hilir	1.729.758.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sumur Resapan	1.3.4.3.1.5.5	20	Tideng Pale	202.147.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sumur Resapan	1.3.4.3.1.5.5	16	Sesayap Hilir	539.914.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sumur Resapan	1.3.4.3.1.5.5	19	Tengku Dacing	657.177.300,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sumur Resapan	1.3.4.3.1.5.5	11	Desa Sesayap	1.140.589.746,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	SKPD	Uraian	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga
13	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sumur Resapan	1.3.4.3.1.5.5	15	Bebatu supra-Sesayap	1.308.810.000,00
14	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sumur Resapan	1.3.4.3.1.5.5	8	Desa Sebwang	1.374.225.000,00
15	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sumur Resapan	1.3.4.3.1.5.5	17	Tideng Pale	1.833.864.000,00
16	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sumur Resapan	1.3.4.3.1.5.5	6	Desa Bebatu Supa	2.419.961.100,00
17	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sumur Resapan	1.3.4.3.1.5.5	12	Desa Tideng Pale	3.746.003.376,00
18	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup	1.3.4.2.6.3.2	1	Desa Sedulun	192.323.800,00
19	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup	1.3.4.2.6.3.2	3	Optimalisasi Jaringan Air Minum Ipa Sedulun IV	719.611.800,00
20	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup	1.3.4.2.6.3.2	5	Desa Sedulun	1.297.382.000,00
21	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup	1.3.4.2.6.3.2	6	Optimalisasi Jaringan Air Minum Tideng Pale - Sesayap	6.482.964.600,00
22	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Saluran Induk Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	1.3.4.2.1.4.1	1	Desa Tengku Dacing Kec. Tana Lia	3.738.459.000,00
23	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bak Penyimpanan/Tower Air Baku	1.3.4.2.6.1.3	1	-	1.073.665.149,00
27	Kecamatan Sesayap	Sumur Resapan	1.3.4.3.1.5.5	3	Jl. Ahmad Yani (PDAM)	218.000.000,00
28	Kecamatan Sesayap	Instalasi PLTS Kapasitas Kecil	1.3.4.3.5.9.1	1	Bebatu	2.500.000,00
29	Kecamatan Sesayap	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya	1.3.4.3.5.9.4	1	Bebatu	10.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	SKPD	Uraian	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga
		Lain-lain				
30	Kantor Camat Sesayap	Jaringan Transmisi Tegangan dibawah 1 KVA	1.3.4.4.2.1.3	2		12.000.000,00
31	Kecamatan Sesayap Hilir	Sumur Resapan	1.3.4.3.1.5.5	5	Desa Sengkong	349.308.000,00
32	Kecamatan Tana Lia	Sumur Resapan	1.3.4.3.1.5.5	1	Jl. Persawahan Desa Tana Merah Barat	230.000.000,00
33	Kecamatan Tana Lia	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil	1.3.4.4.1.3.1	1	Jl. Abdullah Tana Merah	230.000.000,00
34	Kecamatan Tana Lia	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 1 KVA	1.3.4.4.2.1.3	1	Jl. Tarakan Jaya	250.000.000,00
36	Kecamatan Tana Lia	Sumur Resapan	1.3.4.3.1.5.5	3	Jl. Persawahan Desa Tana Merah Barat	4.447.564.000,00
37	Kecamatan Betayau	Sumur Resapan	1.3.4.3.1.5.5	1	Desa Buong Baru	199.340.000,00
Jumlah						36.853.242.871,00

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2025
30.835.126.317,78

31 Desember 2024
30.049.549.747,30

Aset Tetap Lainnya merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan dalam kondisi siap digunakan. Aset Tetap Lainnya di Neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga. Saldo Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp30.835.126.317,78 sedangkan per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp30.049.549.747,30. Aset Tetap Lainnya pada TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp785.576.570,48 atau 2,61%. Kenaikan nilai Aset tersebut disebabkan adanya Belanja Modal Aset Tetap Lainnya di tahun berjalan serta adanya Hibah dari Kementerian. Adapun rincian mutasi masuk dan keluar Aset Tetap Lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.104
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
A	Saldo Awal	30.049.549.747,30
B	Mutasi Masuk	
1	Penambahan Aset Tetap Lainnya berasal dari BM TA 2025	463.746.582,00
2	Reklasifikasi dari BM Gedung dan Bangunan TA 2025	784.674.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Jumlah
3	Penambahan Aset Tetap Lainnya berasal dari BM BOP TA 2025	205.682.879,00
4	Penambahan Aset Tetap Lainnya berasal dari BM BOS TA 2025	791.767.000,00
5	Reklasifikasi dari BM Peralatan dan Mesin BOP TA 2025	10.000.000,00
6	Reklasifikasi dari BM Peralatan dan Mesin BOS TA 2025	771.000,00
7	Penambahan Aset Tetap Lainnya berasal dari Belanja Persediaan TA 2025	112.037.716,48
8	Hibah dari Kemendikdasmen dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	67.623.174,00
9	Penambahan Aset Tetap Lainnya atas Progress Pekerjaan (Hutang)	100.690.000,00
10	Penambahan Aset Peralatan dan Mesin berasal dari Belanja Persediaan BOS TA 2025	88.896.000,00
11	Penambahan Aset Peralatan dan Mesin berasal dari Belanja Persediaan BOP TA 2025	43.000.000,00
12	Penambahan Aset Peralatan dan Mesin berasal dari Penerimaan Internal	34.871.840,00
13	Penambahan Aset Peralatan dan Mesin berasal dari Mutasi Dari SKPD	120.816.075,00
Jumlah B		2.824.576.266,48
C	Mutasi Keluar	
1	Reklasifikasi BM Aset Tetap Lainnya BOP TA 2025 ke Peralatan dan Mesin	45.717.879,00
2	Reklasifikasi BM Aset Tetap Lainnya BOS TA 2025 ke Peralatan dan Mesin	32.015.700,00
3	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Gedung Bangunan	120.816.075,00
4	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Tak Berwujud	981.524.500,00
5	Belanja Modal TA 2025 Bernilai dibawah Kapitalisasi	282.300,00
6	Belanja Modal BOP TA 2025 Bernilai dibawah Kapitalisasi	7.350.000,00
7	Pengurangan BM BOP Aset Tetap Lainnya TA 2025 Reklas ke Persediaan	6.200.000,00
8	Belanja Modal BOS TA 2025 Bernilai dibawah Kapitalisasi	206.637.400,00
9	Pengurangan BM BOS Aset Tetap Lainnya TA 2025 Reklas ke Persediaan	417.041.300,00
10	Aset Hibah yang Bernilai dibawah Kapitalisasi	64.567.327,00
11	Pengurangan atas beban dibayar dimuka	1.159.300,00
12	Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin berasal dari Pengeluaran Internal	34.871.840,00
13	Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari Mutasi Ke SKPD	120.816.075,00
Jumlah C		2.038.999.696,00
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya (A+B-C)		30.835.126.317,78



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Adapun rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per akun barangnya sebagai berikut.

Tabel 5.105
Rincian Mutasi per Jenis Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	3.450.859.888,87	1.138.387.490,00	1.918.183.621,00	2.671.063.757,87
2	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	5.649.600,00	0,00	0,00	5.649.600,00
3	Kartografi, Naskah dan Lukisan	627.269.100,00	850.000,00	0,00	628.119.100,00
4	Musik	91.276.100,00	0	0,00	91.276.100,00
5	Karya Grafika (Graphic Material)	7.301.600,00	0	0,00	7.301.600,00
6	Barang Bercorak Kesenian	5.832.597.600,00	490.707.000,00	0,00	6.323.304.600,00
7	Alat Bercorak Kebudayaan	204.325.000,00	103.560.000,00	0,00	307.885.000,00
8	Tanaman	1.307.345.819,00	0,00	0,00	1.307.345.819,00
9	Aset Tetap Dalam Renovasi	18.522.925.039,43	1.091.071.776,48	120.816.075,00	19.493.180.740,91
Jumlah		30.049.549.747,30	2.824.576.266,48	2.038.999.696,00	30.835.126.317,78

Adapun Aset Tetap Lainnya selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 5.28**.

Rincian lain Jalan, Irigasi, dan Jaringan, sebagai berikut.

- a. Terdapat Aset Tetap Lainnya yang berdiri di atas tanah HGB PT. Inhutani senilai Rp12.437.803.563,72 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.106
Aset Tetap Lainnya yang Berdiri di atas Tanah HGB PT. Inhutani

No	SKPD	Uraian	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	1.3.5.7.1.1.3	26	Rumah Jabatan Bupati (Pembangunan Pagar+Siring Penahan Tanah+Paving+Kolam Renang+Gazebo+Kanopi+Dapur Kotor per 31 Des 2024)	1.872.343.480,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	1.3.5.7.1.1.3	13	Perencanaan Penataan RTH Stadion Mini Tideng Pale	98.470.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	1.3.5.7.1.1.3	17	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Stadion Mini (Pembangunan SP2D 04818 : 3,127,517,000)+(SP2D 06679 : 3,822,483,000)+(Pengawasan : 324,395,280)	7.274.395.280,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	1.3.5.7.1.1.3	1	Rehab Gedung Serbaguna per 31 Desember 2023 Fisik Rp. 198,500,000.00 Pengawasan Rp. 34,959,750.00	233.459.750,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	1.3.5.7.1.1.3	3	Rehab Pendopo Japarrudin per 31 Desember 2023 Fisik Rp. 493,177,178.00 Pengawasan	542.984.126,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	SKPD	Uraian	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga
	dan Kawasan Permukiman				Rp. 49,806,948.00	
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Aset Renovasi	1.3.5.7.1.1.7	7	Pembangunan Pagar Rumah Dinas Bupati Dan Landscape 576.090.000 + Perencanaan Dan Uang Muka 176.700.000 + Pengawasan 28.500.000	781.290.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Aset Renovasi	1.3.5.7.1.1.7	6	Pembersihan dan Pematangan Lahan Rumah Dinas Bupati	98.500.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Aset Renovasi	1.3.5.7.1.1.7	2	Rumah Dinas Sekda Jl. Ir. Salmon (Rehab Rumdin Sekda)	373.749.713,42
9	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Aset Renovasi	1.3.5.7.1.1.7	3	Rumah Dinas DPRD, Jl. Ir. Salmon (Rumah dinas DPRD)	38.534.714,30
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Aset Renovasi	1.3.5.7.1.1.7	8	Review Perancangan Landscape Kawasan Pendopo Japaruddin	242.622.500,00
11	Bagian Umum	Lukisan dan ukiran	1.3.5.1.3.3.1	1	Pengadaan Latar Belakang Panggung Pendopo	198.500.000,00
12	Bagian Umum	Lukisan dan ukiran	1.3.5.1.3.3.1	2	Pengadaan Ukiran Tiang Pendopo	198.500.000,00
13	Bagian Umum	Lukisan dan ukiran	1.3.5.1.3.3.1	3	Pengadaan Ornamen Balok Gantung Pendopo	197.000.000,00
14	Bagian Umum	Aset Renovasi	1.3.5.7.1.1.7	1	Belanja Modal Pengadaan Pos Jaga Eks Rumjab Sekda Milik Inhutani (Sewa Rumdis Asisten Inhutani)	87.920.000,00
15	Bagian Umum	Aset Renovasi	1.3.5.7.1.1.7	7	Kapitalisasi Rehab Fasilitas Parkir (Pembuatan Paving Block Eks Rumah Jabatan Sekda (39.050.000.00) Dan Parkiran Dan Jalan Masuk (73.223.000) , Jl.Ir.Salmon Desa Tideng Pale	112.273.000,00
16	Bagian Umum	Aset Renovasi	1.3.5.7.1.1.7	12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan ,Eks Rumjab Sekda Inhutani (Gudang Bagian Umum) (Perencanaan Rp : 4.900.000, Pengawasan : Rp 1.950.000, Pembuatan Rp. 80.441.000, Total Rp.87.261.000) Tanah Milik Inhutani (Sewa) Jl.Ir.Salmon Desa Tideng Pale	87.261.000,00
Jumlah						12.437.803.563,72

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
342.318.932.552,84 **356.033.937.401,24**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp342.318.932.552,84 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp356.033.937.401,24, maka terdapat penurunan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp13.715.004.848,40 atau 3,85%. Penurunan nilai aset tersebut disebabkan Pekerjaan fisik sudah selesai sehingga aset Konstruksi Dalam Pengerjaan reklas ke Gedung Bangunan dan Jalan Irigasi dan Jaringan. Adapun rincian mutasi masuk dan keluar Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel 5.107

Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
A	Saldo Awal	356.033.937.401,24
B	Mutasi Masuk	
1	Penambahan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Reklas antar KIB	225.067.725.588,63
2	Penambahan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari belanja jasa / belanja lainnya	477.472.228,00
3	Penambahan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari belanja Persediaan	3.315.549.986,16
4	Penambahan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan penambahan atas Progress Pekerjaan melebihi Pembayaran	2.217.365.201,20
5	Penambahan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Berdasarkan Penambahan atas Pengembalian Uang Muka (Piutang 2024)	93.374.276,11
Jumlah B		231.171.487.280,10
C	Mutasi Keluar	
1	Pengurangan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Reklas antar KIB	244.689.513.828,50
2	Pengurangan Aset KDP atas Aset yang Reklas ke Persediaan	196.978.300,00
Jumlah C		244.886.492.128,50
Saldo Akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan (A+B-C)		342.318.932.552,84

Adapun Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 5.29**.

Rincian lain Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut.

- a. Terdapat Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan yang berdiri di atas tanah HGB PT. Inhutani senilai Rp66.317.220.577,16 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.108

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan yang Berdiri di atas Tanah HGB PT. Inhutani

No	SKPD	Uraian	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga
1	Dinas Kesehatan dan Kemasyarakatan	Jalan lainnya	1.3.4.1.1.10.1	1	JL. Printis Km 1 tideng Pale	89.761.815,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	Taman Permanen	1.3.3.1.1.36.1	5	Jl. Padat Karya (Depan Pendopo)	99.220.000,00
3	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1.3.3.1.1.11.4	1	Stadion Mini Tideng Pale	29.248.500,00
4	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1.3.3.1.1.11.4	2	Tideng Pale - Sesayap	87.989.700,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	SKPD	Uraian	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga
5	Dinas Pekerjaan Umum, Ruang, dan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tanah Bangunan Gudang	1.3.1.1.1.2.3	1	Jl Inhutani Kec. Sesayap	29.325.120,00
6	Dinas Pekerjaan Umum, Ruang, dan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.3.1.1.37.1	27	Tideng Pale	78.100.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum, Ruang, dan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.1.1.1.1	76	Jalan Perintis RT. IV Tideng Pale Sesayap (Depan PU)	62.941.453.339,28
8	Dinas Pekerjaan Umum, Ruang, dan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.1.1.1.1	132	Jl. Perintis	98.790.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum, Ruang, dan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.1.1.1.1	133	Jln.Padat Karya (Belakang Kantor Desa Tideng Pale Timur)	588.918.714,54
10	Dinas Pekerjaan Umum, Ruang, dan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jalan Kabupaten Lokal	1.3.4.1.1.3.3	311	Jalan Perintis - Jalan Jendral Sudirma	74.826.210,00
11	Dinas Pekerjaan Umum, Ruang, dan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jalan Kabupaten Lokal	1.3.4.1.1.3.3	286	Jalan Jendral Sudirman (Depan SDN Unggulan Terpadu 1)	62.888.437,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Ruang, dan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jalan Kabupaten Lokal	1.3.4.1.1.3.3	277	Jalan Perintis	77.851.237,00
13	Dinas Pekerjaan Umum, Ruang, dan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Saluran Induk Pembawa (Bangunan Irigasi)	1.3.4.2.1.3.2	5	RSUD Akhmad Berahim	98.503.000,00
14	Dinas Pekerjaan Umum, Ruang, dan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Saluran Induk Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	1.3.4.2.1.4.1	65	Jl. Perintis Depan DPUPRPKP	1.457.737.674,34
15	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.1.1.4.2	9	Area Smp-Sma Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	9.960.880,00
16	Dinas Perhubungan	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.3.1.1.37.1	1	Ruas Jl. Jend. Sudirman Ruas Jl. Padat Karya	99.110.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	SKPD	Uraian	Kode Barang	No Reg	Alamat	Harga
17	Dinas Perhubungan	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	1.3.3.1.1.18.1	3	Jl. Inhutani (Belakang Kantor DPRD KTT)	99.598.950,00
18	RSUD Berahim Akhmad	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.3.1.1.37.1	10	Jl. ir salmon RSU AB	94.215.000,00
19	RSUD Berahim Akhmad	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	1.3.3.1.1.6.19	11	Jalan Padat Karya, Rt.001 Rw.001 Desa Tideng Pale Timur Kec. Sesayap	88.323.000,00
20	RSUD Berahim Akhmad	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	1.3.3.1.1.6.19	12	Jalan Padat Karya, Rt.001, Rw.001 Desa Tideng Pale Timur Kec.Sesayap	38.476.000,00
21	RSUD Berahim Akhmad	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	1.3.3.1.1.6.19	13	Jalan Padat Karya, Rt.001, Rw.001 Desa Tideng Pale Timur, Kec.Sesayap	72.923.000,00
Jumlah						66.317.220.577,16

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
(2.310.802.049.238,91) (2.141.030.024.649,11)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah senilai (Rp2.310.802.049.238,91) dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai (Rp2.141.030.024.649,11), maka terdapat kenaikan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap senilai Rp169.772.024.589,80 atau 7,93%. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menggunakan aplikasi e-BMD untuk melakukan proses penyusutan. Aplikasi e-BMD menerapkan metode garis lurus (*straight line method*) dalam proses menghitung Penyusutan Aset tetap dan SIPD menggunakan hasil dari penyusutan e-BMD untuk Laporan Neraca keuangan.

5.3.1.4 Aset lainnya **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
89.027.048.123,14 131.064.346.686,10

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp89.027.048.123,14 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp131.064.346.686,10, maka terdapat penurunan saldo Aset Lainnya senilai Rp42.037.298.562,96 atau 32,07%. Aset Lainnya terdiri dari, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Aset Tak Berwujud, Aset Lain-lain, dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya. Adapun rincian Aset Lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.109

Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian		31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tuntutan Ganti Rugi, terdiri dari:		23.868.930.822,61	31.915.383.824,39
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	438.293.300,13	1.148.271.300,13
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara	23.430.637.522,48	30.767.112.524,26
Aset Tak Berwujud dari:		15.917.378.091,90	15.293.901.007,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Uraian		31 Desember 2025	31 Desember 2024
3	Lisensi dan <i>franchise</i>	559.627.274,00	558.627.274,00
4	Hak Cipta	190.000.000,00	190.000.000,00
5	<i>Software</i>	9.231.987.056,00	8.508.227.056,00
6	Kajian	48.846.389.220,45	43.346.322.676,00
7	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(42.910.625.458,55)	(37.309.275.999,00)
Aset Lain-lain		49.240.739.208,63	83.855.061.854,71
8	Aset Lain-lain	119.541.861.882,31	153.133.187.528,95
9	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(70.301.122.673,68)	(72.988.066.674,24)
10	Kas yang Dibatasi Penggunaannya / TDF	0,00	3.709.941.000,00
Jumlah		89.027.048.12314	131.064.346.686,10

Rincian lain Aset Lainnya, sebagai berikut.

- a. Aset Lainnya yang belum dihapuskan karena menunggu SK Bupati terkait penghapusan senilai Rp119.541.861.882,31 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.110
Rincian Aset Lainnya yang Belum Dihapuskan Tahun 2025

No	KIB	Unit	Total Harga
1	Peralatan dan Mesin	4.666	56.419.713.915,07
2	Gedung dan bangunan	66	11.106.485.327,67
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	107	49.678.459.259,56
4	Aset Tetap Lainnya	118	2.267.957.380,00
5	Aset Tak Berwujud	1	69.246.000,00
Total		4.958	119.541.861.882,31

- b. Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang belum diserahkan sehingga belum dilakukan penghapusan senilai Rp1.258.853.867,00. dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel 5.111

Rincian Aset Lainnya Belum Diserahkan ke Provinsi Kalimantan Utara

No	SKPD	Harga
1	SMA Negeri 001 Sesayap Hilir	132.259.000,00
2	SMA Negeri 001 Tana Lia	142.565.000,00
3	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	984.029.867,00
JUMLAH		1.258.853.867,00

Adapun Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang belum diserahkan selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 5.30**.

- c. Aset Tetap yang telah habis masa manfaatnya dan akan dilelang Rp1.393.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.112

Rincian Aset Tetap Habis Masa Manfaatnya

No	SKPD	Uraian	Kode Barang	No Reg	Tahun	Harga
1	Bagian Umum	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	02.02.01.01.006	7	2010	492.250.000,00
2	Bagian Umum	Sedan	02.02.01.01.001	5	2011	450.525.000,00
3	Bagian Umum	Sedan	02.02.01.01.001	6	2011	450.525.000,00
Jumlah						1.393.300.000,00

- d. Aset yang hilang dan masih dalam proses TGR senilai Rp200.185.659,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.113

Rincian Aset yang Hilang Masih dalam Proses TGR

No	SKPD	Uraian	Kode Barang	Merk	Tahun	Harga	Keterangan
1	BPKAD	Note Book	02.10.01.02.003	Acer4736 G / Intel Core 2 Duo T 6600 @2,2 GHz, 800 Mhz FSB	2010	12.744.325,00	Notebook
2	BPKAD	Note Book	02.10.01.02.003	Toshiba / Satellite	2011	11.550.000,00	Notebook
3	DISDUKCAPIL	Sepeda Motor	02.02.01.04.001	yamaha / mio sporty cw	2010	17.210.000,00	Sepeda Motor
4	DPMP TSP	Brangkas	02.05.01.04.007	A. Lokal. I. / 58 CMX	2011	5.550.000,00	Hilang
5	DPMP TSP	Lap Top	02.10.01.02.002	Asus / X451C	2014	9.258.000,00	Hilang
6	Kecamatan Muruk Rian	Kipas Angin	02.05.02.04.006	ReGency	2013	1.666.667,00	Kipas Angin
7	Kecamatan Muruk Rian	Kipas Angin	02.05.02.04.006	ReGency	2013	1.666.667,00	Kipas Angin
8	Kecamatan Muruk Rian	Sound System	02.05.02.06.008	-	2013	4.150.000,00	Salon
9	Kecamatan Muruk Rian	Sound System	02.05.02.06.008	-	2013	4.150.000,00	Salon
10	Kecamatan Muruk Rian	Lap Top	02.10.01.02.002	toshiba / intel corei5-	2013	11.900.000,00	Laptop



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	SKPD	Uraian	Kode Barang	Merk	Tahun	Harga	Keterangan
	Rian			3317u,4GB DDR3 750 GB HDD, DVR/RW,WIF			
11	Kecamatan Muruk Rian	Mixer PVC	02.06.01.02.074	-	2013	10.000.000,00	Pengadaan Mixer TVC dan Kabel
12	SMPN 4 Tana Tidung	Lap Top	02.10.01.02.002	Acer / TravelMate 4740	2010	11.880.000,00	Laptop
13	SMPN 4 Tana Tidung	Lap Top	02.10.01.02.002	Acer / TravelMate 4740	2010	11.880.000,00	laptop
14	Kecamatan Tana Lia	Camera + Attachme nt	02.05.02.06.021	Canon	2013	9.000.000,00	Camera Digital
15	DPPP	Pompa Lain- lain	02.02.03.05.007	-	2010	5.900.000,00	Mesin Sedot Air hilang
16	DPPP	Mesin Ketik Listrik Standard	02.05.01.01.006	-	2012	14.850.000,00	Solar sel Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
17	DPPP	Mesin Ketik Listrik Standard	02.05.01.01.006	-	2012	14.850.000,00	Solar sel Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
18	Kec Betayau	Lap Top	02.10.01.02.002	HP	2024	10.000.000,00	
19	Bagian Pemerintahan	Lap Top	02.10.01.02.002	Laptop Toshiba / Satellite L754	2011	15.700.000,00	Laptop
20	Satpol-PP	SOLAR CELL	02.06.03.47.003	Polycrystallin E Solar	2017	16.280.000,00	Lokasi Pos Jaga Ds. Kujau Kec.Betayau
Jumlah						200.185.659,00	

5.3.1.4.1 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
23.868.930.822,61 **31.915.383.824,39**

Saldo akhir Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp23.868.930.822,61 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp31.915.383.824,39, maka terdapat penurunan saldo TGR senilai Rp8.046.453.001,78 atau 25,21%. TGR merupakan Kerugian Daerah yang penanggung jawabnya oleh Bendahara dan Pegawai bukan Bendahara serta Pihak Ketiga pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun rincian tuntutan ganti rugi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.114
Rincian Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis Kerugian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	1.148.271.300,13	0.00	709.978.000,00	438.293.300,13
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	30.767.112.524,26	6.771.835.115,41	14.108.310.117,19	23.430.637.522,48
Jumlah	31.915.383.824,39	6.771.835.115,41	14.818.288.117,19	23.868.930.822,61



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Mutasi masuk pada rincian TGR ini terdiri dari koreksi kurang saji atas Hasil Pemeriksaan, Reklasifikasi Status Kerugian Daerah serta Perpindahan atas status dari Informasi ke Ketetapan. Sedangkan Mutasi keluar pada Tuntutan Ganti Rugi terhadap Bendahara terdiri dari Reklasifikasi status Kerugian Daerah, Pemulihan atas Kerugian Daerah yang telah ditetapkan dan Perpindahan Kerugian Daerah pada Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara atas yang telah ditetapkan melalui SKTJM.

Selain itu, mutasi keluar pada Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat Lain terdiri dari Koreksi atas Lebih Saji atas Hasil Pemeriksaan, pemulihan Kerugian Daerah yang telah ditetapkan senilai Rp434.770.076,00, pemulihan atas Kerugian Daerah terhadap Pegawai bukan Bendahara senilai Rp844.104.144,00, pemulihan atas Kerugian Daerah melalui Surat Tanda Setoran (STS) tahun 2024 ke bawah senilai Rp49.043.000,00, dan pemulihan atas Kerugian Daerah terhadap Pihak Ketiga yang terdiri dari pemulihan melalui STS senilai Rp8.769.609.201,66 dan pemulihan melalui pemotongan Berita Acara Pembayaran (BAP) Pekerjaan senilai Rp859.114.036,06, serta Perpindahan Kerugian Daerah pada Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atas yang telah ditetapkan melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Multak (SKTJM).

5.3.1.4.2 Aset Tak Berwujud **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
58.828.003.550,45 **52.603.177.006,00**

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp58.828.003.550,45 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp52.603.177.006,00, maka terdapat kenaikan saldo Aset Tak Berwujud senilai Rp6.224.826.544,45 atau 11,83%. Rincian atas Aset Tak Berwujud dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.115
Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember		Kenaikan / Penurunan	%
		2025	2024		
1	Hak Cipta	190.000.000,00	190.000.000	0,00	0,00
2	Kajian	48.846.389.220,45	43.346.322.676	5.500.066.544,45	12,69
3	Lisensi dan Franchise	559.627.274,00	558.627.274,00	1.000.000,00	0,18
4	Software	9.231.987.056,00	8.508.227.056,00	723.760.000,00	8,51
Jumlah		58.828.003.550,45	52.603.177.006,00	6.224.826.544,45	11,83



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Adapun rincian mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.116
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A	Saldo Awal	52.603.177.006,00
B	Mutasi Masuk	
1	Penambahan dari Belanja Modal	1.881.003.468,00
2	Reklas dari BM Gedung dan Bangunan	961.020.900,45
3	Reklas dari Aset Tetap Lainnya - Kajian	981.524.500,00
4	Reklas dari Belanja Peralatan dan Mesin BOP	3.300.000,00
5	Reklas dari Belanja Persediaan	2.528.334.600,00
6	Aset Ekstrakomp Peralatan dan Mesin	1.130.000,00
Jumlah B		6.356.313.468,45
C	Mutasi Keluar	
1	Pengurangan Aset Tak Berwujud direklas ke Aset Lain-Lain	69.246.000,00
2	Pengurangan Aset Tak Berwujud karena Pembayaran Hutang Pekerjaan Tahun Lalu	62.240.924,00
Jumlah C		131.486.924,00
Saldo Akhir Aset Tak Berwujud (A+B-C)		58.828.003.550,45

Rincian Aset Tak Berwujud per SKPD beserta mutasi penambahan dan Pengurangan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.31**.

5.3.1.4.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
(42.910.625.458,55) **(37.309.275.999,00)**

Saldo Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah senilai (Rp42.910.625.458,55) dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai (Rp37.309.275.999,00), maka terdapat kenaikan saldo Amortisasi Aset Tak Berwujud senilai Rp5.601.349.459,55 atau 15,01%. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 5.32**.

5.3.1.4.4 Aset Lain-Lain **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
119.541.861.882,31 **153.133.187.528,95**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp119.541.861.882,31 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp153.133.187.528,95, maka terdapat penurunan saldo Aset Lain-



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

lain senilai Rp33.591.325.646,64 atau 21,94%. Penurunan tersebut disebabkan oleh pemindahtanganan aset melalui skema penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pelaksanaan penghapusan terhadap sebagian objek Aset Lain-lain pada TA 2025. Aset lain-lain selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 5.33**.

5.3.1.4.4.1 Aset Rusak Berat / Usang	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	84.650.692.222,26	110.176.748.503,95

Saldo Aset Rusak Berat/Usang per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp84.650.692.222,26 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp110.0176.748.503,95, maka terdapat penurunan saldo Aset Rusak Berat/Usang senilai Rp25.526.056.281,69 atau 23,17%.

5.3.1.4.4.2 Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	34.891.169.660,05	42.956.439.025,00

Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp34.891.169.660,05 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp42.956.439.025,00, maka terdapat penurunan saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah senilai Rp8.065.269.364,95 atau 18,78%. Hal tersebut terjadi akibat Penghapusan atas Aset yang diserahkan ke ke PDAM.

5.3.1.4.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	(70.301.122.673,68)	(72.988.066.674,24)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 adalah senilai (Rp70.301.122.673,68) dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai (Rp72.988.066.674,24), maka terdapat penurunan saldo Akumulasi Penyusutan senilai Rp2.686.944.000,56 atau 3,68%. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 5.34**.

5.3.1.4.6 Kas yang dibatasi Penggunaannya	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	0,00	3.709.941.000,00

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.05/2022 tentang Pembentukan dan Pengelolaan *Treasury Deposit Facility* Dalam Rangka Penyaluran Dana Bagi Hasil TA 2022. Pada akhir tahun 2023, Menteri Keuangan telah menyalurkan Dana Bagi Hasil dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD), yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda, yang disediakan oleh BUN bagi Pemda. Kebijakan penyaluran DBH melalui Rekening TDF-TKD dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang lebih sehat, efisien, dan



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

efektif, dengan menjaga kas simpanan pemda dalam jumlah yang wajar. Penarikan DBH dari Rekening Lain BI TDF-TKD ke RKUD dapat dilakukan oleh Pemda setelah *holding period* sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sesuai Nomor 900.1.14.1/7481/keuda perihal Pengeluaran DBH/DAU melalui Fasilitas TDF maka Pemerintah Daerah mengakui sebagai Aset Lainnya. Sesuai rekening lain Bank Indonesia TDF, Saldo Kas yang dibatasi Penggunaannya/TDF per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp0,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp3.709.941.000,00, maka terdapat penurunan saldo Dana TDF senilai Rp3.709.941.000,00 atau 100,00%.

5.3.2	Kewajiban	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		243.274.217.607,28	142.458.748.052,58

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp243.274.217.607,28 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp142.458.748.052,58, maka terdapat kenaikan saldo Kewajiban senilai Rp100.815.469.554,70 atau 70,77%. Kewajiban dengan penjelasan sebagai berikut.

5.3.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		176.150.459.623,28	142.458.748.052,58

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Tana Tidung per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp176.150.459.623,28 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp142.458.748.052,58, maka terdapat kenaikan saldo Kewajiban Jangka Pendek senilai Rp33.691.711.570,70 atau 23,65%. Adapun rincian Kewajiban Jangka Pendek disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.117
Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember		Kenaikan/ Penurunan	%
		2025	2024		
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.504.952,00	11.344.847,00	(8.839.895,00)	(77,92)
2	Pendapatan Diterima Dimuka	52.498.817,74	138.745.677,00	(86.246.859,26)	(62,16)
3	Utang Belanja	5.438.651.174,84	8.338.063.528,58	(2.899.412.353,74)	(34,77)
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	170.656.804.678,70	133.970.594.000,00	36.686.210.678,70	27,38
Jumlah		176.150.459.623,28	142.458.748.052,58	33.691.711.570,70	23,65



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.3.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		<u>2.504.952,00</u>	<u>11.344.847,00</u>

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp2.504.952,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp11.344.847,00, maka terdapat penurunan saldo Utang PFK senilai Rp8.839.895,00 atau 77,92%. Utang tersebut merupakan pajak Bantuan Operasional Penyelenggaraan BLUD dan BOS yang belum tersetor per 31 Desember 2025. Adapun rincian Utang PFK disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.118
Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember		Kenaikan / Penurunan	%
		2025	2024		
1	Utang PPh 22	0,00	542.753,00	(542.753,00)	(100,00)
-	Utang PFK PPh 22 BLUD (RSUD Ahkmad Berahim)	0,00	542.753,00	(542.753,00)	(100,00)
2	Utang PPh 23	485.560,00	4.716.538,00	(4.230.978,00)	(89,71)
-	Utang PFK PPh 23 BOS (SDN 001)	374.960,00	4.716.538,00	(4.341.578,00)	(92,05)
-	Utang PFK PPh 23 BOP (SDN 001)	110.600,00	0,00	110.600,00	100,00
3	Utang PPN Pusat	2.019.392,00	6.085.556,00	(4.066.164,00)	(66,82)
-	Utang PFK PPN BLUD (RSUD Ahkmad Berahim)	0,00	3.980.186,00	(3.980.186,00)	(100,00)
-	Utang PFK PPN BOS (SDN 020)	0,00	60.760,00	(60.760,00)	(100,00)
-	Utang PFK PPN BOS (SDN TU 1)	330.723,00	0,00	330.723,00	100,00
-	Utang PFK PPN BOS (SDN TU 2)	1.360.669,00	0,00	1.360.669,00	100,00
-	Utang PFK PPN BOP (SDN 001)	328.000,00	2.044.610,00	(1.716.610,00)	(83,96)
Jumlah		2.504.952,00	11.344.847,00	(8.839.895,00)	(77,92)

5.3.2.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		<u>52.498.817,74</u>	<u>138.745.677,00</u>

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp52.498.817,74 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp138.745.677,00, maka terdapat penurunan saldo Pendapatan Diterima Dimuka senilai Rp86.246.859,26 atau 62,16%. Penyajian Pendapatan Diterima



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Dimuka dalam laporan keuangan dihitung dan diakui secara bertahap setiap bulan berdasarkan porsi layanan atau barang yang telah diserahkan. Adapun rincian Pendapatan Diterima Dimuka disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.119

Rekapitulasi Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Saldo Awal Per 1 Januari 2025	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir TA 2025
Pajak Reklame	0,00	4.973.817,74	0,00	4.973.817,74
Sewa Pasar trans Betayau	22.500.000,00	0,00	6.000.000,00	16.500.000,00
Sewa Bangunan Galeri ATM Pasar Imbayud Taka	0,00	31.025.000,00	0,00	31.025.000,00
Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III	102.780.102,00	0,00	102.780.102,00	0,00
Jumlah	125.280.102,00	35.998.817,74	108.780.102,00	52.498.817,74

Pada Pendapatan Diterima Dimuka dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Pendapatan Diterima dari Pajak Reklame sebanyak 27 Surat Ketetapan yang telah diterbitkan untuk masa pajak TA 2025 dengan akhir masa pajak tahun 2026 senilai Rp4.973.817,74. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka atas Pendapatan Pajak Reklame dapat dilihat pada **Lampiran 5.35**.
- Pendapatan Diterima Dimuka berupa sewa Pasar Trans Betayau yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 dan akan berakhir pada tanggal 1 Januari 2028 senilai Rp41.250.000,00 dengan Pendapatan Diterima Dimuka senilai Rp16.500.000,00, dan sewa gedung galeri ATM Pasar Imbayud Taka KTT yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 28 April 2025 dan akan berakhir pada tanggal 28 April 2030 senilai Rp36.500.000,00 dengan Pendapatan Diterima Dimuka senilai Rp31.025.000,00. Adapun rincian Pendapatan Diterima Dimuka berupa sewa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.120

**Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Berupa Sewa
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Uraian	Nama Penyewa	Nilai Sewa (Rp)	Periode Sewa	Pendapatan Pajak Reklame – LO	Pendapatan Diterima di Muka
1	Ruko Betayau	BPD Kaltimtara	41.250.000,00	01/01/2024 s.d. 01/01/2028	8.250.000,00	16.500.000,00
2	ATM Pasar Imbayun	BPD Kaltimtara	36.500.000,00	28/04/2025 s.d. 28/04/2030	5.475.000,00	31.025.000,00
Jumlah			77.750.000,00		13.725.000,00	47.525.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.3.2.1.3 Utang Belanja	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	5.438.651.174,84	8.338.063.528,58

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp5.438.651.174,84 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp8.338.063.528,58, maka terdapat penurunan saldo Utang Belanja senilai Rp2.899.412.353,74 atau 34,77%. penjelasan utang tersebut dijelaskan sebagai berikut.

5.3.2.1.3.1 Utang Belanja Pegawai	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	2.063.078.419,00	3.479.341.372,00

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp2.063.078.419,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp3.479.341.372,00, maka terdapat penurunan saldo Utang Belanja Pegawai senilai Rp1.416.262.953,00 atau 40,70%. Penurunan tersebut dikarenakan instansi terkait telah menyalurkan dana untuk membayar hak-hak pegawai yang sebelumnya tercatat sebagai utang. Adapun rincian Utang Belanja Pegawai disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.121
Rekapitulasi Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember		Kenaikan / Penurunan	%
		2025	2024		
1	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	1.743.560.310,00	(1.743.560.310,00)	(100,00)
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	30.875.208,00	172.165.162,00	(141.289.954,00)	(82,07)
3	Utang Belanja Pegawai BLUD	2.032.203.211,00	1.563.615.900,00	468.587.311,00	29,97
Jumlah		2.063.078.419,00	3.479.341.372,00	(1.416.262.953,00)	(40,70)

5.3.2.1.3.2 Utang Belanja Barang dan Jasa	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	814.195.506,10	480.477.384,55

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp814.195.506,10 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp480.477.384,55, maka terdapat kenaikan saldo utang Belanja Barang dan Jasa senilai Rp333.718.121,55 atau 69,46%. Dikarenakan terdapat komitmen pengadaan belanja obat-obatan yang telah terealisasi namun belum diselesaikan proses pembayarannya kepada pihak rekanan. Adapun rincian Utang Belanja Barang dan Jasa disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel 5.123

Rekapitulasi Mutasi Utang Belanja Modal Tahun 2025

No	Uraian	Saldo 1 Januari 2025	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo 31 Desember 2025
1	Utang Belanja Modal Tanah	0,00	18.348.957,77	0,00	18.348.957,77
2	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.263.228.135,48	2.026.870.031,73	1.263.228.135,48	2.026.870.031,73
3	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.052.775.712,55	455.091.923,56	2.991.709.375,87	516.158.260,24
4	Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud	62.240.924,00	0,00	62.240.924,00	0,00
Jumlah		4.378.244.772,03	2.500.310.913,06	4.317.178.435,35	2.561.377.249,74

Berdasarkan tabel di atas, rincian Utang Belanja Modal per 31 Desember 2025 dijelaskan pada **Lampiran 5.37**. Adapun Utang Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.3.2.1.3.3 Utang Belanja Modal **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
Tanah **18.348.957,77** **0,00**

Saldo Utang Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp18.348.957,77 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, maka terdapat kenaikan saldo Utang Belanja Modal Tanah senilai Rp18.348.957,77 atau 100%. Kenaikan tersebut dikarenakan Pematangan Lahan Taman Budaya Kabupaten Tana Tidung belum terbayarkan sampai dengan 31 Desember 2025.

5.3.2.1.3.3 Utang Belanja Modal **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
Gedung dan Bangunan **2.026.870.031,73** **1.263.228.135,48**

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp2.026.870.031,73 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp1.263.228.135,48, maka terdapat kenaikan saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp763.641.896,25 atau 60,45%.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.3.2.1.3.3	Utang Belanja Modal Jaringan, Jaringan, dan Irigasi	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		516.158.260,24	3.052.775.712,55

Saldo Utang Belanja Modal Jaringan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp516.158.260,24 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp3.052.775.712,55, maka terdapat kenaikan saldo Utang Belanja Modal Jaringan, Jaringan, dan Irigasi senilai Rp2.536.617.452,31 atau 83,09%.

5.3.2.1.3.3	Utang Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		0,00	62.240.924,00

Saldo Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp62.240.924,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, maka penurunan 100%. Penurunan tersebut dikarenakan instansi terkait telah menyalurkan dana untuk membayarkan kepada rekanan pada tahun pelaporan.

5.3.2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		170.656.804.678,70	133.970.594.000,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp170.656.804.678,70 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp133.970.594.000,00, maka terdapat kenaikan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya senilai Rp36.686.210.678,70 atau 27,38%. Kenaikan ini mencerminkan adanya kewajiban baru yang sangat signifikan pada tahun berjalan, khususnya yang bersumber dari utang kelebihan pembayaran transfer Pemerintah Pusat. Adapun rincian Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.124
Rincian Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2025

No	Uraian	Saldo 1 Januari 2025	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo 31 Desember 2025
1	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat	133.970.594.000,00	47.394.581.000,00	11.129.824.000,00	170.235.351.000,00
2	Utang Kelebihan Pembayaran Hibah	0,00	421.453.678,70	0,00	421.453.678,70
Total		133.970.594.000,00	47.816.034.678,70	11.129.824.000,00	170.656.804.678,70



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.3.2.1.4.1	Utang Kelembihan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Pembayaran Transfer	170.235.351.000,00	133.970.594.000,00
	Pemerintah Pusat- Dana		
	Perimbangan		

Saldo Utang Kelembihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat yang berasal dari Dana Perimbangan per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp170.235.351.000,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp133.970.594.000,00, maka terdapat kenaikan saldo Utang Kelembihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat yang Berasal dari Dana Perimbangan senilai Rp36.264.757.000,00 atau 27,07%.

Kenaikan tersebut merujuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2025. Secara keseluruhan, peningkatan ini mencerminkan adanya penyesuaian signifikan atas kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat terkait dana transfer. Adapun rincian Utang Kelembihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.125
Rekapitulasi Utang Kelembihan Pembayaran Transfer Pemerintah
Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2025

Uraian Dana Bagi Hasil	Lebih Bayar (LB)			
	Saldo Awal Utang TA 2024	Penyelesaian LB	LB s.d. TA 2024	Pembulatan
		s.d. TA 2023		LB s.d. TA 2023
1	2	3	4	5=2+4-3
Pajak	1.324.559.000,00	1.324.559.000,00	162.099.000,00	162.099.000,00
Bagian Daerah PBB Panas Bumi	0,00	0,00	162.099.000,00	162.099.000,00
Bagian Daerah Migas	1.123.643.000,00	1.123.643.000,00	0,00	0,00
Bagian Daerah Perkebunan	200.916.000,00	200.916.000,00	0,00	0,00
SDA	132.646.035.000,00	9.805.265.000,00	47.232.482.000,00	170.073.252.000,00
Minyak Bumi	3.355.294.000,00	3.355.294.000,00	1.171.410.000,00	1.171.410.000,00
Gas Bumi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Landrent	61.015.000,00	61.015.000,00	38.411.000,00	38.411.000,00
Royalti	123.344.418.000,00	6.388.955.000,00	42.814.634.000,00	159.770.097.000,00
IIUPH	0,00	0,00	0,00	0,00
PSDH	1.799.497.000,00	0,00	0,00	1.799.497.000,00
Perikanan	1.006.057.000,00	0,00	355.564.000,00	1.361.621.000,00
Perkebunan Sawit	3.079.753.000,00	0,00	2.852.463.000,00	5.932.216.000,00
Jumlah	133.970.594.000,00	11.129.824.000,00	47.394.581.000,00	170.235.351.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Berdasarkan tabel di atas, adapun rincian Lebih Bayar DBH terdapat pada **Lampiran 5.38.**

5.3.2.1.4.2	Utang Kelebihan Pembayaran Hibah	<u>31 Desember 2025</u> 421.453.678,70	<u>31 Desember 2024</u> 0,00

Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Hibah per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp421.453.678,70 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, maka terdapat kenaikan saldo Utang Kelebihan Pembayaran Hibah senilai Rp421.453.678,70 atau 100,00%. Utang tersebut merupakan kewajiban Pengembalian Sisa Dana Hibah berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) nomor:S-35/MK.7/2024 TA 2024 tanggal 30 Oktober 2024 dan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) nomor : PHD-66/MK.7/DTK.03/RR/2024 tanggal 14 November 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung mendapat dana hibah BNPB Senilai Rp17.314.145.000,00 untuk program bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dan pada tanggal 23 Desember 2024 anggaran tersebut telah di transfer dari RKUN ke RKUD Kabupaten Tana Tidung, dana dimaksud telah termanfaatkan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung pada TA 2025 untuk kegiatan sebagai berikut.

Tabel 5.126
Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Hibah Tahun 2025

No	Kegiatan	Nilai Pagu	Nilai Kontrak	Sisa Tender
1	Rehabilitasi Ruas Jalan Sambungan - Tengku Dacing STA 5+200-5+240 (lokasi 5)	4.967.672.000,00	4.712.998.572,60	254.673.427,40
2	Rehabilitasi Ruas Jalan Sambungan - Tengku Dacing STA 8+700-8+850 (lokasi 6)	12.346.473.000,00	12.179.692.748,70	166.780.251,30
Jumlah		17.314.145.000,00	16.892.691.321,30	421.453.678,70

Terdapat sisa dana dari sisa tender kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang tidak termanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan wajib dikembalikan ke RKUN sebagaimana diatur dalam Permenkeu Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana dan Peraturan Kepala BNPB No 9 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Rekonstruksi Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.3.2.2	Kewajiban Jangka Panjang	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		67.123.757.984,00	0,00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp67.123.757.984,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, maka terdapat kenaikan saldo Kewajiban Jangka Panjang senilai Rp67.123.757.984,00 atau 100,00%. Kenaikan dikarenakan Tuntutan dari PT PMJ kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung didasarkan bahwa selama Tahun 2008 s.d. 2010, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah menerima pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) senilai 6% dari harga jual batubara/ton yang dilakukan oleh PT PMJ. Total pembayaran kompensasi dari PT PMJ kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung selama Tahun 2008 s.d. 2010 tersebut senilai Rp67.123.757.984,00.

Namun demikian, Surat Gubernur Kaltim kepada Bupati Tana Tidung Nomor 545/203/Ek tanggal 11 Januari 2011 perihal Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral, menegaskan bahwa pungutan yang dikenakan kepada PT PMJ tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. PT PMJ kemudian melakukan gugatan perdata ke pengadilan untuk meminta pengembalian dana kompensasi tersebut. Sampai dengan tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali, menghasilkan keputusan bahwa Pemerintah Kabupaten Tana Tidung diwajibkan untuk mengembalikan dana KKSDA kepada PT PMJ senilai Rp67.123.757.984,00.

5.3.2.2.1	Utang Kepada Pihak Swasta	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		67.123.757.984,00	0,00

Saldo Utang Kepada Pihak Swasta per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp67.123.757.984,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, maka terdapat kenaikan saldo Utang Kepada Pihak Swasta senilai Rp67.123.757.984,00 atau 100%. Utang Kepada Pihak Swasta atas Utang Pemerintah daerah kepada PT. PMJ berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 22 April 2026 bahwa Pemerintah Tana Tidung akan melaksanakan pembayaran dengan metode cicilan yang dianggarkan pada tiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tahun 2027 sampai dengan tahun 2036.

5.3.3	Ekuitas	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		3.942.758.575.746,62	3.610.370.207.483,78

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Saldo Ekuitas tersebut di dalamnya sudah termasuk SAL akhir. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp3.942.758.575.746,62 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp3.610.370.207.483,78, maka terdapat kenaikan saldo Ekuitas senilai Rp332.388.368.262,84 atau 9,21%.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah Ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan, Beban, Transfer, dan Pos-Pos Luar Biasa. Laporan Operasional merupakan salah satu komponen Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan. Laporan Operasional TA 2025 disajikan secara komparatif dengan TA 2024.

5.4.1	Pendapatan-LO	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		1.028.473.552.676,30	983.691.175.744,73

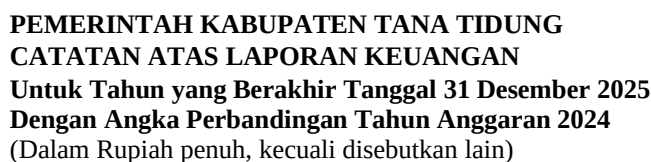
Pendapatan Laporan Operasional adalah pendapatan yang diperoleh dan menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Pendapatan-LO TA 2025 senilai Rp1.028.473.552.676,30. Jika dibandingkan dengan Pendapatan-LO TA 2024 senilai Rp983.691.175.744,73, maka Pendapatan-LO TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp44.782.376.931,57 atau 4,55%, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.127
Realisasi Pendapatan-LO

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	53.616.787.939,46	54.566.035.153,48
2	Pendapatan Transfer-LO	970.452.000.024,00	905.103.395.785,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	4.404.764.712,84	24.021.744.806,25
Jumlah		1.028.473.552.676,30	983.691.175.744,73

5.4.1.1	Pendapatan Asli Daerah-LO	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		53.616.787.939,46	54.566.035.153,48

Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2025 senilai Rp53.616.787.939,46. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah TA 2024 senilai Rp54.566.035.153,48, maka Pendapatan Asli Daerah TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp949.247.214,02 atau 1,74%. Penurunan tersebut dikarenakan adanya pembayaran TGR tahun sebelumnya yang disetorkan ke RKUD TA 2025 sehingga mengurangi pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Adapun Pendapatan Asli Daerah-LO dirincikan sebagai berikut.



Tabel 5.128

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Daerah-LO	10.729.155.449,26	7.646.855.773,58	3.082.299.675,68	40,31
2	Retribusi Daerah-LO	9.860.962.650,00	1.283.361.623,00	8.577.601.027,00	668,37
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	3.741.723.567,47	5.454.784.626,96	(1.713.061.059,49)	(31,40)
4	Lain-lain PAD Yang Sah- LO	29.284.946.272,73	40.181.033.129,94	(10.896.086.857,21)	(27,12)
Jumlah		53.616.787.939,46	54.566.035.153,48	(949.247.214,02)	(1,74)

Dari tabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO lainnya di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.1.1 Pajak Daerah-LO

31 Desember 2025
10.729.155.449,26

31 Desember 2024
7.646.855.773,58

Pajak Daerah-LO TA 2025 senilai Rp10.729.155.449,26. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2024 senilai Rp7.646.855.773,58, maka Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp3.082.299.675,68 atau 40,31%. Kenaikan tersebut dikarenakan PBJT, Opsen PKB dan Opsen BBNKB baru diberlakukan di TA 2025.

Adapun rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO sebagai berikut.

Tabel 5.129

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel	53.774.501,00	68.905.819,00	(15.131.318,00)	(21,96)
2	Pajak Restoran	3.896.347.555,00	3.647.520.930,00	248.826.625,00	6,82
3	Pajak Hiburan	3.567.800,00	1.500.000,00	2.067.800,00	137,85
4	Pajak Reklame	28.344.650,26	27.742.448,58	602.201,68	2,17
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	2.310.737.027,00	(2.310.737.027,00)	(100,00)
6	Pajak Air Tanah	7.747.709,00	6.803.950,00	943.759,00	13,87
7	Pajak Sarang Burung Walet	7.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	40,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	566.947.795,00	586.579.495,00	(19.631.700,00)	(3,35)
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	812.903.344,00	777.324.494,00	35.578.850,00	4,58
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan	214.788.550,00	214.741.610,00	46.940,00	0,02



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
	Bangunan (BPHTB)				
11	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	2.338.444.245,00	0,00	2.338.444.245,00	100,00
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.263.915.500,00	0,00	1.263.915.500,00	100,00
13	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.535.373.800,00	0,00	1.535.373.800,00	100,00
Jumlah		10.729.155.449,26	7.646.855.773,58	3.082.299.675,68	40,31

Perbedaan pengukuran Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan Pendapatan Pajak Daerah-LRA disebabkan oleh beberapa hal yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.130
Pengukuran Pajak Daerah pada LRA dan LO TA 2025

No	Uraian	Per 31-Des-25	Per 31-Des-25	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
1	Pajak Hotel	53.774.501,00	53.774.501,00	0,00	0,00	-
2	Pajak Restoran	3.895.327.555,00	3.896.347.555,00	(1.020.000,00)	1.020.000,00	Piutang Pajak asli daerah TA 2024 dan 2025-Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
3	Pajak Hiburan	3.567.800,00	3.567.800,00	0,00	0,00	-
4	Pajak Reklame	18.950.430,00	28.344.650,26	(9.394.220,26)	(5.706.807,17)	Pendapatan diterima dimuka TA 2025 pada BPKAD
					13.465.575,00	Pendapatan diterima dimuka TA 2025 pada BPKAD
					1.098.651,00	Piutang Pajak asli daerah TA 2024 dan 2025
					732.989,43	koreksi lebih saji atas pendapatan diterima dimuka atas Pajak Reklame (Audited)
					(196.188,00)	Koreksi pengakuan atas kurang saji Piutang Pajak Reklame dan MBLB TA 2024 yang tidak tercatat pada LK TA 2024 Audited
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	Pajak Air Tanah	7.747.709,00	7.747.709,00	0,00	0,00	-
7	Pajak Sarang Burung Walet	2.000.000,00	7.000.000,00	(5.000.000,00)	5.000.000,00	Piutang Pajak asli daerah TA 2024 dan 2025
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	576.808.547,00	566.947.795,00	9.860.752,00	(9.625.752,00)	Pembayaran Piutang MBLB



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Per 31-Des-25	Per 31-Des-25	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
					(235.000,00)	Pembayaran Piutang MBLB
					18.335.100,00	Laporan piutang pajak asli daerah TA 2024 2025
					(18.335.100,00)	Koreksi pengakuan atas kurang saji Piutang Pajak Reklame dan MBLB TA 2024 yang tidak tercatat pada LK TA 2024 Audited
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	381.340.986,00	812.903.344,00	(431.562.358,00)	(381.340.986,00)	Ketetapan, Pembayaran Pokok dan Penyisihan Piutang PBBP2 TA 2025
					812.903.344,00	
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	214.788.550,00	214.788.550,00	0,00	0,00	-
11	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	2.286.782.883,00	2.338.444.245,00	(51.661.362,00)	51.661.362,00	Laporan piutang pajak asli daerah TA 2024 2025
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.263.915.500,00	1.263.915.500,00	0,00	0,00	-
13	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.535.373.800,00	1.535.373.800,00	0,00	0,00	-
Jumlah		10.240.378.261,00	10.729.155.449,26	(488.777.188,26)	488.777.188,26	

5.4.1.1.2 Retribusi Daerah-LO **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
9.860.962.650,00 **1.283.361.623,00**

Retribusi Daerah-LO TA 2025 senilai Rp9.860.962.650,00. Jika dibandingkan dengan Retribusi Daerah-LO TA 2024 senilai Rp1.283.361.623,00, maka Retribusi Daerah-LO TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp8.577.601.027,00 atau 668,37%. Pendapatan Retribusi Daerah-LO mengalami kenaikan karena:

- Penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga masih ada di bendahara penerimaan yang terlambat disetorkan ke kas daerah
- Adanya kesalahan penganggaran penempatan akun yang seharusnya di pendapatan BLUD ke akun retribusi pelayanan kesehatan

Perbedaan pengukuran Pendapatan Retribusi Daerah-LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah LRA mengalami selisih.

Adapun rincian Retribusi Daerah-LO sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel 5.131
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.993.248.418,00	658.353.989,00	8.334.894.429,00	1.266,02
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	62.778.000,00	31.788.000,00	30.990.000,00	97,49
3	Retribusi Pelayanan Pasar	75.605.000,00	48.603.000,00	27.002.000,00	55,56
4	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	11.950.000,00	3.850.000,00	8.100.000,00	210,39
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	12.287.200,00	62.669.940,00	(50.382.740,00)	(80,39)
6	Retribusi Tempat Khusus Parkir	157.825.000,00	54.000.000,00	103.825.000,00	192,27
7	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	411.984.000,00	320.668.000,00	91.316.000,00	28,48
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	89.488.713,00	77.661.500,00	11.827.213,00	15,23
9	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	21.069.000,00	0,00	21.069.000,00	100,00
10	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	24.727.319,00	25.767.194,00	(1.039.875,00)	(4,04)
Jumlah		9.860.962.650,00	1.283.361.623,00	8.577.601.027,00	668,37

Perbedaan pengukuran Pendapatan Retribusi Daerah-LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah LRA disebabkan oleh beberapa hal yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.132
Pengukuran Retribusi Daerah pada LRA dan LO TA 2025

No	Uraian	Per 31 Desember 2025		Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.960.041.275,00	8.993.248.418,00	(33.207.143,00)	33.207.143,00	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Pelayanan
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	62.778.000,00	62.778.000,00	0,00	0,00	-
3	Retribusi Pelayanan Pasar	75.483.000,00	75.605.000,00	(122.000,00)	45.000,00 77.000,00	Koreksi kurang saji atas Piutang Retribusi - Jasa Umum - Pelayanan Pasar - Los dan Pelataran
4	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	11.594.750,00	11.950.000,00	(355.250,00)	355.250,00	Kas dibendahara Penerimaan TA 2025 yang baru disetorkan pada Tahun 2026



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Per 31 Desember 2025		Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	12.287.200,00	12.287.200,00	0,00	0,00	-
6	Retribusi Tempat Khusus Parkir	157.825.000,00	157.825.000,00	0,00	0,00	-
7	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	411.984.000,00	411.984.000,00	0,00	0,00	-
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	91.280.713,00	89.488.713,00	1.792.000,00	(1.792.000,00)	Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang terlambat setor
9	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	43.844.000,00	21.069.000,00	22.775.000,00	(26.766.666,67)	Pendapatan diterima dimuka TA 2025 pada BPKAD
					6.000.000,00	
					2.250.000,00	Koreksi kurang saji atas pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah - LO atas sewa ruko pada pasar Trans Betayau
					(4.258.333,33)	Koreksi PDD Sewa Gedung Galery ATM Pasar Imbayud Taka KTT
10	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	24.727.319,00	24.727.319,00	0,00	0,00	-
Jumlah		9.851.845.257,00	9.860.962.650,00	(9.117.393,00)	9.117.393,00	

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
3.741.723.567,47 **5.454.784.626,96**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2025 senilai Rp3.741.723.567,47. Jika dibandingkan dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2024 senilai Rp5.454.784.626,96, maka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp1.713.061.059,49 atau 31,40%. Penurunan realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari dividen atas penyertaan modal pada Bankaltimtara dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh tidak dilakukannya penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Penurunan persentase kepemilikan tersebut berdampak langsung terhadap penurunan proporsi hak atas laba (Dividen) yang diterima oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian, meskipun kinerja keuangan Bankaltimtara secara umum tidak mengalami penurunan yang signifikan, kontribusi dividen menunjukkan tren menurun seiring dengan perubahan komposisi kepemilikan saham.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.4.1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah-LO	31 Desember 2025 29.284.946.272,73	31 Desember 2024 40.181.033.129,94

Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2025 senilai Rp29.284.946.272,73. Jika dibandingkan dengan Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2024 senilai Rp40.181.033.129,94, maka Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp10.896.086.857,21 atau 27,12%. Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah-LO mengalami penurunan karena berkurangnya pendapatan remunerasi atas penempatan dana pada fasilitas TDF. Kondisi ini merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan strategis pengelolaan kas daerah, khususnya melalui percepatan dan peningkatan volume penarikan dana dari instrumen TDF untuk memenuhi belanja program dan kegiatan pemerintah daerah. Adapun rincian Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah-LO sebagai berikut.

Tabel 5.133
Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah-LO

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	258.133.908,00	231.524.500,00
2	Hasil Kerja Sama Daerah	102.780.102,00	113.525.196,00
3	Jasa Giro pada Kas Daerah	9.456.098.561,28	7.609.090.345,26
4	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	9.967.893,00	8.124.678,63
5	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.931.498.473,22	14.893.284.569,00
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	25.553.000,00	0,00
7	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	9.438.881.516,17	10.060.131.401,47
8	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	59.518.239,39	2.000.000,00
9	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.466.745.068,39	243.302.587,58
10	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	19.323.042,00	3.048.884,00
11	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	279.639.000,00	0,00
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	37.196.700,00	0,00
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	74.228.798,00	118.758.853,00
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	854.336,43	0,00
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	24.465.000,00	71.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.745.868.516,16	1.874.408,00
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	699.046.439,51	0,00
18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	1.045.922.741,47	0,00
19	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	677.828,00	0,00
20	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1.608.547.109,71	6.896.296.607,00
Jumlah		29.284.946.272,73	40.181.033.129,94

Perbedaan pengukuran Lain-lain PAD Yang Sah-LO dengan Lain-lain PAD Yang Sah LRA disebabkan oleh beberapa hal yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.134
Pengukuran Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah pada LRA dan LO TA 2025

No	Uraian	Per 31-Des-25	Per 31-Des-25	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
1	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	258.133.908,00	258.133.908,00	0,00	0,00	-
2	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	102.780.102,00	(102.780.102,00)	102.780.102,00	Pendapatan diterima dimuka TA 2025 pada BPKAD
3	Jasa Giro pada Kas Daerah	9.456.098.561,28	9.456.098.561,28	0,00	0,00	-
4	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	9.967.893,00	9.967.893,00	0,00	0,00	-
5	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.931.498.473,22	2.931.498.473,22	0,00	0,00	-
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	25.553.000,00	25.553.000,00	0,00	0,00	-
7	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	10.048.483.421,66	9.438.881.516,17	609.601.905,49	(610.561.905,49)	Pengembalian atas Kerugian Daerah yang telah di jurnal koreksi ke Piutang Pendapatan pada saat LKPD Audited 2024
					960.000,00	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Per 31-Des-25	Per 31-Des-25	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
8	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	59.518.239,39	59.518.239,39	0,00	0,00	-
9	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.471.713.241,39	1.466.745.068,39	4.968.173,00	(4.968.173,00)	Pembayaran atas Denda Keterlambatan Pekerjaan tanggal 20 Desember 2023 pada Dinas Kesehatan
10	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	19.323.042,00	19.323.042,00	0,00	0,00	-
11	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	279.639.000,00	279.639.000,00	0,00	0,00	-
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	37.196.700,00	37.196.700,00	0,00	0,00	-
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	74.228.798,00	74.228.798,00	0,00	0,00	-
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	179.638.258,79	854.336,43	178.783.922,36	(178.783.922,36)	Piutang Uang Muka atas Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Menjelutung (MTL) dengan Nomor Kontrak 600.640/SP/T-079.1/CK/XI/2022
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	24.465.000,00	24.465.000,00	0,00	0,00	-
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.745.868.516,16	1.745.868.516,16	0,00	0,00	-
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	699.046.439,51	699.046.439,51	0,00	0,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Per 31-Des-25	Per 31-Des-25	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	1.045.922.741,47	1.045.922.741,47	0,00	0,00	-
19	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	677.828,00	677.828,00	0,00	0,00	-
20	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	2.157.214.245,71	1.608.547.109,71	548.667.136,00	(20.233.336,00) (528.433.800,00)	Pembayaran atas Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Akhmad Berahim
Jumlah		30.524.187.307,58	29.284.946.272,73	1.239.241.034,85	(1.239.241.034,85)	

5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
970.452.000.024,00 **905.103.395.785,00**

Pendapatan Transfer-LO TA 2025 senilai Rp970.452.000.024,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LO TA 2024 senilai Rp905.103.395.785,00, maka Pendapatan Transfer-LO TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp65.348.604.239,00 atau 7,22%. Adapun rincian realisasi Pendapatan Transfer-LO sebagai berikut.

Tabel 5.135
Rincian Realisasi Pendapatan Transfer-LO

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	925.326.985.171,00	832.161.889.472,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	45.125.014.853,00	72.941.506.313,00
Jumlah		970.452.000.024,00	905.103.395.785,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.4.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	<u>31 Desember 2025</u> 925.326.985.171,00	<u>31 Desember 2024</u> 832.161.889.472,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO TA 2025 senilai Rp925.326.985.171,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO TA 2024 senilai Rp832.161.889.472,00, maka Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp93.165.095.699,00 atau 11,20%. Kenaikan tersebut mengindikasikan adanya perluasan atau peningkatan kinerja penyaluran dana perimbangan dari APBN ke APBD, pemenuhan syarat salur Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun peningkatan bagi hasil pajak akibat membaiknya indikator ekonomi makro di tahun berjalan. Adapun rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO sebagai berikut.

Tabel 5.136
Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO	918.330.887.171,00	817.997.845.472,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	6.996.098.000,00	14.164.044.000,00
Jumlah		925.326.985.171,00	832.161.889.472,00

5.4.1.2.1.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO	<u>31 Desember 2025</u> 918.330.887.171,00	<u>31 Desember 2024</u> 817.997.845.472,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO TA 2025 senilai Rp918.330.887.171,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO TA 2024 senilai Rp817.997.845.472,00, maka Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp100.333.041.699,00 atau 12,27%. Adapun rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO sebagai berikut.

Tabel 5.137
Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dana Bagi Hasil-LO	482.476.199.300,00	351.689.041.319,00	130.787.157.981,00	37,19
2	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	397.312.680.666,00	425.690.872.922,00	(28.378.192.256,00)	(6,67)
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	38.542.007.205,00	40.617.931.231,00	(2.075.924.026,00)	(5,11)
Jumlah		918.330.887.171,00	817.997.845.472,00	100.333.041.699,00	12,27



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.4.1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil-LO **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
482.476.199.300,00 **351.689.041.319,00**

Dana Bagi Hasil-LO TA 2025 senilai Rp482.476.199.300,00. Jika dibandingkan dengan Dana Bagi Hasil-LO TA 2024 senilai Rp351.689.041.319,00, maka Dana Bagi Hasil-LO TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp130.787.157.981,00 atau 37,19%. Adapun rincian Dana Bagi Hasil-LO sebagai berikut.

Tabel 5.138
Rincian Dana Bagi Hasil-LO

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	183.270.997.800,00	18.912.969.000,00	164.358.028.800,00	869,02
2	Bagi Hasil dari Pasal 21	5.092.377.300,00	65.120.009.401,00	(60.027.632.101,00)	(92,18)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN	169.387.200,00	122.031.000,00	47.356.200,00	38,81
4	DBH CHT	0,00	896,00	(896,00)	(100,00)
5	DBH SDA Minyak Bumi	392.475.000,00	363.031.000,00	29.444.000,00	8,11
6	DBH SDA Gas Bumi	156.127.000,00	0,00	156.127.000,00	100,00
7	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	274.268.000,00	264.432.000,00	9.836.000,00	3,72
8	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	286.545.638.000,00	260.557.478.310,00	25.988.159.690,00	9,97
9	DBH SDA Kehutanan-PSDH	2.323.315.000,00	3.230.801.712,00	(907.486.712,00)	(28,09)
10	DBH SDA Kehutanan-IIUPH	328.325.000,00	0,00	328.325.000,00	100,00
11	Bagi Hasil dari SDA Perikanan	1.174.532.000,00	572.319.000,00	602.213.000,00	105,22
12	Bagi Hasil dari Sawit	2.748.757.000,00	2.545.969.000,00	202.788.000,00	7,97
Jumlah		482.476.199.300,00	351.689.041.319,00	130.787.157.981,00	37,19

Perbedaan pengukuran Pendapatan DBH-Pajak dan DBH-SDA-LO dengan Pendapatan DBH-Pajak dan DBH-SDA LRA disebabkan oleh beberapa hal yang disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel 5.139

Pengukuran DBH-Pajak dan DBH-SDA pada LRA dan LO TA 2025

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2025	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	203.634.442.000,00	183.270.997.800,00	20.363.444.200,00	(20.363.444.200,00)	RPKBUN. SPAN-MDRI DBH PPH 21, PPH 25/29, PBB NON MIGAS, PBB PERKEBUNAN, PBB LAINNYA, PBB MIGAS, PBB PERHUTANAN DESEMBER 2025 (RTGS/094913/025)
2	Bagi Hasil dari Pasal 21	5.658.197.000,00	5.092.377.300,00	565.819.700,00	(565.819.700,00)	DBH PBB Februari 2025 (RPKBUN.SPAN-MDRI/RTGS/113201/022)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN	188.208.000,00	169.387.200,00	18.820.800,00	(18.820.800,00)	RPKBUN. SPAN-MDRI DBH PPH 21, PPH 25/29, PBB NON MIGAS, PBB PERKEBUNAN, PBB LAINNYA, PBB MIGAS, PBB PERHUTANAN DESEMBER 2025 (RTGS/094913/025)
4	DBH SDA Minyak Bumi	392.475.000,00	392.475.000,00	0,00	0,00	-
5	DBH SDA Gas Bumi	156.127.000,00	156.127.000,00	0,00	0,00	-
6	DBH SDA Mineral dan Batubara Landrent	274.268.000,00	274.268.000,00	0,00	0,00	-
7	DBH SDA Mineral dan Batubara Royalty	286.545.638.000,00	286.545.638.000,00	0,00	0,00	-
8	DBH SDA Kehutanan PSDH	2.323.315.000,00	2.323.315.000,00	0,00	0,00	-
9	DBH SDA Kehutanan IIUPH	328.325.000,00	328.325.000,00	0,00	0,00	-
10	Bagi Hasil dari SDA Perikanan	1.174.532.000,00	1.174.532.000,00	0,00	0,00	-
11	Bagi Hasil dari Sawit	2.748.757.000,00	2.748.757.000,00	0,00	0,00	-
Jumlah		503.424.284.000,00	482.476.199.300,00	20.948.084.700,00	(20.948.084.700,00)	

5.4.1.2.1.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

31 Desember 2025
397.312.680.666,00

31 Desember 2024
425.690.872.922,00

Dana Alokasi Umum (DAU)-LO TA 2025 senilai Rp397.312.680.666,00. Jika dibandingkan dengan Dana Alokasi Umum (DAU)-LO TA 2024 senilai Rp425.690.872.922,00, maka Dana Alokasi Umum (DAU)-LO TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp28.378.192.256,00 atau 6,67%. Adapun rincian Dana Alokasi Umum (DAU)-LO disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel 5.140
Rincian Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	339.966.356.410,00	349.264.548.000,00	(9.298.191.590,00)	(2,66)
2	Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK	5.381.538.256,00	5.756.624.922,00	(375.086.666,00)	(6,52)
3	Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan	38.264.051.000,00	25.678.444.000,00	12.585.607.000,00	49,01
4	Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan	13.700.735.000,00	13.513.380.000,00	187.355.000,00	1,39
5	Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum	0,00	31.477.876.000,00	(31.477.876.000,00)	(100,00)
Jumlah		397.312.680.666,00	425.690.872.922,00	(28.378.192.256,00)	(6,67)

5.4.1.2.1.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
38.542.007.205,00 **40.617.931,231,00**

Dana Alokasi Khusus-LO TA 2025 senilai Rp38.542.007.205,00. Jika dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus-LO TA 2024 senilai Rp40.617.931.231,00, maka Dana Alokasi Khusus-LO TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp2.075.924.026,00 atau 5,11%. Dana Alokasi Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Adapun rincian Dana Alokasi Khusus-LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.141
Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik-LO

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	0,00	9.560.668.240,00	(9.560.668.240,00)	(100,00)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.810.611.370,00	0,00	10.810.611.370,00	0,00
3	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	2.247.694.000,00	1.901.850.564,00	345.843.436,00	18,18
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	3.401.703.628,00	(3.401.703.628,00)	(100,00)
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	775.285.700,00	(775.285.700,00)	(100,00)
6	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	1.601.422.598,00	(1.601.422.598,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
7	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	960.209.895,00	(960.209.895,00)	(100,00)
8	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	5.776.158.629,00	(5.776.158.629,00)	(100,00)
9	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	597.500.000,00	(597.500.000,00)	(100,00)
10	DAK Non Fisik-TPG PNSD	8.281.449.600,00	6.365.703.000,00	1.915.746.600,00	30,09
11	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	675.000.000,00	296.662.000,00	378.338.000,00	127,53
12	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.500.258.320,00	1.048.181.000,00	452.077.320,00	43,13
13	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.011.530.000,00	971.392.800,00	40.137.200,00	4,13
14	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan	310.608.878,00	306.144.300,00	4.464.578,00	1,46
15	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	303.988.000,00	0,00	303.988.000,00	0,00
16	DAK Non Fisik-BOKB-KB	831.212.900,00	792.301.156,00	38.911.744,00	4,91
17	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	297.446.000,00	361.791.000,00	(64.345.000,00)	(17,79)
18	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	5.940.759.247,00	0,00	5.940.759.247,00	0,00
19	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	608.500.000,00	0,00	608.500.000,00	0,00
20	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3.451.051.374,00	2.267.923.772,00	1.183.127.602,00	52,17
21	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	2.209.197.516,00	3.633.032.949,00	(1.423.835.433,00)	(39,19)
22	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	62.700.000,00	0,00	62.700.000,00	0,00
Jumlah		38.542.007.205,00	40.617.931.231,00	(2.075.924.026,00)	(5,11)

Tabel 5.142

Pengukuran Dana Alokasi Khusus (DAK) pada LRA dan LO TA 2025

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2025	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
1	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler Perpustakaan Daerah	10.810.611.370,00	10.810.611.370,00	0,00	0,00	-
2	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Pelayanan Kesehatan Dasar	2.247.694.000,00	2.247.694.000,00	0,00	0,00	-
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	8.281.449.600,00	8.281.449.600,00	0,00	0,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2025	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
4	DAK Non FisikTamsil Guru PNSD	675.000.000,00	675.000.000,00	0,00	0,00	-
5	DAK Non FisikTKG PNSD	1.500.258.320,00	1.500.258.320,00	0,00	0,00	-
6	DAK Non FisikBOP PAUD	1.011.530.000,00	1.011.530.000,00	0,00	0,00	-
7	DAK Non FisikBOP Pendidikan Kesetaraan	310.608.878,00	310.608.878,00	0,00	0,00	-
8	DAK Non FisikBOKKBPengawasa n Obat dan Makanan	303.988.000,00	303.988.000,00	0,00	0,00	-
9	DAK Non Fisik BOKB KB	831.212.900,00	831.212.900,00	0,00	0,00	-
10	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	297.446.000,00	297.446.000,00	0,00	0,00	-
11	DAK Non Fisik Dana BOSP BOS Reguler	5.940.759.247,00	5.940.759.247,00	0,00	0,00	-
12	DAK Non Fisik Dana BOSP BOS Kinerja	608.500.000,00	608.500.000,00	0,00	0,00	-
13	DAK Non Fisik - Dana BOK - BOK Dinas - BOK Kabupaten/Kota	3.451.051.374,00	3.451.051.374,00	0,00	0,00	-
14	DAK Non Fisik - Dana BOK - BOK Puskesmas	2.209.197.516,00	2.209.197.516,00	0,00	0,00	-
15	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	62.700.000,00	62.700.000,00	0,00	0,00	-
Jumlah		38.542.007.205,00	38.542.007.205,00	0,00	0,00	

5.4.1.2.1.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

31 Desember 2025
6.996.098.000,00

31 Desember 2024
14.164.044.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO TA 2025 senilai Rp6.996.098.000,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO TA 2024 senilai Rp14.164.044.000,00, maka Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp7.167.946.000,00 atau 50,61%. Realisasi Insentif Fiskal mengalami penurunan karena secara nasional alokasi anggaran Insentif Fiskal mengalami penurunan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.4.1.2.1.2.1	Insentif Fiskal-LO	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		6.996.098.000,00	14.164.044.000,00

Insentif Fiskal-LO TA 2025 dianggarkan senilai Rp6.996.098.000,00 dan terealisasi senilai Rp6.996.098.000,00 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi Insentif Fiskal-LO TA 2024 senilai Rp14.164.044.000,00, Insentif Fiskal-LO TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp7.167.946.000,00 atau 50,61%. Penurunan signifikan tersebut terjadi karena anggaran Insentif Fiskal-LO TA 2025 disebabkan adanya efisiensi anggaran transfer ke daerah sesuai dengan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN/APBD dan PMK Nomor 56 Tahun 2025.

5.4.1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		45.125.014.853,00	72.941.506.313,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO TA 2025 senilai Rp45.125.014.853,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO TA 2024 senilai Rp72.941.506.313,00, maka Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp27.816.491.460,00 atau 38,14%. Adapun rincian Pendapatan Transfer Daerah-LO sebagai berikut.

Tabel 5.143
Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Bagi Hasil-LO	43.390.519.601,00	35.037.618.142,00	8.352.901.459,00	23,84
2	Bantuan Keuangan-LO	1.734.495.252,00	37.903.888.171,00	(36.169.392.919,00)	(95,42)
Jumlah		45.125.014.853,00	72.941.506.313,00	(27.816.491.460,00)	(38,14)

5.4.1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil-LO	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		43.390.519.601,00	35.037.618.142,00

Pendapatan Bagi Hasil-LO TA 2025 senilai Rp43.390.519.601,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasil-LO TA 2024 senilai Rp35.037.618.142,00, maka Pendapatan Bagi Hasil-LO TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp8.352.901.459,00 atau 23,84%. Pendapatan Bagi Hasil-LO terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.4.1.2.2.1.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		43.390.519.601,00	35.037.618.142,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO TA 2025 senilai Rp43.390.519.601,00 Jika dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO TA 2024 senilai Rp35.037.618.142,00, maka Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp8.352.901.459,00 atau 23,84%. Adapun rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO sebagai berikut.

Tabel 5.144
Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	21.486.601,00	981.138.634,00
2	Bagi Hasil Dari Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor	19.747.464,00	1.334.747.398,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	39.284.778.212,00	31.156.253.282,00
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	430.926.194,00	167.703.676,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.633.581.130,00	1.397.775.152,00
Jumlah		43.390.519.601,00	35.037.618.142,00

Perbedaan pengukuran Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA disebabkan oleh beberapa hal yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.145
Pengukuran Pendapatan Bagi Hasil Pajak pada LRA dan LO TA 2025

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2025	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.041.729.317,00	21.486.601,00	1.020.242.716,00	(1.020.242.716,00)	Penetapan Definitif DBH Pajak Daerah Provinsi TA 2023 berdasarkan SK Definitif Dana bagi Hasil Pajak Daerah TA 2023 berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Utara, Nomor : 188.44/K. 396/2024
2	Bagi Hasil Dari Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.006.109.112,00	19.747.464,00	986.361.648,00	(986.361.648,00)	Penetapan Definitif DBH Pajak Daerah Provinsi TA 2023 berdasarkan SK Definitif Dana bagi Hasil Pajak Daerah TA 2023 berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Utara, Nomor : 188.44/K. 396/2024



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2025	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	40.076.502.956,00	39.284.778.212,00	791.724.744,00	(13.306.660.043,00)	Penetapan Definitif DBH Pajak Daerah Provinsi TA 2023 berdasarkan SK Definitif Dana bagi Hasil Pajak Daerah TA 2023 berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Utara, Nomor : 188.44/K. 396/2024
					12.535.734.380,00	Penetapan Definitif DBH Pajak Daerah Provinsi TA 2025 berdasarkan SK Definitif Dana bagi Hasil Pajak Daerah TA 2025 berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Utara, Nomor : 100.3.3.1/55/2026
					(20.799.081,00)	Salah saji atas pendapatan LO yang seharusnya terjurnal pada akun koreksi ekuitas atas pengakuan kurang bayar (piutang) yang belum diakui pada TA 2024 Audited, sesuai SK Gubernur Nomor 188.44/K.396/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 188.44/K.89/2024 tentang Penetapan Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah PBBKB
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (AP)	445.925.014,00	430.926.194,00	14.998.820,00	(129.358.548,00)	Penetapan Definitif DBH Pajak Daerah Provinsi TA 2023 berdasarkan SK Definitif Dana bagi Hasil Pajak Daerah TA 2023 berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Utara, Nomor : 188.44/K. 396/2024
					114.359.728,00	Penetapan Definitif DBH Pajak Daerah Provinsi TA 2025 berdasarkan SK Definitif Dana bagi Hasil Pajak Daerah TA 2025 berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Utara, Nomor : 100.3.3.1/55/2026
5	Bagi Hasil Pajak Lainnya/Pajak Rokok	3.633.581.130,00	3.633.581.130,00	0,00	0,00	-
Jumlah		46.203.847.529,00	43.390.519.601,00	2.813.327.928,00	(2.813.327.928,00)	

5.4.1.2.2.2 Bantuan Keuangan-LO 31 Desember 2025 31 Desember 2024
1.734.495.252,00 37.903.888.171,00

Bantuan Keuangan-LO TA 2025 terealisasi senilai Rp1.734.495.252,00, jika dibandingkan dengan realisasi Bantuan Keuangan-LO TA 2024 senilai Rp37.903.888.171,00, Bantuan Keuangan-LO TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp36.169.392.919,00 atau 95,42%. Penurunan signifikan



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

tersebut terjadi karena alokasi Bantuan Keuangan Umum-LO TA 2025 nihil atau tidak mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Adapun rincian Bantuan Keuangan-LO sebagai berikut.

Tabel 5.146

Rincian Realisasi Bantuan Keuangan-LO

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	29.750.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.734.495.252,00	8.153.888.171,00
Jumlah		1.734.495.252,00	37.903.888.171,00

Tabel 5.147

Pengukuran Bantuan Keuangan pada LRA dan LO TA 2025

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2025	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.734.495.252,00	1.734.495.252,00	0,00	0,00	-
Jumlah		1.734.495.252,00	1.734.495.252,00	0,00	0,00	

5.4.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	<u>31 Desember 2025</u> 4.404.764.712,84	<u>31 Desember 2024</u> 24.021.744.806,25

Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO TA 2025 senilai Rp4.404.764.712,84. Jika dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO TA 2024 senilai Rp24.021.744.806,25, maka terdapat penurunan senilai Rp19.616.980.093,41 atau 81,66%. Lain-lain Pendapatan Yang Sah dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.3.1	Pendapatan Hibah-LO	<u>31 Desember 2025</u> 4.332.967.133,84	<u>31 Desember 2024</u> 22.305.690.506,25

Pendapatan Hibah-LO TA 2025 senilai Rp4.332.967.133,84. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah-LO TA 2024 senilai Rp22.305.690.506,25, maka Pendapatan Hibah-LO TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp17.972.723.372,41 atau 80,57%. Pendapatan Hibah-LO mengalami penurunan yang signifikan karena tidak adanya alokasi atau transfer dana hibah dari pemerintah pusat dibandingkan tahun sebelumnya yang memiliki realisasi



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

cukup besar. Adapun rincian Pendapatan Hibah-LO disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.148
Pendapatan Hibah-LO

Uraian		SKPD	Jenis Peruntukan Hibah	Nilai
A. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat :				3.042.274.734,30
1	Penambahan Hibah dari Perpustakaan Nasional RI :			
	Peralatan dan Mesin (057.01.1.531535/2025 Tanggal 13 Agustus 2025)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Peralatan Personal Computer	7.543.662,00
			Personal Computer	19.789.801,00
	Aset Tetap Lainnya (Buku) (43625/4.2/PLK.03.07/X.2025 Tanggal 03 November 2025)		Buku Umum	10.457.635,00
			Buku Ilmu Sosial	6.503.398,00
			Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	12.502.139,00
			Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	483.457,00
			Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	1.477.571,00
2	Peralatan dan Mesin, dan Rak Buku		PUSKESMAS TIDENG PALE	Buku Umum
		Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor		1.498.500,00
		PUSKESMAS TANA LIA	Buku Umum	7.236.181,00
		PUSKESMAS SESAYAP HILIR	Buku Umum	7.254.636,00
			Lemari dan Arsip Pejabat	1.498.500,00
		PUSKESMAS MURUK RIAN	Buku Umum	7.235.988,00
			Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.498.500,00
		PUSKESMAS KUJAU	Buku Umum	7.236.181,00
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.299.999,81			
3	Penambahan Hibah dari Kementerian Kesehatan :			
	Penerimaan dari Kementerian Kesehatan berupa Peralatan dan Mesin	DINAS KESEHATAN	Alat Kesehatan Umum Lainnya	3.658.653,00
			Obat	395.731.075,00
			Bahan Cetak	264.200,00
4	Penambahan Hibah dari Direktorat Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal :			



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Uraian		SKPD	Jenis Peruntukan Hibah	Nilai
	Penambahan Aset Tetap terhadap Pendapatan Hibah Aset Tetap Peralatan Mesin dan Gedung Bangunan, BAST:000.1.2.3/0166/SPNF.SK B.KTT/XII/2025 Tanggal 29 Desember 2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Alat Kantor Lainnya	114.232.000,00
			Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.012.320.000,00
			Komputer Jaringan	7.750.000,00
			Peralatan Jaringan	7.750.000,00
			Peralatan Komputer Lainnya	6.496.000,00
			Personal Komputer	136.416.000,00
			Kursi Kerja Pejabat	3.000.000,00
			Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00
			Meubelair	14.600.000,00
			Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	953.541.309,49
5	Penambahan Hibah dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian :			
	Peralatan dan Mesin berdasarkan BAST Nomor 1424/PSP.KP/BMN/B/12/2025 Tanggal 31 Desember 2025	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	277.763.360,00
B. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya :				1.290.692.399,54
6	Penambahan Hibah dari Provinsi Kaltara :			
	Penerimaan dari Dinkes Prov Kaltara	DINAS KESEHATAN	Obat	1.159.770.404,54
7	Penerimaan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN	Obat	14.310.597,00
8	Penerimaan dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	30.959.398,00
9	Penerimaan dari Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Bahan Cetak	20.364.000,00
			Bahan Cetak	20.364.000,00
			Bahan Cetak	42.284.000,00
			Bahan Komputer	2.640.000,00
Jumlah A + B				4.332.967.133,84



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.4.1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	<u>31 Desember 2025</u> 71.797.579,00	<u>31 Desember 2024</u> 1.716.054.300,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO TA 2025 senilai Rp71.797.579,00. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp1.716.054.300,00, maka Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp1.644.256.721,00 atau 95,82%, yang merupakan penurunan dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Penurunan tersebut disebabkan Seluruh Puskesmas TA 2025 Tidak menerima Pendapatan Dana Kapitasi JKN, karena Puskesmas sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Sesuai Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 100.3.3.2/426/K-X11/2024 pada tanggal 24 Desember 2024, Tentang Penerapan Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD di Kabupaten Tana Tidung.

5.4.1.3.2.1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	<u>31 Desember 2025</u> 71.797.579,00	<u>31 Desember 2024</u> 1.716.054.300,00

Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO TA 2025 senilai Rp71.797.579,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO TA 2024 senilai Rp1.716.054.300,00, maka Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp1.644.256.721,00 atau 95,82%. Adapun rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.149
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Puskesmas Tideng Pale	0,00	748.636.237,00
2	Puskesmas Sesayap Hilir	0,00	464.209.583,00
3	Puskesmas Tana Lia	0,00	219.391.136,00
4	Puskesmas Kujau	0,00	211.439.105,00
5	RSUD Akhmad Berahim	0,00	0,00
6	Puskesmas Muruk Rian	0,00	72.378.239,00
7	RSD Pratama Tanjung Keramat	71.797.579,00	0,00
Jumlah		71.797.579,00	1.716.054.300,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.4.2	Beban	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		949.881.863.933,31	1.089.206.567.844,34

Beban untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tercatat senilai Rp949.881.863.933,31, jika dibandingkan dengan realisasi beban pada periode 31 Desember 2024 senilai Rp1.089.206.567.844,34, maka beban pada tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp139.324.703.911,03 atau 12,79%. Adapun rincian atas beban tersebut adalah sebagai berikut;

5.4.2.1	Beban Operasi	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		857.922.496.410,31	983.619.991.794,34

Beban Operasi TA 2025 senilai Rp857.992.496.410,31. Jika dibandingkan dengan beban operasi TA 2024 senilai Rp983.619.991.794,34 maka Beban Operasi TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp125.697.495.384,03 atau 12,78%. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.150
Rincian Beban Operasi

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Beban Pegawai	314.479.737.531,00	316.377.435.083,00	(1.897.697.552,00)	(0,60)
2	Beban Barang dan Jasa	309.331.871.936,46	390.791.123.553,54	(81.459.251.617,08)	(20,84)
3	Beban Hibah	23.075.271.125,00	35.692.558.871,00	(12.617.287.746,00)	(35,35)
4	Beban Bantuan Sosial	243.500.000,00	0,00	243.500.000,00	0,00
5	Beban Penyisihan Piutang	1.610.360.246,38	395.946.180,53	1.214.414.065,85	306,71
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	209.181.755.571,47	240.362.928.106,27	(31.181.172.534,80)	(12,97)
Jumlah		857.922.496.410,31	983.619.991.794,34	(125.697.495.384,03)	(12,78)

5.4.2.1.1	Beban Pegawai	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		314.479.737.531,00	316.377.435.083,00

Beban Pegawai TA 2025 senilai Rp314.479.737.531,00. Jika dibandingkan dengan beban pegawai TA 2024 senilai Rp316.377.435.083,00, maka beban pegawai TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp1.897.697.552,00 atau 0,60%. Adapun rincian beban pegawai sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel 5.151
Rincian Beban Pegawai

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Beban Gaji Pokok ASN	97.800.292.547,00	90.270.482.932,20
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	8.771.897.530,00	8.130.245.506,00
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	3.212.650.250,00	3.687.681.140,33
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	6.002.014.116,00	4.957.275.293,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.006.799.523,00	1.534.644.999,47
6	Beban Tunjangan Beras ASN	5.694.791.230,00	5.201.985.340,00
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	81.411.066,00	69.389.814,00
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	1.508.786,00	1.305.223,00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.404.763.534,00	8.833.839.629,00
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	202.226.745,00	183.364.457,00
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	606.682.269,00	541.649.973,00
12	Beban Tunjangan Khusus*)	270.108.000,00	66.067.720,00
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	151.120.270.941,00	160.207.902.502,00
14	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	88.078.547,40	172.165.162,00
15	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	8.281.449.600,00	6.227.057.400,00
16	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.500.258.320,00	1.128.471.300,00
17	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	675.000.000,00	277.500.000,00
18	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	1.377.750.113,00
19	Beban Honorarium	0,00	7.247.456.600,00
20	Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	1.114.800.000,00
21	Beban Uang Representasi DPRD	451.290.000,00	450.975.000,00
22	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	53.975.600,00	54.800.100,00
23	Beban Tunjangan Beras DPRD	54.730.000,00	54.665.000,00
24	Beban Uang Paket DPRD	38.682.000,00	38.986.500,00
25	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00	653.913.750,00
26	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	66.487.575,00	66.137.400,00
27	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	6.044.325,00	0,00
28	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.528.000.000,00	2.520.000.000,00
29	Beban Tunjangan Reses DPRD	630.000.000,00	420.000.000,00
30	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	66.064.520,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
31	Beban Pembulatan Gaji DPRD	12.000,00	12.000,00
32	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.980.525.916,00	2.967.005.153,00
33	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	3.192.000.000,00	3.192.000.000,00
34	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	182.385.000,00
35	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	107.338.560,00	61.332.960,00
36	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.248.000,00	6.864.000,00
37	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00
38	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.314.420,00	7.531.680,00
39	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	755.900,00	924.536,00
40	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.860,00	1.000,00
41	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	180.600.000,00
42	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00	280.000.000,00
43	Beban Pegawai BOS	2.578.700.000,00	0,00
44	Beban Pegawai BLUD	3.625.233.350,60	3.909.985.900,00
Jumlah		314.479.737.531,00	316.377.435.083,00

Perbedaan pengukuran Belanja Pegawai LRA dengan Beban Pegawai LO senilai Rp1.416.262.953,00 yang disebabkan oleh beberapa hal yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.152
Pengukuran Belanja dan Beban Pegawai pada LRA dan LO TA 2025

No	Uraian	LRA Per 31 Desember 2025	LO Per 31 Desember 2025	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
1	Beban Gaji Pokok ASN	97.800.292.547,00	97.800.292.547,00	0,00	0,00	-
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	8.771.897.530,00	8.771.897.530,00	0,00	0,00	-
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	3.212.650.250,00	3.212.650.250,00	0,00	0,00	-
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	6.002.014.116,00	6.002.014.116,00	0,00	0,00	-
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.006.799.523,00	2.006.799.523,00	0,00	0,00	-
6	Beban Tunjangan Beras ASN	5.694.791.230,00	5.694.791.230,00	0,00	0,00	-
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	81.411.066,00	81.411.066,00	0,00	0,00	-
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	1.508.786,00	1.508.786,00	0,00	0,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	LRA Per 31 Desember 2025	LO Per 31 Desember 2025	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.124.869.833,00	9.404.763.534,00	1.720.106.299,00	(33.908.276,00)	Pembayaran Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS TA 2024 di TA 2025 pada RSUD Akhmad Berahim
					23.454.011,00	Utang Kewajiban 4% Iuran Wajib Komponen Jaspel RSUD AB-Iuran Wajib
					(1.709.652.034,00)	Pembayaran Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	202.226.745,00	202.226.745,00	0,00	0,00	-
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	606.682.269,00	606.682.269,00	0,00	0,00	-
12	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	151.120.270.941,00	151.120.270.941,00	0,00	0,00	-
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.814.894.467,40	10.814.894.467,40	0,00	0,00	-
14	Beban Uang Representasi DPRD	451.290.000,00	451.290.000,00	0,00	0,00	-
15	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	53.975.600,00	53.975.600,00	0,00	0,00	-
16	Beban Tunjangan Beras DPRD	54.730.000,00	54.730.000,00	0,00	0,00	-
17	Beban Uang Paket DPRD	38.682.000,00	38.682.000,00	0,00	0,00	-
18	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00	654.370.500,00	0,00	0,00	-
19	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	66.487.575,00	66.487.575,00	0,00	0,00	-
20	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	6.044.325,00	6.044.325,00	0,00	0,00	-
21	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.528.000.000,00	3.528.000.000,00	0,00	0,00	-
22	Beban Tunjangan Reses DPRD	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	0,00	-
23	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	66.064.520,00	66.064.520,00	0,00	0,00	-
24	Beban Pembulatan Gaji DPRD	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-
25	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.980.525.916,00	2.980.525.916,00	0,00	0,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	LRA Per 31 Desember 2025	LO Per 31 Desember 2025	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
26	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	3.192.000.000,00	3.192.000.000,00	0,00	0,00	-
27	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	107.338.560,00	107.338.560,00	0,00	0,00	-
28	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.248.000,00	7.248.000,00	0,00	0,00	-
29	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00	0,00	-
30	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.314.420,00	7.314.420,00	0,00	0,00	-
31	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	755.900,00	755.900,00	0,00	0,00	-
32	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	-
33	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	312.480.000,00	0,00	0,00	-
34	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	-
35	Beban Pegawai BOSP-BOS	2.578.700.000,00	2.578.700.000,00	0,00	0,00	-
36	Beban Pegawai BLUD	3.321.390.004,60	3.625.233.350,60	(303.843.346,00)	(1.563.615.900,00) (141.289.954,00) 1.358.704.536,00 288.013.710,00 178.489.679,00 74.016.640,00 79.334.802,00	Pembayaran Utang Belanja Pegawai BLUD TA 2024 di TA 2025 pada RSUD Akhmad Berahim Pembayaran Utang Jasa Pelayanan Dana Kapitasi TA 2024 Utang Jaspel RSUD AB-Belanja Pegawai BLUD (Agustus s.d Desember) Utang Jasa Pelayanan Puskesmas-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Tideng Pale Utang Jasa Pelayanan Puskesmas-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Sesayap Hilir Utang Jasa Pelayanan Puskesmas-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Tana Lia Utang Jasa Pelayanan Puskesmas-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Kujau



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	LRA Per 31 Desember 2025	LO Per 31 Desember 2025	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
					30.189.833,00	Utang Jasa Pelayanan Puskesmas-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Muruk Rian
Jumlah		315.896.000.484,00	314.479.737.531,00	1.416.262.953,00	(1.416.262.953,00)	

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
309.331.871.936,46 **390.791.123.553,54**

Beban Barang dan Jasa TA 2025 senilai Rp309.331.871.936,46 Jika dibandingkan beban barang dan jasa TA 2024 senilai Rp390.791.123.553,54, maka beban barang dan jasa TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp81.459.251.617,08 atau 20,84%. Beban Barang dan Jasa tersebut mengalami penurunan dikarenakan adanya efisiensi anggaran TA 2025 melalui Intruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja APBN/APBD dan PMK Nomor 56 Tahun 2025. Sehingga penganggaran belanja ke SKPD mengalami rasionalisasi. Adapun rincian Beban Barang dan Jasa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.153
Rincian Beban Barang dan Jasa

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Beban Persediaan	99.864.719.876,95	128.669.933.684,97	(28.805.213.808,02)	(22,39)
2	Beban Dibawah Kapitalisasi	2.401.832.832,67	1.867.793.022,73	534.039.809,94	28,59
3	Beban Jasa	127.798.200.551,80	164.714.317.283,84	(36.916.116.732,04)	(22,41)
4	Beban Pemeliharaan	8.317.122.509,04	9.059.575.017,00	(742.452.507,96)	(8,20)
5	Beban Perjalanan Dinas	70.949.996.166,00	86.479.504.545,00	(15.529.508.379,00)	(17,96)
Jumlah		309.331.871.936,46	390.791.123.553,54	(81.459.251.617,08)	(20,84)

Tabel 5.154
Rincian Beban per Jenis Barang dan Jasa

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Barang Pakai Habis	99.619.860.966,95	128.385.520.704,97	(28.765.659.738,02)	(22,41)
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	244.858.910,00	284.412.980,00	(39.554.070,00)	(13,91)
3	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2.401.832.832,67	1.867.793.022,73	534.039.809,94	28,59



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
4	Beban Jasa Kantor	69.076.338.355,37	83.288.611.199,00	(14.212.272.843,63)	(17,06)
5	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	5.317.079.745,00	4.247.711.160,00	1.069.368.585,00	25,18
6	Beban Sewa Tanah	30.500.000,00	87.000.000,00	(56.500.000,00)	(64,94)
7	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	5.642.643.668,00	12.414.002.614,00	(6.771.358.946,00)	(54,55)
8	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	3.182.276.333,33	3.255.246.066,67	(72.969.733,34)	(2,24)
9	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00	0,00
10	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	53.252.000,00	90.125.000,00	(36.873.000,00)	(40,91)
11	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	758.769.176,60	5.949.138.695,00	(5.190.369.518,40)	(87,25)
12	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.577.482.000,00	912.776.662,00	664.705.338,00	72,82
13	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	171.980.958,00	143.134.600,00	28.846.358,00	20,15
14	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	4.463.200.000,00	2.401.100.000,00	2.062.100.000,00	85,88
15	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.067.290.447,00	8.797.181.110,00	1.270.109.337,00	14,44
16	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	236.000.000,00	(236.000.000,00)	(100,00)
17	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.526.252.611,00	3.924.996.219,00	601.256.392,00	15,32
18	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.785.901.898,04	3.941.413.211,00	(155.511.312,96)	(3,95)
19	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.968.000,00	913.665.587,00	(908.697.587,00)	(99,46)
20	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	43.500.000,00	(43.500.000,00)	(100,00)
21	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.949.996.166,00	86.479.504.545,00	(15.529.508.379,00)	(17,96)
22	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.995.966.179,00	18.179.644.111,00	(13.183.677.932,00)	(72,52)
23	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	673.738.500,00	514.373.400,00	159.365.100,00	30,98
24	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	23.075.520.357,17	(23.075.520.357,17)	(100,00)
25	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	17.001.896.999,10	0,00	17.001.896.999,10	100,00
26	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	113.346.000,00	0,00	113.346.000,00	100,00
27	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP	183.023.980,00	0,00	183.023.980,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
	Kesetaraan				
28	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	2.114.286.516,40	0,00	2.114.286.516,40	100,00
29	Beban Barang dan Jasa BLUD	2.326.129.694,00	1.358.752.309,00	967.377.385,00	71,20
Total		309.331.871.936,46	390.791.123.553,54	(81.459.251.617,08)	(20,84)

Perbedaan pengukuran Beban Barang dan Jasa dengan Belanja Barang dan Jasa LRA disebabkan oleh beberapa hal yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.155
Pengukuran Belanja dan Beban Barang dan Jasa pada LRA dan LO TA 2025

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2025	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
1	Beban Barang Pakai Habis	109.020.916.712,93	99.619.860.966,95	9.401.055.745,98	144.284.476.079,34	Saldo awal persediaan TA 2025 barang pakai habis
					1.686.687.674,54	Hibah dari pemerintah Pusat dan Daerah Menambah beban
					1.321.323.162,85	Reklasifikasi dari Belanja Modal APBD TA 2025 Menambah beban Persediaan
					144.764.000,00	Reklasifikasi dari Belanja Jasa APBD TA 2025 Menambah beban Persediaan
					4.860.613.252,16	Dana BLUD Menambah beban
					442.944.123,93	Hutang 2025 Menambah beban Persediaan
					423.543.300,00	Reklasifikasi dari Belanja Modal BOS TA 2025 Menambah beban Persediaan
					34.515.000,00	Reklasifikasi dari Belanja Modal BOP TA 2025 Menambah beban Persediaan
					1.703.818.502,90	Penambahan Beban Persediaan dari Dana BOS dan BOP



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2025	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
					33.834.227,00	Menambah beban Persediaan dari Peminjaman Persediaan Obat Ke IFK Bulungan
					989.366.630,60	Menambah beban Persediaan dari Dana BOK
					1.022.320,00	Menambah beban Persediaan dari Pengembalian Peminjaman Persediaan Obat Oleh IFK Bulungan
					93.600.000,00	Reklas Rincian Obyek dari Barang Tak Pakai Habis Ke Barang Pakai Habis
					(14.068.410,00)	Mengurangi Beban persediaan dikarenakan Pengembalian Pinjaman Persediaan Obat ke IFK Bulungan
					(271.117.223,55)	Pengeluaran Beban Persediaan atas pembayaran utang tahun lalu
					(3.353.707.042,58)	Mengurangi Beban persediaan akibat Reklasifikasi dari Belanja Persediaan APBD TA 2025 ke Aset Tetap
					(143.868.980,00)	Reklasifikasi dari Belanja Persediaan APBD TA 2025 ke Aset Tetap yang tidak memenuhi batas Kapitalisasi
					(18.456.623,52)	Reklasifikasi dari Belanja Persediaan APBD TA 2025 ke Beban Jasa/Pemeliharaan
					(3.288.636.223,50)	Reklasifikasi Persediaan ke Aset Tetap (sisa Bahan Konstruksi tahun lalu yang sudah terpasang 2025)
					(22.539.054.300,00)	Reklasifikasi Persediaan ke Aset Lainnya (Aset Untuk PDAM)



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2025	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
					(1.060.728,00)	Peminjaman Persediaan Obat Oleh IFK Bulungan
					(135.791.594.488,15)	Persediaan Akhir Batang tak pakai habis TA 2025 SKPD yang mengurangi beban persediaan
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	280.265.600,00	244.858.910,00	35.406.690,00	555.323.750,00	SALDO AWAL Persediaan barang tak pakai habis
					198.912.000,00	Reklas dari Belanja Modal
					42.614.010,00	DANA BLUD
					(93.600.000,00)	Reklas Rincian Obyek Barang Tak Pakai Habis Ke Barang Pakai Habis
					(30.000.000,00)	Reklas ke Aset Tetap Ekstrakompatabel
					(708.656.450,00)	Persediaan Akhir TA 2025 SKPD yang mengurangi beban persediaan
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	207.966.570,00	2.401.832.832,67	(2.193.866.262,67)	164.268.980,00	Reklasifikasi dari Belanja Persediaan APBD TA 2025 ke Aset Tetap yang tidak memenuhi batas Kapitalisasi
					1.374.483.676,67	Reklasifikasi dari Belanja Modal TA 2025 ke Aset Tetap yang tidak memenuhi batas Kapitalisasi
					21.689.100,00	Reklasifikasi dari Belanja Modal BLUD TA 2025 ke Aset Tetap yang tidak memenuhi batas Kapitalisasi
					320.731.600,00	Reklasifikasi dari Belanja Modal BOS TA 2025 ke Aset Tetap yang tidak memenuhi batas Kapitalisasi
					351.474.979,00	Reklasifikasi dari Belanja Modal BOP TA 2025 ke Aset Tetap yang tidak memenuhi batas Kapitalisasi



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2025	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
					64.567.327,00	Aset Hibah Aset Tetap yang bernilai dibawah kapitalisasi
					(103.349.400,00)	Reklas ke Aset Tetap
4	Beban Jasa Kantor	69.482.956.701,20	69.076.338.355,37	(406.618.345,83)	263.060.191,17	Pengakuan Utang Tagihan Listrik, PDAM, Internet dan Barjas SKPD TA 2025
					4.800.000,00	Beban Persediaan Rincian Obyek SKPD Kec. Betayau
					99.023.500,00	Belanja modal TA 2025 yang direklasifikasi menjadi Jasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					3.412.000,00	Utang Pajak Mobil berdasarkan Reviu Inspektorat pada DPU
					(208.715.161,00)	Pekunasan Utang Tagihan Listrik, PDAM, Internet SKPD TA 2024
					(515.798.876,00)	Belanja Barjas menjadi Aset Tetap Modal pada SKPD DISPERINDAGKO P DAN UKM dan BAPPEDA.
					(52.400.000,00)	Belanja Jasa/ Persediaan menjadi Persediaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
5	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	5.317.079.745,00	5.317.079.745,00	0,00	0,00	-
6	Beban Sewa Tanah	77.000.000,00	30.500.000,00	46.500.000,00	(46.500.000,00)	Reklas Dari beban Sewa Tanah ke Sewa Gedung dan Bangunan
7	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	5.642.643.668,00	5.642.643.668,00	0,00	0,00	-
8	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	3.176.033.000,00	3.182.276.333,33	(6.243.333,33)	340.975.000,00	Beban dibayar dimuka TA 2024
					46.500.000,00	Rekals dari beban Sewa Tanah
					(381.231.666,67)	Beban Dibayar di Muka TA 2025
9	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	-
10	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	53.252.000,00	53.252.000,00	0,00	0,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2025	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
11	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	844.716.920,60	758.769.176,60	85.947.744,00	(50.455.272,00)	Perencanaan Pembangunan Patok Jalan IPPKH Jalan Simpang Sesayp - Jalan Poros AJP. SP2D 02919
					(35.492.472,00)	Perencanaan Pembangunan Patok Kawasan Vegetasi Pusat Pemerintahan. SP2D 02917
12	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.577.482.000,00	1.577.482.000,00	0,00	0,00	-
13	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	171.980.958,00	171.980.958,00	0,00	0,00	-
14	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	4.463.200.000,00	4.463.200.000,00	0,00	0,00	-
15	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.067.290.447,00	10.067.290.447,00	0,00	0,00	-
16	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.609.016.611,00	4.526.252.611,00	82.764.000,00	9.600.000,00	Persediaan mejadi Aset Tetap (Exstrakompatabel)
					(92.364.000,00)	Reklas Beban Persediaan dari Beban Pemeliharaan
17	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.626.839.985,57	3.785.901.898,04	840.938.087,53	531.319.757,69	Belanja modal TA 2025 yang direklasifikasi menjadi Jasa
					13.656.623,52	Reklasifikasi Persediaan ke Jasa/Pemeliharaan
					(1.385.914.468,74)	Reklasifikasi Belanja Jasa yang menjadi Aset Tetap
18	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.968.000,00	4.968.000,00	0,00	0,00	-
19	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.949.996.166,00	70.949.996.166,00	0,00	0,00	-
20	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.995.966.179,00	4.995.966.179,00	0,00	0,00	-
21	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	623.738.500,00	673.738.500,00	(50.000.000,00)	50.000.000,00	Reklasifikasi Belanja Modal yang Menjadi Belanja Jasa SKPD DPU
22	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	18.909.431.502,00	17.001.896.999,10	1.907.534.502,90	(203.716.000,00)	Belanja Persediaan (BOP) yang menjadi Aset Tetap pada DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					(1.703.818.502,90)	Persediaan per 31 Desember 2025



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2025	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
						pada DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
23	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	113.346.000,00	113.346.000,00	0,00	0,00	-
24	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	183.023.980,00	183.023.980,00	0,00	0,00	-
25	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	3.103.653.147,00	2.114.286.516,40	989.366.630,60	(989.366.630,60)	Reklas Beban Persediaan (Belanja BLUD dan BOK) pada Puskesmas
26	Beban Barang dan Jasa BLUD	7.145.064.692,16	2.326.129.694,00	4.818.934.998,16	260.297.164,00	Pengakuan Utang Barang dan Jasa pada TA 2025 pada RSUD Aakhmad Berahim
					(5.079.232.162,16)	Reklas Beban Persediaan (Belanja BLUD) pada Puskesmas dan RSUD
Jumlah		325.696.829.085,46	309.331.871.936,46	16.364.957.149,00	(16.364.957.149,00)	

Adapun rincian beban barang dan jasa kemudian dijelaskan sebagai berikut:

5.4.2.1.2.1 Beban Persediaan **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
99.864.719.876,95 **128.669.933.684,97**

Beban Persediaan TA 2025 senilai Rp99.864.719.876,95. Jika dibandingkan dengan Beban Persediaan TA 2024 senilai Rp128.669.933.684,97 maka Beban Persediaan TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp28.805.213.808,02 atau 22,39%. Beban Persediaan mengalami penurunan dikarenakan adanya Peraturan Efisiensi Anggaran Tahun 2025 Melalui Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja APBN/APBD dan PMK Nomor 56 Tahun 2025. Sehingga penganggaran belanja ke SKPD mengalami rasionalisasi. Adapun rincian Beban Persediaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.156
Rincian Beban Persediaan

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	348.063.585,00	955.237.503,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	281.681.721,00	226.367.198,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.658.667.450,00	6.085.914.680,00
4	Beban Bahan-Bahan Baku	115.369.400,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	48.953.600,00	1.366.642.700,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	28.236.700,00	31.308.700,00
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	633.192.832,00	367.439.840,00
8	Beban Bahan-Bahan Lainnya	3.494.076.915,91	2.923.518.504,28
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.592.407.286,00	1.120.266.443,00
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	259.905.000,00	190.016.800,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	144.946.438,00	177.708.052,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	590.000,00
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	3.678.000,00
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	21.138.365,00	3.760.600,00
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	107.839.845,00	47.958.265,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.684.487.982,55	2.184.370.068,46
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.603.741.663,90	1.290.103.098,80
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.224.838.989,10	4.649.141.815,30
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	261.770.775,00	234.083.000,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	725.584.088,25	947.112.152,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.692.730.378,58	2.135.841.295,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	621.902.935,20	1.105.615.100,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	286.162.128,00	1.184.008.830,00
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	1.171.281.030,00	911.088.125,00
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.287.544.310,00	1.957.702.600,00
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	245.960.383,00	1.458.879.421,00
27	Beban Obat-Obatan-Obat	3.986.840.642,82	2.987.303.288,78
28	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	68.409.250,00	1.478.501.175,00
29	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	18.964.515.546,49	24.696.263.458,17
30	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	13.447.285.699,19	29.532.011.239,00
31	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	17.286.703,00	0,00
32	Beban Natura dan Pakan-Natura	3.520.308.978,96	1.821.452.113,18



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
33	Beban Natura dan Pakan-Pakan	243.363.000,00	15.625.000,00
34	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	314.700,00	0,00
35	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi	0,00	51.937.374,00
36	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	0,00	(2.370.374,00)
37	Beban Makanan dan Minuman Rapat	17.743.647.040,00	16.993.204.945,00
38	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.080.929.700,00	8.646.193.405,00
39	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	416.400.500,00
40	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.164.672.185,00	5.434.993.550,00
41	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	177.600.000,00	72.200.000,00
42	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	158.000.000,00	176.901.000,00
43	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	71.900.000,00	220.540.000,00
44	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	415.975.000,00
45	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	862.877.100,00	814.206.000,00
46	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	20.000.000,00	100.000.000,00
47	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	218.000.000,00	97.110.000,00
48	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	26.850.000,00	0,00
49	Beban Pakaian Adat Daerah	232.300.000,00	627.326.000,00
50	Beban Pakaian Batik Tradisional	890.322.000,00	678.366.000,00
51	Beban Pakaian Olahraga	1.173.554.620,00	1.400.563.240,00
52	Beban Pakaian Paskibraka	10.400.000,00	152.465.000,00
53	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	48.273.900,00	206.927.450,00
54	Beban Komponen-Attachment	24.500.000,00	0,00
55	Beban Komponen-Komponen Lainnya	116.200.000,00	0,00
56	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	42.910.010,00	52.750.530,00
57	Beban Pipa-Pipa Lainnya	12.975.000,00	24.735.000,00
Jumlah		99.864.719.876,95	128.669.933.684,97



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.4.2.1.2.2	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi (Beban Lain-lain)	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		2.401.832.832,67	1.867.793.022,73

Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi TA 2025 senilai Rp2.401.832.832,67. Jika dibandingkan dengan Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi TA 2024 senilai Rp1.867.793.022,73 maka Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi mengalami kenaikan senilai Rp534.039.809,94 atau 28,59%. Kenaikan Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi terjadi karena TA 2025 sudah menyesuaikan penganggaran dan pemetaan akun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 (Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021) tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyesuaian regulasi tersebut mengakibatkan adanya beberapa jenis pengadaan barang yang pada tahun sebelumnya (TA 2024) dikategorikan sebagai Belanja Modal/Aset Tetap, kini di TA 2025 harus dialihkan dan dicatat langsung sebagai beban operasi karena tidak lagi memenuhi nilai minimum kriteria kapitalisasi yang baru. Selain itu kenaikan terjadi disebabkan terdapat belanja patok tanah senilai Rp506.103.863,61 yang pada tahun sebelumnya tidak ada. Adapun rincian Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.157
Rincian Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	6.243.000,00	22.871.500,00
2	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	15.988.440,00	0,00
3	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	9.790.200,00
4	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	8.548.300,00	0,00
5	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	0,00	620.000,00
6	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat	0,00	350.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
	Ukur/Pembanding		
7	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	0,00	150.000,00
8	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	11.720.332,00
9	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	7.920.300,00	7.560.000,00
10	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	0,00	500.000,00
11	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	450.000,00	14.547.400,00
12	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	478.263.207,00	261.766.526,00
13	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	795.721.365,00	894.015.000,00
14	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	866.400,00	1.074.000,00
15	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.005.000,00	76.800.000,00
16	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	0,00	17.071.000,00
17	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	85.817.033,06	74.655.000,00
18	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	15.651.000,00	840.000,00
19	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	5.820.000,00	0,00
20	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	6.300.000,00	45.200.000,00
21	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	12.805.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
22	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0,00	7.820.000,00
23	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	0,00	950.000,00
24	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	0,00	9.000.000,00
25	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	28.664.684,00	35.635.300,00
26	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	0,00	5.919.963,00
27	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	10.257.500,00	4.088.130,00
28	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT	931.500,00	0,00
29	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik	1.395.600,00	0,00
30	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	7.555.000,00	0,00
31	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	15.029.553,00	1.175.000,00
32	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	2.913.750,00	1.800.000,00
33	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika	0,00	920.000,00
34	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	300.000,00	0,00
35	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan	495.000,00	0,00
36	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	2.197.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
37	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	0,00	350.000,00
38	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	0,00	50.000,00
39	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	0,00	150.000,00
40	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.199.910,00	2.200.000,00
41	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	581.000,00
42	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong	3.043.620,00	0,00
43	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	0,00	1.500.000,00
44	Beban Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment	0,00	7.500.000,00
45	Beban Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	0,00	1.320.000,00
46	Beban Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	1.920.000,00	1.300.000,00
47	Beban Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	421.800,00	5.835.000,00
48	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.000.000,00	13.224.000,00
49	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	97.500.000,00
50	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	0,00	3.820.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
51	Beban Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	506.103.863,61	0,00
52	Beban Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	3.952.100,00	45.010.000,00
53	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	357.348.299,00	61.202.435,73
54	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat	0,00	1.168.610,00
55	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama	0,00	17.653.954,00
56	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial	6.568.879,00	18.409.283,00
57	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa	0,00	25.796.161,00
58	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	0,00	31.974.061,00
59	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	12.292.320,00	4.057.430,00
60	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	483.457,00	2.958.715,00
61	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	1.164.952,00	246.122,00
62	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial	0,00	2.331.000,00
63	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (Graphic Material)-Karya Grafika (Graphic Material)	0,00	145.500,00
64	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita	0,00	99.600,00
65	Beban Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak	0,00	1.765.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
	Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya		
Jumlah		2.401.832.832,67	1.867.793.022,73

Berdasarkan tabel di atas, rincian Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi dijelaskan pada **Lampiran 5.39**

5.4.2.1.2.3	Beban Jasa	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		127.798.200.551,80	164.714.317.283,84

Beban Jasa TA 2025 senilai Rp127.798.200.551,80. Jika dibandingkan dengan Beban Jasa TA 2024 senilai Rp164.714.317.283,84 maka Beban Jasa TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp36.916.116.732,04 atau 22,41%. Penurunan tersebut terjadi karena adanya Peraturan Efisiensi Anggaran Tahun 2025 melalui Intruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN/APBD dan PMK Nomor 56 Tahun 2025 sehingga penganggaran belanja ke SKPD mengalami rasionalisasi. Adapun rincian Beban Jasa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.158
Rincian Beban Jasa

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	777.100.000,00	0,00
2	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.958.365.000,00	4.028.131.000,00
3	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.535.760.000,00	9.604.760.004,00
4	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	458.875.000,00	1.367.600.000,00
5	Beban Honorarium Rohaniwan	6.000.000,00	12.400.000,00
6	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	163.300.000,00	155.250.000,00
7	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	40.800.000,00	35.200.000,00
8	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	75.700.000,00	0,00
9	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	815.300.000,00	829.200.000,00
10	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	2.257.050.000,00	8.369.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
11	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	6.889.000.000,00	6.142.350.000,00
12	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	195.521.307,00	121.577.698,00
13	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	173.910.000,00	454.069.211,00
14	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.017.013.000,00	1.229.932.000,00
15	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.360.900.000,00	1.633.700.000,00
16	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	0,00	52.800.000,00
17	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	513.300.000,00	564.100.000,00
18	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	350.319.000,00	998.714.000,00
19	Beban Jasa Tenaga Administrasi	4.824.351.871,00	9.355.268.513,00
20	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	18.000.000,00	32.450.000,00
21	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	955.200.000,00	1.036.800.000,00
22	Beban Jasa Tenaga Ahli	5.785.537.675,20	9.072.248.228,00
23	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	7.147.027.846,00	9.413.468.893,00
24	Beban Jasa Tenaga Keamanan	1.165.378.261,00	2.019.400.000,00
25	Beban Jasa Tenaga Caraka	264.000.000,00	656.400.000,00
26	Beban Jasa Tenaga Supir	1.033.424.302,00	1.389.800.000,00
27	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	207.872.000,00	270.096.000,00
28	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	13.875.000,00	19.400.000,00
29	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	358.760.000,00	475.710.000,00
30	Beban Jasa Tata Rias	36.000.000,00	59.760.000,00
31	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	23.865.000,00	0,00
32	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	1.003.583.844,00	753.650.688,00
33	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	1.743.408.690,00	3.201.031.720,00
34	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	40.000.000,00	40.000.000,00
35	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	129.873.000,00	174.971.000,00
36	Beban Jasa Kalibrasi	83.837.836,00	77.128.110,00
37	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.060.050.000,00	1.287.200.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
38	Beban Tagihan Telepon	7.088.000,00	5.881.500,00
39	Beban Tagihan Air	888.444.129,00	975.327.682,00
40	Beban Tagihan Listrik	3.915.430.852,00	4.153.904.950,00
41	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	624.473.840,00	515.900.000,00
42	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.624.539.499,17	2.313.501.974,00
43	Beban Paket/Pengiriman	35.898.700,00	45.288.800,00
44	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	384.595.003,00	181.501.300,00
45	Beban Pengolahan Air Limbah	0,00	24.330.216,00
46	Beban Medical Check Up	196.316.700,00	134.274.000,00
47	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	4.633.712,00
48	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	6.010.893.000,00	0,00
49	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	855.400.000,00	0,00
50	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	51.000.000,00	0,00
51	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	485.524.248,00	480.647.484,00
52	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	0,00	9.298.800,00
53	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	4.552.059.600,00	3.305.641.640,00
54	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.127.599,00	134.595.801,00
55	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	160.562.573,00	144.594.694,00
56	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	109.805.725,00	172.932.741,00
57	Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	30.500.000,00	75.000.000,00
58	Beban Sewa Tanah Lapangan Olahraga	0,00	12.000.000,00
59	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00	64.847.000,00
60	Beban Sewa Electric Generating Set	126.000.000,00	168.000.000,00
61	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.228.734.700,00	863.097.142,00
62	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	31.336.000,00	35.190.500,00
63	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	444.715.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
64	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	0,00	18.000.000,00
65	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	812.000.000,00	1.218.440.000,00
66	Beban Sewa Alat Ukur Universal	0,00	89.097.936,00
67	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	3.423.572.968,00	9.423.615.036,00
68	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	21.000.000,00	89.000.000,00
69	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	553.850.000,00	684.406.666,67
70	Beban Sewa Bangunan Gudang	112.416.666,66	89.000.000,00
71	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	330.450.000,00	117.000.000,00
72	Beban Sewa Bangunan Terbuka	0,00	52.800.000,00
73	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	155.000.000,00
74	Beban Sewa Bangunan Parkir	29.250.000,00	27.000.000,00
75	Beban Sewa Asrama	408.150.000,00	328.266.666,67
76	Beban Sewa Hotel	1.560.493.000,00	1.573.647.900,00
77	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	187.666.666,67	228.124.833,33
78	Beban Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	49.000.000,00	0,00
79	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	53.252.000,00	90.125.000,00
80	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	0,00	1.209.750.000,00
81	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	2.355.134.600,00
82	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	261.915.600,00	1.223.600.202,00
83	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	291.592.500,00	1.109.023.893,00
84	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	205.261.076,60	0,00
85	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	51.630.000,00
86	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0,00	196.991.700,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
87	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	0,00	124.672.000,00
88	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	477.482.000,00	591.112.962,00
89	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1.100.000.000,00	0,00
90	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	171.980.958,00	143.134.600,00
91	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	0,00	90.000.000,00
92	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	4.463.200.000,00	2.311.100.000,00
93	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	6.782.560.493,00	7.159.764.810,00
94	Beban Sosialisasi	1.432.269.516,00	0,00
95	Beban Bimbingan Teknis	1.687.570.438,00	1.059.831.300,00
96	Beban Diklat Kepemimpinan	164.890.000,00	577.585.000,00
97	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.644.570.000,00	3.202.391.100,00
98	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	344.952.000,00	193.000.000,00
99	Beban Beasiswa	59.500.000,00	0,00
100	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	1.946.944.179,00	14.634.253.011,00
101	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	150.000.000,00
102	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	673.738.500,00	221.925.400,00
103	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	292.448.000,00
104	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	23.075.520.357,17
105	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	17.001.896.999,10	0,00
106	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	98.346.000,00	0,00
107	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00	0,00
108	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	183.023.980,00	0,00
109	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	2.114.286.516,40	0,00
110	Beban Barang dan Jasa BLUD	2.326.129.694,00	1.358.752.309,00
Jumlah		127.798.200.551,80	164.714.317.283,84



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.4.2.1.2.4	Beban Pemeliharaan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		8.317.122.509,04	9.059.575.017,00

Beban Pemeliharaan TA 2025 senilai Rp8.317.122.509,04 Jika dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan TA 2024 senilai Rp 9.059.575.017,00 maka Beban Pemeliharaan TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp742.452.507,96 atau 8,20%. Adapun rincian Beban Pemeliharaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.159
Rincian Beban Pemeliharaan

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	0,00	236.000.000,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	0,00	99.905.000,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.405.386.956,00	2.022.197.717,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.585.978.164,00	350.656.500,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	134.400.000,00	0,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.245.000,00	0,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.735.000,00	0,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	9.600.000,00	0,00
9	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	499.202.500,00	624.301.150,00
10	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	87.364.000,00	20.000.000,00
11	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	83.745.491,00	15.394.000,00
12	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	39.980.000,00	39.759.731,00
13	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	97.950.000,00	0,00
14	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	194.377.500,00	224.330.911,00
15	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	114.038.000,00	119.719.210,00
16	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	258.250.000,00	398.502.000,00

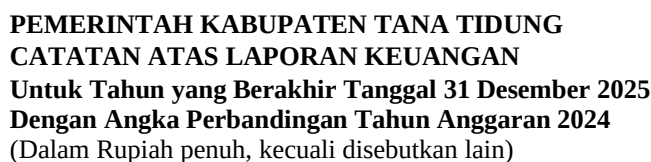


PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
17	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	0,00	10.230.000,00
18	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.159.975.516,83	330.025.600,00
19	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	0,00	182.482.000,00
20	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	252.652.600,00	0,00
21	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	179.226.150,00	2.316.600.827,00
22	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	35.079.230,00	4.280.000,00
23	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	235.632.684,00
24	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	195138000
25	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	75.700.000,00	0,00
26	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	78.018.401,21	0,00
27	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	439.695.100,00
28	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	5.250.000,00	237.559.000,00
29	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	913.665.587,00
30	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	4.968.000,00	0,00
31	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	43.500.000,00
Jumlah		8.317.122.509,04	9.059.575.017,00

5.4.2.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 31 Desember 2024
70.949.996.166,00 86.479.504.545,00

Beban Perjalanan TA 2025 senilai Rp70.949.996.166,00 Jika dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas TA 2024 senilai Rp86.479.504.545,00 maka Beban Perjalanan Dinas TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp15.529.508.379,00 atau 17,96%. Adapun rincian Beban Perjalanan Dinas disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.160

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	59.044.964.066,00	72.216.769.905,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.139.638.100,00	13.525.368.440,00
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	123.530.000,00	121.733.000,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.641.864.000,00	615.633.200,00
Jumlah		70.949.996.166,00	86.479.504.545,00

5.4.2.1.3	Beban Hibah	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		23.075.271.125,00	35.692.558.871,00

Beban Hibah TA 2025 senilai Rp 23.075.271.125,00. Jika dibandingkan dengan Beban Hibah TA 2024 senilai Rp35.692.558.871,00 maka Beban Hibah TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp12.617.287.746,00 atau 35,35%. Adapun rincian Beban Hibah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.161
Rincian Beban Hibah

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	250.000.000,00	3.550.000.000,00
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	174.825.000,00	479.717.000,00
3	Beban Hibah Barang kepada BUMD	596.228.675,00	0,00
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.166.943.300,00	24.880.426.295,00
5	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	847.080.900,00	0,00
6	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.725.871.705,00	2.910.932.601,00
7	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	140.923.900,00	205.000.000,00
8	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	2.341.050.820,00	0,00
9	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.064.668.525,00	915.918.475,00
10	Beban Hibah Dana BOSP-BOS	571.378.300,00	1.509.463.642,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
11	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.196.300.000,00	967.996.800,00
12	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	0,00	273.104.058,00
Jumlah		23.075.271.125,00	35.692.558.871,00

Tabel 5.162
Pengukuran Belanja dan Beban Hibah pada LRA dan LO TA 2025

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2025	Selisih	Rincian Selisih	Keterangan
		LRA	LO			
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	-
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	174.825.000,00	174.825.000,00	0,00	0,00	-
3	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	596.228.675,00	596.228.675,00	0,00	0,00	-
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	11.014.024.200,00	11.014.024.200,00	0,00	0,00	-
5	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.912.698.000,00	5.725.871.705,00	(3.813.173.705,00)	3.813.173.705,00	Jurnal balik Beban dibayar dimuka TA 2024 (Beban Hibah Pilkada) pada SKPD KESBANGPOL
6	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	140.923.900,00	140.923.900,00	0,00	0,00	-
7	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	2.341.050.820,00	2.341.050.820,00	0,00	0,00	-
8	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.064.668.525,00	1.064.668.525,00	0,00	0,00	-
9	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	571.378.300,00	571.378.300,00	0,00	0,00	-
10	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.196.300.000,00	1.196.300.000,00	0,00	0,00	-
11	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah		19.262.097.420,00	23.075.271.125,00	(3.813.173.705,00)	3.813.173.705,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Perbedaan pengukuran Beban Hibah dengan Belanja Hibah senilai Rp3.408.136.984,00 atas pengakuan Beban Hibah Pilkada yang telah di setorkan kembali pada TA 2025 yang menambah nilai Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, rincian tambahan nilai beban terdiri atas pengakuan hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) senilai Rp2.716.048.778,00 dan pengakuan hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) senilai Rp1.097.124.927,00.

5.4.2.1.4	Beban Bantuan Sosial	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		243.500.000,00	0,00

Beban Bantuan Sosial merupakan pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif.

Beban Bantuan Sosial TA 2025 senilai Rp243.500.000,00 Jika dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial TA 2024 senilai Rp0,00, maka Beban Bantuan Sosial TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp243.500.000,00 atau 100,00%. Kenaikan Belanja Bantuan Sosial dikarenakan terdapat kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan daerah berdasarkan SK Bupati Nomor 100.3.3.2/297/K-VII/2025 tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang kepada Pelaku Usaha Ekonomi Produktif Individu Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025.

5.4.2.1.5	Beban Penyisihan Piutang	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		1.610.360.246,38	395.946.180,53

Penyisihan Piutang merupakan bagian dari upaya menyajikan akun Piutang yang mendekati kebenaran kemampuan konversinya menjadi Kas. Artinya, nilai Piutang setelah dikurangi Penyisihan Piutang (disebut juga Piutang Neto atau Piutang Bersih) merupakan suatu angka yang berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, dapat diperoleh hasil penagihannya.

Beban Penyisihan Piutang/Piutang tidak tertagih yaitu cadangan yang harus dibentuk senilai persentase tertentu dari akun Piutang berdasarkan penggolongan kualitas Piutang, sedangkan yang dimaksud dengan kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan Piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.

Beban Penyisihan Piutang TA 2025 senilai Rp1.610.360.246,38. Jika dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang TA 2024 senilai Rp395.946.180,53 maka Beban Penyisihan Piutang TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp1.214.414.065,85 atau 306,71%. Adapun rincian Beban Penyisihan Piutang disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel 5.163
Rincian Beban Penyisihan Piutang

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya	5.100,00	0,00
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	(3.092.767,70)
3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	24.131,12	0,00
4	Beban Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet	25.000,00	0,00
5	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.833.510,00	0,00
6	Beban Penyisihan Piutang PBBP2	376.513.440,72	395.837.643,55
7	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	258.306,98	0,00
8	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0,00	3.201.304,68
9	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	631.250.000,00	0,00
10	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	600.450.757,56	0,00
Jumlah		1.610.360.246,38	395.946.180,53

5.4.2.1.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
209.181.755.571,47 **240.362.928.106,27**

Beban Penyusutan dan amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 senilai Rp209.181.755.571,47 Jika dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 senilai Rp240.362.928.106,27, maka Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp31.181.172.534,80 atau 12,97%. Adapun rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel 5.164
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	40.578.324.285,76	37.525.689.021,82	3.052.635.263,94	8,13
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	29.700.886.457,94	28.285.955.068,00	1.414.931.389,94	5,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	132.740.696.874,88	168.493.382.798,45	(35.752.685.923,57)	(21,22)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	690.601.036,87	251.921.758,00	438.679.278,87	174,13
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	82.337.199,14	476.850.096,00	(394.512.896,86)	(82,73)
6	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	5.388.909.716,88	5.329.129.364,00	59.780.352,88	1,12
Jumlah		209.181.755.571,47	240.362.928.106,27	(31.181.172.534,80)	(12,97)

5.4.2.2 Beban Tidak terduga **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
0,00 **17.620.000,00**

Beban Tidak Terduga TA 2025 senilai Rp0,00. Jika dibandingkan dengan Beban Tidak Terduga periode TA. 2024 senilai Rp17.620.000,00 maka Beban Tidak Terduga TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp17.620.000,00 atau 100,00%. Penurunan tersebut dikarenakan tidak terealisasi belanja tidak terduga sesuai dengan yang direncanakan untuk pembayaran utang pada PT.Pipit Mutiara Jaya dan Belanja tidak terduga lainnya seperti bencana dan belanja mendesak.

5.4.2.3 Beban Transfer **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
91.959.367.523,00 **105.568.956.050,00**

Beban Transfer TA 2025 senilai Rp91.959.367.523,00. Jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp105.568.956.050,00 maka Beban Transfer TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp13.609.588.527,00 atau 12,89%. Adapun rincian Beban Transfer disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.165
Rincian Beban Transfer

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Beban Bagi Hasil	989.949.241,00	533.000.000,00	456.949.241,00	85,73
2	Beban Bantuan Keuangan	90.969.418.282,00	105.035.956.050,00	(14.066.537.768,00)	(13,39)
Jumlah		91.959.367.523,00	105.568.956.050,00	(13.609.588.527,00)	(12,89)



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.4.2.3.1	Beban Bagi hasil	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		989.949.241,00	533.000.000,00

Beban Bagi Hasil TA 2025 senilai Rp989.949.241,00, Jika dibandingkan dengan Beban Bagi Hasil TA 2024 senilai Rp533.000.000,00, maka Beban Bagi Hasil TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp456.949.241,00 atau 85,73%. Adapun rincian Beban Bagi Hasil disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.166

Rincian Beban Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	886.812.239,00	460.500.000,00
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	103.137.002,00	72.500.000,00
Jumlah		989.949.241,00	533.000.000,00

5.4.2.3.1.1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		886.812.239,00	460.500.000,00

Beban Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa TA 2025 senilai Rp886.812.239,00, Jika dibandingkan dengan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa TA 2024 senilai Rp460.500.000,00, maka Beban Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp426.312,239,00 atau 92,58%.

5.4.2.3.1.2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		103.137.002,00	72.500.000,00

Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota Kepada Pemerintah Desa TA 2025 senilai Rp103.137.002,00, Jika dibandingkan dengan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa TA 2024 senilai Rp72.500.000,00, maka Beban Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp30.637.002,00 atau 42,26%.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.4.2.3.2	Beban Bantuan Keuangan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		90.969.418.282,00	105.035.956.050,00

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa TA 2025 senilai Rp90.969.418.282,00. Jika dibandingkan dengan Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa TA 2024 senilai Rp105.035.956.050,00, maka Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp14.066.537.768,00 atau 13,39%. Adapun rincian Beban Bantuan Keuangan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.167
Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	357.000.000,00	(357.000.000,00)	(100,00)
2	Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	90.609.418.282,00	104.678.956.050,00	(14.069.537.768,00)	(13,44)
3	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	360.000.000,00	0,00	360.000.000,00	0,00
Jumlah		90.969.418.282,00	105.035.956.050,00	(14.066.537.768,00)	(13,39)

5.4.2.3.2.1	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		0,00	357.000.000,00

Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2025 senilai Rp0,00. Jika dibandingkan dengan Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2024 senilai Rp357.000.000,00, maka Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp357.000.000,00 atau 100%. Hal ini merupakan dampak dari penyesuaian klasifikasi anggaran, dimana terjadi perubahan kode rekening dan nomenklatur peruntukan anggaran. Alokasi yang sebelumnya ditujukan untuk tingkat desa telah dialihkan / direformasi peruntukannya menjadi anggaran bantuan untuk tingkat Rukun Tetangga (RT).



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.4.2.3.2.2	Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota ke Desa	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		90.609.418.282,00	104.678.956.050,00

Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Ke Desa TA 2025 senilai Rp90.609.418.282,00. Jika dibandingkan dengan Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa TA 2024 senilai Rp 104.678.956.050,00 maka Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Ke Desa TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp14.069.537.768,00 atau 13,44%.

5.4.2.3.2.3	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota ke Desa	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		360.000.000,00	0,00

Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2025 senilai Rp360.000.000,00, sedangkan pada TA 2024 tidak terdapat realisasi (nihil), sehingga pada TA 2025 terjadi peningkatan senilai Rp360.000.000,00 atau 100%.

5.4.3	Surplus/Defisit Dari Operasi	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		78.591.688.742,99	(105.515.392.099,61)

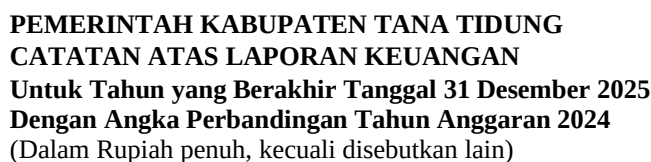
Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Surplus/Defisit dari Operasi TA 2025 senilai Rp78.591.688.742,99. Jika dibandingkan dengan Surplus/Defisit dari Operasi TA 2024 senilai Rp(105.515.392.099,61), maka TA 2025 mengalami Surplus senilai Rp184.107.080.842,60 atau 174,48%.

5.4.4	Surplus / Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		261.289.093.923,51	(27.941.350.038,67)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional TA 2025 senilai Rp261.289.093.923,51 dan TA 2024 senilai Rp(27.941.350.038,67). Pada akhir tanggal pelaporan keuangan 31 Desember 2025 memiliki Surplus Kegiatan Non Operasional Senilai Rp261.289.093.923,51 yang merupakan Surplus penjualan dan penghapusan tahun buku 2025.

Jika dibandingkan Surplus / Defisit dari Kegiatan Operasional per 31 Desember 2025 maka Surplus / Defisit dari Kegiatan Operasional per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan senilai Rp289.230.443.962,18 atau 1.035,13%

Rincian Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2025 dan 2024. Adapun rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.168

No	Uraian	TA 2025	TA 2024
I	SURPLUS NON OPERASIONAL		
1	Persediaan yang dikembalikan	323.589.750.938,00	6.202.824,00
2	Kenaikan Nilai Investasi	1.422.763.865,29	0,00
Jumlah (I)		325.012.514.803,29	6.202.824,00
II	DEFISIT NON OPERASIONAL		
Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan:			
1	Penjualan Peralatan dan Mesin	5.568.750,00	183.700.000,00
2	Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.114.083,00	0,00
3	Penjualan Aset Lain-Lain (Rusak Berat)	35.732.812,00	0,00
Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan:			
1	Penghapusan Aset Lain-Lain (Rusak Berat)	6.746.421.300,93	26.009.909.256,67
2	Penghapusan Aset Lain-Lain (Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah)	549.770.308,70	297.930.000,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya:			
1	Pembayaran Utang Belanja BMHP/Kelebihan Pembayaran atas Transfer Pusat	56.362.813.625,15	1.456.013.606,00
Jumlah (II)		63.723.420.879,78	27.947.552.862,67
Total (I dan II)		261.289.093.923,51	(27.941.350.038,67)

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional tersebut dapat dilihat lebih rinci pada **Lampiran 5.40**.

5.4.4.1	Surplus Dari Kegiatan Non Operasional	<u>31 Desember 2025</u> 325.012.514.803,29	<u>31 Desember 2024</u> 6.202.824,00

Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA 2025 senilai Rp325.012.514.803,29. Jika dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Operasional TA 2024 senilai Rp6.202.824,00 maka Surplus dari Kegiatan Operasional TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp 325.006.311.979,29 atau 5.239.650,71%.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.4.4.2 Defisit Non Operasional	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	63.723.420.879,78	27.947.552.862,67

Defisit Non Operasional TA 2025 senilai Rp63.723.420.879,78. Jika dibandingkan dengan Defisit Non Operasional TA 2024 senilai Rp27.947.552.862,67 maka Defisit Non Operasional TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp35.775.868.017,11 atau 128,01%. Kenaikan disebabkan oleh adanya penghapusan dan penjualan Aset Lain-Lain dalam kondisi Rusak Berat/Usang.

5.4.5 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas Pemerintah Daerah. Pada tahun 2025 dan 2024 tidak terdapat Pos Luar Biasa.

5.4.6 Surplus / Defisit Laporan Operasional	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	339.880.782.666,50	(133.456.742.138,28)

Berdasarkan Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami Surplus senilai Rp339.880.782.666,50 dan 31 Desember 2024, diketahui bahwa terjadi defisit Laporan Operasional senilai Rp(133.456.742.138,28). Hal ini menunjukkan kenaikan saldo operasional senilai Rp473.337.524.804,78 atau 354,67%.

5.5. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Arus Kas Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dapat diuraikan sebagai berikut.

5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	298.897.546.503,59	573.711.239.120,43

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan Kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tanpa mengandalkan sumber dana dari luar. Arus Kas dari Aktivitas Operasi selama TA 2025 adalah senilai Rp298.897.546.503,59 dan TA 2024 adalah senilai Rp573.711.239.120,43 maka Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2025 mengalami Penurunan senilai Rp274.813.692.616,84 atau 47,90%. Rincian Arus Kas Masuk pada Tahun 2025 dan 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi selama TA 2025 senilai Rp1.078.524.318.416,05 dan TA 2024 adalah senilai Rp1.483.668.171.154,45 maka Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp405.143.852.738,40 atau 27,31%. Adapun rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.169
Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan /Penurunan	%
1	Penerimaan Pajak Daerah	10.240.378.261,00	7.812.755.443,00	2.427.622.818,00	31,07
2	Penerimaan Retribusi Daerah	9.851.845.257,00	706.311.634,00	9.145.533.623,00	1.294,83
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.741.723.567,47	4.930.224.687,96	(1.188.501.120,49)	(24,11)
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	30.266.053.399,58	35.931.993.623,49	(5.665.940.223,91)	(15,77)
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	506.994.414.300,00	832.040.549.000,00	(325.046.134.700,00)	(39,07)
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	397.312.680.666,00	425.690.872.922,00	(28.378.192.256,00)	(6,67)
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	38.542.007.205,00	40.617.931.231,00	(2.075.924.026,00)	(5,11)
8	Penerimaan Dana Alokasi Desa	26.568.977.400,00	29.801.783.000,00	(3.232.805.600,00)	(10,85)
9	Penerimaan Dana Insentif Daerah	6.996.098.000,00	14.164.044.000,00	(7.167.946.000,00)	(50,61)
10	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	46.203.847.529,00	35.037.618.142,00	11.166.229.387,00	31,87
11	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.734.495.252,00	37.903.888.171,00	(36.169.392.919,00)	(95,42)
12	Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	17.314.145.000,00	(17.314.145.000,00)	(100,00)
13	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	71.797.579,00	1.716.054.300,00	(1.644.256.721,00)	(95,82)
Jumlah		1.078.524.318.416,05	1.483.668.171.154,45	(405.143.852.738,40)	(27,31)

- b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi selama TA 2025 adalah senilai Rp779.626.771.912,46 dan TA 2024 adalah senilai Rp909.956.932.034,02 maka Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp130.330.160.121,56 atau 14,32%. Adapun rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel 5.170
Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pembayaran Pegawai	315.896.000.484,00	313.541.036.552,00	2.354.963.932,00	0,75
2	Belanja Barang dan Jasa	325.696.829.085,46	422.867.337.627,02	(97.170.508.541,56)	(22,98)
3	Pembayaran Hibah	19.262.097.420,00	38.040.036.933,00	(18.777.939.513,00)	(49,36)
4	Pembayaran Bantuan Sosial	243.500.000,00	17.620.000,00	225.880.000,00	1.281,95
5	Pembayaran Bantuan Keuangan	117.538.395.682,00	135.490.900.922,00	(17.952.505.240,00)	(13,25)
6	Belanja Bagi Hasil	989.949.241,00	0,00	989.949.241,00	100
7	Pembayaran Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		779.626.771.912,46	909.956.932.034,02	(130.330.160.121,56)	(14,32)

5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
(386.626.267.135,24) (446.055.065.542,40)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran Kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi/Non Keuangan selama TA 2025 adalah senilai Rp(386.626.267.135,24) dan TA 2024 adalah senilai Rp(446.055.065.542,40) maka Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi/Non Keuangan TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp59.428.798.407,16 atau 13,32%. Hal ini disebabkan oleh penjualan Aset yang bertambah, yang terdiri dari:

- Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi selama TA 2025 adalah senilai Rp258.133.908,00 dan TA 2024 adalah senilai Rp231.524.500,00 maka Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp26.609.408,00 atau 11,49%; dan
- Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi selama TA 2025 adalah senilai Rp386.884.401.043,24 dan TA 2024 adalah senilai Rp446.286.590.042,40 maka Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp59.402.188.999,16 atau 13,31%.

Adapun rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel 5.171
Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Tanah	2.847.964.666,00	0,00	2.847.964.666,00	100,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	35.323.557.737,00	39.818.595.746,00	(4.495.038.009,00)	(11,29)
3	Belanja Gedung dan Bangunan	233.904.479.133,85	225.324.831.715,40	8.579.647.418,45	3,81
4	Belanja Jalan, Irigasi dan	111.466.199.577,39	179.911.495.381,00	(68.445.295.803,61)	(38,04)
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.461.196.461,00	305.796.700,00	1.155.399.761,00	377,83
6	Belanja Aset Tidak Berwujud	1.881.003.468,00	925.870.500,00	955.132.968,00	103,16
Jumlah		386.884.401.043,24	446.286.590.042,40	(59.402.188.999,16)	(13,31)

5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
0,00 **0,00**

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang. Adapun Arus Kas Masuk, arus kas keluar serta arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan tahun 2025 dan 2024 adalah nihil.

5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
(5.246.957,00) **(123.300.850,00)**

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan maupun pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris selama TA 2025 adalah senilai Rp(5.246.957,00) dan TA 2024 adalah senilai Rp(123.300.850,00) maka Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp118.053.893,00 atau 95,74%. Rincian uraian Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar sebagai berikut.

- Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris selama TA 2025 adalah senilai Rp83.276.527.552,00 dan TA 2024 adalah senilai Rp96.035.532.796,00 maka Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp12.759.005.244,00 atau 13,29%.
- Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris selama TA 2025 adalah senilai Rp83.281.774.509, dan TA 2024 adalah senilai Rp96.158.833.646,00 maka Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp12.877.059.137,00 atau 13,39%.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Adapun rincian Arus Kas Masuk dan Keluar dari Aktivitas Transitoris disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.172
Rincian Arus Kas Masuk dan Keluar dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Arus Kas 2025		Arus Kas 2024	
		Arus Kas Masuk	Arus Kas Keluar	Arus Kas Masuk	Arus Kas Keluar
1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.517.598,00	2.517.598,00	0,00	0,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	6.760.493,00	6.760.493,00	11.386.681,00	11.386.681,00
3	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.124.894,00	8.124.894,00	0,00	0,00
4	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	20.280.726,00	20.280.726,00	32.933.700,00	32.933.700,00
5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	13.513.509,00	13.513.509,00	0,00	0,00
6	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	78.105.886,00	78.105.886,00	191.590.624,00	191.590.624,00
7	Belanja Iuran Wajib Pegawai 3.25%	0,00	0,00	71.061.411,00	71.061.411,00
8	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	0,00	0,00	14.510.902,00	14.510.902,00
9	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	193.202.060,00	193.202.060,00	177.053.281,00	177.053.281,00
10	Iuran Jaminan Kematian	579.024.852,00	579.024.852,00	520.946.742,00	520.946.742,00
11	Iuran Jaminan Kesehatan 4%	3.990.996.866,00	3.990.996.866,00	3.760.479.335,00	3.760.479.335,00
12	Iuran Wajib Pegawai 1%	2.068.778.014,00	2.068.778.014,00	1.913.950.471,00	1.913.950.471,00
13	Iuran Wajib Pegawai 8%	3.079.067.507,00	3.079.067.507,00	4.111.087.927,00	4.111.087.927,00
14	Pajak Penghasilan Ps 22	901.293.497,00	901.836.250,00	1.137.165.526,00	1.139.648.659,00
15	Pajak Penghasilan Ps 23	1.053.081.803,00	1.052.657.003,00	1.229.820.791,00	1.230.277.971,00
16	Pajak Penghasilan Ps 25	698.181,00	698.181,00	173.109,00	173.109,00
17	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	7.907.779.948,00	7.907.779.948,00	9.482.680.996,00	9.482.680.996,00
18	Pajak Pertambahan Nilai	52.213.425.514,00	52.218.496.646,00	57.577.413.763,00	57.577.411.860,00
19	PPH 21	7.430.657.101,00	7.430.657.101,00	13.525.406.402,00	13.601.794.219,00
20	Taspen	3.729.219.103,00	3.729.219.103,00	2.277.871.135,00	2.277.871.135,00
21	BPJS Kesehatan 1%	0,00	0,00	0,00	14.777.323,00
22	Kas Lainnya 2025	0,00	57.872,00	0,00	29.197.300,00
Jumlah		83.276.527.552,00	83.281.774.509,00	96.035.532.796,00	96.158.833.646,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Dari tabel Arus Kas Masuk dan Keluar dari Aktivitas Transitoris diatas, dapat disajikan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.173
Rekapitulasi Arus Kas Masuk dan Keluar dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025	Saldo Per 31 Desember 2024
Arus Masuk	83.276.527.552,00	96.035.532.796,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	83.276.527.552,00	96.035.532.796,00
Koreksi SILPA	0,00	0,00
Pengeluaran Kas Lainnya	0,00	0,00
Arus Keluar	83.281.774.509,00	96.158.833.646,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	83.281.716.637,00	96.129.636.346,00
Koreksi SILPA	0,00	0,00
Pengeluaran Kas Lainnya	57.872,00	29.197.300,00
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris	(5.246.957,00)	(123.300.850,00)

5.5.5 Kenaikan (Penurunan) Kas **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
(87.733.967.588,65) **127.532.872.728,03**

Kenaikan/penurunan kas selama TA 2025 adalah senilai Rp(87.733.967.588,65), dan TA 2024 adalah senilai Rp127.532.872.728,03 maka Kenaikan/penurunan kas TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp215.266.840.316,68 atau 168,79% karena terdapat peningkatan belanja aset. Adapun rincian Kenaikan/penurunan kas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.174
Rekapitulasi Penurunan Kas TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Aktivitas Operasi	298.897.546.503,59	573.711.239.120,43	(274.813.692.616,84)	(47,90)
2	Aktivitas Investasi	(386.626.267.135,24)	(446.055.065.542,40)	59.428.798.407,16	(13,32)
3	Aktivitas Pendanaan / Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Aktivitas Transitoris / Non Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris	(5.246.957,00)	(123.300.850,00)	118.053.893,00	(95,74)
Jumlah Kenaikan / Penurunan Kas		(87.733.967.588,65)	127.532.872.728,03	(215.266.840.316,68)	(168,79)

5.5.6 Saldo Awal Kas **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
436.029.832.062,90 **308.496.959.334,87**

Saldo Awal Kas TA 2025 adalah senilai Rp436.029.832.062,90 dan TA 2024 adalah senilai Rp308.496.959.334,87 maka Saldo Awal Kas TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp127.532.872.728,03 atau 41,34%. Adapun rincian Saldo Awal



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Kas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.175
Saldo Awal Kas TA 2025 dan 2024

No	Uraian	1-Jan-25	1-Jan-24
1	Kas di Kas Daerah	430.172.961.885,93	304.256.764.871,88
2	Kas di BLUD	4.256.815.368,00	3.149.285.782,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	600.000,00	4.475.000,00
4	Kas Lainnya	2.358.857,00	29.229.017,02
5	Kas Dana Bos	220.303.650,97	294.146.624,97
6	Kas Dana BOSP	37.431.942,00	995.700,00
7	Kas Dana BOK Puskesmas	1.190.048.036,00	643.060.923,00
8	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	149.312.323,00	119.001.416,00
Jumlah		436.029.832.062,90	308.496.959.334,87

5.5.7 Saldo Akhir Kas **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
348.295.864.474,25 **436.029.832.062,90**

Saldo Akhir Kas TA 2025 adalah senilai Rp348.295.864.474,25 dan TA 2024 adalah senilai Rp436.029.832.062,90 maka Saldo Akhir Kas TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp87.733.967.588,65 atau 20,12%. Adapun rincian Saldo Akhir Kas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.176
Saldo Akhir Kas

No	Uraian	Saldo per 31 Desember	
		2025	2024
1	Kas di Kas Daerah	343.429.299.450,43	430.172.961.885,93
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	600.000,00
3	Kas di BLUD	4.161.619.400,95	4.256.815.368,00
4	Kas Dana BOS	401.488.030,97	217.132.552,97
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	238.238,90	149.312.323,00
6	Kas Lainnya	438.600,00	5.529.955,00
7	Kas Dana BOSP	7.246.220,00	37.431.942,00
8	Kas Dana BOK Puskesmas	295.534.533,00	1.190.048.036,00
Jumlah		348.295.864.474,25	436.029.832.062,90



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.6 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang berisi tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas atas Aktivitas Operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.177
Laporan Perubahan Ekuitas

Uraian	2025	2024
EKUITAS AWAL	3.610.370.207.483,78	3.742.895.594.401,47
SURPLUS/DEFISIT-LO	339.880.782.666,50	(133.456.742.138,28)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	22.382.562.788,56	0,00
Lain-lain	(29.874.977.192,22)	931.355.220,59
EKUITAS AKHIR	3.942.758.575.746,62	3.610.370.207.483,78

5.6.1 Ekuitas Awal **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
3.610.370.207.483,78 **3.742.895.594.401,47**

Penyajian saldo ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Tana Tidung TA 2025 dan 2024 adalah senilai Rp3.610.370.207.483,78 dan Rp3.742.895.594.401,47.

5.6.2 Surplus/Defisit **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
339.880.782.666,50 **(133.456.742.138,28)**

Berdasarkan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Tana Tidung TA 2025 dan TA 2024 terdapat Surplus/Defisit senilai Rp339.880.782.666,50 dan Rp(133.456.742.138,28) yang menjadi pengurang Ekuitas Awal sehingga hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perubahan Ekuitas pada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
(7.492.414.403,66) **931.355.220,59**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar atas koreksi ekuitas TA 2025 dan TA 2024 senilai Rp(7.492.414.403,66) dan Rp931.355.220,59. Adapun rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel 5.178

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

No	Uraian	Penambah Ekuitas	Pengurang Ekuitas	Saldo Koreksi Ekuitas
1	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00
2	Selisih Revaluasi Aset Tetap	22.382.562.788,56	0,00	22.382.562.788,56
3	Lain-lain	0,00	29.874.977.192,22	(29.874.977.192,22)
Jumlah		22.382.562.788,56	29.874.977.192,22	(7.492.414.403,66)

5.6.3.1	Koreksi Nilai Persediaan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		0,00	0,00

Koreksi Nilai Persediaan di TA 2025 dan TA 2024 senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.6.3.2	Koreksi Nilai Revaluasi Aset Tetap	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		22.382.562.788,56	0,00

Koreksi Selisih Nilai Revaluasi Aset Tetap di TA 2025 dan 2024 senilai Rp22.382.562.788,56 dan Rp0,00. Koreksi tersebut merupakan koreksi Revaluasi atas Aset Tetap Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja pada Pusat Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung senilai Rp137.560.374.211,44 menjadi senilai Rp159.942.937.000,00 sehingga terdapat penambahan senilai Rp22.382.562.788,56 Berdasarkan Laporan Penilaian Atas Sebidang Tanah Sebagai Kawasan Pusat Pemerintah Kabupaten Tana Tidung oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kanwil DJKN Kaltim dan Utara KPKNL Tarakan Nomor LP-0036/1/KNL.1303/2025 Tanggal 4 Juli 2025 dengan luasan tanah dari luasan awal 405 Ha menjadi 404,042 Ha pada DPUPRPKP.

5.6.3.3	Lain-lain	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		(29.874.977.192,22)	931.355.220,59

Lain lain di TA 2025 dan TA 2024 senilai (Rp29.874.977.192,22) dan Rp931.355.220,29. Lain-lain merupakan koreksi ekuitas atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, Akumulasi dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud dan Kewajiban. Adapun rincian Lain-lain disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel 5.179
Koreksi Ekuitas Lain-lain

No	Uraian	Penambah Ekuitas	Pengurang Ekuitas	Saldo Koreksi Ekuitas
1	Koreksi Ekuitas-Aset Lancar	0,00	1.353.897.362,00	(1.353.897.362,00)
2	Koreksi Ekuitas-Investasi Jangka Panjang	0,00	380.087.119,35	(380.087.119,35)
3	Koreksi Ekuitas-Aset Tetap	0,00	0,02	(0,02)
4	Koreksi Ekuitas-Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	28.094.753.071,52	0,00	28.094.753.071,52
5	Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya	1.130.000,01	0,00	1.130.000,01
6	Koreksi Ekuitas-Akumulasi dan Amortisasi Aset Lainnya	0,00	241.292.242,68	(241.292.242,68)
7	Koreksi Ekuitas-Kewajiban Jangka Pendek	11.128.174.444,30	0,00	11.128.174.444,30
8	Koreksi Ekuitas-Kewajiban Jangka Panjang	0,00	67.123.757.984,00	(67.123.757.984,00)
Jumlah		39.224.057.515,83	69.099.034.708,05	(29.874.977.192,22)

5.6.3.3.1 Koreksi Aset Lancar **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
(1.353.897.362,00) **(137.618.705,96)**

Koreksi Aset Lancar TA 2025 dan TA 2024 senilai (Rp1.353.897.362,00) dan (Rp137.618.705,96). Koreksi tersebut merupakan koreksi Kas Dana BOK Puskesmas, Piutang Pajak, dan Piutang Transfer Pusat dan Daerah. Koreksi Aset Lancar dapat disajikan sebagai berikut.

5.6.3.3.1.1 Koreksi Nilai Kas **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
(57.872,00) **(21,52)**

Koreksi Nilai Kas TA 2025 dan TA 2024 senilai (Rp57.872,00) dan (Rp21,52). Koreksi Nilai Kas tersebut merupakan koreksi nilai kas BOK karena adanya transfer dari dana pribadi ke rekening *virtual account* PMT Lokal BOK Puskesmas Muruk Rian untuk mengaplikasikan pembayaran ke rekening pihak ketiga pengadaan bahan makanan tambahan sejumlah Rp57.872,00, yang telah dicatat sebagai pendapatan TA 2023 sesuai Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Transfer (SP3T) Nomor 2771/SP3T/DK/2023 namun pada TA 2025 melalui konsultasi kepada Tim Biro Perencanaan Kemenkes, diarahkan untuk dikeluarkan dari SiLPA dana BOK ditegaskan kembalibahwa bagi puskesmas yang rekening giranya masuk dana di luar BOK agar segera dipindahbukukan sehingga pada tanggal 7 Maret 2025, BNI mendebet uang kas diluar dana BOK tersebut ke rekening asal, agar rekonsiliasi kas dana BOK hanya berasal dari transfer dana BOK pusat.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.6.3.3.1.2 Koreksi Piutang Pajak	<u>31 Desember 2025</u> (18.531.288,00)	<u>31 Desember 2024</u> (137.618.684,44)

Koreksi Piutang Pajak TA 2025 dan TA 2024 senilai (Rp18.531.288,00) dan (Rp137.618.684,44). Koreksi piutang pajak merupakan pajak reklame dan pajak MBLB TA 2024 yang baru diakui pada TA 2025.

5.6.3.3.1.3 Piutang Dana Transfer Pusat Dan Dana Transfer Daerah lainnya	<u>31 Desember 2025</u> (1.372.370.778,00)	<u>31 Desember 2024</u> 0,00

Piutang Dana Transfer Pusat dan Dana Transfer Daerah Lainnya TA 2025 dan TA 2024 senilai (Rp1.372.370.778,00) dan Rp0,00. Koreksi Piutang merupakan penyaluran kurang bayar s.d TA 2023 dan Piutang BH Pajak kepada Provinsi TA 2024 yang baru diakui pada TA 2025. Koreksi nilai piutang TA 2025 sebagai berikut.

- Penambah ekuitas senilai Rp13.467.395.222,00 atas Kurang Bayar PKB, BBNKB, PBBKB, dan AP yang baru di akui pada TA 2025 sesuai SK Gubernur Nomor 100.3.3.1/128/2025 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada Kabupaten/Kota TA 2024.
- Pengurang ekuitas senilai Rp14.839.766.000,00 atas penyaluran KB SD TA 2023 sesuai KMK Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada TA 2024.

5.6.3.3.2 Koreksi Ekuitas-Investasi Jangka Panjang	<u>31 Desember 2025</u> (380.087.119,35)	<u>31 Desember 2024</u> 1.117.225.376,50

Koreksi Investasi Jangka Panjang TA 2025 dan TA 2024 senilai (Rp380.087.119,35) dan Rp1.117.225.376,50. koreksi Penyertaan Modal Pemerintah merupakan hasil koreksi yang tertuang dalam laporan keuangan PDAM Tirta Sungoi Sesayap hasil dari audit Kantor Akuntan Publik (KAP) atas laporan keuangan TA 2025 yang melakukan koreksi atas Laba tahun sebelumnya.

5.6.3.3.3 Koreksi Ekuitas-Aset Tetap	<u>31 Desember 2025</u> (0,02)	<u>31 Desember 2024</u> (25.751.449,95)

Terdapat Koreksi Aset Tetap TA 2025 dan TA 2024 senilai Rp0,02 dan Rp25.751.449,95. Koreksi nilai aset tetap tersebut atas perhitungan pembulatan desimal.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.6.3.3.4	Koreksi Ekuitas-Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	<u>31 Desember 2025</u> 28.094.753.071,52	<u>31 Desember 2024</u> 0,00

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2025 dan TA 2024 senilai Rp28.094.753.071,52 dan Rp0,00. Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap karena ada koreksi akumulasi penyusutan karena terdapat aset yang belum disusutkan pada tahun sebelumnya dan koreksi akumulasi penyusutan karena perubahan masa manfaat.

5.6.3.3.5	Koreksi Ekuitas-Aset Tidak Berwujud	<u>31 Desember 2025</u> 1.130.000,01	<u>31 Desember 2024</u> 0,00

Terdapat Koreksi Aset Tidak Berwujud TA 2025 dan TA 2024 senilai Rp1.130.000,01 dan Rp0,00. Koreksi Aset Tidak Berwujud atas Pengakuan ATB yang TA 2024 dicatat sebagai aset Ekstrakompatibel dan dikoreksi kembali menjadi ATB pada TA 2025.

5.6.3.3.6	Koreksi Ekuitas-Akumulasi dan Amortisasi Aset Lainnya	<u>31 Desember 2025</u> 241.292.242,68	<u>31 Desember 2024</u> 0,00

Terdapat Akumulasi dan Amortisasi Aset Lainnya TA 2025 dan TA 2024 senilai Rp241.292.242,68 dan Rp0,00.

5.6.3.3.7	Koreksi Ekuitas-Kewajiban Jangka Pendek	<u>31 Desember 2025</u> 11.128.174.444,30	<u>31 Desember 2024</u> (22.500.000,00)

Koreksi Kewajiban Jangka Pendek TA 2025 dan 2024 senilai Rp11.128.174.444,30 dan (Rp22.500.000,00). Koreksi nilai kewajiban TA 2025 sebagai berikut.

- a. Penambah ekuitas senilai Rp11.130.424.444,30 merupakan koreksi utang belanja modal, dan utang atas penyaluran lebih bayar. Adapun penambah ekuitas sebagai berikut.
 - 1) Penambah ekuitas senilai Rp600.444,30 merupakan kewajiban yang telah dihapuskan karena pihak ketiga tidak menuntut untuk dibayarkan dibuktikan dengan berita acara tidak menuntut kembali.
 - 2) Penambah ekuitas senilai Rp11.129.824.000,00 merupakan pengurangan utang kelebihan pembayaran dana transfer umum sesuai dengan KMK Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.
- b. Pengurang ekuitas senilai Rp2.250.000,00 merupakan kewajiban pendapatan diterima dimuka sewa bangunan Ruko pada pasar Trans Betayau oleh Bankaltimtara.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5.6.3.3.8	Koreksi Ekuitas-Kewajiban Jangka Panjang	<u>31 Desember 2025</u> 67.123.757.984,00	<u>31 Desember 2024</u> (0,00)

Koreksi ekuitas Kewajiban Jangka Panjang senilai Rp67.123.757.984,00 merupakan koreksi kewajiban berdasarkan Hasil Keputusan Peninjauan Kembali Nomor 497/PK/Pdt/2016, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung diputuskan untuk membayar ganti rugi materil senilai Rp67.123.757.984,00 kepada PT PMJ sebagai akibat dari tuntutan pengembalian Dana Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) dari PT PMJ kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Tuntutan dari PT PMJ kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung didasarkan bahwa selama Tahun 2008 s.d. 2010, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah menerima pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) senilai 6% dari harga jual batubara/ton yang dilakukan oleh PT PMJ.

5.6.4	Ekuitas Akhir	<u>31 Desember 2025</u> 3.942.758.575.746,62	<u>31 Desember 2024</u> 3.610.370.207.483,78

Berdasarkan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 diperoleh saldo akhir Ekuitas senilai Rp3.942.758.575.746,62 dan Rp3.610.370.207.483,78.



BAB VI

**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
2025**



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Informasi Non Keuangan, yang dapat dijelaskan pada bagian ini antara lain adalah:

a. Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung. Kabupaten Tana Tidung adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara, yang disetujui pembentukannya pada sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 17 Juli 2007. Kabupaten ini merupakan pemekaran tiga wilayah kecamatan di Kabupaten Bulungan, yakni Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir dan Tana Lia. Sejak tahun 2012, Kecamatan ini merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, seiring dengan pemekaran provinsi baru tersebut dari Kalimantan Timur. Kabupaten Tana Tidung berada di tengah-tengah antara Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan yang merupakan jalur strategis perekonomian.

Kabupaten Tana Tidung yang beribukota di Tideng Pale terletak di Provinsi Kalimantan Utara dengan luas wilayah sekitar 4.828,58 (Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Koma Lima Puluh Delapan) Kilometer Persegi. Kabupaten Tana Tidung terdiri dari lima Kecamatan yaitu Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kecamatan Tana Lia, Kecamatan Muruk Rian, Kecamatan Betayau. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sekatak Kabupaten Nunukan, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Malinau Kota dan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau.

b. Penjelasan mengenai sifat operasi dan kegiatan Pokok

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan, yang didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam kaitan ini Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan ini ditetapkan dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain bertugas dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung juga memiliki fungsi sebagai penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan.

Dalam hal ini, yang menjadi Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar:



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

-
- 1) Pendidikan;
 - 2) Kesehatan;
 - 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 5) Ketenteraman, Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat; dan
 - 6) Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar:

- 1) Tenaga Kerja;
- 2) Lingkungan Hidup;
- 3) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 4) Perhubungan;
- 5) Komunikasi & Informatika;
- 6) Penanaman Modal; dan
- 7) Perpustakaan.

Urusan Pemerintahan Pilihan:

- 1) Pariwisata;
- 2) Pertanian; dan
- 3) Perindustrian.

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan:

- 1) Sekretariat Daerah;
 - a) Bagian UMUM
 - b) Bagian Pemerintahan
 - c) Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
 - d) Bagian Hukum
 - e) Bagian Organisasi
 - f) Bagian Administrasi Pembangunan
- 2) Sekretariat DPRD.

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan:

- 1) Perencanaan;
- 2) Keuangan; dan
- 3) Kepegawaian.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan:

- 1) Inspektorat.

Unsur Kewilayahan:

- 1) Kecamatan
 - a) Kecamatan Sesayap;
 - b) Kecamatan Sesayap Hilir;
 - c) Kecamatan Tana Lia;
 - d) Kecamatan Betayau; dan
 - e) Kecamatan Muruk Rian.

Unsur Pemerintahan Umum:

- 1) Kesatuan Bangsa dan Politik.

c. Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Kegiatan Operasional

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka melaksanakan Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, yang bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui langkah-langkah seperti:

- 1) Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas;
- 2) Tersedianya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan merata;
- 3) Terwujudnya daya saing angkatan kerja lokal dalam seleksi ASN, Pegawai BUMN/BUMD, Tenaga Kerja Badan Usaha Milik Swasta;
- 4) Terwujudnya tenaga kerja yang produktif dan terampil dan berdaya saing; dan
- 5) Terwujudnya masyarakat yang cerdas dan terampil.

Dari tujuan tersebut, berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi serta memperhitungkan modal dasar, maka Visi dan Misi Pembangunan 2021-2026 yaitu:



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

1) Visi;

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 adalah **“TERWUJUDNYA TANA TIDUNG BERMARTABAT, SEJAHTERA, INDAH DAN HUMANIS (BERSIH)”**

2) Misi;

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026, dirumuskan 7 (tujuh) Misi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan SDM yang berkualitas;
- b) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dasar yang terpadu tata ruang;
- c) Menciptakan pembangunan ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam;
- d) Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup;
- e) Meningkatkan kemandirian desa;
- f) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- g) Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah.

3) Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026, maka Pemerintah Daerah akan melaksanakannya melalui 5 (lima) misi yang telah disusun dan strategi-strategi pembangunan daerah.

Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau selama periode RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah kebijakan pembangunan tahun 2021 difokuskan pada upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan menahun dan mendesak untuk segera ditangani. Selain itu, upaya pembenahan birokrasi pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik menjadi fokus prioritas yang akan ditangani pada tahun pertama. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga didorong untuk lebih ditingkatkan melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau semua lapisan masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Penyelenggaraan pelayanan publik terus diperbaiki mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten serta menjamin proses pelayanan publik yang akuntabel dan transparan. Permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Tana Tidung memerlukan upaya yang menerus dan berkesinambungan didukung sumber daya yang memadai. Alokasi pendanaan untuk bidang infrastruktur, permukiman, pelayanan kesehatan dan pendidikan perlu ditingkatkan untuk memastikan penanganan masalah dengan tuntas. Di sisi lain, upaya untuk mengefisienkan belanja pemerintahan daerah perlu terus dilakukan sehingga dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, dituangkan melalui kebijakan yaitu:

1) Kebijakan Pemerintah Daerah.

Kebijakan Pemerintah Daerah tertuang dalam Rencana Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah dan Rencana Program Pembangunan Daerah.

Rencana Strategi Pembangunan Daerah antara lain:

- a) Pengembangan Agro industri;
- b) Pengoptimalan mitigasi gangguan kemandirian pangan;
- c) Peningkatan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat;
- d) Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi; dan
- e) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan.

2) Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2010 pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21.

Asas umum yang menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi beberapa hal yaitu:

- 1) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- 2) Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah;
- 3) Penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai dari APBD;
- 4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah;
- 5) Anggaran pendapatan dan belanja daerah mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi; dan
- 6) Ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD dalam hal ini adalah Perumda Daerah Air Minum Tirta Sungoi Sesayap. Adapun Peraturan Daerah terkait Penyertaan Modal masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah karena masih diperlukan pembahasan terkait isi dari penyertaan modal tersebut. Adapun Laporan Keuangan Perumda Daerah Air Minum Tirta Sungoi Sesayap TA 2025 dapat dilihat paa **Lampiran 6.1.**

Dari asas umum tersebut, ditetapkan mengenai kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yaitu:

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pengelompokan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung terbagi menjadi:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
 - (1) Pajak Daerah,
 - (2) Retribusi Daerah,
 - (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah.
- b) Dana Perimbangan, terdiri dari:
 - (1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak,
 - (2) Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Secara umum, kebijakan pendapatan daerah meliputi:

- a) Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan;
- b) Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi pendapatan;
- c) Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional.

2) Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pengelompokan belanja daerah terbagi menjadi:

- a) Belanja daerah menurut klasifikasi ekonomi terdiri dari; belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial), belanja modal dan belanja tak terduga;
- b) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari; urusan wajib dan urusan pilihan;
- c) Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Arah kebijakan belanja daerah antara lain:

- a) Membiayai urusan yang bersifat *mandatory* dan sudah ditentukan peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Pembiayaan operasional dan program dasar pada SKPD yang telah dibentuk Kabupaten Tana Tidung, agar setiap SKPD dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang khususnya berhubungan dengan tugas – tugas operasional dan program dasar yang memang harus dilaksanakan secara berkesinambungan;
- c) Pembiayaan program dan kegiatan yang berhubungan dengan kelengkapan organisasi pemerintahan daerah untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tana Tidung;
- d) Pembiayaan terhadap kelanjutan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, yang merupakan kebijakan nasional, khususnya menyangkut penyelenggaraan pemerintahan daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- e) Pembiayaan untuk kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintah umum, terutama menyangkut kebutuhan pegawai non gaji, seperti halnya biaya perjalanan, barang dan jasa.
- 3) Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, yang terdiri dari sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.



BAB VII

**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
2025**



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

BAB VII
PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2025, disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung disebutkan bahwa Entitas Pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, sedangkan entitas akuntansi yaitu perangkat daerah, BLUD, dan PPKD dalam lingkup pemerintah Kabupaten Tana Tidung, tidak termasuk Perusahaan Daerah, dan Entitas Akuntansi Kabupaten Tana Tidung memiliki 29 Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri dari dua Sekretariat, lima Badan, 15 Dinas, satu Kantor, lima Kecamatan, satu Inspektorat, dan enam BLUD yang berfungsi sebagai entitas akuntansi. Setiap entitas akuntansi diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dari setiap entitas akuntansi tersebut kemudian digabungkan oleh entitas pelaporan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan gabungan dari Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi. Laporan Keuangan Dinas merupakan gabungan dari laporan keuangan dinas sebagai entitas akuntansi, Unit Pelayanan Teknis (UPT) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berada dibawahnya. Laporan Keuangan merupakan gabungan dari laporan keuangan badan sebagai entitas akuntansi kantor-kantor yang ada di bawahnya. Laporan Keuangan Sekretariat Daerah merupakan gabungan dari Laporan Keuangan Sekretariat Daerah sebagai entitas akuntansi dan bagian yang ada di bawahnya. Selain itu ada beberapa SKPD yang tidak melakukan penggabungan laporan keuangan karena hanya terdiri dari satu entitas akuntansi, yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat DPRD dan BLUD Rumah Sakit. Khusus untuk PPKD, sebagai entitas pelaporan selain menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, juga menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas. Laporan keuangan dari 29 SKPD entitas akuntansi penggabungan tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Pencapaian target keuangan TA 2025 didasarkan pada target pendapatan Senilai Rp1.027.212.457.453,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 tercatat Senilai Rp1.078.782.452.324,05 atau 105,02%. Realisasi tersebut lebih dari target Senilai Rp51.569.994.871,05 atau 5,02%, jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 Senilai Rp1.483.899.695.654,45 maka tahun 2025 mengalami penurunan pendapatan Senilai Rp405.117.243.330,40 atau 27,30%. Dan Anggaran Belanja Daerah TA 2025 Senilai Rp1.433.234.595.478,90, Realisasi Belanja Daerah TA 2025 Rp1.166.511.172.955,70 atau 81,39%, mengalami penurunan Senilai Rp189.732.349.120,72 atau 13,99%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 yaitu Senilai Rp1.356.243.522.076,42. Dari kondisi tersebut dapat digambarkan bahwa di TA 2025 terjadi Defisit Senilai Rp87.728.720.631,65, Defisit ini disebabkan realisasi pendapatan yang lebih kecil dibandingkan dengan realisasi belanja. Sedangkan pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah Senilai Rp436.022.138.025,90.

Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah Senilai Rp348.293.417.394,25. SiLPA TA 2025 mengalami penurunan Senilai Rp87.728.720.631,65 atau 20,12%, jika dibandingkan dengan SiLPA TA 2024 Senilai Rp436.022.138.025,90. Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung TA 2025.



LAMPIRAN VIII

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PIUTANG UANG MUKA PENGADAAN BARANG/JASA TA 2025 DAN 2024
PER 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	PENYEDIA	NILAI KONTRAK/ADDENDUM	PIUTANG UANG MUKA (TA 2023+TA 2024)			PENGEMBALIAN UANG MUKA TA 2024	SALDO PIUTANG UANG MUKA TA 2024	PENAMBAHAN UANG MUKA TA 2025	PENGEMBALIAN UANG MUKA TA 2025	SALDO PIUTANG UANG MUKA TA 2025	KET
				Tanggal	Nomor SP2D	Nilai (Rp)						
TOTAL						-	-	-	-	-	-	

TIDENG PALE, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



LAMPIRAN IX

DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	Piutang Pajak Restoran	1.020.000,00	5.100,00	1.014.900,00
2	Piutang Pajak Reklame	1.098.651,00	24.131,12	1.074.519,88
3	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00	25.000,00	4.975.000,00
4	Piutang Pajak MBLB	18.335.100,00	1.833.510,00	16.501.590,00
5	Piutang PBB-P2	3.360.247.073,00	1.764.900.751,96	1.595.346.321,04
6	Piutang BPJT-Tenaga Listrik	51.661.362,00	258.306,98	51.403.055,02
7	Piutang Retribusi Jasa Umum	33.684.393,00	-	33.684.393,00
8	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	33.697.944,00	3.369.794,40	30.328.149,60
9	Piutang Dana Transfer Umum-DBH Pajak	346.079.087.000,00	-	346.079.087.000,00
10	Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak dan Sumber Daya Alam	3.200.174.000,00	-	3.200.174.000,00
11	Piutang Transfer Antar Daerah	29.962.545.759,00	-	29.962.545.759,00
12	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.234.837.507,00	1.231.700.757,56	3.136.749,44
JUMLAH		383.981.388.789,00	3.002.117.352,02	380.979.271.436,98

TIDENG PALE, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



LAMPIRAN X

DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISHAN DANA BERGULIR



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR
DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
		N I H I L	I L	

TIDENG PALE, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



LAMPIRAN XI

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Akhir Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2017	PT. BPD Bank Kaltimara	Akta Nomor 12 AHU-0041890.AH.01.01	Uang	100.100.000.000,00	100.100.000.000,00	100.100.000.000,00	100.100.000.000,00	0,00	4.816.815.131,72	4.816.815.131,72	100.100.000.000,00
2	2022	PDAM Tirta Sungoi Sesayap KAB. TANA TIDUNG	Perda Nomor 1 Tahun 2022	Uang dan Aset	48.493.447.042,11	3.590.906.609,54	43.859.863.686,63	47.450.770.296,17	0,00	0,00	0,00	0,00

TIDENG PALE, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



LAMPIRAN XII

DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH



KABUPATEN TANA TIDUNG
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Tanah	444.105.621.898,61	37.847.509.428,56	1.702.631.819,79	480.250.499.507,38
2	Peralatan dan Mesin	368.942.603.056,79	45.702.788.185,80	14.317.776.273,19	400.327.614.969,40
3	Gedung dan Bangunan	1.454.317.612.762,93	465.449.664.660,10	185.962.392.621,48	1.733.804.884.801,55
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.333.413.362.850,06	163.501.984.533,46	91.395.835.920,96	2.405.519.511.462,56
5	Aset Tetap Lainnya	30.049.549.747,30	2.824.576.266,48	2.038.999.696,00	30.835.126.317,78
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	356.033.937.401,24	231.171.487.280,10	244.886.492.128,50	342.318.932.552,84
7	Akumulasi Penyusutan	(2.141.030.024.649)	(209.473.002.847)	(39.700.978.257)	(2.310.802.049.239)
Jumlah		2.845.832.663.070,82	737.025.007.511,34	500.603.150.207,56	3.082.254.520.372,60

TIDENG PALE, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



LAMPIRAN XIII

DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
REKAPITULASI DAFTAR ASET TETAP

TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	NILAI PER 31 DESEMBER 2024 (audited)	MUTASI		SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2025
			TAMBAH	KURANG	
1	Tanah	444.105.621.898,61	37.847.509.428,56	1.702.631.819,79	480.250.499.507,38
2	Peralatan dan Mesin	368.942.603.056,79	45.702.788.185,80	14.317.776.273,19	400.327.614.969,40
3	Gedung dan Bangunan	1.454.317.612.762,93	465.449.664.660,10	185.962.392.621,48	1.733.804.884.801,55
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	2.333.413.362.850,06	163.501.984.533,46	91.395.835.920,96	2.405.519.511.462,56
5	Aset Tetap Lainnya	30.049.549.747,30	2.824.576.266,48	2.038.999.696,00	30.835.126.317,78
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	356.033.937.401,24	231.171.487.280,10	244.886.492.128,50	342.318.932.552,84
JUMLAH		4.986.862.687.716,93	946.498.010.354,50	540.304.128.459,92	5.393.056.569.611,51

TIDENG PALE, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



LAMPIRAN XIV

DAFTAR REKAPITULASI KONTRUKSI DALAM PEKERJAAN



KABUPATEN TANA TIDUNG

DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN

PER 31 DESEMBER 2024

NO	NAMA OPD	NILAI	MUTASI ASET TAHUN 2024		SALDO AKHIR
		PER 31 DESEMBER 2024	MASUK	KELUAR	31 DESEMBER 2025
A	B	C	D	E	F
					C+D-E
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	26.969.260.897,09	41.662.884.422,07	13.956.411.054,05	54.675.734.265,11
2	Dinas Kesehatan	2.232.145.449,77	3.929.071.953,50	1.588.559.005,77	4.572.658.397,50
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	322.941.296.188,38	174.359.796.812,10	228.948.154.068,68	268.352.938.931,81
4	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	-	-	-	-
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49.800.000,00	10.959.304.048,43	-	11.009.104.048,43
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-	-	-	-
8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	-	-	-	-
9	Dinas Lingkungan Hidup	198.594.000,00	-	-	198.594.000,00
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
11	Dinas Perhubungan	1.014.296.434,00	516.463.000,00	439.123.000,00	1.091.636.434,00
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-	-	-	-
13	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
14	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	310.245.000,00	99.967.044,00	310.245.000,00	99.967.044,00
15	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	1.916.052.200,00	-	-	1.916.052.200,00
16	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	212.615.000,00	-	-	212.615.000,00
17	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm	140.627.232,00	-	-	140.627.232,00
18	Bagian Umum	-	-	-	-
19	Bagian Pemerintahan	-	-	-	-
20	Bagian Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-
21	Bagian Hukum	-	-	-	-
22	Bagian Organisasi	-	-	-	-
23	Bagian Administrasi Pembangunan Dan Umum	-	-	-	-
24	Inspektorat Kabupaten	49.005.000,00	-	-	49.005.000,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan	-	-	-	-
26	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-
28	Sekretariat Dprd	-	-	-	-
29	Kecamatan Sesayap	-	-	-	-
30	Kecamatan Sesayap Hilir	-	-	-	-
31	Kecamatan Tana Lia	-	-	-	-
32	Kecamatan Betayau	-	-	-	-
33	Kecamatan Muruk Rian	-	-	-	-
34	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-
Total		356.033.937.401,24	231.527.487.280,10	245.242.492.128,50	342.318.932.552,84

TIDENG PALE, 4 September 2026

BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



LAMPIRAN XV

DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA OPD	NILAI	MUTASI ASET TAHUN 2024		NILAI
		PER 31 DESEMBER 2024	MASUK	KELUAR	PER 31 DESEMBER 2025
A	B	C			F
			D	E	C+D-E
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	8.661.563.835,09	467.715.757,85	935.431.515,70	8.193.848.077,24
2	Dinas Kesehatan	3.910.141.000,00	-	650.000.000,00	3.260.141.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	75.905.261.411,00	20.010.719.700,00	51.628.202.985,00	44.287.778.126,00
4	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	1.193.622.500,00	-	-	1.193.622.500,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja	998.055.000,00	-	-	998.055.000,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	924.182.146,00	-	-	924.182.146,00
8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	181.062.500,00	-	28.570.000,00	152.492.500,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	139.156.100,00	-	-	139.156.100,00
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	293.276.700,00	109.307.300,00	-	402.584.000,00
11	Dinas Perhubungan	2.370.710.893,00	-	-	2.370.710.893,00
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	409.444.660,00	245.210.000,00	245.210.000,00	409.444.660,00
13	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	45.758.000,00	276.588.500,00	-	322.346.500,00
14	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	19.100.000,00	-	-	19.100.000,00
16	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	13.702.114.819,92	94.723.333,34	259.456.666,67	13.537.381.486,59
17	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm	1.693.481.500,00	53.866.000,00	197.783.000,00	1.549.564.500,00
18	Bagian Umum	10.631.186.983,67	1.564.754.000,00	2.755.184.428,67	9.440.756.555,00
19	Bagian Pemerintahan	312.625.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	312.625.000,00
20	Bagian Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat	260.285.000,00	-	-	260.285.000,00
21	Bagian Hukum	562.760.000,00	-	32.450.000,00	530.310.000,00
22	Bagian Organisasi	590.563.300,00	69.246.000,00	-	659.809.300,00
23	Bagian Administrasi Pembangunan Dan Umum	178.140.941,00	-	-	178.140.941,00
24	Inspektorat Kabupaten	449.786.000,00	1.421.897.714,29	-	1.871.683.714,29
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan	886.797.800,00	-	207.820.000,00	678.977.800,00
26	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	4.786.943.724,50	933.663.036,50	1.028.392.986,50	4.692.213.774,50
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	452.476.300,00	584.885.000,00	27.485.150,00	1.009.876.150,00
28	Sekretariat DPRD	3.762.668.415,01	-	-	3.762.668.415,01
29	Kecamatan Sesayap	3.440.105.856,08	319.008.600,00	1.886.627.856,08	1.872.486.600,00
30	Kecamatan Sesayap Hilir	4.241.606.975,00	48.782.800,00	290.786.800,00	3.999.602.975,00
31	Kecamatan Tana Lia	9.578.764.374,67	-	-	9.578.764.374,67
32	Kecamatan Betayau	618.942.800,00	420.358.000,00	38.650.000,00	1.000.650.800,00
33	Kecamatan Muruk Rian	1.187.572.994,00	-	-	1.187.572.994,00
34	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	745.030.000,00	-	-	745.030.000,00
Total		153.133.187.528,94	26.636.125.741,98	60.227.451.388,62	119.541.861.882,29

TIDENG PALE, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



LAMPIRAN XVI

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH



KABUPATEN TANA TIDUNG
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

PER 31 DESEMBER 2025

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR KUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRANSFER KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		N I H I L						

TIDENG PALE, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



LAMPIRAN XVII

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2025

No	Uraian	Saldo per 31 Desember		Kenaikan / Penurunan	%
		2025	2024		
1	Pendapatan Diterima di muka	52.498.817,74	138.745.677,00	(86.246.859,26)	(62,16)
2	Utang Belanja Pegawai	2.063.078.419,00	3.479.341.372,00	(1.416.262.953,00)	(40,70)
3	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan	185.881.204,00	0,00	185.881.204,00	100,00
4	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	10.610.623,00	0,00	10.610.623,00	100,00
5	Utang Belanja Barang yang Diserahkan	266.939.223,93	271.762.223,55	(4.822.999,62)	(1,77)
6	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	3.622.698,00	(3.622.698,00)	(100,00)
7	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Kalibrasi	0,00	2.550.000,00	(2.550.000,00)	(100,00)
8	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	17.100.340,00	9.038.848,00	8.061.492,00	89,19
9	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	308.662.803,00	172.847.847,00	135.814.956,00	78,57
10	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/ Tv Berlangganan	21.589.312,17	20.655.768,00	933.544,17	4,52
11	Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	3.412.000,00	0,00	3.412.000,00	100,00
12	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat	170.656.804.678,70	133.970.594.000,00	36.686.210.678,70	27,38
13	Utang Pengadaan Aset Tetap	2.561.377.249,74	4.378.244.772,03	(1.816.867.522,29)	(41,50)
14	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2.504.952,00	11.344.847,00	(8.839.895,00)	(77,92)
Total		176.150.459.623,28	142.458.748.052,58	33.691.711.570,70	75,61

TIDENG PALE, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



LAMPIRAN XVIII

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
HUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

PER 31 DESEMBER 2025

No	OPD	RINCIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
				TAMBAH	KURANG	
		N I H I L				
		Sub Jumlah				-
		JUMLAH	-			-

TIDENG PALE, 4 September 2026

BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



LAMPIRAN XIX

DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM
DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2023 DAN DIANGGARKAN
KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN
BERIKUTNYA



KABUPATEN TANA TIDUNG
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH			%	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			N I H I L					

TIDENG PALE, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



LAMPIRAN XX

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH / PERUSAHAAN DAERAH



LAMPIRAN XX .1

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH / PERUSAHAAN DAERAH



KABUPATEN TANA TIDUNG
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5+6+7	9	10	11 = 9+10	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17x18
1	PDAM Tirta Sungai Sesayap KAB. TANA TIDUNG	APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung	Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Tana Tidung sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2022	3.600.565.555,09	44.927.980.836,02	-	48.528.546.391,11	35.099.349,00	-	35.099.349,00	-	-	-	60.215.671.263,63	(11.722.224.221,52)	48.493.447.042,11	99,93	48.458.373.079,49
	Sub Total (1)			3.600.565.555,09	44.927.980.836,02	-	48.528.546.391,11	35.099.349,00	-	35.099.349,00	-	-	-	60.215.671.263,63	(11.722.224.221,52)	48.493.447.042,11	99,93	48.458.373.079,49
	Total Seluruh Bidang industri			3.600.565.555,09	44.927.980.836,02	-	48.528.546.391,11	35.099.349,00	-	35.099.349,00	-	-	-	60.215.671.263,63	(11.722.224.221,52)	48.493.447.042,11	99,93	48.458.373.079,49

TIDENG PALE, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



LAMPIRAN XX .2

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN
(LAPORAN LABA / RUGI) BADAN USAHA MILIK
DAERAH / PERUSAHAAN DAERAH



KABUPATEN TANA TIDUNG
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

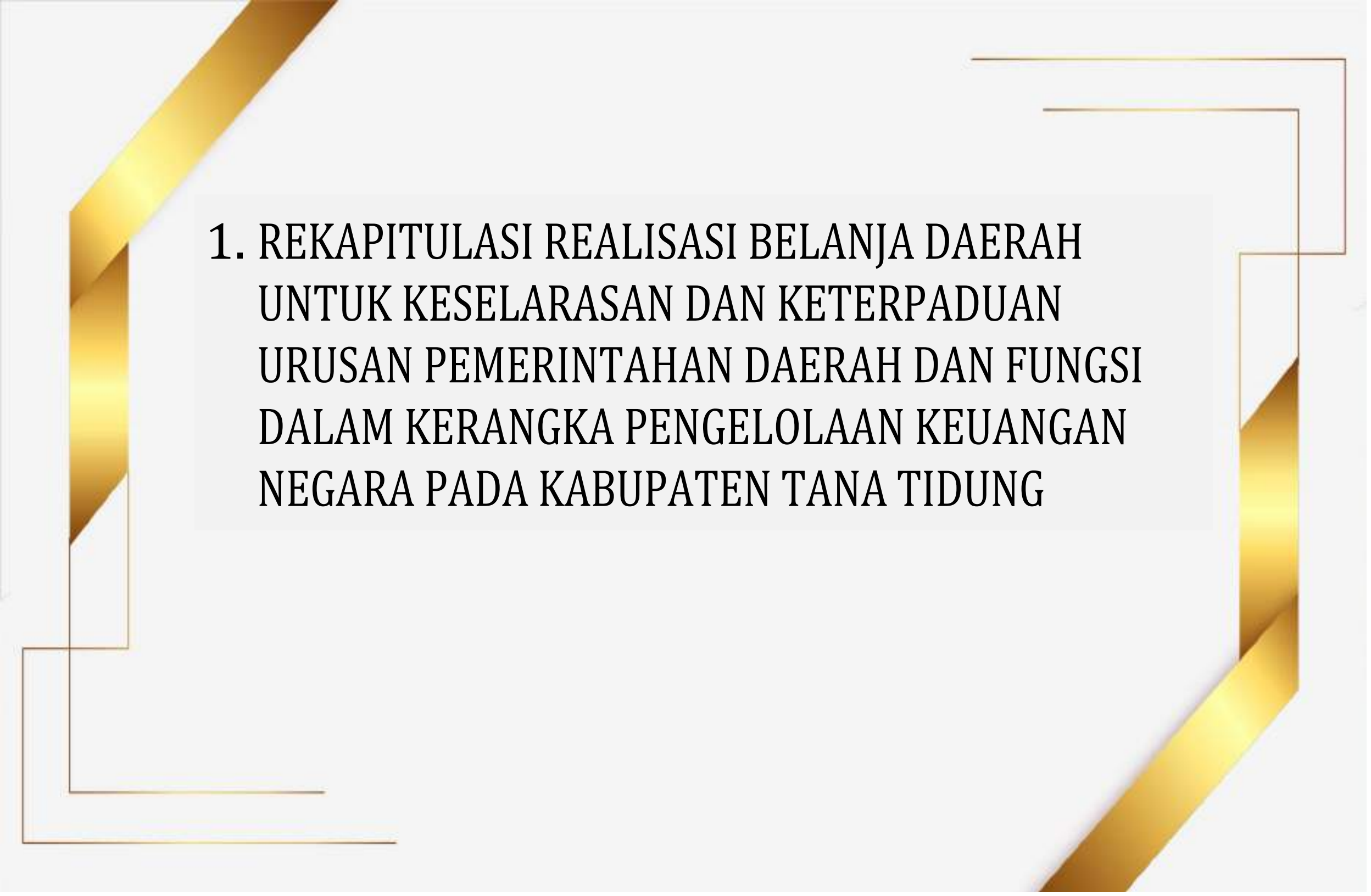
No	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di luar usaha	Beban di luar usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bidang Perusahaan Air Minum PDAM Tirta Sungoi Sesayap KAB. TANA TIDUNG	APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung	Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Tana Tidung sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2022	6.030.125.007,35	4.609.292.376,61	1.420.832.630,74	1.931.234,60	-	1.422.763.865,34
	Sub Total (1)			6.030.125.007,35	4.609.292.376,61	1.420.832.630,74	1.931.234,60	-	1.422.763.865,34
	Total Seluruh Bidang industri			6.030.125.007,35	4.609.292.376,61	1.420.832.630,74	1.931.234,60	-	1.422.763.865,34

TIDENG PALE, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.



LAMPIRAN INFORMASI LAINNYA

The slide features a light gray background with decorative gold elements. A wide, 3D-style gold ribbon runs diagonally from the top-left corner towards the bottom-right. Thin, dark gold lines form a stepped border on the left and right sides of the slide, framing the central text area.

1. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PADA KABUPATEN TANA TIDUNG



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

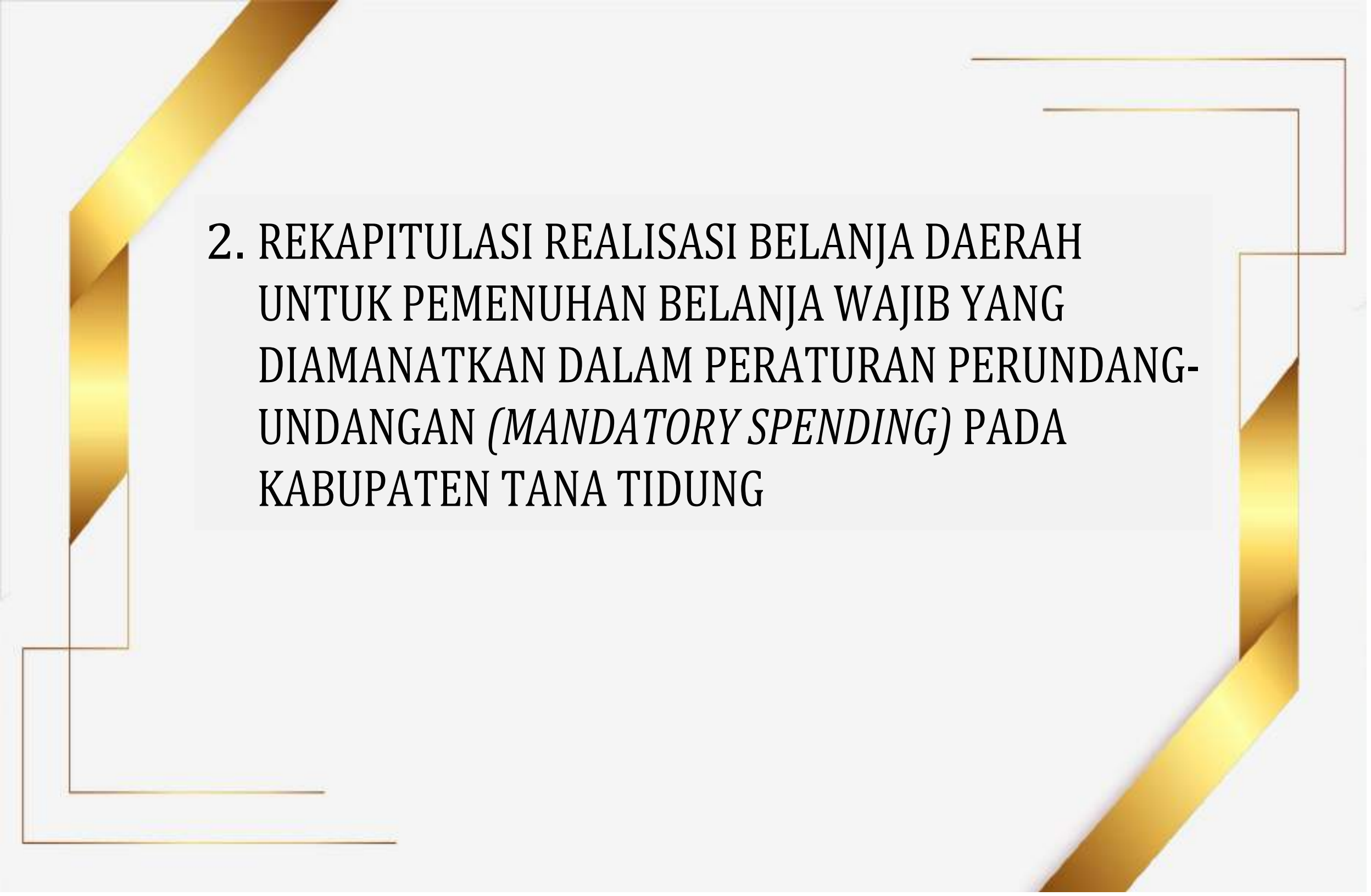
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE			URAIAN	KELOMPOK BELANJA							
				OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
				ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
01			PELAYANAN UMUM	266.682.173.477,89	216.514.963.728,80	9.276.301.035,00	8.711.297.556,52	94.864.820.364,00	0,00	119.344.429.141,00	118.528.344.923,00
01	2	12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.194.220.725,00	5.784.054.604,00	8.049.200,00	7.826.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2	13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.221.280.000,00	2.074.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00
01	2	20	STATISTIK	204.802.000,00	180.313.746,00	19.861.800,00	19.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2	24	KEARSIPAN	283.014.125,00	280.978.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	4	01	SEKRETARIAT DAERAH	67.370.263.835,00	63.265.860.490,80	4.941.207.467,00	4.518.434.342,52	0,00	0,00	0,00	0,00
01	4	02	SEKRETARIAT DPRD	42.167.206.622,00	39.683.254.766,00	112.216.800,00	109.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	5	01	PERENCANAAN	16.306.824.424,00	14.364.401.830,00	425.628.350,00	422.838.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	5	02	KEUANGAN	76.866.094.347,89	40.901.293.994,00	1.580.513.648,00	1.507.411.948,00	94.864.820.364,00	0,00	118.984.429.141,00	118.168.344.923,00
01	5	03	KEPEGAWAIAN	7.640.852.320,00	6.873.716.861,00	42.333.200,00	40.672.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	5	04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	629.586.600,00	606.057.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	5	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.215.163.100,00	1.039.857.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	6	01	INSPEKTORAT	15.734.435.910,00	12.744.491.887,00	1.346.424.730,00	1.287.337.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	7	01	KECAMATAN	23.822.675.003,00	23.069.275.627,00	800.065.840,00	797.570.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.025.754.466,00	5.647.132.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			KETERTIBAN DAN KEAMANAN	26.942.731.106,00	25.553.492.154,00	19.856.084.509,00	12.837.352.350,97	0,00	0,00	0,00	0,00
03	1	05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	26.942.731.106,00	25.553.492.154,00	19.856.084.509,00	12.837.352.350,97	0,00	0,00	0,00	0,00
03	1	06	SOSIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			EKONOMI	54.627.501.546,00	51.679.377.728,00	5.517.433.839,00	5.327.079.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	1	03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	2	07	TENAGA KERJA	5.110.106.275,00	4.644.314.961,00	553.328.300,00	523.809.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	2	09	PANGAN	530.853.200,00	475.079.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	2	15	PERHUBUNGAN	8.938.301.784,00	8.723.111.631,00	4.106.919.271,00	3.978.899.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	2	16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	8.390.119.488,00	7.870.257.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	2	17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8.841.674.559,00	8.258.291.917,00	37.842.800,00	36.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	2	18	PENANAMAN MODAL	5.871.510.218,00	5.526.782.205,00	269.233.160,00	250.496.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	2	21	PERSANDIAN	125.355.000,00	109.684.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	3	25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	845.313.356,00	824.524.911,00	22.995.800,00	22.302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	3	27	PERTANIAN	13.779.944.036,00	13.206.486.569,00	206.782.948,00	199.424.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	3	30	PERDAGANGAN	1.008.635.830,00	981.089.023,00	320.331.560,00	315.246.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	3	31	PERINDUSTRIAN	1.185.687.800,00	1.059.754.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	14.166.033.828,00	13.677.000.687,00	593.169.700,00	589.668.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	1	03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	2	10	PERTANAHAN	2.757.035.000,00	2.522.019.679,00	263.572.100,00	260.361.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	2	11	LINGKUNGAN HIDUP	11.408.998.828,00	11.154.981.008,00	329.597.600,00	329.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06			PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	74.620.766.590,00	66.454.975.727,50	279.371.354.845,00	257.331.682.176,75	0,00	0,00	0,00	0,00
06	1	03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	63.733.304.778,00	55.943.812.867,03	279.371.354.845,00	257.331.682.176,75	0,00	0,00	0,00	0,00
06	1	04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10.887.461.812,00	10.511.162.860,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE			URAIAN	KELOMPOK BELANJA							
				OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
				ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
07			KESEHATAN	118.123.698.395,00	108.903.337.565,16	22.818.498.855,00	21.715.278.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	1	02	KESEHATAN	117.074.246.195,00	107.990.020.344,16	22.753.498.855,00	21.664.279.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	2	14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.049.452.200,00	913.317.221,00	65.000.000,00	50.998.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08			PARIWISATA	7.016.365.805,01	6.848.607.270,00	93.146.420,00	84.136.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	3	26	PARIWISATA	7.016.365.805,01	6.848.607.270,00	93.146.420,00	84.136.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			PENDIDIKAN	213.703.084.666,61	162.697.818.067,00	96.451.374.192,39	80.210.162.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1	01	PENDIDIKAN	200.606.669.672,61	151.951.943.376,00	61.756.323.257,39	51.549.731.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2	19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.486.328.936,00	1.479.538.618,00	266.136.800,00	264.344.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2	22	KEBUDAYAAN	7.251.531.320,00	5.088.484.760,00	23.031.847.846,00	17.196.591.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2	23	PERPUSTAKAAN	4.358.554.738,00	4.177.851.313,00	11.397.066.289,00	11.199.494.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			PERLINDUNGAN SOSIAL	9.086.174.614,00	8.768.854.062,00	79.452.550,00	77.742.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1	06	SOSIAL	8.344.045.214,00	8.068.367.162,00	79.452.550,00	77.742.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2	08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	590.660.000,00	549.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3	32	TRANSMIGRASI	151.469.400,00	151.365.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH				784.968.530.028,51	661.098.426.989,46	434.056.815.945,39	386.884.401.043,24	94.864.820.364,00	0,00	119.344.429.141,00	118.528.344.923,00

TANA TIDUNG, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.

The slide features a light gray background with decorative gold elements. A wide, 3D-style gold ribbon runs diagonally from the top-left corner towards the bottom-right. Thin, dark gold lines form a rectangular frame around the central text area, with some lines extending outwards at the corners.

2. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PEMENUHAN BELANJA WAJIB YANG DIAMANATKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN (*MANDATORY SPENDING*) PADA KABUPATEN TANA TIDUNG

1) REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN
MANDATORY SPENDING-BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025 PADA KABUPATEN TANA
TIDUNG

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MANDATORY SPENDING -BIDANG PENDIDIKAN TA 2025

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	a. Belanja pada Dinas Pendidikan :			
	1) Belanja Operasi :			
	a. Belanja Pegawai	124.515.820.000,00	85.609.430.772,00	68,75
	b. Belanja Barang dan Jasa	78.500.150.057,61	66.634.570.244,00	84,88
	c. Belanja Hibah	4.842.230.935,00	4.796.427.120,00	99,05
	d. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	
	2) Belanja Modal :			
	a. Tanah;	0,00	0,00	0,00
	b. Peralatan dan Mesin;	14.271.077.585,00	11.777.876.439,00	82,53
	c. Bangunan dan Gedung;	69.056.475.518,39	55.400.860.707,00	80,23
	d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.470.000,00	36.844.356,00	53,81
	e. Aset Tetap Lainnya	1.051.748.000,00	1.294.041.879,00	0,00
	f. Aset Lainnya	340.400.000,00	236.700.000,00	0,00
	b. Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang pendidikan, antara lain :			
	1) Belanja Transfer			
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	292.646.372.096,00	225.786.751.517,00	77,15
3.	Total Belanja Daerah	1.433.234.595.478,90	1.166.511.172.955,70	81,39
	Rasio anggaran pendidikan (2:5) x 100%	20	19	

TIDENG PALE, 4 September 2026

BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MANDATORY SPENDING -BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN TA 2025

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	a. Belanja pada Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM :			
	1) Belanja Operasi :			
	a. Belanja Pegawai	4.559.405.940,00	4.321.727.577,00	94,79
	b. Belanja Barang dan Jasa	3.711.032.980,00	3.158.046.471,00	85,10
	c. Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
	d. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal :			
	a. Tanah;	0,00	0,00	0,00
	b. Peralatan dan Mesin;	42.333.200,00	40.672.850,00	96,08
	c. Bangunan dan Gedung;	0,00	0,00	0,00
	d. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan dan Pelatihan ASN (a+b)	8.312.772.120,00	7.520.446.898,00	90,47
3.	Total Belanja Daerah	1.433.234.595.478,90	1.166.511.172.955,70	81,39
Rasio Anggaran Pendidikan dan Pelatihan ASN		1	1	

TIDENG PALE, 4 September 2026

BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.

2) REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN
MANDATORY SPENDING-BIDANG PENGAWASAN
TAHUN ANGGARAN 2025 PADA KABUPATEN TANA
TIDUNG

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MANDATORY SPENDING -BIDANG PENGAWASAN TA 2025

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	a. Belanja pada Dinas Pengawasan :			
	1) Belanja Operasi :			
	a. Belanja Pegawai	4.438.081.714,00	4.058.306.386,00	91,44
	b. Belanja Barang dan Jasa	11.296.354.196,00	8.686.185.501,00	76,89
	c. Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
	d. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal :			
	a. Tanah;	0,00	0,00	0,00
	b. Peralatan dan Mesin;	767.115.930,00	708.392.200,00	92,34
	c. Bangunan dan Gedung;	519.574.400,00	519.212.780,00	99,93
	d. Aset Tetap Lainnya	59.734.400,00	59.733.000,00	100,00
2.	Anggaran Fungsi Pengawasan (a+b)	17.080.860.640,00	14.031.829.867,00	82,15
3.	Total Belanja Daerah	1.433.234.595.478,90	1.166.511.172.955,70	81,39
	Rasio anggaran pengawasan	1	1	

TIDENG PALE, 4 September 2026

BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.

3) REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN
MANDATORY SPENDING-BIDANG INFRASTRUKTUR
PELAYANAN PUBLIK TAHUN ANGGARAN 2025
PADA KABUPATEN TANA TIDUNG

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN MANDATORY SPENDING-BIDANG INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK TA 2025

A. PERHITUNGAN BELANJA BAGI HASI DAN/ATAU TRANSFER KEPADA DAERAH/DESA

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Penerimaan			
	Dana Transfer Umum			
	a. DAU	402.661.605.000,00	397.312.680.666,00	98,67
	b. DBH	503.424.284.000,00	506.994.414.300,00	100,71
	Jumlah Penerimaan	906.085.889.000,00	904.307.094.966,00	99,80
2.	Pengurang			
	a) DBH CHT			
	b) DBH DR			
	c) ADD	27.385.891.000,00	26.568.977.400,00	97,02
	Jumlah Pengurang	27.385.891.000,00	26.568.977.400,00	97,02
3.	Jumlah Dana Transfer Umum yang Diperhitungkan	933.471.780.000,00	930.876.072.366,00	99,72

B. PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	a) Belanja Modal	444.390.319.075	396.125.225.640	89,14
	1) Tanah;	3.015.903.866,00	2.847.964.666,00	0,00
	2) Peralatan dan Mesin;	39.255.670.619,00	35.323.557.737,00	89,98
	3) Bangunan dan Gedung;	259.808.320.981,39	233.904.479.133,85	90,03
	4) Jalan, Jaringan dan Irigasi;	128.538.549.399,00	111.466.199.577,39	86,72
	5) Aset tetap lainnya;	1.380.431.856,00	1.461.196.461,00	105,85
	6) Aset Lainnya	2.057.939.224,00	1.881.003.468,00	91,40
	b) Belanja Pemeliharaan	10.333.503.130,01	9.240.824.596,57	89,43
2.	a) Belanja Hibah;	19.667.134.141,00	19.262.097.420,00	97,94
	b) Belanja Bantuan Sosial	243.500.000,00	243.500.000,00	100,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan	118.354.479.900,00	117.538.395.682,00	99,31
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	582.655.433.116,40	533.169.218.741,81	91,51
4.	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	62,42	57,28	91,76

TIDENG PALE, 4 September 2026

BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.

3. REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN ANGGARAN 2025 PADA KABUPATEN TANA TIDUNG

3. REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM)

KABUPATEN TANA TIDUNG
REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TA 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
A. SPM Bidang Pendidikan				
1	Pendidikan Dasar	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	583.416.500,00	473.335.659,00
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	445.128.125,00	245.128.125,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	984.410.500,00	867614460,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	58.050.000,00	57.750.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.114.586.000,00	902.229.398,00
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	0,00	0,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	58.130.000,00	56.033.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	12.012.050.000,00	11.705.794.000,00
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	0,00	0,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	415.000.000,00	411.098.900,00
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	20.613.900,00	19.800.000,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.000.000.000,00	996.804.000,00
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	150.400.000,00	148.396.000,00
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0,00	0,00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	300.000.000,00	196.500.000,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0,00	0,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0,00	0,00
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	0,00	0,00
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0,00	0,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	532.190.000,00	483.976.180,00
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	252.550.000,00	145.528.900,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	0,00	0,00
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25.000.000,00	24.810.000,00
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,00	0,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.500.000.000,00	1.325.821.629,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	187.140.000,00	126.153.000,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.700.000.000,00	1.564.702.875,00
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	62.304.600,00	54.084.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2.653.276.000,00	2.357.802.640,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	4.552.572.587,00	2.338.154.093,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	260.000.000,00	136.954.000,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0,00	0,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.580.130.000,00	1.161.989.608,00
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0,00	0,00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	122.550.000,00	98.179.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-	-
Total			30.569.498.212,00	25.898.639.467,00
2	Pendidikan Anak Usia Dini	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	0,00	0,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0,00	0,00
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	133.608.000,00	130.768.500,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.602.433.200,00	1.545.353.602,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	334.799.997,00	334.608.330,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0,00	0,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	337.800.000,00	333.359.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	0,00	0,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	317.909.600,00	317.791.507,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	187.907.000,00	181.313.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0,00	0,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	0,00
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	0,00	0,00
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	316.880.000,00	296.177.000,00
Total			3.231.337.797,00	3.139.370.939,00
3	Pendidikan Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	0,00	0,00
Total			0,00	0,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan			33.800.836.009,00	29.038.010.406,00
B. SPM Bidang Kesehatan				
1	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	258.696.700,00	235.606.700,00
Total			258.696.700,00	235.606.700,00
2	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	7.860.000,00	7.740.000,00
Total			7.860.000,00	7.740.000,00
3	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	111.100.000,00	95.520.000,00
Total			111.100.000,00	95.520.000,00
4	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	6.300.000,00	6.200.000,00
Total			6.300.000,00	6.200.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
5	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	7.860.000,00	7.740.000,00
Total			7.860.000,00	7.740.000,00
6	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	42.520.000,00	41.440.000,00
Total			42.520.000,00	41.440.000,00
7	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	62.290.000,00	42.450.000,00
Total			62.290.000,00	42.450.000,00
8	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	25.376.000,00	25.300.000,00
Total			25.376.000,00	25.300.000,00
9	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	411.628.282,00	389.174.000,00
Total			411.628.282,00	389.174.000,00
10	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	153.656.000,00	142.386.271,00
Total			153.656.000,00	142.386.271,00
11	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	107.277.200,00	79.229.018,00
Total			107.277.200,00	79.229.018,00
12	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	27.807.000,00	13.051.600,00
Total			27.807.000,00	13.051.600,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan			1.222.371.182,00	1.085.837.589,00
C. SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	117.792.000,00	117.340.000,00
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	5.546.153.600,00	4.214.577.500,00
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.894.380.000,00	1.839.346.675,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0,00	0,00
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0,00	0,00
Total			7.558.325.600,00	6.171.264.175,00
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	579.826.600,00	486.239.820,00
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	189.997.250,00	84.468.540,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0,00	0,00
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.356.554.400,00	1.277.162.759,00
Total			2.126.378.250,00	1.847.871.119,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			9.684.703.850,00	8.019.135.294,00
D. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	243.817.500,00	243.817.500,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
	bagi korban bencana kabupaten / kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	0,00	0,00
Total			243.817.500,00	243.817.500,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			243.817.500,00	243.817.500,00
E. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum				
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	52.430.000,00	52.430.000,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	63.324.000,00	89.254.000,00
		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	0,00	0,00
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	318.374.000,00	268.558.100,00
		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	0,00	0,00
Total			434.128.000,00	410.242.100,00
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	82.453.900,00	81.696.261,00
Total			82.453.900,00	81.696.261,00
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	95.746.221,00	85.451.599,00
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0,00	0,00
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	27.444.000,00	21.680.200,00
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	707.113.353,00	707.070.000,00
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	37.035.800,00	31.075.800,00
Total			867.339.374,00	845.277.599,00
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	3.280.000,00	3.280.000,00
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	26.175.000,00	25.225.000,00
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	13.430.000,00	13.430.000,00
Total			42.885.000,00	41.935.000,00
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	22.202.700,00	21.788.800,00
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	51.242.280,00	49.513.600,00
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	44.917.500,00	44.020.000,00
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.742.500,00	28.484.000,00
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	35.644.000,00	34.961.870,00
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00
		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
Total			184.748.980,00	178.768.270,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			1.611.555.254,00	1.557.919.230,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
F. SPM Bidang Sosial				
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlan- tar di luar panti	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	0,00	0,00
Total			0,00	0,00
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlan- tar di luar panti	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	0,00	0,00
Total			0,00	0,00
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlan- tar di luar panti	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	0,00	0,00
Total			0,00	0,00
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlan- tar di luar panti	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	223.956.100,00	164.511.240,00
Total			223.956.100,00	164.511.240,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			223.956.100,00	164.511.240,00

Tana Tidung, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.

4. RINGKASAN REALISASI PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 PADA KABUPATEN TANA TIDUNG



PEMERINTAHAN KAB. TANA TIDUNG
RINGKASAN REALISASI PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUBRINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2025



Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025	(Rp)	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.027.212.457.453,00	1.078.782.452.324,05	51.569.994.871,05	105,02
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30.948.274.122,00	54.358.134.393,05	23.409.860.271,05	175,64
4.1.01	Pajak Daerah	7.812.710.096,00	10.240.378.261,00	2.427.668.165,00	131,07
4.1.01.06	Pajak Hotel	100.000.000,00	53.774.501,00	(46.225.499,00)	53,77
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	100.000.000,00	53.774.501,00	(46.225.499,00)	53,77
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	100.000.000,00	53.774.501,00	(46.225.499,00)	53,77
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.148.246.343,00	3.895.327.555,00	2.747.081.212,00	339,24
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.148.246.343,00	3.895.327.555,00	2.747.081.212,00	339,24
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.148.246.343,00	3.895.327.555,00	2.747.081.212,00	339,24
4.1.01.08	Pajak Hiburan	5.000.000,00	3.567.800,00	(1.432.200,00)	71,35
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	5.000.000,00	3.567.800,00	(1.432.200,00)	71,35
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	5.000.000,00	3.567.800,00	(1.432.200,00)	71,35
4.1.01.09	Pajak Reklame	15.000.000,00	18.950.430,00	3.950.430,00	126,33
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	15.000.000,00	18.950.430,00	3.950.430,00	126,33
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	15.000.000,00	18.950.430,00	3.950.430,00	126,33
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	10.000.000,00	7.747.709,00	(2.252.291,00)	77,47
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	10.000.000,00	7.747.709,00	(2.252.291,00)	77,47
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	10.000.000,00	7.747.709,00	(2.252.291,00)	77,47
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	2.000.000,00	(8.000.000,00)	20,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	2.000.000,00	(8.000.000,00)	20,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	2.000.000,00	(8.000.000,00)	20,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	225.000.000,00	576.808.547,00	351.808.547,00	256,35
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	225.000.000,00	576.808.547,00	351.808.547,00	256,35

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025	(Rp)	(%)
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	225.000.000,00	576.808.547,00	351.808.547,00	256,35
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	294.000.000,00	381.340.986,00	87.340.986,00	129,70
4.1.01.15.01	PBBP2	294.000.000,00	381.340.986,00	87.340.986,00	129,70
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	294.000.000,00	381.340.986,00	87.340.986,00	129,70
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	150.000.000,00	214.788.550,00	64.788.550,00	143,19
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	150.000.000,00	214.788.550,00	64.788.550,00	143,19
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	150.000.000,00	214.788.550,00	64.788.550,00	143,19
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	2.000.000.000,00	2.286.782.883,00	286.782.883,00	114,33
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	2.000.000.000,00	2.286.782.883,00	286.782.883,00	114,33
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	1.700.000.000,00	2.202.213.206,00	502.213.206,00	129,54
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	300.000.000,00	84.569.677,00	(215.430.323,00)	28,18
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.918.174.396,00	1.263.915.500,00	(654.258.896,00)	65,89
4.1.01.20.01	Opsen PKB	1.918.174.396,00	1.263.915.500,00	(654.258.896,00)	65,89
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	1.918.174.396,00	1.263.915.500,00	(654.258.896,00)	65,89
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.937.289.357,00	1.535.373.800,00	(401.915.557,00)	79,25
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	1.937.289.357,00	1.535.373.800,00	(401.915.557,00)	79,25
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	1.937.289.357,00	1.535.373.800,00	(401.915.557,00)	79,25
4.1.02	Retribusi Daerah	1.778.963.865,00	9.851.845.257,00	8.072.881.392,00	553,79
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.413.963.865,00	9.109.897.025,00	7.695.933.160,00	644,28
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.323.963.865,00	8.960.041.275,00	7.636.077.410,00	676,75
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	328.963.865,00	185.274.371,00	(143.689.494,00)	56,32
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	995.000.000,00	8.774.766.904,00	7.779.766.904,00	881,88
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	45.000.000,00	62.778.000,00	17.778.000,00	139,50
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	45.000.000,00	62.778.000,00	17.778.000,00	139,50
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	36.600.000,00	75.483.000,00	38.883.000,00	206,23
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	12.200.000,00	1.425.000,00	(10.775.000,00)	11,68
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	12.200.000,00	27.982.000,00	15.782.000,00	229,36
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	12.200.000,00	46.076.000,00	33.876.000,00	377,67
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	8.400.000,00	11.594.750,00	3.194.750,00	138,03
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	8.400.000,00	11.594.750,00	3.194.750,00	138,03
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	346.500.000,00	717.220.913,00	370.720.913,00	206,99

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025	(Rp)	(%)
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	14.000.000,00	12.287.200,00	(1.712.800,00)	87,76
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	14.000.000,00	12.287.200,00	(1.712.800,00)	87,76
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	36.000.000,00	157.825.000,00	121.825.000,00	438,40
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	36.000.000,00	157.825.000,00	121.825.000,00	438,40
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000.000,00	411.984.000,00	211.984.000,00	205,99
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000.000,00	411.984.000,00	211.984.000,00	205,99
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	60.000.000,00	91.280.713,00	31.280.713,00	152,13
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	60.000.000,00	91.280.713,00	31.280.713,00	152,13
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	36.500.000,00	43.844.000,00	7.344.000,00	120,12
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	36.500.000,00	43.844.000,00	7.344.000,00	120,12
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	18.500.000,00	24.727.319,00	6.227.319,00	133,66
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	18.500.000,00	24.727.319,00	6.227.319,00	133,66
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	18.500.000,00	24.727.319,00	6.227.319,00	133,66
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.099.406.000,00	3.741.723.567,47	(2.357.682.432,53)	61,34
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.099.406.000,00	3.741.723.567,47	(2.357.682.432,53)	61,34
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.099.406.000,00	3.741.723.567,47	(2.357.682.432,53)	61,34
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.099.406.000,00	3.741.723.567,47	(2.357.682.432,53)	61,34
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	15.257.194.161,00	30.524.187.307,58	15.266.993.146,58	200,06
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00	258.133.908,00	58.133.908,00	129,06
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	200.000.000,00	258.133.908,00	58.133.908,00	129,06
4.1.04.01.08.0002	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	200.000.000,00	258.133.908,00	58.133.908,00	129,06
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00
4.1.04.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025	(Rp)	(%)
4.1.04.05	Jasa Giro	4.526.753.653,00	9.466.066.454,28	4.939.312.801,28	209,11
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.516.753.653,00	9.456.098.561,28	4.939.344.908,28	209,35
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.516.753.653,00	9.456.098.561,28	4.939.344.908,28	209,35
4.1.04.05.07	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	10.000.000,00	9.967.893,00	(32.107,00)	99,67
4.1.04.05.07.0001	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	10.000.000,00	9.967.893,00	(32.107,00)	99,67
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	0,00	2.931.498.473,22	2.931.498.473,22	0,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	2.931.498.473,22	2.931.498.473,22	0,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	2.931.498.473,22	2.931.498.473,22	0,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	184.888.000,00	10.074.036.421,66	9.889.148.421,66	5.448,72
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	25.553.000,00	25.553.000,00	0,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	25.553.000,00	25.553.000,00	0,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	184.888.000,00	10.048.483.421,66	9.863.595.421,66	5.434,90
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	184.888.000,00	10.048.483.421,66	9.863.595.421,66	5.434,90
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	59.518.239,39	59.518.239,39	0,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	59.518.239,39	59.518.239,39	0,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	59.518.239,39	59.518.239,39	0,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	646.506.099,00	1.471.713.241,39	825.207.142,39	227,64
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	646.506.099,00	1.471.713.241,39	825.207.142,39	227,64
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	646.506.099,00	1.471.713.241,39	825.207.142,39	227,64
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	6.000.000,00	19.323.042,00	13.323.042,00	322,05
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.000.000,00	19.323.042,00	13.323.042,00	322,05
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	6.000.000,00	19.323.042,00	13.323.042,00	322,05
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	279.639.000,00	279.639.000,00	0,00
4.1.04.14.01	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00	279.639.000,00	279.639.000,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025	(Rp)	(%)
4.1.04.14.01.0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00	279.639.000,00	279.639.000,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	827.238.409,00	3.807.044.281,93	2.979.805.872,93	460,21
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	37.196.700,00	37.196.700,00	0,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	0,00	37.196.700,00	37.196.700,00	0,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	327.238.409,00	74.228.798,00	(253.009.611,00)	22,68
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	327.238.409,00	74.228.798,00	(253.009.611,00)	22,68
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	179.638.258,79	179.638.258,79	0,00
4.1.04.15.15.0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	179.638.258,79	179.638.258,79	0,00
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	24.465.000,00	24.465.000,00	0,00
4.1.04.15.16.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	24.465.000,00	24.465.000,00	0,00
4.1.04.15.34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	500.000.000,00	1.745.868.516,16	1.245.868.516,16	349,17
4.1.04.15.34.0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	500.000.000,00	1.745.868.516,16	1.245.868.516,16	349,17
4.1.04.15.61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	699.046.439,51	699.046.439,51	0,00
4.1.04.15.61.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	465.383.776,26	465.383.776,26	0,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025	(Rp)	(%)
4.1.04.15.61.0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00	53.941.923,25	53.941.923,25	0,00
4.1.04.15.61.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	179.720.740,00	179.720.740,00	0,00
4.1.04.15.65	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	1.045.922.741,47	1.045.922.741,47	0,00
4.1.04.15.65.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	1.045.922.741,47	1.045.922.741,47	0,00
4.1.04.15.88	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	677.828,00	677.828,00	0,00
4.1.04.15.88.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	677.828,00	677.828,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	8.665.808.000,00	2.157.214.245,71	(6.508.593.754,29)	24,89
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	8.665.808.000,00	2.157.214.245,71	(6.508.593.754,29)	24,89
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	8.665.808.000,00	2.157.214.245,71	(6.508.593.754,29)	24,89
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	30.948.274.122,00	54.358.134.393,05	23.409.860.271,05	175,64
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	996.132.183.331,00	1.024.352.520.352,00	28.220.337.021,00	102,83
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	982.308.887.000,00	976.414.177.571,00	(5.894.709.429,00)	99,39
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025	(Rp)	(%)
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025	(Rp)	(%)
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	503.424.284.000,00	506.994.414.300,00	3.570.130.300,00	100,70
4.2.01.07.01	DBH Pajak	209.480.847.000,00	209.317.211.300,00	(163.635.700,00)	99,92
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	203.634.442.000,00	203.740.003.800,00	105.561.800,00	100,05
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.658.197.000,00	5.404.240.300,00	(253.956.700,00)	95,51
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	188.208.000,00	172.967.200,00	(15.240.800,00)	91,90
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	291.194.680.000,00	294.928.446.000,00	3.733.766.000,00	101,28
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	392.475.000,00	392.475.000,00	0,00	100,00
4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi	156.127.000,00	179.952.000,00	23.825.000,00	115,26
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent	274.268.000,00	274.268.000,00	0,00	100,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	286.545.638.000,00	290.255.579.000,00	3.709.941.000,00	101,29
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.323.315.000,00	2.323.315.000,00	0,00	100,00
4.2.01.07.02.0007	DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)	328.325.000,00	328.325.000,00	0,00	100,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	1.174.532.000,00	1.174.532.000,00	0,00	100,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	2.748.757.000,00	2.748.757.000,00	0,00	100,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	2.748.757.000,00	2.748.757.000,00	0,00	100,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	402.661.605.000,00	397.312.680.666,00	(5.348.924.334,00)	98,67
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	340.233.407.000,00	339.966.356.410,00	(267.050.590,00)	99,92
4.2.01.08.01.0001	DAU	340.233.407.000,00	339.966.356.410,00	(267.050.590,00)	99,92
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	62.428.198.000,00	57.346.324.256,00	(5.081.873.744,00)	91,85
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	10.463.412.000,00	5.381.538.256,00	(5.081.873.744,00)	51,43
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	38.264.051.000,00	38.264.051.000,00	0,00	100,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	13.700.735.000,00	13.700.735.000,00	0,00	100,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	41.841.009.000,00	38.542.007.205,00	(3.299.001.795,00)	92,11
4.2.01.09.01	DAK Fisik	13.268.698.000,00	13.058.305.370,00	(210.392.630,00)	98,41
4.2.01.09.01.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.999.832.000,00	10.810.611.370,00	(189.220.630,00)	98,27
4.2.01.09.01.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	2.268.866.000,00	2.247.694.000,00	(21.172.000,00)	99,06

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025	(Rp)	(%)
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	28.572.311.000,00	25.483.701.835,00	(3.088.609.165,00)	89,19
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	9.692.749.000,00	8.281.449.600,00	(1.411.299.400,00)	85,43
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	482.750.000,00	675.000.000,00	192.250.000,00	139,82
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.078.499.000,00	1.500.258.320,00	421.759.320,00	139,10
4.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.046.632.000,00	1.011.530.000,00	(35.102.000,00)	96,64
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	344.710.000,00	310.608.878,00	(34.101.122,00)	90,10
4.2.01.09.02.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	303.988.000,00	303.988.000,00	0,00	100,00
4.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	1.158.100.000,00	831.212.900,00	(326.887.100,00)	71,77
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	297.446.000,00	(103.214.000,00)	74,23
4.2.01.09.02.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	6.023.546.000,00	5.940.759.247,00	(82.786.753,00)	98,62
4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	608.500.000,00	608.500.000,00	0,00	100,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3.958.179.000,00	3.451.051.374,00	(507.127.626,00)	87,18
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	3.411.298.000,00	2.209.197.516,00	(1.202.100.484,00)	64,76
4.2.01.09.02.0044	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	62.700.000,00	62.700.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	947.926.898.000,00	942.849.102.171,00	(5.077.795.829,00)	99,46
4.2.01.05	Dana Desa	27.385.891.000,00	26.568.977.400,00	(816.913.600,00)	97,01
4.2.01.05.01	Dana Desa	27.385.891.000,00	26.568.977.400,00	(816.913.600,00)	97,01
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	27.385.891.000,00	26.568.977.400,00	(816.913.600,00)	97,01
4.2.01.06	Insentif Fiskal	6.996.098.000,00	6.996.098.000,00	0,00	100,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	6.996.098.000,00	6.996.098.000,00	0,00	100,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	6.996.098.000,00	6.996.098.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	34.381.989.000,00	33.565.075.400,00	(816.913.600,00)	97,62
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	13.823.296.331,00	47.938.342.781,00	34.115.046.450,00	346,79
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	12.088.801.079,00	46.203.847.529,00	34.115.046.450,00	382,20
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	12.088.801.079,00	46.203.847.529,00	34.115.046.450,00	382,20

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025	(Rp)	(%)
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	531.607.959,00	1.041.729.317,00	510.121.358,00	195,95
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	512.928.288,00	1.006.109.112,00	493.180.824,00	196,15
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.744.264.832,00	40.076.502.956,00	32.332.238.124,00	517,49
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	300.000.000,00	445.925.014,00	145.925.014,00	148,64
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.000.000.000,00	3.633.581.130,00	633.581.130,00	121,11
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	1.734.495.252,00	1.734.495.252,00	0,00	100,00
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.734.495.252,00	1.734.495.252,00	0,00	100,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	1.734.495.252,00	1.734.495.252,00	0,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	13.823.296.331,00	47.938.342.781,00	34.115.046.450,00	346,79
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	996.132.183.331,00	1.024.352.520.352,00	28.220.337.021,00	102,83
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	132.000.000,00	71.797.579,00	(60.202.421,00)	54,39
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	132.000.000,00	71.797.579,00	(60.202.421,00)	54,39
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	132.000.000,00	71.797.579,00	(60.202.421,00)	54,39
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	132.000.000,00	71.797.579,00	(60.202.421,00)	54,39
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	132.000.000,00	71.797.579,00	(60.202.421,00)	54,39
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	132.000.000,00	71.797.579,00	(60.202.421,00)	54,39
	JUMLAH PENDAPATAN	1.027.212.457.453,00	1.078.782.452.324,05	51.569.994.871,05	105,02
5	BELANJA DAERAH	1.433.234.595.478,90	1.166.511.172.955,70	(266.723.422.523,20)	81,39
5.1	BELANJA OPERASI	784.968.530.028,51	661.098.426.989,46	(123.870.103.039,05)	84,22
5.1.01	Belanja Pegawai	390.349.994.098,23	315.896.000.484,00	(74.453.993.614,23)	80,93

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025	(Rp)	(%)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	168.372.497.247,46	135.505.143.895,00	(32.867.353.352,46)	80,47
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	118.224.566.091,00	97.800.292.547,00	(20.424.273.544,00)	82,72
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	95.927.526.931,00	85.109.000.411,00	(10.818.526.520,00)	88,72
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	22.297.039.160,00	12.691.292.136,00	(9.605.747.024,00)	56,91
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	10.517.136.894,00	8.771.897.530,00	(1.745.239.364,00)	83,40
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	8.745.428.446,00	7.966.355.063,00	(779.073.383,00)	91,09
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.771.708.448,00	805.542.467,00	(966.165.981,00)	45,46
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.286.411.462,00	3.212.650.250,00	(1.073.761.212,00)	74,94
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	3.643.728.785,00	3.212.650.250,00	(431.078.535,00)	88,16
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	642.682.677,00	0,00	(642.682.677,00)	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.463.979.380,00	6.002.014.116,00	(1.461.965.264,00)	80,41
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	6.515.834.559,00	5.638.923.966,00	(876.910.593,00)	86,54
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	948.144.821,00	363.090.150,00	(585.054.671,00)	38,29
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.485.117.574,00	2.006.799.523,00	(478.318.051,00)	80,75
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.880.900.305,00	1.518.385.389,00	(362.514.916,00)	80,72
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	604.217.269,00	488.414.134,00	(115.803.135,00)	80,83
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	6.857.734.619,00	5.694.791.230,00	(1.162.943.389,00)	83,04
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	5.723.459.171,00	4.986.620.190,00	(736.838.981,00)	87,12
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.134.275.448,00	708.171.040,00	(426.104.408,00)	62,43
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	135.231.415,45	81.411.066,00	(53.820.349,45)	60,20
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	123.064.523,45	81.411.066,00	(41.653.457,45)	66,15
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	12.166.892,00	0,00	(12.166.892,00)	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.864.019,34	1.508.786,00	(4.355.233,34)	25,72
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.429.404,34	1.240.129,00	(4.189.275,34)	22,84
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	434.615,00	268.657,00	(165.958,00)	61,81
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	15.111.950.008,55	11.124.869.833,00	(3.987.080.175,55)	73,61
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	14.140.502.816,55	10.392.813.140,00	(3.747.689.676,55)	73,49
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	971.447.192,00	732.056.693,00	(239.390.499,00)	75,35
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.259.324.529,00	202.226.745,00	(1.057.097.784,00)	16,05
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.207.544.708,00	174.453.628,00	(1.033.091.080,00)	14,44
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	51.779.821,00	27.773.117,00	(24.006.704,00)	53,63
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.724.849.643,00	606.682.269,00	(1.118.167.374,00)	35,17
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.576.486.242,00	523.354.156,00	(1.053.132.086,00)	33,19
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	148.363.401,00	83.328.113,00	(65.035.288,00)	56,16

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025	(Rp)	(%)
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	300.331.612,12	0,00	(300.331.612,12)	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	281.227.352,12	0,00	(281.227.352,12)	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	19.104.260,00	0,00	(19.104.260,00)	0,00
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	200.889.706.385,77	161.935.165.408,40	(38.954.540.977,37)	80,61
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	189.240.488.385,77	151.120.270.941,00	(38.120.217.444,77)	79,85
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	170.264.903.390,89	148.363.806.395,00	(21.901.096.995,89)	87,13
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	18.975.584.994,88	2.756.464.546,00	(16.219.120.448,88)	14,52
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.649.218.000,00	10.814.894.467,40	(834.323.532,60)	92,84
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	9.692.749.000,00	8.281.449.600,00	(1.411.299.400,00)	85,43
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.078.499.000,00	1.500.258.320,00	421.759.320,00	139,10
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	528.662.000,00	720.000.000,00	191.338.000,00	136,19
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	349.308.000,00	313.186.547,40	(36.121.452,60)	89,66
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025	(Rp)	(%)
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.842.452.035,00	11.722.182.436,00	(120.269.599,00)	98,98
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	452.290.000,00	451.290.000,00	(1.000.000,00)	99,77
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	452.290.000,00	451.290.000,00	(1.000.000,00)	99,77
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	58.848.300,00	53.975.600,00	(4.872.700,00)	91,71
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	58.848.300,00	53.975.600,00	(4.872.700,00)	91,71
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	61.880.000,00	54.730.000,00	(7.150.000,00)	88,44
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	61.880.000,00	54.730.000,00	(7.150.000,00)	88,44
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	45.717.000,00	38.682.000,00	(7.035.000,00)	84,61
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	45.717.000,00	38.682.000,00	(7.035.000,00)	84,61
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	663.000.000,00	654.370.500,00	(8.629.500,00)	98,69
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	663.000.000,00	654.370.500,00	(8.629.500,00)	98,69
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	118.076.175,00	66.487.575,00	(51.588.600,00)	56,30
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	118.076.175,00	66.487.575,00	(51.588.600,00)	56,30
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.000.000,00	6.044.325,00	(3.955.675,00)	60,44
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.000.000,00	6.044.325,00	(3.955.675,00)	60,44
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.528.000.000,00	3.528.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.528.000.000,00	3.528.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	66.971.556,00	66.064.520,00	(907.036,00)	98,64
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	66.971.556,00	66.064.520,00	(907.036,00)	98,64
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	168.504,00	12.000,00	(156.504,00)	7,12
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	168.504,00	12.000,00	(156.504,00)	7,12

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025	(Rp)	(%)
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.000.700.500,00	2.980.525.916,00	(20.174.584,00)	99,32
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	60.000.000,00	39.825.576,00	(20.174.424,00)	66,37
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.940.700.500,00	2.940.700.340,00	(160,00)	99,99
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.196.800.000,00	3.192.000.000,00	(4.800.000,00)	99,84
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.196.800.000,00	3.192.000.000,00	(4.800.000,00)	99,84
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	409.359.620,00	220.938.740,00	(188.420.880,00)	53,97
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	148.280.500,00	107.338.560,00	(40.941.940,00)	72,38
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	148.280.500,00	107.338.560,00	(40.941.940,00)	72,38
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	16.530.000,00	7.248.000,00	(9.282.000,00)	43,84
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	16.530.000,00	7.248.000,00	(9.282.000,00)	43,84
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	224.640.000,00	98.280.000,00	(126.360.000,00)	43,75
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	224.640.000,00	98.280.000,00	(126.360.000,00)	43,75
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	18.299.120,00	7.314.420,00	(10.984.700,00)	39,97
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	18.299.120,00	7.314.420,00	(10.984.700,00)	39,97
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.390.000,00	755.900,00	(634.100,00)	54,38
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.390.000,00	755.900,00	(634.100,00)	54,38
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	220.000,00	1.860,00	(218.140,00)	0,84
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	220.000,00	1.860,00	(218.140,00)	0,84
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	618.690.233,00	612.480.000,00	(6.210.233,00)	98,99
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	318.690.233,00	312.480.000,00	(6.210.233,00)	98,05
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	318.690.233,00	312.480.000,00	(6.210.233,00)	98,05
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.89	Belanja Pegawai BOSP	3.015.820.000,00	2.578.700.000,00	(437.120.000,00)	85,50
5.1.01.89.01	Belanja Pegawai BOSP-BOS	3.015.820.000,00	2.578.700.000,00	(437.120.000,00)	85,50
5.1.01.89.01.0001	Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler	3.015.820.000,00	2.578.700.000,00	(437.120.000,00)	85,50
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	5.201.468.577,00	3.321.390.004,60	(1.880.078.572,40)	63,85
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	5.201.468.577,00	3.321.390.004,60	(1.880.078.572,40)	63,85
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	5.201.468.577,00	3.321.390.004,60	(1.880.078.572,40)	63,85

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025	(Rp)	(%)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	374.707.901.789,28	325.696.829.085,46	(49.011.072.703,82)	86,92
5.1.02.01	Belanja Barang	123.155.941.726,01	109.509.148.882,93	(13.646.792.843,08)	88,91
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	122.632.211.996,01	109.020.916.712,93	(13.611.295.283,08)	88,90
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.240.127.760,00	643.022.386,00	(597.105.374,00)	51,85
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	295.363.700,00	279.270.790,00	(16.092.910,00)	94,55
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.420.734.516,66	4.554.329.250,00	(866.405.266,66)	84,01
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	48.152.000,00	47.069.600,00	(1.082.400,00)	97,75
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	28.296.700,00	28.236.700,00	(60.000,00)	99,78
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	97.840.000,00	97.596.400,00	(243.600,00)	99,75
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.214.527.569,00	2.350.203.892,00	(864.323.677,00)	73,11
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.607.571.775,00	1.579.647.936,00	(27.923.839,00)	98,26
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	263.639.500,00	259.905.000,00	(3.734.500,00)	98,58
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	29.086.400,00	27.534.765,00	(1.551.635,00)	94,66
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	87.846.200,00	77.385.000,00	(10.461.200,00)	88,09
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.724.080.213,00	1.346.908.802,00	(377.171.411,00)	78,12
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.372.045.455,00	1.303.447.485,00	(68.597.970,00)	95,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.238.165.111,46	4.113.852.035,00	(1.124.313.076,46)	78,53
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	194.078.000,00	187.512.000,00	(6.566.000,00)	96,61
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	928.745.525,00	847.381.980,00	(81.363.545,00)	91,23
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.517.415.963,35	1.322.026.073,00	(195.389.890,35)	87,12
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	449.214.728,00	424.073.010,00	(25.141.718,00)	94,40
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	248.093.100,00	191.193.052,00	(56.900.048,00)	77,06
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.213.672.000,00	1.010.535.000,00	(203.137.000,00)	83,26
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.612.633.200,00	2.275.787.310,00	(336.845.890,00)	87,10
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	298.210.400,00	290.025.300,00	(8.185.100,00)	97,25
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.534.833.898,00	744.229.511,00	(790.604.387,00)	48,48
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	68.820.476,00	67.230.250,00	(1.590.226,00)	97,68

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025	(Rp)	(%)
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	37.687.949.963,00	35.555.324.310,74	(2.132.625.652,26)	94,34
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	13.615.165.878,00	13.447.285.699,19	(167.880.178,81)	98,76
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	24.785.000,00	17.332.151,00	(7.452.849,00)	69,93
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.969.159.147,00	2.858.155.380,00	(111.003.767,00)	96,26
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	249.509.936,00	243.363.000,00	(6.146.936,00)	97,53
5.1.02.01.01.0048	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.810.932.819,54	17.743.647.040,00	(4.067.285.779,54)	81,35
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.562.890.610,00	6.080.929.700,00	(481.960.910,00)	92,65
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	121.600.000,00	0,00	(121.600.000,00)	0,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	13.480.052,00	0,00	(13.480.052,00)	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.733.680.000,00	5.164.672.185,00	(569.007.815,00)	90,07
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	188.860.000,00	177.600.000,00	(11.260.000,00)	94,03
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	177.406.000,00	158.000.000,00	(19.406.000,00)	89,06
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	97.086.000,00	71.900.000,00	(25.186.000,00)	74,05
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	914.936.000,00	862.877.100,00	(52.058.900,00)	94,31
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	20.160.000,00	20.000.000,00	(160.000,00)	99,20
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	218.423.000,00	218.000.000,00	(423.000,00)	99,80
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	27.060.000,00	26.850.000,00	(210.000,00)	99,22
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	262.464.000,00	232.300.000,00	(30.164.000,00)	88,50
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	930.397.000,00	890.322.000,00	(40.075.000,00)	95,69
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.262.672.400,00	1.173.554.620,00	(89.117.780,00)	92,94
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	293.218.600,00	280.265.600,00	(12.953.000,00)	95,58
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	97.830.000,00	93.600.000,00	(4.230.000,00)	95,67
5.1.02.01.02.0005	Belanja Komponen-Attachment	55.100.000,00	54.500.000,00	(600.000,00)	98,91
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	119.175.000,00	116.200.000,00	(2.975.000,00)	97,50

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025	(Rp)	(%)
5.1.02.01.02.0009	Belanja Pipa-Pipa Baja	2.990.600,00	2.990.600,00	0,00	100,00
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	18.123.000,00	12.975.000,00	(5.148.000,00)	71,59
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	230.511.130,00	207.966.570,00	(22.544.560,00)	90,21
5.1.02.01.04.0010	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	22.426.200,00	22.089.000,00	(337.200,00)	98,49
5.1.02.01.04.0011	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	45.131.600,00	44.622.000,00	(509.600,00)	98,87
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	32.400.000,00	25.196.400,00	(7.203.600,00)	77,76
5.1.02.01.04.0118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	99.321.630,00	96.379.800,00	(2.941.830,00)	97,03
5.1.02.01.04.0121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.753.200,00	2.280.000,00	(2.473.200,00)	47,96
5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	1.577.400,00	0,00	(1.577.400,00)	0,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya ([],Home Use),	17.843.100,00	11.442.000,00	(6.401.100,00)	64,12
5.1.02.01.04.0248	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	2.915.000,00	2.913.750,00	(1.250,00)	99,95
5.1.02.01.04.0452	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong	4.143.000,00	3.043.620,00	(1.099.380,00)	73,46
5.1.02.02	Belanja Jasa	124.035.521.153,00	100.922.635.439,80	(23.112.885.713,20)	81,36
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	86.638.615.674,00	69.482.956.701,20	(17.155.658.972,80)	80,19
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	995.250.000,00	777.100.000,00	(218.150.000,00)	78,08
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.072.750.000,00	3.958.365.000,00	(2.114.385.000,00)	65,18
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.947.180.000,00	8.535.760.000,00	(1.411.420.000,00)	85,81
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	516.500.000,00	458.875.000,00	(57.625.000,00)	88,84
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	60,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025	(Rp)	(%)
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	220.050.000,00	163.300.000,00	(56.750.000,00)	74,21
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	72.000.000,00	40.800.000,00	(31.200.000,00)	56,66
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	85.600.000,00	75.700.000,00	(9.900.000,00)	88,43
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	898.800.000,00	815.300.000,00	(83.500.000,00)	90,70
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.365.200.000,00	2.257.050.000,00	(108.150.000,00)	95,42
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	7.750.840.000,00	6.889.000.000,00	(861.840.000,00)	88,88
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	203.551.600,00	199.144.005,00	(4.407.595,00)	97,83
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	189.456.000,00	173.910.000,00	(15.546.000,00)	91,79
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.104.800.000,00	1.017.013.000,00	(87.787.000,00)	92,05
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.711.200.000,00	1.360.900.000,00	(350.300.000,00)	79,52
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	515.280.000,00	513.300.000,00	(1.980.000,00)	99,61
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	373.877.800,00	350.319.000,00	(23.558.800,00)	93,69
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.653.060.000,00	4.824.351.871,00	(2.828.708.129,00)	63,03
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.027.200.000,00	955.200.000,00	(72.000.000,00)	92,99
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.426.646.000,00	6.202.313.051,20	(1.224.332.948,80)	83,51
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.395.100.000,00	7.147.027.846,00	(2.248.072.154,00)	76,07
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.969.900.000,00	1.165.378.261,00	(804.521.739,00)	59,15
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	444.000.000,00	264.000.000,00	(180.000.000,00)	59,45
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.742.720.000,00	1.033.424.302,00	(709.295.698,00)	59,29
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	400.082.500,00	207.872.000,00	(192.210.500,00)	51,95
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	14.170.000,00	13.875.000,00	(295.000,00)	97,91
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	388.600.000,00	358.760.000,00	(29.840.000,00)	92,32
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	24.000.000,00	23.865.000,00	(135.000,00)	99,43
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	1.410.432.500,00	1.003.583.844,00	(406.848.656,00)	71,15
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.821.027.280,00	1.743.408.690,00	(77.618.590,00)	95,73

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025	(Rp)	(%)
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	180.325.000,00	129.873.000,00	(50.452.000,00)	72,02
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	143.370.000,00	86.387.836,00	(56.982.164,00)	60,25
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.076.500.000,00	1.060.050.000,00	(16.450.000,00)	98,47
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	7.860.000,00	7.088.000,00	(772.000,00)	90,17
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.112.122.940,00	880.382.637,00	(231.740.303,00)	79,16
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.320.785.674,00	3.909.837.378,00	(410.948.296,00)	90,48
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	734.081.000,00	624.473.840,00	(109.607.160,00)	85,06
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.148.519.580,00	2.625.276.737,00	(523.242.843,00)	83,38
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	66.480.000,00	35.898.700,00	(30.581.300,00)	53,99
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	749.167.800,00	381.183.003,00	(367.984.797,00)	50,88
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	370.460.000,00	196.316.700,00	(174.143.300,00)	52,99
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.730.330.000,00	6.010.893.000,00	(719.437.000,00)	89,31
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.001.840.000,00	855.400.000,00	(146.440.000,00)	85,38
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.885.650.600,00	5.317.079.745,00	(568.570.855,00)	90,33
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	495.375.800,00	485.524.248,00	(9.851.552,00)	98,01
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	20.160.000,00	0,00	(20.160.000,00)	0,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	4.917.931.200,00	4.552.059.600,00	(365.871.600,00)	92,56
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	56.855.400,00	9.127.599,00	(47.727.801,00)	16,05
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	227.330.600,00	160.562.573,00	(66.768.027,00)	70,62
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	167.997.600,00	109.805.725,00	(58.191.875,00)	65,36
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	88.000.000,00	77.000.000,00	(11.000.000,00)	87,50
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	88.000.000,00	77.000.000,00	(11.000.000,00)	87,50
5.1.02.02.03.0017	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025	(Rp)	(%)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.697.798.271,00	5.642.643.668,00	(1.055.154.603,00)	84,24
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	28.560.000,00	0,00	(28.560.000,00)	0,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	142.640.000,00	126.000.000,00	(16.640.000,00)	88,33
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.494.694.000,00	1.228.734.700,00	(265.959.300,00)	82,20
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	32.081.600,00	31.336.000,00	(745.600,00)	97,67
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	0,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0048	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	935.000.000,00	812.000.000,00	(123.000.000,00)	86,84
5.1.02.02.04.0082	Belanja Sewa Alat Ukur Universal	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.858.752.671,00	3.423.572.968,00	(435.179.703,00)	88,72
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	24.000.000,00	21.000.000,00	(3.000.000,00)	87,50
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	179.820.000,00	0,00	(179.820.000,00)	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.720.140.000,00	3.176.033.000,00	(544.107.000,00)	85,37
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	655.240.000,00	655.240.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	116.000.000,00	109.000.000,00	(7.000.000,00)	93,96
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	366.000.000,00	330.450.000,00	(35.550.000,00)	90,28
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0,00
5.1.02.02.05.0033	Belanja Sewa Bangunan Parkir	27.750.000,00	27.000.000,00	(750.000,00)	97,29
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	489.450.000,00	378.850.000,00	(110.600.000,00)	77,40
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.905.700.000,00	1.560.493.000,00	(345.207.000,00)	81,88
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	120.000.000,00	115.000.000,00	(5.000.000,00)	95,83
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	964.857.900,00	844.716.920,60	(120.140.979,40)	87,54
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	268.362.400,00	261.915.600,00	(6.446.800,00)	97,59

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025	(Rp)	(%)
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	299.913.000,00	291.592.500,00	(8.320.500,00)	97,22
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	88.702.000,00	85.947.744,00	(2.754.256,00)	96,89
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	210.062.500,00	205.261.076,60	(4.801.423,40)	97,71
5.1.02.02.08.0029	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal	97.818.000,00	0,00	(97.818.000,00)	0,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.590.572.220,00	1.577.482.000,00	(13.090.220,00)	99,17
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	490.572.220,00	477.482.000,00	(13.090.220,00)	97,33
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	180.900.000,00	171.980.958,00	(8.919.042,00)	95,06
5.1.02.02.10.0005	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	180.900.000,00	171.980.958,00	(8.919.042,00)	95,06
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	4.465.100.000,00	4.463.200.000,00	(1.900.000,00)	99,95
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	4.465.100.000,00	4.463.200.000,00	(1.900.000,00)	99,95
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	13.701.634.488,00	10.067.290.447,00	(3.634.344.041,00)	73,47
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	8.949.815.900,00	6.782.560.493,00	(2.167.255.407,00)	75,78
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	2.291.156.400,00	1.432.269.516,00	(858.886.884,00)	62,51
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	2.295.772.188,00	1.687.570.438,00	(608.201.750,00)	73,50
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	164.890.000,00	164.890.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	53.252.000,00	53.252.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	53.252.000,00	53.252.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10.333.503.130,01	9.240.824.596,57	(1.092.678.533,44)	89,42
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025	(Rp)	(%)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.171.856.800,01	4.609.016.611,00	(562.840.189,01)	89,11
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.517.048.000,01	1.405.386.956,00	(111.661.044,01)	92,63
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.875.875.800,00	1.585.978.164,00	(289.897.636,00)	84,54
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	134.640.000,00	134.400.000,00	(240.000,00)	99,82
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.860.000,00	5.245.000,00	(5.615.000,00)	48,29
5.1.02.03.02.0061	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	30.050.000,00	0,00	(30.050.000,00)	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	21.169.000,00	10.735.000,00	(10.434.000,00)	50,71
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	547.870.000,00	499.202.500,00	(48.667.500,00)	91,11
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	100.000.000,00	87.364.000,00	(12.636.000,00)	87,36
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	182.364.000,00	176.109.491,00	(6.254.509,00)	96,57
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	40.000.000,00	39.980.000,00	(20.000,00)	99,95
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	97.950.000,00	97.950.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	206.590.000,00	194.377.500,00	(12.212.500,00)	94,08
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	121.440.000,00	114.038.000,00	(7.402.000,00)	93,90
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	274.500.000,00	258.250.000,00	(16.250.000,00)	94,08

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025	(Rp)	(%)
5.1.02.03.02.0446	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.156.678.330,00	4.626.839.985,57	(529.838.344,43)	89,72
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.924.917.630,00	4.545.889.985,57	(379.027.644,43)	92,30
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	226.475.000,00	75.700.000,00	(150.775.000,00)	33,42
5.1.02.03.03.0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	5.285.700,00	5.250.000,00	(35.700,00)	99,32
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.968.000,00	4.968.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	4.968.000,00	4.968.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	79.912.784.886,26	70.949.996.166,00	(8.962.788.720,26)	88,78
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	79.912.784.886,26	70.949.996.166,00	(8.962.788.720,26)	88,78
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	64.619.777.976,00	59.044.964.066,00	(5.574.813.910,00)	91,37
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.598.962.009,60	10.139.638.100,00	(2.459.323.909,60)	80,47
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	167.092.500,00	123.530.000,00	(43.562.500,00)	73,92
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.526.952.400,66	1.641.864.000,00	(885.088.400,66)	64,97
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.092.895.766,00	5.619.704.679,00	(473.191.087,00)	92,23
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.438.604.266,00	4.995.966.179,00	(442.638.087,00)	91,86
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.993.950.000,00	2.644.570.000,00	(349.380.000,00)	88,33
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	371.000.000,00	344.952.000,00	(26.048.000,00)	92,97
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	114.148.266,00	59.500.000,00	(54.648.266,00)	52,12
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	1.959.506.000,00	1.946.944.179,00	(12.561.821,00)	99,35
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025	(Rp)	(%)
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	654.291.500,00	623.738.500,00	(30.553.000,00)	95,33
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	654.291.500,00	623.738.500,00	(30.553.000,00)	95,33
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	20.368.404.000,00	19.205.801.482,00	(1.162.602.518,00)	94,29
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	19.902.053.000,00	18.909.431.502,00	(992.621.498,00)	95,01
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	19.388.553.000,00	18.909.431.502,00	(479.121.498,00)	97,52
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	513.500.000,00	0,00	(513.500.000,00)	0,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	113.640.000,00	113.346.000,00	(294.000,00)	99,74
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	98.640.000,00	98.346.000,00	(294.000,00)	99,70
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	352.711.000,00	183.023.980,00	(169.687.020,00)	51,89
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	352.711.000,00	183.023.980,00	(169.687.020,00)	51,89
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	3.371.433.708,00	3.103.653.147,00	(267.780.561,00)	92,05
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	3.371.433.708,00	3.103.653.147,00	(267.780.561,00)	92,05
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	3.371.433.708,00	3.103.653.147,00	(267.780.561,00)	92,05
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	7.437.417.420,00	7.145.064.692,16	(292.352.727,84)	96,06
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	7.437.417.420,00	7.145.064.692,16	(292.352.727,84)	96,06
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	7.437.417.420,00	7.145.064.692,16	(292.352.727,84)	96,06
5.1.05	Belanja Hibah	19.667.134.141,00	19.262.097.420,00	(405.036.721,00)	97,94
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	442.198.500,00	424.825.000,00	(17.373.500,00)	96,07
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	192.198.500,00	174.825.000,00	(17.373.500,00)	90,96
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	192.198.500,00	174.825.000,00	(17.373.500,00)	90,96
5.1.05.04	Belanja Hibah kepada BUMD	600.000.000,00	596.228.675,00	(3.771.325,00)	99,37
5.1.05.04.02	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	600.000.000,00	596.228.675,00	(3.771.325,00)	99,37
5.1.05.04.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	600.000.000,00	596.228.675,00	(3.771.325,00)	99,37
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	13.405.735.115,00	13.067.646.100,00	(338.089.015,00)	97,47

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025	(Rp)	(%)
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	11.307.101.280,00	11.014.024.200,00	(293.077.080,00)	97,40
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.388.329.080,00	10.166.943.300,00	(221.385.780,00)	97,86
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	918.772.200,00	847.080.900,00	(71.691.300,00)	92,19
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.957.709.935,00	1.912.698.000,00	(45.011.935,00)	97,70
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.957.709.935,00	1.912.698.000,00	(45.011.935,00)	97,70
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	140.923.900,00	140.923.900,00	0,00	100,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	140.923.900,00	140.923.900,00	0,00	100,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	2.383.822.000,00	2.341.050.820,00	(42.771.180,00)	98,20
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	2.383.822.000,00	2.341.050.820,00	(42.771.180,00)	98,20
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	2.383.822.000,00	2.341.050.820,00	(42.771.180,00)	98,20
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.064.668.526,00	1.064.668.525,00	(1,00)	99,99
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.064.668.526,00	1.064.668.525,00	(1,00)	99,99
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.064.668.526,00	1.064.668.525,00	(1,00)	99,99
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	1.770.710.000,00	1.767.678.300,00	(3.031.700,00)	99,82
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	572.610.000,00	571.378.300,00	(1.231.700,00)	99,78
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	572.610.000,00	571.378.300,00	(1.231.700,00)	99,78
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.198.100.000,00	1.196.300.000,00	(1.800.000,00)	99,84
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.198.100.000,00	1.196.300.000,00	(1.800.000,00)	99,84

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025	(Rp)	(%)
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	243.500.000,00	243.500.000,00	0,00	100,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	243.500.000,00	243.500.000,00	0,00	100,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	243.500.000,00	243.500.000,00	0,00	100,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	243.500.000,00	243.500.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	784.968.530.028,51	661.098.426.989,46	(123.870.103.039,05)	84,22
5.2	BELANJA MODAL	434.056.815.945,39	386.884.401.043,24	(47.172.414.902,15)	89,13
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.015.903.866,00	2.847.964.666,00	(167.939.200,00)	94,43
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	3.015.903.866,00	2.847.964.666,00	(167.939.200,00)	94,43
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	583.802.000,00	583.802.000,00	0,00	100,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	583.802.000,00	583.802.000,00	0,00	100,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	2.432.101.866,00	2.264.162.666,00	(167.939.200,00)	93,09
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	2.432.101.866,00	2.264.162.666,00	(167.939.200,00)	93,09
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.255.670.619,00	35.323.557.737,00	(3.932.112.882,00)	89,98
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	5.018.881.768,00	4.923.460.590,00	(95.421.178,00)	98,09
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	4.448.552.300,00	4.399.472.150,00	(49.080.150,00)	98,89
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	4.265.900.000,00	4.217.800.000,00	(48.100.000,00)	98,87
5.2.02.01.01.0005	Belanja Modal Hauler	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.01.0007	Belanja Modal Compacting Equipment	36.190.400,00	36.190.000,00	(400,00)	99,99
5.2.02.01.01.0010	Belanja Modal Alat Pengangkat	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	146.461.900,00	145.482.150,00	(979.750,00)	99,33
5.2.02.01.02	Belanja Modal Alat Besar Apung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.02.0006	Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	570.329.468,00	523.988.440,00	(46.341.028,00)	91,87
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	428.658.968,00	386.940.000,00	(41.718.968,00)	90,26
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	5.103.000,00	3.400.000,00	(1.703.000,00)	66,62
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	119.767.500,00	117.660.000,00	(2.107.500,00)	98,24
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	16.800.000,00	15.988.440,00	(811.560,00)	95,16
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	10.865.739.852,00	9.502.984.000,00	(1.362.755.852,00)	87,45

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025	(Rp)	(%)
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	10.565.739.852,00	9.202.984.000,00	(1.362.755.852,00)	87,10
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.572.692.500,00	3.398.224.000,00	(174.468.500,00)	95,11
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	3.852.612.000,00	2.779.000.000,00	(1.073.612.000,00)	72,13
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.282.822.000,00	1.231.360.000,00	(51.462.000,00)	95,98
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.857.613.352,00	1.794.400.000,00	(63.213.352,00)	96,59
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	448.094.900,00	175.325.100,00	(272.769.800,00)	39,12
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	0,00
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	388.094.900,00	175.325.100,00	(212.769.800,00)	45,17
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	240.000.000,00	29.365.000,00	(210.635.000,00)	12,23
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	9.524.900,00	8.935.500,00	(589.400,00)	93,81
5.2.02.03.03.0011	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	126.500.000,00	125.274.600,00	(1.225.400,00)	99,03
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	12.070.000,00	11.750.000,00	(320.000,00)	97,34
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.197.000,00	1.197.000,00	0,00	100,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.197.000,00	1.197.000,00	0,00	100,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1.197.000,00	1.197.000,00	0,00	100,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	11.103.037.053,00	9.705.077.850,00	(1.397.959.203,00)	87,40
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	6.060.629.239,00	5.664.749.677,00	(395.879.562,00)	93,46
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	13.747.378,00	6.370.000,00	(7.377.378,00)	46,33
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025	(Rp)	(%)
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	502.628.665,00	480.410.539,00	(22.218.126,00)	95,57
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.544.253.196,00	5.177.969.138,00	(366.284.058,00)	93,39
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.925.324.560,00	3.937.480.119,00	(987.844.441,00)	79,94
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.425.638.287,00	2.081.433.469,00	(344.204.818,00)	85,80
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	29.699.617,00	20.455.000,00	(9.244.617,00)	68,87
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.260.028.086,00	869.353.800,00	(390.674.286,00)	68,99
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	56.169.663,00	40.980.000,00	(15.189.663,00)	72,95
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.111.225.707,00	890.736.850,00	(220.488.857,00)	80,15
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	42.563.200,00	34.521.000,00	(8.042.200,00)	81,10
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	117.083.254,00	102.848.054,00	(14.235.200,00)	87,84
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	29.886.800,00	17.486.000,00	(12.400.800,00)	58,50
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	12.813.000,00	12.738.100,00	(74.900,00)	99,41
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	33.683.000,00	32.700.000,00	(983.000,00)	97,08
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	38.198.500,00	37.422.000,00	(776.500,00)	97,96
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	2.501.954,00	2.501.954,00	0,00	100,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	837.998.613,00	644.555.760,00	(193.442.853,00)	76,91
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	722.303.013,00	531.859.760,00	(190.443.253,00)	73,63
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	73.626.800,00	34.143.700,00	(39.483.100,00)	46,37
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	557.332.400,00	408.849.410,00	(148.482.990,00)	73,35
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	91.343.813,00	88.866.650,00	(2.477.163,00)	97,28
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	47.728.400,00	46.096.000,00	(1.632.400,00)	96,57
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	17.855.000,00	16.346.000,00	(1.509.000,00)	91,54
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	29.873.400,00	29.750.000,00	(123.400,00)	99,58
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	67.967.200,00	66.600.000,00	(1.367.200,00)	97,98
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	67.967.200,00	66.600.000,00	(1.367.200,00)	97,98
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.092.346.383,00	2.945.404.461,00	(146.941.922,00)	95,24
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.147.481.138,00	2.046.569.001,00	(100.912.137,00)	95,30
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	416.183.513,00	380.006.694,00	(36.176.819,00)	91,30

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025	(Rp)	(%)
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	6.122.500,00	6.000.000,00	(122.500,00)	97,99
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	654.313.500,00	619.697.365,00	(34.616.135,00)	94,70
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	26.353.100,00	23.050.000,00	(3.303.100,00)	87,46
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	2.244.958,00	1.326.450,00	(918.508,00)	59,08
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	44.381.100,00	36.574.500,00	(7.806.600,00)	82,41
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	769.732.467,00	762.253.992,00	(7.478.475,00)	99,02
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	45.000.000,00	44.500.000,00	(500.000,00)	98,88
5.2.02.07.01.0023	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	183.150.000,00	173.160.000,00	(9.990.000,00)	94,54
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	944.865.245,00	898.835.460,00	(46.029.785,00)	95,12
5.2.02.07.02.0004	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	24.928.200,00	24.400.000,00	(528.200,00)	97,88
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	919.937.045,00	874.435.460,00	(45.501.585,00)	95,05
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	185.769.874,00	168.990.770,00	(16.779.104,00)	90,96
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	119.674.800,00	116.429.850,00	(3.244.950,00)	97,28
5.2.02.08.01.0008	Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	97.180.500,00	96.320.250,00	(860.250,00)	99,11
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.01.0031	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	7.947.400,00	6.782.100,00	(1.165.300,00)	85,33
5.2.02.08.01.0041	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	14.546.900,00	13.327.500,00	(1.219.400,00)	91,61
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	61.383.674,00	47.920.920,00	(13.462.754,00)	78,06
5.2.02.08.03.0002	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika	4.815.800,00	4.795.200,00	(20.600,00)	99,57
5.2.02.08.03.0003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	4.553.074,00	4.519.920,00	(33.154,00)	99,27
5.2.02.08.03.0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	47.658.800,00	34.643.100,00	(13.015.700,00)	72,68
5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	4.356.000,00	3.962.700,00	(393.300,00)	90,97
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	4.711.400,00	4.640.000,00	(71.400,00)	98,48
5.2.02.08.05.0003	Belanja Modal Proteksi Lingkungan	4.711.400,00	4.640.000,00	(71.400,00)	98,48
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025	(Rp)	(%)
5.2.02.08.07.0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.859.146.172,00	3.648.043.226,00	(211.102.946,00)	94,52
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.371.703.484,00	3.193.742.004,00	(177.961.480,00)	94,72
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	169.000.000,00	91.798.110,00	(77.201.890,00)	54,31
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	3.134.614.984,00	3.033.855.394,00	(100.759.590,00)	96,78
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	68.088.500,00	68.088.500,00	0,00	100,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	487.442.688,00	454.301.222,00	(33.141.466,00)	93,20
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	433.853.938,00	402.575.122,00	(31.278.816,00)	92,79
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	34.463.350,00	32.720.800,00	(1.742.550,00)	94,94
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	19.125.400,00	19.005.300,00	(120.100,00)	99,37
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.12.02	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.12.02.0004	Belanja Modal Peralatan Bantu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	43.295.000,00	0,00	(43.295.000,00)	0,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	43.295.000,00	0,00	(43.295.000,00)	0,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	43.295.000,00	0,00	(43.295.000,00)	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	200.000.000,00	198.912.000,00	(1.088.000,00)	99,45
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	200.000.000,00	198.912.000,00	(1.088.000,00)	99,45
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	200.000.000,00	198.912.000,00	(1.088.000,00)	99,45
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	14.408.000,00	13.421.800,00	(986.200,00)	93,15
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	14.408.000,00	13.421.800,00	(986.200,00)	93,15
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	14.408.000,00	13.421.800,00	(986.200,00)	93,15
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	2.888.834.000,00	2.729.358.100,00	(159.475.900,00)	94,47
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	2.888.834.000,00	2.729.358.100,00	(159.475.900,00)	94,47
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	2.866.334.000,00	2.729.358.100,00	(136.975.900,00)	95,22
5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	696.922.004,00	666.827.080,00	(30.094.924,00)	95,68
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	696.922.004,00	666.827.080,00	(30.094.924,00)	95,68
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	696.922.004,00	666.827.080,00	(30.094.924,00)	95,68
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	259.808.320.981,39	233.904.479.133,85	(25.903.841.847,54)	90,02
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	252.292.140.371,39	228.739.661.334,73	(23.552.479.036,66)	90,66
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	250.695.760.221,39	227.300.323.234,73	(23.395.436.986,66)	90,66

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025	(Rp)	(%)
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	157.339.916.516,00	146.973.410.412,73	(10.366.506.103,27)	93,41
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	13.940.867.700,00	13.203.796.410,00	(737.071.290,00)	94,71
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	16.696.343.456,00	13.745.239.933,00	(2.951.103.523,00)	82,32
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	44.329.259.812,39	36.114.179.385,00	(8.215.080.427,39)	81,46
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	266.136.800,00	264.344.818,00	(1.791.982,00)	99,32
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	185.884.160,00	183.190.209,00	(2.693.951,00)	98,55
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	127.965.577,00	125.980.000,00	(1.985.577,00)	98,44
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	10.349.980.000,00	10.341.882.077,00	(8.097.923,00)	99,92
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	236.000.000,00	230.250.000,00	(5.750.000,00)	97,56
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	600.000.000,00	594.486.500,00	(5.513.500,00)	99,08
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	6.623.406.200,00	5.523.563.490,00	(1.099.842.710,00)	83,39
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.596.380.150,00	1.439.338.100,00	(157.042.050,00)	90,16
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	282.699.700,00	282.699.700,00	0,00	100,00
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	1.313.680.450,00	1.156.638.400,00	(157.042.050,00)	88,04
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	157.456.965,00	155.403.842,52	(2.053.122,48)	98,69
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	157.456.965,00	155.403.842,52	(2.053.122,48)	98,69
5.2.03.02.01.0002	Belanja Modal Tugu	157.456.965,00	155.403.842,52	(2.053.122,48)	98,69
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	172.357.745,00	164.250.000,00	(8.107.745,00)	95,29
5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	172.357.745,00	164.250.000,00	(8.107.745,00)	95,29
5.2.03.03.01.0005	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	172.357.745,00	164.250.000,00	(8.107.745,00)	95,29
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	7.001.365.900,00	4.664.588.861,60	(2.336.777.038,40)	66,62
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	7.001.365.900,00	4.664.588.861,60	(2.336.777.038,40)	66,62
5.2.03.04.01.0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	2.100.000.000,00	0,00	(2.100.000.000,00)	0,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	4.078.909.800,00	3.851.485.489,00	(227.424.311,00)	94,42
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	822.456.100,00	813.103.372,60	(9.352.727,40)	98,86
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	185.000.000,00	180.575.095,00	(4.424.905,00)	97,60
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	185.000.000,00	180.575.095,00	(4.424.905,00)	97,60
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	185.000.000,00	180.575.095,00	(4.424.905,00)	97,60
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	128.538.549.399,00	111.466.199.577,39	(17.072.349.821,61)	86,71
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	108.774.666.364,00	93.210.168.641,39	(15.564.497.722,61)	85,69

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025	(Rp)	(%)
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	101.450.778.187,00	87.026.279.349,02	(14.424.498.837,98)	85,78
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	101.450.778.187,00	87.026.279.349,02	(14.424.498.837,98)	85,78
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	7.323.888.177,00	6.183.889.292,37	(1.139.998.884,63)	84,43
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	7.126.900.677,00	5.988.584.792,37	(1.138.315.884,63)	84,02
5.2.04.01.02.0011	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	196.987.500,00	195.304.500,00	(1.683.000,00)	99,14
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	12.216.624.920,00	12.044.977.056,00	(171.647.864,00)	98,59
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.01.0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10.003.806.920,00	9.906.125.700,00	(97.681.220,00)	99,02
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	10.003.806.920,00	9.906.125.700,00	(97.681.220,00)	99,02
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	68.470.000,00	36.844.356,00	(31.625.644,00)	53,81
5.2.04.02.06.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	68.470.000,00	36.844.356,00	(31.625.644,00)	53,81
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.144.348.000,00	2.102.007.000,00	(42.341.000,00)	98,02
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	2.144.348.000,00	2.102.007.000,00	(42.341.000,00)	98,02
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	5.488.580.000,00	4.152.692.080,00	(1.335.887.920,00)	75,66
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	5.210.833.000,00	3.879.256.900,00	(1.331.576.100,00)	74,44
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	5.210.833.000,00	3.879.256.900,00	(1.331.576.100,00)	74,44
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	277.747.000,00	273.435.180,00	(4.311.820,00)	98,44
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	277.747.000,00	273.435.180,00	(4.311.820,00)	98,44
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	2.058.678.115,00	2.058.361.800,00	(316.315,00)	99,98
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	2.058.678.115,00	2.058.361.800,00	(316.315,00)	99,98
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	2.058.678.115,00	2.058.361.800,00	(316.315,00)	99,98
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.380.431.856,00	1.461.196.461,00	80.764.605,00	105,85
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	200.000.000,00	38.612.682,00	(161.387.318,00)	19,30
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	200.000.000,00	38.612.682,00	(161.387.318,00)	19,30
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	161.227.783,00	0,00	(161.227.783,00)	0,00
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	2.618.000,00	2.610.720,00	(7.280,00)	99,72
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	31.148.617,00	31.030.050,00	(118.567,00)	99,61
5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	5.005.600,00	4.971.912,00	(33.688,00)	99,32

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025	(Rp)	(%)
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	300.000.000,00	296.592.000,00	(3.408.000,00)	98,86
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	300.000.000,00	296.592.000,00	(3.408.000,00)	98,86
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	300.000.000,00	296.592.000,00	(3.408.000,00)	98,86
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02.02.0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	128.683.856,00	128.541.900,00	(141.956,00)	99,88
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	128.683.856,00	128.541.900,00	(141.956,00)	99,88
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	128.683.856,00	128.541.900,00	(141.956,00)	99,88
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	751.748.000,00	997.449.879,00	245.701.879,00	132,68
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	664.679.000,00	897.678.200,00	232.999.200,00	135,05
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	664.679.000,00	897.678.200,00	232.999.200,00	135,05
5.2.05.89.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan	87.069.000,00	99.771.679,00	12.702.679,00	114,58
5.2.05.89.03.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	87.069.000,00	99.771.679,00	12.702.679,00	114,58
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.057.939.224,00	1.881.003.468,00	(176.935.756,00)	91,40
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	2.057.939.224,00	1.881.003.468,00	(176.935.756,00)	91,40
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2.057.939.224,00	1.881.003.468,00	(176.935.756,00)	91,40
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	945.005.300,00	789.576.000,00	(155.429.300,00)	83,55
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	1.112.933.924,00	1.091.427.468,00	(21.506.456,00)	98,06
	JUMLAH BELANJA MODAL	434.056.815.945,39	386.884.401.043,24	(47.172.414.902,15)	89,13
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	94.864.820.364,00	0,00	(94.864.820.364,00)	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	94.864.820.364,00	0,00	(94.864.820.364,00)	0,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	94.864.820.364,00	0,00	(94.864.820.364,00)	0,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	94.864.820.364,00	0,00	(94.864.820.364,00)	0,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	94.864.820.364,00	0,00	(94.864.820.364,00)	0,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	94.864.820.364,00	0,00	(94.864.820.364,00)	0,00

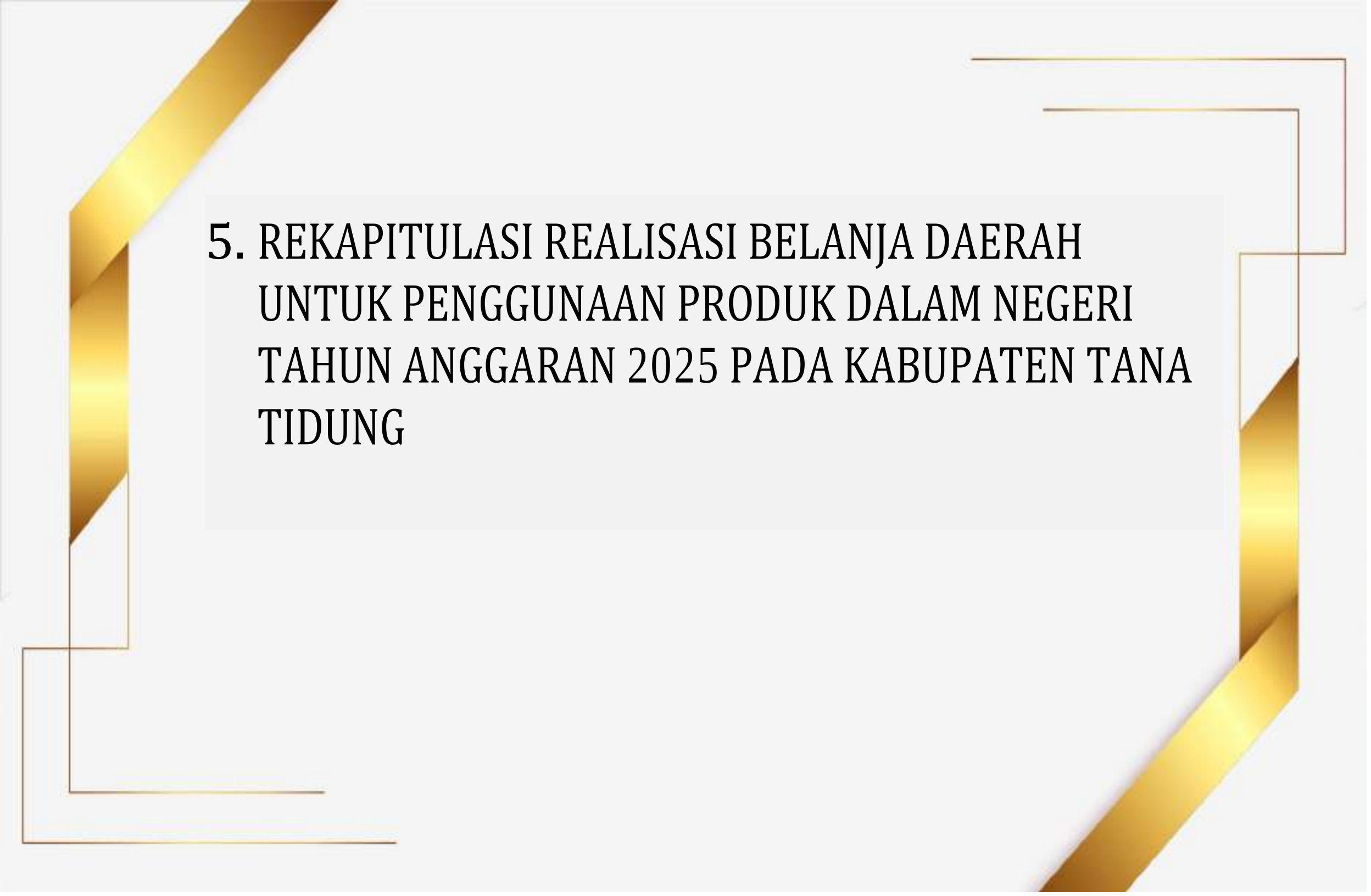
Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025	(Rp)	(%)
5.4	BELANJA TRANSFER	119.344.429.141,00	118.528.344.923,00	(816.084.218,00)	99,31
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	989.949.241,00	989.949.241,00	0,00	100,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	886.812.239,00	886.812.239,00	0,00	100,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	886.812.239,00	886.812.239,00	0,00	100,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	886.812.239,00	886.812.239,00	0,00	100,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	103.137.002,00	103.137.002,00	0,00	100,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	103.137.002,00	103.137.002,00	0,00	100,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	103.137.002,00	103.137.002,00	0,00	100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	118.354.479.900,00	117.538.395.682,00	(816.084.218,00)	99,31
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02.03.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	118.354.479.900,00	117.538.395.682,00	(816.084.218,00)	99,31
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	117.994.479.900,00	117.178.395.682,00	(816.084.218,00)	99,30
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	117.994.479.900,00	117.178.395.682,00	(816.084.218,00)	99,30
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	100,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	119.344.429.141,00	118.528.344.923,00	(816.084.218,00)	99,31
	JUMLAH BELANJA	1.433.234.595.478,90	1.166.511.172.955,70	(266.723.422.523,20)	81,39

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025	(Rp)	(%)
	SURPLUS/DEFISIT	(406.022.138.025,90)	(87.728.720.631,65)	318.293.417.394,25	21,62
6	PEMBIAYAAN DAERAH	406.022.138.025,90	436.022.138.025,90	30.000.000.000,00	107,38
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	436.022.138.025,90	436.022.138.025,90	0,00	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	436.022.138.025,90	436.022.138.025,90	0,00	100,00
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	431.769.845.596,90	435.652.042.339,93	3.882.196.743,03	100,89
6.1.01.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah	17.314.145.000,00	0,00	(17.314.145.000,00)	0,00
6.1.01.03.01.0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	17.314.145.000,00	0,00	(17.314.145.000,00)	0,00
6.1.01.03.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	414.455.700.596,90	435.652.042.339,93	21.196.341.743,03	105,11
6.1.01.03.03.0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	414.455.700.596,90	435.652.042.339,93	21.196.341.743,03	105,11
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	4.252.292.429,00	370.095.685,97	(3.882.196.743,03)	8,70
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	4.252.292.429,00	0,00	(4.252.292.429,00)	0,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	4.252.292.429,00	0,00	(4.252.292.429,00)	0,00
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	0,00	220.783.362,97	220.783.362,97	0,00
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	0,00	220.783.362,97	220.783.362,97	0,00
6.1.01.08.03	Sisa Dana Kapitasi	0,00	149.312.323,00	149.312.323,00	0,00
6.1.01.08.03.0001	Sisa Dana Kapitasi	0,00	149.312.323,00	149.312.323,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	436.022.138.025,90	436.022.138.025,90	0,00	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00	0,00	(30.000.000.000,00)	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	30.000.000.000,00	0,00	(30.000.000.000,00)	0,00
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	30.000.000.000,00	0,00	(30.000.000.000,00)	0,00
6.2.03.01.06	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang	30.000.000.000,00	0,00	(30.000.000.000,00)	0,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025	(Rp)	(%)
6.2.03.01.06.0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang	30.000.000.000,00	0,00	(30.000.000.000,00)	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00	0,00	(30.000.000.000,00)	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	406.022.138.025,90	436.022.138.025,90	30.000.000.000,00	107,38
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	348.293.417.394,25	348.293.417.394,25	0,00

TANA TIDUNG, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.

The slide features a light gray background with decorative gold elements. A wide, 3D-style gold ribbon runs diagonally from the top-left corner towards the bottom-right. Thin, dark gold lines form a stepped, L-shaped border in the top-right and bottom-left corners. The main text is centered within a light gray rectangular area.

5. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025 PADA KABUPATEN TANA TIDUNG



KABUPATEN TANA TIDUNG
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2025

No	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Komitmen Belanja PDN (Rp)	Realisasi Belanja PDN (Rp)	Persentase Realisasi PDN (%)	Permasalahan dan Strategi dan Penyelesaian
I	BELANJA OPERASI	394.618.535.930,28	157.847.414.372,11	138.080.970.602,18	87,48	
I.1	Belanja Barang dan Jasa (termasuk barang yang diserahkan kepada masyarakat)	374.707.901.789,28	149.883.160.715,71	130.278.731.634,18	86,92	
I.2	Belanja Hibah Barang/Jasa	19.667.134.141,00	7.866.853.656,40	7.704.838.968,00	97,94	
I.3	Bantuan sosial Barang/Jasa	243.500.000,00	97.400.000,00	97.400.000,00	100,00	
II	BELANJA MODAL	434.056.815.945,39	173.622.726.378,16	153.614.574.550,90	88,48	
II.1	Belanja Modal Tanah	3.015.903.866,00	1.206.361.546,40	0,00	0,00	
II.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.255.670.619,00	15.702.268.247,60	14.129.423.094,80	89,98	
II.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	259.808.320.981,39	103.923.328.392,56	93.561.791.653,54	90,03	
II.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan irigasi	128.538.549.399,00	51.415.419.759,60	44.586.479.830,96	86,72	
II.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.380.431.856,00	552.172.742,40	584.478.584,40	105,85	
II.6	Belanja Modal Aset Lainnya	2.057.939.224,00	823.175.689,60	752.401.387,20	91,40	
TOTAL (1+2)		828.675.351.875,67	331.470.140.750,27	291.695.545.153,08	88,00	

TIDENG PALE, 4 September 2025
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.

6. REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK
SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025 PADA KABUPATEN TANA
TIDUNG

6. REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TA 2025

No.	SKPD Pelaksana	Prioritas Nasional	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	103.922.000,00	95.825.400,00	92,21
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	191.916.300,00	191.662.230,00	99,87
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	531.724.660,00	531.454.096,00	99,95
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	778.379.000,00	761.581.541,00	97,84
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			

No.	SKPD Pelaksana	Prioritas Nasional	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	4.419.812.506,00	4.066.608.831,00	92,01
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	71.980.000,00	71.725.400,00	99,65
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.841.187.429,00	3.613.067.843,00	94,06
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	711.756.672,00	707.964.428,00	99,47
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.058.400,00	60.124.400,00	93,86
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.630.000,00	169.466.079,00	99,32
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	171.505.500,00	167.210.200,00	97,50
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	18.340.950.900,00	11.353.007.921,97	61,90
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.296.325.890,00	4.183.377.317,00	97,37
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.486.200,00	84.968.850,00	78,32
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			

No.	SKPD Pelaksana	Prioritas Nasional	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
	Informatika	Keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	125.355.000,00	109.684.780,00	87,50
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	224.663.800,00	199.738.746,00	88,91
		Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.201.739.000,00	1.159.543.687,00	96,49
		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.328.609.000,00	1.318.366.210,00	99,23
		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.103.364.238,00	4.729.093.337,00	92,67
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	297.686.250,00	280.942.449,00	94,38
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.740.000,00	108.967.600,00	93,34
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291.492.000,00	223.932.833,00	76,82
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.489.000,00	49.411.840,00	97,87
4	Dinas Lingkungan Hidup	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	72.782.130,00	71.402.700,00	98,10

No.	SKPD Pelaksana	Prioritas Nasional	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	487.940.720,00	471.429.800,00	96,62
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Pengelolaan Sampah	5.550.086.700,00	5.446.527.364,00	98,13
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	288.868.600,66	274.733.745,00	95,11
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	514.159.600,00	512.572.105,00	99,69
		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130.296.000,00	113.883.350,00	87,40
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.901.580.117,34	3.869.163.173,00	99,17
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	618.115.560,00	585.963.252,00	94,80
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.390.000,00	74.216.300,00	72,48
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.115.000,00	51.555.219,00	93,54
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.262.000,00	12.841.000,00	74,39
5	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	9.734.000,00	8.346.400,00	85,74
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	22.202.700,00	21.788.800,00	98,14

No.	SKPD Pelaksana	Prioritas Nasional	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
		Ekonomi dan	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	720.318.180,00	694.416.210,00	96,40
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.812.000,00	35.260.249,00	98,46
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.743.612.435,00	3.560.099.937,00	95,10
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	521.371.636,00	518.087.435,00	99,37
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.344.124.600,00	1.279.574.100,00	95,20
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.877.809.200,00	1.485.422.500,00	79,10
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.904.995,00	9.135.900,00	92,24
6	Dinas Perhubungan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87.430.000,00	85.776.600,00	98,11
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.668.634.811,00	4.639.654.137,00	99,38
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.133.006.369,00	1.103.088.800,00	97,36
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	988.575.134,00	879.696.540,00	88,99
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	551.120.104,00	519.454.800,00	94,25
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.644.000,00	28.044.400,00	97,91
7	Dinas Perindustrian	Melanjutkan hilirisasi dan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			

No.	SKPD Pelaksana	Prioritas Nasional	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
	Perdagangan Koperasi dan UKM	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	80.833.300,00	74.889.000,00	92,65
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	46.916.200,00	44.716.200,00	95,31
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.057.938.300,00	940.148.910,00	88,87
		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	71.455.000,00	65.381.800,00	91,50
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	70.248.000,00	57.337.200,00	81,62
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	390.406.000,00	342.153.300,00	87,64
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	320.156.500,00	223.018.800,00	69,66

No.	SKPD Pelaksana	Prioritas Nasional	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	311.412.860,00	297.118.357,00	95,41
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	755.998.530,00	754.765.175,00	99,84
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	261.556.000,00	244.452.400,00	93,46
		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.708.000,00	31.642.962,00	83,92
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.609.582.603,00	6.593.877.129,00	99,76
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	527.872.756,00	508.887.250,00	96,40
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.268.100,00	142.555.804,00	95,50
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	683.418.000,00	311.851.472,00	45,63
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.402.400,00	18.486.200,00	95,28
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.777.830.019,00	10.764.014.877,00	99,87
			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	615.050.600,00	441.352.352,00	71,76
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	181.849.125,00	180.086.670,00	99,03
			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	32.540.000,00	32.351.200,00	99,42

No.	SKPD Pelaksana	Prioritas Nasional	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	68.625.000,00	68.541.000,00	99,88
9	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	108.274.700,00	101.403.000,00	93,65
10	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	917.795.200,00	818.603.500,00	89,19
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.663.484.800,00	1.615.670.500,00	97,13
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.900.000,00	99,00
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	175.566.000,00	173.977.000,00	99,09
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			

No.	SKPD Pelaksana	Prioritas Nasional	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.701.679.464,00	5.600.799.527,00	98,23
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	811.533.750,00	791.031.799,00	97,47
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.318.150,00	130.284.150,00	90,91
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	406.441.400,00	334.157.625,00	82,22
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	376.822.000,00	374.747.000,00	99,45
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	244.193.000,00	231.842.120,00	94,94
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	115.652.000,00	103.565.000,00	89,55
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	449.468.542,00	408.430.264,00	90,87
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	38.848.000,00	38.664.000,00	99,53

No.	SKPD Pelaksana	Prioritas Nasional	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
			Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	6.300.000,00	-	0,00
		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
			Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	151.469.400,00	151.365.900,00	99,93
		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	204.394.000,00	201.189.600,00	98,43
		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.028.000,00	20.563.620,00	70,84
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	359.764.594,00	347.160.697,00	96,50
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.563.300,00	79.568.000,00	96,37
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.112.000,00	141.809.920,00	76,20
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.448.000,00	14.659.800,00	94,90
12	Inspektorat Kabupaten	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.358.567.714,00	4.626.930.049,00	86,35
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.076.880.856,00	1.040.809.612,00	96,65
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.027.562.970,00	1.022.623.880,00	99,52

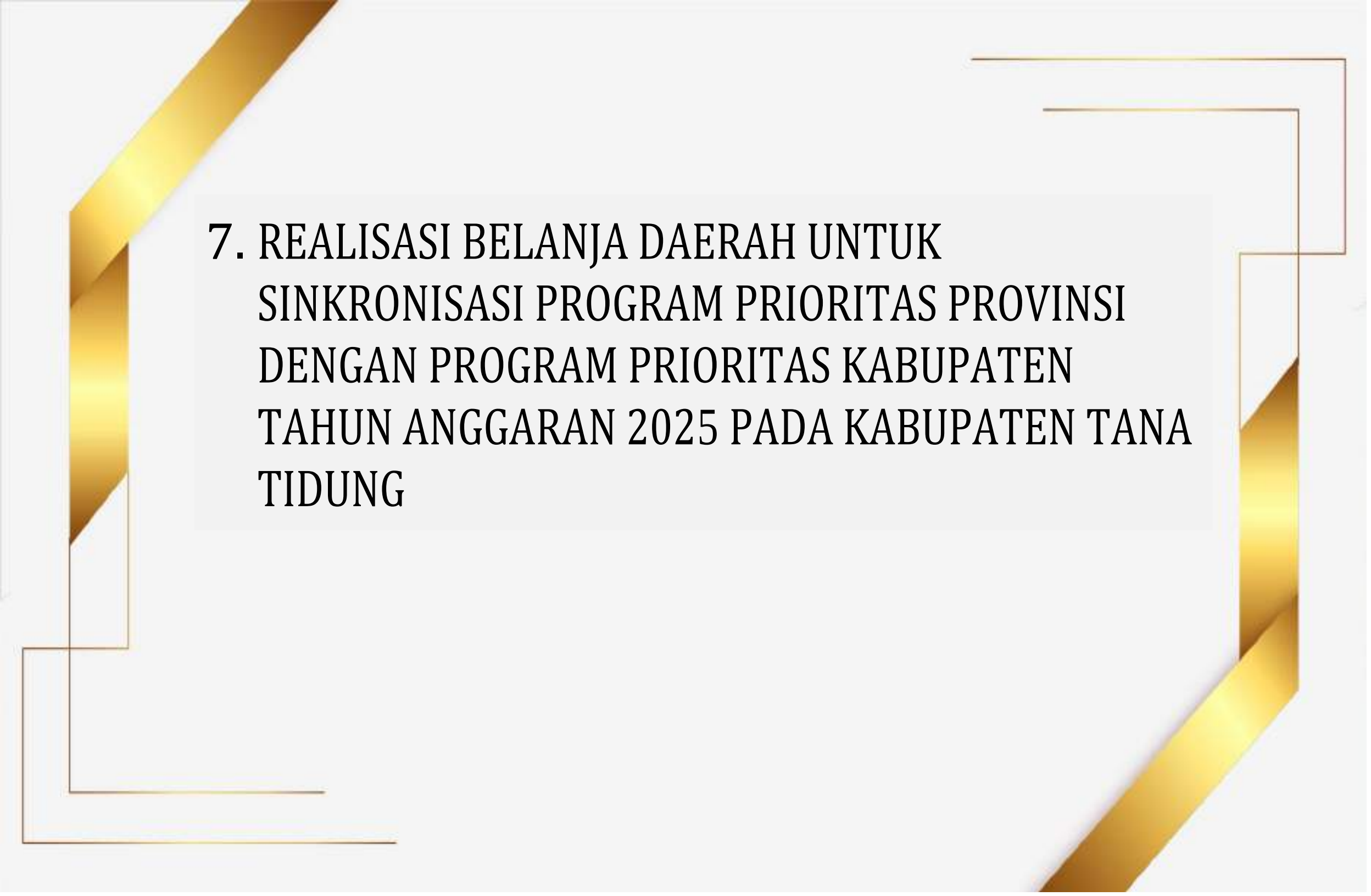
No.	SKPD Pelaksana	Prioritas Nasional	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	531.278.400,00	443.061.697,00	83,40
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.474.000,00	66.856.200,00	97,64
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	785.264.000,00	674.603.813,00	85,91
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.966.753.000,00	2.159.109.434,00	72,78
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
			Pendampingan dan Asistensi	3.038.081.000,00	2.228.279.342,00	73,34
13	Kecamatan Sesayap	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	39.625.000,00	20.117.000,00	50,77
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	520.565.700,00	194.952.300,00	37,45
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	32.840.000,00	25.640.000,00	78,08
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.550.000,00	9.900.000,00	48,18
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10.200.000,00	39.151.800,00	383,84
14	Kecamatan Sesayap Hilir	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	80.715.800,00	19.860.000,00	24,60
		Memperkuat pembangunan sumber	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			

No.	SKPD Pelaksana	Prioritas Nasional	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	
		daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	378.241.800,00	181.452.300,00	47,97	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	136.272.200,00	90.067.600,00	66,09	
		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.210.000,00	10.667.000,00	44,06	
15	Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.342.873.638,00	2.211.332.051,00	94,39	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.448.340.774,00	-	0,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	168.716.000,00	126.208.275,00	74,81	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Peningkatan Pelayanan BLUD	11.700.000.000,00	6.767.713.083,00	57,84	
TOTAL				145.227.906.782,00	116.556.217.350,97	80,26	

TANA TIDUNG, 4 September 2026

BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.

The slide features a light gray background with decorative gold elements. A thick gold ribbon runs diagonally from the top-left corner towards the bottom-right. Thin gold lines form a rectangular border around the central text area, with some lines extending outwards at the corners.

7. REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2025 PADA KABUPATEN TANA TIDUNG

7. REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN TA 2025

No.	SKPD Pelaksana	Prioritas PROVINSI	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun yang Berwawasan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	103.922.000,00	95.825.400,00	92,21
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	191.916.300,00	191.662.230,00	99,87
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	531.724.660,00	531.454.096,00	99,95
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	778.379.000,00	761.581.541,00	97,84
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			

No.	SKPD Pelaksana	Prioritas PROVINSI	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	4.419.812.506,00	4.066.608.831,00	92,01
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	71.980.000,00	71.725.400,00	99,65
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.841.187.429,00	3.613.067.843,00	94,06
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	711.756.672,00	707.964.428,00	99,47
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.058.400,00	60.124.400,00	93,86
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.630.000,00	169.466.079,00	99,32
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	171.505.500,00	167.210.200,00	97,50
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan di Kabupaten/Kota	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	18.340.950.900,00	11.353.007.921,97	61,90
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.296.325.890,00	4.183.377.317,00	97,37
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.486.200,00	84.968.850,00	78,32

No.	SKPD Pelaksana	Prioritas PROVINSI	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pembangunan Ekonomi melalui Diversifikasi Produk dan Keunggulan Komparatif di setiap Kabupaten/Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	125.355.000,00	109.684.780,00	87,50
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	224.663.800,00	199.738.746,00	88,91
		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun yang Berwawasan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.201.739.000,00	1.159.543.687,00	96,49
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.328.609.000,00	1.318.366.210,00	99,23
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.103.364.238,00	4.729.093.337,00	92,67
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	297.686.250,00	280.942.449,00	94,38
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.740.000,00	108.967.600,00	93,34
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291.492.000,00	223.932.833,00	76,82
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.489.000,00	49.411.840,00	97,87

No.	SKPD Pelaksana	Prioritas PROVINSI	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
4	Dinas Lingkungan Hidup	Pembangunan Ekonomi melalui Diversifikasi Produk dan Keunggulan Komparatif di setiap Kabupaten/Kota	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	72.782.130,00	71.402.700,00	98,10
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	487.940.720,00	471.429.800,00	96,62
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Pengelolaan Sampah	5.550.086.700,00	5.446.527.364,00	98,13
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	288.868.600,66	274.733.745,00	95,11
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	514.159.600,00	512.572.105,00	99,69
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130.296.000,00	113.883.350,00	87,40
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.901.580.117,34	3.869.163.173,00	99,17
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	618.115.560,00	585.963.252,00	94,80
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.390.000,00	74.216.300,00	72,48
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.115.000,00	51.555.219,00	93,54
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.262.000,00	12.841.000,00	74,39

No.	SKPD Pelaksana	Prioritas PROVINSI	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
5	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan di Kabupaten/Kota	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	9.734.000,00	8.346.400,00	85,74
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	22.202.700,00	21.788.800,00	98,14
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	720.318.180,00	694.416.210,00	96,40
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.812.000,00	35.260.249,00	98,46
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.743.612.435,00	3.560.099.937,00	95,10
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	521.371.636,00	518.087.435,00	99,37
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.344.124.600,00	1.279.574.100,00	95,20
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.877.809.200,00	1.485.422.500,00	79,10
6	Dinas Perhubungan	Penguatan Konektivitas Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil dalam Membangun Desa Menata Kota di setiap Kabupaten/Kota	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87.430.000,00	85.776.600,00	98,11
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.668.634.811,00	4.639.654.137,00	99,38
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.133.006.369,00	1.103.088.800,00	97,36
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	988.575.134,00	879.696.540,00	88,99

No.	SKPD Pelaksana	Prioritas PROVINSI	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
7	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	551.120.104,00	519.454.800,00	94,25
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.644.000,00	28.044.400,00	97,91
		Pembangunan Ekonomi melalui Diversifikasi Produk dan Keunggulan Komparatif di setiap Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	80.833.300,00	74.889.000,00	92,65
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	46.916.200,00	44.716.200,00	95,31
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.057.938.300,00	940.148.910,00	88,87
		Pengelolaan Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pelaku UMKM di setiap Kabupaten/Kota	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	71.455.000,00	65.381.800,00	91,50
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	70.248.000,00	57.337.200,00	81,62
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			

No.	SKPD Pelaksana	Prioritas PROVINSI	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
		Pembangunan Ekonomi melalui Diversifikasi Produk dan Keunggulan Komparatif di setiap Kabupaten/Kota	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	390.406.000,00	342.153.300,00	87,64
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	320.156.500,00	223.018.800,00	69,66
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	311.412.860,00	297.118.357,00	95,41
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	755.998.530,00	754.765.175,00	99,84
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	261.556.000,00	244.452.400,00	93,46
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.708.000,00	31.642.962,00	83,92
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.609.582.603,00	6.593.877.129,00	99,76
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	527.872.756,00	508.887.250,00	96,40
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.268.100,00	142.555.804,00	95,50
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	683.418.000,00	311.851.472,00	45,63
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.402.400,00	18.486.200,00	95,28
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun yang Berwawasan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.777.830.019,00	10.764.014.877,00	99,87

No.	SKPD Pelaksana	Prioritas PROVINSI	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	615.050.600,00	441.352.352,00	71,76
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	181.849.125,00	180.086.670,00	99,03
			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	32.540.000,00	32.351.200,00	99,42
			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	68.625.000,00	68.541.000,00	99,88
9	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Penguatan Ketahanan Pangan Daerah dengan Pembangunan Pertanian dalam arti luas, dan Jaminan Perlindungan kepada Petani, Nelayan dan Petani Tambak di setiap Kabupaten/Kota	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	108.274.700,00	101.403.000,00	93,65
10	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan di Kabupaten/Kota	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	917.795.200,00	818.603.500,00	89,19
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.663.484.800,00	1.615.670.500,00	97,13
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	175.566.000,00	173.977.000,00	99,09

No.	SKPD Pelaksana	Prioritas PROVINSI	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun yang Berwawasan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.701.679.464,00	5.600.799.527,00	98,23
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	811.533.750,00	791.031.799,00	97,47
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.318.150,00	130.284.150,00	90,91
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	406.441.400,00	334.157.625,00	82,22
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	376.822.000,00	374.747.000,00	99,45
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	244.193.000,00	231.842.120,00	94,94
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.900.000,00	99,00
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	115.652.000,00	103.565.000,00	89,55

No.	SKPD Pelaksana	Prioritas PROVINSI	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Pengadaan Balai Latihan Kerja, Perluasan Lapangan Kerja, Kesempatan Usaha dan Ekonomi Kreatif bagi Kaum Milenial	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	449.468.542,00	408.430.264,00	90,87
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	38.848.000,00	38.664.000,00	99,53
			Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	6.300.000,00	-	0,00
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	204.394.000,00	201.189.600,00	98,43
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.028.000,00	20.563.620,00	70,84
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	359.764.594,00	347.160.697,00	96,50
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.563.300,00	79.568.000,00	96,37
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.112.000,00	141.809.920,00	76,20
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.448.000,00	14.659.800,00	94,90
		Penguatan Konektivitas Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil dalam Membangun Desa Menata Kota di setiap Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
			Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	151.469.400,00	151.365.900,00	99,93
12	Inspektorat Kabupaten	Pembangunan Ekonomi melalui	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

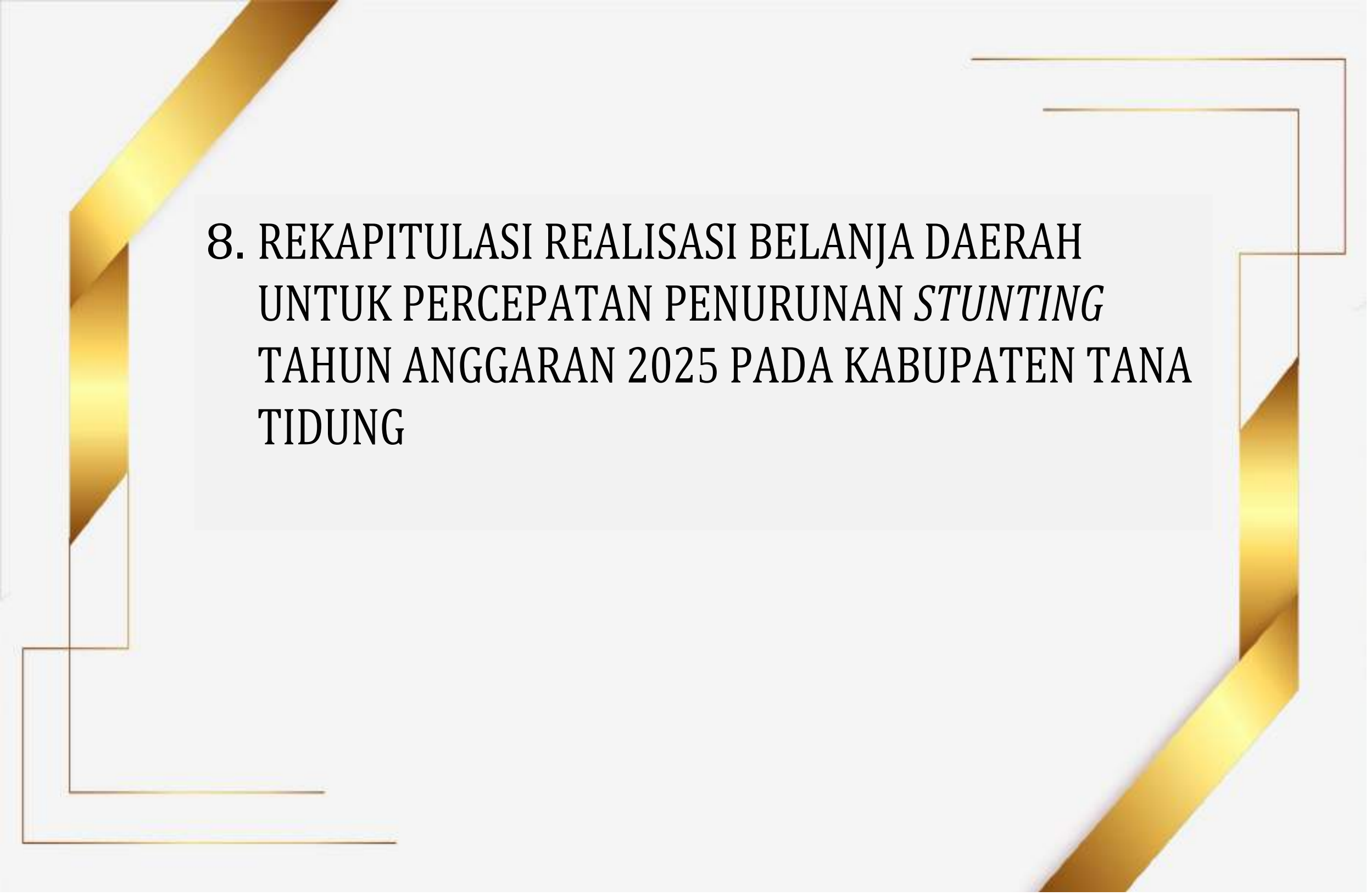
No.	SKPD Pelaksana	Prioritas PROVINSI	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10.200.000,00	39.151.800,00	383,84
14	Kecamatan Sesayap Hilir	Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan di Kabupaten/Kota	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	80.715.800,00	19.860.000,00	24,60
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	378.241.800,00	181.452.300,00	47,97
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	136.272.200,00	90.067.600,00	66,09
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.210.000,00	10.667.000,00	44,06
15	Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun yang Berwawasan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.342.873.638,00	2.211.332.051,00	94,39
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.448.340.774,00	-	0,00
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	168.716.000,00	126.208.275,00	74,81
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Peningkatan Pelayanan BLUD	11.700.000.000,00	6.767.713.083,00	57,84

No.	SKPD Pelaksana	Prioritas PROVINSI	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
TOTAL				145.227.906.782,00	116.556.217.350,97	80,26

TANA TIDUNG, 4 September 2026

BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.

The slide features a light gray background with decorative gold elements. A wide, 3D-style gold ribbon runs diagonally from the top-left to the bottom-right. Thin gold lines form a stepped border on the left and right sides, and a rectangular frame in the top-right corner.

8. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TAHUN ANGGARAN 2025 PADA KABUPATEN TANA TIDUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PENURUNAN *STUNTING*

TAHUN ANGGARAN 2025

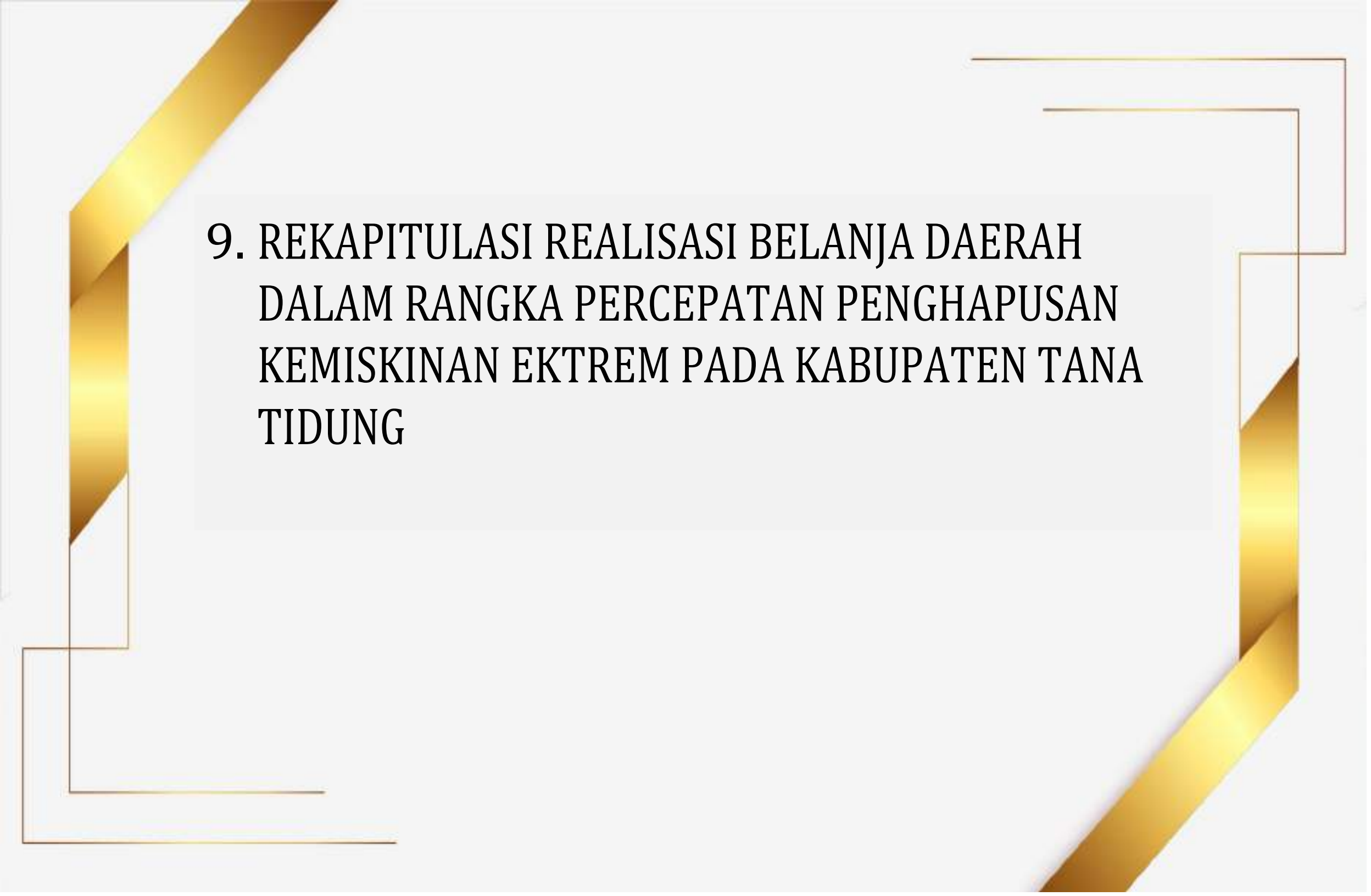
NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		JUMLAH (Rp)	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
	BELANJA PADA SKPD		APBD TA 2025	APBD-P TA 2025		
1.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG		150.000.000,00	177.010.000,00	174.354.000,00	98,5
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	150.000.000,00	177.010.000,00	174.354.000,00	98,5
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	150.000.000,00	177.010.000,00	174.354.000,00	98,5
	5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	150.000.000,00	177.010.000,00	174.354.000,00	98,5
2.	DINAS KESEHATAN		3.763.996.224,00	2.851.325.800,00	2.314.019.159,00	81,16
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.065.994.924,00	2.342.970.200,00	1.854.929.189,00	79,17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.065.994.924,00	2.342.970.200,00	1.854.929.189,00	79,17
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	129.513.500,00	62.285.500,00	40.620.000,00	65,22
	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	121.438.000,00	153.656.000,00	142.386.271,00	92,67
	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	64.581.200,00	107.277.200,00	79.229.018,00	73,85
	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	38.597.000,00	27.807.000,00	13.051.600,00	46,94
	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	290.528.200,00	80.676.700,00	59.016.700,00	73,15
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.964.789.924,00	1.070.493.200,00	790.797.600,00	73,87
	1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	198.093.000,00	186.073.000,00	126.615.000,00	68,05
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	258.454.100,00	654.701.600,00	603.213.000,00	92,14
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	78.630.800,00	72.955.400,00	54.939.400,00	75,31
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	78.630.800,00	72.955.400,00	54.939.400,00	75,31
	1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	78.630.800,00	72.955.400,00	54.939.400,00	75,31
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	516.370.300,00	332.400.000,00	301.740.570,00	90,78
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	516.370.300,00	332.400.000,00	301.740.570,00	90,78
	2.14.04.2.01.18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	108.000.000,00	108.000.000,00	105.657.570,00	97,83
	2.14.04.2.01.21	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	68.580.300,00	0,00	0,00	0,00
	2.14.04.2.01.24	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA	115.390.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.14.04.2.01.26	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA	224.400.000,00	224.400.000,00	196.083.000,00	87,38
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB	103.000.200,00	103.000.200,00	102.410.000,00	99,43
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	55.600.200,00	55.600.200,00	55.010.000,00	98,94
	2.14.03.2.04.06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	55.600.200,00	55.600.200,00	55.010.000,00	98,94
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	47.400.000,00	47.400.000,00	47.400.000,00	100,00
	2.14.03.2.01.11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	47.400.000,00	47.400.000,00	47.400.000,00	100,00
3.	DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN		258.934.700,00	192.402.700,00	184.146.950,00	95,71
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	135.092.000,00	84.128.000,00	82.743.950,00	98,35
	3.25.06.2.03	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	135.092.000,00	84.128.000,00	82.743.950,00	98,35
	3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	135.092.000,00	84.128.000,00	82.743.950,00	98,35
	3.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	123.842.700,00	108.274.700,00	101.403.000,00	93,65

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		JUMLAH (Rp)	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
	BELANJA PADA SKPD		APBD TA 2025	APBD-P TA 2025		
	3.09.032.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	123.842.700,00	108.274.700,00	101.403.000,00	93,65
	3.09.032.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	123.842.700,00	108.274.700,00	101.403.000,00	93,65
4.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		288.872.000,00	244.193.000,00	231.842.120,00	94,94
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	288.872.000,00	244.193.000,00	231.842.120,00	94,94
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	288.872.000,00	244.193.000,00	231.842.120,00	94,94
	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	288.872.000,00	244.193.000,00	231.842.120,00	94,94
5.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		190.500.000,00	217.500.000,00	217.300.000,00	99,91
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	190.500.000,00	217.500.000,00	217.300.000,00	99,91
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	190.500.000,00	217.500.000,00	217.300.000,00	99,91
	2.16.02.2.01.14	Relasi Media	190.500.000,00	217.500.000,00	217.300.000,00	99,91
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN KAWASAN PERMUKIMAN		4.595.634.646,00	9.104.877.250,00	7.532.512.974,97	82,73
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.836.249.600,00	7.558.325.600,00	6.171.264.175,00	81,65
	1.03.03.2.01	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota	2.836.249.600,00	7.558.325.600,00	6.171.264.175,00	81,65
	1.03.03.2.01.28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.418.124.800,00	5.546.153.600,00	4.214.577.500,00	75,99
	1.03.03.2.01.29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.234.415.000,00	1.894.380.000,00	1.839.346.675,00	97,09
	1.03.03.2.01.32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	183.709.800,00	117.792.000,00	117.340.000,00	99,62
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.759.385.046,00	1.546.551.650,00	1.361.248.799,97	88,02
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.759.385.046,00	1.546.551.650,00	1.361.248.799,97	88,02
	1.03.05.2.35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	350.994.246,00	189.997.250,00	84.468.540,00	44,46
	1.03.05.2.40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.408.390.800,00	1.356.554.400,00	1.276.780.259,97	94,12
7.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		2.101.485.000,00	4.417.270.900,00	4.253.776.502,00	96,3
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2.101.485.000,00	4.417.270.900,00	4.253.776.502,00	96,3
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.101.485.000,00	4.417.270.900,00	4.253.776.502,00	96,3
	1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	500.000.000,00	1.198.100.000,00	1.196.300.000,00	99,85
	1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	459.078.000,00	1.602.433.200,00	1.545.353.602,00	96,44
	1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.046.632.000,00	1.046.632.000,00	959.082.400,00	91,64
	1.01.02.2.03.47	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	95.775.000,00	570.105.700,00	553.040.500,00	97,01
TOTAL			11.349.422.570,00	17.204.579.650,00	14.907.951.705,97	86,65

TIDENG PALE, 4 September 2026

BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.

The slide features a light gray background with a central white rectangular box containing the title. The box is framed by decorative gold elements: a thick, 3D-style ribbon on the left and right sides, and thin, L-shaped lines in the corners.

9. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKTREM PADA KABUPATEN TANA TIDUNG

8. REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

B). KABUPATEN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

TAHUN ANGGARAN 2025

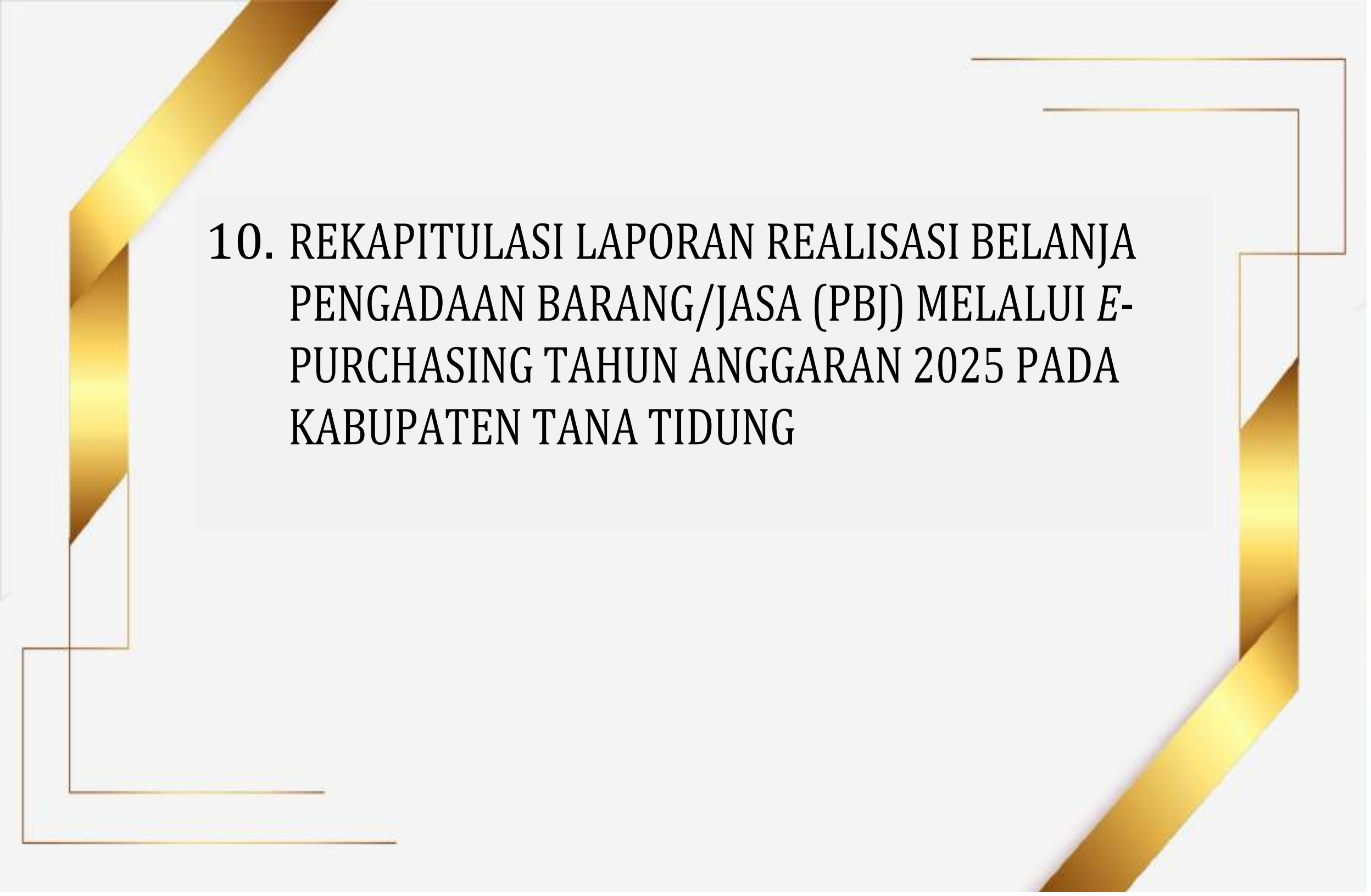
No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota			
	1 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
	Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya			
	2 Pemeliharaan Anak-anak Terlantar			
	Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial		N I H I L	
	Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya			
	3 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			
	Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya			
	4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
	Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya			
	5 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			
	Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya			

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2	Menetapkan data sasaran keluarga miskin ektrim bberdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang di buktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan			
	1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		
		Belanja Operas Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah		
		Belanja Bantuan Sosial		
		Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya		
		2	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, peningkatan Peran, serta masyarakat dan Lintas Sektor, Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	
			N I H	
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial		
		Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya		
3	Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada APBD Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address)		I	
	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	L	
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial		
	2	Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya		
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial		
		Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
		Belanja Aset Tetap Lainnya		
		3	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial		
		Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya		

No.	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
4	Memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat				
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial		N	
		Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya		I	
5	Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali			H	
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial		I	
		Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya		L	
	Dst				
Total Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem					

TIDENG PALE, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.

The slide features a light gray background with decorative gold elements. A thick gold ribbon runs diagonally from the top-left corner towards the bottom-right. Thin gold lines form a rectangular border around the central text area, with some lines extending outwards at the corners.

10. REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) MELALUI *E*- PURCHASING TAHUN ANGGARAN 2025 PADA KABUPATEN TANA TIDUNG

9. REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) MELALUI E-PURCHASING

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) MELALUI E-PURCHASING

TAHUN ANGGARAN 2025

No	SKPD	Total Nilai Pengadaan Barang/Jasa	Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui E- Purchasing	Persentase (%)	Ket
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.325.560.335,00	14.976.649.753,00	86,44	
2	Dinas Kesehatan	23.228.986.966,00	5.775.012.334,00	24,86	
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	7.198.688.425,00	6.078.988.742,00	84,45	
4	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	1.791.541.136,00	1.722.172.241,00	96,13	
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	899.373.473,00	798.337.960,00	88,77	
6	Satuan Polisi Pamong Praja	205.974.000,00	130.824.600,00	63,52	
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	445.117.250,00	388.032.360,00	87,18	
8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	177.263.581,00	24.692.850,00	13,93	
9	Dinas Lingkungan Hidup	752.058.000,00	475.317.002,00	63,20	
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	839.706.160,00	543.898.220,00	64,77	
11	Dinas Perhubungan	3.358.544.884,00	2.974.456.891,00	88,56	
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.790.683.150,00	177.938.461,00	9,94	
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	526.105.378,00	188.550.150,00	35,84	
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.299.898.725,00	900.548.442,00	69,28	
15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	833.507.356,00	397.336.800,00	47,67	
16	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	1.107.247.428,00	624.491.268,00	56,40	
17	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	653.650.500,00	246.113.970,00	37,65	
18	Sekretariat Daerah	10.181.043.127,00	3.464.720.875,00	34,03	
19	Sekretariat DPRD	-	-	0,00	
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	1.504.850.857,00	387.645.000,00	25,76	
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.923.561.586,00	4.395.645.272,00	49,26	
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber	278.870.400,00	32.672.850,00	11,72	
23	Inspektorat Kabupaten	580.962.000,00	527.000.000,00	90,71	
24	Kecamatan Sesayap	-	-	0,00	
25	Kecamatan Sesayap Hilir	401.172.500,00	49.775.000,00	12,41	
26	Kecamatan Tana Lia	531.401.000,00	531.060.000,00	99,94	
27	Kecamatan Betayau	-	-	0,00	
28	Kecamatan Muruk Rian	20.160.000,00	20.160.000,00	100,00	
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.881.789.600,00	1.373.650.520,00	73,00	
Total		86.737.717.817,00	47.205.691.561,00	54,42	

TIDENG PALE, 4 September 2026
BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.

11. REKAPITULASI REALISASI BELANJA
MENGUNAKAN KARTU KREDIT PEMERINTAH
DAERAH (KKPD) TAHUN ANGGARAN 2025 PADA
KABUPATEN TANA TIDUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA MENGGUNAKAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	Belanja Barang dan Jasa			Belanja Modal			Keterangan
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja KKPD (Rp)	Persentase Realisasi KKPD (%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja KKPD (Rp)	Persentase Realisasi KKPD (%)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	78.500.150.057,61	0,00	0,00	84.788.171.103,39	0,00	0,00	
2	Dinas Kesehatan	46.388.045.212,00	0,00	0,00	22.818.498.855,00	0,00	0,00	
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	69.563.193.583,00	0,00	0,00	279.634.926.945,00	0,00	0,00	
4	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	3.149.485.775,00	0,00	0,00	1.544.101.536,00	0,00	0,00	
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.186.645.900,00	0,00	0,00	18.104.467.273,00	0,00	0,00	
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2.445.576.231,00	0,00	0,00	38.393.700,00	0,00	0,00	
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.330.591.850,00	0,00	0,00	79.452.550,00	0,00	0,00	
8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.684.082.936,00	0,00	0,00	553.328.300,00	0,00	0,00	
9	Dinas Lingkungan Hidup	7.696.468.710,66	0,00	0,00	329.597.600,00	0,00	0,00	
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.466.671.174,00	0,00	0,00	8.049.200,00	0,00	0,00	
11	Dinas Perhubungan	4.532.406.973,00	0,00	0,00	4.106.919.271,00	0,00	0,00	
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.816.152.250,00	0,00	0,00	19.861.800,00	0,00	0,00	
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.073.859.018,00	0,00	0,00	269.233.160,00	0,00	0,00	
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.627.594.044,00	0,00	0,00	11.397.066.289,00	0,00	0,00	
15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3.489.037.321,01	0,00	0,00	359.283.220,00	0,00	0,00	
16	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	4.802.172.656,00	0,00	0,00	229.778.748,00	0,00	0,00	
17	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	4.470.685.586,00	0,00	0,00	358.174.360,00	0,00	0,00	
18	SEKRETARIAT DAERAH	41.239.037.369,00	0,00	0,00	4.941.207.467,00	0,00	0,00	
	Bagian Umum	28.044.335.234,00	0,00	0,00	4.835.708.569,00	0,00	0,00	
	Bagian Pemerintahan	1.889.578.225,00	0,00	0,00	62.881.589,00	0,00	0,00	
	Bagian Organisasi	2.809.522.748,00	0,00	0,00	30.250.609,00	0,00	0,00	
	Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat	2.493.737.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Bagian Hukum	1.419.396.687,00	0,00	0,00	3.743.200,00	0,00	0,00	
	Bagian Administrasi Pembangunan	4.582.467.275,00	0,00	0,00	8.623.500,00	0,00	0,00	
19	Sekretariat DPRD	26.866.033.540,00	0,00	0,00	112.216.800,00	0,00	0,00	
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	11.156.133.264,00	0,00	0,00	425.628.350,00	0,00	0,00	
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	25.943.689.882,00	0,00	0,00	1.580.513.648,00	0,00	0,00	

NO	SKPD	Belanja Barang dan Jasa			Belanja Modal			Keterangan
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja KKPD (Rp)	Persentase Realisasi KKPD (%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja KKPD (Rp)	Persentase Realisasi KKPD (%)	
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.711.032.980,00	0,00	0,00	42.333.200,00	0,00	0,00	
23	Inspektorat Kabupaten	11.296.354.196,00	0,00	0,00	1.346.424.730,00	0,00	0,00	
24	Kecamatan Sesayap	1.458.777.596,00	0,00	0,00	137.398.260,00	0,00	0,00	
25	Kecamatan Sesayap Hilir	1.485.556.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Kecamatan Tana Lia	1.444.838.700,00	0,00	0,00	556.957.300,00	0,00	0,00	
27	Kecamatan Betayau	1.173.906.073,00	0,00	0,00	85.967.280,00	0,00	0,00	
28	Kecamatan Muruk Rian	1.213.978.600,00	0,00	0,00	19.743.000,00	0,00	0,00	
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.495.743.732,00	0,00	0,00	169.122.000,00	0,00	0,00	
TOTAL		374.707.901.789,28	0,00	0,00	434.056.815.945,39	0,00	0,00	

TIDENG PALE, 4 September 2026

BUPATI,

IBRAHIM ALI, S.P.